PROSIDING

SEMINAR NASIONAL dan MUSWIL
Aktualisasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Memperkuat Sendi-Sendi Kehidupan Berbangsa

Surakarta, 25 November 2017

PROCEEDING
SEMINAR NASIONAL ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (AP3KnI) JAWA TENGAH 2017
"Aktualisasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Memperkuat Sendi-Sendi Kehidupan Berbangsa"

Laboratorium Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Jl. Ir. Sutami No. 36 A, Kentingan, Surakarta
Telp/fax : (0271) 669124 email/ web: labppkn@fkip.uns.ac.id / http://ppkn.fkip.uns.ac.id

SUSUNAN PANITIA

Ketua Panitia
Wijianto, S.Pd.,M.Sc.

Sekretaris
Dr. Anita Trisiana, S.Pd.,MH.

Bendahara
Dra. Sri Hastuti Lastyawati, M.Pd.

Reviewer dan Editor
Dr. Winarno, S,Pd.,M.Si.
Dr. Anita Trisiana, S.Pd.,MH.
Dr. Triyanto, SH.,M.Hum.
Dr. Triana Rejekiningsih, SH.,Kn.,M.Pd.

Perancang Sampul
Lancar Eko Sumiyati
Raharjo, S.Pd.,M.Sc.

Penerbit
Laboratorium Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Jl. Ir. Sutami No. 36 A, Kentingan, Surakarta
Telp/fax : (0271) 669124
Email/ web: labppkn@fkip.uns.ac.id / http://ppkn.fkip.uns.ac.id

ISBN: 978-602-51150-0-4

Cetakan I, Edisi I, Desember 2017
Hak Cipta Dilundungi Undang-Undang
All Rigtht Reserved

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diskursus tentang pemikiran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bergerak sangat dinamis seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Pada dasarnya, pembahasan tentang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, merupakan pembahasan tentang "diri kita" dalam proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kajian tentang aktualisasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan suatu diskursus tentang "*How to put **values** in **mind**, in the bottom of the **heart**, and in the **hand***" (Udin S. Winataputra, 2017). Adapun permasalahan yang dihadapi insan akademis dalam lingkup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan saat ini ialah keadaan belum selarasnya antara *"mind", "heart",* dan *"hand"* atau dapat kita ketakan masih belum selarasnya antara nilai-nilai luhur yang ada di pikiran kita yang bersumber dari nilai Pancasila terhadap keyakinan dalam hati kita untuk kemudian diwujudkan dalam perbuatan. Disinilah titik usaha pendidik secara umum, dan pendidik Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara khusus untuk terus berusaha menuju keselerasan pikiran, hati, dan tindakan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berbagai upaya dilakukan oleh insan akademis yang bergerak dalam bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk terus melakukan kajian, diskursus, dan sumbangsih pemikiran untuk merumuskan solusi alternatif dalam rangka kehidupan bernegara-bangsa. Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI) Provinsi Jawa Tengah berkerja sama dengan Program Studi PPKn FKIP UNS menyelenggarakan Seminar Nasional dan Musyawarah Wilayah Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI) Jawa Tengah 2017 dengan tujuan untuk membentuk wadah dan menyalurkan pemikiran-pemikiran insan akademis Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari seluruh penjuru negeri dalam suatu tema **"Aktualisasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Memperkuat Sendi-Sendi Kehidupan Berbangsa"**.

Kegiatan Seminar Nasional ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendesiminasikan hasil kajian, pemikiran, pengetahuan maupun pengalaman penelitian dalam kajian

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dilakukan dari berbagai unsur Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari kalangan Dosen, Guru, Pakar, Praktisi, dan mahasiswa Program Pascasarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kegiatan Seminar Nasional ini juga merupakan wadah pertukaran pemikiran mendalam tentang kajian fenomena-fenomena kewarganegaraan saat ini, untuk memperoleh suatu wawasan yang lebih luas dan alternatif solusi dalam permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Adapun artikel-artikel yang sudah dipresentasikan pada Seminar Nasional AP3KnI Jawa Tengah 2017, diterbitkan dalam E-Prosiding Seminar Nasional. Semoga E-Prosiding Seminar Nasional yang telah disusun ini dapat bermanfaat sebagai bahan kajian atau sumber referensi keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bagi insan akademis yang memiliki fokus kajian dalam bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan maupun bagi Pemangku Kebijakan dalam rangka untuk sumber referensi dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dalam bidang kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan baik itu kebijakan kurikulum, peraturan-peraturan daerah, dan sebagainya. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pseserta dan pemakalah Seminar Nasional **"Aktualisasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Memperkuat Sendi-Sendi Kehidupan Berbangsa"**, yang telah berkontribusi dalam Seminar Nasional tersebut. Kami berharap E-Prosiding Seminar Nasional ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama pihak-pihak yang berkaitan dengan kajian pengembangan tentang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, Nopember 2017

Panitia

Assalamualaikum wr wb.

Rekan-rekan yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Swt., Tuhan yang maha kuasa atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu pada acara seminar nasional sekaligus musyawarah wilayah Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (AP3KnI) Jawa Tengah.

AP3KnI Jawa Tengah adalah cabang kepengurusan wilayah pertama AP3KnI pusat. Aneka macam kegiatan telah dilakukan AP3KnI Jawa Tengah mulai seminar, pelatihan, workshop, diskusi dan lain-lain dalam upaya meningkatkan kualitas profesi PPKn di Jawa Tengah. Saya yang diberi amanah untuk menjadi ketua AP3KnI Jawa Tengah menyadari sepenuhnya bahwa selama perjalanan kepengurusan 2012-2017 penuh tantangan, hambatan, dan rintangan. Saya mengucapkan terimakasih kepada para pengurus yang selama lima tahun ini telah bahu membahu dalam menjalankan roda organisasi. Saya juga mohon maaf apabila selama memimpin organisasi ini terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan.

Musyawarah wilayah ini dikemas dalam suatu seminar nasional PPKn yang mengadirkan pembicara pakar PPKn Prof. Udin S Winataputra, MA sekaligus ketua umum AP3KnI Pusat. Agenda Musyawarah Wilayah ini adalah untuk membentuk kepengurusan baru 2017-2022. Semoga kepengurusan baru nanti dapat membawa organisasi berjalan lebih baik. Saya mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan panitia yang telah berusaha keras menyukseskan acara ini. Terimakasih juga kami ucapakan kepada Pimpinan FKIP UNS, Prodi PPKn FKIP UNS, dan Laboratorium PPKn FKIP UNS termasuk kepada para sponsor yang telah mendukung acara ini.

Wassalamualaikum wr wb.

Surakarta, 25 November 2017
Ketua AP3KnI Jateng

Dr. Triyanto, SH. MHum.

SAMBUTAN KEPALA PRODI PPKn FKIP UNS

Puji syukur, marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia Nya, kita khususnya para komunitas pendidik pendidikan kewarganegaraan dapat bertemu kembali dalam acara Seminar Nasional dan Musyawarah Wilayah AP3KnI Jawa Tengah tahun 2017.

Seminar nasional yang dikemas dalam kegiatan Seminar Nasional dan Musyawarah Wilayah AP3KnI Jawa Tengah tahun 2017 menghadirkan tema "Aktualisasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk memperkuat sendi-sendi kehidupan berbangsa". Sebuat tema penting , sebab ujung dari Pancasila sebagai inti dari pendidikan kewarganegaraan di Indonesia adalah bagaimana mengaktualisasikannya. Seminar nasional ini nantinya akan diikuti komunitas akademik *(academic community)* pendidikan kewarganegaraan dari berbagai wilayah di Indonesia . Sekaligus ini membuktikan bahwa bidang pendidikan kewarganegaraan memiliki dukungan berupa masyarakat akademik.

Musyawarah wilayah yang dikemas dalam Seminar Nasional dan Musyawarah Wilayah AP3KnI Jawa Tengah tahun 2017 ini adalah kegiatan reorganisasi kembali kepengurusan AP3KnI Jawa Tengah masa bakti 2012-2017 menuju kepengurusan masa bakti 2017-2022. Kepenguruan AP3KnI Jawa Tengah sebagai bagian dari organisasi profesi AP3KnI tingkat pusat diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan komunitas pendidikan kewarganegaraan dari berbagai wilayah di Jawa Tengah dan tuntutan akademik perkembangan bidang kajian pendidikan kewarganegaraan .

Program studi PPKn FKIP UNS selaku tuan rumah kegiatan dan mitra kerjasama AP3KnI Jawa Tengah mengucapkan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan oleh para komunitas akademik pendidikan kewarganegaraan di Jawa Tengah . Kami berharap kegiatan sejenis di masa masa yang akan datang dapat dilakukan di berbagai wilayah di Jawa tengah, sehingga gaung dan gema AP3KnI Jawa Tengah senantiasa didengar dan diterima. Kami juga mengucapkan mohon maaf jika penyelenggaraan Seminar Nasional dan Musyawarah Wilayah AP3KnI Jawa Tengah tahun 2017 ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasannya. Akhirnya selamat untuk ber- Seminar Nasional dan ber-Musyawarah Wilayah AP3KnI Jawa Tengah tahun 2017.

Kepala Prodi

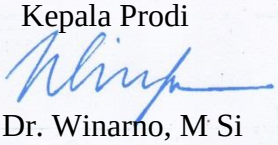

Dr. Winarno, M Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Sambutan Ketua AP3KNI Jawa Tengah iii

Sambutan Kepala Program Studi PPKN FKIP UNS iv

Daftar Isi v

Susunan Panitia x

Susunan Acara xi

Susunan Pemaparan Makalah Penunjang

a. Sub tema ruang 1

1. **Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia** Dr. Winarno Narmoatmojo, M.Si (Universitas Sebelas Maret Surakarta) 1
2. **Strategi Pembelajaran PPKn dalam Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Peserta Didik**
   Julita Widya Dwintari (Universitas Negeri Yogyakarta) 25
3. **Upaya Guru PPKn dalam Mengembangkan Sikap Toleransi Bahasa Siswa**
   Misbahul janatti (Universitas Pendidikan Indonesia) 38
4. **Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaran (PKn) Di Perguruan Tinggi**
   Suyahman (Universitas veteran bangun nusantara sukoharjo) 46
5. **Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila melalui Pembelajaran PKn untuk Mewujudkan Good and Smart Citizen**
   Risladiba, Dieta Ayu Lestary, Ricky Engel Mawara (Universitas Pendidikan Indonesia) 56
6. **Pendidikan Karakter melalui Program Pengabdian Sekolah sebagai Wujud Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila di SMP Ponpes An Nur Ungaran Kabupaten Semarang**
   Ama Farida Sari S.Pd (Universitas Sebelas Maret) 71
7. **Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi**
   Wachid Pratomo M.Pd (Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta) 82
8. **Pewarisan Nilai-Nilai Budaya Kearifan Lokal pada Masyarakat Kampung**

Adat Naga untuk Membangun Karakter Warga Negara
Itok Dwi Kurniawan (Universitas Sebelas Maret) 97

9. **Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Pancasila melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan**
Suprayogi, Noorochmat Isdaryanto, Eta Yuni Lestari (UNNES) 102

b. Sub tema ruang 2

1. **Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Menanggulangi Radikalisme Di Perguruan Tinggi**
Pipit Widiatmaka (IAIN Surakarta) 112
2. **Semangat Nasionalisme Generasi Muda di Tengah Arus Globalisasi**
Heni Widia Nengsi (Universitas Pendidikan Indonesia) 127
3. **Penghayatan Lagu Perjuangan Nasional dalam Meningkatkan Sikap Tanggung Jawab pada Peserta Didik**
Apriyanda Kusuma Wijaya, Pitria Sopianingsih
(Universitas Pendidikan Indonesia) 136
4. **Aktualisasi Domain Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai Upaya Membentuk Good Citizens**
Weni wahyu Widyastuti, Randi setia Nughraga
(Universitas Pendidikan Indonesia) 145
5. **Peran Boarding School (Sekolah Berasrama) dalam Membentuk Smart and Good Citizen (Studi Di SMP MTA Gemolong)**
Ikrimah saputra S.Pd (Universitas Sebelas Maret) 159
6. **Pembelajaran Berbasis Nilai-Nilai Luhur Ajaran Ki Hajar Dewantara untuk Mengembangkan Karakter Siswa**
Warsito, Sri Wiyata (Universitas Widya Dharma Klaten) 168
7. **Pendidikan Karakter: Budaya Sekolah Sebagai Wahana Pengembangan Karakter Pada Diri Siswa**
Margi Wahono, Tijan, AT. Sugeng Priyanto, Andi Suhardiyanto
(UNNES) 185
8. **Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Melalui Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik)**
(Studi Kasus Pada Mahasiswa Afirmasi Papua Di Universitas Sebelas Maret)
Triyanto (Universitas Sebelas Maret) 195

c. Sub tema ruang 3

1. **Penerapan Model Pembelajaran Active Learning Melalui Media Video**

untuk Meningkatkan Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan pada Mahasiswa
Ayu Dian Ningtyas (Universitas Islam Lamongan) 203

2. **Penerapan Model Problem Based Learning untuk Membentuk Mahasiswa Yang Kritis pada Pembelajaran PPKn**
   Mutiara Nurmanita (Universitas negeri Yogyakarta) 223

3. **Project Citizen Berbasis Media Massa Sebagai Model Pembelajaran PPKn Inovatif**
   Dian eka Putri (Pascasarjana Universitas Sebelas Maret) 234

4. **Peningkatan Keaktifan Dan Hasil Belajar PPKn melalui Metode Problem Based Learning (PBL) bagi Peserta Didik Kelas X IPS 1 Semester 1 SMAN 1 Sumberlawang Tahun Pelajaran 2016/2017 (Sebuah Tinjauan Ilmiah)**
   Mujiyono S.Pd (Universitas Sebelas Maret) 248

5. **Pemanfaatan Facebook Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan**
   Fitra Waluyadi (Universitas Sebelas Maret) 266

6. **Pemanfaatan Internet sebagai Sumber Belajar terhadap Kompetensi Profesional Guru**
   Roni Yudo Kuncoro (Universitas Sebelas Maret) 275

7. **Penguatan Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning dengan Menggunakan Pendekatan Action Learning Approach dalam Upaya Pembentukan Good Citizen**
   Achmad Marwan Nurhadi (Universitas Sebelas Maret) 284

8. **Urgensi Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran PPKN**
   Anggi Agustin S.Pd (Universitas Sebelas Maret) 297

d. Sub tema ruang 4

1. **Penguatan Kompetensi Guru PPKn di Abad 21 untuk Pembentukan Siswa sebagai Warga Negara Muda yang Baik**
   Primandha Sukma Nur Warghani (Universitas Negri Yogyakarta) 305

2. **Penguatan Kompetensi Profesional Guru Untuk Membentuk Warganegara Yang Cerdas Melalui Pilihan Isu & Tema Baru**
   Machmud Al Rasyid (Universitas Sebelas Maret) 324

3. **Pendidikan Kebangsaan Menurut Ki Hadjar Dewantara Sebagai Upaya dalam Mengembangkan Kurikulum PPKn**

Christmas Astriana (Pasca Universitas Negeri Yogyakarta) 335

4. **Membumikan Budaya Membaca, Menciptakan Masyarakat Anti Hoax, Mewujudkan Indonesia Berkeadaban**
   Asmaul Husna, Fikstif Donal Lintong, Ghina Aisyah (Universitas Pendidikan Indonesia) 346

5. **Literasi Media Untuk Pengendalian Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Rangka Membentuk Kompetensi Wawasan Global Warga Negara**
   Rima Vien P.H (Universitas Sebelas Maret) 360

6. **Implementasi Kompetensi Kepribadian Guru PPKn dalam Membentuk Good Citizen pada Siswa SMP Negeri 2 Karangpandan Karanganyar**
   Erna Gesti Fadrusiana (Universitas Sebelas Maret) 373

7. **Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013**
   Muhammad Yogi Guntoro (Universitas Sebelas Maret) 385

8. **Penguatan Civic Literacy dikalangan Peserta Didik melalui Kegiatan Menyanyikan Lagu-Lagu Wajib Nasional dalam Pembelajaran PPKn**
   Syahrur Razy (Universitas Sebelas Maret) 397

9. **Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Menguatkan Civil Society Di Indonesia (Studi Pada Tingkat Sekolah Menengah Atas)**
   An-nisa Nur Sholihah S.Pd, Indah Septiani
   (Universitas Sebelas Maret) 409

e. Sub tema ruang 5

1. **Peran PKn dalam Membentuk Kewarganegaraan Digital yang Berkarakter**
   Benaziria (Universitas negeri Yogyakarta) 423

2. **Peran Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PKn) Meningkatkan Pengamalan Nilai Nilai Pancasila Pada Siswa Di SMP Negeri 2 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue**
   Hasbi Ali (Unsyiah Banda Aceh) 438

3. **Penerapan Metode Galeri Wisata Untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Siswa Pada Bahan Ajar Pembagian Jenis-Jenis Hukum**
   Ratnaningsih S.Pd (Universitas Sebelas Maret) 449

4. **Persepsi Siswa SMKN 7 Surakarta tentang Kewarganegaraan Digital di Era Global dalam Perspektif Literasi Media Digital**
Wendy Librata Ratna Manikam (Universitas Sebelas Maret) 463

5. **Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Warga Negara Muda sebagai Warga Digital yang Baik (Good Digital Citizen) di Era Global**
Hani'atul Hidayah (Universitas Sebelas Maret) 473

6. **Menyiapkan Generasi Muda Menjadi Warga Negara Digital (Digital Citizenship) Yang Cerdas Dan Baik Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan**
Galih Puji Mulyoto, Yoga Ardian Feriandi (STKIP PGRI Ngawi-Universitas PGRI Madiun) 484

f. Sub tema ruang 6

1. **Pembentukan Warga Negara Yang Berintegritas Untuk Membentuk Perilaku Anti Korupsi**
Muhamad saleh, Yayuk hidayah (Universitas Halu Oleo Kendari) 502

2. **Penguatan Kewarganegaraan Ekologis Melalui Pembelajaran Pkn Berbasis Ecoliteracy Dan Project Citizen**
Mariyani (Universitas Negeri Yogyakarta) 510

3. **Gerakan Go Greenschool Dalam Meningkatkan Karakter Peduli Lingkungan Siswa Di Smk Negeri 1 Adiwerna**
Novita isnarosi nurfaida (Universitas negeri yogyakarta) 529

4. **Implikasi Program Ecovillage dalam Mengembangkan Civic Responsibility terhadap Lingkungan**
Tasya Fildzah Shabrina (Universitas Pendidikan Indonesia) 547

5. **Menelisik Diametral Kerusakan Lingkungan Berkaca Dari Aliran Eco Feminism Sebagai Bentuk Gerakan Ecological Citizenship**
Dewi gunawati (universitas sebelas maret surakarta) 558

6. **Upaya Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menanggulangi Kasus Bullying di Sekolah**
Arif Ady Setiawan (Universitas Sebelas Maret) 575

7. **Strategi Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam Menanamkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pada Peserta Didik**

Weka Indriani (Universitas Negeri Yogyakarta) 587

8. **PENDIDIKAN HUKUM DALAM MEMBENTUK KOMPOTENSI KEWARGANEGARAAN : APLIKASI TEORI BELAJAR YANG COCOK**
   Maslan abidin, nursanda rizki adhari
   (Universitas pendidikan indonesia) 599

9. **Implementasi Prinsip Pendidikan Islam dalam Penguatan Perilaku Anti Korupsi (Studi Kasus Pada Pendidikan Khas Sekolah Islam Terpadu SMPIT Insan Kamil Karanganyar)**
   Anisa Nur Rochmah (Universitas Sebelas Maret) 614

10. **Gerakan Pungut Sampah (Gps) Sebagai Upaya Memperkuat Kesadaran Lingkungan Warga Negara (Studi Kasus Pada Sekolah Menengah Atas Di Kota Bandung)**
    Medi saputra, masrukhi (universitas muhammadiyah semarang, universitas negeri semaran) 626

Susunan Panitia Seminar Nasional dan MUSWIL
Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (AP3KnI)
Jawa Tengah
25 Nopember 2017

Pelindung	: Dekan FKIP UNS
Penasehat	: Prof. Dr. Udin Winataputra
Penangunggjawab	: Dr. Triyanto, SH, M.Hum
Ketua Pelaksana	: Wijianto,S.Pd,M.Sc
Wakil Ketua Pelaksana	: Dr. Triana Rejekiningsih,SH,Kn,M.Pd
Sekretaris	: Dr. Anita Trisiana, S.Pd,MH
Bendahara	: Dra. Sri Hastuti Lastyawati,M.Pd
Seksi Ilmiah	: Dr. Triana Rejekiningsih,SH,KN,M.Pd
	Dr. Anita Trisiana, S.Pd,MH
	Dr. Triyanto,SH,M.Hum
	Lancar Eko Sumiyati
Seksi Persidangan	: Drs. Hassan Suryono S.H., M.H., M.Pd
Penanggung Jawab Ruang	: Endang Wulandari
	Dewi Wulandari
	Anggi Yoga Pramanda
	Friskal Oktiansyah
	Sri Rahayu
	Lancar Eko Sumiyati
Seksi Perlengkapan	: Rendi Setya Kurniawan
	Anggi Yoga Pramanda
Seksi Konsumsi	: Wulandari
Seksi Publikasi dan Dokumentasi	: Raharjo, S.Pd, M.Sc
	Danang Prasetyo Hartono
	Urfan Ismail
Seksi Acara dan Hiburan	: Religia Fatihasari Berliana
	Airlangga Rachmat Bagaskara
	Ahmad Nur Fauzan

Susunan Acara Seminar Nasional dan MUSWIL
Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (AP3KnI)
Jawa Tengah
25 Nopember 2017

WAKTU	ACARA	PENANGUNG JAWAB
07.00-08.00	Registrasi Peserta	Panitia Sie Konsumsi
08.00-08.30	Pembukaan 1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya 2. Doa 3. Laporan Ketua Panitia 4. Sambutan AP3KnI Jateng 5. Sambutan Dekan FKIP UNS, sekaligus membuka muswil dan seminar nasional AP3KnI 2017	Religia Fatihasari Berliana Ahmad Nur Fauzan Wijianto,S.Pd,M.Sc Dr. Triyanto., S.H., M.Hum Dr. Imam Sujadi
08.30-10.00	Keynote Speaker: 1 Keynote Speaker: 2	Prof.Dr. Udin Winataputra Dr. Winarno,S.Pd,M.Si Moderator : Raharjo, S.Pd, M.Sc
10.00-12.00	Presentasi pemakalah sesi pararel (Informasi ruang pada hari pelaksanaan)	Penanggungjawab Ruang: 1. Endang Wulandari 2. Dewi Wulandari 3. Anggi Yoga Pramanda 4. Friskal Oktiansyah 5. Sri Rahayu 6. Lancar Eko Sumiyati
12.00-13.00	ISHOMA	Panitia, Sie Konsumsi
13.00-15.30	Muswil	Sie Persidangan
15.30-16.00	Penutupan	Panitia

IMPLEMENTASI PANCASILA MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

Winarno Narmoatmojo
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
wienupi@gmail.com

ABSTRAK

Pancasila adalah dasar filsafat negara. Ia diyakini berisi kebajikan dan dapat menjadi panduan dalam mengembangkan identitas Indonesia . Oleh karena itu, Pancasila dijadikan materi pembelajaran dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia Merujuk pada teori kewarganegaraan komunitarian dan struktural fungsional, nilai Pancasila berisi tentang ide kehidupan yang baik, sebagai nilai konsensus dan dengan demikian menjadi sumbere bagi terciptanya integrasi sosial. Berdasar hal itu, dibutuhkan sosialisasi atas nilai Pancasila guna mempertahankan eksistensi dan keberlangsungan di masyarakat. Sosialisasi atas nilai Pancasila dapat dilakukan melaui jalur pendidikan kewarganegaraan. Penelitian ini menganalisis bagaimana Pancasila diimplementasikan melalui pendidikan kewarganegaraan di Indonesia Penelitian dilakukan dengan desain kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, wawancara mendalam dan ditunjang dengan observasi dan FGD. Analisis data dengan interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila dapat diimplementaskan melalui pendidikan kewarganegaraan dalam dua konsep utama yakni status dan isi Pancasila. Status Pancasila adalah pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi kebangsaan dan dasar negara . Masing masing status dikembangkan melalui pendekatan sosiologis, historis dan yuridis. Pembelajaran atas Pancasila meliputi pembelajaran tentang Pancasila , pembelajaran melalui (ber) Pancasila dan pembelajaran untuk Pancasila

Keywords: *Pancasila, pendidikan kewarganegaraan*

PENDAHULUAN

Bagi bangsa Indonesia, Pancasila telah diterima sebagai dasar negara. Pancasila berisikan lima asas, prinsip, atau nilai yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Ketentuan mengenai lima nilai ini dimuat dalam konstitusi negara Indonesia yakni pada bagian Pembukaan UUD 1945 alinea IV. Pancasila, dengan mengacu pada teori kewarganegaraan komunitarian (Will Kymlicka, 2001) dan fungsionalisme struktural (George Ritzer, 2004), dapat dikatakan berisi gagasan tentang kehidupan yang baik, merupakan hasil kesepakatan komunitas, nilai sosial bersama yang turut menentukan kehidupan, dan dapat menjadi sumber bagi terjadinya integrasi sosial.

Sebagai nilai kebajikan dan nilai sosial bersama, maka Pancasila perlu diaktualisasikan, diimplementasikan dan disosialisasikan kepada warganya demi

eksistensi dan kelangsungan kehidupan berbangsa di Indonesia. Menurut Kaelan (2007), aktualisasi itu dapat dilakukan antara lain dengan; revitalisasi epistemologis, menjadikannya sebagai landasan etik pengetahuan, sosialisasi lewat pendidikan, dan menjadikannya sebagai sumber material hukum Indonesia. Sastrapetedja (2007) juga menyatakan bahwa "mediasi" untuk kontekstualisasi dan implementasi Pancasila adalah melalui interpretasi, internalisasi atau sosialisasi, misalnya melalui pendidikan. Berdasar dua pendapat di atas, implementasi Pancasila dapat dilakukan melalui jalur pendidikan.

Pengalaman menunjukkan bahwa implementasi Pancasila melalui jalur pendidikan dilakukan dengan memuatkannya sebagai bagian dari materi pembelajaran (*instructional material*) Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) di Indonesia. Upaya menjadikan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai sarana bagi sosialisasi Pancasila ini pernah dilakukan pada masa Orde Lama yakni dengan pelajaran Civics (1960), Orde Baru, dengan menerapkan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) kurikulum 1975, 1984 dan pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berdasar kurikulum 1994. Orde reformasi dengan pelajaran Kewarganegaraan (2004), Pendidikan Kewarganegaraan (2006) dan PPKn (2013).

Berdasar pengalaman di atas, Pancasila selalu menjadi bagian dari materi pendidikan kewarganegaraan Indonesia. Artinya Pancasila menjadi muatan materi dari PKn. Pancasila sebagai konsep sendiri memiliki makna dan penjelasan yang beragam sejalan dengan pendekatan pemikiran yang dilakukan. Dengan demikian patut dipertanyaan perihal isi Pancasila apakah dan nilai-nilai Pancasila yang manakah yang seyogyanya dapat dijadikan muatan materi dalam Pendidikan Kewarganegaraan saat ini belum terumuskan secara jelas dan benar. .

Persoalan tentang muatan materi Pancasila dalam PKn juga penting untuk dijelaskan oleh karena Pancasila sendiri sebagai objek kajian atau muatan PKn di Indonesia telah lama diakui dan dijalankan. Materi Pancasila dapat dikatakan sebagai bahan PKn yang bersifat "*The Great Ought*" dimana setiap bangsa pasti akan melakukan internalisasi bahan tersebut sebagai persyaratan objektif bangsa yang bersangkutan (Numan Somantri, 2001). Materi Pancasila dalam PKn termasuk *structural formal content* yang bersifat tetap dan menjadi pemersatu (Sapriya,

2007). Sebagai materi yang bersifat "*The Great Ought*" dan termasuk *structural formal content* seharusnya materi Pancasila bersifat tetap dan tidak berubah.

Kajian ini penting untuk dilakukan oleh karena beberapa hal. *Pertama*, bahwa Pancasila sebagai sistem nilai yang telah diangkat sebagai dasar negara membutuhkan implementasinya dalam kehidupan. *Kedua*, implementasi Pancasila dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya melalui pendidikan. *Ketiga*, bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki kaitan erat dengan Pancasila. Pancasila baik sebagai ideologi dan dasar negara merupakan bagian dari ontologi PKn. *Keempat*, isi atau muatan Pancasila yang disosialisasikan kepada warga dapat digunakan untuk membangun identitas atau jatidiri bangsa, oleh karena Pancasila diakui menjadi dasar bagi pembangunan identitas bangsa Indonesia dan merupakan salah satu unsur dari identitas itu sendiri. *Kelima*, isi Pancasila dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia masih menghadapi kelemahan dalam hal metode pembelajaran yang cenderung indoktrinatif dan juga muatan Pancasila itu sendiri yang cenderung ditafsirkan sebagai sarana untuk melegitimasi kekuasaan yang ada. *Keenam*, Pancasila yang memiliki beragam status, makna, dan tafsiran membutuhkan penataan dan pengorganisasin yang jelas sebagai materi PKn. *Ketujuh*, sepanjang pengetahuan penulis, sampai saat ini belum ada kajian akademik yang secara khusus menganalisis dan merumuskan materi Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah mengingat pengalaman bahwa Pancasila selalu menjadi isi PKn.

Guna menemukan data atas kajian di atas dilakukan studi dokumentasi, wawancara mendalam dan observasi. Pengumpulan, analisis dan interpretasi atas dokumen mencakup teks-teks tertulis: dokumen kenegaraan (dokumen formal) berupa peraturan perundangan yakni peraturan perundangan yang berisikan ketetapan politik mengenai pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dan Pancasila, Rencana mengajar guru PKn, buku teks PKn, modul atau lembar kegiatan siswa yang digunakan dalam pembelajaran PKn , buku referensi, jurnal, makalah, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan variabel Pancasila dan PKn. Informan dipilih melalui *selective* dan *snowball sampling* yang meliputi para pakar di berbagai bidang (filsafat Pancasila, PKn, sejarah, dan sosial), dan guru PKn. Teknik wawancara ini selanjutnya akan didukung melalui *Focus Group Discussion*

(FGD) dengan para guru PKn. Analisis data dilakukan dengan model analisis induktif (Patton,1990) yakni analisis terhadap pola- pola, tema-tema dan kategori-kategori berasal dari data; ia berasal dari data yang tidak ditentukan sebelum pengumpulan dan analisis.

.

KERANGKA TEORI

1. Materi Pembelajaran dalam Kurikulum

Materi pembelajaran (*instructional material)* merupakan bagian dari kurikulum pendidikan. Kurikulum sebagai program pendidikan merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen yakni tujuan, isi, organisasi dan strategi (Burhan Nurgiyantoro, 1988); tujuan kurikulum, bahan pelajaran, proses belajar mengajar dan evaluasi atau penilaian (S. Nasution, 1994); tujuan, isi atau materi, proses atau sistem penyampaian dan media, serta evaluasi (Nana Syaodih Sukmadinata, 1997). Jadi isi atau bahan ajar merupakan bagian atau salah satu komponen kurikulum.

Isi merupakan hal yang terpenting bahkan banyak orang memandang isi tidak lain dari kurikulum itu sendiri. Isi terdiri atas fakta, konsep, generalisasi, ketrampilan, dan sikap yang terdapat dalam bahan ajar (Burhan Nurgiyantoro, 1988). Ansyar (1989) menyatakan secara umum materi pendidikan yang termuat dalam kurikulum meliputi tiga komponen yakni ilmu pengetahuan, proses dan nilai-nilai. Dalam Depdiknas (2004:4) disebutkan materi pembelajaran (*instructional material*) terdiri atas pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan ketrampilan (psikomotorik).

Materi bisa dibedakan menjadi dua yakni materi esensial dari suatu ilmu dan materi pendidikan (Karhami, 2000) atau materi teoritis dan materi pendidikan (Ansyar,1989). Pembedaan lain diperkenalkan oleh Lee S Shulman dalam artikel berjudul *Those who understand: Knowledge growth in teaching* (1986) yang membedakan antara *content knowledge* dan *pedagogical content knowledge. Pedagogigal Content Knowledge (PCK)* terdiri atas atau merupakan *intersection* antara *Content Knowledge* dan *Pedagogical Knowledge*. Menurut Shulman, *content knowledge* mencakup " *knowledge of concepts, theories, conceptual frameworks as well as knowledge about accepted ways of developing knowledge"*

(http://www.leeshulman.net/domains.html) . Sedangkan *pedagogical knowledge* dikatakan meliputi " *generic knowledge about how students learn, teaching approaches, methods of assessment and knowledge of different theories about learning "* (http://www.leeshulman.net/domains.html). Guru yang memiliki pengetahuan tentang materi pelajaran dan strategi pedagogis umum, meskipun perlu, tetapi tidak cukup untuk mendapatkan pengetahuan guru yang baik. Untuk keluar dari masalah ini guru perlu berpikir tentang bagaimana konten tertentu harus diajarkan, ia memerlukan pengetahuan konten (isi) yang berhubungan dengan proses pengajaran, termasuk cara membuat dan merumuskan materi sehingga bisa dipahami oleh orang lain. Guru memerlukan pengetahuan yang disebut *pedagogical content knowledge.*

Berdasar tiga pendapat di atas, pada intinya sama yakni ada materi yang bersifat teoritis, materi pengetahuan atau masih berdasar ilmu dan ada materi pendidikan yakni materi yang disiapkan untuk keperluan pendidikan. Sebuah materi teoritis belum dapat begitu saja diajarkan sebelum dikembangkan sebagai materi pendidikan.

Selanjutnya, Ansyar (1989) menyatakan ada beberapa kriteria untuk menetapkan materi teoritis menjadi materi pendidikan yang akan dimuat dalam kurikulum sekolah. Pertama, signifikansi dalam arti menentukan bagian apa dari suatu ilmu yang perlu dimasukkan atau ditekankan. Dua, kebutuhan sosial dalam arti pemilihan materi untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki fungsi sosial. Tiga, kegunaan dalam arti materi pendidikan dapat bermanfaat bagi peserta didik, sekolah, dan masyarakat. Empat, minat dalam arti pemilihan materi hendaknya didasarkan atas minat dan kebutuhan siswa. Lima, perkembangan manusia dalam arti pemilihan materi pendidikan selayaknya mempertimbangkan pula perkembangan psikologis dan sosial peserta didik dan enam, struktur disiplin ilmu dalam arti pilihan materi pendidikan yang dimuat selayaknya mencakup pula struktur bidang ilmu tertentu agar peserta didik dapat leluasa belajar dalam kerangka fikir ilmuwan.

Karhami (2000) juga mengemukakan sejumlah kreteria untuk memilih materi esensial dari suatu ilmu menjadi materi pendidikan dalam kurikulum. Pertama, materi sebaiknya mengungkap gagasan kunci dari ilmu. Dua, materi

dipilih sebagai struktur pokok suatu mata pelajaran. Tiga, materi perlu menerapkan penggunaan metode inquiri secara tepat. Empat, konsep dan prinsip yang dapat dipilih dapat memuat pandangan global yang luas dan lengkap. Lima, seimbang antara materi teoritis dengan materi praktis dan enam, materi perlu mendorong daya imajinasi siswa. Pendapat yang lebih sederhana menyatakan bahwa untuk kepentingan pendidikan, materi teoritik ilmu perlu diorganisasikan dan dikembangkan secara ilmiah dan psikologis (Numan Somantri, 2001).

2. Isi PKn

Mengacu pendapat Margaret Stimman Branson (1998), komponen utama dari Pendidikan Kewarganegaraan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu *civic knowledge, civic skills,* dan *civic dispotitions*. *Civic knowledge* berkaitan dengan isi atau apa yang seharus warganegara ketahui. *Civic skills* merupakan ketrampilan apa yang seharusnya dimiliki oleh warganegara yang mencakup; ketrampilan intelektual dan ketrampilan partisipasi. Sedangkan *civic dispotitions* berkaitan dengan karakter privat dan publik dari warganegara yang perlu dipelihara dan ditingkatkan dalam demokrasi konstitusional.

Sapriya (2007) dengan mendasarkan pada pendapat Hanna dan Lee (1962) mengemukakan bahwa *content* untuk *Social Studies* dapat meliputi 3 (tiga) sumber, yaitu pertama, *informal content* yang dapat ditemukan dalam kegiatan masyarakat, kegiatan anggota DPR, kegiatan pejabat, dan lain-lain. Kedua, *the formal content disiplines* yang meliputi geografi, sejarah, ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, antropologi, dan yurisprudensi. Ketiga, *the response of pupils* yaitu tanggapan siswa baik yang bersifat *informal content* maupun *formal content*. Bahan ini dapat dikembangkan pada isi atau *content* PKn dengan catatan perlu disesuaikan dengan visi, misi, dan karakterisik PKn.

Jika dikaitkan dengan *formal content dicipline* maka maka bahan PKn dapat diambilkan dari ilmu politik yakni *civics* atau ilmu kewarganegaraan. Secara keilmuan, apabila bertolak dari ilmu kewarganegaraan (*civics*) yang merupakan cabang dari ilmu politik, maka bahan ajar untuk PKn menfokuskan pada demokrasi politiknya yang selanjutnya masih perlu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan siswa atau disebut *basic human activities* (Numan Somantri, 2001).

Pancasila termasuk konten (isi) PKn yang sifatnya *formal structure.* Menurut Sapriya (2007) isi yang bersifat *formal structure* harus sama dan tidak bisa ditawar-tawar (*unnegotiated, given*) karena merupakan unsur perekat dan pemersatu bangsa yang akan memperkuat semangat kebangsaan Indonesia. Numan Somantri (2001) menyebut Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai bahan PKn Indonesia yang bersifat "*The Great Ought*", termasuk *Unavoidable Indotrination*, yang perlu diinternalisasikan kepada warga negara.

Hasil dan Pembahasan

1. Muatan materi Pancasila sebagai isi PKn

Menurut Azis Wahab dan Sapriya (2007), PKn di Indonesia dimulai dengan nama *Civics* yakni dalam buku Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia (*Civics*) karangan Mr. Soepardjo, dkk diterbitkan oleh Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tahun 1960. Dalam buku ini, materi Pancasila dimuat sebagai salah satu dari 8 (delapan) bagian isi buku. Pada bagian Pancasila memuat materi Arti Persatuan, Bentuk Pantjasila, Pantjasila sebagai alat persatuan, Pantjasila sebagai kepribadian bangsa, Pantjasila dan ilmu pengetahuan, Pantjasila sebagai dasar negara, Pantjasila sebagai *way of life* dan Realisasi Pantjasila dalam masyarakat (Soepardo, et al, 1960)

Muatan Pancasila dalam pendidikan kewarganegaraan tahun 1960 yang pada waktu itu bernama Civics, berisikan dua hal, yakni mengenai bentuk Pancasila dan kedudukan atau arti penting Pancasila. Bentuk Pancasila yang dimaksud adalah arti dari kata Pancasila yakni lima dasar. Arti ini berkaitan dengan konteks Pancasila secara politik yakni ketika pertama kali dikemukakan oleh Soekarno dalam pidato di sidang I BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Arti Pancasila dalam konteks politik ini berbeda dan tidak berhubungan dengan arti kata Pancasila yang berasal dari konsep agama Budha yang bermakna lima pantangan hidup. Bentuk Pancasila juga berarti susunan sila-sila Pancasila. Susunan Pancasila bermula dari Soekarno tanggal 1 Juni 1945 sebagai usul dasar filsafat negara berisi lima dasar. Susunan Pancasila dari Soekarno ini berubah ketika ditetapkan menjadi dasar negara termuat dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dan berubah lagi ketika termuat dalam bagian Mukadimah dalam Konstitusi RIS 1945 dan UUD Sementara RI tahun 1950.

Muatan perihal kedudukan atau arti penting Pancasila dalam kehidupan bernegara disebutkan sebagai alat persatuan, sebagai kepribadian bangsa, sebagai metode dan pangkal tolak pembahasan ilmu pengetahuan sosial dan Pancasila sebagai *way of life.*

Setelah terjadinya perubahan kurikulum 1975 dengan menggunakan nama Pendidikan Moral Pancasila, maka Pancasila juga dimuatkan sebagai bagian dari materi pendidikan kewarganegaraan. Pada buku Pendidikan Moral Pancasila terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk tingkat SLTP kelas 1 tahun 1980, materi Pancasila dimuat kedalam 3 bab yakni Bab V Dasar Negara Pancasila (1), Bab VI Dasar Negara Pancasila (2) dan Bab VII Hubungan Pancasila dengan UUD NRI 1945.

Perihal pengamalan Pancasila dikemukakan ada dua, yakni pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan pengamalan Pancasila sebagai dasar negara. Kita mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa bilamana sikap mental/batin, cara berfikir, dan bertingkah laku dijiwai oleh sila-sila Pancasila yang bersumber pada Pembukaaan dan Batang Tubuh UUD NRI 1945 dan bilamana tidak bertentangan dengan norma –norma yang berlaku. Pengamalan Pancasila sebagai dasar negara pada dasarnya adalah melaksanakan seluruh pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan, batang tubuh beserta penjelasannya (Depdikbud, 1983). Materi Pancasila juga memuat butir-butir P4 berdasar ketetapan MPR RI tahun 1978, yang dikatakan bahwa ketetapan tersebut memberi petunjuk-petunjuk yang nyata dan jelas wujud pengamalan sila-sila Pancasila. Butir-butir pengamalan Pancasila dalam naskah P4 atau Eka Prasetya Panca Karsa berjumlah 36 butir, yang terbagi 4 butir sila I, 8 butir sila II, 5 butir sila III, 7 butir sila IV dan 12 butir sila V (Depdikbud, 1983).

Berdasar data di atas, dapat dikemukakan bahwa muatan Pancasila dalam pelajaran Pendidikan Moral Pancasila menekankan pada status pokok Pancasila dasar negara dan Pancasila pandangan hidup bangsa. Dua status dan fungsi pokok ini selanjutnya diuraikan dan dijabarkan status-status lain daripada Pancasila yang kesemua itu dapat dikembalikan lagi kepada dua fungsi pokok tersebut. Fungsi pokok Pancasila dasar negara meliputi ; 1) Pancasila sebagai dasar falsafah Negara, 2) Pancasila sebagai sumber tertib hukum, 3) Pancasila sebagai perjanjian luhur

bangsa (waktu mendirikan negara), 4) Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan negara (seperti terkandung dalam Pembukaan UUD NRI 1945) dan 5) Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Fungsi Pancasila pandangan hidup bangsa meliputi ; 1) Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, 2) Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, dan 3) Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia.

Materi Pancasila lain yang dimuat adalah sejarah perumusan Pancasila dasar negara dan pengamalan Pancasila. Sejarah perumusan Pancasila dimulai dengan masa penjajahan Jepang sampai pengesahan Pembukaan UUD oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yang didalamnya memuat Pancasila. Pengamalan Pancasila berisikan pengamalan Pancasila dalam statusnya sebagai dasar negara dan pengamalan Pancasila dalam statusnya sebagai pandangan hidup. Jadi ada pembedaan jenis pengamalan Pancasila.

Dengan keluarnya kurikulum 1994, terjadi perubahan nama pendidikan kewarganegaraan dari sebelumnya Pendidikan Moral Pancasila (PMP) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan disingkat PPKn. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 yang mengamanatkan perlunya Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai kurikulum wajib.

Pada buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk SMP kelas 1 terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1994, materi Pancasila secara tersurat tidak disebutkan sebagai salah satu materi. Tidak ditemukan kata "Pancasila" sebagai salah satu bab atau bahasan dari buku tersebut. Demikian pula pada Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk SMP kelas 2 dan kelas 3. Materi Pancasila dalam PPKn diwujudkan dalam bentuk topik-topik nilai dan sikap sebagai jabaran dari Pancasila yang terdapat dalam P4. Topik-topik tersebut, misalnya Ketakwaan, Cinta Tanah Air, Musayawarah, Tenggang Rasa, Kesetiaan, Kebersihan , dan sebagainya

Berdasar topik-topik di atas, dapat dikemukakan bahwa muatan Pancasila dalam PPKn berisi uraian perihal isi Pancasila. Materinya menekankan pada nilai-nilai Pancasila sebagai upaya memantapkan usaha pengahayatan dan pengamalan Pancasila di sekolah. Nilai-nilai Pancasila ini diturunkan dari butir-butir P4 yang

kemudian dijadikan pokok bahasan. Dengan demikian pokok bahasan dalam PPKn pada dasarnya adalah nilai-nilai Pancasila yang telah terjabarkan pada butir-butir P4. Pokok bahasan disusun berurutan mulai dari butir nilai dan sikap pada sila I, dilanjutkan sila II, III, IV dan V. Jika pokok bahasan masih memungkinkan ditambah maka diulang kembali dari sila I pada butir nilai dan sikap yang selanjutnya.

Dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sekolah tahun 2006 dimuat ruang lingkup Pancasila sebagai salah satu isi materi PKn 2006. Ruang lingkup Pancasila ini berisikan materi: 1) Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, 2) Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, 3) Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, dan 4) Pancasila sebagai ideologi terbuka. Keempat materi Pancasila ini dalam kurikulum telah disusun peruntukkannya sesuai dengan jenjang pendidikan di sekolah. Untuk materi 1) Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan 2) Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara diperuntukkan bagi PKn tingkat SD. Materi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara diperuntukkan bagi PKn jenjang SMP. Materi Pancasila sebagai ideologi terbuka diperuntukkan bagi PKn jenjang SMA.

Muatan Pancasila dalam PKn 2006 khususnya untuk jenjang SMP memuat kedudukan atau status Pancasila dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup bangsa dan jatidiri bangsa. Pemuatan status – status tersebut tidak diikuti penjelasan sistematis terhadapnya. Pancasila dasar negara memuat banyak makna atau tafsir, yakni menjadi dasar penyelenggaraan bernegara, menjadi acuan penyusunan etika, dan menjadi paradigma pembangunan. Sementara itu, isi masing-masing sila Pancasila dijelaskan dalam kaitannya dengan karakteristik Pancasila sebagai ideologi. Muatan lain adalah materi mengenai upaya mempertahankan Pancasila dengan jalan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan bernegara, melaksanakan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, dan melalui bidang pendidikan.

Berdasarkan temuan penelitian diketahui muatan Pancasila dalam PKn SMP 2006 berisikan: *pertama*, muatannya lebih menekankan pada status Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. *Dua*, makna ideologi ditafsirkan secara sempit atau dalam pengertian sempit yakni seperangkat gagasan yang sifatnya utuh,

sistematis, dan menyeluruh. *Tiga*, makna dasar negara ditafsirkan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan bernegara yang berimplikasi menjadikan setiap tingkah laku dan setiap pengambilan keputusan para penyelenggara negara dan pelaksana pemerintahan harus selalu berpedoman pada Pancasila, menjadi sumber acuan dalam menyusun etika kehidupan berbangsa dan menjadi paradigma pembangunan. *Empat,* tidak dijelaskan secara terbedakan makna Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai ideologi negara. *Lima,* ideologi Pancasila dinyatakan memiliki karakteristik yang berbeda bila dibandingkan dengan ideologi lain dan jika dihubungkan dengan lima sila kandungannya. Makna dari masing-masing sila Pancasila berkaitan dengan status Pancasila sebagai ideologi. *Enam,* upaya mempertahankan Pancasila dapat dilakukan dengan jalan melaksanakan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dan melakukan pendidikan Pancasila di sekolah.

2. Implementasi Pancasila melalui PKn

Para informan pakar pada umumnya sependapat bahwa pendidikan kewarganegaraan berkaitan dengan Pancasila yakni pendidikan kewarganegaraan di Indonesia bertugas membelajarkan Pancasila kepada para siswa. Namun kaitan antara pendidikan, pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila lebih dari sekedar hal tersebut. Bahwa Pancasila itu menjadi dasar, asas bagi pendidikan nasional dan Pancasila itu ada dalam PKn. PKn secara umum bertugas mendidik warga negara agar paham dan menjadi warga negara yang baik. Dengan menyampaikan Pancasila melalui pendidikan kewarganegaraan mendidik agar warga negara tahu *local wisdom,* pengalaman sejarah, sistem kenegaraan, sadar apa yang ada dalam negara, tahu hak dan kewajibannya sehingga nanti kita tidak kehilangan jatidiri bangsa, bukan melulu demokrasi. Sebenarnya Pancasila itu *core* dari pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Ia menjadi jatidiri pendidikan kewarganegaraan bukan melulu pendidikan demokrasi Selanjutnya, pakar tidak mempersoalkan cara mengimplementasikan, tetapi muatan Pancasila seperti kaidah *local wisdom,* sistem hukum, moral negara Indonesia perlu diberikan. Dengan Pancasila ini, PKn bicara dari sisi filosofi. Jadi isi Pancasila dimasukkan dalam PKn guna mendidik warga negara yang baik perlu tahu filosofi negaranya. *Indonesian filosofinya* perlu

menjadi isi PKn di Indonesia. Terdapat kesepakatan pandangan bahwa PKn memiliki kaitan dengan Pancasila. Kaitan itu adalah Pancasila menjadi isi atau muatan PKn. Dengan muatan Pancasila itu akan menjadikan PKn di Indonesia memiliki jatidiri sebagai pendidikan yang bertugas membentuk warga negara yang baik untuk konteks Indonesia. Pancasila menjadi *core*-nya PKn di Indonesia.

Perihal bagian atau sisi Pancasila manakah yang dapat dimuatkan dalam PKn, berdasar pandangan pakar dapat diambil beberapa temuan penelitian. *Pertama*, isi Pancasila dalam PKn dapat berwujud dua hal yakni isi Pancasila sebagai kajian atau objek itu sendiri (Pancasila sebagai *genetivus objectivus*) dan kajian menurut perspektif Pancasila atau Pancasila sebagai *genetivus subjectivus*. *Dua*, sebagai objek kajian, isi Pancasila yang dimuat dalam PKn bisa dari berbagai perspektif, misal dari sisi sejarahnya (sejarah perjuangan bangsa, proses perumusan Pancasila), sisi hukumnya (Pancasila sebagai sumber hukum yang regulatif maupun konstitutif yang terjabar dalam UUD 1945), sosiologis kultural (pengamalan nilai Pancasila), politik (etika politik), dan kajian filsafat (makna Pancasila, ideologi terbuka). *Tiga*, muatan Pancasila juga bisa digali dan dijabarkan dari tiga kedudukan Pancasila yakni Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi nasional dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Muatan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa penting karena mendasari fungsi yang lain serta dapat menjadi sumber pengembangan jatidiri bangsa. *Empat*, Pancasila sebagai objek kajian ini, perspektif yang dipilih dan mau diajarkan disesuaikan dengan jenjang pendidikan, tingkat kebutuhan dan perkembangan siswa. *Lima*, Pancasila sebagai salah satu objek kajian dalam PKn secara materi bersifat *perennial*, merupakan nilai-nilai luhur warisan para pendahulu bangsa, namun dalam cara penyajiannya dapat dikembangkan sesuai dengan minat kebutuhan siswa sehingga bisa menarik (*progressivism*). *Enam*, Pancasila dalam PKn sekarang ini lebih banyak sebagai objek kajian, lebih banyak sebagai *genetivus objectivus*, belum diisi dengan sifat *genetivus subjectivus*. *Tujuh*, pengembangan muatan Pancasila sebagai *genetivus subjectivus* perlu dilakukan agar mewarnai setiap kajian dalam PKn agar setiap bahasan PKn dapat dikaji dari Pancasila, nilai-nilai Pancasila mendasari setiap bahasan PKn, dan Pancasila menjadi *core*-nya PKn yang mampu memancarkan energi terhadap semua isi yang termuat di PKn Indonesia.

Berdasar pada temuan penelitian, maka isi atau konten materi Pancasila yang terdapat pada PKn dalam statusnya sebagai mata pelajaran di sekolah dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. *Pertama*, materi yang berisikan status, kedudukan, peran, atau fungsi Pancasila pada kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia berikut penjelasan akan kedudukan tersebut. Status, kedudukan, peran, atau fungsi Pancasila menurut Notonagoro (1980) diistilahkan sebagai rumus Pancasila, sedang menurut Pranarka (1985) disebutnya eksistensi Pancasila. *Dua*, materi yang berisikan isi yang terkandung dari konsep Pancasila itu sendiri. Berdasar pengkategorian ini, dapat disimpulkan materi Pancasila dalam PKn berisikan dua hal yakni perihal rumus atau eksistensi dan perihal isi atau substansi Pancasila.

Kategori status dan pengertian Pancasila tersebut, sebagai berikut;

Tabel 1
Kategori status Pancasila dalam pelajaran PKn di Indonesia

No	Pelajaran PKn	Status dan Fungsi Pancasila
1	Civics (19 62)	Pancasila sebagai alat persatuan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Pancasila dan ilmu pengetahuan Pancasila sebagai dasar negara Pancasila sebagai *way of life*
2	Pendidikan Moral Pancasila (1975-1984)	Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia Pancasila sebagai kepribadian bangsa Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, ketiganya ini masuk kepada fungsi pokok Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia Pancasila sebagai dasar falsafah negara, Pancasila sebagai sumber tertib hukum, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan kita, kelima status ini masuk pada fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara.
3	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (1994)	Pancasila terjabarkan kedalam nilai-nilai moral menurut masing-masing sila
4	Pendidikan Kewarganegaraan	Pancasila sebagai ideologi negara Pancasila sebagai dasar negara

	2006)	
5	PPKn (2013)	Pancasila sebagai dasar negara Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa

Dengan temuan penelitian ini, penulis menyatakan bahwa muatan Pancasila dalam PKn di Indonesia berkembang dari muatan perihal status, kedudukan, fungsi Pancasila berikut penjabarannya atau "rumus" Pancasila, lalu berkembang menjadi muatan perihal isi, tafsir, kandungan dari tiap sila Pancasila berikut penjabarannya atau "isi" Pancasila dan muatan berupa "perspektif" Pancasila terhadap suatu kajian dalam PKn. Tahapan pertama dilakukan melalui pelajaran PMP 1975/1984 dan buku PKn/*Civics* "Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia" 1960. Tahapan kedua termuat dalam pelajaran PPKn 1994 yang didalamnya memuat "isi" dari Pancasila yakni nilai norma Pancasila berikut pengamalannya. Tahapan ketiga, yakni menjadikan Pancasila sebagai *core-nya* PKn di Indonesia masih merupakan idealisme, sebab isi kajian Pancasila dalam PKn maupun isi PKn sendiri belum menampakkan hal tersebut.

Gambaran atas perkembangan materi atau konten Pancasila dalam PKn tersebut dapat penulis skemakan sebagai berikut;

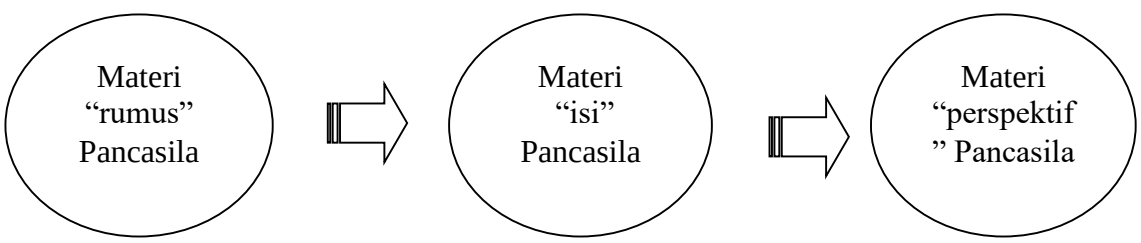

Skema 1

Perkembangan materi Pancasila dalam PKn

Dengan gambaran ini, penulis berpendapat bahwa pembelajaran Pancasila dalam PKn dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yakni 1) Pembelajaran tentang Pancasila, bermakna membelajarkan konten perihal "rumus" Pancasila yakni status, kedudukan, fungsi, arti pentingnya dalam kehidupan bernegara berikut penjabarannya yang diharapkan bermuara pada pemahaman Pancasila, 2) Pembelajaran ber-Pancasila, bermakna membelajarkan nilai dan norma sebagai

"isi" daripada Pancasila yang diharapkan terwujud dan sikap dan perilaku warga negara yang berdasar Pancasila, dan 3) Pembelajaran untuk Pancasila, bermakna membelajarkan kajian-kajian dalam PKn menurut "perspektif" Pancasila, yang diharapkan Pancasila menjadi sudut pandang terhadap setiap materi PKn.

Ketiga tahap pembelajaran Pancasila ini dapat diskemakan sebagai berikut;

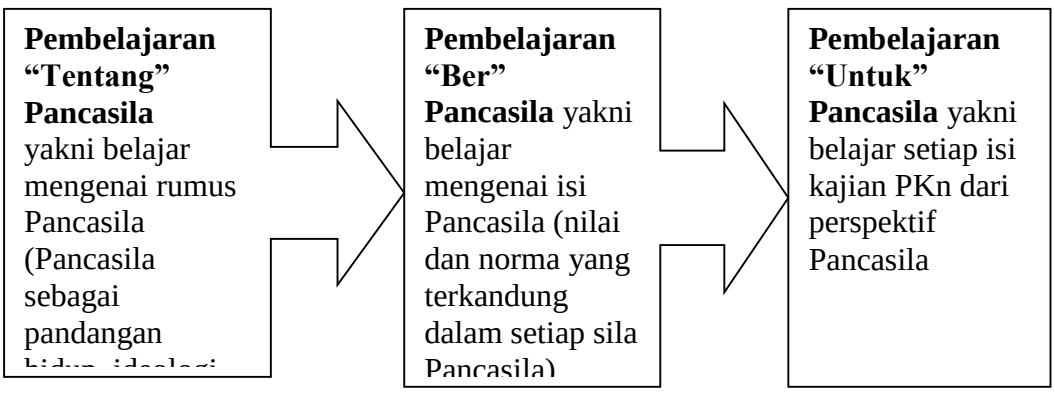

Skema 2
Tiga Tahapan Pembelajaran Pancasila dalam PKn

Materi Pancasila yang terdapat dalam PKn dewasa ini yakni materi "rumus" dan "isi " Pancasila telah memungkinkan PKn menjalankan fungsinya sebagai pendidikan nilai-moral, pendidikan kebangsaan dan pendidikan politik dan hukum. Materi Pancasila pandangan hidup bangsa beserta kandungan sila-sila yang termuat didalamnya menjadikan PKn berfungsi sebagai pendidikan nilai-moral. Materi Pancasila ideologi kebangsaan beserta kandungan sila-sila yang termuat didalamnya menjadikan PKn berfungsi sebagai pendidikan kebangsaan. Materi Pancasila dasar negara beserta kandungan sila-sila yang termuat didalamnya menjadikan PKn berfungsi sebagai pendidikan politik dan hukum.

Hubungan antara materi Pancasila tersebut dan fungsi PKn dapat dideskripsikan sebagai berikut;

Tabel 3

Hubungan antara Materi Pancasila dan Fungsi PKn

Materi Pancasila sebagai Isi PKn	Fungsi PKn
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa	Sebagai pendidikan nilai moral
Pancasila sebagai ideologi kebangsaan	Sebagai pendidikan kebangsaan
Pancasila sebagai dasar negara	Sebagai pendidikan politik dan hukum

Materi Pancasila dalam PKn termasuk bahan yang bersifat "The Great Ough" yang tidak dapat dihindari untuk disampaikan kepada peserta didik (*unavoidable indoctrination*) dalam rangka pembentukan semangat kebangsaan, cinta tanah air dan pembangunan karakter keindonesiaan (*nation charachter building*). Materi Pancasila mengandung unsur filsafat pendidikan perrenialisme oleh karena ia merupakan nilai-nilai luhur sebagai warisan bangsa. Materi Pancasila dalam ilmu sosial termasuk bahan yang sifatnya *formal structure content* sebagai unsur perekat dan pemersatu bangsa. Oleh karena itu isi bahan yang tersaji seharusnya sama dan tetap. Materi Pancasila tersebut meliputi "rumus" Pancasila yakni Pancasila pandangan hidup bangsa, Pancasila ideologi kebangsaan, dan Pancasila dasar negara. Sebagai materi yang bersifat *formal structure content*, materi Pancasila tidaklah netral secara akademik. Ia terkait dengan kepentingan sebuah bangsa yakni pentingan untuk melestarikan dan mewariskannya kepada tiap-tiap generasi. Pancasila telah diterima sebagai nilai kebajikan bersama, yang dalam gagasan kewarganegaraan komunitarian, dianggap sebagai konsepsi tentang kehidupan yang baik. Bangsa dalam hal ini penyelenggara negara berhak menyampaikan nilai-nilai kebajikan itu kepada warganya guna menjaga eksistensi dan keberlangsungan masyarakat itu sendiri.

Selanjutnya, PKn dalam mengembangkan materi Pancasila dapat memerinci lebih jauh materi tersebut disesuaikan dengan tiga dimensi kompetensi yang ada pada bidang PKn. Penulis dengan mendasarkan pendapat M S Branson (1998) dan Quigley, Buchanan & Bahmueller (1991), membedakan tiga kompetensi dalam PKn yakni *Civic Knowledge*, *Civic Skill* dan *Civic Virtue*. Materi Pancasila

dalam hubungannya dengan dimensi kompetensi dalam PKn tersebut, dapat dideskripsikan pada tabel sebagai berikut;

Tabel 4
Materi Pancasila dalam Dimensi PKn

Dimensi PKn	Penjabaran	Isi
Civic Knowledge	*Content Knowledge Pancasila dalam PKn*	Pengetahuan atas Pancasila pandangan hidup bangsa, ideologi kebangsaan dan dasar negara Pengetahuan atas isi sila-sila Pancasila
Civic Skill	*Intellectual skill*	Kemampuan menjelaskan, menganalisis dan berfikir kritis atas Pancasila
	Partisipation skill	Kemampuan mempertahankan Pancasila
Civic Virtue	*Civic commitment*	Komitmen, loyalitas , bersikap positif, menghormati dan menghargai Pancasila
	Civic dispotition	Sikap religius, manusiawi, nasionalis, demokratis, dan adil

Implementasi materi Pancasila kedalam pembelajaran PKn adalah dengan mengembangkan materi pengetahuan teoritis (*content knowledge*) Pancasila menjadi materi pendidikan di kelas atau sebagai *pedagogical content knowledge*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa materi Pancasila ini telah dikembangkan melalui penyusunan rencana pembelajaran yakni silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan modul PKn serta dilaksanakannya pembelajaran atas materi Pancasila tersebut di kelas. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa dalam hal penyampaian materi mengenai "rumus" Pancasila, guru PKn lebih banyak menggunakan pembelajaran yang menekankan ekspositori atau guru yang lebih aktif menerangkan. Sementara untuk materi perihal "isi" Pancasila, guru PKn lebih banyak menggunakan pembelajaran aktif siswa.

Materi Pancasila meskipun bersifat *unvoidable indoctrination* dan sebagai konten yang bersifat *formal structure* tetap dapat diorganisasikan agar memenuhi materi yang bersifat *the responses of pupils* atau bisa memenuhi kebutuhan dan

minat siswa. Materi pendidikan yang bisa memenuhi kebutuhan dan minat siswa merupakan salah satu dari kreteria materi yang baik. Peluang tersebut terutama terhadap materi "isi" Pancasila. Membelajarkan materi "isi" Pancasila lebih banyak meminta siswa untuk secara leluasa mengembangkan pikiran-pikirannya dalam memberi komentar, memberi contoh sikap dan perilaku baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contoh-contoh yang diberikan pada umumnya adalah contoh-contoh kecil dan riil yang dihadapi oleh siswa itu sendiri sesuai dengan perkembangannya. Kegiatan pembelajaranpun tidak hanya berpusat pada guru tetapi mampu menciptakan pembelajaran siswa aktif.

Berdasar hal tersebut, materi Pancasila meskipun mengandung filsafat pendidikan perrenialisme, akan tetapi dalam pembelajaran di kelas dapat mengadopsi filsafat pendidikan progressivisme yakni dalam hal perluasan contoh dan ilustrasi yang diberikan disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa serta pengembangan strategi pembelajaran yang berpijak pada siswa. Dalam konteks isi pembelajaran, pendidikan nilai-moral Pancasila mengacu pada nilai-nilai luhur bangsa (perrenialisme), namun dalam pelaksanaan pembelajaran dapat dikembangkan dengan memperhatikan minat siswa dan pembelajaran siswa aktif (progressivisme). Dengan cara ini maka dapat dihindari kecenderungan terjadinya indoktrinasi dalam hal metode pembelajaran meskipun dari sisi isinya bersifat *unavoidable indoctrination.* Terhadap materi Pancasila siswa tetap diberikan kesempatan memberi respon dan berfikir kritis terhadap nilai-nilai tersebut sampai pada akhirnya dipahami dan diterimanya sebagai nilai kebajikan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Implementasi Pancasila melalui PKn adalah bagian dari implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara, dapat dilakukan dengan menjadikan Pancasila sebagai materi pelajaran yakni materi rumus atau eksistensi dan materi isi atau substansi Pancasila dalam konsep pandangan hidup bangsa, ideologi kebangsaan, dan dasar negara sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan, disertai jenis pendekatan pendekatan ilmiah dan tafsir untuk mengembangkannya

yakni sosiologis, filosofis, historis dan yuridis, dan dengan mempertimbangkan pemikiran Pancasila dalam jalur politik kenegaraan.

Saran

1. Kepada para pengembang materi Pancasila, direkomendasikan untuk menyusun materi Pancasila yang benar secara ilmiah akademik, rumusan yang sama, satu tafsir dan disepakati, yang didukung baik oleh pemikiran akademik ilmiah maupun pemikiran melalui jalur politik kenegaraan.
2. Kepada para guru PKn, direkomendasikan agar: 1) Pancasila sebagai materi teoritis (*content knowledge*) dikuasai dan dipahami secara benar sehingga materi pendidikan yang disajikan benar secara ilmiah akademis, 2) tidak perlu melakukan perluasan materi yang telah ada tetapi memberi pendalaman atas materi yang terkait sesuai dengan tingkat perkembangan dan pengalaman belajar siswa, 3) pembelajaran materi "isi" Pancasila melalui contoh dan perwujudannya di kehidupan sehari-hari terus dilakukan dan 4) melengkapi cara mengoranisir materi Pancasila dengan memperhatikan urutan materi berdasar pemikiran akademik yakni Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai ideologi kebangsaan dan Pancasila sebagai dasar negara.
3. Kepada para ilmuwan dan komunitas akademik PKn, diharapkan dapat bekerjasama melakukan kegiatan ilmiah akademik mengembangkan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan atau sebagai landasan ontologis pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sehingga Pancasila dapat menjadi *core*-nya PKn Indonesia.

Daftar Pustaka

Ansyar, Muhammad. (1989). *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum* . Jakarta : P2LPTK. Ditjend Pendidikan Tinggi, Depdikbud

Bourchier, David .(2007). *Pancasila Versi Orde Baru dan Asal Muasal Negara Organis.* Terj. Agus Wahyudi. Yogyakarta : Aditya Media dan PSP UGM.

Brameld, Theodore. (1965). *Education as Power*. USA: Holt, Riverhart and Winston, Inc.

Branson, S Margaret. (1998). "*The Role of Civic Education, A Forthcoming Education Policy*" Task Force Position Paper from the Communitarian Network. Tersedia di www.civiced.org. Di akses tanggal 17 Agustus 2009.

Brubacher, John Seiler. (1939). *Modern Philoshopies of Education*. New York: Mc Graw-Hill Book Company Inc.

Budimansyah, Dasim. (2009). "Membangun Karakter Bangsa Di Tengah Arus Globalisasi dan Gerakan Demokratisasi". Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar dalam bidang Sosiologi Kewarganegaraan pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, 14 Mei 2009

Bungin, Burhan. (2000). *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Press.

Cogan, JJ. (1999). *Developing the Civic Society : The Role Of Civic Education*. Bandung: CICED.

Cogan, John J & Derricott, Ray. (Eds). (1998). *Citizenship Education For 21 st Century; Setting the Contex*. London: Kogan Page

Creswell, J. W. (1998). *Qualitatif Inquiry and Research Design*. California: .Sage Publications, Inc.

Creswell, J. W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed.* Terjmh. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Creswell, Jhon W. (2008). *Educational Research: Planing, Conducting and Evaluating Quantitatif & Qualitatif Research*, Third Edition. New Jersey : Pearson Education.

Denzin, Norman K & Lincoln, Yvonna S. (2009). *Hanbook of Kualitatif Research*. Terjmh Dariyatno dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Depdikbud. (1980). *Pendidikan Moral Pancasila untuk SLTP kelas 1*. Jakarta: Depdikbud.

Depdikbud. (1993). *Bahan Penataran P4 di Perguruan Tinggi*. Jakarta : Depdikbud.

Depdikbud. (1994). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SLTP* kelas 1, 2, 3 . Jakarta: Depdikbud.

Hardiman, Budi. (2003). "Belajar dari Politik Multikulturalisme" dalam *Kewarganegaraan Mulitikultural : Teori Liberal Mengenai Hak-hak Minoritas.* Jakarta : LP3S

Hatta, Mohammad. (1966). *Demokrasi Kita*. Jakarta: Pandji Masyarakat.

Kaelan .(2007). *"*Revitalisasi dan Reaktualisasi Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara dan Ideologi" dalam *Memaknai Kembali Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Lima.

Kalidjernih, F. K. (2008). "Cita Sipil Indonesia Pasca-kolonial: Masalah Lama, Tantangan Baru" dalam *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Acta Civicus SPS UPI,* 1, (2), 127-146.

Karhami, S,K,A. (2000). "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah" dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6, (024), 281-294.

Kerr, David .(1999). *Citizenship Education : An International Comparison*. London : NFER

Ketetapan MPR RI No. XVIII/MPR/1998 tentang *Pencabutan Ketetapan MPR RI No II / MPR / 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.*

Klinken, Gerry van .(2001). "*Identitas-Identitas Baru"*. Makalah untuk acara Beda Buku 'Negara Etnik', oleh Yayasan Pondok Rakyat dan Indonesiatera, tanggal 23 Juni 2001di Lembaga Indonesia Perancis (LIP), Yogyakarta.

Kohn, Hans (1984) *Nasionalisme arti dan sejarahnya* Terj. Sumantri Mertodipura. Cet ke-4.Jakarta : PT Pembangunan dan Erlangga.

Kymlicka, Will (2001). *Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship*. Oxford: Oxford University Press.

Kymlicka, Will. (2004). *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer*. Terjmh: Agus Wahyudi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mc Cowan, Tristan. (2009). *Rethingking Citizenship Education, A Curiculum for Participatory Democracy*. London: Continum International Publishing Group.

Miles, Matthew B & Huberman, A Michael .(1994). *Qualitatif Data Analysis*. Second Edition. London : Sage Publications.

Moleong, Lexy (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung : Remaja Rosda Karya

Muchson AR. (2003). "Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Baru dan Implementasinya dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi". Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Kurikulum Berbasis Kompetensi Kewarganegaraan, diselenggarakan oleh Program Studi PPKn FKIP UNS tanggal 29 Maret 2003 di Surakarta.

Notonagoro (1980). *Pancasila secara Ilmiah Populer*. Cet ke-5. Jakarta: CV Pantjuran Tudjuh.

Notonagoro .(1982). *Beberapa Hal mengenai Falsalah Pancasila* . Cet ke-10. Jakarta. Pantjuran Tudjuh.

Nurgiyantoro, Burhan. (1988). *Dasar Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah Sebuah Pengantar Teoritis dan Pelaksanaan*. Yogyakarta : BPFE

Ouigley CN, Buchanan JH, Bahmueller CF (1991). *Civitas: A Frame Work for Civic Education*. Calabasas: Center of Civic Education.

Panitia Lima. (1977). *Uraian Pancasila* . Jakarta: Penerbit Mutiara.

Patton, Michael Quin. (1990). *Qualitative Evaluation and Research Methods* (2nd Ed) London: Sage Publication Ltd.

Pedagogical Content Knowledge (PCK). Tersedi di laman http://www.leeshulman.net/domains-pedagogical-content-knowledge.html diakses tanggal 25 Mei 2011

Pedagogical Content Knowledge (PCK). Tersedi di laman http://www.tpck.org/tpck/index.php?title=Pedagogical_Content_Knowledge_(PCK) diakses tanggal 23 Mei 2011

Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang *Standar Isi*

Permendikbud No 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar

Pranarka, AMW. (1985). *Sejarah Pemikiran Pancasila*. Jakarta: CSIS.

Pusat Kurikulum. (2007). *Naskah Akademik Kajian Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan.* Depdiknas: Badan Penelitian dan Pengembangan, Pusat Kurikulum

Pusat Perbukuan.(2008). *"Contextual Teaching and Learning" Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk SMP kelas VIII.* Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.

Ritzer, George. 2004. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta : Rajawali Press.

Rowan, Brian. Et al. (2001). "Measuring Teachers' Pedagogical Content Knowledge in Surveys: An Exploratory Study". Studi of Instructional Improvment.

Samsuri. (2010).*Transformasi Gagasan Masyarakat Kewargaan (Civil Society) Melalui Reformasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia (Studi Pengembangan Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Era Reformasi).* Disertasi Pendidikan IPS, Bandung : SPs UPI . Tidak diterbitkan.

Santoso, Listiono, et al. (2003.) *(de) konstruksi Ideologi Negara , Suatu Upaya Membaca Ulang Pancasila* . Yogyakarta: ning Rat.

Sapriya. (2007). *Perspektif Pemikiran Pakar tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun Karakter Bangsa* . Disertasi Pendidikan IPS. SPS UPI Bandung. Tidak diterbitkan.

Sastrapetedja, M .(2006). "Pancasila sebagai Orientasi Pembangunan Bangsa dan Pengembangan Etika Ilmu Pengetahuan" . Proseding Simposium dan Sarasehan Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa, tanggal 14-15 Agustus 2006 di Yogyakarta.

Shulman, Lee. (1986). "Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching" dalam *Educational Researcher,* Vol. 15, No. 2. (Feb., 1986), 4-14.

Soepardo, dkk. (1960) *Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia* . Jakarta: Departemen PP dan K.

Soeprapto, R. (2009). *Pancasila Jatidiri Bangsa*. Jakarta: LPPKB.

Somantri, Muhammad Numan. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: Rosda Karya.

Strauss, Anselm & Corbin, Juliet . (2003). *Dasar- Dasar Penelitian Kualitatif*. Terj. M Shodiq & Musttaqien. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sukmadinata, Nana Syaodih. (1997). *Pengembangan Kurikulum , Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosda Karya

Sutopo, HB. (2002). *Penelitian Kualitatif*: *Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian.* Surakarta : UNS Press.

Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) termuat dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Technological_Pedagogical_Content_Knowledge. Diakses tanggal 26 Mei 2011

Tilaar, HAR. (2009). *Kekuasaan dan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*

Wahab, Abdul Azis & Sapriya. (2007). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan* . Sekolah Pasca Sarjana UPI. Bandung : UPI Press

Winarno. (2011). *Implementasi Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan* . Disertasi Sekolah Pascasarjana UPI Bandung . Tidak diterbitkan

Winatapura, Udin S & Budimansyah, Dasim. (2007). *Civic Education Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas.* Bandung : SPS PKN UPI.

Winataputra, Udin Saripudin. (2001). *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistematik Pendidikan Demokrasi*. Disertasi Pendidikan IPS. Bandung : PPS UPI. Tidak diterbitkan.

STRATEGI PEMBELAJARAN PPKn DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER TANGGUNG JAWAB PESERTA DIDIK

Julita Widya Dwintari

Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta
juulita18@gmail.com

ABSTRAK

Mata pelajaraan PPKn bertujuan membentuk warga negara yang baik. Salah satu karakter yang harus dimiliki oleh setiap warga negara baik adalah tanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab tidak akan melepaskan dan melalaikan tugas maupun kewajibannya, selalu konsekuen dan konsisten dalam sikap serta perbuatannya. Oleh karena itu, guru PPKn harus menanamkan nilai karakter tanggung jawab pada peserta didik. Permasalahannya, menyusun pembelajaran yang membentuk karakter tanggung jawab bukan hal yang mudah. Tujuan dari makalah ini adalah mendeskripsikan strategi guru dalam pembelajaran PPKn untuk membentuk karakter tanggung jawab peserta didik. Makalah ini merupakan hasil penelitian kepustakaan menggunakan metode kajian pustaka dengan mengkaji dokumen yang relevan dengan model analisis induktif. Strategi pembelajaran PPKn untuk membentuk karakter tangggung jawab dapat dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga penilaian pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai tangung jawab. 1) Tahap perencanaan yaitu guru mengintegrasikan nilai tanggung jawab dalam disain pembelajaran yang disusun dalam silabus dan RPP. Perencanaan disusun dengan memperhatikan faktor signifikansi, fleksibilitas, relevansi, kepastian, ketelitian, adaptabilitas, waktu, monitoring, dan isi; 2) Tahap pelaksanaan, guru melaksanakan pembelajaran yang membentuk karakter tanggung jawab dengan mempertimbangkan kompetensi sikap spiritual, pengetahuan dan keterampilan dalam penyampaian materi pembelajaran. Pada tahap ini guru melaksanakan langkah-langkah model pembelajaran yang telah disusun pada tahap perencanaan. Model pembelajaran yang dapat membentuk karakter tanggung jawab peserta didik antara lain *Structured Numbered Heads*, Jigsaw, *Value Clarification Technique*, *Story Telling*, *Discovery Learning*, dan Pembelajaran Berbasis Proyek; 3) Penilaian karakter tanggung jawab dapat dilakukan pada saat pembelajaran sedang berlangsung dengan menggunakan observasi atau jurnal, dan setelah proses pembelajaran selesai dengan menggunakan penilaian antarpeserta didik maupun penilaian antarpeserta didik. Guru sebaiknya menggunakan minimal dua bentuk penilaian, misalnya observasi dan penilaian diri.

Kata kunci : *karakter tanggung jawab, PPKn, strategi pembelajaran*

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia bertujuan untuk membentuk warga negara yang beriman, cerdas, dan berkarakter. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tanggung jawab merupakan karakter yang penting, mengingat tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melakukan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan terhadap dirinya sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa (Salahudin, 2013: 112). Karakter tanggung jawab perlu dimiliki oleh setiap warga negara karena orang yang bertanggung jawab tidak akan melepaskan dan melalaikan tugas maupun kewajibannya, selalu konsekuen dan konsisten dalam sikap serta perbuatannya.

Karakter tanggung jawab seseorang dapat dibentuk. Jalaludin (1997:167) berpendapat bahwa karakter terbentuk dari pengaruh luar, terbentuk dari asimilasi dan sosialisasi. Asimilasi menyangkut hubungan manusia dengan lingkungan bendawi, sedangkan sosialisasi menyangkut hubungan antar manusia. Kedua unsur inilah yang membentuk karakter dan karakter merupakan pola seseorang berhubungan dengan lingkungannya. Dengan demikian, karakter tanggung jawab dapat dibentuk di lingkungan sekolah, melalui pendidikan karakter. Menurut Fitri (2012:156), pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada setiap mata pelajaran perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Karena itu, pembelajaran nilai-nilai karakter seharusnya tidak hanya diberikan pada aras kognitif saja, tetapi menyentuh pada internalisasi dan pengamalan nyata dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di sekolah dan di masyarakat.

Salah satu mata pelajaran yang memuat pendidikan karakter adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). PPKn merupakan mata pelajaran yang memiliki tugas untuk membentuk warga negara baik. Akan tetapi, Sanjaya (2012) menyatakan bahwa salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan adalah lemahnya proses pembelajaran karena kurang merangsang

kemampuan berpikir dan lebih menekakan hafalan informasi, sehingga lahirlah siswa-siswa yang baik dalam penguasaan teori tetapi lemah dalam aplikasi. Hal ini berkaitan dengan guru yang terkonsentrasi dan berfokus pada pembentukan pengetahuan dan keterampilan tetapi seirng lupa akan kewajiban menanamkan karakter peserta didik.

Permasalahan lain yang muncul yaitu guru hanya mengandalkan buku paket sebagai media pembelajaran, padahal guru memiliki otonomi untuk mengembangkan pembelajaran di kelasnya. Guru juga mengalami kebingungan dalam memilih model pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan kompetensi sikap dan memiliki waktu persiapan lebih sedikit untuk memasukkan secara lengkap konten baru yang disarankan atau pendekatan yang efektif ke dalam kelas mereka (Torney-Purta dan Lopez, 2006: 17). Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pembelajaran yang bisa digunakan guru PPKn untuk mengembangkan karakter tanggung jawab peserta didik di kelas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah kajian pustaka dengan model analisis induktif. Disebut penelitian kepustakaan karena data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya (Harahap, 2014: 68). Menurut Nasution (1988: 126) analisis data adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Model analisis data yang digunakan adalah model analisis induktif. Patton (Poerwandari, 2005) menjelaskan bahwa melalui analisis induktif akan memunculkan berbagai macam tema, kategori dan pola hubungan di antara kategori tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai tulisan dan hasil penelitian yang terkait dengan strategi pembelajaran PPKn dan karakter tanggung jawab yang didapatkan baik dari peraturan perundang-undangan, buku, maupun jurnal internasional dan nasional. Setelah dianalisis, maka tersusunlah gagasan pikiran tentang strategi pembelajaran yang dapat digunakan guru PPKn untuk mengembangkan karakter tanggung jawab peserta didik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Karakter Tanggung jawab

Ada dua makna dari karakter, yaitu pertama, sebagai kumpulan kondisi yang telah diberikan begitu saja, atau telah ada begitu saja, yang lebih kurang dipaksakan dalam diri kita. Karakter yang demikian dianggap sebagai sesuatu yang telah ada dari sananya (*given*). Kedua, karakter juga bisa dipahami sebagai tingkat kekuatan melalui mana seseorang individu mampu menguasai kondisi tersebut. Karakter yang demikian ini disebutnya sebagai sebuah proses yang dikehendaki (*wiled*) (Koesoema, 2010: 90). Sementara Muslich (2011: 70) mendefinisikan katrakter sebagai cara berpikir dan berperilaku seseorang yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam keluarga, masyarakat dan negara. Sunarti (2005:1) juga berpendapat bahwa karakter merupakan istilah yang menunjuk kepada aplikasi nilai-nilai kebaikan dalam bentuk tingkah laku. Walaupun istilah karakter dapat menunjuk kepada karakter baik atau karakter buruk, namun dalam aplikasinya orang dikatakan berkarakter jika mengaplikasikan nilai-nilai kebaikan dalam perilakunya. Dengan demikian, karakter adalah aplikasi nilai kebaikan dalam berpikir dan ditunjuukan dalam bentuk tingkah laku yang menjadi ciri khas tiap individu.

Salah satu karakter yang harus dimiliki setiap orang adalah tanggung jawab. Mustari (2014: 19) mendefinisikan tanggung jawab sebagai sikap atau perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya ia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara dan tuhan. Barbara (2004:385) menjelaskan tanggung jawab sebagai sikap yang dapat diandalkan, ketekunan, terorganisasi, tepat waktu, menghormati komitmen, perencanaan. Berdasarkan hal tersebut, Guru harus membentuk karakter tanggung jawab peserta didik di kelas agar setiap peserta didik kelak memiliki karakter yang mampu bertanggung jawab dalam kehidupan baik berkeluarga, bermasyarakat maupun bernegara.

B. PPKn sebagai Pendidikan Karakter

Pengembangan nilai karakter di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Pasal 6 ayat (4) peraturan tersebut menyebutkan bahwa penyelenggaraan PPK dilaksanakan pada satuan pendidikan Jalur Pendidikan Formal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah dan merupakan tanggung jawab kepala satuan pendidikan formal dan guru. Oleh karena itu, setiap guru harus mengembangkan karakter peserta didiknya melalui pembelajaran yang dilakansakaan guru di kelas.

Semua mata pelajaran pada dasarnya wajib untuk menguatkan pendidikan karakter, namun, PPKn menjadi salah satu mata pelajaran yang memiliki keterkaitan dengan pendidikan karakter. Winarno (2015: 354) menjelaskan keterkaitan PPKn dengan pendidikan karakter dikarenakan pendidikan karakter dan PPKn bukanlah sesuatu yang terpisahkan dan diajarkan dalam situasi yang terisolasi satu sama lain, namun PPKn berfungsi sebagai mata pelajatan yang memiliki misi pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter.

Susiatik (2013: 63) menjelaskan bahwa PPKn sebagai pendidikan karakter merupakan salah satu misi yang harus diemban. Misi lain adalah sebagai pendidikan politik, pendidikan demokrasi, pendidikan hukum, pendidikan HAM, dan bahkan sebagai pendidikan anti korupsi. PPkn memiliki Kompetensi Inti Sikap Spiritual dan Sikap Sosial dalam kurikulum 2013. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus menjadi tujuan pembelajaran mata pelajaran tersebut. Maksudnya perubahan karakter peserta didik merupakan usaha yang disengaja atau direncanakan, bukan sekadar dampak ikutan atau pengiring saja. Berdasarkan hal tersebut, guru PPKn harus membentuk karakter peserta didik, salah satunya karakter tanggung jawab dengan menerapkan strategi pembelajaran yang mengintegrasikan nilai tanggung jawab.

C. Konsep Strategi Pembelajaran

Uno (2011: 2) menjelaskan pengertian strategi pembelajaran sebagai cara yang digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga memudahkan peserta didik menerima dan memahami mata pelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai

suatu perencanaan serangkaian cara yang akan digunakan guru untuk mencapai tujuan pendidikan.

Proses pembelajaran menurut Marzuki (2011: 8) dilaksanakan dalam tiga tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atau penilaian yang dijelaskan sebagai berikut. 1) Tahap perencanaan adalah usaha merancang proses pembelajaran dengan membuat silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); 2) Tahap pelaksanaan yaitu pelaksanaan dari apa yang telah disusun dalam RPP pada tahap perencanaan. Pembelajaran dari tahapan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dipilih dan dilaksanakan agar peserta didik mempraktikkan nilai-nilai karakter yang ditargetkan. Dalam proses ini guru juga bisa melakukan pengamatan sekaligus melakukan evaluasi (penilaian) terhadap proses yang terjadi, terutama terhadap karakter peserta didiknya; 3) Tahap evaluasi atau penilaian yaitu penilaian peserta didik untuk mengukur ketercapaian peserta didik atas pembelajaran yang dilakukan. Penilaian tidak hanya menyangkut pencapaian kognitif peserta didik, tetapi juga pencapaian afektif dan psikomotoriknya.

D. Strategi Pembelajaran PPKn untuk Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Peserta Didik

Pembentukan karakter tanggung jawab peserta didik dapat dilakukan pada semua materi PPkn baik dengan strategi pembelajaran individu (*individual learning*) maupun berkelompok (*group learning*). Pada dasarnya tanggung jawab sebagai karakter dapat diintegrasikan guru ke dalam materi pembelajaran PPKn dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran.

1. Perencanaan Pembelajaran

Pasal 20 PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menjelaskan bahwa perencanaan pembelajaran merupakan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk setiap muatan pembelajaran**.** Peterson, Mark, dan Clark (1978, 431) menyarankan agar pada tahap perencanaan sebaiknya guru melakukan perencanaan sebelumnya dirumah. Perencanaan penting dilakukan agar guru memiliki gambaran atas pembelajaran yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Dengan adanya Kurikulum 2013 yang mengharuskan adanya pengintegrasian KI 1, 2, 3, dan 4

secara holistik dalam materi pembelajaran, maka dalam tahap perencanaan guru tidak boleh lupa untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi tersebut, bukan hanya fokus pada penanaman pengetahuan dan pembentukan keterampilan saja.

Nadzir (2013: 346) menjelaskan bahwa guru harus memperhatikan hal-hal berikut. 1) Signifikansi yaitu perencanaan harus melihat aspek dikaitkan dengan tujuan pendidikan untuk mencapai tuntutan KI 1, 2, 3, dan 4; 2) Fleksibilitas yaitu perencanaan harus disusun berdasarkan pertimbangan realistis antara biaya, waktu dan tingkat berpikir siswa; 3) Relevansi yaitu berkaitan dengan jaminan adanya hubungan antara materi dengan pengembangan sikap spiritual dan tanggung jawab, dan pengembangan keterampilan; 4) Kepastian yaitu perencanaan dibuat dengan mengurangi kejadian yang tidak terduga di luar perencanaan; 5) Ketelitian yaitu perencanaan disusun secara sederhana dan ada relevansi; 6) Adaptabilitas yaitu pembelajaran bersifat dinamis, sehingga perencanaan harus fleksibel dan dapat dirancang untuk menghindari hak-hal yang tidak diharapkan; 7) Waktu yaitu perencanaan pembelajaran harus memperhatikan alokasi waktu yang tersedia; 8) Monitoring yaitu pengembangan kriteria untuk menjamin bahwa komponen pembelajaran bekerja dengan efektif; 9) Isi perencanaan yaitu memperhatikan: a) tujuan untuk mentransfomasikan pengetahuan, sikap spiritual dan sikap tanggung jawab, dan keterampilan sesuai tuntutan KI 1, 2, 3, dan 4; b) program dan layanan; c) tenaga manusia; d) keuangan, e) bangunan fisik; f) struktur organisasi; g) konteks sosial.

Marzuki (2013: 8) menjelaskan bahwa pada prinsipnya, perencanaan pembelajaran agar bernuansa moral, maka silabus dan RPP yang disusun harus mengintegrasikan pendidikan karakter. dengan demikian, untuk pembentukan karakter tangung jawab maka guru harus mengintegrasikan nilai karakter tanggung jawab pada materi pembelajaran yang disusun dalam perencanaan pembelajaran dengan mempertimbakan signifikansi, relevansi, fleksibilitas, kepastian, ketelitian, adaptabilitas, waktu, monitoring, dan isi perencanaan.

2. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran pada dasarnya, merupakan kegiatan pelaksanaaan atas perencanaan yang telah dirancang pada tahap perencanaan, hanya saja, dilakukan pada tahap pelaksanaan. Pelaksanaan pembelajaran terdiri

atas kegiatan pendahaluan, pelaksanaan dan penutup sebagaimana yang dimuat dalam RPP yang berisi langkah-langkah dari suatu model pembelajaran. Dengan demikian guru perlu menentukan model pembelajaran apa yang cocok diterapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan termasuk membentuk karakter tangggung jawab peserta didik.

Model-model pembelajaran kooperatif dapat digunakan untuk membentuk nilai karakter tanggung jawab peserta didik mengingat dengan kerja kelompok, setiap peserta didik memiliki tanggung jawab masing-masing untuk kepentingan bersama. Beberapa model pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengembangkan karakter salah satunya tanggung jawab antara lain *Numbered Heads Together* (NHT), *make a match*, *Student Teams Achievement Divisions* (STAD), *Team Game Tournament* (TGT), dan Jigsaw (Afandi, Hamalah & Wardani, 2013: 16). Simulasi dan *role playing* juga merupakan model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Mechouat, 2017: 262). *Structured Numbered Heads* juga efektif untuk mengembangkan karakter tanggung jawab peserta didik, mengingat kelebihan model *Structured Numbered Heads* adalah memudahkan pembagian tugas, memudahkan siswa belajar untuk melaksanakan tanggung jawab individu sebagai anggota kelompok, dan dapat diterapkan dalam semua mata pelajaran di berbagai tingkatan kelas (Huda, 2012: 139).

Model-model pembelajaran yang membentuk karakter menurut Schuitema, ten Dam, dan Veugelers (2008: 75) yaitu kelas diskusi atau diskusi dalam kelompok kecil, pembelajaran berbasis masalah, bekerja dengan kelompok, diskusi, dan menggunakan topik subjek yang mencakup masalah moral, dilema, dan nilai. Diskusi dan interaksi juga dianggap penting untuk mengembangkan karakter peserta didik (Lickona, Schaps, dan lewis, 2002: 2). Guru juga bisa mengggunakan cerita (*Strory Telling*) untuk mengajarkan informasi faktual, mengeksplorasi nilai-nilai budaya, dan membantu siswa untuk mengembangkan nilai (Demircioglu, 2010: 105).

Model *discovery learning* dan *project based learning* disarankan sebagai model pembelajaran untuk membentuk karakter tanggung jawab mengingat kedua model tersebut merupakan model pembelajaran kooperatif yang menuntut pembagian tugas. Selain itu, hal ini dikarenakan adanya Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan yang mengamanatkan guru untuk menerapkan pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian (*discovery/inquiry learning*) untuk memperkuat pendekatan saintifik, tematik dan tematik terpadu. Untuk mendorong kemampuan peserta didik agar menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun kelompok maka disarankan untuk menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*) (Kemendikbud, 2016: 3).

Sanjaya (2011: 283) berpendapat bahwa *Value Clarification Technique* (VCT) dapat membantu siswa mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggapnya baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa. Berdasarkan hal tersebut, VCT dapat digunakan sebagai model pembelajaran untuk mengembangkan karakter salah satunya tanggung jawab. Penentuan model pembelajaran yang harus disesuiakan dengan: 1) tujuan pembelajaran yang mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai KI dan KD; 2) karakteristik peserta didik; 3) alokasi waktu; 4) sumber belajar dan media pembelajaran yang tersedia; 5) kompetensi guru, 6) sarana dan prasarana. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah pembelajaran yang telah disusun dalam RPP. Guru hendaknya memiliki kompetensi untuk melaksanakan pembelajaran serta mampu menguasai proses pembelajaram dikarenakan selalu ada kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

3. Penilaian Pembelajaran

Penilaian pembelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Pasal 1 ayat (2) adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik Pada dasarnya ada tiga jenis penilaian, yaitu penilaian pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor), dan sikap (afektif). Winarno, (2013: 223) menyebutkan ada tujuh teknik penilaian yang berbasis kelas yang dapat digunakan, yaitu penilaian unjuk kerja, penilaian sikap, penilaian tertulis, penilaian proyek, penilaian produk, penggunaan porto folio, dan penilaian diri. Berdasarkan ketujuh teknik penilaian tersebut, teknik penilaian sikap cocok

digunakan untuk menilai karakter peserta didik dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter.

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian menjelaskan penilaian sikap merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Pasal 12 ayat (1) menjelaskan penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan: 1) mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran; 2) mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi/pengamatan; 3) menindaklanjuti hasil pengamatan; 4) mendeskripsikan perilaku peserta didik.

Penilaian karakter tanggung jawab dapat dilakukan dengan menggunakan penilaian sikap, yaitu observasi, penilaian diri, penilaian antarpeserta didik, atau jurnal. Penilaian pembelajaran untuk menilai karakter tanggung jawab siswa dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung dan setelah proses pembelajaran berlangsung. Observasi dan jurnal merupakan jenis penilaian pada saat proses berlangsung. Sementara penilaian setelah proses berlangsung dapat dilakukan dengan penilaian diri dan penilaian antarpeserta didik. Dalam menyusun penilaian guru hendaknya menyusun rubrik penilaian yang jelas. Untuk mengukur keberhasilan pengembangan karakter tanggung jawab, guru sebaiknya menggunakan minimal dua bentuk penilaian, misalnya observasi dan penilaian diri.

KESIMPULAN

Strategi pembelajaran PPKn untuk membentukan karakter tanggung jawab peserta didik dapat dilaksanakan dengan mengintegrasikan nilai tanggung jawab secara holistik pada tahapan pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian. Perencanaan pembelajaran dilakukan dengan membuat silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengintegrasikan nilai tanggung jawab sebagai KI 2 dengan memperhatikan KI 1, 3 dan 4 pada setiap materi pembelajaran.

Tahap pelaksanaan pembelajaran merupakan pelaksanaan atas langkah-langkah model pembelajaran yang telah disusun dan direncanakan dalam RPP. Guru dapat memilih model pembelajaran dengan mempertimbangkan: 1) tujuan

pembelajaran yang mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai KI dan KD; 2) karakteristik peserta didik; 3) alokasi waktu; 4) sumber belajar dan media pembelajaran yang tersedia; 5) kompetensi guru; 6) sarana dan prasarana. Model pembelajaran yang disarankan dapat membentuk karakter tanggung jawab antara lain *Structured Numbered Heads*, Jigsaw, *Value Clarification Technique*, *Story Telling*, *discovery Learning*, dan Pembelajaran Berbasis Proyek. Penilaian karakter tanggung jawab dapat dilakukan guru dengan menggunakan penilaian sikap yang berupa observasi, penilaian diri, penilaian antarpeserta didik, atau jurnal dengan menyertakan rubrik penilaian yang jelas. Untuk menilai karakter tanggung jawab, sebaiknya menggunakan dua jenis penilaian sikap seperti observasi dan penilaian diri.

DAFTAR PUSTAKA

Barbara A. Lewis. 2004. *Character Building untuk Remaja*. (Terjemahan: Arvin Saputra), Batam, Karisma Publising Group.

Demircioglu, Ismail H. 2010. *Using Historical Stories to Teach Tolerance: the Experiences of Turkish Eighth-Grade Students*, The Social Studies, 99 (3), 105-110.

Fitri, Agus Zaenal. 2012. *Pendidikan Karakter Berbasis Nilai dan Etika di Sekolah,* Yogyakarta, Ar-Ruzz Media.

Harahap, N. 2014. *Penelitian Kepustakaan*, Jurnal Iqra,8 (1), 68-74.

Huda, Miftakhul. 2012. *Cooperative Learning: Metode, Teknik, Struktur dan Model Penerapan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Jalaludin. 1997. *Psikologi Agama,* Jakarta, Grafindo.

Kemendikbud. 2016. *Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Kemendikbud.

Koesoema, D. 2010. *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global.* Jakarta, Gramedia.

Lickona, T., Schaps, E., & Lewis, C. 2002. *Eleven Principles Effective Character Education*, Retrieved from https://digitalcommons.unomaha.

edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1065&context=slcestgen, diakses tanggal 29 Oktober 2017.

Marzuki. 2011. Integrasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama. Retrieved from http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/dr-marzuki-mag/dr-marzuki-mag-integrasi-pendidikan-karakter-dalam-pembelajaran-di-smp.pdf, diakses tanggal 29 Oktober 2017.

Marzuki. 2013. *Etika Moral dalam Pembelajaran*. Retrieved from http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/dr-marzuki-mag/49-etika-dan-moral-dalam-pembelajaran-marzuki-2013.pdf, diakses tanggal 29 Oktober 2017.

Mechouat, K. 2017. *Approaching and Implementating Civic Education Pedagogies and Engagement Values in the Moroccan Classrooms: Gender-Based Perspectives,* European Scientific Journal. 13 (7). 256-276.

Muslich. 2011 *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*, Jakarta, Bumi Aksara.

Mustari, Mohamad. 2014. *Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Nadzir, M. 2013. *Perencanaan Pembelajaran Berbasis Karakter*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, 2 (2), 338-352.

Nasution, S. 1988. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung, Tarsito.

Nurul Zuriah, 2008. *Pendidikan Moral & Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan*, Jakarta, Bumi Aksara.

Pasal 20 PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peterson, Penelope L., Marx, Ronald W. & Clark, Christopher M. (1978). *Planning, Teacher Behaviour, and Student Achievement.,* American Education Research Journal, 15 (3), 417-432.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Sistem Penilaian Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Poerwandari, K. 2005. *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta, UI.

Salahudin, Anas. 2013. *Pendidikan Karakter Berbasis Agama & Budaya Bangsa*, Bandung, Pustaka setia.

Sanjaya, Wina. 2011. *Penelitian Tindakan Kelas*, Jakarta: Kencana Prenada.

Sanjaya, Wina. 2012. *Penelitian Tindakan Kelas (cetakan ke II)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group

Schuitema, Jaap; ten Dam, Geert, & Veugelers, Wiel. (2008). *Teaching Strategies for Moral Education: A Review*, Journal of Curriculum Studies, 40 (1), 69-89.

Sunarti, Euis. 2005. *Menggali Kekuatan Cerita*, Jakarta: PT Elek Media Komputindo.

Susiatik, Titik. 2013. *Pengaruh Pembelajaran PPKn terhadap Pembentukan Karakter Siswa*, Majalah Ilmiah Pawiyatan, 20 (4), 58-72.

Taniredja,T., Faridli, M.E. & Harmianto, S. 2011. *Model-Model Pembelajaran Inovatif*. Bandung, Alfabeta.

Torney-Purta, Judith & Lopez, Susan Vermeer. 200. *Developing Citizenship Competencies from Kindergarten Through Grade 12: A Background Paper for Policymakers and Educators*, Denver, Education Commission of the States.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Uno, Hamzah B. 201. *Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang Pendidikan,* Jakarta, Bumi Aksara.

Winarno. 2013. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta, Bumi Aksara.

Winano. 2015. *Integrasi Nilai Karakter dalam Materi Pembelajaran PPKn di SMA.* Prosiding Aktualisasi Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar Menuju Peserrta Didik yang Berkarakter. Surakarta, 353-364.

UPAYA GURU PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKN) DALAM MENGEMBANGKAN SIKAP TOLERANSI BAHASA SISWA

Misbahul Janatti[1], Febriyanti[2]
Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
misbahuljanatti@student.upi.edu
febriyanti02@student.upi.edu

ABSTRAK

Toleransi adalah sikap yang harus ada dalam diri manusia Indonesia yang terdiri dari berbagai latarbelakang budaya atau yang sering diesbut dengan penuh keberagaman atau musltikultural. Tujuan penulisan artikel ini untuk membahas tentang upaya guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam mengembangkan sikap toleransi bahasa siswa. Keberagaman bahasa yang terdapat disekolah merupakan hal keniscayaan karena bahasa dibawa siswa sesuia dengan kebiasaannya dirumah, akan tetapi jika tidak dikelola dengan baik akan mudah terjadi benturan salah paham bahkan konflik antar siswa karena tidak memahami bahasa antara satu dengan yang lainnya. Untuk mencegah hal tersebut diperlukan upaya guru untuk minimalisir benturan atau konflik antara peserta didik. Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Informan penelitian ditentukan dengan cara *porposive sampling.* Jenis data: data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dengan teknik *member chek* sumber dan Triangulasi. Analisa data yang digunakan yaitu Reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan sikap toleransi bahasa siswa dalam kehidupan sekolah berjalan dengan baik. Upaya dilakukan guru dengan memberikan waktu istirahat sebagai penggunaan bahasa daerahnya. Dalam proses pembelajaran dikelas menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar. Pembentukan kelompok belajar siswa agar siswa berdiskusi sehingga akan terbentuk komunikasi antara siswa, memberikan keteladanan kepada siswa dengan hal yang demikian siswa dapat melihat bukti nyata dari apa yang diajarkan oleh guru.

Kata kunci: *Keberagaman, Toleransi, Bahasa.*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, perlu digarisbawahi bahwa bangsa terdiri dari anggota-anggota yang berbeda baik secara kelas, gender, ras, dan suku (Freddy K. Kalidjernih, 2011). Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang masyarakatnya terdiri dari berbagai suku bangsa dan bahasa, hal ini terjadi karena Pasaman Barat yang berada pada Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah tujuan transimigrasi sehingga banyak terdapat berbagai suku bangsa. Suku bangsa yang ada di Kabupaten Pasaman Barat yaitu: suku Minang, Mandailing,

Jawa, Batak, Nias, Sunda dan Melayu. Dari suku bangsa tersebut tentunya memiliki bahasanya masing-masing untuk berkomunikasi dalam suku bangsa tersebut. Keberagaman merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan. jika tidak dikelola dengan baik akan mudah terjadi benturan atau konflik.

Untuk meminimalisasi benturan dan konfilk maka perlu ditanamkan dalam diri peserta didik nilai toleransi bahasa dalam keberagaman karena nilai keberagaman merupakan fakta yang ada pada peserta didik yang secara luas mereka berasal dari berbagai latarbelakang budaya dan mempengaruhi cara hidup atau berprilaku disekolah dilevel yang kecil. Nilai toleransi dalam keberagaman merupakan sebuah kaidah yang menjadi pegangan dalam berinteraksi dengan sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai toleransi dalam keberagaman tersebut perlu dijunjung tinggi bersama oleh suatu komunitas agar terjadi keadaan saling menghargai dan menghormati perbedaan dan persamaan dalam kehidupan bersama. Toleransi merupakan sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Dengan nilai toleransi yang dimiliki oleh peserta didik akan terwujud sikap empaty dan peduli dengan sesama tanpa mempedulikan perbedaan sebagai penghalangnya.(Noddings, 2010). Maka dari itu untuk menjaga keharmonisan dalam suatu negara agar tidak terjadi konflik berkepanjangan diperlukan sikap saling menghormati dan mengakui perbedaan pada semua tradisi kultural. Maka menurut (Freddy K. Kalidjernih, 2011) multikulturalisme adalah suatu kebijakan, pendidikan dan gerakan yang menekankan pengakuan kepada keanekaragaman kultural di masa lampau dan masa kini dan masyarakat guna mempromosikan kesetaraan untuk semua tradisi kultural. Dalam usaha untuk menumbuh kembangkan sikap toleransi terhadap keanekaragaman atau multikulturalisme di Indonesia maka guru disini sangat berperan penting dalam mempromosikan multikulturalisme tersebut diantaranya melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan sikap moral siswa berkaitan dengan toleransi bahasa yang dibawa siswa kesekolah. Kamus besar bahasa Indonesia, arti bahasa adalah lambang bunyi yang arbitrer; yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk

bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasi diri; 2. Percakapan perkataan yang baik; tingkah laku yang baik; sopan santun; baik budinya; menunjukkan bangsa; budi bahasa atau perangai serta tutur kata menunjukkan sifat dan tabiat seseorang (baik buruk kelakukuan menunjukkan tinggi rendah asal atau keturunan).

Dalam PPKn terdapat Pendidikan Multikultural yang mengajarkan tentang keberagaman dimana tujuannya untuk mewujudkan anak didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila terutama terdapat pada sila kedua Pancasila "Kemanusiaan yang adil dan beradab" dalam hal ini jika Pancasila kedua ini telah tercapai maka sikap toleransi akan berjalan dengan baik. PPKn adalah sebuah mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum sekolah. PPKn berusaha membina perkembangan moral anak didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, agar dapat mencapai perkembangan secara optimal dan dapat mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari (Freddy K. Kalijernih, 2011).

Berkaitan dengan pendapat diatas, Lawrence J. Saha dan Aly, 2005 (dalam Zuriah, 2011) menjelaskan bahwa pendidikan multikultural diarahkan untuk mewujudkan kesadaran, toleransi, pemahaman, dan pengetahuan yang mempertimbangkan perbedaan kultural, dan juga perbedaan dan persamaan antar budaya dan kaitannya dengan pandangan dunia, konsep, nilai, keyakinan, dan sikap.

Berangkat dari beberapa penjelasan itulah pentingnya upaya guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mengembangkan sikap toleransi sangat dibutuhkan agar pandangan akan konsep perbedaan dijadikan sebuah anugerah untuk saling mengenal dan menghargai betapa masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, bahasa dan ras.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, alasan peneliti memilih metode ini dengan tujuan utama yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik subjek yang diteliti secara tepat untuk mendeskripsikan data yang didapatkan dilapangan berkaitan dengan upaya guru dalam mengembangkan sikap toleransi bahasa siswa disekolah. Penelitian ini dilaksanakan pada salah satu sekolah di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Informan penelitian adalah guru PPKn dan siswa kelas

VII ditentukan dengan cara *porposive sampling* karena peneliti memilih informan yang sesuai dengan kriteria yang akan diteliti dan mendukung untuk penelitian ini. Jenis data yang digunakan, data primer melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi kepada guru dan siswa yang ada disekolah tersebut. Selanjutnya peneliti juga menggunakan data sekunder yaitu menganalisis data yang telah ada disekolah. Dalam penelitian ini peneliti menguji keabsahan data dengan teknik *member chek* sumber dengan tujuan untuk mengkonfirmasi ulang hasil data yang didapat dari subjek penelitian. Selanjutnya peneliti juga menggunakan teknik triangulasi yaitu membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang didapat dari subjek penelitian agar hasil yang didapatkan benar-benar akurat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bahasa merupakan salah satu bentuk hasil karya budaya yang merupakan alat untuk mengungkapkan apa yang dipelajari dan dipikirkan oleh manusia secara verbal. Bahasa dan kebudayaan memiliki hubungan yang saling keterkaitan, karena bahasa: *language expresses cultural reality, language embodies cultural reality, language symbolizes cultural reality*.(F.X. Rahyono, 2009). *Conversation plays a central role in the way in which citizens relate to public concerns. Conversation. whether they occur between peers, among strangers, between educators and learners, or within an individual's head, are the medium through which we all come to articulate our own moral language*.(Cristopher J. Koliba, 2012). Dengan bahasa kebudayaan pemilik bahasa dapat diketahui, karena realitas kultural yang diungkapkan, diwujudkan serta dilambangkan dengan bahasa. Dengan bahasa dapat mengenali berbagai budaya yang ada dan akan terwujudnya saling memahami dan menghormati antara satu dengan lainnya serta saling terbuka dengan berbeda sukubangsa yang akan membentuk sikap toleransi dan menciptakan keadaan yang damai dan tentram dengan keadaan masyarakat yang multikultual. (Nuraeni, 2012)

Multikultural adalah respon terhadap adanya pluralitas yang kompleks dalam masyarakat yang tidak hanya pengakuan yang dibutuhkan tetapi juga kesadaran budaya yang inklusif dan tranformatif. Multikulturalisme dikembangkan dari pluralisme budaya dengan menekankan kesederajatan budaya yang ada dalam

masyarakat.(Suparlan, 2005). Tujuan yang hendak dicapai pluralisme adalah koeksistensi atau pengakuan terhadap kesetaraan social dan budaya antara beragam kelompok etnik yang ada dalam suatu masyarakat. Pluralisme sebagai suatu pemahaman lebih menekankan entitas perbedaan suatu masyarakat yang satu dengan yang lain dan kurang memperhatikan interaksi. Multikulutral sebagai suatu paham yang menekankan pada interaksi dengan memperhatikan keberadaan setiap kebudayaan sebagai entitas yang memiliki hak-hak yang setara atau sama. (Liliweri, 2005).

Pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan kewarganegaraan bermaksud untuk mempersiapkan generasi muda untuk menjadi warganegara yang baik dan dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan negaranya. Proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggungjawab sebagai warganegara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran dan belajar dalam proses penyiapan warganegara tersebut. (Budimansyah., 2010)(Samsuri, 2012)(Udin S. Winataputra, 2012).

Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran pendidikan karakter yang didalamnya termasuk karakter toleransi. Toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya (Saripudin, 2017). Dengan hal yang demikian sesuai dengan tujuan pendidikan di Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, bernilai luhur, berkeptibadian yang mantap, mandiri dan bertanggungjawab. Sikap toleransi yang ada dalam diri seseorang akan menghasilkan sikap sehari-hari dalam kehidupan sikap menghargai orang lain dan lingkungan, persahabatan, ramah dan terbuka kerena dapat menghargai dan menerima pribadi lain (Qiqi Yiliati Zakiyah & Rusdiana, 2014).

Sejalan dengan pendapat diatas, menurut (Zuriah, 2011) Pendidikan Kewarganegaraan Multikultural dapat menjadi elemen yang ku-at dalam kurikulum

Indonesia untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan hidup *(life skills),* di tengah masyarakat Indonesia yang multikultur dan mencakup berbagai macam perspektif budaya yang berbeda terutama dalam bingkai kearifan lokal.

Agar terwujudnya sikap toleransi pada siswa agar saling menghormati, memahami dalam masyarakat yang multicultural, perlu adanya upaya guru yang kreatif untuk mewujudkan hal tersebut. Karena peranan guru sangat penting dalam merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran disekolah. Sekolah sebagai bagian masyarakat multicultural yang terkecil, dengan demikian hal ini bisa terapkan bagaimana siswa mempelajari dan memahami sikap toleransi sehingga dalam dunia nyata atau dalam masyarakat yang sesungguhnya. Sekolah merupakan lembaga pendidikan kedua setelah keluarga, yang memiliki fungsi melanjutkan pendidikan yang di dapatkan di rumah dengan guru sebagai pendidiknya (Uyoh Sadulloh, 2015);(Applebaum, 2006). Adapun upaya guru mewujudkan sikap toleransi di sekolah dengan model pendidikan: pendidikan berbasis nilai kehidupan/*living values,* sehingga dengan mudah mengeinternalisasikan dan mengimplementasikan nilai yang diharapkan. Pendidikan berbasis budaya sekolah/*school culture* karena masing-masing sekolah memiliki keunikan dalam *character building.* Pendidikan melibatkan aspek *knowing the good*, *desiring the good/loving the good and acting the good.* Pendidikan yang terintgrasi dalam seluruh kegiatan sekolah meliputi: kegiatan pembelajaran, pembiasaan/habituasi, dan kegiatan ekstrakurikuler.(Saripudin, 2017). Dari upaya guru yang diterapkan disekolah maka nilai toleransi yang diterapkan pada siswa akan menjadi modal bagi siswa dalam menghadapi kehidupan yang multicultural, karena toleransi harga mati yang harus dipertahankan guna menciptakan kehidupan yang harmonis terbebas dari konflik. Dalam proses pembelajaran guru bisa berupaya dengan membentuk siswa kedalam beberapa kelompok yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang ada dikelas, dengan demikian siswa akan memahami akan sikap saling toleransi antara satu dengan yang lain, sehingga akan mencapai kedamaian bagi siswa. Dengan pembagian pada beberapa kelompok belajar maka siswa saling berinteraksi, didalam kelas siswa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa dan bahasa daerah bisa diterapkan diluar jam pelajaran dikelas.

KESIMPULAN

Bahasa merupakan salah satu bentuk hasil karya budaya yang merupakan alat untuk mengungkapkan apa yang dipelajari dan dipikirkan oleh manusia secara verbal. Bahasa dan kebudayaan memiliki hubungan yang saling keterkaitan, karena bahasa: *language expresses cultural reality, language embodies cultural reality,language symbolizes cultural reality.* Multikulturalisme dikembangkan dari pluralisme budaya dengan menekankan kesederajatan budaya yang ada dalam masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan bermaksud untuk mempersiapkan generasi muda untuk menjadi warganegara yang baik dan dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan negaranya. Toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Upaya guru mewujudkan sikap toleransi di sekolah dengan model pendidikan: pendidikan berbasis nilai kehidupan/*living values*, sehingga dengan mudah mengeinternalisasikan dan mengimplementasikan nilai yang diharapkan. Pendidikan berbasis budaya sekolah/*school culture* karena masing-masing sekolah memiliki keunikan dalam *character building.* Pendidikan melibatkan aspek *knowing the good, desiring the good/loving the good and acting the good.* Pendidikan yang terintgrasi dalam seluruh kegiatan sekolah meliputi: kegiatan pembelajaran, pembiasaan/habituasi, dan kegiatan ekstrakurikuler.

DAFTAR PUSTAKA

Budimansyah., D. (2010). *Penguatan pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter bangsa* (Pertama). Bandung: Widya Aksara Press.

Cristopher J. Koliba. (2012). Moral Language and Network of Engagement: Service Learning and Civic Education. https://doi.org/10.1177/00027640021955621.

Departemen Pendidikan Nasional, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

F.X. Rahyono. (2009). *KEARIFAN BUDAYA DALAM KATA* (cet. I). Jakarta: Penerbit Wedatama Widya Sastra.

Freddy K. Kalijernih. (2011). *KONSEP DAN ISU KEWARGANEGARAAN* (Ed. III). Bandung: Widya Aksara Press.

Liliweri, A. (2005). *Prasangka & Konflik Komunikasi Lintas Budaya*. Yogyakarta: LKiS.

Nuraeni, H. G. & M. A. (2012). *Studi Budaya di Indonesia*. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA.

Qiqi Yiliati Zakiyah & Rusdiana. (2014). *PENDIDIKAN NILAI KAJIAN TEORI DAN PRAKTIK DI SEKOLAH*. Bandung: PUSTAKA SETIA.

Samsuri. (2012). *Pendidikan karakter warganegara: Kritik pembangunan karakter bangsa*. Surakarta: Pustaka Hanif.

Saripudin, K. komalasari & D. (2017). *PENDIDIKAN KARAKTER Konsep dan Aplikasi Living Values Education*. Bandung: PT. Rafika Aditama.

Suparlan, P. (2005). *Sukubangsa dan Hubungan Antar Sukubangsa*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

Udin S. Winataputra, D. B. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam perspektif internasional (konteks, teori dan profil pembelajaran)*. Bandung: Widya Aksara Press.

Uyoh Sadulloh. (2015). *PEDAGOGIK (Ilmu Mendidik)*. Bandung: Alfabeta.

Zuriah, N. (2011). Model Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal Dalam Fenomena Sosial Pasca Reformasi Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Penelitian*, *12*(2), 63–72.

Applebaum, B. (2006). Moral Education: A Teacher-Centeres Approach. https://doi.org/10.1177/1477878506064555.

Noddings, N. (2010). Moral education and caring. https://doi.org/10.1177/147787851036861

INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) DI PERGURUAN TINGGI

Suyahman
Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo
sym_62@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan internalisasi nilai-nilai Pancasila Melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) di perguruan tinggi. Subjek penelitiannya: dosen PKn dan mahasiswa yang mengambil matakuliah PKn di UMS Surakarta, objeknya: internalisasi nilai-nilai Pancasila dan pembelajaran PKn. Metode pengumpulan datanya: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data dilakukan dengan triangulasi data dan metode. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis interaktif mengalir yang terdiri dari 3 langkah yaitu: reduksi data, display data dan verifikasi data..Hasil penelitian menunjukan bahwa masih banyaknya penyimpangan nilai-nilai pancasila yang dilakukan oleh mahasiswa teknik elektro semester gasal tahun akademik 2017-2018 dalam proses pembelajaran PKn.Ini adalah tantangan bagi Dosen PKn harus mampu mencarikan solusi yang tepat sehingga dapat menggunakan matakuliah PKn sebagai sarana internalisasi nilai-nilai pancasila kepada para mahasiswanya. Simpulannya internalisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, dengan cara dosen dalam memberikan perkuliahan senantiasa memberikan keteladanan-keteladanan daalam sikap, perilaku dan perbuatan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila tidak diajarkan dalam perkuliahan akan tetapi dididikan oleh dosen melalui perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Berdasarkan kesimpulan penelitian disarankan setiap dosen dapat memberikan keteladanan nyata sikap, perilaku dan tindakannya mencerminkan nilai-nilai pencasila selama proses perkuliahan PKn.

Kata Kunci*: Nilai-Nilai Pancasila dan Pembelajaran PKn*

PENDAHULUAN

Dari sudut sejarah, Pancasila sebagai dasar negara pertama-tama diusulkan oleh Ir.Soekarno pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 1 Juni 1945, yaitu pada waktu membahas Pancasila sebagai dasar negara. Sejak saat itu pula Pancasila digunakan sebagai nama dari dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, meskipun untuk itu terdapat beberapa tata urut dan rumusan yang berbeda.

Pancasila sebagai dasar negara, hal ini berarti bahwa setiap tindakan rakyat dan Negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Secara historis, Pancasila diambil dari budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga mempunya fungsi dan

peranan yang sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sejarah membuktikan pada 1 Oktober 1965, persatuan dan kesatuan segenap kekuatan yang setia kepada Pancasila mampu mematahkan pemberontakan G30S/PKI yang bertujuan mengubah Pancasila dan meninggalkan UUD 1945. Peristiwa tersebut membuktikan usaha mengganti Pancasila dengan ideologi lain akan mendapat perlawanan rakyat Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila bersifat universal, sehingga harus diinternalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi cermin dalam bersikap, berperilaku dan berbuat bagi semua warga negara indonesia. Dalam konteks kehidupan mahasiswa , nilai-nilai Pancasila harus diterapkan bagi mahasiswa dalam kehidupan di kampus perguruan tinggi. Karenanya pembelajaran khususnya mata kuliah pengembangan kepribadian mahasiswa (MPK) yaitu diantaranya PKn tidak hanya sebatas transfer pengetahuan sehingga hanya menekankan ranah koqnitif dan aspek ingatan saja, akan tetapi sebaliknya harus mengedepankan aspek sikap dan keterampilan mahasiswa.

Kenyataannya di lapangan ditemukan bahwa kecenderungan dosen hanya menekankan aspek pengetahuan saja, dampaknya adalah sikap, perilaku, dan perbuatan mahasiswa banyak yang kurang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Penelitian ini difokuskan pada internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran PKn di Perguruan tinggi. Pokok permasalahan dirumuskan bagaimanakah menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran PKn pada mahasiswa di Perguruan tinggi?.

Tujuan penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran PKn pada mahasiswa teknik elektro Universitas Muhammadiyah surakarta tahun akademik 2017-2018.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Subjek penelitian ini adalah dosen dan mahasiswa Teknik elektro semester I tahun akademik 2017-2018, dan objek penelitiannya adalah internalisasi nilai-nilai Pancasila dan pembelajaran

PKn. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk megetahui kevalidan data, dilakukan triangulasi data dan triangulasi metode. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interaktif yang terdiri dari 3 langkah yaitu: reduksi data, display data, dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Pancasila sebagai suatu ideologi mengandung nilai-nilai yang disaring dan digali dari nilai-nilai luhur dan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut memberikan pengaruh bentuk sikap dan perilaku yang positif. Nilai dapat diartikan sebagai kualitas atau isi dari sesuatu. Orang yang akan menilai berarti menimbang sesuatu. Artinya, suatu kegiatan manusia yang menghubungkan sesuatu dengan sesuatu untuk selanjutnya mengambil suatu keputusan.

Keputusan tersebut dapat menggambarkan apakah sesuatu itu berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, religious atau tidak religius. Sesuatu dikatakan bernilai apabila ia mempunyai kegunaan, keberhargaan (nilai kebenaran), keindahan (nilai estetis), kebaikan (nilai moral atau etis) mengandung unsur religius (nilai agama). Sesuatu yang bernilai akan selalu dihargai dan dihormati di manapun sesuatu itu berada. Suatu contoh, sebatang emas akan tetap menjadi barang yang dicari dan diminati orang banyak, walaupun berada di tempat yang kotor sekalipun, karena emas dianggap sebagai barang yang berharga. Demikian pula seseorang yang selalu mematuhi dan menjalankan ketentuan-ketentuan agama akan selalu dihormati oleh orang lain karena orang itu mencerminkan nilai-nilai religius.

Secara terinci nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah sebagai berikut:

Sila pertama Pancasila yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa" mengandung dua pengertian pokok, yaitu tentang Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, yaitu zat yang maha kuasa, yang menciptakan alam semesta. Oleh sebab itu, tidak satu pun yang dapat menyamai-Nya, Dia dzat yang Mahasempurna. Secara rinci nilai-nilai yang terkandung dalam sila Ketuhanan

Yang Maha Esa adalah: a) Adanya sikap percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b) Kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. c) Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama antarpemeluk beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. d) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. e) Hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak asasi yang paling hakiki. f) Tiap-tiap penduduk mempunyai kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. g) Tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang dan h) Tiap-tiap penduduk mempunyai kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Kemanusiaan yang adil dan beradab mencerminkan sifat hakiki manusia sebagai makhluk sosial (*homo socius*). Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sebagai berikut: a) Mengakui dan menghargai manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. b) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban tanpa membeda-bedakan agama dan kepercayaan, suku, ras, keturunan, adat, status sosial, warna kulit, jenis kelamin, dan lain sebagainya. c) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap tenggang rasa (*tepo seliro*). d) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. e) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. f) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, dan g) Berani membela kebenaran dan keadilan dengan penuh kejujuran.

Sila Persatuan Indonesia terdiri dari dua kata yang penting yaitu persatuan dan Indonesia. *Persatuan* berasal dari kata satu, yang berartiutuh, tidak pecah-belah. Sedangkan persatuan mengandung pengertian disatukannya berbagai macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kesatuan.Dengan demikian, secara lebih rinci sila Persatuan Indonesia mengandungnilai-nilai sebagai berikut: a) Dapat menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. b) Rela berkorban untuk

kepentingan bangsa dan negara. c) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. d) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, dan e) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Untuk menjelaskan sila ini ada beberapa kata yang perlu dipahami, yaitu, hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan, kerakyatan. Kerakyatan juga sering disebut kedaulatan rakyat. Hal ini berarti rakyatlah yang berkuasa, rakyatlah yang memerintah atau sering disebut dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. *Hikmat kebijaksanaan* mempunyai arti suatu sikap yang dilandasi penggunaan akal sehat dan selalu mempertimbangkan kepentingan persatuan dan kesatuan. *Permusyawaratan* berarti suatu tata cara yang khas bagi bangsa Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan sesuatu berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai keputusan mufakat. *Perwakilan* berarti suatu tata cara untuk mengusahakan ikut sertanya rakyat mengambil bagian dalam urusan Negara. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpinoleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah: a) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. b) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. c) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. d) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai dalam musyawarah. e) Dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakan hasil putusan musyawarah. f) Dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan, dan g) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Keadilan sosial adalah keadaan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Artinya, keadilan itu tidak untuk golongan tertentu saja tetapi untuk seluruh masyarakat indonesia, tanpa membedakaan kekayaan, jabatan maupun suku tertentu. Secara rinci nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah: a) Mengembangkan perbuatan yang luhur,

yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. b) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Menghormati hak orang lain. c) Suka memberi pertolongan kepada orang lain. d) Tidak menggunakan hak milik perorangan untuk memeras orang lain. e) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. f) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. g) Suka bekerja keras. h) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, dan i) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial.

Berdasarkan penjabaran nilai-nilai Pancasila di atas, dalam kenyataannya banyak dilakukan pelanggaran dikalangan mahasiswa. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengamatan yang peneliti lakukan sejak tanggal 23 agustus hingga 23 oktober tahun 2017. Dari hasil pengamatan dilakukan ditemukan beberapa pelanggaran nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh mahasiswa diantaranya: untuk nilai Ketuhanan: mahasiswa melaksanakan sholat dhuhur dan ashar terlambat, mahasiswa memulai dan mengakhiri perkuliahan tidak dengan berdoa, mahasiswa mendengar ada kematian tidak memebrikan reaksi apa-apa, mahasiswa tidak peduli terhadap temannya yang baru menjalankan pusasa Senin dan kamis karena ketika makan dan minum berada di depan temannya yang sedang berpuasa, Nilai Kemanusiaan: dalam memilih eklompok diskusi mahasiswa membeda-bedakan agama, suku dan budaya, dalam memberikan pertolongan pilih kasih, dalam memberikan donor darah memilih temannya yang seagama, nilai Persatuan : mahasiswa tidak berani melaporkan kepada dosennya temannya yang megerjakan tugas dengan cara plagiat, mahasiswa tidak berani melaporkan kepada dosennya yang melihat temannya asyik melihat video porno di HP, mahasiswa tidak berani melaporkan temannya yang memalak teman lainnya, mahasiswa tidak berani melaporkan temannya yang selalu menjadi rpovokator di kelasnya, sila Kerakyatan: dalam diskusi mahasiswa tidak mengahargai dan meghormati pendapat temanya, dalam diskusi mahasiswa selalu memaksakan kehendaknya, dmahasiswa tidak melaksanakan hasil diskusi secara bertanggung jawab, dan Sila Keadilan: dalam membagi materi diskusi mahasiswa tidak adil,

Demikian juga hasil pengamatan terhadap Dosen ketika memberikan perkuliahan pendidikan kewarganegaraan ditemukan beberapa hal yang kurang menginternalisasi nilai-nilai pancasila misalkan: ketika memulai dan mengakhiri perkuliahan Dosen tidak mengajak mahasiswa untuk berdoa, ketika dosen terlambat datang tidak menjelaskan alasan keterlambatannya, ketika dosen mengakhiri perkuliahan lebih juga tidak menjelaskan alasannya, dosen tidak menegur mahasiswa yang terlambat, dosen dalam memberi nilai diskusi kelompok tidak adil, dosen kurang peduli terhadap mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam menerima materi perkuliahaan, dosen kurang menghargai dan menghormati poendapat mahasiswa yang berbeda, dosen memaksakan kehendaknya ketika menjawab pertanyaaan mahasiswa.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

Pertama: bahwa perkuliahan pendidikan kewarganegaraan saat ini kurang mampu untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila kepada mahasiswa. Dampaknya adalah banyak sikap, perilaku dan perbuatan mahasiswa yang kurang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di kampus UMS, Kedua: Perkuliahan pendidikan kewarganegaraan saat ini lebih menekankan pada target materi dan hanya menekankan aspek pengetahuan mahasiswa sehingga kurang menyentuh ranah sikap dan perbuatan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ketiga: Dosen dalam memberikan perkuliahan pendidikan kewarganegaraan kurang memberikan keteladanan sikap, perilaku dan perbuatan yang mecerminkan nilai- nilai pancasila kepada mahasiswa.

2. Pembahasan

Temuan dilapangan yang menunjukan lemahnya nilai-nilai Pancasila dikalangan mahasiswa. Hal ini ditunjukan dengan indikator-indikator: nilai Ketuhanan : adanya kebiasaan mahasiswa melaksanakan ibadah dhuhur dan ashar tidak tepat waktu, ketidak jujuran mahasiswa dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen cenderung copi paste, membiarkan temannya melihat film atau gambar-gambar porno di HP.Nilai Kemanusiaan: sikap membeda-bedakan dalam memilih kelompok diskusi, membeda-bedakan dalam hal tolong – menolong,

Nilai Persatuan: ketidak beranian mahasiswa melaporkan temannya yang melakukan muniman keras, merokok, dan tidak sopan dengan dosennya, pembiaran terhadap temannya yang dimalak oleh teman lainnya, membangga-banggakan produk lua negeri, nilai Kerakyatan: memaksakan kehendak dalam berdiskusi, tidak menghargai dan menghormati pendapat yang berbeda, tidak melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab, Nilai keadilan: pembagian tugas materi diskusi yang tidak adil, cenderung hidup berbudaya konsumtif

Berdasarkan kenyataan di lapangan tersebut, maka harus diupayakan bagaimana perkuliahan pendidikan kewarganegaraan yang mampu menjadi sarana internalisasi nilai-nilai pancasila. Seperti hasiol penelitian Nurdin (2016) yang menyimpulkan bahwa perkuliahan pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi sarana internalisasi nilai-nilai Pancasila jika dalam perkuliahan Dosen memberikan contoh-contoh konkrit tentang sikap, eprilaku dan perbuatan yang mencerminkan nilai-nilai pancasila kepada mahasiswa. Juga Safriahti(2017) dalam penelitiannya yang menyimpulkan bahwa perkuliahan pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi sarana internalisasi nilai-nilai Pancasila jika dalam proses perkuliahan Dosen meghargai adanya perbedaan pendapat, dosen berlaku adil, dosen disiplin, dosen bersikap terbuka, dosen tidak memaksakan kehendaknya serta dosen mengawalidan megakhiri perkuliahaan dengan berdoa, dan perkuliahan menyentuh pada ranah sikap, perilaku juga pengetahuan mahasiswa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui perkuliahan pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa Teknik Elektro semester gasal tahun akademik 2017-2018 di UMS Surakarta: jika dalam proses perkuliahan dosen lebih menekankan pada aspek sikap , perilaku dan perbuatan, dosen menghargai dan menghormati adanya perbedaan pendapat selama perkuliahan berlangsung, dosen tidak emmaksakan kehendaknya kepada mahasiswa, dosen bersikap adil dan terbuka, dosen memulai dan mengakhiri perkuliahan dengan berdoa, dosen selalu bermusyawarah dalam menghadapi permasalahan yang

dihadapi mahasiswa, mtode perkuliahan menggunakan bermain peran, demontrasi, dan simulasi.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya Wahyu Nugroho, 2014, Makalah Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Mahasiswa

Asmani, jamal ma'mur, 2011. Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah . Jogjakarta: DIVA Press (Anggota IKAPI)

Bedjo, Akhyar Zainul. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education Untuk Perguruan Tinggi , Banjarmasin: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat

Hamid, Darmadi, 2010. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Alfabeta.

Kabar pendidikan, 2011.Proses Internalisasi Nilai. (Online). (http://kabar-pendidikan. blogspot. com. Diakses tanggal 10 Nopemebr 2017.

Kaelan Dan Ahmad Zubaidi, 2007, pendidikan Kewarganegaraan, untuk Perguruan Tinggi, Yogyakarta: paradigma

Lexy, J. Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departement Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.336

Mukhamad Murdiono , 2010, Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Moral Religius Dalam Proses Pembelajaran Di Perguruan Tinggi, Jornal *Cakrawala Pendidikan,* Mei 2010, Th. XXIX, Edisi Khusus Dies Natalis UNYFISE Universitas Negeri Yogyakarta (e-mail: mukhamad_murdiono@uny.ac.id;

Maftuh, Bunyamin. 2008. "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dan Nasionalisme Melalui Pendidikan Kewarganegaraan." *Educationist* II (2): 134–43.

Nazir, Moh.2005. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017, tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Creswell, J.W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among !ve approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Sumarsono. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D),Bandung: Alfabeta

Syarbaini, Syahrial. 2006. Membangun karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: University Press.

Keputusan Dirjen Dikti No. 43 Tahun 2006 Tentang Rambu-Rambu Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian

UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Cemerlang

Wahyudi. 2016. "Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia." In *Seminar Nasional Inovasi Pendidikan 6 Agustus 2016*, 382–94.

Winarno. 2005. Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Widodo, Eko.Taufiqurrahman .2009 .Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta : CV Sari Ilmu Pratama.

INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI PEMBELAJARAN PKN UNTUK MEWUJUDKAN *GOOD AND SMART CITIZEN*

Risladiba[1]
Dieta Ayu Lestary[2]
Ricky Engel Mawara[3]

Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia
risladiba24@gmail.com
dietayulestary@yahoo.com
ricky.mawara@yahoo.co.id

ABSTRAK

Internalisasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi ini perlu diperkuat kembali. Mengingat begitu derasnya efek yang ditimbulkan karena pengaruh globalisasi. Apabila, peserta didik tidak dibekali dengan penguatan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila, maka peserta didik tersebut dapat dengan mudah terbawa dampak negatif dari globalisasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tidak dapat disangsikan lagi, bahwa dewasa ini nilai-nilai Pancasila di kalangan peserta didik sudah mulai memudar. Hal tersebut dapat dilihat dengan semakin maraknya perilaku peserta didik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti halnya tawuran antar pelajar, perilaku bullying kepada sesama teman. Oleh karena itu, penting adanya internalisasi nilai-nilai Pancasila yang dapat dilakukan melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Mengingat peran Pendidikan Kewarganegaraan yang sangat strategis untuk pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan bagaimana internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran PKn sehingga dapat mewujudkan *good and smart citizen*. Metode yang digunakan adalah studi literasi, yakni dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan pada penulisan artikel ini. Untuk mendukung upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran PKn, maka perlu diupayakan pembelajaran PKn yang memiliki kekuatan (*powerful*), yakni hendaknya bermuatan nilai (*value-based*), hendaknya bermakna (*meningful*), mengundang siswa untuk aktif dalam belajar, pembelajaran terpadu, hendaknya mampu mengundang kemampuan berpikir siswa pada taraf yang lebih tinggi, hendaknya demokratis, hendaknya menyenangkan (*joyful*), dan hendaknya kreatif. Berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan, bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila melalaui pembelajaran PKn masih belum maksimal. Sehingga, dengan adanya internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran PKn, diharapkan sikap dan perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang pada akhirnya dapat mewujudkan peserta didik sebagai *good and smart citizen*.

Kata Kunci: *Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila, Pembelajaran PKn, Good and Smart Citizen*

PENDAHULUAN

Dekandensi moral kewargaan di Indonesia merupakan suatu hal yang sedang terjadi dan terus berlanjut. Berbagai permasalahan yang muncul ke permukaan semakin menyadarkan kita bahwa ada sesuatu yang salah dengan sebagian besar *mindset* kewargaan yang mendiami nusantara ini. Mulai dengan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, radikalisme, makar, tawuran antar pelajar, bullying, kasus pembunuhan yang hampir setiap hari kita dengar dari berita, dan masih banyak lagi. Negara kesatuan yang dibangun dari pengorbanan jiwa dan raga para pahlawan seperti kurang dihargai. Generasi muda saat ini seakan-akan tidak peduli bahwa mereka hidup di atas tanah yang dulu dijadikan medan pertempuran demi membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Abad XXI menyapa warga dunia dengan kemajuan sekaligus kemunduran. Kemajuan menuju ke arah yang serba digital, dan kemunduran moralitas akibat perkembangan tersebut. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup manusia di segala bidang, seperti dalam bersosialisasi, bekerja, belajar, dan bermain. Dunia pendidikan pun tidak terhindar dari perkembangan teknologi abad ke-21 dan berusaha untuk memanfaatkan teknologi demi mencapai proses pembelajaran yang maksimal.

Disaat para pendidik berusaha untuk meninggkatkan aspek kognitif peserta didik, aspek afektif malah menurun. Seperti halnya empat sehat lima sempurna yang sudah tidak relevan dengan saat ini, perkembangan yang seimbang antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor merupakan suatu keniscayaan. Disaat kita mengajarakan tentang pemanfaatan teknologi sebagai salah satu sumber pembelajaran, kita juga harus mengajarakan kaidah-kaidah tentang penggunaan teknologi yang baik dan benar. Karena teknologi adalah pedang bermata dua.

Globalisasi layaknya aliran air di sungai yang deras, jika kita tidak mempunyai pegangan untuk bertahan, maka kita akan terbawa arus sungai tersebut. Disamping memiliki sederet dampak positif, dampak negatif juga tidak lepas dari yang namanya globalisasi ini. Tapal batas yang tidak jelas dalam dunia maya yang kemudian mengakibatkan budaya-budaya luar yang tidak sesuai ikut terkonsumsi oleh para generasi muda yang perlahan dan pasti mulai megikis nilai-nilai luhur bangsa ini, lahirnya agama baru (facebook, twitter, instagram, dan

sebagainya), semakin menguatnya individualistis, mementingkan kepentingan kelompok, lunturnya semangat gotong-royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Beberapa masalah tersebut merupakan dampak negatif yang ditimbulkan dari indahnya globalisasi pada awal pengertiaanya.

Adalah pendidikan yang menjadi jalan vital guna membentuk masyarakat yang bermartabat sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab1, Pasal 1, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Selanjutnya, Sutrisno (2016: 29) menyatakan bahwa pendidikan nilai merupakan salah satu komponen dalam pendidikan kewarganegaraan yang tidak hanya mendidik para peserta didiknya untuk menjadi manusia yang cerdas, tetapi juga membangun kepribadiannya agar memiliki akhlak mulai, dan menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman (visi Pendidikan Nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Cogan & Derricott (1998:116) mengatakan bahwa karakteristik yang harus dimiliki warganegara di abad 21 ini yaitu: 1) kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global; 2) kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran ataukewajibannya dalam masyarakat; 3)kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya; 4) kemampuan berpikir kritis dan sistematis; 5) kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan; 6) memiliki kepekaan dan mempertahankan hak asasi manusia seperti hak kaum wanita, minoritas,dan lain-lain; 7) kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintah lokal, nasional, dan internasional.

Dan, dalam mewujudkan karakteristik warga negara abad 21 tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan menjadi ujung tombaknya karena Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran di persekolahan yang mempunyai

kontribusi penting dalam membentuk dan mewujudkan warganegara yang cerdas seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu *smart and good citizenship* (Jayadiputra, 2016: 11).

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini berdasarkan pada metode studi literatur. Dimana studi literatur adalah adalah metode untuk mengumpulkan data untuk mengungkapkan bahan pembahasan pada penulisan artikel ini. Teknik studi literatur ini dapat dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku maupun jurnal yang berkaitan dengan pembahasan. Pembahasan dalam penulisan artikel ini adalah terkait dengan internalisasi nilai, nilai-nilai Pancasila, pembelajaran PKn, dan tentang *good and smart citizen*. Teknik ini untuk mendapatkan data teoritis yang dapat mendukung penulisan artikel ini. Faisal (1992:30) mengemukakan bahwa "hasil studi literatur bisa dijadikan masukan dan landasan dalam menjelaskan dan merinci masalah-masalah yang akan diteliti".

PEMBAHASAN

1. Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila

Internalisasi adalah penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin atau nilai, sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku (Poerwadarminta, 2007: 439). Kemudian jika dikaitkan dengan perkembangan manusia, proses internalisasi harus berjalan sesuai dengan tugas-tugas perkembangan. Internalisasi merupakan sentral proses perubahan kepribadian yang merupakan dimensi kritis pada perolehan dan perubahan manusia, termasuk di dalamnya pempribadian makna (nilai) atau implikasi respon terhadap makna (Supriadi, A. dkk, 2014: 650).

Muhaimin (Mona, 2010: 153) mengemukakan bahwa, dalam proses internalisasi yang dikaitkan dengan pembinaan peserta didik atau anak asuh ada tiga tahap yang mewakili proses atau tahap terjadinya internalisasi, yaitu:

a) Tahap Transformasi Nilai

Tahap ini merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pendidik dalam menginformasikan nilai-nilai yang baik dan kurang baik. Pada tahap ini hanya terjadi komunikasi verbal antara pendidik dan peserta didik atau anak asuh.

b) Tahap Transaksi Nilai

Suatu tahap pendidikan nilai dengan jalan melakukan komunikasi dua arah, atau interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang bersifat interaksi timbal-balik.

c) Tahap Transinternalisasi

Tahap ini jauh lebih mendalam dari tahap transaksi. Pada tahap ini bukan hanya dilakukan dengan komunikasi verbal tapi juga sikap mental dan kepribadian. Jadi pada tahap ini komunikasi kepribadian yang berperan secara aktif.

Menurut Kuperman (Irawan, B. dkk, 2014: 6) "nilai adalah patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya diantara cara-cara tindakan alternatif". Kemudian Prof. Dr. Notonegoro **(**Widodo, 2009: 9) menyatakan bahwa, nilai dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

a) Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia.
b) Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan dan aktivitas.
c) Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.

Setiap negara memiliki pandangan hidup masing-masing untuk menentukan langkah hidup ke depan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, hal ini tampak bahwa Pancasila adalah jiwa, kepribadian dan pandangan hidup *(way of life)* bangsa Indonesia. Menurut Darmadi, sebagai pandangan hidup Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Dengan kata lain Pancasila sebagai penunjuk arah bagi semua kegiatan dalam aktivitas hidup (Darmadi, 2010: 249).

Pancasila dianggap sebagai perwujudan jiwa seluruh rakyat Indonesia yang hidup dan berkembang dalam kepribadian bangsa. Bentuk perilaku rakyat Indonesia bisa dicerminkan dari Pancasila. Masyarakat dalam berperilaku seharusnya bisa menunjukkan bagaimana yang tertuang di sila-sila Pancasila.

Dalam pandangan Kaelan, bahwa bangsa Indonesia sebagai kausa materialis dari Pancasila. Pandangan hidup dan filsafat hidup itu merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia yang menimbulkan tekad bagi dirinya untuk mewujudkannya dalam sikap tingkah laku dan perbuatannya (Kaelan, 2002: 47).

Nilai-nilai yang ada di Pancasila seharusnya tertanam pada seseorang sejak sudah bisa berinteraksi dengan dunia luar. Jika seseorang sudah bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila itu maka seseorang akan bisa menjiwai dari Pancasila itu sendiri. Menurut Widjaja, Pancasila di dalamnya mengandung nilai-nilai yang universal (bersifat umum) yang dikembangkan dan berkembang dalam pribadi manusia-manusia sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk sosial (Widjaja, 1984: 4). Penanaman nilai-nilai Pancasila ini bisa membangkitkan kesadaran akan dirinya atas tanggung jawab pribadi dan masyarakat.

Asmaroini (2017: 58) menjelaskan, bahwa nilai-nilai dalam lima sila Pancasila dijelaskan, antara lain sebagai berikut.

a. Ketuhanan Yang Maha Esa: Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama ini adalah dimana kita sebagai manusia yang diciptakan wajib menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi laranganNya. Masyarakat Indonesia berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing dan wajib menjalankan apa yang diperintahkan dalam agama masing-masing dan menjauhi apa yang dilarang.
b. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab: Sila kedua menjelaskan bahwa kita sesama manusia mempunyai derajat yang sama dihadapan hukum.
c. Persatuan Indonesia: Makna persatuan hakikatnya adalah satu, yang artinya bulat tidak terpecah.
d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Dalam sila ini menjelaskan tentang demokrasi, adanya kebersamaan dalam mengambil keputusan dan penanganannya, dan kejujuran bersama.
e. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Makna dalam sila ini adalah adanya kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat, seluruh kekayaan dan

sebagainya dipergunakan untuk kebahagiaan bersama, dan melindungi yang lemah.

Jadi, internalisasi nilai-nilai Pancasila merupakan sebuah proses atau cara menanamkan nilai-nilai Pancasila pada kewargaan guna mencapai kebribadian yang sesuai dengan Pancasila atau meng-*habituation*-kan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

2. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Sugiarti dalam Ristina (Mona, 2010: 15) mengemukakan bahwa "pembelajaran dapat diartikan sebagai upaya yang sistematik dan disengaja untuk menciptakan kondisi-kondisi agar terjadi kegiatan belajar membelajarkan. Dalam kegiatan itu terjadi interaksi antara kedua belah pihak, yaitu peserta didik (warga belajar) yang melakukan kegiatan belajar, dengan pendidik (sumber belajar) yang melakukan kegiatan membelajarkan".

Landasan PKn adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, tanggap pada tuntutan perubahan zaman, serta Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Kurikulum Berbasis Kompetensi tahun 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006, Kurikulum 2013, serta Pedoman Khusus Pengembangan Silabus dan Penilaian Mata Pelajaran Kewarganegaraan yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional-Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah-Direktorat Pendidikan Menengah Umum.

Pendidikan Kewarganegaraan dapat diartikan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari peserta didik sebagai individu, anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Supriadi, A. dkk, 2014: 651).

Lebih lanjut, Somantri (2001: 299) mengemukakan bahwa, "pendidikan kewarganegaraan yang cocok dengan Indonesia adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah,

masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan kehidupan bernegara yang demikian maju dengan segala tantangannya, Pendidikan Kewarganegaraan tampaknya perlu memperluas misinya dari sekedar pendidikan politik. Pendidikan Kewarganegaraan pada masa sekarang ini memiliki misi sebagai berikut (Maftuh, 2008: 137):

a. PKn sebagai pendidikan politik, yang berarti program pendidikan ini memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan kepada siswa agar mereka mampu hidup sebagai warga negara yang memiliki tingkat kemelekan politik (*political literacy*) dan kesadaran berpolitik (*political awareness*), serta kemampuan berpartisipasi politik (*political participation*) yang tinggi.
b. PKn sebagai pendidikan nilai (*value education*), yang berarti melalui PKn diharapkan tertanam dan tertransformasikan nilai, moral, dan norma yang dianggap baik oleh bangsa dan negara kepada diri siswa, sehingga mendukung bagi upaya *nation and character building*. Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila tetap harus menjadi rujukan utama dalam upaya pendidikan nilai ini.
c. PKn sebagai pendidikan nasionalisme, yang berarti melalui PKn diharapkan dapat ditumbuhkan dan ditingkatkan rasa kebangsaan atau nasionalisme siswa, sehingga mereka lebih mencintai, merasa bangsa, dan rela berkorban untuk bangsa dan negaranya.
d. PKn sebagai pendidikan hukum, yang berarti bahwa program pendidikan ini diarahkan untuk membina siswa sebagai warga negara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, yang menyadari akan hak dan kewajibannya, dan yang memiliki kepatuhan terhadap hukum yang tinggi.
e. PKn sebagai pendidikan multikulural (*multiculutal education*), yang berarti PKn diharapkan mampu meningkatkan wawasan dan sikap toleran siswa dan mahasiswa untuk hidup dalam masyarakatnya yang multikutural.

f. PKn sebagai pendidikan resolusi konflik (*conflict resolution education*), yang berarti PKn membina siswa dan mahasiswa untuk mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif.

Dengan melihat misi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang demikian luas, maka tujuan PKn pun perlu lebih diperluas pula. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education* atau *citizenship education*) secara teoritis adalah untuk mendidik para siswa menjadi warga negara yang baik, cerdas, dan bertanggung jawab yang dapat berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat yang demokratis.

Winarno (2012: 55) mengemukakan bahwa, pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah pendidikan untuk membentuk seperangkat karakteristik sebagai warganegara_yang sejalan dengan pandangan hidup komunitas politik yang bersangkutan_bukan sekedar mempelajari fakta-fakta tentang pranata dan prosedur kehidupan politik, tetapi juga mencakup pembelajaran serangkaian disposisi, kebajikan, dan loyalitas. PKn adalah pendidikan untuk me"warganegara"kan orang-orang didalam suatu komunitas.

Untuk mendukung upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran PKn, maka perlu diupayakan pembelajaran PKn yang memiliki kekuatan (*powerful*). Pembelajaran PKn akan memiliki kekuatan (*powerful*) jika diajarkan secara: bermuatan nilai, bermakna, aktif, terpadu, mengundang kemampuan berfikir tingkat tinggi, demokratis, menyenangkan (*joyful*), efective, efisien, kreatif, melalui belajar dengan bekerja sama (*cooperative learning*), dan mengundang aktivitas sosial. Pembelajaran PKn yang perlu diupayakan antara lain (Maftuh, 2008: 142-143):

Pertama, pembelajaran PKn hendaknya bermuatan nilai (*value-based*), artinya PKn mesti mengembangkan sikap, nilai, dan moral atau kecerdasan emosional dan kecerdasan moral siswa, bukan hanya mengembangkan kemampuan dan kecerdasan intelektual. Dengan demikian PKn perlu mengembangkan secara terpadu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme, PKn memang harus bermuatan nilai.

Kedua, pembelajaran PKn hendaknya bermakna (*meningful*), yakni PKn mampu membelajarkan dan membinakan kemampuan atau kompetensi hidup yang bermakna kepada para siswa, bukan sekedar menyampaikan informasi yang artifisial atau kurang bermanfaat bagi kehidupan siswa. Pembelajaran bermakna mengandung arti bahwa kemampuan yang dimiliki siswa dapat digunakan secara fungsional sepanjang kehidupannya.

Ketiga, pembelajaran PKn mesti mengundang siswa untuk aktif dalam belajar. Dengan demikian, pembelajaran PKN harus berpusat kepada siswa (*student centered*). Keaktifan siswa ini dapat diwujudkan melalui aktivitas membaca, bertanya, berdiskusi, mengumpulkan data, menganalisis data, menilai (*value judgment*), memecahkan masalah, ataupun mengambil keputusan.

Keempat, pembelajaran PKn yang baik adalah pembelajaran terpadu, baik terpadu dilihat dari konsep-konsep keilmuan, maupun terpadu dari ranah (*domain*) pendidikan yang dikembangkannya (kognitif, afektif, dan psikomotor).

Kelima, pembelajaran PKn hendaknya mampu mengundang kemampuan berpikir siswa pada taraf yang lebih tinggi. Dengan demikian PKn bukan hanya mengajari siswa dengan kemampuan mengingat (*recall*) fakta atau konsep, tetapi juga sampai pada kemampuan berpikir analitis, kritis, kreatif, reflektif, dan evaluatif. Cara penjelasan, teknik bertanya dan tugas-tugas yang dirancang secara baik oleh guru dapat membantu mengundang kemampuan bepikir siswa. Pengembangan kemampuan berpikir ini juga sangat perlu dalam masalah penanaman nilai, di mana diharapkan nilai-nilai yang dibinakan dapat diterima siswa dengan penuh nalar.

Keenam, pembelajaran PKN hendaknya demokratis, artinya dilangsungkan dalam suasana hubungan antarsiswa dan antara siswa dan guru yang terbuka, kekeluargaan, harmonis dan manusiawi, tanpa ada tekanan fisik maupun psikologis. Pembelajaran PKn bukan sekedar mengajar apa itu konsep demokrasi, melainkan pembelajaran yang dilakukan secara demokratis dalam suasana yang demokratis pula.

Ketujuh, pembelajaran PKn itu hendaknya menyenangkan (*joyful*) bagi siswa, artinya siswa merasa senang dan tertarik dengan mata pelajaran PKn,

bukan justru sebaliknya merasa bosan dan membenci PKn karena dianggap tidak menyenangkan. Oleh karena itu, *learning by playing* atau *learning by doing* dalam PKn perlu lebih dikenalkan dari pada sekedar verbalisme atau mengingat fakta (*memorizing facts*). Pembelajaran PKn hendaknya efektif dan efisien, artinya pengajaran yang sederhana, tidak complicated, tetapi mampu mencapai target kompetensi atau tujuan yang telah ditetapkan.

Kedelapan, pembelajaran PKn hendaknya kreatif, dalam arti mampu mengundang dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkreasi di kelas. Kreativitas siswa ini akan berkembang jika didukung oleh guru yang kreatif pula. Pembelajaran PKn hendaknya dikembangkan pula melalui *cooperative learning* (belajar secara bekerja sama), daripada hanya pengajaran yang mengembangkan kompetisi individual. *Cooperative learning* bukan hanya dapat membantu meningkatkan kemampuan akademis secara bersama-sama untuk semua siswa, tetapi mampu pula mengembangkan sikap-sikap positif, seperti sikap kerjasama, toleransi, menghormati perspektif orang lain, serta empati; dan

Kedelapan, pembelajaran PKn hendaknya mampu mengajak siswa untuk melakukan aktivitas sosial yang riil (*social action*). Dengan demikian siswa bukan hanya belajar di dalam ruangan kelas saja, tetapi juga dapat di luar kelas atau di masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang nyata yang dapat bermanfaat bagi dirinya ataupun bagi masyarakatnya. Hal ini perlu untuk menumbuhkan kemampuan siswa sebagai aktor sosial, yakni warga masyarakat yang memiliki kepekaan atau kepedulian sosial dan mampu memecahkan masalah-masalah sosial dengan baik.

3. *Good and Smart Citizen*

Budimansyah (Winarno, 2012: 55) menegaskan bahwa, baik dan cerdas adalah bagian dari karakter, dan karakter yang baik dan cerdas adalah karakter yang dimiliki seorang pribadi. Dalam perspektif etika, manusia berbuat baik bahkan cerdas itu dalam kaitannya dengan norma moral yakni berusaha untuk mengarahkan perbuatannya ketujuan tertinggi hidupnya sebagai manusia atau menyesuaikan tindakannya dengan norma yang mengatur perihal bagaimana manusia seharusnya hidup. Ia adalah orang yang selalu berusaha untuk hidup

sesuai dengan tuntutan hati nuraninya atau sesuai dengan kesadarannya akan apa yang secara konkret menjadi kewajiban moralnya sebagaimana diungkapkan oleh Soedarminta (Winarno, 2012: 55). Jadi karakter "baik dan cerdas" adalah dalam konteks ia sebagai manusia yang dipandu oleh hati nurani, terlepas dari atribut ataupun prestasi dibelakangnya.

Winarno (2012: 59) dalam wacana kewarganegaraan menyatakan, bahwa warga negara yang baik dan cerdas (*smart and good citizen*), merupakan titik temu antara *civic confidence, civic competence* dan *civic commitment*. *Civic confidence* merupakan irisan dari *civic knowledge* dan *civic dispositions, civic competence* merupakan irisan dari *civic knowledge* dan *civic skill* dan *civic commitment* merupakan irisan dari *civic dispositions* dan *civic skill.* Warga negara yang memiliki civic *knowledge, civic dispositions* dan *civic skill* adalah warga negara yang *confidence, competence* dan *commitment* yang selanjutnya disebut sebagai *smart and good citizen.*

Pendapat lain mengenai warga negara yang baik atau *good citizen* diungkapkan oleh Numan Somantri (2001: 279). Menurutnya, warga negara yang baik adalah warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis, Pancasila sejati. Selanjutnya, menurut Azis Wahab (2011: 311-312) warga negara yang baik adalah warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan dengan baik hak-hak dan kewajibannya sebagai individu warga negara memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial, mampu memecahkan masalahnya sendiri, juga masalah kemasyarakatan secara cerdas sesuai dengan fungsi dan perannya, memiliki sikap disiplin. Selain itu melaksanakan hukum dan aturan, tidak merusak lingkungan, memanfaatkan lingkungan dengan rasa tanggung jawab.

Sedangkan yang dimaksud dengan warga negara yang cerdas adalah warga negara yang cerdas adalah warga negara yang mampu berpikir analitis, memiliki komitmen dan mampu melibatkan diri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Wahab dan Sapriya, 2011: 314). Warga negara yang baik itu ukurannya adalah konstitusi negara yang bersangkutan. Sepanjang warga negara itu sikap dan perilakunya tidak bertentangan dan mematuhi konstitusi maka ia berkategori warga negara baik, sementara manusia /orang

yang baik pada dasarnya sama di semua negara, karena ia ditentukan oleh hati nuraninya.

KESIMPULAN

Internalisasi nilai-nilai Pancasila merupakan sebuah proses atau cara menanamkan nilai-nilai Pancasila pada warga negara guna mencapai kepribadian yang sesuai dengan Pancasila atau meng-*habituation*-kan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Proses internalisasi nilai-nilai Pancasila diajarkan dalam pembelajaran PKn, karena landasan PKn sendiri adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, tanggap pada tuntutan perubahan zaman, serta Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Kurikulum Berbasis Kompetensi tahun 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006, Kurikulum 2013, serta Pedoman Khusus Pengembangan Silabus dan Penilaian Mata Pelajaran Kewarganegaraan yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional-Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah-Direktorat Pendidikan Menengah Umum.Untuk mendukung upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran PKn, maka perlu diupayakan pembelajaran PKn yang memiliki kekuatan (*powerful*). Pembelajaran PKn yang perlu diupayakan antara lain (Maftuh, 2008: 142-143): Pertama, pembelajaran PKn hendaknya bermuatan nilai (*value-based*). Kedua, pembelajaran PKn hendaknya bermakna (*meningful*). Ketiga, pembelajaran PKn mesti mengundang siswa untuk aktif dalam belajar. Keempat, pembelajaran PKn yang baik adalah pembelajaran terpadu. Kelima, pembelajaran PKn hendaknya mampu mengundang kemampuan berpikir siswa pada taraf yang lebih tinggi. Keenam, pembelajaran PKN hendaknya demokratis. Ketujuh, pembelajaran PKn itu hendaknya menyenangkan (*joyful*) bagi siswa. Kedelapan, pembelajaran PKn hendaknya kreatif, dalam arti mampu mengundang dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkreasi di kelas. Dengan adanya internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran PKn diharapkan warga negara dapat menjadi *smart and good citizen* yaitu warga negara yang baik dan cerdas dan mempunyai jiwa

Pancasila sejati sehingga sikap dan perilakunya tidak bertentangan dan mematuhi konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Asmaroini, Ambiro Puji. (2017). *Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapannya Bagi Masyarakat di Era Globalisasi*. *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 2, Januari 2017* E-ISSN 2527-7057, P-ISSN 2545-2683.

Cogan, J.J. dan Derricott, R. (1998). *Citizenship for the 21st Century; An InternationalPerspective on Education*. London: Kogan Page.

Faisal, Sanafiah. (1992). *Format-format Penelitian Sosial.* Jakarta: Rajawali Press.

Hamid, Darmadi. (2010). *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.

Irawan, B. dkk. (2014). *Analisis Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembelajaran Pkn Di Kelas Viii*.

Jayadiputra, Eka. (2015). *Model Project Citizen Dalam Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa*. *Jurnal Ilmiah Cisoc*, 2 (1), hlm. 11-20.

Kaelan. (2002). *Filsafat Pancasila Pandangan hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.

Maftuh, Bunyamin. (2008). *Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Nasionalisme Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Educationist. Vol. II No. 2 Juli 2008 ISSN : 1907 – 8838.

Mona. (2010). *Model Project Citizen Untuk Meningkatkan Kecakapan Kewarganegaraan Pada Konsep Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat, Tesis Magister Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Indonesia.* Bandung: Tidak Diterbitkan.

Mulyana, Rohmat. 2004. *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung: CV. Afabeta.

Poerwadarminta. (2007). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.

Somantri, N. M. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Supriadi, A. dkk. (2014). *Internalisasi Nilai Nasionalisme dalam Pembelajaran Pkn Pada Siswaman 2 Model Banjarmasin*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4 (8), hlm. 649-655.

Surisno. (2016). *Berbagai Pendekatan Dalam Pendidikan Nilai Dan Pendidikan Kewarganegaraan*. *Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran*, 5, hlm. 29-37.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Wahab, Abdul Azis dan Sapriya. (2011). *Teori & Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.

Widjaja, 1984. *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Jakarta : CV Era Swasta.

Widodo, Eko., Taufiqurrahman. (2009). *Pendidikan Kewarganegaraan.* Jakarta: CV Sari Ilmu Pratama.

Winarno. (2012). *Karakter Warga Negara Yang Baik Dan Cerdas*. *PKn Progresif*, 7 (1), hlm. 54-62.

PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PROGRAM PENGABDIAN SEKOLAH SEBAGAI WUJUD INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DI SMP PONPES AN NUR UNGARAN KABUPATEN SEMARANG

Ama Farida Sari

Prodi PPKn Pascasarjana UNS, Surakarta
Email amafaridasari@ymail.com

ABSTRAK

Penanaman nilai-nilai Pancasila tidak selalu dalam pembelajaran di kelas saja, namun juga melalui tindakan nyata seperti program pengabdian kepada masyarakat, lingungan sekolah atau lembaga layanan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pendidikan karakter yang ditanamkan oleh sekolah melalui program pengabdian yang diterapkan kepada siswa sebagai wujud internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta latar belakang penerapan program pengabdian siswa di SMP Ponpes An Nur Ungaran Kabupaten Semarang. Metode penelitian yaitu kualitatif dengan fokus penelitian pada pendidikan karakter yang ditanamkan oleh sekolah melalui program pengabdian serta latar belakang penerapan program pengabdian siswa di SMP Ponpes An Nur Ungaran Kabupaten Semarang. Teknik pengumpuan data dengan menggunakan cara observasi, wawancara dan studi dokumen. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data. Teknik analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan nilai pendidikan karakter yang diterapkan melalui program pengabdian antara lain disiplin, tanggung jawab, gotong royong, menghargai dan peduli. Pelaksanaan program pengabdian dilatarbelakangi mulai merosotnya moralitas pemuda, sikap tidak peduli dan keinginan untuk menjadikan siswa SMP Ponpes An Nur Ungaran sebagai generasi yang berkakter, mampu melaksankan tugas serta mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saran, cara penerapan nilai-nilai Pancasila sangatlah banyak sekali, semua dapat dilakukan dalam serangkaian kegiatan pembelajaran ataupun diluar pembelajaran melalui kegiatan yang bermanfaat kepada siswa. Karakter siswa jaman sekarang seperti istilah jawa "*nek ora ditutuk ora mlaku*" artinya jika tidak ditegur langsung, tidak diarahan mereka tidak akan sadar untuk bertindak. Pendidikan karakter pada sekolah yang terintegritas dengan pondok pesantren memang sangat penting agar siswa yang berada disana merasa memiliki, menjaga, merawat, menghargai apa yang mereka miliki saat ini. Jika hanya mengandalkan pendidikan agama dan PPKn yang diberikan di sekolah maka pembentukan karakter kurang maksimal, semua harus seimbang antara pendidikan sekolah, agama, pendidikan karakter. Program pengabdian ini dilaksanakan secara kontinyu, sehingga dapat terkontrol perkembangannya.

Kata kunci : *Pendidikan Karakter, Pengabdian Sekolah, Pancasila*

PENDAHULUAN

Dalam dunia pendidikan sekolah adalah salah satu wadah dalam proses transfer ilmu dan melakukan aktivitas pembelajaran. Setiap sekolah memiliki karakteristik tersendiri dalam melakukan modifikasi pembelajaran sebagai imbuhan atau tambahan dari struktur pokok yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang digunakan sebagai ciri khas dan membedakan dengan sekolah yang lain. Karakteristik atau ciri khas setiap sekolah dituangkan dalam berbagai program penunjang pembelajaran atau kegiatan yang ada di sekolah yang bersangkutan. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh sekolah sebagai tempat memperoleh pendidikan sangatlah banyak sekali, salah satunya adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter akhir-akhir ini menjadi sasaran dari banyak sekolah seiring merosotnya moral warga negara jaman sekarang dan lingkungan yang mulai mengabaikan sikap, tingkah laku dan moral manusia, acuh terhadap orang lain, kepedulian yang mulai hilang. Sehingga sekolah melakukan berbagai upaya agar karakter anak muda generasi penerus bangsa tidak pudar dan tetap berpegang teguh pada pancasila yang diinternalisasikan melalui program-program atau kegiatan di sekolahan.

Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan YME, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat. Individu yang berkarakter baik atau unggul adalah seorang yang berusaha melakukan hal yang terbaik terhadap Tuhan YME, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa dan negara dengan mengoptimalkan potensi (pengetahuan) dirinya dan disertai dengan kesadaran, emosi dan perasaannya. Karakter seseorang terbentuk karena kebiasaan yang dilakukan, sikap yang diambil dalam menanggapi keadaan, dan kata-kata yang diucapkan kepada orang lain. Karakter ini pada akhirnya menjadi sesuatu yang menempel pada seseorang dan sering orang yang bersangkutan tidaka menyadari karakternya (Kurniawan, 2013:29).

Pendidikan karakter memiliki pengaruh yang kuat terhadap kualitas diri seseorang, orang yang baik biasanya memiliki karakter yang baik pula. Pendidikan karakter menurut Suyanto sebaiknya diterapkan sejak usia kanak-kanak, atau yang

biasa disebut para ahli psikologi sebagai usia emas (*golden age*), karena usia ini terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya (Kurniawan, 2013:33). Dengan adanya pendidikan karakter disekolahan, diharapkan siswa memiliki sikap, pemikiran, tata karama dan kebiasaan yang sesuai dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Salah satu pendidikan karakter yang dilakukan dilingkungan sekolah sekaligus pondok pesantren An Nur Ungaran adalah program pengabdian sekolah. Melalui program pengabdian yang ditujukan kepada siswa dengan mempertimbangkan kurangnya kesadaran untuk menjaga lingkungan, kepedulian terhadap sesama dan juga untuk melatih kedisiplinan dan tanggung jawab, maka ketika pengabdian yang dilakukan adalah dengan melakukan kebiasaan baik, akan terbentuk karakter baik pula yang dimiliki oleh seorang siswa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendidikan karakter yang ditanamkan oleh sekolah melalui program pengabdian yang diterapkan kepada siswa sebagai wujud internalisasi nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta latar belakang penerapan program pengabdian siswa di SMP Ponpes An Nur Ungaran Kabupaten Semarang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana dalam penelitian ini akan menyajikan data deskripsi. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Kirk dan Miller (dalam Moleong, 2010:4).

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah pendidikan karakter yang ditanamkan oleh sekolah melalui program pengabdian yang diterapkan kepada siswa sebagai wujud internalisasi nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta latar belakang penerapan program pengabdian siswa di SMP Ponpes An Nur Ungaran Kabupaten Semarang. Sumber data penelitian adalah data primer yang bersumber dari wawancara dengan siswa yang melakukan pengabdian di SMP Ponpes An Nur Ungaran, sedangkan data sekunder dalam

penelitian ini berupa literatur buku atau studi kepustakaan yang relevan. Teknik pengumpuan data dalam penelitian ini dengan menggunakan cara observasi, wawancara dan studi dokumen. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi teknik untuk menguji data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda dan teknik analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang memberikan layanan pendidikan mulai dari jenjang dasar hingga atas memiliki karakteristik tersendiri dalam memberikan layanan pendidikan kepada siswa. Termasuk sekolah yang terintegrasi dengan pondok pesantren merupakan sebuah ciri khas tersendiri yang memberikan pelayanan pendidikan yang terintegrasi dengan pendidikan agama yang selama ini mungkin hanya sedikit diberikan di sekolah umum. Budiyanto dan Machali (2014) menyatakan bahwa, pesantren sebagai sebuah institusi budaya yang lahir atas prakarsa dan inisiatif (tokoh) masyarakat dan bersifat otonom, sejak awal berdirinya merupakan potensi strategis yang ada di tengah kehidupan sosial masyarakat. Kendati kebanyakan pesantren hanya memosisikan dirinya sebagai institusi pendidikan dan keagamaan, namun sejak tahun 1970-an beberapa pesantren telah berusaha melakukan reposisi dalam menyikapi berbagai persoalan sosial masyarakat, seperti ekonomi, sosial, dan politik.

SMP Ponpes An Nur Ungaran adalah sekolah menengah pertama sekaligus pondok pesantren yang berada di desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat, terletak dibawah kaki gunung ungaran dan air terjun semirang. Mayoritas siswa yang bersekolah sekaligus mondok di SMP Ponpes An Nur Ungaran bukan penduduk asli daerah setempat, mereka berasal dari luar desa, luar kecamatan bahkan luar Kabupaten Semarang. Kebanyakan alasan dari mereka bersekolah sambil mondok selain keinginan mereka sendiri dan orangtua adalah keiginan untuk memperoleh ilmu agama yang lebih dibandingakan dengan mereka yang hanya sekolah di SMP umum.

Bersekolah sambil mondok bukan hal yang baru dikalangan masyarakat. Banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya sambil belajar agama di pondok pesantren. Namun masih sedikit sekolah yang terintegrasi atau sekaligus menjadi satu antara sekolah dengan pondok. SMP Ponpes An Nur Ungaran sebagai sekolah sekaligus pondok pesantren selain melaksanakan pembelajaran seperti sekolah pada umumnya juga memiliki program khusus yang diterapkan kepada siswanya untuk membangun karakter sebagai warga negara yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter yang diberikan di SMP Ponpes An Nur Ungaran salah satunya melalui program pengabdian sekolah yang dilakukan kepada siswa.

Pendidikan karakter, menurut Ratna Megawangi dalam Kesuma (2012:5) "sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agara dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya". Secara harfiah karakter artinya kualitas mental atau moral, kekuatan moral, nama atau reputasi (Hornby dan Parnwell dalam Hidayatullah, 2009:9).

Tujuan pertama pendidikan karakter adalah memfasilitasi penguatan dan mpengembangan nilai-nilai tertentu sehingga terwjud dalam perilaku anak, baik ketika proses sekolah maupun setelah proses sekolah setelah lulus dari sekolah. Penguatan dan pengembangan memiliki makna bahwa pendidikan dalam setting sekolah bukanlah sekedar suatu dogmatisasi nilai kepada peserta didik, tetapi sebuah proses yang membawa peserta didik untuk memahami dan merefleksi bagaimana suatu nilai menjadi penting untuk diwujudkan dalam perilaku keseharian manusia, termasuk bagi anak (Kesuma, 2012:9).

Menurut Majid (2013:58), dalam islam tidak ada disiplin ilmu yang terpisah dari etika-etika islam. Dan pentingnya komparasi antara akal dan wahyu dalam menentukan nilai-nilai moral terbuka untuk diperdebatkan. Bagi kebanyakan muslim segala yang dianggap halal dan haram dalam islam, dipahami sebagai keputusan Allah tentang benar dan baik. Dalam islam terdapat tiga nilai utama, yaitu akhlak, adab dan keteladanan. Akhlak merujuk kepada tugas dan tanggung jawab selain syari'ah dan ajaran islam secara umum. Sedangkan term adab merujuk kepada sikap yang dihubungkan dengan tingkah aku yang baik. Dan keteladanan

merujuk kepada kualitas karakter yang ditampilkan oleh seorang muslim yang baik yang mengikuti keteladanan Nabi Muhammad SAW. Ketiga nilai inilah yang menjadi pilar pendidikan karakter dalam islam. Oleh karena itu, pendidikan karakter berurusan dengan pengajaran nilai-nilai dasar yang secara virtual dapat diterima oleh semua masyarakat yang beradab, tanpa peduli dimana dan kapan. Nilai-nilai ini semestinya mengatasi nilai-nilai keyakinan agama apapun.

Dikarenakan SMP Ponpes An Nur Ungaran adalah sekolah yang terintegrasi pondok, maka pendidikan karakter untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu seperti yang diungkapkan oleh Kesuma sangatlah diperlukan. Nilai-nilai yang ingin diwujudkan melalu program pengabdian yaitu nilai disiplin, tanggung jawab, gotong royong, saling menghargai, dan juga peduli lingkungan. Nilai karakter tersebut berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, dimana nilai disiplin termuat dalam ajaran sila pertama KeTuhanan Yang Maha Esa yang mengandung nilai religius dan taat, taat artinya mematuhi aturan, dimana dalam pelaksanaannya disiplin adalah wujud dari taat pada aturan.

Disiplin yang ditanamkan dalam program pengabdian yaitu siswa menjalankan tugas pengabdian secara konsisten dan sesuai dengan peraturan. Program pengabdian diberlakukan kepada seluruh siswa atau santri tanpa terkecuali. Setiap siswa mendapatkan jatah pengabdian dalam jangka waktu sehari terhitung setelah melakukan sholat dhuha berjamaah hingga jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak yayasan dan sekolah. Perarutan mengenai pengabdian telah disepakati oleh wali santri sehingga tidak ada anggapan bahkan tuduhan bahwa program pengabdian dilaksanakan secara sewenang-wenang dan atas keputusan salah satu pihak. Dalam menjalankan program pengabdian siswa diperkenankan untuk makan, minum dan beristirahat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan setiap siswa, sehingga tidak ada batasan untuk mereka beraktifitas dan menyelesaikan tanggung jawab pengabdian, dan ketika jam istirahat, sarapan, serta sholat harus dilaksanakan bersama dengan siswa lain yang tidak melaksanakan pengabdian, sehingga nilai kedisiplinan dan religius tetap terjaga.

Nilai pendidikan karakter selanjutnya yang diwujudkan melalui program pengabdian adalah nilai tanggung jawab dan gotong royong, dimana nilai tersebut termuat dalam sila-sila Pancasila yaitu sila Kemanusiaan yang adil dan beradab

serta persatuan Indonesia. Dalam program pengabdian siswa tidak melakukan semua pekerjaan secara individu atau hanya satu orang, melainkan dari beberapa siswa setiap perwakilan kelas yang mendapat jatah piket pengabdian, sehingga pelaksanaan pengabdian dilakukan secara bersama-sama dan terasa ringan, inilah wujud gotong royong dalam menyelesaikan tanggung jawab. Artinya tugas atau tanggung jawab mereka untuk melakukan pengabdian akan terasa ringan karena dilakukan secara bersamaan atau dibagai dalam team. Begitu pula dengan nilai saling menghargai dan peduli lingkungan, santri atau siswa yang melaksanakan program pengabdian melakukan seluruh rangkaian kegiatan yang telah disusun oleh sekolah menyesuaikan dengan kebutuhan dan urgensi kegiatan apa yang harus dilakukan seperti membersihkan lingkungan asrama, mushola, sekitar kelas, kantor guru, kamar mandi dan membantu guru yang bertugas menyiapkan sarapan untuk seluruh santri. Melalui program pengabdian yang dilakukan, secara tidak langsung mereka akan merasakan betapa lelahnya menjadi mereka yang bertugas setiap hari dan memikirkan perasaan orang lain ketika pekerjaan yang telah mereka selesaikan ternyata dirusak atau dikotori lagi. Disitulah perasaan mereka akan terketuk dan rasa menghargai mulai tumbuh, menghargai kerja keras orang lain, mengahargai apa yang telah dilakukan orang lain, peduli akan lingkungan, karena pondok dan sekolah adalah tempat tinggal mereka selama 24 jam, dan mereka yang melaksanakan pengabdian akan merasa tanggung jawab terhadap tugas mereka sekaligus merasa memiliki karena mereka pula yang harus merawat dan menjaga lingkungan sekolah dan pondok.

Kegiatan penabdian yang dilaksanakan berupa serangkaian kegiatan melaksanakan pekerjaan untuk membersihkan, merawat serta menjaga lingkungan sekolah sejalan dengan pendidikan karakter melalui pendekatan pembelajaran berbuat. Menurut Muslich (2011:118), pendekatan pembelajaran berbuat (*action learning approach*) menekankan pada usaha memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbuatan-perbuatan moral, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama dalam suatu kelompok. Superka, et.al. (1976) menyimpulkan ada dua tujuan utama pendidikan moral berdasarkan kepada pendekatan ini. Pertama, memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbuatan moral, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama, berdasarkan nilai-nilai

mereka sendiri. Kedua, mendorong siswa untuk melihat diri mereka sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam pergaulan dengan sesama, yang tidak memiliki kebebasan sepenuhya, melainkan sebagai warga dari suatu masyarakat, yang harus mengambil bagian dalam suatu proses demokrasi.

Dengan demikian program pengabdian yang diberlakukan kepada siswa oleh SMP Ponpes An Nur Ungaran memberikan pelajaran pada siswa bahwa mereka adalah bagian dari sekolah, bagian dari asrama dan bagian dari keseluruhan yang ada di SMP Ponpes An Nur Ungaran, mereka adalah keluarga yang harus saling menghargai, menjaga dan peduli sesama. Sejalan dengan Hidayatullah (2009:106) yang menyatakan bahwa salah satu dari tiga unsur agar seseorang dapat diteladani atau menjadi teladan adalah memiliki integritas, integritas adalah kesamaan antara ucapan dan tindakan atau satunya kata dan perbuatan. Inti dari integritas adalah terletak pada kualitas istiqomahnya. Sebagai wujud istiqomah dan kesetaraan antara ucapan dan perbuatan adalah bagaimana siswa bukan hanya mumpuni dalam akademik disekolah dan pondok namun juga perwujudan perilakunya, tanggung jawabnya, dan keseimbangan yang dilandaskan pada ajaran agama serta penerapan nilai-nilai Pancasila yang dijadikan pedoman dalam bertindak tanduk.

Seluruh hasil penanaman nilai-nilai pendidikan karakter melalui program pengabdian yang dilaksanakan di SMP Ponpes An Nur Ungaran dilatar belakangi oleh mulai merosotnya nilai-nilai kepribadian bangsa yang di miliki oleh pemuda jaman sekarang dengan banyaknya fenomena pergaulan bebas, narkoba, merokok dikalangan pelajar, hingga mulai hilangnya sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Dengan kejadian itu semua, sekolah ingin mewujudkan pendidikan karakter yang melatih anak untuk disiplin, tanggung jawab, saling menghargai, gotong royong dan peduli lingkungan yang menjadi karakter bangsa Indonesia.

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter selain nilai-nilai di atas menurut Kurniawan (2013:39) dapat diidentifikasi berasal dari empat sumber. Pertama agama, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat beragama. Oleh karena itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Secara politis, kehidupan kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai yang berasala dari agama. Karenanya, nilai-nilai pendidikan karakter harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari

agama. Kedua, Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yang dijabarkan lebih lanjut kedaam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Artinya, nilai-nilai yang terkandung Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni. Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara. Ketiga, budaya. Sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat tersebut. Nilai budaya ini dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikais antar anggota masyarakat tersebut. Posisi budaya yang sedemikian penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa. Keempat, tujuan Pendidikan Nasional. UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. Pasal 3 UU Sisdiknas menyebutkan, "pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Kebiasaan yang dilakukan akan menjadi hal yang ringan dan mudah untuk diterapkan, termasuk salah satunya adalah program pengabdian yang melatih kedisiplinan, tanggung jawab, rasa memiliki dan menghargai individu, toleransi, tolong menolong, gotong royong dan juga peduli seperti yang diamanatkan oleh nilai-nilai Pancasila.

KESIMPULAN

Program pengabdian bertujuan untuk melatih siswa disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong dan menumnuhkan nilai-nilai karakter lainnya sebagai internalisasi dari nilai-nilai Pancsila dalam lingkungan sekolah. Program ini dilatarbelakangi merosotnya nilai-nilai luhur bangsa pada pemuda jaman sekarang yang sudah tidak memiliki kepedulian dan penghargaan terhadap sesama, orang tua bahkan lingkungan. Karena sasaran dari proses pendidikan adalah mengubah apa yang tidak tau menjadi tau, apa yang belum terjadi diusahakan terealisasi dan realisasi nilai-nilai Pancasila diaplikasikan dalam pendidikan karakter untuk memperbaiki moralitas pemuda penerus bangsa.

Saran yang bisa diberikan penulis, cara penerapan nilai-nilai Pancasila sangatlah banyak sekali, semua dapat dilakukan dalam serangkaian kegiatan pembelajaran ataupun diluar pembelajaran melalui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat kepada siswa. Karena karakter siswa jaman sekarang seperti istilah jawa "*nek ora ditutuk ora mlaku*" artnya jika tidak ditegur langsung, tidak diarahan mereka tidak akan sadar untuk bertindak. Pendidikan karakter pada sekolah yang terintegritas dengan pondok pesantren memang sangat penting agar siswa atau santri yang berada disana merasa memiliki, menjaga, merawat, menghargai apa yang mereka miliki saat ini. Karena jika hanya mengandalkan pendidikan agama dan PPKn yang diberikan di sekolah maka pembentukan karakter kurang maksimal, semua harus seimbang antara pendidikan sekolah, agama, serta pendidikan karakter dan program pengabdian ini dilaksanakna secara kontinyu, sehingga dapat terkontrol perkembangannya.

DAFTAR PUSTAKA

Budiyanto, Mangun., dan Machali, Imam. 2014. *Pembentukan Karakter Mandiri Melalui Pendidikan Agriculture di Pondok Pesantren Islamic Center Aswaja Lintang Songo Piyungan Bantul Yogyakarta*. Jurnal Pendidikan Karakter, Tahun IV, Nomor 2, Juni 2014

Hidayatullah, M. Furqon. 2009. *Guru Sejati: Membangun Insan Berkarakter Kuat& Cerdas*. Surakarta: Yuma Pustaka

Kesuma, Dharma., dan Triana, Cepi. 2013. *Pendidikan Karakter*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset

Kurniawan, Syamsul. 2013. *Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset

Muslich, Masnur. 2011. *Pendidikan Karakter*. Jakarta: Sinar Grafika Offset

Tafsir, Ahmad. 2013. *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset

INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DIPERGURUAN TINGGI

Wachid Pratomo
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
Putrieneliz37@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan Indonesia selalu dinamis mengikuti perkembangan zaman. Dengan keadaan yang dinamis berpengaruh dalam perubahan karakter dan pemahaman nilai Pancasila oleh siswa. Internalisasi Pancasila dari masa ke masa mengalami pergeseran disetiap orde yang dilewatinya. Sehingga Pancasila dimaknai berbeda oleh setiap generasi. Kurikulum mengamanatkan internalisasi Pancasila melalui salah satunya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaran. Disetiap masa yang dilewati Pendidikan Kewarganegaraan juga tidak lepas dari pengaruh penguasa sehingga dipandang hanya sebagai penyambung mandat penguasa, karena siapa yang berkuasa maka mandat yang dititipkan akan berbeda juga. Metode yang dilakukan adalah studi pustaka dimana hasil pemikiran di kombinasikan dengan ggasan para tokoh dan ahli serta buku yang sudah ada. Hasil yang didapatkan yaitu perlu diadakan revitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi agar dapat di interprestasikan secara maksimal dalam membinakan nilai-nilai Pancasila, Pendidikan Kewarganegaran juga perlu menggunakan secara terintegrasi pendekatan pendidikan nilai secara langsung, yang didasari oleh perspektif sosialisasi, dan pendekatan pendidikan nilai secara tidak langsung, yang didasari oleh perspektif sosialisasi. Pembelajaran PKn pun hendaknya memiliki kekuatan (powerful), yaitu pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang bermuatan nilai, bermakna, aktif, terpadu, mengundang kemampuan berfikir tingkat tinggi, demokratis, menyenangkan, efektif, efisien, kreatif, melalui belajar dengan bekerja sama (cooperative learning), dan mengundang aktivitas sosial.

Kata Kunci : *Internalisasi, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan*

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia selalu berusaha dikembangkan sesuai dengan perkembangan IPTEK di dunia. Pendidikan dari tahun ke tahun mengalami pasang surut dalam pelaksanannya. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pengertian lain juga mengemukakan bahwa pendidikan adalah proses pembudayaan, proses kultural, atau proses kultivasi untuk mengembangkan semua bakat dan potensi manusia guna mengangkat diri sendiri dan dunia sekitarnya pada taraf human.(Tri Sukitman, 2014: 18) Berbagai usaha dilakukan pemerintah agar pendidikan

Indonesia menjadi berkualitas. Sistem pembelajaran yang efektif dan efisien menjadi output (keluaran) yang diinginkan oleh tiap komponen yang terlibat di dalam dunia pendidikan (Himawan, 2011 :10). Indonesia belakangan ini dilanda krisi multidimensi yang salah satu pengaruhnya adalah generasi muda kita kehilangan jadi diri yang berjiwa karakter bangsa Indonesia. Maka dibutuhkan kembali menghidupkan nilai Pancasila yang mulai meredup dengan pendidikan mengarah ke karakter bangsa serta nilai Pancasila.

Pendidikan bangsa yang dilaksanakan mengarah pada karakter, sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkarakter(Supardi ,2012:12). Berbagai penelitian mengenai pendidikan karakter telah dilaksanakan. Penelitian tentang pendidikan karakter dilakukan untuk lebih memahami dampak pendidikan karakter bagi individu, keluarga, dan masyarakat(Winda Rachelina, 2014:84). Hal itu perlu dilakukan karena sadar bahwa pendidikan karakter penting bagi kehidupan manusia, maka peran yang dimainkan dunia pendidikan haruslah tidak sekadar menunjukkan pengetahuan moral, tetapi juga mencintai dan mau melakukan tidakan moral(Sudrajat, 2011). Dalam pendidikan karakter, hal penting untuk dipertanyakan adalah nilai-nilai moral manakah yang ingin diajarkan.(Suharjono 2012:9) Di Indonesia sendiri menganut ideologi Pancasila yang didalamnya mengandung nilai-nilai yang tentunya menjadi pedoman dalam kehidupan.

Nilai-nilai Pancasila sendiri sesungguhnya merupakan kristalisasi dari nilai-nilai agama dan nilai budaya bangsa(Suharjono, 2012 :5) Semua nilai-nilai yang tercantum di dalamnya semestinya dapat dijadikan acuan dalam pembentukan sikap dalam suatu pembelajaran. Adapun ranah dan sasaran dari aktualisasi sila-sila dalam Pancasila adalah pembangunan karakter yang mencakup ranah kognitif, afektif, psikomotor(Wahyudi , 2016:94).

METODE

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian Kualitatif dimana metode yang digunakan adalah metode Kepustakaan.. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik kepustakaan. Teknik studi kepustakaan merupakan langkah yang peting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian langakh selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang akan diteliti. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan

informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil penelitian dan sumber lainnya yang sesuai(internet dan koran) (Nazir, 1998:112). Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah (Sugiyono, 2012 : 291).

Berdasarkan pengertian tersebut, maka penelitian tentang Internalisasi Nilai-nilai Pancasila melalui PKn di perguruan tinggi menggunakan bermacam-macam material yang terdapat diruang kepustakaan, seperti dokumen, jurnal,makalah, buku yang relevan dengan penelitian.

PEMBAHASAN

Internalisasi Pancasila dari Masa ke Masa

Pancasila sebagai ideologi negara telah disepakati oleh *the founding fathers* sejak tahun 1945. Namun nilai-nilai Pancasila tidak berarti telah serta merta terinternalisasi dalam diri bangsa Indonesia. Bahkan, untuk beberapa lama, Pancasila sepertinya hanya menjadi ungkapan simbolis kenegaraan tanpa jelas implementasinya, baik dalam kehidupan kenegaraan maupun kemasyarakatan. Penafsiran Pancasila pun kadang menjadi bermacam-macam tergantung golongannya bahkan tergantung pada arus politik yang berkuasa. Upaya menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila telah dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno di tahun 1960- an, dalam kerangka *nation and character building*. Upaya ini dilakukan untuk mengIndonesiakan orang Indonesia yang disesuaikan dengan visi dan misi politik penguasa pada masa itu. Oleh karena itu, bahan-bahan yang diberikan pun bukan hanya tentang Pancasila dan UUD 1945, tetapi juga bahan-bahan yang berisi pandangan politik penguasa masa itu. Upaya menggelorakan semangat pancasila sangat tinggi, sehingga oleh Azyumardi Azra dipandang sebagai fase ke-2 tumbuhnya manusia Pancasilais pada bangsa Indonesia. Pada masa ini, upaya *nation and character building* ini bukan hanya untuk masyarakat luas pada umumnya, namun juga dilakukan melalui jalur pendidikan formal, misalnya melalui mata pelajaran *Civics*. Sejarah mencatat,

bahwa pada periode selanjutnya, yaitu pada masa Orde Baru, apa yang dilakukan oleh rezim Orde Lama itu dipandang sebagai sebuah upaya indoktrinasi.

Ketika awal Orde Baru berkuasa, yang pada saat itu bertekad melaksana-kan Pancasila secara murni dan konsekwen, hal yang dibenahi pertama untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme adalah melalui jalur pendidikan formal. Ketika Kurikulum persekolahan diubah pada tahun 1968, maka perubahan terhadap mata pelajaran yang mengembangkan misi pembinaan warga negara yang baik, yang Pancasilais, juga mengalami perubahan. Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) pun masuk dalam kurikulum persekolahan sebagai mata pelajaran, dan materinya berisi Pancasila dan UUD 1945 yang telah dibersihkan dari pengaruh pandangan Orde Lama. Internalisasi nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai nasionalisme melalui jalur sekolah lebih diperjelas lagi dengan keluarnya Kurikulum 1975, di mana terdapat mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) sebagai pengganti nama PKN. Dari namanya saja sudah tersirat bahwa mata pelajaran ini dimaksudkan untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila kepada para pelajar. Upaya menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila secara meluas kesegala lapisan masyarakat, birokrasi dan persekolahan dilakukan oleh penguasa Orde Baru melalui Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). P4 pada awalnya dilandasi upaya pemerintah yang menginginkan agar nilai-nilai Pancasila dapat dengan mudah dipahami, dihayati, diamalkan oleh seluruh warga negara. P4 juga mempengaruhi kurikulum persekolahan dan perguruan tinggi pada mas tersebut. Kurikulum PMP tahun 1984 dan terutama kurikulum PPKn 1994 secara jelas menjabarkan nilai-nilai Pancasila yang telah diuraikan di P4.

Kurikulum Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, juga tidak lepas dari pengaruh P4. Diseminasi P4 melalui jalur pendidikan formal bukan hanya melalui kurikulum, melainkan juga melalui penataran P4 untuk siswa dan mahasiswa baru. Para pengembang Penataran P4 pada masa itu, sudah mencoba mengembangkan berbagai cara atau metode yang lebih baik dari sekedar indoktrinasi. Namun karena penataran P4 yang bersifat massal dan penafsiran Pancasila yang dianggap tunggal oleh penguasa, maka penataran P4 ini pun oleh kaum pendukung reformasi dipandang sebagai sebuah upaya indoktrinasi ala Orde Baru. Ketika memasuki masa reformasi, terjadi pula perubahan pada upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila

dan nasionalisme. Kurikulum PPkn di seko-lah pun mengalami perubahan baik dari nama maupun substansi materinya. Begitu juga kurikulum pada mata kuliah umum Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewiraan/Kewarganegaraan di perguruan tinggi, mengalami perubahan. Materi yang berbau Orde Baru dihapuskan dari kurikulum dan diganti dengan materi-materi yang lebih sesuai dengan visi dan misi politik Orde Reformasi. Kurikulum PPKn dalam kurikulum persekolahan 1994 yang dulu sangat berorientasi pada nilai-nilai Pancasila, diganti dengan Kurikulum PKn 2004 dan 2006 yang lebih bersifat konseptual teoritis.

Mata kuliah yang mengemban pembinaan mahasiswa untuk menjadi warga negara yang baik dan Pancasilais, juga mengalami pengecilan peran. Secara formal, mata kuliah Pendidikan Pancasila pada sebagian besar perguruan tinggi, dihilangkan dan disatukan dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan demikian, sebenarnya pada masa ini dalam kurikulum formal baik di jenjang persekolahan maupun perguruan tinggi, upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila, termasuk nilai-nilai nasionalisme, mengalami penurunan intensitas. Di luar lembaga pendidikan for-mal, seperti di lingkungan birokrasi dan masyarakat pada umumnya, upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme pada masa reformasi, bahkan lebih tidak jelas lagi.

Revitalisasi Peran PKn

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, di Indonesia, sejak tahun 1960 Pendidikan Kewarganegaraan (*Civics*) merupakan mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Sejak saat itu pula, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran, selalu ada dalam kurikulum yang berlaku dan dalam undang-undang sistem pendidikan nasional Dalam dua undang-undang sistem pendidikan nasional terakhir, yaitu UU No. 2 tahun 1989 dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Kewarganegaraan selalu dinyatakan sebagai program atau mata pelajaran yang harus ada pada setiap jenjang pendidikan, dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Jika dianalisis, perkembangannya sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang, Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sangat tergantung pada konteks politik. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia tidak dapat bebas dari pengaruh rezim politik yang memerintah.

Kemauan politik dari pemerintah, seringkali tercermin pada tujuan dan isi Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan sering merupakan mandat politik dan alat ideologi rezim. Sebagai akibatnya, Pendidikan Kewarganegaraan berubah ketika rezim politik berubah (Bunyamin, 1990; Winataputra, 1999). Pada masa reformasi rekarang ini, Pendidikan Kewarganegaraan tampaknya perlu dilakukan revitalisasi dan reorientasi, baik menyangkut tujuan, misi, kompetensi yang diharapkan, materi, pendekatan dan strategi pembelajarannya. Dengan revitalisasi dan reorientasi ini, diharapkan Pendidikan Kewarganegaraan tidak terjebak lagi menjadi program indoktrinasi politik penguasa. PKn diharapkan lebih mampu menjadi program pendidikan yang secara teoritis, konseptual, dan praksis memiliki konsistensi atau keajegan sebagai pembina warganegara yang baik dan demokratis dengan meminimalisasi pengaruh mandat politik rezim yang berkuasa. Jadi pada era Reformasi saat ini, ada keinginan baru untuk mereformasi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia agar kurang bergantung pada pengaruh politik.

Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia yang baru didasarkan pada pengetahuan ilmiah dan nilai-nilai demokratis universal dan juga nilai-nilai Indonesia asli yang lebih stabil dari pada perubahan politik. Dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan kehidupan bernegara yang demikian maju dengan segala tantangannya, Pendidikan Kewarganegaraan tampaknya perlu memperluas misinya dari sekedar pendidikan politik. Pendidikan Kewarganegaraan pada masa sekarang ini memiliki misi sebagai berikut:

1. PKn sebagai pendidikan politik, yang berarti program pendidikan ini memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan kepada siswa agar mereka mampu hidup sebagai warga negara yang memiliki tingkat kemelekan politik (*political literacy*) dan kesadaran berpolitik (*political awareness*), serta kemampuan berpartisipasi politik (*political participation*) yang tinggi.
2. PKn sebagai pendidikan nilai (*value education*), yang berarti melalui PKn diharapkan tertanam dan tertransformasikan nilai, moral, dan norma yang dianggap baik oleh bangsa dan negara kepada diri siswa, sehingga mendukung bagi upaya *nation and character building*. Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila tetap harus menjadi rujukan utama dalam upaya pendidikan nilai ini.

3. PKn sebagai pendidikan nasionalisme, yang berarti melalui PKn diharapkan dapat ditumbuhkan dan ditingkatkan rasa kebangsaan atau nasionalisme siswa, sehingga mereka lebih mencintai, merasa bangsa, dan rela berkorban untuk bangsa dan negaranya.
4. PKn sebagai pendidikan hukum, yang berarti bahwa program pendidikan ini diarahkan untuk membina siswa sebagai warga negara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, yang menyadari akan hak dan kewajibannya, dan yang memiliki kepatuhan terhadap hukum yang tinggi.
5. PKn sebagai pendidikan multikulural (*multiculutal education*), yang berarti PKn diharapkan mampu meningkatkan wawasan dan sikap toleran siswa dan mahasiswa untuk hidup dalam masyarakatnya yang multikutural.
6. PKn sebagai pendidikan resolusi konflik (*conflict resolution education*), yang berarti PKn membina siswa dan mahasiswa untuk mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif.

Dengan melihat misi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang demikian luas, maka tujuan PKn pun perlu lebih diperluas pula. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education* atau *citizenship education*) secara teoritis adalah untuk mendidik para siswa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab yang dapat berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat yang demokratis. Dalam penjelasan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sis-tem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan karakter ke Indonesian. Apa yang dimaksudkan atau ditujukan oleh Pendidikan Kewarganegaraan menurut undang-undang itu ternyata sangat sederhana, yang hanya memuat dua kompetensi yang harus dimiliki warga negara, yaitu *rasa kebangsaan* dan *karakter*. Menurut pendapat *The National Curriculum Council* (Edwards and Fogelman,2000:94) Pendidikan Kewarganegaraan (*Education for Citizenship*) bertujuan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diper-lukan untuk menggali, membuat keputusan yang berpengetahuan, dan melaksanakan hak dan kewajiban dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Sosok warganegara yang baik yang ingin dihasilkan oleh Pendidikan Kewarganegaraan menurut Sanusi adalah warga negara yang merdeka yang tidak

jadi beban bagi siapapun, yang melibatkan diri dalam kegiatan belajar, memahami garis besar sejarah, cita-cita dan tujuan bernegara, dan produktif dengan turut memajukan ketertiban, keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan umum. Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik, yang sering diterpa oleh konflik sosial, dibutuhkan warga negara yang memiliki karakteristik pribadi yang kuat yang dapat hidup secara fungsional pada masa globalisasi yang sangat kompetitif.

Cogan dan Derricot (1998) mengemukakan adanya delapan karakteristik yang perlu dimiliki warganegara pada masa kini yaitu: (1) kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global; (2) kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat; (3) kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya; (4) kemampuan berpikir kritis dan sistematis; (5) kemauan untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan; (6) kemauan mengubah gaya hidup dan kebiasaan konsumtif untuk melindungi lingkungan; (7) memiliki kepekaan ter-hadap hak asasi dan mampu untuk mempertahankannya (seperti hak kaum wanita, minoritas etnis, dsb); dan (8) kemauan dan kemampuan berpartisi- pasi dalam kehidupan politik pada tingkatan lokal, nasional, dan interna-sional.

Dalam kaitannya dengan upaya membina siswa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, para siswa harus mampu memecahkan masalah mereka sendiri dan masalah masyarakatnya, termasuk memecahkan masalah konflik antar pribadi dan antar kelompok, dalam cara-cara yang damai dan demokratis. Parker (1996:12) mengingatkan kita bahwa sebenarnya ada banyak kemungkinan bagi siswa untuk mengalami hidup dalam demokrasi yang nyata di lingkungan sekolah mereka, seperti di kelas yang heterogen, di tempat bermain, di ruangan olah raga dan pada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Parker menyatakan, bahwa ... *within and among these settings pro-blems of common living are identified and mutual deliberation and problem-solving activity is undertaken as a rou-tine practice of school life*.

Dalam situasi seperti ini Pendidikan Kewarganegaraan dapat memainkan peran untuk terlibat dalam memecahkan masalah termasuk konflik dalam kehidupan sekolah dan kehidupan sosial kemasyarakatan lainnya.. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaran masa kini adalah membina warga negara Indonesia yang baik, yaitu warga negara yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki jiwa yang merdeka, memahami dan menjalankan hak dan kewajiban dengan baik, memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial, berjiwa demokratis, mampu menghargai perbedaan etnis, budaya dan agama , mampu berfikir kritis, sistematis, kreatif, dan inovatif, mampu mengambil keputusan dan memecahkan masalah secara demokratis, menyelesaikan konflik secara damai tanpa kekerasan, mematuhi hukum, berdisiplin, menghargai lingkungan hidup, dan mampu berpartisipasi secara cerdas dalam kehidupan politik lokal, nasional, dan global.

Sejalan dengan misi dan tujuan Pendidikan kewarganegaraan di atas, maka Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia perlu memiliki tiga fungsi pokok dalam pengembangan warga negara yang demokratis, yaitu mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intelligence*), membina tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*), dan mendorong partisipasi warga negara (*civic participation*). Hal ini berkaitan erat dengan tiga kompetensi warganegara yang baik yang dikemukakan oleh Branson (1998), yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan sikap kewarganegaraan (*civic dispositions*). Pengembangan ketiga hal ini (*civic intelligence/civic knowledge, civic responsibility/civic dispositions,* dan *civic participation/civic skills*) menunjukan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan bersifat multidimensional dan terpadu dalam ranah (*domain*) yang dikembangkannya.

Dengan melihat pada tiga fungsi pokok atau tiga kompetensi utama yang perlu dikembangkan oleh Pendidikan Kewarganegaraan di atas, maka salah satu misi dan peran Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia adalah sebagai pendidikan aspek afektif, yaitu pendidikan budi pekerti (karakter), nilai dan moral. Misi sebagai pendidikan aspek afektif ini terutama berkaitan dengan fungsi pengembangan *civic responsibi-lity* atau *civic dispositions* di atas. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan afektif atau pendidikan nilai ini, lebih mirip dengan Pendidikan Kewarganegaraan di Inggris di mana Pendidikan Kewarga-negaraan merupakan bagian dari pendidikan moral dan nilai (Edwards dan Fogelman, 2000). Nilai-nilai yang diajarkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia adalah nilai-nilai

pilihan yang dipertimbangkan sebagai "nilai-nilai Indonesia yang baik", dan nilai-nilai tersebut mencakup pula nilai-nilai demokrasi universal. Namun demikian, pendekatan untuk mengajarkan nilai-nilai ini mesti-nya tidak dilakukan melalui indoktrinasi nilai-nilai untuk mempertahankan status quo, tetapi menggunakan pendekatan yang lebih demokratis, seperti dalam tradisi *reflec-tive inquiry*.

Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education* atau *citizenship education*) dapat diinterpretasikan dalam versi minimal dan maksimal. Interpretasi minimal berarti hanya menuntut pembahasan ke dalam pengetahuan dasar dari aturan-aturan yang telah melembaga yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Sementara itu, dalam interpretasi maksimal, Pendidikan Kewarganegaraan mengembangkan kemampuan kritis dan reflektif, kemerdekaan fikiran tentang isu-isu sosial, dan kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses sosial dan politik. Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia mesti dikembangkan dengan menggunakan interpretasi maksimal, karena ia akan menjadi lebih memiliki kekuatan dan lebih fungsional untuk mengembangkan demokrasi di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan interpretasi maksimal dan melalui tradisi reflektif inkuiri, Pendidikan Kewarganegaraan sekarang lebih diharapkan mampu memecahkan problema implementasi nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme secara lebih kritis dan demokratis. Meskipun banyak ahli pendidikan memandang bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting untuk mendidik para siswa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, namun tidak semua negara mempunyai tingkat minat yang sama untuk mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan. Sebagaimana dinyatakan oleh Rowe (2000), pada banyak negara Pendidikan Kewarganegaraan *remains optional, fragmented, poorly resourced, lacking of theoretical base and taught by reluctant or poorly trained teachers*.

Kondisi seperti ini terjadi juga pada Pendidikan kewarganegaraan selama ini di Indonesia, sebagaimana digambarkan oleh Somantri (2001) dan Winataputra (2002). Masalah ini tentu saja menggambarkan suatu tantangan dalam mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. Dalam melakukan pembaruan terhadap Pendidikan Kewarganegaraan yang sesuai dengan kondisi

perubahan sosial masa kini, Sanusi (1999) menawarkan model Pendidikan Kewarganegaraan yang didasarkan pada sepuluh pilar demokrasi.

Kesepuluh pilar demokrasi tersebut meliputi: Ketuhanan Yang Maha Esa, hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, kerakyatan yang cerdas, pembagian kekuasaan negara, otonomi daerah, *rule of law*, pengadilan yang merdeka, kemakmuran umum, dan keadilan sosial. Sisi kedua dari model yang dikemukakannya adalah membangun visi, sikap dan mutu perilaku para pemainnya yang demokratik dalam sosok warga negara yang baik, yaitu warga negara yang merdeka, yang melibatkan diri dalam kegiatan belajar, memahami garis besar sejarah, cita-cita dan tujuan bernegara, dan produktif, dan membangun diri bersama jaringan kerjanya menuju masyarakat belajar yang madani dan demokratik.

Pendidikan Kewarganegaraan juga perlu direvitalisasi berkaitan dengan materinya.. Berbeda dengan Pendidikan Kewarganegaraan di Barat yang materinya banyak berasal dari pengetahuan ekstraseptif, Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pengetahuan intraseptif, yang berasal dari nilai-nilai agama (misalnya menyangkut masalah keimanan dan ketaqwaan) dan nilai-nilai luhur budaya bangsa (Somantri, 2001 :55).

Salah satu temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Winataputra(1999) tentang Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia juga menunjukkan bahwa secara kontekstual logika internal dan dinamika eksternal sistem pendidikan kewarganegaraan dipengaruhi oleh aspek-aspek pengetahuan intraseptif berupa agama dan Pancasila; pengetahuan ekstraseptif ilmu, teknologi, dan seni; cita-cita, nilai, konsep, prinsip dan praksis demokrasi; masalah-masalah kontemporer Indonesia; kecenderungan dan masalah globalisasi; dan kristalisasi *civic virtue* dan *civic culture* untuk masyarakat madani Indonesia; masyarakat negara kebangsaan Indonesia yang berdemokrasi konstitusional. Pembaharuan lain dari Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia adalah keinginan untuk membuat Pendidikan Kewarganegaraan menjadi lebih berdaya (*powerful*) dalam mendorong partisipasi siswa pada kehidupan sosial yang demokratis. Hal ini berkaitan dengan upaya revitalisasi pada pendekatan, metode dan strategi pembelajarannya.

Guru serta dosen Pendidikan Kewarganegaraan didorong untuk menggunakan metode mengajar yang lebih demokratis daripada metode yang

indoktrinatif. Demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, toleransi, kerjasama, dan menghargai orang lain adalah di antara isi (materi) Pendidikan Kewarganegaraan yang utama. Merujuk pada prinsip-prinsip demokrasi, guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan mestinya bukan sekedar mengajar tentang demokrasi (*teaching about democracy*), dan mengajar untuk berdemokrasi (*teaching for democracy*), tetapi juga mengajar dalam suasana yang demokratis (*teaching in democracy*). Oleh karena itu, para guru mesti menjadi contoh (model) yang baik untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi di sekolah dan masyarakat.

Dengan melihat pada revitalisasi dan reorientasi misi, fungsi dan tujuan serta karakteristik PKn di atas, maka PKn memiliki peran yang sangat strategis untuk tetap menjalankan misi dan fungsinya sebagai mata pelajaran yang dapat membinakan nilai-nilai Pancasila ke dalam diri siswa. Oleh karena itu PKn tetap diharapkan memuat nilai-nilai luhur yang terkandung pada nilai sentral (*central values*) bangsa Indonesia, yaitu Pancasila termasuk di dalamnya nilai-nilai karakter bangsa.

Kesimpulan

Secara historis, pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran kebangsaan atau nasionalisme pada bangsa Indonesia. Pendidikan pada saat ini juga masih tetap diharapkan memainkan peran strategis dalam membinakan dan meningkatkan nilai-nilai PKn sebagai mata pelajaran yang memegang peranan penting baik ditingkat persekolahan maupun perguruan tinggi dalam membina nilai luhur Pancasila. Namun, dalam masa-masa yang lalu PKn selalu mendapat pengaruh yang kuat dari kepentingan politik, bahkan dapat dikatakan menjadi mandat politik dari penguasa saat itu sehingga baik misi, orientasi, tujuan, dan materinya sering berubah sesuai dengan perubahan politk yang terjadi. PKn yang diharapkan saat ini perlu memperluas misinya bukan sekedar sebagai pendidikan politik, melainkan juga sebagai pendidikan nilai, pendidikan nasionalisme, pendidikan demokrasi, pendidikan hukum, pendidikan multikultural dan pendidikan resolusi konflik.

PKn pun perlu menggunakan interpretasi maksimal, yang berarti PKn mesti mengembangkan kemampuan kritis dan reflektif, kemerdekaan fikiran tentang isu-

isu sosial, dan kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses sosial dan politik.

Oleh karena itu, dengan interpretasi maksimal PKn bukan sekadar melaksanakan tradisi transmisi nilai-nilai kewarganegaraan (*citizenship transmission*), tetapi juga mestinya lebih bersifat *reflective inquiry*, yang berarti mendidik siswa untuk secara kritis mengkaji dan memecahkan permasalahan kemasyarakatan, serta menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan penuh keyakinan. Dalam membinakan nilai-nilai Pancasila, PKn juga perlu menggunakan secara terintegrasi pendekatan pendidikan nilai secara langsung, yang didasari oleh perspektif sosialisasi, dan pendekatan pendidikan nilai secara tidak langsung, yang didasari oleh perspektif sosialisasi. Pembelajaran PKn pun hendaknya memiliki kekuatan (*powerful*), yaitu pembelajaran PKn yang bermuatan nilai, bermakna, aktif, terpadu, meng-undang kemampuan berfikir tingkat tinggi, demokratis, menyenangkan, efektif, efisien, kreatif, melalui belajar dengan bekerja sama (*cooperative learning*), dan mengundang aktivitas sosial. Dengan menggunakan kedua pendekatan itu, secara terintegrasi dan didukung oleh suasana pembelajaran yang memiliki kekuatan seperti di atas, maka diharapkan para siswa dapat menerima dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan penuh nalar dan keyakinan.

Daftar Pustaka

Branson, M.S., 1998, *The Role of Civic Education: a Forthcoming Education Policy Task Force Position Paper from the Communitarian Network*. http://www.civiced.org.

Cogan, John J. dan Derricot, R., 1998, *Citizenship for the 21st Century: An Internationalperspektive on education.*London : Cogan Page

Edwards, J. Dan Fogelman, K. 2000. " *Citizenship education and cultural diversity". Dalam Politic Education Citizenship*. Vol. VI . London and New York : Falmer Press hal. 93-103.

Evans, K., 2000, *"Beyond the work-related curriculum: citizenship and learning after sixteen"*, dalam *Politics, Education and Citizenship*, Vol. VI (Eds, Leicester, M., Modgil, C. dan Modgil, S.). London and New York: Falmer Press.

Engle, S.H. dan Ochoa, A.S. 1988 . *Education for Democratic Citizenship, Decision Making in the Social Studies*. New York : Teachers College Press

Himawan, Hidayatulah. 2011. "Analisa Dan Perancangan Sistem Pembelajaran." *Telematika* 7 No. 2: 10.

Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Maftuh, B, 1990, Studi Historis tentang Perkembangan Program Pendidikan umum dalam kurikulum Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Sejak Tahun 1945 sampai dengan Tahun 1984. Thesis yang tidak dipublikasikan. Bandung: PPS IKIP Bandung.

Maftuh, B. dan Sapriya, 2004, "Pembelajaran PKN melalui Peta Konsep," dalam *Jurnal Civicus*, Jurusan PKN FPIPS UPI.

Nazir. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta

Parker, WC (Ed.), 1996, *Educating the Democratic Mind*. Albany, New York: State University of New York Press.

Rowe, D., 2000, *"Value pluralism, democracy and education for citizenship"*, dalam *Politics, Education and Citizenship*, Vol. VI (Eds, Leicester, M., Modgil, C. dan Modgil, S.). London and New York: Falmer Press.

Sanusi, A., 1999, *Model Pendidikan Kewarganegaraan Negara Meng-hadapi Perubahan dan Gejolak Sosial*. Makalah yang dipresentasi kan pada *Conference on Civic Education for Civil Society*, di Bandung 16-17 Maret 1999.

Somantri, NM, 2001, Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS. Bandung: Remaja Rosda Karya.

.

Suharjono, Muhammad. 2012a. "Filantropi Nilai Dalam Pendidikan Karakter: Kajian Filsafat Nilai Terhadap Pendidikan Karakter Di Indonesia." *Jurnal Pelopor Pendidikan* 3 (1): 1–10. http://www.stkippgrismp.ac.id/backsitecontent/uploads/2013/09/Suharjono.pdf%5Cnfiles/1461/Suharjono - 2012 - Filantropi Nilai dalam Pendidikan Karakter (Kajian.pdf.)

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Supardi. 2012. "Arah Pendidikan Di Indonesia." *Arah Pendidikan Di Indonesia Dalam Tataran Kebijakan Dan Implementasi* 121 (4): 11–21.

Winda Rachelina. 2014. "Pentingnya Pendidikan Karakter Bangsa." *Blokdetik.com* 5 (45): 82–87. windarachelina.blogdetikcom/2017/11/8.

Wahab, AA, 1996, Politik Pendidikan dan Pendidikan Politik: Model Pendidikan Kewarganegaraan Indo-nesia menuju Warganegara Global. Pidato Pengukuhan Guru Besar pada IKIP Bandung.

Winataputra, US, 1999, *Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi di Indonesia*. Paper disampaikan pada *Workshop on the Development of Concepts and Content of Civic Education for Indonesian Schools*, 16-19 Oktober 1999 di Bandung.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

Sudrajat, Ajat. 2011. "MENGAPA PENDIDIKAN KARAKTER?" *Jurnal Pendidikan Karakter* 1 (1).
http://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/1316/1094

Tri Sukitman & Mulyadi. 2014. "Pendidikan Karakter Dan Bimbingan Konseling." *Jurnal Pelopor Pendidikan* 5 (1): 17–27.
http://www.stkippgrismp.ac.id/jurnal-pelopor-pendidikan-3/.

PEWARISAN NILAI-NILAI BUDAYA KEARIFAN LOKAL PADA MASYARAKAT KAMPUNG ADAT NAGA UNTUK MEMBANGUN KARAKTER WARGA NEGARA

Itok Dwi Kurniawan

Universitas Sebelas Maret , Surakarta
itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Eksistensi masyarakat adat yang mempunyai kekhasan dalam bidang sosial, budaya, ekonomi yang berbeda dari kelompok masyarakat lain dan kehidupan masih kental dengan adat kebiasaan atau tradisi atau oleh hukum atau aturan mereka sendiri merupakan fondasi yang dapat membentuk karakter warga negara. Pengejawantahan upaya pembentukan karakter dalam domain terkecil ini nyata dalam bentuk pelestarian kebudayaan yang dilakukan melalui proses enkulturasi dan sosialisasi. Strategi ini merupakan kunci sukses masyarakat adat Kampung Naga dalam memelihara adat dan tradisinya sehingga dapat berkontribusi dalam upaya penanaman karakter warga negara. Metode dalam penulisan ini menggunakan metode *study literature*, dengan memaparkan teori yang berhubungan dengan judul makalah, yang diperoleh dari jurnal, buku dokumentasi, dan internet. Dapat dapat disimpulkan pewarisan nilai-nilai budaya kearifan lokal pada masyarakat kampung adat dijembatani oleh keluarga, lembaga adat dan masyarakat. Proses pewarisan terjadi melalui pengamatan, keteladanan dan interaksi yang terjadi. Karakter warga negara yang ada dalam masyarakat Kampung Adat Naga adalah jujur, adil dan tanggung jawab. Penanaman nilai luhur budaya di masyarakat adat Kampung Naga ini dilakukan bukan hanya sekedar memberikan nasihat, perintah maupun petuah. Tetapi, lebih kepada praktik langsung dimana anak akan diajak orang tua untuk secara langsung mengamalkan nilai-nilai adat dan tradisi yang dapat membentuk karakter.

Kata Kunci: *karakter, warga negara, masyarakat*

PENDAHULUAN

Pembentukan karakter warga negara merupakan upaya terkait dengan pengembangan multi aspek keunggulan bangsa sehingga suatu bangsa tidak terombang-ambing dalam pencarian dirinya. Karakter warga negara yang pada hakikatnya adalah untuk menumbuhkan dan memperkuat jati diri bangsa. Kewarganegaraan (*citizenship*) adalah suatu bentuk dari identitas sosial politik (*a form of social political identity*) seseorang yang keberadaannya berkaitan dengan waktu yang berkembang (Derek Heater dalam Winarno, 2015:1). Dalam kehidupan berbangsa, eksistensi masyarakat adat yang mempunyai kekhasan dalam bidang sosial, budaya, ekonomi yang berbeda dari kelompok masyarakat lain, merupakan fondasi yang dapat membentuk karakter warga negara. Karena, pengejawantahan upaya

pembentukan karakter dalam domain terkecil ini merupakan cikal bakal yang akan membentuk masa depan bangsa yang akan datang.

Dalam fenomena Kampung Adat Naga, Penanaman nilai luhur budaya dilakukan bukan hanya sekedar memberikan nasihat, perintah maupun petuah, tetapi lebih kepada praktik langsung dimana anak akan diajak orang tua untuk secara langsung mengamalkan nilai-nilai adat dan tradisi yang dapat membentuk karakter. Dalam pemerintahan demokrasi, warga adalah mereka yang aktif dalam pemerintahan, baik yang sedang memerintah maupun yang diperintah. Suatu saat posisi ini akan berganti. Konsep warga negara dalam pemerintahan demokrasi tentu saja berbeda dengan konsep warga negara dalam bentuk yang lain, misal yang ada di bentuk pemerintahan aristokrasi dan oligarki (Winarno, 2015:3). Dalam tatanan kehidupan berbangsa, diperlukan pembangunan sumber daya manusia dengan pemahaman awal mengenai karakter baru bangsa Indonesia. Warga negara yang baik adalah mereka yang mampu memerintah dan diperintah dalam kehidupan publik, dimana kedua posisi ini suatu saat dapat berganti (*who share in the civic life of ruling and being ruled in the turn*). Karena itu, warga negara perlu belajar dan membiasakan diri untuk mampu memerintah dan juga diperintah (Winarno, 2015:4). Dengan demikian, untuk membangun masyarakat yang demokratis, setiap warga negara haruslah memiliki karakter atau jiwa yang demokratis.

METODE PENELITIAN

Metode dalam makalah ini menggunakan metode *study literature*, dengan memaparkan teori yang berhubungan dengan judul makalah, yang diperoleh dari jurnal, buku dokumentasi, dan internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pola Pewarisan Nilai Budaya Kampung Adat Naga

Penanaman nilai luhur budaya di masyarakat adat Kampung Naga ini dilakukan bukan hanya sekedar memberikan nasihat, perintah maupun petuah. Tetapi, lebih kepada praktik langsung dimana anak akan diajak orang tua untuk secara langsung mengamalkan

nilai-nilai adat dan tradisi yang dapat membentuk karakter. Sarana dalam pewarisan nilai kampung adat dapat terbagi menjadi:

1. Keluarga

   Dalam Kampung Adat Naga, keluarga merupakan komponen terpenting. Karena di dalam keluarga, anak diajak orang tua untuk secara langsung mengamalkan nilai-nilai adat dan tradisi yang dapat membentuk karakter. Dalam keluarga anak belajar melalui pengamatan, interaksi, dan keteladanan. Seorang anak dalam Kampung Adat Naga, meniru dan mempelajari pola sikap dan perilaku dalam keluarga, yang kemudian secara perlahan terbentuk dalam kepribadiannya. Secara sosiologis kehidupan manusia dalam berinteraksi dipengaruhi oleh konsep internalisasi dan eksternalisasi, maksudnya ketika anak usia dini dilahirkan dalam keluarga, individu ini harus mempelajari bahasa lingkungan dan memasukkan kenyataan eksternal menjadi kenyataan satu dengan dirinya. Bahasa sebagai kenyataan eksternal masuk ke dalam diri anak usia dini dan menjadi kenyataan internal. Proses memasukkan kenyataan eksternal ke dalam dan menjadi kenyataan internal, disebut internalisasi (Robet MZ Lawang, 1986: 22). Kebiasaan-kebiasaan yang positif dan negatif yang berlangsung lama dan terbuka dalam lingkungan keluarga dapat tertanam secara kuat pada kepribadian seseorang. Pengaruh keluarga sangat besar pengaruhnya bagi pembentukan dan perkembangan kepribadian anak. Menurut Jean Piaget dan Lewrence Kohlberg, moralitas anak bersifat heteronomos; moralitas anak dibentuk oleh norma yang ditanamkan oleh individu dari luar dirinya yaitu mereka yang berhubungan paling dekat dengannya, terutama lingkungan keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, adik dan kakak (Sigit Dwi Kusrahmadi, 2005:6)

2. Lembaga Adat.

   Lembaga adat sebagai jembatan dalam pewarisan kebudayaan dan penanaman nilai budaya dalam masyarakat kampung adat juga mengajarkan pentingnya menjaga kelestarian adat. Dalam hal ini bertujuan agar generasi muda mereka tidak mudah melupakan. Peran fungsi lembaga adat dalam penanaman nilai budaya yang dapat membentuk katakter adalah mensosialisasikan norma dan adat yang berlaku dalam masyarakat adat tersebut.

3. Masyarakat

Aspek ketiga ini berkaitan dengan keluarga, karena seorang anak setelah dalam keluarga akan melanjutkan ke lingkungan masyarakat. Dalam masyarakat, anak akan mengenal bukan hanya teman-temannya, tetapi juga akan bersosialisasi untuk mengenal aturan-aturan yang belaku dalam masyarakat tersebut, dalam hal ini anak akan mulai mengenal norma yang berlaku dalam masyarakt adat yang dapat membentuk karakternya. Norma inilah yang menjadi acuan dalam kehidupan anak hingga ia dewasa dan tua. Secara perlahan-lahan yang akan dia aplikasikan sebagai sikap kepribadian yang menjadi karakteristik hingga akhirnya akan membentuk karakteristik dalam kehidupan berbangsa.

Strategi pewarisan nilai budaya berupa enkulturalisasi dan sosialisasi ini merupakan kunci sukses masyarakat adat Kampung Naga dalam memelihara adat dan tradisinya sehingga dapat berkontribusi dalam upaya penanaman karakter warga negara.

B. Pembangunan karakter warga Negara Kampung Adat Naga

Pembangunan karakter warga negara Kampung Adat Naga terjadi bukanlah hal yang mudah dalam prosesnya, karena seiring berjalannya waktu pengaruh dari dunia luar semakin kuat. Namun demikian dengan adanya keteladanan dan usaha yang maksimal dari masyarakat dan lembaga adat secara perlahan-lahan pembangunan karakter warga negara di kampung adat dapat terjadi. Karakter warga negara dalam Kampung Adat Naga meliputi:

1. Demokratis

   Karakter masyarakat yang demokratis berupa tanggung jawab, ada dalam masyarakat Kampung Adat Naga. Karena anak diajarkan untuk selalu menjaga keharmonisan hubungan dalam bermasyarakat. Nilai demokrasi yang tertanam dalam diri anak akan memebentuk karakter anak. Heri Gunawan (2012:31) "nilai adalah merupakan rujukan untuk bertindak. Nilai merupakan standar untuk mempertimbangkan dan meraih perilaku tentang baik atau tidak baik dilakukan".

2. Jujur

   Karakter warga negara yang selanjunya dimiliki adalah jujur. Memiliki sifat dan sikap yang jujur bagi warga negara merupakan kunci bagi terciptanya keharmonisan antar warga negara. Jujur, perilaku yang didasarkan pada upaya

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan (Kemendiknas tahun 2010 dalam Agus Wibowo, 2012: 43-44).

3. Adil

Adil merupakan karakter sebagai warga negara yang demokrasi. Sikap adil nantinya merupakan akar penentuan benar dan salah. Dengan terlatihnya sikap adil dimulai dari lingkup kecil dalam masyarakat adat Naga, maka akan melatih adil agar bisa menjadi orang yang adil nantinya dalam ranah kehidupan yang lebih luas. Sikap adil, bukanlah sama rata sama rasa, tetapi merupakan kemampuan dalam menyikapi masalah sesuai dengan kondisi. Dengan berlaku adil maka akan timbul sifat tanggung jawab.

KESIMPULAN

Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa pewarisan nilai-nilai budaya kearifan lokal pada masyarakat kampung adat dijembatani oleh keluarga, lembaga adat dan masyarakat. Proses pewarisan terjadi melalui pengamatan, keteladanan dan interaksi yang terjadi. Karakter warga negara yang ada dalam masyarakat Kampung Adat Naga adalah jujur, adil dan tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Wibowo. 2012. *Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Heri Gunawan. 2012. *Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi*, Alfabeta, Bandung

Robet MZ Lawang, 1986. *Pengantar Sosiologi*, Karunika, Universitas Terbuka, Jakarta.

Sigit Dwi Kusrahmadi. 2003. *Pentingnya Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Dalam Mewujudkan Warga Negara Yang Baik*. Versi online http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/Pembentukan%20Karakter%20%20PAUD%20%20%20Pengabdian%20Masyarakat.pdf diakses pada tanggal 18 November 2017 pukul 10:30 WIB

Winarno . 2015. *Pemikiran Aristoteles Tentang Kewarganegaraan dan Konstitusi*, HUMANIKA Vol. 21 No. 1 (2015) ISSN 1412-9418

PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Suprayogi [1], Noorochmat Isdaryanto [2] Eta Yuni Lestari[3]

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan UNNES, Kota Semarang
suprayogi@mail.unnes.ac.id,
noorochmat@mail.unnes.ac.id,
etayuni@mail.unnes.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan klasik terkait krisis karakter yang semakin menjauh dari nilai-nilai Pancasila dirasakan semakin nampak jelas. Lebih parah lagi, krisis karakter terjadi pada generasi muda. Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat kenakalan remaja yang semakin tinggi, kejahatan dan pelanggaran atas norma-norma yang dilakukan generasi muda semakin banyak dan beragam, seperti penyalahgunaan narkoba, seks bebas, merokok, tawuran antar pelajar, dan masalah kenakalan remaja lainnya. Selain itu krisis karakter yang dialami generasi muda juga disebabkan karena minimnya keteladanan dari generasi sebelumnya, para penyelenggara negara dari tingkat pemerintah pusat hingga daerah juga memberikan contoh yang negatif dengan banyaknya tindak pidana korupsi. Hal ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik pada pemerintah dan penyelenggara negara. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana peran strategis Pendidikan Kewarganegaraan dalam menginternalisasikan nilai-nilai karakter beberbasis Pancasila melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaran. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana peran pendidikan Kewarganegaraan dalam menginternalisasikan karakter Pancasila. Metode dalam penulisan artikel ini dengan menggunakan studi pustaka dari buku dan jurnal, dengan membandingkan hasil temuan yang sesuai dengan tema. Selain studi pustaka, data juga diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan yang dapat memberikan keterangan tentang penanaman nilai-nilai karakter berbasis nilai-nilai Pancasila pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Responden terdiri dari mahasiswa yang mendapatkan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan dosen Mata kuliah kuliah Umum Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila di Universitas Negeri Semarang. Upaya penanaman nilai-nilai karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui pembelajaran PKn. Proses penanaman nilai-nilai karakter dilaksanakan mulai tahap perencanaan pembelajaran dengan memasukan dalam perangkat perkuliahan (RPS), proses pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Diharapkan proses pembelajaran karakter tidak hanya dilaksanakan pada PKn saja melainkan terintegrasi pada semua mata pelajaran di sekolah, agar menghasilkan generasi muda yang berkarakter Pancasila.

Kata Kunci : *pancasila, pendidikan, pembelajaran, karakter, kewarganegaraan*

PENDAHULUAN

Permasalahan klasik terkait krisis karakter yang semakin menjauh dari nilai-nilai Pancasila dirasakan semakin nampak jelas. Lebih parah lagi, krisis karakter terjadi pada generasi muda. Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat kenakalan remaja yang semakin tinggi, kejahatan dan pelanggaran atas norma-norma yang dilakukan generasi muda semakin

banyak dan beragam, seperti penyalahgunaan narkoba, seks bebas, merokok, tawuran antar pelajar, dan masalah kenakalan remaja lainnya. Krisis karakter pada generasi muda, salah satunya disebabkan karena pengaruh arus teknologi informasi yang semakin canggih, yang sebagian besar datang dari pengaruh media sosial yang provokatif. Dampak krisis karakter tersebut menjadikan generasi muda tidak mampu lagi mengendalikan dirinya sendiri, tidak bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk dalam mengambil keputusan.

Selain itu, krisis karakter yang dialami generasi muda juga disebabkan karena minimnya keteladanan dari generasi sebelumnya. Menurut Latif (2011) akibat keteledoran, ketidaktaatan, dan penyelewengan atas nilai-nilai Pancasila oleh bangsa sendiri, terutama oleh para penyelenggara negara, bintang pemimpin itu pun redup tertutup kabut, pelan-pelan timbul kegelapan dalam rumah kebangsaan. Dari pendapat tersebut menunjukan sikap para penyelenggara yang justru belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga permasalahan kebangsaan banyak timbul hingga mengkikis makna dari Pancasila itu sendiri. Korupsi yang merajalela mulai dari pemerintah pusat hingga daerah menyebabkan masyarakat mengalami krisis kepercayaan kepada para penyelanggara negara. Sehingga perilaku mereka tidak bisa menjadi tauladan atau bintang penuntun untuk para generasi muda. Justru menjadi pemicu generasi muda untuk ikut meniru perilaku penyelenggara negara, misalnya mencontek pada saat ujian, tidak disiplin, tawuran, dll.

Kondisi di atas, tentunya tidak sesuai dengan karakter yang seharusnya dimiliki oleh para generasi muda. Harusnya karakter generasi muda adalah karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, sikap anak yang memiliki kepedulian tinggi terhadap orang lain, menghormati orang yang lebih tua, bersopan santun, gemar membantu orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan, peduli menjaga kebersihan lingkungan, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Karakter tersebut dapat diartikan sebagai nilai-nilai kebajikan (tahu nilai kebajikan, tahu berbuat baik, dan nyata berkehidupan baik) yang tertanam dalam diri dan terjawantahkan dalam perilaku (Miranita, 2012).

Dari permasalahan tersebut di atas, pendidikan karakter bagi generasi muda sangat diperlukan untuk mengembalikan karakter warga negara Indonesia kepada karakternya yang asli sebagai warga negara Indonesia, yaitu karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tujuannya adalah meningkatkan keikutsertaan dan kepedulian generasi muda dalam pembangunan nasional. Upaya penumbuhan karakter bagi pemuda dapat dilakukan secara

efektif melalui pendidikan. Salah satunya adalah melalui mata pelajaran atau mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Pendidikan Agama. Mata pelajaran/mata kuliah PKn sangat strategis dalam upaya penanaman nilai-nilai karakter pada peserta didik. Hal tersebut setidaknya dapat dicermati dari: *Pertama*, cakupan materi pengetahuan/substansi tentang nilai dan moral. *Kedua*, berupaya menginternalisasikan nilai-nilai karakter kepada warga negara untuk membentuk warga negara yang baik (*Good Citizen*). *Ketiga*, mendorong peserta didik berperilaku sesuai dengan karakter yang tangguh. *Keempa, PKnt* berusaha membentuk watak atau karakter warga negara sesuai dengan kepribadian bangsa, yaitu Pancasila.

Maka dari latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah, bagaimana menjadikan Pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran atau mata kuliah yang strategis untuk menanamkan nilai-nilai karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?

METODE PENELITIAN

Tulisan ini disusun berdasarkan pengumpulan data yang berkaitan dengan judul tulisan. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang bersumber dari buku yang sesuai dengan judul dan tulisan, lalu digunakan sebagai bahan analisis dari hasil temuan permasalahan dilapangan khususnya pada saat mengajarkan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Selain dari buku, data juga diperoleh dari berbagai jurnal yang juga digunakan sebagai bahan analisis, sekaligus sebagai bahan untuk perbandingan hasil temuan. Sumber pengumpulan data kedua dilaksanakan dengan metode wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan informan yang terdiri dari mahasiswa yang mendapatkan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Mahasiswa disini menjadi sumber informasi tentang pelaksanaan mata kuliah Pendidikan Kewaraganegaraan apakah mampu menenamkan karakter ataukah tidak. Selain yang menjadi informan untuk pengambilan data adalah guru dan dosen yang mengampu mata pelajaran atau mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Guru dan Dosen menjadi sumber informasi tentang bagaimana upaya strategis dalam menanamkan nilai karakter melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

Selanjutnya hasil data akan dianalisis menggunakan teknis analisis data dengan model analisis interaktif.. Kegiatan analisis ini meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 2007: 20).

a. Pengumplan Data; Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan studi pustaka dari buku dan jurnal
b. Reduksi Data, yaitu melakukan pemilihan data, pemusatan data, penyederhanaan data, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
c. Penyajian Data, yaitu menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan.
d. Penarikan Kesimpulan, yaitu melakukan penyimpulan setelah data direduksi dan disajikan. Jika terjadi kekurangan data maka dilakukan pengumpulan data lagi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah pada capaian pendidikan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang sesuai standar kompetensi lulusan (Barus, 2015). Sejak awal Indonesia merdeka, pendidikan karakter telah digagas para pemikir pendiri bangsa Indonesia, terutama oleh Persiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno, melalui gagasannya tentang pembentukan karakter bangsa (*Nation and Character Building*), tentang Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta relevansi, tantangan dan perkembangan bagi pendidikan karakter di Indonesia (Rifki, 2011).

Istilah karakter berasal dari bahasa Yunani *charassein* dan "*kharax*" yang maknanya *tools for making* atau *to engrave* yang artinya mengukir, kata ini mulai banyak digunakan kembali dalam bahasa prancis "c*aracter"* pada abad ke 14 dan kemudian masuk dalam bahasa inggris menjadi "*character'* sebelum akhirnya menjadi bahasa Indonesia menjadi "karakter".5 Membentuk karakter seperti kita mengukir di atas batu permata atau permukaan besi yang keras. Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau juga kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan mendasari cara pandang, berpikir, sikap, dan cara bertindak orang tersebut. Kebajikan tersebut terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, hormat

kepada orang lain (kemendiknas, 2010). Lebih lanjut tentang karakter, Lickona (2004) menyatakan bahwa secara substantif terdapat tiga unjuk *perilaku (operatives values, values in action)* yang satu sama lain saling berkaitan, yakni *moral knowing, moral feeling, dan moral behavior.* Lickona (2004) menegaskan lebih lanjut bahwa karakter yang baik atau *good character* terdiri atas proses psikologis *knowing the good, desiring the good, and doing the good—habit of the mind, habit of the heart, and habit of action* (dalam Miranita, 2012).

Pendidikan karakter yang dikembangkan di Indonesia adalah karakter yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yaitu sesuai nilai-nilai Pancasila. Misalnya sesuai dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, Maka karakter yang dikembangkan adalah beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, menghargai orang yang beragama lain, memberikan kesempatan untuk orang lain beribadah, tidak memaksanakan agama atau kepercayaan kepada orang lain, bekerjasama antara pemeluk agama lain, toreransi. Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, misalnya menghargai dan menghormati hak dan kewajiban orang lain, saling tolong menolong, rukun, gotong royong, bersikap adil, menghormati HAM. Sila ketiga, Persatuan Indonesia misalnya tidak memandang perbedaan baik dari segi suku, agama, bahasa, ras, dan golongan, ikut serta menjaga keutuhan negara kesatuan republik Indonesia. Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai karakter yang dapat dikembangkan sesuai dengan sila ini adalah misalnya mengutamakan musyawarah mufakat, gotong royong, mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, mengutamakan kepentingan rakyat. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nilai karakter yang dapat dikembangkan adalah bersikap adil, menghormati orang lain, bersikap rukun, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, menolong orang lain, tidak menciptakan jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin, serta menciptakan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan.

Kelima karakter bangsa itulah yang diharapkan tertanam pada jiwa peserta didik melalui pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Rifki, 2011). Agar proses internalisasi nilai-nilai karakter

kepada generasi muda berjalan dengan baik, maka pendidikan tidak hanya mengacu pada aspek pengetahuan (*cognitive*) saja melainkan, sikap perasaan (*affection felling*), dan tindakan, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME) baik untuk diri sendiri, masyarakan dan bangsanya serta kemampuan keterampilan (psikomotorik). Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, yang menyatakan bahwa "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

Agar pendidikan berjalan dengan efektif, maka kualitas pembelajaran pendidikan karakter, khususnya melalui mata pelajaran atau mata kuliah PKn harus berjalan dengan optimal. Menurut Sabar (2010), Sekolah sebagai institusi pendidikan pada dasarnya bertujuan mempersiapkan peserta didik untuk dapat memecahkan masalah kehidupan pada masa sekarang dan di masa yang akan datang, dengan mengembangkan potensipotensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, pendidikan mempunyai fungsi dalam membentuk karakter peserta didik. Dengan kata lain, bahwa melalui proses pendidikan yang profesional maka akan dapat membentuk karakter peserta didik. Proses pendidikan karakter melalui Pendidikan Kewarganegaraan dapat dilaksanakan dengan 3 tahap kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran.

1. Integrasi pendidikan karakter dalam proses perencanaan pembelajaran PKn

Pada tahap proses perencanaan, upaya pendidikan karakter melalui pembelajaran PKn dapat diawali dengan proses penyusunan bahan ajar yang mengandung nilai-nilai karakter. Desain pembelajaran yang baik diawali dengan proses penyusunan perangkat pembelajaran yang baik pula. Dalam perangkat pembelajaran seperti RPP atau SAP, perlu dilakukan identifikasi nilai-nilai karakter yang dapat dikembangkan dalam pelaksanaan pembelajaran. Tujuannya adalah agar proses internalisasi nilai dapat dilaksanan secara terarah dan sistematis. Menurut Eko dan Tijan (2010), Pengembangan nilai-nilai karakter luhur yang menjadi acuan bagi seluruh warga negara Indonesia, dapat juga dengan mengacu

pada keteladanan dari para *founding fathers.* Nilai-nilai karakter yang dapat dikembangkan misalnya nilai religius, jujur, peduli, toleran, demokratis, santun, cerdas, dan tangguh. Pengertian dari masing-masing nilai tersebut adalah sebagai berikut :

a. *Religius* adalah sikap pandang dan perilaku yang mencerminkan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.
b. *Jujur* adalah satunya sikap, ucapan, dan perilaku yang menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya.
c. *Peduli* adalah sikap dan perbuatan yang diarahkan untuk berbagi dan membantu orang lain dan berbuat untuk memelihara lingkungan alam secara berkelanjutan.
d. *Toleran (tepa slira)* adalah sikap memahami dan menerima kenyataaan, sikap, atau tindakan orang lain yang berbeda dari yang diyakini atau dilakukannya;
e. *Demokratis* adalah sikap atau tindakan yang didasarkan pada penghormatan terhadap hak dan kewajiban orang lain dalam kesetaraan.
f. *Santun* adalah sikap yang mencerminkan kehalusan budi dan tingkah laku sebagai wujud penghormatan terhadap orang lain.
g. *Cerdas* adalah kemampuan untuk mengetahui dan memahami segala hal dengan cepat dan tepat serta berkemampuan memecahkan masalah.
h. *Tangguh* adalah kemampuan yang tak mudah dikalahkan karena kekuatan, keandalan, ketabahan, dan ketahanannya dalam menghadapi situasi apa pun.

Nilai-nilai tersebut bisa diselipkan pada setiap kegiatan pembelajaran, mulai dari penyusunan tujuan pembelajaran, misalnya tidak hanya mencapai tujuan secara kognitif/substansi materi saja, melainkankan menambahkan tujuan yang lebih khusus yaitu untuk menanamkan nilai-nilai karakter yang fokus pada dari aspek sikap. Dalam perangkat pembelajaran misalnya, pada kegiatan awal pembelajaran proses pembelajaran diawali dengan berdoa, hal ini akan menginternalisasikan nilai religius, karakter yang mencerminkan sikap dan perilaku bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila pertama.

Menurut Yudi (2017), sila Ketuhanan Yang Maha Esa menghendaki agar bangsa Indonesia berketuhanan dengan menjiwai sifat kasih sayang-Nya dan menjadikan-Nya sebagai sumber moralitas dalam kehidupan dan kemasyarakatan. Dengan pengalaman sila

ini khususnya bagi generasi muda harusnya tidak ada lagi kekerasan antar pelajar, tawuran, mencontek, dan berbagai jenis kenakalan remaja lainnya.

2. Integrasi pendidikan karakter dalam pelaksanaan pembelajaran PKn

Dalam proses pelaksanaan pembelajaran, upaya pendidikan karakter dapat dilakukan pada kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Tujuan kegiatan pembelajaran dari pendahuluan, inti dan penutup, tidak hanya memberikan peserta didik materi atau ilmu pengetahuan saja, melainkan lebih kepada internalisasi nilai-nilai karakter. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran PKn, guru/dosen memilih metode pembelajaran yang efektif untuk menyampaikan materi sekaligus secara tidak langsung menginternalisasikan nilai-nilai karakter. Metode pembelajaran harus beragam disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Pemilihan metode yang tepat akan memudahkan peserta didik menerima materi sekaligus menghindari kejenuhan dalam proses pembelajaran.

Metode pembelajaran yang bisa diterapkan dalam pembelajaran PKn misalnya diskusi, demonstrasi, debat, *role playing*, konstekstual, inquiri, *problem based learning*, dan metode-metode pembelajaran kreatif lainnya. Dalam implementasinya penggunaaan metode diskusi misalnya, secara tidak langsung akan mengajarkan peserta didik untuk memiliki karakter peduli, peduli dengan menghargai pendapat yang mungkin berbeda, karakter santun dengan menghormati teman atau pendidik yang sedang menyampaikan materi atau argument, dan karakter demokratis yang didasarkan pada penghormatan terhadap hak dan kewajiban orang lain dalam kesetaraan. Upaya penanaman karakter sesuai dengan nilai peduli, santun dan demokratis, juga sejalan dengan pengamalan sila kedua dan sila keempat Pancasila.

3. Integrasi pendidikan karakter dalam evaluasi pembelajaran PKn

Teknik-teknik penilaian dipilih sehingga secara keseluruhan teknik-teknik tersebut mengukur pencapaian peserta didik dalam kompetensi dan karakter. Proses penilaian atau evaluasi kompetensi dan karakter dapat dilaksanakan dengan, pertama memberikan umpan balik, kesempatan kepada peserta didik agar aktif dalam kegiatan pembelajaran, misalnya menyampaikan pendapat, sebagai upaya menumbuhkan karakter cerdas dan demokratis sekaligus pengamalan sila ke empat. Kedua, memberikan tugas rumah atau pekerjaan rumah baik secara individu atau keompok dengan tujuan menumbuhkan karakter tanggungjawab,

kerjasama, peduli, toleran, dan tidak memandang teman dari segi agama, suku. Hal ini sesuai dengan karakter sila ketiga, sesuai dengan nilai persatuan. Ketiga, dengan memberikan tes baik secara lesan maupun tertulis untuk mengukur seberapa besar materi yang dapat diterima oleh peserta didik, sekaligus sebagai bahan evaluasi diri bagi pendidik, memberikan nilai secara objektif dan adil. Sesuai dengan karakter sila ke 5, nilai keadilan. Dan yang ke empat, dalam penyusunan soal ujian lebih baik pendidik menyisipkan soal yang mengandung nilai-nilai karakter, agar peserta didik mampu berpikir kritis serta mengimplementasikan nilai-nilai karakter.

Contoh pelaksanaan pembelajaran PKn tersebut menunjukan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan efektif digunakan untuk menanamkan pendidikan karakter bagi siswa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

KESIMPULAN

Pendidikan karakter sangat diperlukan untuk para generasi muda, salah satunya melalui proses pembelajaran. Pembelajaran PKn sangat strategis dan efektif untuk menanamkan nilai-nilai karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Upaya penanaman pendidikan karakter dapat dilaksnakan pada saat penyusunan perangkat pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi. Diharapkan proses pembelajaran karakter tidak hanya dilaksanakan pada PKn saja melainkan terintegrasi pada semua mata pelajaran di sekolah, agar menghasilkan generasi muda yang berkarakter Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Barus, 2015. *Menakar Hasil Pendidikan Karakter terintegrasi di SMP*. Jurnal Cakrawala Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan Juni 2015 No 2 UNY

Handoyo, Eko., dan Tijan. 2011. *Model Pendidikan Karakter Berbasis Konservasi*. Jakarta. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud.

Hammid Abdulloh, dkk. 2013. *Penanaman Nilai-nilai Karakter Siswa SMK Salafiah Prodi TKJ Kajen Margoyoso Pati Jawa Tengah*, dalam Jurnal Pendidikan Vokasi Vol 3 Nomor 2 Juni.

Maftuh Bunyamin. 2008, *Internalisasi Nilai-nilai Nasionalisme melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan*. dalam jurnal Educationist Vol II No 2 ISSN 1907-8838 Universitas Pendidikan Indonesia.

Miranita Khusniati. 2012. *Pendidikan karakter melalui pendidikan IPA*, Jurnal IPA Indonesia 1 Volume 2

Murdiono Mukhamad. 2010. *Strategi Internalisasi Nilai-nilai Moral Religius dalam Proses Pembelajaran di Perguruan Tinggi*, Dalam Jurnal Cakrawala Pendidikan, Mei 2010, Th XXIX, Universitas Negeri Jogjakarta

Latif Yudi, 2011. *Negara Paripurna Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Utama , Jakarta.

Latif Yudi, 2017. *Mata Air Keteladanan Pancasila Dalam Perbuatan*, Mizan, Jakarta.

Rifki Afandi. 2011. *Integrasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar*. Jurnal Pedagogia, Vol 1 No 1

Sabar Budi Raharjo. 2010. *Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Menciptakan Akhlak Mulia*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 16, Nomor 3, Mei 2010

Sunarto, dkk., 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Semarang : Unnes Pres

Soegito,2015. *Pendidikan Pancasila*, Semarang : Unnes press

Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional

PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENANGGULANGI RADIKALISME DI PERGURUAN TINGGI

Pipit Widiatmaka
Istitut Agama Islam Negeri Surakarta
pipit.widiatmaka.pkn@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam menanggulangi radikalisme di perguruan tinggi. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka (buku, jurnal, dan prosiding) serta internet, berupa berita yang terkait dengan penelitian ini.Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data interaktif yang terdiri dari 4 tahap, yaitu 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data, dan 4) penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa radikalisme merupakan faham yang sangat mengancam keberagaman yang ada di Indonesia, hingga saat ini faham tersebut mulai berkembang di dunia pendidikan khususnya di perguruan tinggi. Radikalisme mulai berkembang di perguruan tinggi karena sebagian besar mahasiswa karena perguruan tinggi tempat berkumpulnya para pemuda dan mudah dipengarui dengan sesuatu yang baru. Peran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi sangat penting dan sangat dibutuhkan, menggingat mata kuliah tersebut adalah mata kuliah pengembangan kepribadiaan dan juga merupakan pendidikan moral. Pendidikan kewarganergaan dapat difungsikan sebagai pendidikan multikultural, sehingga melalui mata kuliah tersebut mampu membuka wawasan mahasiswa bahwa Indonesia adalah negara multikultural dan mampu merdeka di atas semua perbedaan yang ada, sehingga radikalisme di perguruan tinggi dapat ditanggulangi. Melalui pendidikan kewarganegaraan juga dapat membangun karakter toleransi, melalui proses pembelajaran yang efektif dengan strategi pendidikan karakter, yaitu *moral knowing*, *moral loving*, dan *moral doing*. Pendidik di perguruan tinggi diharuskan mengawasi kegiatan para mahasiswanya di lingkungan perguruan tinggi.

Kata kunci: *pendidikan kewarganegaraan, radikalisme, perguruan tinggi*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa, agama dan lain sebagainya, sehingga tidak dipungkiri bahwa Indonesia disebut sebagai negara multikultural. Keberagaman yang ada di Indonesia merupakan suatu kelebihan yang dimiliki oleh Indonesia, namun keberagaman tersebut bisa menimbulkan disintegrasi nasional apabila tidak mampu dirawat dan dijaga karena keberagaman rentan terhadap konflik. Mahfud (2009: 10) berpandangan bahwa "pada hakikatnya sejak awal para *founding fathers* bangsa Indonesia telah menyadari akan keragaman bahasa, budaya, agama, suku dan etnis

di Indonesia. Singkatnya bangsa Indonesia adalah bangsa multikultural, maka bangsa Indonesia menganut semangat *Bhineka Tunggal Ika*. Konsep *Bhineka Tunggal Ika* terlebih dahulu".

Sujanto (2009: 9) memaparkan bahwa "sesanti *Bhineka Tunggal Ika*, *Sesanti* artinya kelimat bijak (*wise-word*) yang dipelihara dan digunakan sebagai pedoman atau sumber kajian di masyarakat. *Bhineka Tunggal Ika* adalah kalimat (*sesanti*) yang tertulis dipita lambang negara Garuda Pancasila, yang berarti berbagai keragaman etnis, agama, adat-istiadat, bahasa daerah, budaya dan lainya yang mewujud menjadi satu kesatuan tanah air, satu bangsa dan satu bahasa Indonesia". Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan persatuan yang menjadi keinginan masyarakat Indonesia. Kunci yang sekaligus menjadi mediasi untuk mewujudkan cita-cita itu adalah toleransi. Toleransi adalah karakter yang harus dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia agar keberagaman di Indonesia dapat terjaga dengan baik.

Pasca reformasi Isu suku, agama, ras dan antargolonga (SARA) menjadi isu yang menarik untuk diperbincangkan, karena banyak konflik yang dilatarbelakangi oleh isu tersebut. Pada dasarnya pasca reformasi konflik yang berbau SARA semakin meningkat, karena reformasi memberikan kebebasan yang tidak ada batasnya atau kebebasan yang berlebihan. Kebebasan terebut ternyata dimanfaatkan oleh kelompok atau organisasi radikal untuk menjalankan aksinya yaitu menolak Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Misal fitnah dan provokasi dari beberapa tokoh organisasi Al-Jama'ah Al-Islamiyah (AJAI) seperti Abdullah Sungkar, yang mengatakan bahwa "Pancasila adalah doktrin-doktrin batil yang meracuni pikiran pemuda-pemuda Islam Indonesia. Lalu Abu Bakar Ba'asyir menuding Pancasila sebagai rekayasa pihak Kristen/Katholik untuk menghancurkan institusi Islam di Indonesia" (Hendropriyono, 2009: 363). Pasca reformasi radikalisme mulai berkembang di seluruh lapisan masyarakat, yang berujung pada terjadinya tindakan terorisme di beberapa daerah. Fenomena ini sangat mengancam eksistensi keberagaman di Indonesia menggingat masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang hoterogen.

Radikalisme di Indonesia mulai merambah ke lingkungan pendidikan, sehingga banyak siswa maupun mahasiswa terpengaruh dengan ideologi tersebut, dan pada akhirnya menolak ideologi Pancasila, yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam. Direktur Pencegahan BNPT (Brigadir Jenderal Hamidin) mengungkapkan bahwa "hingga

tahun 2016 hasil penelitian BNPT yang bekerja sama dengan perguruan tinggi menunjukkan dari seluruh pelaku teror di Indonesia paling banyak dilakukan oleh orang yang berusia 21-30 tahun, angkanya mencapai 47 %. Dilihat dari segi pendidikan pelajar, tingkat SMA memiliki jumlah tertinggi, mencapai 63 %. Tingkat perguruan tinggi di posisi kedua dengan jumlah 16 %" (Sumantri, 9 Mei 2016: *http://news.metrotvnews.com*). Fenomena ini sangat miris menggingat banyak pemuda yang merupakan calon pemimpin Indonesia di masa yang akan datang terpengaruh dengan ideologi radikal dan menolak Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada tanggal 29 Februari 2016 menyelenggarakan kegiatan "Dialog Pencegahan Radikal Terorisme dan ISIS di Kalangan Perguruan Tinggi se-Jawa Tengah" di Universitas Diponegoro Semarang. Perguruan tinggi dipilih sebagai mitra strategis dalam upaya pencegahan terorisme, karena menurut Anas Saidi peneliti LIPI mengungkapkan bahwa temuan yang mengagetkan bahwa radikalisme ideologi telah merambah dunia mahasiswa khususnya melalui organisasi kemahasiswaan yang baru tumbuh pasca reformasi. Pasca reformasi organisasi kemahasiswaan dari kelompok Cipayung seperti PMII, HMI, GMNI, PMKRI, GMKI, dan lainnya telah kurang dominan dan digeser oleh kelompok organisasi kemahasiswaan yang rajin menanamkan ideologi radikal (Malik, 2016: *http://jalandamai.org/mewaspadai-benih-radikalisme-di-kampus.html*).

Perguruan tinggi menjadi tempat yang sangat efektif untuk menyebarkan ideologi radikal, karena perguruan tinggi adalah tempat berkumpulnya para pemuda dalam rangka menuntut ilmu. Di sisi lain, pemuda yang terpengaruh dengan ideologi radikal tersebut, akan berpotensi menjadi seorang teroris. Direktur Pencegahan BNPT, Brigadir Jenderal Hamidin mengungkapkan bahwa "hingga tahun 2016 hasil penelitian BNPT yang bekerja sama dengan perguruan tinggi menjelaskan alasan mengapa pemuda menjadi target utama rekruetmen menjadi anggota jaringan teroris, yaitu 1) Pemuda sedang dalam proses pencarian jati diri. Berdasar hasil riset *The United States Institute of Peace* pada tahun 2010, menggungkapkan bahwa 2.032 anggota jaringan Al-Qaeda adalah mahasiswa atau remaja yang mempertanyakan identitas dirinya, 2) Pemuda terlibat terorisme karena membutuhkan kebersamaan sehingga kelompok teroris pandai memanfaatkan remaja yang emosinya tidak

stabil, 3) Pemuda memiliki hasrat ingin memperbaiki apa yang menurutnya tidak benar atau tidak adil, 4) Ideologi pemuda biasa dijejali dengan semangat perubahan, dan 5) Ada juga pemuda yang menjadi pelaku teror lantaran ingin mencari sensasi dan kegagahan" (Sumantri, 2016: *http://news.metrotvnews.com*).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa radikalisme yang sudah masuk ke dunia pendidikan khususnya di perguruan tinggi semakin mengkhawatirkan masa depan bangsa Indonesia, karena pemuda adalah pemegang estafet kpemimpinan di masa yang akan datang. Apabila pemuda (mahasiswa) terpengaruh dengan ideologi yang radikal masa depan keberagaman di Indonesia akan terancam punah. Pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan keperibadian diharapkan menjadi ujung tombak untuk menanggulangi radikalisme di perguruan tinggi, sehingga keberagaman di Indonesia dapat terjaga dan terpelihara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka (buku, jurnal, dan prosiding) serta internet, berupa berita yang terkait dengan penelitian ini.Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data interaktif yang terdiri dari 4 tahap, yaitu 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data, dan 4) penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Telaah tentang Radikalisme

Radikalisme merupakan faham yang sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia karena banyak dan sering terjadi di Indonesia, namun radikalisme yang terjadi di Indonesia sering mengatasnamakan agama Islam sehingga orang-orang tersebut merusak nama baik agama Islam. Padahal agama Islam sendiri adalah agama yang menekankan pada persaudaraan dan perdamaian. Tindakan radikal tidak hanya dilakukan dari kalangan Islam saja, namun juga pernah dilakukan oleh agama lain, seperti radikalisme agama Kristen di abad XVI yang salah satu tokohnya Marthin Luther.

Tindakan radikal tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan agama Islam saja, namun tindakan tersebut juga dilakuakan oleh pemimpin atau penguasa negara dan kaum pergerakan. Misal Vladimir Lenin menggunakan instrument *Cheka* (polisi rahasia) untuk memerangi kaum *Bolshevik,* Adolf Hitler menggunakan Gestapo Nazi kepada rakyat Jerman. Kaum pergerakan juga menggunakan cara-cara teror dan kekerasan untuk melemahkan musuh, sabotase, penculikan pembunuhan, perampokan merupakan bagian teknik perang untuk memperjuangkan kemerdekaan. Kasus terbaru terjadi tindakan radikal yang merupakan tindakan genosida terhadap suku Rohignya di Myanmar, yang dilakukan oleh beberapa pemeluk agama Budha yang bekerja sama dengan pemerintah Myanmar.

Secara bahasa, radikalisme berasal dari bahasa Latin, *radix*, yang berarti "akar". Ia adalah paham yang menghendaki adanya perubahan dan perombakan besar untuk mencapai kemajuan. Dalam perspektif ilmu sosial, radikalisme erat kaitannya dengan sikap atau posisi yang mendambakan perubahan terhadap *status quo* dengan cara menggantinya dengan sesuatu yang sama sekali baru dan berbeda (Susanto, 2007: 3). Radikalisme pada dasarnya merupakan respon seseorang atau sekelompok orang terhadap kondisi yang sedang berlangsung yang muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan, atau bahkan perlawanan terhadap ide, asumsi, kelembagaan, nilai atau yang lainnya.

Istilah radikal secara sederhana mengacu kepada keadaan atau orang dan gerakan tertentu yang menginginkan perubahan sosial dan politik secara cepat dan menyeluruh yang sering dilakukan dengan menggunakan cara-cara tanpa kompromi dan bahkan kekerasan-bukan dengan cara-cara damai (Azra, 2002: 112). Sartono Kartodirdjo (1993: 38) sendiri mengartikan radikalisme sebagai gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan yang berkuasa. Pada dasarnya makna radikalisme itu sangat luas dan tidak mengacu pada suatu faham yang berujung pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok muslim saja, melainkan gerakan sosial yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan kondisi tertentu dengan pemikiran dan tindakan kekerasan atau radikal.

Agil Asshofie dalam Rodin (2016: 34) mengungkapkan Secara sederhana, radikalisme adalah pemikiran atau sikap yang ditandai oleh empat hal yang sekaligus menjadi karakteristiknya, yaitu: *Pertama*, sikap tidak toleran dan tidak mau menghargai pendapat atau keyakinan orang lain. *Kedua*, sikap fanatik, yakni sikap yang membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. *Ketiga*, sikap eksklusif, yakni sikap tertutup dan berusaha berbeda dengan kebiasaan orang banyak. *Keempat*, sikap revolusioner, yakni kecenderungan untuk menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan.

Radikalisme merupakan suatu faham yang berorientasi pada tindakan kekerasan, entah itu menggunakan tindakannya atau pemikirannya. Tindakan radikal selama ini tidak hanya dilakukan oleh kelompok yang berorientasi pada agama tertentu saja, melainkan juga dilakukan oleh kelompok tertentu yang tidak berorientasi pada agama, misal keinginan sekelompok orang yang ingin melakukan perubahan kondisi yang pemerintahannya sering melakukan tindakan korupsi, dengan cara pemikiran dan tindakan kekerasan.

B. Peran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi, sehingga setiap program studi wajib memberikan mata kuliah tersebut kepada mahasiswa, meskipun program studi eksak, seperti matematika, kimia. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 37 ayat (2) menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Dasar tersebut merupakan ketentuan yang wajib diikuti oleh seluruh universitas, institut maupun sekolah tinggi di Indonesia. Pemerintah melalui Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional RI mengeluarkan Keputusan Nomor 267/ DIKTI/Kep/2000 tentang Penyempurnaan Garis-Garis Besar Proses Pembelajaran (GBPP) Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) Pendidikan Kewarganegaraan pada perguruan tinggi di Indonesia, pada pasal 3 dalam Keputusan Dirjen Dikti tersebut bahwa pendidikan Kewarganegaraan dirancang dengan maksud untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan

hubungan antar warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Pendidikan kewarganegraan di perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting untuk membangun karakter mahasiswa agar menjadi warga negara yang baik berdasarkan Pancasila. Sapriya (2012: 37) mengungkapkan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai warga negara terdidik dalam kehidupannya selaku warga negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab.
2. Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional secara kritis dan bertanggung jawab.
3. Memupuk sikap dan prilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan serta patriotisme yang cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

Pada dasarnya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi sangat efektif untuk membangun karakter toleransi menggingat seluruh materi yang tercakup di dalam mata kuliah tersebut bersumber dari Pancasila. Di sisi lain, pendidikan kewarganergaan juga dituntut untuk dapat membangun karakter yang berdasarkan kepribadian bangsa Indonesia. Melalui mata kuliah tersebut mahasiswa dapat memahami bahwa Indonesia dibangun oleh *founding fathers* di atas perbedaan, seperti suku, agama, bahasa, ras, dan lain sebagainya. Perbedaan yang dibangun oleh *founding fathers,* saat ini mulai terancam karena banyak pemuda yang melakukan tindakan radikal untuk menolak Pancasila. Fenomena ini sangat mengkhawatirkan bagi masa depan Indonesia, karena generasi penerusnya melakukan tindakan-tindakan radikal yang bertentangan dengan Pancasila.

Mahfud (2009: 5) memaparkan bahwa "pendidikan harus mampu memberikan panyadaran (*consciousness*) kepada masyarakat bahwa konflik bukan satu hal yang baik untuk dibudayakan. Selayaknya pula pendidikan mampu memberikan tawaran-tawaran yang mencerdaskan antara lain dengan cara men-*design* materi, metode hingga kurikulum yang mampu menyadarkan masyarakat akan pentingnya sikap saling toleran, menghormati perbedaan suku, agama, ras, etnis dan budaya masyarakat Indonesia yang

multikultural". Pada dasarnya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi membekali mahasiswa tiga kompetensi, sehingga sehingga tidak mudah terpengaruh dengan ideologi radikal dan tetap berpegang teguh pada ideologi Pancasila. Kompetensi tersebut, yaitu 1) *Civic knowledge,* kompetensi ini membekali warga negara pengetahuan bagaimana untuk menjadi warga negara yang baik *(good citizen)* berdasarkan Pancasila, *2)* C*ivic skill*, kompetensi ini berkenaan dengan apa yang harus dapat dilakukan oleh mahasiswa bagi kelangsungan kehidupana berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila, yaitu keterampilan intelektual dan partisipasi, dan 3) *Civic dispositions,* kompetensi dalam ranah ini menuntut mahasiswa harus memiliki karakter yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila agar menjadi warga negara yang baik (*good citizen*), seperti karakter religius, karakter tanggung jawab, karakter toleransi dan lain sebagainya.

C. Pendidikan Kewarganegraan sebagai Wahana Pendidikan Multikultural

Keberagaman di Indonesia tidak serta merta muncul dengan sendirinya, namun melalui proses yang panjang sehingga membentuk suatu kesatuan yang memiliki perbedaan lata belakang, yang kemudian kelompok tersebut dikenal dengan nama bangsa Indonesia. Cogan dalam Winataputra (2012: 189) mengemukakan bahwa masyarakat multikultural Indonesia tidak bisa dibangun secara *taken for granted* atau *trial and error*, sebaliknya harus diupayakan secara sistematis, programatis, integrated dan berkesinambungan. Salah satu strategi yang bisa dilakukan dalam konteks tersebut adalah melalui pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan yang dimaksud dalam hal ini adalah pendidikan kewarganegaraan dalam arti luas (*citizenship education*) yang memiliki perspektif kewarganegaraan dunia abad ke-21 yang terkenal dengan sebutan kewarganegaraan multidimensi yang salah satu cirinya memiliki karakteristik multikultural.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang memiliki posisi dan peran penting, karena memuat materi yang selalu menekankan dan membangun persatuan dan kesatuan di dalam perbedaan yang ada sehingga mata kuliah tersebut dapat difungsikan sebagai pendidikan multikultural. Mahfud (2009: 192-193) memaparkan ada beberapa pedekatan dalam proses pendidikan multikultural, yaitu:

1. Tidak lagi menyamakan pandangan pendidikan (*education*) dengan persekolahan (*schooling*), atau pendidikan multikultural dengan program-program sekolah formal.
2. Menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan dengan kelompok etnis.
3. Pengembangan kompetensi dalam suatu kebudayaan baru biasanya membutuhkan interaksi inisiatif dengan orang-orang yang sudah memiliki kompetensi.
4. Meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan.
5. Kemungkinan bahwa pendidikan (baik formal maupun non formal) meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa kebudayaan.

Pada dasarnya pendidikan multikultural dapat diimplementasikan di setiap jalur pendidikan, baik pendidikan formal, nonformal maupun informal, namun strategi dalam mengimplementasikannya berbeda. Misal di jalur pendidikan informal, orang tua harus menjadi tauladan bagi anaknya dengan menunjukkan beberapa perbedaan yang ada di lingkungan sekitarnya kepada anaknya. Melalui proses tersebut, maka wawasan anak didiknya menjadi lebih luas dan faham akan keberagaman yang ada. Di pendidikan formal anak didik mendapatkan pelajaran tentang keberagaman melalui mata pelajaran PPKn dan Sejarah, sehingga melalui pendidikan formal anak didik akan memiliki wawasan yang lebih luas tentang keberagaman yang ada di Indonesia.

Pendidikan kewarganegaraan untuk Indonesia secara filosofik dan substantif-pedagogis merupakan pendidikan untuk memfasilitasi perkembangan pribadi peserta didik agar menjadi warga negara Indonesia yang religius, berkeadaban, berjiwa persatuan Indonesia, demokratis dan bertanggung jawab dan berkeadilan serta mampu hidup secara harmonis dalam konteks multikulturalisme-*Bhinneka Tunggal Ika* (Candra dan Yuliadhani, 2012: 209). Di perguruan tinggi mata kuliah pendidikan kewarganegaran diharapkan mampu membuka pemahaman atau cakrawala mahasiswa bahwa Indonesia adalah negara yang multikultural dan bukan negara monokultural. Melalui proses tersebut mahasiswa secara sadar maupun tidak sadar akan tertanam *mindset* bahwa setiap warga negara Indonesia harus menerima kenyataan itu dan dituntut untuk menjaga dan memelihara keberagaman tersebut.

Radikalisme yang berkembang di perguruan tinggi pada dasarnya sangat mengancam keberagaman di Indonesia, baik sekarang maupun di masa depan, sehingga pendidikan multikultural menjadi ujung tombak untuk menanggulangi radikalisme di

perguruan tinggi. Pendidikan multikultural untuk menanggulangi radikalisme harus memiliki strategi yang baik agar tujuan di dalam pembelajaran tersebut dapat tercapai secara maksimal. Banks dalam Budimansyah dan Suryadi (2008: 31-32) mengemukakan bahwa terdapat lima dimensi yang terkait dengan pendidikan multikultural, yaitu:

1. *Content integration*, mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan teori dalam mata kuliah/disiplin ilmu.
2. *The knowledge construction process*, membawa mahasiswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran (disiplin).
3. *An equity paedagogy*, menyesuaikan metode pembelajaran dengan cara belajar mahasiswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik mahasiswa yang beragam baik dari segi ras, budaya ataupun sosial.
4. *Prejudic reduction*, mengidentifikasi karakteristik ras mahasiswa dalam menentukan metode pengajarannya.
5. *Empowering school culture*, melatik kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, berintegrasi dengan seluruh staf dan mahasiswa yang berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik.

pendidikan multikultural yang terintegrasi di dalam pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu strategi untuk menanggulangi radikalisme di perguruan tinggi, sehingga tidak dipungkiri di setiap program studi wajib mengajarkan mata kuliah pendidikan kewarganegraan kepada mahasiswanya. Pendidikan multikultural pada dasarnya suatu proses untuk membangun karkater toleransi mahasiswa, melalui proses tersebut pendidikan multikultural dapat difungsikan sebagai deradikalisasi.

D. Pendidikan Kewarganegraan sebagai Wahana untuk Membangun Karakter Toleransi

Radikalisme yang berkembang di seluruh lapisan masyarakat khususnya di perguruan tinggi menjadi tantangan pendidikan kewarganegaraan untuk menanggulanginya, menggingat peran pendidikan kewarganergaan salah satunya adalah membangun karakter toleransi yang berdasarkan Pancasila. Pada dasarnya pendidikan kewarganergaan memiliki peran yang sentral dalam menanggulangi radikalisme di

perguruan tinggi, seperti yang dinyatakan oleh Amirsyah (2012: 117), yaitu "untuk membendung kuatnya arus radikalisme, maka pembentukan karakter dan jiwa nasionalisme merupakan suatu keniscayaan, diupayakan melalui pendidikan formal oleh pemerintah terhadap masyarakat sejak pra sekolah sampai perguruan tinggi dengan memberikan muatan materi pengetahuan pada kurikulum pendidikan meliputi mata pelajaran Pancasila, Kewarganegaraan, Kewiraan, Budi pekerti sesuai dengan tingkat pendidikan mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan universitas".

Haryatmoko dalam Naim dan Sauqi (2010: 106) mengemukakan bahwa "secara alami sesungguhnya manusia lahir sebagai makhluk yang tidak toleran, maka toleransi tidak akan datang begitu saja dalam pemikiran dan kesadaran seseorang atau masyarakat. Sikap yang toleran merupakan akumulasi dari proses pembelajaran dan pembiasaan yang panjang. Orang yang tidak toleran pada dasarnya memang tidak pernah berdialog, tidak pernah belajar, dan tidak pernah menggunakan penalarannya untuk memahami dan menerima yang lain". Pada dasarnya membangun karkater toleransi melalui jalur pendidikan formal atau di perguruan tinggi dibutuhkan pendidik yang memiliki pemahaman yang luas tentang keberagaman, memiliki karakter toleransi dan memiliki kompetensi sebagai seorang pendidik yang berkualitas . Kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang pendidik menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 10 ayat 1 dibagi menjadi 4 (empat) kompetensi, yakni :

1. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik.
2. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik.
3. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam.
4. Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagi bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Pada dasarnya proses pembangunan karakter toleransi merupakan proses pendidikan karakter, sehingga para pendidik harus paham tentang strategi pendidikan karakter, agar karakter toleransi tersebut tertanan di dalam karakter mahasiswa. Majid

dan Andayani (2012: 112-113) menawarkan suatu strategi pendidikan karkater yang efektif untuk membangun akhlak mulia, khususnya karakter toleransi yaitu:

1. *Moral knowing/learning to know*

   Tahapan ini merupakan langkah pertama dalam pendidikan karkater, tujuan tahapan ini diorientasikan pada penguasaan tentang nilai-nilai. Setiap individu harus mampu membedakan nilai-nilai akhlak mulia dan akhlak tercela serta nilai universal, memahami secara logis dan rasional pentingnya akhlak mulia dan bahaya akhlak tercela dalam kehidupan, serta mengenal sosok Nabi Muhammad SAW, sebagai figur teladan akhlak mulia melalui hadits-hadits dan sunahnya. Jadi pada dasarnya mahasiswa harus paham dan mengetahui bahwa karakter toleransi merupakan akhlak mulia dan perlu dibangun dan dikembangkan.

2. *Moral loving/moral feeling*

   Tahapan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa cinta dan rasa butuh terhadap nilai-nilai akhlak mulia khususnya karakter toleransi, yang menjadi sasaran pendidik adalah emosional, hati atau jiwa, bukan lagi akal, rasio dan logika. Pendidik menyentuh emosi sehingga tumbuh kesadaran, keinginan, dan kebutuhan, maka individu tersebut mampu berkata kepada dirinya sendiri "iya, saya harus seperti itu…" atau "saya perlu mempraktikan akhlak ini…", untuk mencapai tahapan ini pendidik bisa memasukinya dengan kisah-kisah yang menyentuh hati atau kompetensi. Melalui proses ini mahsiswa diharapkan dapat berintropeksi diri (*muhasabah*), sehingga, semakin tahu kekuarangannya

3. *Moral doing/learning to do*

   Tahap Ini merupakan puncak keberhasilan pendidikan karkater, setiap individu tersebut mempraktikkan nilai-nilai akhlak mulia itu dalam perilakunya sehari-hari khususnya karakter toleransi. Individu tersebut akan menjadi semakin sopan, ramah, hormat, penyayang, jujur, disiplin, cinta, adil serta murah hati dan seterusnya. Selama perubahan akhlak belum terlihat dalam perilaku, individu tersebut harus memiliki setumpuk pertanyaan yang harus selalu dicari jawabannya. Tindakan selanjutnya adalah pembiasaan dan pemotivasian

Strategi pendidikan karakter tersebut pada dasarnya dapat diimplementasikan di semua jalur pendidikan, entah itu formal, informal mauun nonformal. Apabila ketiga

jalur pendidikan tersebut mampu bersinergi, maka karakter toleransi dapat terbangun dengan baik dan pada akhirnya akan menjadi suatu budaya.

Pendidikan formal khususnya perguruan tinggi memiliki peran yang sentral dalam membangun karakter toleransi untuk menanggulangi radikalisme di perguruan tinggi, seperti yang diungkapkan oleh Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu "pentingnya peranan dunia pendidikan pelaku terorisme mulai memfokuskan perekrutan anggota baru di lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, pesantren maupun universitas" (Amirsyah, 2012: 96). Perguruan tinggi menjadi ujung tombak untuk membangun karakter bangsa khususnya karakter toleransi, di sisi lain perguruan tinggi juga merupakan tempat yang mudah terkontaminasi ideologi radikal, karena tempat tersebut adalah tempat berkumpulnya para pemuda menuntut ilmu yang sebagian besar belum memiliki pondasi dalam kehidupannya sehingga mudah terpengaruh dengan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

KESIMPULAN

Radikalisme merupakan ideologi yang bertentangan dengan ideologi pancasila, selain itu ideologi tersebut mengancam keberagaman di Indonesia. Radikalisme pasca reformasi mulai berkembang di seluruh lapisan masyarakat hingga masuk ke dunia pendidikan khususnya di perguruan tinggi. Pada dasarnya perguruan tinggi merupakan salah satu tempat untuk menuntut ilmu dan untuk mengembangkan kompetensi para pemuda, namun tempat tersebut dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengkampanyekan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Untuk menanggulangi radikalisme di perguruan tinggi diperlukan suatu pendidikan moral yang terpogram dan tersistematis, sehingga akar radikalisme dapat terputus khususnya di dunia pendidikan. Pendidikan kewarganegaraan menjadi ujung tombak untuk menanggulangi ideologi radikal, karena mata kuliah tersebut adalaj mata kuliah yang wajib diberikan kepada setiap program studi dan juga merupakan pendidikan moral yang berdasarkan Pancasila. Tujuan pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya membentuk warga negara yang baik (*good citizen*) yang berdasarkan Pancasila. Seseorang yang dikatakan sebagai warga negara yang baik (*good citizen*) apabila mampu menguasai tiga kompetensi yang terkandung di dalam pendidikan kewarganegaraan, yaitu *civic knowledge*, *civic skill*, dan *Civic dispositions.*

Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dapat difungsikan sebagai pendidikan multikultural sehingga melalui pembelajaran dapat membuka cakrawala dan pengetahuan mahasiswa bahwa Indonesia adalah negara yang homogen dan bukan negara yang heterogen. Pada dasarnya pendidikan multikultural selalu mengedepankan sesanti Bhineka Tunggal Ika, sehngga melalui pembelajaran tersebut secara langsung karkater toleransi akan terbentuk. Melalui pendidikan multikultural mampu menanggulangi radikalisme di perguruan tinggi karena pendidikan multikultural dapat difungsikan sebagai proses deradikalisasi. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang mampu membangun karakter bangsa yang berdasarkan Pancasila khususnya karakter toleransi. Apabila setiap mahasiswa memiliki toleransi, maka ideologi yang berkembang di perguruan tinggi dapat ditanggulangi, sehingga peran karakter toleransi di sini sangat penting untuk menanggulangi radikalisme. Para pemuda yang merupkan generasi penerus bangsa diharapkan mampu memiliki karakter bangsa khususya karakter toleransi, melalui karakter toleransi radikalisme di Indonesia akan mulai terpinggirkan sehingga keberagaman di Indonesia dapat terjaga dan terpelihara.

DAFTAR PUSTAKA

Amirsyah. 2012. *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi*. Jakarta: Grafindo

Azra, Azyumardi. 2002. *Pendidikan Multikultural: Membangun Kembali Indonesia Bhineka Tunggal Ika*. Makalah Disampaikan dalam Symposium Internasional Antropologi Indonesia ke-3. Denpasar: Kajian Budaya UNUD.

Budimansyah, Dasim dan Suryadi, Karim. 2008. P*KN dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Program Studi PKn SPs UPI.

Candra dan Yuliandari. 2012. "Mendamaikan Multikulturalisme dan Etnisitas: Peran Pendidikan Kewarganegraan Melalui Pendekatan Multikultural" dalam *Transformasi Empat Pilar Kebangsaan dalam Mengatasi Fenomena Konflik dan Kekerasan: Peran Pendidikan Kewarganegraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegraan Universitas Pendidikan Indonesia.

Hendropriyono. 2009. *Terorisme: Fundamentalisme Kristen, Yahudi Islam*. Jakarta: Kompas

Kartodirdjo, Sartono. 1985. *Ratu Adil*. Jakarta: Sinar Harapan.

Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No. 267/ DIKTI/ KEP/ 2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi di Indonesia.

Mahfud, Choirul. 2009. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Majid, Abdul dan Andayani, Dian. 2012. *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Malik, Abdul. 2016. Mewaspadai Benih Radikalisme di Kampus. 129 Februari 2016. *http://jalandamai.org/mewaspadai-benih-radikalisme-di-kampus.html*. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2016.

Naim, Ngainum dan Sauqi, Ahmad. 2010. *Pendidikan Multikultural, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

Rodin, Dede. 2016. *Islam dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-ayat "Kekerasan" dalam al-Qur'an*. Addin, Vol. 10, No. 1, hlm. 34

Susanto, Edi. 2007. *Kemungkinan Munculnya Paham Islam Radikal di Pesantren*. Jurnal Tadris, Vol. 2, No. 1, hlm. 3.

Sapriya. 2012. "Perlunya Reorientasi Ontologi Pendidikan Kewarganegraan dalam pembangunan Karakter Bangsa" dalam *Transformasi Empat Pilar Kebangsaan dalam Mengatasi Fenomena Konflik dan Kekerasan: Peran Pendidikan Kewarganegraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegraan Universitas Pendidikan Indonesia.

Sujanto, Bedjo. 2009. *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah: Model Pengelolaan Sekolah di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: CV Sagung Seto

Sumantri, Arga. 2016. Usia Produktif Rentan Jadi Pelaku Teror. 09 Mei 2016. *http://news.metrotvnews.* Diakses pada tanggal 5 September 2016

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Winataputra. 2012. "Transformasi Nilai-Nilai Kebangsaan untuk Memperkokoh Jatidiri Bangsa Indonesia: Suatu Pendekatan Pendidikan Kewarganegraan" dalam *Transformasi Empat Pilar Kebangsaan dalam Mengatasi Fenomena Konflik dan Kekerasan: Peran Pendidikan Kewarganegraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegraan Universitas Pendidikan Indonesia.

SEMANGAT NASIONALISME GENERASI MUDA DI TENGAH ARUS GLOBALISASI

Heni Widia Nengsi
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
heniwidianengsi@rocketmail.com

ABSTRAK

Modernitas telah membawa dampak besar kepada manusia secara individu (self) dan perubahan sosial yang hebat dalam berbagai belahan dunia, tidak terkecuali Negara Indonesia. Kehidupan manusia telah memasuki zaman peradaban baru (pasca-tradisional). Saat ini Negara Indonesia memasuki masa dimana baik secara langsung maupun tidak langsung terjadi pemaksaan penerimaan budaya-budaya baru baik itu bersifat positif maupun negatif yang mengakibatkan pengikisan budaya lokal Indonesia. Secara sadar atau tidak bangsa Indonesia sudah ikut mensukseskan langkah tersebut. Hal tersebut sangat terasa pengaruhnya di berbagai bidang kehidupan, dan tak seorang pun dapat mengisolasi diri atau mengelak dari hal tersebut. Kita harus cerdas menyaring, mengambil yang positif dan meninggalkan yang negatif, agar tidak tergilas oleh roda globalisasi. Tujuan menanamkan semangat nasionalisme dalam diri setiap warga negara adalah agar setiap warga negara tidak melupakan jati dirinya sebagai anak bangsa. Metode yang digunakan adalah studi literasi, yakni dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan pada penulisan paper ini. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah memegang teguh nilai-nilai luhur dan akar budaya kita sebagai bangsa Indonesia. untuk mempertahankan dan membangun semangat generasi muda ditengah arus globalisasi adalah dengan cara menanamkan rasa semangat nasionalisme dalam setiap diri. Sikap nasionalisme sebagai sikap mental dan menempatkan kesetiaan tertinggi pada negara, menjaga nilai-nilai luhur, dan memelihara unsur-unsur identitas nasional. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana pembinaan semangat nasionalisme harus dapat diefektifkan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yaitu "untuk membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat".Dengan demikian bangsa Indonesia mampu bertahan dari derasnya arus globalisasi dan suatu saat mampu menjadi kiblat dari globalisasi.

Kata kunci: Globalisasi dan Nasionalisme

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya modernisasi menurut Wilbert E Moore (1965) ialah suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional atau pra modern dalam arti teknologi serta organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri Negara barat yang stabil. Sementara menurut J W School (1988), modernisasi adalah suatu transformasi, suatu perubahan masyarakat dalam segala aspek-aspeknya. Maka dari itu, dapat disimpulkan

bahwa modernisasi ialah transformasi total yang berawal dari tradisional menuju modern dalam segala aspek kehidupan yang cenderung bersifat ekonomis, praktis dan politis.

Dampak positif dari modernisasi ini diantaranya adalah dapat memperkuat integrasi masyarakat dimana sifat terbuka yang dimiliki masyarakat modern ini dapat memperlancar interaksi antar individu sehingga integrasipun semakin kuat. Selain itu, dampak positif dari modernisasi juga bisa meningkatkan IPTEK, kemajuan di bidang industry ataupun transportasi, serta meningkatkan kesadaran dalam politik dan juga demokrasi.

Sedangkan dampak negatif dari modernisasi ini adalah dapat menimbulkan kesenjangan dalam bidang ekonomi dan social, menimbulkan pencemaran pada lingkungan alam, hingga pada peningkatan kriminalitas yang memang bertentangan dengan norma hukum ataupun agama. Demikian ulasan tentang pengertian modernisasi beserta ciri dan juga dampaknya.

Kata moderniasi tidak dapat terlepas dari kata Globalisasi, karena sejatinya antara kedua nya memiliki keterkaitan satu sama lain dimana, Globalisasi menurut Achmad Suparman adalah suatu proses yang menjadikan sesuatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia tanpa dibatasi oleh wilayah.

Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari pikiran yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi patokan bagi bangsa- bangsa di seluruh dunia.

Sebagai suatu proses, globalisasi berlangsung melalui dua dimensi dalam interaksi antar bangsa, yaitu dimensi ruang dan dimensi waktu. Dilihat dari dimensi ruang akan semakin dipersempit dan dari dimensi waktu semakin dipersingkat dalam berinteraksi dan berkomunikasi pada skala dunia. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan. Teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor pendukung utama dalam globalisasi. Dewasa ini, perkembangan teknologi begitu cepat sehingga segala informasi dengan berbagai bentuk dan kepentingan dapat tersebar luas ke seluruh dunia.Oleh karena itu globalisasi tidak dapat kita hindari kehadirannya. Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh besar bagi kehidupan suatu negara termasuk negara kita Indonesia. Pengaruh tersebut dibagi menjadi dua yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif.

PEMBAHASAN

1. GLOBALISASI

Kata global, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bermakna universal. Secara umum atau keseluruhan, taksiran secara bulat, secara garis besar atau meliputi seluruh dunia. Dari kata ini lahirlah kata ”globalisasi”, globalisasi diartikan sebagai proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Pahamnya disebut globalisme, yaitu paham kebijaksanaan nasional yang memperlakukan seluruh dunia sebagai lingkungan yang pantas untuk pengaruh politik. Menurut John Huckle, globalisasi adalah suatu proses dengan mana kejadian, keputusan, dan kegiatan di salah satu bagian dunia menjadi suatu konsekuensi yang signifikan bagi individu dan masyarakat di daerah yang jauh. Sementara itu, Albrow mengemukakan bahwa globalisasi adalah keseluruhan proses di mana manusia di bumi ini diinkorporasikan (dimasukkan) ke dalam masyarakat dunia tunggal, masyarakat global. Karena proses ini bersifat majemuk, kita pun memandang globalisasi di dalam kemajemukan.

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian globalisasi adalah proses sesuatu yang mendunia yang merupakan masuknya atau meluasnya pengaruh dari suatu wilayah atau negara ke wilayah atau negara lain dan atau proses masuknya suatu negara dalam pergaulan dunia. Globalisasi menunjukkan semakin meningkatnya ketergantungan antarindividu dan antarmasyarakat di seluruh dunia. Dalamartilain globalisasi adalah menyatunya negara-negara yang ada di dunia menjadi satu negara yang sangat besar tanpa mengenal batas.

2. NASIONALISME

Pengertian Nasionalisme Secara Sederhana adalah semangat kebangsaan, perasaan kebangsaan, yaitu semangat cinta atau perasaan cinta terhadap bangsa dan tanah air melebihi apapun juga. Sedangkan Secara Umum, Pengertian Nasionalisme adalah paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara yang memiliki tujuan atau cita-cita bersama untuk kepentingan nasional. Dengan praktek Nasionalisme tampak sebagai gerakan yang memperjuangkan atau mempertahankan kemerdekaan/kebebasan, kemakmuran atau kepentingan-kepentingan lainnya dari sesuatu bangasa. Penganut Nasionalisme disebut dengan Nasionalis.

Hans Kohn mengatakan bahwa terdapat esensi yang sama diantara berbagai pendapat. Adapun esensi itu adalah sikap mental dimana kesetiaan tertinggi dirasakan dan sudah sepantasnya diserahkan kepada bangsa dan negara. Sejalan dengan pendapat sebelumnya menurut Hartono Nasionalisme adalah Rasa kecintaan terhadap negaranya yang tidak dapat dilepaskan dari rasa patriotisme. Sifat Nasonalisme hendaklah harus ada pada jiwa suatu bangsa, karena tanpa adanya rasa nasionalisme di dalam jiwa setiap bangsa, maka yang terjadi adalah perang saudara, perang suku seperti yang sering kita saksikan belakangan ini, oleh karena itulah penting bagi kita untuk terus menjaga rasa Nasionalisme di dalam diri agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, sebagai mana yang telah terjadi di masa lampau, Rasa nasionalisme menciptakan Masyarakat yang solid, yang bersatu antar satu sama lain, yang berjuang bersama, tanpa Nasionalisme maka indonesia belum tentu merdeka, karena kemerdekaan itu bisa di raih karena usaha bersama-sama dengan satu tujuan yang sama.

Menurut Dr. Hertz dalam bukunya yang berjudul Nationality in History and Politics mengemukakan empat unsur nasionalisme, yaitu:

1. Hasrat untuk mencapai kesatuan.
2. Hasrat untuk mencapai kemerdekaan
3. Hasrat untuk mencapai keaslian.
4. Hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa.

Dari definisi itu nampak bahwa negara dan bangsa adalah sekelompok manusia yang:

a. memiliki cta-cita bersama yang mengikat warga negara menjadi satu kesatuan;
b. memiliki sejarah hidup bersama sehingga tercipta rasa senasib sepenanggungan;
c. memiliki adat, budaya, dan kebiasaan yang sama sebagai akibat pengalaman hidup bersama;
d. menempati suatu wilayah tertentu yang merupakan kesatuan wilayah; dan
e. teroganisir dalam suatu pemerintahan yang berdaulat sehingga mereka terikat dalam suatu masyarakat hukum.

Bentuk Nasionalisme

1. Nasionalisme Kewarganegaraan (atau nasionalisme sipil)

Merupakan bentuk nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya, kehendak rakyat, atau perwakilan politik.

2. Nasionalisme Etnis

adalah sejenis semangat kebangsaan dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat.

3.NasionalismeRomantik/Organik/Identitas

Dimana negara memperoleh kebenaran politik secara semula jadi (*organik*) hasil dari bangsa atau ras; menurut semangat romantisme.

4. Nasionalisme Budaya

Bentuk nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan bukannya "*sifat keturunan*" seperti warna kulit, ras dan sebagainya.

Tujuan Nasionalisme

Pada dasarnya nasionalisme yang muncul di berbagai negara mempunyai tujuan sebagai berikut:

- Menjamin kemauan dan kekuatan mempertahankan masyarakat nasional melawan musuh dari luar sehingga melahirkan semangat rela berkorban.
- Menghilangkan *Ekstremisme* (tuntutan berlebihan) dari warga negara (individu dan kelompok).
- Menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air
- Menciptakan hubungan yang rukun dan harmonis, dan mempererat tali persaudaraan yang utuh.

MEMBENTUK SEMANGAT NASIONALISME DITENGAH ARUS GLOBALISASI

Seperti diketahui, saat ini mau tidak mau kita harus berhadapan dengan arus globalisasi. Sikap terbaik untuk mengahdapi arus globalisasi kita harus merancang dan merumuskan apa saja yang menjadi tugas dan kewajiban setiap diri kita. Salah satu tugas dan kewajiban yang harus kita laksanakan adalah menegakkan dan mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara. Tugas dan kewajiban itu telah ditegaskan dalam Pembukaan dan pasal-pasal UUD

1945. Saat ini, pengaruh globalisasi yang sangat jelas terlihat terjadi di bidang ekonomi, kebudayaan, dan teknologi informasi.

Arus globalisasi begitu cepat merasuk ke dalam masyarakat terutama di kalangan muda. Pengaruh globalisasi tersebut telah membuat banyak anak muda kita kehilangan kepribadian diri sebagai bangsa Indonesia.

Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya popular, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain. Dalam globalisasi, terdapat dampak positif dan negatif. Dampak positif globalisasi adalah adanya kemudahan informasai dan arus barang antar negara dan wilayah. Selain itu, globalisasi juga akan mendorong laju pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, globalisasi juga dapat membawa dampak negatif dalam kehidupan bangsa dan negara.

Globalisasi sangat berpengaruh terhadap penerapan unsur-unsur jati diri bangsa. Adanya pertentangan antara nilai-nilai dari dalam diri bangsa Indonesia dengan nilai-nilai yang dibawa dari luar akan membawa konflik terhadap ideologi bangsa Indonesia. Ideologi bangsa Indonesia adalah pancasila, dimana pancasila lah yang menjadi dasar bagi bangsa dan negara Indonesia. Setiap sila-sila pancasila sendiri memiliki makna khusus yang terkandung didalamnya, yaitu:

1. Sila pertama
    - Adanya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu.
    - Kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing.
2. Sila kedua
    - Pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajibannya.
    - Adanya perlakuan adil
    - Manusia sebagai makhluk beradab dan berbudaya
3. Sila ketiga
    - Pengakuan terhadap persatuan bangsa Indonesia
    - Cinta dan bangga akan Negara Indonesia
4. Sila keempat

- Kedaulatan ada di tangan rakyat
- Negara adalah untuk kepentingan rakyat
- Keputusan diambil berdasarkan keputusan bersama

5. Sila kelima
    - Perwujudan keadilan sosial
    - Keseimbangan antara hak dan kewajiban
    - Cita-cita masyarakat adil dan makmur yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia

Mengingat pengaruh globalisasi sangat kuat di zaman ini, maka kita sebagai bangsa yang mempunyai jati diri dan kepribadian yang berbeda dengan bangsa lain harus tetap memelihara dan jati diri dan identitas nasional yang merupakan kepribadian bangsa. Identitas nasional memiliki beberapa unsur, yaitu: Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konstitusi UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, nilai budaya, bendera, bahasa nasional, lagu kebangsaan, lambang negara, dan lagu-lagu wajib.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi dampak negatif globalisasi ini adalah melalui efektivitas pembinaan kebangsaan melalui pembentukan sikap nasionalisme. Sikap nasionalisme sebagai sikap mental dan menempatkan kesetiaan tertinggi pada negara, menjaga nilai-nilai luhur, dan memelihara unsur-unsur identitas nasional. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana pembinaan semangat nasionalisme harus dapat diefektifkan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yaitu "untuk membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat". Dengan ini, sikap nasionalisme akan dapat dijadikan sebagai pembentukan sikap dan mental bangsa dalam mempertahankan jati diri bangsa di tengah arus globalisasi.

Menyadari akan tantangan perubahan, baik lokal, nasional, maupun global semakin berat, Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan mampu menumbuhkan sikap mental cerdas, penuh tanggung jawab dari mahasiswa untuk mampu memahami, menganalisis, serta menjawab berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara secara tepat, rasional, konsisten, berkelanjutan serta menjadi warga negara yang tahu hak dan kewajibannya menguasai iptek serta dapat menemukan jati dirinya, dan dapat mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan, dan berkemanusiaan.

Dengan kata lain secara konseptual, Pendidikan Kewarganegaraan hendaknya mengembangkan warga negara yang memiliki lima ciri utama, yaitu jati diri, kebebasan untuk menikmati hak tertentu, pemenuhan kewajiban-kewajiban terkait, tingkat minat dan keterlibatan dalam urusan publik, dan pemilikan nilai-nilai dasar kemasyarakatan. Karakteristik tersebut menuntut adanya upaya pengembangan kurikulum dan pembelajaran.

PENUTUP

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk mempertahankan dan membangun semangat generasi muda ditengah arus globalisasi adalah dengan cara menanamkan rasa semangat nasionalisme dalam setiap diri. Sikap nasionalisme sebagai sikap mental dan menempatkan kesetiaan tertinggi pada negara, menjaga nilai-nilai luhur, dan memelihara unsur-unsur identitas nasional. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana pembinaan semangat nasionalisme harus dapat diefektifkan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yaitu "untuk membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat". Dengan ini, sikap nasionalisme akan dapat dijadikan sebagai pembentukan sikap dan mental bangsa dalam mempertahankan jati diri bangsa di tengah arus globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

J.W. Schoorl. 1988. *Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang*. Terjemahan: R.G Soekadijo. Jakarta: Gramedia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kohn, Hans. 1984. Nasionalisme, Arti Dan Sejarahnya. Jakarta: PT. Pembangunan

Suparlan, Parsudi. (1982). *Struktur Sosial, Agama dan Ritual : Geertz, Hertz, Cunningham, Turner dan Levi Strauss" dalam Ilmu Sosial Dasar.* Konsorsiumantar Bidang Depdikbud, Jakarta.

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Wilbert E. Moore. Social Verandering dalam Social Change. Diterjemahkan oleh A. Basoski, Prisma Boeken, Utrech, Antwepen ,1965

PENGHAYATAN LAGU PERJUANGAN NASIONAL DALAM MENINGKATKAN SIKAP TANGGUNG JAWAB PADA PESERTA DIDIK

Apriyanda Kusuma Wijaya[1], Pitria Sopianingsih[2]
Pascasarjana PKn Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
apriyandawijaya22@gmail.com[1],sopianingsihpitria@gmail.com[2]

ABSTRAK

Pembelajaran dilembaga formal pada hakekatnya bertujuan untuk membentuk warga Negara yang cerdas, baik, berguna, serta bertanggung jawab sesuai dengan amanat undang-undang atau konstitusi. Hal ini menjadi salah satu tujuan dari penulisan artikel ini bahwa sebuah pembelajaran tidak hanya membentuk aspek kognitif saja, melainkan juga afektif/sikap dan psikomotor. Untuk itu pentingnya sebuah pembelajaran tersebut dalam rangka membentuk sikap peserta didik, khususnya sikap tanggung jawab sebagai warga Negara atau sebagai generasi penerus bangsa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literature. Hasil atau temuan dalam penelitian ini yaitu didapatkan secara pemahaman bahwa lagu perjuangan nasional merupakan sebuah karya yang memberikan makna atau kenangan dari jasa para pahlawan ketika berjuang demi bangsa ini, selain itu juga sebagai wahana untuk membangkitkan serta meningkatkan sikap tanggung jawab pada peserta didik dipersekolahan yang merupakan asset terbesar bagi Bangsa Indonesia. Dalam usaha meningkatkan sikap tanggungjawab peserta didik maka sebuah pembiasaan atau habituasi untuk menghayati lagu perjuangan dirasa sangat penting, baik dengan menyanyikannya langsung atau juga dengan diputarkan dahulu lagu tersebut sebelum dinyanyikan. Dengan dibiasakan pada saat akan memulai atau pun menutup pembelajaran, maka diharapkan peserta didik menjadi lebih bisa memaknai serta mempersiapkan diri dalam melaksanakan perannya sebagai warga Negara yang dicita-citakan oleh konstitusi.
Kata Kunci : *Lagu Perjuangan Nasional, Tanggung Jawab, Peserta Didik*

PENDAHULUAN

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap perubahan zaman. Dalam UU No. 20 tahun 2003 Pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal dan informal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Pembelajaran di sekolah yang terstruktur ini memiliki tujuan seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam mewujudkan tujuan tersebut tentunya melibatkan banyak komponen seperti guru/tenaga pendidik, kurikulum, sarana dan prasarana, lingkungan, dan peserta didik itu sendiri.

Kita pahami bersama bahwa peran guru dalam pembelajaran tidak hanya untuk mengembangkan pengetahuan, tapi juga mengembangkan sikap dan juga keterampilan. Hal tersebut yang kemudian menjadi tujuan dari penulisan artikel ini karena sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. untuk itu perlu sebuah inovasi yang dilakukan oleh guru dalam rangka usaha untuk mengembangkan potensi pengetahuan, sikap maupun keterampilan yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Karena sebuah potensi apabila tidak diasah maka tidak akan berkembang.

Artikel ini dibuat untuk sebagai sarana mengungkapkan gagasan berkaitan dengan salah satu cara yang bisa digunakan oleh guru sebagai pendidik di satuan lembaga formal untuk mengembangkan pembelajaran disekolah. Karena dengan pendidikan formal, akan diperoleh salah satu cara yang paling tepat dalam menanamkan aspek kenegaraan kepada para pemuda. Penulis menganggap pentingnya sebuah pengembangan sikap tanggung jawab pada peserta didik yang nantinya akan meneruskan perjuangan serta kehidupan bangsa ini. Untuk itu perlunya sebuah pembelajaran yang mengintegrasikan lagu-lagu perjuangan nasional, yang mana lagu perjuangan nasional tersebut nantinya ketika dipembelajaran tidak hanya sebagai hiburan saja, tetapi juga merupakan cara untuk menanamkan sikap tanggung jawab pada peserta didik untuk lebih mencintai bangsa ini dan untuk memacu peserta didik melakukan hal yang terbaik demi bangsa Indonesia ini.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan sebuah penelitian yang menggunakan studi literature dengan mencari referensi teori yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dan dikaji. Referensi teori dengan penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber buku maupun penelitian yang kemudian dijadikan sebagai landasan dan alat utama dalam kajian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lagu Perjuangan Nasional

Lagu perjuangan Nasional disebut juga sebagai musik fungsional yaitu musik yang diciptakan untuk tujuan nasional. Salah satu contoh dimaksudkan musik fungsional dalam sejarah musik, seperti musik digunakan mengiringi peribadatan agama (ritual), musik untuk mengiringi tari sebagai sarana hiburan. Fungsi primer dari lagu-lagu perjuangan adalah sebagai sarana upacara, dimana kedudukan pemain serta peserta didalam seni pertunjukkan harus terlibat, hingga seni pertunjukkan jenis ini bisa disebut *Art of participation*. Fungsi sekunder lagu-lagu perjuangan digunakan sebagai media agitasi politik dalam membangkitkan semangat perjuangan melawan penjajah, dan keberadaan jenis lagu-lagu ini di Indonesia pada masa perang kemerdekaan jumlahnya cukup banyak (R.M. Soedarsono, 2001 : 170-171). Sebagai seni pertunjukkan dalam lagu-lagu perjuangan idiom musik Barat dikemas berdasarkan kemampuan musikal masyarakat pendukungnya. Unsur teknis bernyanyi tidak begitu penting, diutamakan makna serta isi teks lagu bersifat agitasi disampaikan kepada masyarakat pendukungnya mudah dinyanyikan dan dihayati seluruh masyarakat Indonesia.

Secara umum pengertian lagu perjuangan adalah kemampuan dan daya upaya yang muncul melalui media kesenian di dalam peranannya pada peristiwa sejarah kemerdekaan di Indonesia (Sri Martono, 1953 : 668). Upaya ini disebut sebagai sikap patriotis di dalam konteks sejarah sebelum dan sesudah Kemerdekaan R.I. tanggal 17 Agustus 1945, pada masa perang kemerdekaan dan revolusi di Indonesia. Dalam pengertian yang luas sebagai perasaan nasional lagu-lagu perjuangan disebut sebagai lagu wajib yang diajarkan mulai pada tingkat pendidikan dasar, hingga perguruan tinggi dan wajib diketahui seluruh masyarakat Indonesia. Ditegaskan pula menurut peraturan pemerintah berdasarkan Instruksi Menteri Muda Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan No. 1 tanggal 17 Agustus 1959 yang diterbitkan oleh Balai Pustaka tahun 1963, telah ditetapkan 7 (tujuh) buah lagu perjuangan sebagai lagu wajib yaitu: (1) Lagu kebangsaan "Indonesia Raya" ciptaan Wage Rudolf Supratman. (2) Lagu "Bagimu Negeri" ciptaan Kusbini. (3) Lagu "Maju Tak Gentar" ciptaan Cornel Simanjuntak. (4) Lagu "Halo-halo Bandung" ciptaan Ismail Marzuki. (5) Lagu "Rayuan Pulau Kelapa" ciptaan Ismail Marzuki. (6) Lagu "Berkibarlah Benderaku" ciptaan Bintang Sudibyo. (7) Lagu "Satu Nusa Satu Bangsa" ciptaan L. Manik.

Fungsi lagu-lagu perjuangan Indonesia di dalam perkembangannya saat ini dapat dikategorikan menjadi 2 bagian sebagai berikut. Fungsi Konstruktif lagu untuk upacara fungsi primer bersifat konstruktif berisi pesan pembangunan sebagai sarana seremonial dalam suatu kegiatan upacara bersifat kenegaraan yaitu lagu kebangsaan "Indonesia Raya" ciptaan W.R. Supratman dan lagu "Bagimu Negeri" ciptaan Kusbini. Lagu-lagu tersebut usianya lebih tua dibandingkan dengan lagu perjuangan lainnya dan secara umum dilaksanakan pada saat tertentu dalam posisi berdiri ditempat sebagai penghormatan terhadap lambang negara dan lagu sumpah bakti kepada nusa dan bangsa diungkapkan dengan rasa khidmat secara mendalam. Lagu-lagu tersebut diciptakan sebelum revolusi bahkan peranannya sangat penting pada masa perang kemerdekaan di Indonasia tahun 1945 – 1949. Selain itu dengan diperdengarkannya lagu adanya tanda bahwa Indonesia masih memiliki harapan untuk bangkit sebagai negara yang merdeka, guna merubah persepsi pada siatuasi keadaan yang pesimis menjadi suatu sikap yang optimis menjadi perbuatan konstruktif (Victor Tuner, 1967 : 53). Hal ini dapat dibuktikan pada tanggal 22 Juli 2001 lagu kebangsaan "Indonesia Raya" dan lagu "Bagimu Negeri" berkumandang mengiringi upacara pembukaan serta acara penandatanganan serah terima jabatan Kepala Negara. Dalam sidang Istimewa tampak ketua MPR Amin Rais memberikan mandat kepada Presiden R.I. Megawati Sukarnoputri, disaksikan para wakil rakyat dalam upacara penetapan dan pengangkatan Wakil Presiden menjadi Presidan R.I. di Gedung MPR R.I. Jakarta (Slade, 1997 : 170).

Fungsi sekunder bersifat konstruktif, ialah lagu perjuangan sebagai sarana pembangkit semangat solidaritas bangsa cinta tanah air digunakan menghimpun persatuan dan kesatuan melawan penjajahan di Indonesia. Revolusi di Indonesia mendorong perkembangan pesat dan perubahan lagu-lagu perjuangan Indonesia. Jiwa revolusi menimbulkan kebebasan serta menghilangkan rasa rendah, sebaliknya merubah keberanian. Ritme dan irama mars satu diantaranya lagu hasil kolaborasi propaganda Jepang dimanfaatkan, dan baru pada masa revolusi tahun 1945 – 1949 dapat dikatakan lain dari pada masa sebelumnya.

Sikap Tanggung Jawab Warga Negara

Tanggung jawab dalam kamus besar Bahasa Indonesia (2005:205) berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (bila terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut (Mu'in, 2011:215) Sikap tanggung jawab

menunjukkan apakah orang itu punya karakter yang baik atau tidak. Orang yang lari dari tanggung jawab sering tidak disukai, itu artinya adalah karakter yang buruk. Menurut Thomas Lickona dalam bukunya yang berjudul "Educating For Character", tanggung jawab merupakan bentuk lanjutan dari rasa hormat. Jika kita menghormati orang lain, berarti kita menghargai mereka. Jika kita menghargai mereka, berarti kita merasakan sebuah ukuran dari rasa tanggung jawab kita untuk menghormati kesejahteraan hidup mereka. Tanggung jawab (lickona, 2013:72) secara literal berarti "kemampuan untuk merespon atau menjawab". Itu artinya, tanggung jawab berorientasi terhadap orang lain, memberi bentuk perhatian, dan secara aktif memberikan respons terhadap apa yang mereka inginkan. Tanggung jawab menekankan pada kewajiban positif untuk saling melindungi satu sama lain

Macam-macam Tanggung Jawab (Purnama dalam Aini, 2016:38-40) yaitu sebagai berikut :

(1) Tanggung jawab terhadap diri sendiri, Menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Karena merupakan seorang pribadi manusia mempunyai pendapat sendiri berangan-angan sendiri sebagai perwujudan dari pendapat perasaan.

(2) Tanggung jawab terhadap keluarga Keluarga merupakan masyarakat kecil, keluarga terdiri dari suami-istri, ayah-ibu dan anak-anak, dan juga orang lain yang menjadi anggota keluarga. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga, kesejahteraan, keselamatan pendidikan dan kehidupan.

(3) Tanggung jawab terhadap masyarakat Pada hakekatnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain sesuai kedudukannya sebagai makhluk sosial. Karena membutuhkan manusia lain maka ia harus berkomunikasi dengan manusia lain tersebut. Sehingga dengan demikian manusia disini merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab seperti anggota masyarakat lain agar dapat melangsungkan hidupnya dalam masyarakat tersebut. Wajar apabila segala tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

(4) Tanggung jawab terhadap bangsa/negeri Bahwa setiap manusia adalah warga Negara suatu Negara dalam berpikir, berbuat, bertindak, dan bertingkah laku manusia terikat oleh

norma-norma atau ukuran yang dibuat oleh Negara. Manusia tidak dapat berbuat semaunya sendiri, bila perbuatan manusia itu salah maka ia harus bertanggung jawab kepada Negara.

(5) Tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab, melainkan untuk mengisi kehidupannya manusia mempunyai tanggung jawab langsung kepada Tuhannya. Sehingga dikatakan bahwa tindakan manusia tidak lepas dari hukum-hukum Tuhan. Yang dituangkan dalam kitab suci melalui berbagai macam agama. Pelanggaran dari hukuman-hukuman tersebut akan segera diperingatkan oleh Tuhan dan jika peringatan yang keraspun manusia masih juga tidak menghiraukan maka Tuhan akan melakukan kutukan. Sebab dengan mengabaikan perintah-perintah Tuhan, berarti meninggalkan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan terhadap Tuhan sebagai penciptanya. Bahkan untuk memenuhi tanggungjawabnya manusia harus berkorban.

Istilah-istilah berukut yang berkaitan dengan tanggung jawab (Aini, 2016:61-62):

1) Duty (tugas) : apa yang telah diberikan pada kita dan harus dilaksanakan.

2) Laws (hukum dan undang-undang) : kesepakatan tertulis yang harus kita ikuti dan apabila melanggarnya kita harus bertanggung jawab untuk menerima konsekuensinya.

3) Contracts (kontrak) : kesepakatan yang harus diikuti dan melanggarnya berarti tidak bertanggung jawab.

4) Promises (janji) : sebuah kesepakatan yang diucapkan harus ditepati, melanggar janji berarti juga tidak bertanggung jawab. Memang tidak ada sanksi tegas, namun menimbulkan kekecewaan. Orang yang ingkar janji, berarti jelek karakternya.

5) Job Descriptions (pembagian kerja) : melanggarnya tidak hanya dicap sebagai orang yang tidak bertanggung jawab, tetapi juga akan mengganggu kinerja seluruh rencana yang telah dibuat.

6) Relationship Obligations (kewajiban dalam hubungan) : apa yang harus dilaksanakan ketika orang ketika menjalin hubungan. Melanggarnya bisa-bisa akan membuat hubungan berjalan buruk karena tanggung jawab sangatlah penting dalam suatu hubungan.

7) Religious Convictions (ketetapan agama) : nilai-nilai yang diatur oleh agama yang biasanya dianggap ajaran dari Tuhan. Bagi penganut yang melanggarnya, akan berhadapan dengan aturan agamanya tersebut.

8) Accountability: keadaan yang bisa dimintai tanggung jawab dan bisa dipertanggungjawabkan.

9) Diligence (tekun/rajin) : orang yang rajin dan tekun itu biasanya adalah orang yang bertanggung jawab. Ketika melakukan sesuatu secara malas-malasan pada saat tujuan untuk mencapai sesuatu sudah ditetapkan dan standar kerja untuk mencapainya bisa diukur, ia adalah orang yang tidak bertanggung jawab.

10) Reaching Goals (tujuan yang ingin dicapai) : ini merupakan tanggung jawab bagi orang yang telah menetapkan tujuan dan harus bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu agar tujuan itu bisa tercapai.

11) Prudent (bijaksana) : orang yang melakukan suatu tindakan dengan tidak bijaksana dapat dikatakan tidak bertanggung jawab.

12) Rational (masuk akal) : orang yang bertanggung jawab adalah yang mengatakan sesuatu hal yang masuk akal, tidak mengumbar kebohongan, dan irasionalitas. Kita sering melihat orang-orang tidak bertanggung jawab menyebarkan mitos dan hal-hal yang tidak masuk akal.

13) Time Management (manajemen waktu) : orang yang bertanggung jawab biasanya adalah orang yang bisa mengatur waktu dan konsekuen dengan jadwal yang telah ditetapkan.

14) Teamwork (tim kerja) : orang yang menyimpang dari kesepakatan tim dan ingin mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri dari kegiatan bersama tim adalah orang yang tidak bertanggung jawab.

15) Self Motivated (motivasi diri) : orang yang bertanggung jawab itu memiliki kemampuan memotivasi diri dan tingkat harapan yang kuat dalam dirinya. Tanggung jawab berasal dari rasa percaya diri dan kesadaran akan potensi diri yang bisa diaktualisasikan secara baik dalam kesehariannya.

Cara Pengimplementasian Pada Peserta Didik

Proses pelaksanaan dalam pengimplementasian penghayatan lagu perjuangan nasional ini, yaitu dengan cara yang pertama dinyanyikan secara langsung dengan memahami makna dari setiap syair yang dinyanyikan, kemudian yang kedua yaitu dengan diputarkan terlebih dahulu lagu-lagu perjuanagna nasional tersebut sebelum dinyanyikan, kemudian yang ketiga yaitu bisa dinyanyikan lagu tersebut dengan diputarkan secara bersamaan dengan menggunakan bantuan *speaker* aktif, *handphone* ataupun laptop. Hal ini bisa dilaksanakan ketika akan memulai pembelajaran, atau juga ketika ditengah pembelajaran sebagai hiburan maupun *ice breaking*, atau juga ketika diakhir sebelum pembelajaran ditutup.

KESIMPULAN

Pada proses pembelajaran itu penting seorang guru melakukan sebuah inovasi. Inovasi tersebut yaitu dalam rangka mengembangkan sikap pada peserta didik, khususnya sikap tanggung jawab peserta didik. Proses pengembangan sikap tanggung jawab peserta didik itu dirasa sesuai dengan menggunakan cara penghayatan pada lagu-lagu perjuangan nasional, yakni menyanyikannya, diputarkan atau diperdengarkan ketika pembelajaran. Dengan hal tersebut diharapkan peserta didik dapat memahami arti dan maksud syair demi syair, menghayati perjuangan para pahlawan yang telah berjuang demi bangsa ini kemudian puncaknya adalah mereka menyadari bahwa mereka / peserta didik tersebut adalah para pewaris, generasi penerus, bagi bangsa Indonesia ini. kemudian dengan kesadaran yang telah dimiliki tersebut maka nantinya mereka akan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam belajar disekolah, maupun melakukan aktifitasnya dikehidupan masyarakat serta memegang teguh amanat konstitusi yaitu undang-undang dasar 1945 dan pancasila yang merupakan cita-cita bersama bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Aini ,Septia Nur (2015).*Penerapan Sikap Sosial Tanggung Jawab Pada Mata Pelajaran Ips Terpadu Kelas Vii Di Mtsn.Tumpang Kabupaten Malang.* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. http://etheses.uin-malang.ac.id/2968/1/11130015.pdf

Hoetomo, (2005). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Mitra Pelajar.

Lickona ,Thomas. (2013). *Educating For Character Mendidik Untuk Membentuk Karakter Bagaimana Sekolah Dapat Mengajarkan Sikap Hormat dan Tanggung Jawab,* Jakarta : Bumi Aksara, 2013.

Martono, Sri, (1953). *Kehidupan Seni Suara Tahun 1945 – 1952*, Yogyakarta: Kementerian Penerangan Republik Indonesia,

Mintargo, Wisnu,(2002). *Peranan lagu2 Perjuangan Terhadap Pemahaman Pendidikan Kesadaran Nasionalisme di Indonesia*. Jurnal Racmi BPG Vol 2 No.2 Mei 2002

Mu'in, Fatchul. (2011). *Pendidikan Karakter Konstruksi Teoritik dan Praktik Urgensi Pendidikan Progresif dan Revitalisasi Peran Guru dan Orangtua*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1959. *Instruksi Menteri Muda Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan No. 1 tanggal 17 Agustus 1959*. Balai Pustaka tahun 1963

Soedarsono, R.M.,(2001). *Metodologi Seni Pertunjukkan dan Seni Rupa*, Bandung: Masyarakat Seni Pertunjukkan Indonesia,.

Soedarsono, R.M.,(1998). *Seni Pertunjukkan di Era Globalisasi*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Slade, Carole, *Form & Style Tenth Edition*, New York: Hougton Mifflin Company, 1997

Turner, Victor, *The Forest of Symbols Aspects Ndembu Ritual*, Itacha and London: Cornell University, 1967

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional.

AKTUALISASI DOMAIN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK *GOOD CITIZENS*

Weni Wahyu Widyastuti[1], Randi Setia Nugraha[2]
Pascasarjana PKn Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
weni868@gmail.com[1], randisetianugraha2@gmail.com[2]

ABSTRAK

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan agar setiap warga negaranya menjadi warga negara yang baik (*to be good citizens*). Yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana aktualisasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam setiap domain untuk membentuk *good citizens* tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian studi teks atau studi pustaka, yang menggunakan dokumen tertulis dan juga media elektronik sebagai sumbernya. Dari kajian tersebut dapat diketahui bahwa untuk mewujudkan *good citizens*, diperlukan aktualisasi dari Pendidikan Kewarganegaraan di dalam setiap domain yang ada. Dimulai dari pengembangan keilmuan yang dilakukan oleh komunitas profesi dan juga kaum akademisi sebagai wujud aktualisasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam domain akademik. Yang selanjutnya pengembangan keilmuan tersebut disampaikan melalui dunia pendidikan formal, dalam hal ini sekolah sebagai perwujudan aktualisasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam domain kurikuler. Hingga yang terakhir, konsep yang telah dikembangkan dalam domain akademik dan disampaikan melalui domain kurikuler tersebut diaplikasikan secara nyata di dalam kehidupan bermasyarakat melalui *community civic*. Dari pemaparan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa setiap warga Negara bisa turut berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi dari setiap warga Negara sesuai dengan porsi masing- masing.

Kata Kunci**:** *Domain Pendidikan Kewarganegaraan, Good Citizens*

PENDAHULUAN

Andagium ganti menteri ganti kebijakan sudah menjadi suatu hal yang jamak di negeri ini. Hal tersebut secara otomatis akan memberikan dampak secara langsung terhadap sekolah- sekolah yang ada, dimana sekolah akan dituntut agar menjadi lebih adaptif terhadap segala bentuk perubahan yang telah dicanangkan pemerintah. Salah satu bentuk perubahan yang cukup menjadi sorotan publik adalah dualisme dalam dunia pendidikan, yakni antara Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2006 (KTSP). Hal tersebut dimulai pada masa awal kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ke 27, H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. Sekolah yang sudah mengimplementasikan Kurikulum 2013 selama 3 semester berturut- turut terhitung tahun ajaran 2013/ 2014 dapat melanjutkan kurikulum

tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mendikbud Nomor 160 Tahun 2014. Sedangkan sekolah yang baru menjalankan Kurikulum 2013 selama satu semester terhitung pada tahun ajaran 2014/2015 dianjurkan untuk kembali menerapkan Kurikulum 2006 (KTSP) pada semester selanjutnya.

Dualisme kurikulum tersebut merupakan implikasi dari penerapan Kurikulum 2013 yang dianggap terlalu tergesa- gesa. Terbukti dari ketimpangan antara ekspektasi tujuan implementasi Kurikulum 2013 dengan realitas yang terjadi di lapangan. Padahal apabila ditinjau dari segi tujuan pelaksanaan, kurikulum 2013 memiliki tujuan yang lebih bisa mengembangkan potensi siswa tidak hanya dalam hal kemampuan kognitif, tetapi juga psikomotorik dan afektif, sebagaimana tertuang dalam Permendikbud No. 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. Disana disebutkan bahwa tujuan Kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Tetapi fakta yang ada di lapangan menunjukkan kurangnya pemahaman secara menyeluruh dari stakeholder sekolah dan juga siswa mengenai Kurikulum 2013, sehingga tujuan dari pelaksanaan Kurikulum 2013 belum bisa tercapai dengan maksimal. Bahkan tidak sedikit dari guru dan siswa yang beranggapan bahwa Kurikulum 2013 berat untuk diimplementasikan.

Kurikulum 2013 sendiri merupakan pengembangan dari kurikulum 2006 (KTSP) yang dilandasi pemikiran tentang tantangan masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, kompetensi masa depan, dan fenomena negatif yang mengemuka (Pedoman Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013, 2013: 4). Dengan demikian, secara eksplisit bisa terlihat bahwa Kurikulum 2013 diyakini sebagai kurikulum yang lebih baik jika dibandingkan dengan Kurikulum 2006 (KTSP). Karena apabila dianalogikan, suatu ban bocor tidak akan mungkin digantikan menggunakan ban bocor lagi, tetapi akan diganti menggunakan ban baru yang dianggap lebih bisa memenuhi standar keselamatan. Meskipun pada faktanya, belum ada penelitian yang merujuk mengenai urgensi penggantian kurikulum 2006 (KTSP) menjadi Kurikulum 2013. Hal tersebut menjadi salah satu faktor pemicu kurang maksimalnya dukungan terhadap pelaksanaan Kurikulum 2013.

Dari latar belakang pengembangan Kurikulum 2013 tersebut, sudah barang tentu menimbulkan satu pertanyaan mendasar. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan dualisme kurikulum yang ada pada saat ini? Karena secara tak langsung, bukankah hal tersebut akan mendorong terjadinya kesenjangan antara sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013 dengan sekolah yang menerapkan Kurikulum 2006 (KTSP). Sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013 yang kebanyakan merupakan mantan rintisan sekolah bertaraf internasional atau sekolah unggulan akan dianggap memiliki kualitas lebih baik jika dibanding dengan sekolah yang menerapkan Kurikulum 2006 (KTSP). Hal tersebut tentunya sudah tidak sesuai dengan prinsip pemerataan pendidikan sebagaimana tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu", dan pasal 11, ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi". Hal tersebut bisa diperkuat dengan analogi orang yang sedang melakukan perjalanan, kurikulum yang oleh Syaodih (2009: 5) didefinisikan sebagai suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar-mengajar bisa diibaratkan sebagai sebuah peta, 2 orang yang berpegang teguh pada peta yang berbeda, akan menghasilkan output/ hasil yang berbeda pula. Karena dalam proses perjalanannya pasti akan menemui petunjuk dan kendala yang berbeda.

Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah bagaimana pengaruh pengintegrasian dualisme kurikulum terhadap mata pelajaran? Apakah hal tersebut akan berpengaruh terhadap output dalam hal ini siswa? Terutama terhadap mata pelajaran yang lebih banyak berafiliasi dengan aspek moral, seperti Pendidikan Kewarganegaraan, yang sejak diberlakukannya Kurikulum 2013 terjadi pergantian nama menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Apakah dengan adanya penggantian nama dan juga penambahan jam mata pelajaran PPKn akan mampu mewujudkan tujuan Negara mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahab, A.A. & Sapriya (2011: 99) berikut:

> "Agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizens*), yakni warga negara yang memiliki kecerdasan (*civic intelligence*)

> baik intelektual, emosional, sosial maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (*civic responsibility*); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (*civic paticipation*) agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air."

Untuk mencapai tujuan Pendidikan Kewarganegaraan tersebut secara maksimal, pembelajaran yang dilakukan di dalam sekolah sebagaimana diatur dalam kurikulum saja tidaklah cukup. Diperlukan pengembangan secara menyeluruh terhadap domain Pendidikan Kewarganegaraan yang ada. Secara teoritis, Pendidikan Kewarganegaraan sendiri memiliki 3 (tiga) domain sebagaimana dikemukakan oleh Wahab A.A. & Sapriya (2011: 97) bahwa:

> "*citizenship education* memiliki paradigma sistemik di dalamnya terdapat tiga domain yakni: domain akademis, domain kurikuler, dan domain sosiokultural. Domain akademis adalah berbagai pemikiran tentang PKn yang berkembang di lingkungan komunitas keilmuan. Domain kurikuler adalah konsep dan praksis PKn dalam dunia pendidikan formal dan nonformal. Domain sosio kultural adalah konsep dan praksis PKn di lingkungan masyarakat."

Ketiga domain tersebut di atas harus dikembangkan secara bersinergi. Maksudnya disini adalah Pendidikan Kewarganegaraan harus diaktualisasikan dalam masing- masing domain yang kemudian dikaitkan antara domain yang satu dengan lainnya. Tujuan penulisan ini adalah untuk melihat bagaimana aktualisasi Pendidikan Kewarganegaraan tersebut di dalam setiap domainnya, mulai dari domain akademik, kurikuler, hingga sosiokultural.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian studi teks atau studi pustaka. Menurut Nazir (1988), studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Sedangkan menurut Pohan dalam Prastowo (2012: 81), penyusunan kajian pustaka bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah di dokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan. Dasar pertimbangan perlu disusunnya kajian pustaka dalam suatu rancangan penelitian menurut Ratna dalam Prastowo (2012: 81)

didasari oleh kenyataan bahwa setiap objek kultural merupakan gejala multidimensi sehingga dapat dianalisis lebih dari satu kali secara berbeda-beda, baik oleh orang yang sama maupun berbeda. Makasud dari kajian pustaka sendiri adalah untuk meringkas, menganalisis, dan menafsirkan konsep dan teori yang berkaitan dengan sebuah proyek penelitian (Striyadi, 2016).

Berikut ini merupakan bagan studi kepustakaan yang penulis lakukan dalam penelitian ini.

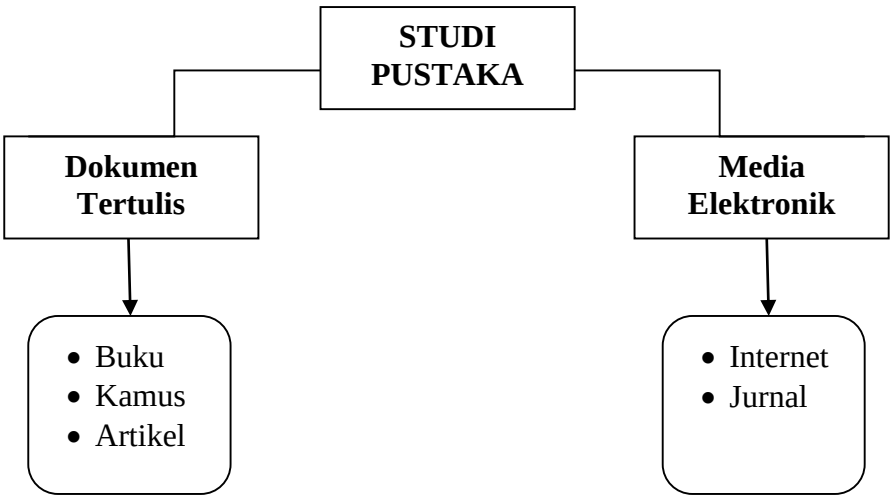

Bagan 1. Studi Pustaka

PEMBAHASAN

1. Penumbuhan Budaya Literasi sebagai Embrio Aktualisasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Domain Akademik

Publikasi ilmiah dalam jurnal bertaraf internasional merupakan salah satu media dalam mengaktualisasikan diri bagi para peneliti dan akademisi dalam pengembangan bidang keilmuan mereka masing- masing. Salah satu situs pengolahan peringkat publikasi ilmiah Scimago Lab yang bisa dilihat melalui situs www.scimagojr.com memperlihatkan betapa memprihatinkan peringkat Indonesia dalam jumlah publikasi ilmiah dari tahun 1996- 2016. Berikut merupakan tabel peringkat Negara dalam publikasi jurnal Scopus:

Tabel Peringkat Negara dalam Publikasi Jurnal Scopus

Peringkat Negara	Country	Documents	Citable documents	Citations	Self citations
1	United States	10193964	9165271	240363880	110517058
2	China	4595249	4525851	32913858	18210007
3	United Kingdom	2898927	2499445	60988844	13948928
…	…	…	…	…	…
32	Singapore	241361	224763	4097146	486934
…	…	…	…	…	…
34	Malaysia	214883	207498	1299378	341788
…	…	…	…	…	…
43	Thailand	139682	132845	1510067	238251
…	…	…	…	…	…
55	Indonesia	54146	51665	380569	50906
…	…	…	…	…	…
62	Viet Nam	35445	33937	347394	51341
…	…	…	…	…	…
69	Philippines	23843	21861	340738	33779
…	…	…	…	…	…
122	Brunei Darussalam	3041	2679	21986	2409
123	Cambodja	2990	2694	47555	5376
…	…	…	…	…	…
137	Laos	2087	1937	26911	3365
…	…	…	…	…	…
139	Myanmar	1864	1763	18162	1445
…	…	…	…	…	…
201	Timor Leste	155	129	885	67

Sumber: http://www.scimagojr.com/countryrank.php (diakses 19-11-2017)

Secara keseluruhan, Indonesia berada pada peringkat 55 dari 239 jumlah Negara yang tergabung dalam ranking publikasi karya ilmiah tersebut. Sedangkan dalam tingkat regional (ASEAN) menempati urutan keempat setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sungguh disayangkan mengingat yang menempati peringkat pertama dan kedua merupakan Negara dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga dan pertama di dunia, sedangkan Indonesia yang notabene merupakan Negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat, justru terdampar di posisi 55. Padahal apabila dipikirkan secara logika, Indonesia sebenarnya mempunyai kesempatan lebih besar lagi untuk menambah jumlah publikasi ilmiah tersebut apabila ditinjau dari segi jumalh penduduk. Salah satu

contoh yang paling diharapkan perannya dalam pengembangan tersebut adalah komunitas profesi.

Domain akademik melalui komunitas profesi memiliki peran untuk mengembangkan konten keilmuan melalui penelitian atau pengkajian sehingga memperkaya kajian ilmunya. Salah satu contoh nyatanya adalah Profesor, yang mempunyai suatu kewajiban khusus untuk mengembangkan bidang keilmuannya. Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor tercantum dalam Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, diantaranya: (1) menulis buku; (2) menghasilkan karya ilmiah; dan (3) menyebarluaskan gagasan.

Kerja keras dari komunitas profesi saja tidak akan cukup untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari Negara lain. Diperlukan sinergi dari kaum akademisi yang lebih besar untuk mewujudkan hal tersebut. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan menanamkan budaya literasi. Literasi dapat diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis atau keberaksaraan. Sedangkan Kern (2000) mendefinisikan istilah literasi secara lebih komprehensif sebagai berikut:

> Literacy is the use of socially-, and historically-, and culturallysituated practices of creating and interpreting meaning through texts. It entails at least a tacit awareness of the relationships between textual conventions and their context of use and, ideally, the ability to reflect critically on those relationships. Because it is purpose-sensitive, literacy is dynamic – not static – and variable across and within discourse communities and cultures. It draws on a wide range of cognitive abilities, on knowledge of written and spoken language, on knowledge of genres, and on cultural knowledge. (Literasi adalah penggunaan praktik-praktik situasi sosial, dan historis, serta kultural dalam menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui teks. Literasi memerlukan setidaknya sebuah kepekaan yang tak terucap tentang hubunganhubungan antara konvensi-konvensi tekstual dan konteks penggunaanya serta idealnya kemampuan untuk berefleksi secara kritis tentang hubungan-hubungan itu. Karena peka dengan maksud/ tujuan, literasi itu bersifat dinamis – tidak statis – dan dapat bervariasi di antara dan di dalam komunitas dan kultur diskursus/ wacana. Literasi memerlukan serangkaian kemampuan kognitif, pengetahuan bahasa tulis dan lisan, pengetahuan tentang genre, dan pengetahuan kultural).

Dari definisi tersebut di atas, literasi terlihat sebagai suatu hal yang memerlukan kemampuan kompleks. Secara sederhana, literasi bisa didefinisikan sebagai

kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan berbicara (Kemendikbud, 2016: 2). Dari situ terlihat urgensi pentingnya menanamkan budaya literasi sejak dini. Oleh sebab itu pemerintah sedang berusaha menggalakkan program Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Gerakan literasi sekolah sendiri menurut Kemendikbud (2016: 3) merupakan gerakan sosial dengan dukungan kolaboratif berbagai elemen.Upaya yang ditempuh untuk mewujudkannya berupa pembiasaan membaca siswa. Pembiasaan ini dilakukan dengan kegiatan 15 menit membaca (guru membacakan buku dan warga sekolah membaca dalam hati, yang disesuaikan dengan konteks atau target sekolah). Dengan adanya budaya literasi, diharapkan akan mampu memunculkan embrio- embrio masyarakat yang tidak hanya gemar membaca, tetapi juga mampu mengaktualisasikan ilmu yang dimiliki melalui sebuah karya tulis, dengan demikian jumlah akademisi dan komunitas profesi yang mengembangkan bidang keilmuannya masing- masing akan mampu berkembang secara *massive*, termasuk di dalamnya bidang keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan Kewarganegaraan secara khusus memiliki substansi kajian tersendiri, hal tersebut tercantum dalam keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No.43/DIKTI/KEP/2006, diantaranya: 1) Filsafat Pancasila, 2) Identitas Nasional, 3) Negara dan Konstituasi, 4) Demokrasi Indonesia, 5) Rule of law dan Hak Asasi Manusia, 6) Hak dan Kewajiban Warganegara serta Negara, 7)Geopolitik Indonesia, 8) Geostrategi Indonesia. Selain substansi kajian tersebut, pengembangan bidang keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan juga bisa diwujudkan melalui penelitian seputar strategi pembelajaran yang inovatif, agar materi lebih bisa terserap dengan sempurna.

Baik akademisi maupun komunitas profesi bertanggung jawab untuk mengembangkan substansi kajian tersebut demi berkembangnya bidang keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi yang bertanggung jawab mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan bukan hanya komunitas profesi, melainkan juga kaum akademisi.

Kesadaran akan pentingnya pengembangan keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan bagi kaum akademisi diwujudkan melalui aturan kewajiban mempublikasikan karya ilmiah bagi para mahasiswa baik strata 1, 2 maupun 3 yang

sudah menyelesaikan tugas akhirnya ke dalam bentuk jurnal maupun prosiding. Dalam hal ini penulis menyarankan agar dalam proses tersebut, baik komunitas profesi maupun kaum akademisi menggunakan referensi dari dalam negeri. Hal tersebut dimaksudkan sebagai penghargaan atas pemikiran kaum intelek negeri sendiri. Karena fenomena yang terjadi saat ini adalah banyak akademisi yang terlalu bergantung pada teori asing dan mengesampingkan pemikiran intelek lokal. Salah satu contohnya adalah dalam pengkajian pendidikan karakter, tidak sedikit yang berkiblat pada teori Thomas Lickona, padahal Indonesia sendiri mempunyai Ki Hajar Dewantara. Penggunaan referensi dari tokoh asing bukannya tidak diperbolehkan dalam hal ini, tetapi alangkah lebih baik apabila kita juga tidak mengesampingkan pemikiran tokoh nasional.

2. Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah sebagai Aktualisasi Pengembangan Domain Kurikuler

Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai peran ganda dalam dunia pendidikan di Indonesia, yaitu sebagai pendidikan nilai dan juga pendidikan karakter dalam proses pembelajaran. Apabila ditinjau dari perspektif pendidikan nilai, Pendidikan Kewarganegaraan didefinisikan sebagai sebuah upaya di bidang formal yang mengemban misi nasional mencerdaskan kehidupan bangsa yang syarat akan nilai. Tidak terlepasnya konten nilai tersebut berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan warga negara dalam menghadapi segala tantangan perkembangan zaman. Proses pembelajaran yang ada diarahkan pada penginternalisasian konsep tatanan nilai, sikap, dan hati nurani sehingga karakter bangsa Indonesia yang Pancasilais tetap mendasari segala pemikiran dan tindakan yang ditunjukkan di kehidupan bermasyarakat (Hermawan, I.C., 2013; Aryani, I.K. & Susatim, M., 2010).

Sedangkan apabila ditinjau dari perspektif pendidikan karakter, Pendidikan Kewarganegaraan dapat dipahami sebagai sebuah upaya di lingkup pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan warga negara yang dapat memahami dan menjalankan peran sosialnya dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan pengembangan beberapa sifat kewarganegaraan dalam proses pembelajaran yang ada, antara lain: kewarganegaraan, kejujuran, peduli terhadap sesama, kebajikan, kerjasama, kesopan-santunan, peduli di lingkungan rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dengan penjelasan tersebut,

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter mencoba menghubungkan antara pembelajaran yang ada di kelas secara idealis dengan lingkungan di luar sekolah dalam konteks praksis, sehingga siswa terlahir sebagai warga negara yang tidak hanya memiliki pemahaman secara teoritis melainkan juga dapat berkontribusi pada lingkungannya melalui cerminan karakter yang ditunjukkan dalam sikap dan pemikiran mereka (Budimansyah, D., 2010; Hermawan, I.C., 2013).

Oleh sebab pentingnya Pendidikan Kewarganegaran dalam dunia pendidikan Indonesia, maka pemerintah menjadikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu bidang studi yang wajib diajarkan mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi (PT). Hal tersebut tertuang dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2)UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Meskipun Pendidikan Kewarganegaraan dianggap pemerintah sebagai salah satu mata pelajaran yang penting untuk diajarkan di sekolah, hal tersebut tidak serta merta meningkatkan antusiasme siswa terhadap mata pelajaran tersebut. Terbukti dengan banyaknya argument yang mengatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pelajaran yang membosankan. Dari permasalahan tersebut, solusi yang bisa dilakukan adalah tuntutan terhadap guru agar memilih model pembelajaran yang inovatif agar lebih bisa menarik perhatian siswa.

Model pembelajaran sendiri oleh Joyce & Weil (Rusman, 2011: 133) didefinisikan sebagai suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahanbahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Hal senada disampaikan oleh Dahlan (dalam Isjoni, 2007: 49) bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang digunakan dalam menyusun kurikulum, mengatur materi pembelajaran, dan memberi petunjuk kepada pengajar di dalam kelas. Selain itu Hanafiah & Suhana (2010: 41) menyatakan bahwa model pembelajaran adalah suatu

pendekatan dalam rangka mensiasati perubahan perilaku peserta didik secara adaptif maupun generatif.

Terdapat beberapa macam model pembelajaran yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan antusiasme siswa di kelas. Menurut Ruminiati (2007: 1- 11) model pembelajaran terdiri dari model pembelajaran dengan pendekatan deduktif dan induktif, model pembelajaran dengan pendekatan ekspositori, model pembelajaran dengan pendekatan proses, model pembelajaran dengan pendekatan sosial. Sedangkan menurut Hanafiah & Suhana (2010: 71– 72), ada beberapa model pembelajaran, yaitu problem based learning, authentic instruction, inquiry based learning, project based learning, work based learning, service learning, dan cooperative learning.

Pengimplementasian model pembelajaran di dalam kelas merupakan salah satu otoritas guru yang tidak dapat diganggu gugat. Agar pemilihan model pembelajaran bisa lebih sesuai dengan permasalahan yang ada di kelas, maka guru sebaiknya melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) terlebih dahulu. Hal tersebut dimaksudkan agar model pembelajaran yang digunakan nanti lebih sesuai dengan situasi dan kondisi kelas, sehingga permasalahan di dalam kelas bisa terselesaikan dengan tepat.

Dari contoh tersebut di atas, bisa dilihat keterkaitan antara domain akademik dengan domain kurikuler. Jadi domain kurikuler mengimplementasikan hasil pengembangan domain akademik dalam bentuk materi dan strategi pembelajaran yang inovatif sehingga siswa dapat dengan mudah memahaminya.

3. Aktualisasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Masyarakat sebagai Upaya Pengembangan Domain Sosiokultural

Apabila dikaitkan dengan perspektif Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter bangsa, aktualisasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam domain sosiokultural sejalan dengan tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan yang berada dalam lingkup masyarakat. Untuk mengkajinya, dapat dilakukan dengan penelaahan terhadap pendapat Clark (dalam Aryani, I.K. & Susatim, M. 2010: 46) yang menyatakan bahwa:

> "Titik berat Pendidikan Kewarganegaraan adalah perkembangan individu yang dapat memahami lingkungan sosialnya, serta manusia dengan kegiatan dan interaksi antara mereka. Anak didik diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif dan dapat memberikan andil dalam masyarakat, mempunyai tanggung jawab, tolong-menolong dengan sesama, dan dapat mengembangkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakatnya".

Pendapat tersebut memberikan sebuah gambaran tentang urgensi dari implementasi konsep- konsep Pendidikan Kewarganegaraan dalam lingkup formal untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai upaya membangun karakter bangsa. Dalam proses pengimplementasian konsep Pendidikan Kewarganegaraan ke dalam masyarakat tersebut, diperlukan suatu media yang nantinya akan bisa dijadikan sebagai "jembatan" untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat dari lingkup pendidikan formal ke dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu contoh yang bisa dijadikan sebagai "jembatan" tersebut adalah komunitas kewarganegaraan (*civic community*). Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kardiman, Y. (2014: 4) sebagai berikut:

> "Dua hal yang penting dalam pendidikan kewarganegaraan. Pertama, Pendidikan Kewarganegaraan di persekolahan yang harus terus di kembangkan, sehingga mampu mempersiapkan warga negara muda untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokratis dalam masyarakat. Kedua, pengembangan pendidikan kewarganegaraan pada masyarakat civil melalui *civic community"*.

Keberadaan komunitas di masyarakat menjadi sebuah warna tersendiri yang menunjukkan bahwa manusia pada hakikatnya tidak dapat melepaskan perannya sebagai makhluk sosial. Putnam (1993) membangun perspektif bahwa *civic community* bercirikan pada sebuah hubungan yang kaya akan proses asosiasi, baik yang mewujudkan maupun bekontribusi pada kolaborasi sosial secara efektif. Selain itu, konten kewarganegaraan dalam *civic community* ditandai dengan partisipasi aktif anggotanya dalam urusan publik. Dikarenakan ketertarikan terhadap isu-isu publik dan siap untuk terlibat dalam perdebatan serta kegiatan umum adalah tanda-tanda penting dari kebajikan sipil. Berdasarkan kedua konsep ini, *civic community* dipandang sebagai suatu bentuk upaya yang dilakukan oleh masyarakat sipil dengan interaksi sosial yang kuat di dalamnya yang dapat mengatasi permasalahan-permasalahan baik sosial maupun

ekonomi melalui keterlibatannya. (Brown, D.L & Swanson, L.E., 2003; Smith, M.K., 2007). Sehingga, semakin banyak civic community yang berkembang di dalam masyarakat, maka bidang ilmu Pendidikan Kewarganegaraan akan bisa teraplikasikan dengan baik dan tidak akan berakhir menjadi retorika semata.

Dari pemaparan tersebut di atas, bisa dilihat bahwasanya domain sosio kultural merupakan domain pengaplikasian secara nyata dari konsep yang telah dikembangkan dalam domain akademis dan disampaikan melalui domain kurikuler pada kehidupan di dalam kehidupan bermasyarakat.

KESIMPULAN

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan agar setiap warga negaranya menjadi warga negara yang baik (*to be good citizens*), yakni warga negara yang memiliki kecerdasan (*civic intelligence*) baik intelektual, emosional, sosial maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (*civic responsibility*); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (*civic paticipation*) agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan aktualisasi dari Pendidikan Kewarganegaraan di dalam setiap domain yang ada. Dimulai dari pengembangan keilmuan yang dilakukan oleh komunitas profesi dan juga kaum akademisi sebagai wujud aktualisasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam domain akademik. Yang selanjutnya pengembangan keilmual tersebut disampaikan melalui dunia pendidikan formal, dalam hal ini sekolah sebagai perwujudan aktualisasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam domain kurikuler. Hingga yang terakhir, konsep yang telah dikembangkan dalam domain akademik dan disampaikan melalui domain kurikuler tersebut diaplikasikan secara nyata di dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari pemaparan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa setiap warga Negara bisa turut berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, mari kita turut ikut ambil bagian sesuai dengan porsi kita masing- masing.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2005. Undang-Undang Guru dan Dosen UU RI Nomor 14 Tahun 2005. Jakarta.

Anonim. (2013). Pedoman Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013. Buku1. Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan danKebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikandan Kebudayaan.

Aryani, I.K. & Susatim, M. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Brown, D.L & Swanson, L.E. (editor). (2003). *Challenges for rural America in the 21st century*. Amerika: The Pennsylvania State University Press.

Budimansyah, D. (2010). *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.

Depdiknas .2003. Undang-undang RI No.20 tahun 2003.tentang sistem pendidikan nasional.

Hanafiah dan Suhana. 2010. Konsep Strategi Pembelajaran. Bandung: PT Refika Aditama.

Isjoni. 2007. Cooperative Learning Efektivitas Pembelajaran Kelompok. Bandung: Alfabeta.

Kardiman, Y. dkk. (2014). Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk SMA/MA kelas X. Jakarta: Erlangga.

Kemendikbud. 2016. Panduan Gerakan Literasi Sekolah. Jakarta: Dirjen Dikdasmen.

Kern, Richard. 2000. Literacy and Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.

Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Permendikbud No. 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.

Permendikbud RI No. 160 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 Dan Kurikulum 2013.

Prastowo, A. 2012. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Ar- Ruzz Media.

Putnam R,1993, The Prosperous Community ; SOSIAL Capital and Public Life. The American Prospect, 13-65-78, (diakses 19/ 11/ 2017)

Ruminiati. 2007. Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan SD. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. 424 hlm

Rusman. (2011). Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No.43/DIKTI/KEP/2006

Syaodih, Sukmadinata, N. (2009). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Rosdakarya.

Wahab, A.A. & Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta

http://josesutri.blogspot.co.id/2016/10/kajian-pustaka.html (diakses 19/ 11/ 2017)

http://www.scimagojr.com/countryrank.php (diakses 19/ 11/ 2017)

PERAN *BOARDING SCHOOL* (SEKOLAH BERASRAMA) DALAM MEMBENTUK *SMART AND GOOD CITIZEN* (Studi di SMP MTA Gemolong)

Ikrimah Saputra
PPKn Pascasarjana UNS, Surakarta
Ikrimahsaputra96@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran *boarding school* (sekolah berasrama) dalam membentuk *smart and good citizen.* Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dimana subjek yang diteliti adalah Guru PKn SMP MTA Gemolong dan Kepala Pembina Asrama Putra SMP MTA Gemolong. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan program *boarding school* di SMP MTA Gemolong berperan dalam membentuk *smart and good citizen*. Peran tersebut dapat dilihat dari berbagai macam kegiatan pembelajaran yang berlangsung di sekolah maupun di asrama yang mendukung penguatan tiga aspek pendidikan kewarganegaraan, yakni *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skill* (ketrampilan kewarganegaraan), dan *civic disposition* (watak kewarganegaraan) dalam rangka pembentukan *smart and good citizen.* Penulis menyarankan agar dapat lebih maksimal dalam membentuk *smart and good citizen*, pendidikan kewarganegaraan di sekolah tidak hanya dilakukan melalui mata pelajaran PKn saja melainkan juga dapat diintegrasikan di semua mata pelajaran. Selain itu penulis juga menyarankan bahwa masyarakat di sekitar sekolah maupun asrama SMP MTA Gemolong dapat dilibatkan dalam proses pendidikan.

Kata kunci : *boarding school, smart and good citizen, civic knowledge, civic skill*, c*ivic disposition*

PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan instrumen untuk mewujudkan warga negara yang baik dan cerdas *(smart and good citizen)*. Hal ini diperkuat oleh Permendiknas No. 22 tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Lebih lanjut Djahiri (2006:173) mengatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan sosial yang terintegrasi yang diharapkan dapat

melahirkan warga negara yang cerdas, kritis, bertanggung jawab, terampil dan partisipasif dalam pengambilan keputusan-keputusan publik, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Winarno (2013:26) mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan mencangkup tiga aspek, yakni *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skill* (ketrampilan kewarganegaraan), dan *civic disposition* (watak kewarganegaraan). Dimana ketiga aspek tersebut merupakan sarana dalam membentuk *smart and good citizen* (warga negara yang cerdas dan baik). Untuk mewujudkan ketiga aspek tersebut, diperlukan suatu pendidikan kewarganegaraan yang intensif tidak terbatas hanya saat di sekolah melainkan pendidikan kewarganegaraan yang berlangsung sepanjang hari secara kontinue selama seseorang hidup.

Condorcet dalam buku *A History of Education for Citizenship* (2004:43) berpendapat bahwa:

> *Specific recommendations for citizenship education fall into two requirements. One is that, although the Constitution and Declaration of Rights should form, as it were, the set texts, appreciation of their inestimable quality should not come about as the result of indoctrination: they are to be taught as the outcome of the employment of reason, the path to eternal truth. The second requirement is for lifelong civic education, not truncated on leaving school.*

Berdasarkan pendapat diatas ada dua hal yang direkomendasikan Condorcet untuk pendidikan kewarganegaraan. Pertama pendidikan kewarganegaraan harus diajarkan sebagai hasil dari pekerjaan akal, bukan sekedar indroktinasi. Kedua, pendidikan kewarganegaraan harus diajarkan seumur hidup, tidak terpotong saat meninggalkan sekolah. PKn tidak saja mencakup pendidikan persekolahan sebagai mata pelajaran di sekolah. PKn juga mencakup pendidikan non-persekolahan berupa segala macam kegiatan untuk mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik dan cerdas.

Namun demikian, jika melihat realita yang ada saat ini, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di Indonesia hanya berlangsung saat seseorang berada disekolah. Menurut pengamatan Kerr (1999:5-7) menunjukkan pendidikan kewarganegaraan hanya berbentuk pengajaran kewarganegaraan yang bersifat formal (di sekolah), terikat oleh isi, berorientasi pada pengetahuan, menitik beratkan pada proses pengajaran, dan hasilnya mudah diukur. Sehingga pendidikan kewarganegaraan baru mencakup aspek *Civic Knowledge* yakni melalui penyampaian pelajaran secara teoritis di dalam kelas, belum mencakup aspek *Civic*

Skill (Ketrampilan Kewarganegaraan), dan *Civic Disposition* (Watak Kewarganegaraan) yang seharusnya diajarkan dan dilakukan secara continue baik di sekolah maupun di lingkungan seseorang tinggal. Hal ini menyebabkan tujuan pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk *smart and good citizenship* belum tercapai secara maksimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, proses pendidikan yang perlu dikembangkan adalah pendidikan secara kontinue sepanjang hari, tidak hanya terbatas pada saat seseorang berada di sekolah. Sekolah berbentuk *boarding school* bisa menjadi alternatif dalam melakukan pendidikan kewarganegaraan sepanjang hari secara kontinue, dimana dalam sekolah berbentuk *boarding school*, pendidikan berlangsung 24 jam baik itu di sekolah maupun di asrama. Maksudin (2006:8) menjelaskan bahwa *boarding school* adalah sekolah yang memiliki asrama, di mana para siswa hidup; belajar secara total di lingkungan sekolah. Mengapa *boarding school?* Jawabnya adalah karena kelebihan model sekolah ini. Adapun kelebihannya yaitu: semua siswa dapat berpartisipasi dalam program belajar, mutu akademik dan skill menjadi prioritas boarding school, dapat memanfaatkan secara optimal sumber-sumber belajar, dan dapat berkomunikasi langsung dengan pembimbing.

Mengacu pada berbagai permasalahan dan teori yang telah dikemukakan di atas, peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui Peran *Boarding School* (Sekolah Berasrama) dalam Membentuk *Smart and Good Citizen*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan selama tujuh hari yakni pada tanggal 12 s/d 19 November 2017 yang bertempat di SMP MTA Gemolong dan Asrama Putra SMP MTA Gemolong yang beralamat di Desa Gemolong RT 02/III, Gemolong, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57274. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena dalam penelitian ini peneliti berusaha menggambarkan hasil penelitian dalam bentuk uraian mengenai peran program *boarding school* di SMP MTA Gemolong dalam membentuk *smart and good citizen*. Subjek yang diteliti adalah Guru PKn SMP MTA Gemolong dan Kepala Pembina Asrama Putra SMP MTA Gemolong. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa Observasi dan Wawancara. Teknik Analisis Data yaitu dengan Reduksi data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan di lapangan dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat diperoleh hasil bahwa pelaksanaan program *boarding school* di SMP MTA Gemolong berperan dalam membentuk *smart and good citizen*. Peran tersebut dapat dilihat dari berbagai macam kegiatan pembelajaran yang berlangsung di sekolah maupun di asrama yang mendukung penguatan tiga aspek pendidikan kewarganegaraan, yakni *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skill* (ketrampilan kewarganegaraan), dan *civic disposition* (watak kewarganegaraan) dalam rangka pembentukan *smart and good citizen*

Penguatan Aspek *Civic Knowledge* (Pengetahuan Kewarganegaraan)

Civic knowledge merupakan pengetahuan kewarganegaraan yang wajib dimiliki oleh siswa. Triyanto (2015:444) menjelaskan bahwa *Pengetahuan kewarganegaraan* mencakup pengetahuan tentang pemerintahan, tujuan pemerintah, prinsip-prinsip konstitusi, struktur pemerintahan, sistem politik, kekuasaan, keadilan, keragaman, hukum, hak asasi manusia, tanggung jawab warga negara, peran warga negara dalam demokrasi, dan partisipasi warga negara dalam mengambil keputusan.

Proses penguatan *civic knowledge* di SMP MTA Gemolong tidak terlepas dari proses pembelajaran yang ada di sekolah maupun di asrama. Oleh karena itu, kombinasi dari kedua komponen tersebut sangat penting bagi keberhasilan penguatan *civic knowledge* bagi siswa. Di sekolah siswa mendapatkan *civic knowledge* dari mata pelajaran PKn. Dimana materi yang diajarkan sesuai dengan ruang lingkup materi mata pelajaran PKn menurut Permendiknas No. 22 Tahun 2006 yang meliputi: Persatuan dan kesatuan bangsa, Norma, hukum, dan peraturan, Hak asasi manusia, Kebutuhan warga negara. Konstitusi negara, Kekuasan dan Politik, Pancasila, dan Globalisasi.

Selain memperoleh pendidikan mengenai pengetahuan keagamaan, di asrama siswa juga memperoleh materi pendidikan kewarganegaraan seperti wawasan nusantara, toleransi antar umat beragama, hak dan kewajiban sebagai manusia melalui tausiyah-tausiyah yang disampaikan oleh pembina asrama. Untuk lebih jelas, penguatan aspek *Civic Knowledge* (Pengetahuan Kewarganegaraan) dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. Penguatan Aspek *Civic Knowledge* (Pengetahuan Kewarganegaraan) di SMP MTA Gemolong

No	Tempat	Kegiatan	Materi
1	Sekolah	KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) mata pelajaran PKn di kelas	Persatuan dan kesatuan bangsa, Norma, hukum, dan peraturan, Hak asasi manusia, Kebutuhan warga negara, Konstitusi negara, Kekuasan dan Politik, Pancasila, Globalisasi.
2	Asrama	Tausiyah oleh pembina asrama	Wawasan nusantara, Toleransi antar umat beragama, Hak dan kewajiban sebagai manusia

Sumber : Data Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran di SMP MTA Gemolong, baik yang berlangsung di sekolah maupun di asrama berperan dalam menguatkan aspek *civic knowledge* siswa. Hal ini bisa dilihat dari kegiatan pembelajaran dikelas maupun tausiyah di asrama, di mana materi yang disampaikan sesuai dengan cakupan pengetahuan kewarganegaraan yakni pengetahuan tentang pemerintahan, tujuan pemerintah, prinsip-prinsip konstitusi, struktur pemerintahan, sistem politik, kekuasaan, keadilan, keragaman, hukum, hak asasi manusia, tanggung jawab warga negara, peran warga negara dalam demokrasi, dan partisipasi warga negara dalam mengambil keputusan.

Penguatan Aspek *Civic Skill* (Keterampilan Kewarganegaraan)

Triyanto (2015:444) menjelaskan bahwa ketrampilan kewarganegaraan mencakup mencakup dua ketrampilan yaitu: (1) Ketrampilan berpikir kritis: mengumpulkan dan menilai informasi, mengklarifikasi, mengidentifikasi, mengevaluasi, melakukan refleksi, berkomunikasi, bernegosiasi; (2) Ketrampilan berpartisipasi: berkomunikasi, bernegosiasi, bekerjasama, mengelola konflik secara damai dan adil, serta mencapai kesepakatan.

Proses penguatan *civic skill* siswa di SMP MTA Gemolong tidak terlepas dari kegiatan yang ada di sekolah maupun di asrama. Dalam kegiatan pembelajaran disekolah, guru menggunakan berbagai macam metode pembelajaran untuk menjadikan siswa lebih

aktif dan kritis dalam pembelajaran. Seperti diskusi kelompok yang membantu melatih kemampuan berpikir kritis siswa. Selain itu juga ada kegiatan OSIS yang juga dapat meningkatkan *civic skill* siswa khususnya dalam berorganisasi.

Sedangkan di asrama proses penguatan *civic skill* lebih terfokus kepada keterampilan partisipasi, hal ini dikarenakan adanya interaksi yang intens diantara siswa di asrama setiap hari secara tidak langsung akan melatih siswa dalam berkomunikasi, bernegosiasi, bekerjasama, mengelola konflik secara damai dan adil, serta mencapai kesepakatan. Di asrama siswa juga diajarkan sopan santun, menyapa, memberi salam, dan cara berbicara dengan orang lain baik itu dengan pembina, guru, ataupun sesama siswa. Selain itu juga ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang juga dapat meningkatkan *civic skill* siswa. Untuk lebih jelas, penguatan aspek *Civic Skill* (Keterampilan Kewarganegaraan) dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2. Penguatan aspek *Civic Skill* (Keterampilan Kewarganegaraan) di SMP MTA Gemolong

No	Kegiatan	Tempat	Jenis Keterampilan
1	Diskusi pembelajaran	Sekolah	Berpikir kritis
2	Pemilihan dan debat Ketua OSIS	Sekolah	Partisipasi
3	Ekskul pidato Bahasa Inggris dan Bahasa Arab	Asrama	Partisipasi
4	Tahfidzul Qur'an	Asrama	Berpikir kritis
5	Pembagian tugas piket kamar	Asrama	Partisipasi
6	Pemilihan dan debat ketua ASTRA	Asrama	Partisipasi
7	Pembinaan Akhlak	Asrama	Partisipasi
8	Pembinaan BTQ	Asrama	Berpikir kritis

Sumber : Data Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran di SMP MTA Gemolong, baik yang berlangsung di sekolah maupun di asrama berperan dalam menguatkan aspek *civic skill* siswa. Hal ini bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan yang berlangsung dikelas maupun di asrama, di mana banyak kegiatan tersebut dapat menguatkan *civic skill* siswa baik itu keterampilan berpikir kritis maupun keterampilan berpartisipasi.

Penguatan Aspek *Civic Disposition* (Watak Kewarganegaraan)

Triyanto (2015:444) menjelaskan bahwa watak kewarganegaraan mencakup karakter privat dan karakter publik. Karakter privat mencakup beriman, tanggung jawab moral, beradab, jujur, tekun, berpikiran terbuka, disiplin diri, menghargai martabat individu, dan menghargai perbedaan pendapat. Karakter publik mencakup: taat hukum, kesediaan berpartisipasi, komitmen terhadap keputusan mayoritas, menghormati hak minoritas, toleran, patriotik, saling menyayangi, nasionalis, menjaga keseimbangan kepentingan pribadi dan umum, kesediaan merubah peraturan yang tidak adil dengan cara damai dan berdasar hukum.

Proses penguatan *civic disposition* siswa di SMP MTA Gemolong dilakukan melalui kegiatan-kegiatan dan peraturan-peraturan yang ada di sekolah maupun di asrama, dan juga pemberian teladan oleh guru dan pembina. Dalam pembelajaran di sekolah penguatan *civic disposition* dilakukan melalui pengimplementasian sikap spiritual dan sikap sosial yang ada dalam Kompetensi Dasar (KD) 1 dan 2 kurikulum 2013 dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu penguatan *civic disposition* juga dilakukan melalui pemberian sanksi yang tegas dan mendidik kepada siswa yang melanggar peraturan, sehingga siswa bisa menjadi pribadi yang patuh dan bertanggung jawab.

Sedangkan di asrama penguatan *civic disposition* dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang melatih siswa menjadi pribadi yang bertanggung jawab seperti adanya piket membersihkan asrama, piket adzan, piket membersihkan masjid, dan juga melatih siswa untuk menghormati dan menghargai perbedaan dengan mendasarkan pembagian teman sekamar berdasarkan daerah yang berbeda, dan roling teman sekamar selama satu semester sekali. Dengan tujuan siswa menjadi pribadi yang supel dan mudah akrab serta tidak memilih-milih dalam berteman.

Tabel 3.
Penguatan aspek *Civic Disposition* (Watak Kewarganegaraan*)*
di SMP MTA Gemolong

No	Kegiatan	Tempat	Watak yang ditanamkan
1	Piket Kelas	Sekolah	Tanggung jawab (Sosial)

2	Memulai pembelajaran dengan berdoa	Sekolah	Beriman (Spiritual)
3	Tidak menyontek dalam mengerjakan ujian/ulangan	Sekolah	Jujur (Sosial)
4	Memberi salam pada saat awal dan akhir presentasi	Sekolah	Beriman (Spiritual)
5	Mengucapkan syukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu	Sekolah	Beriman (Spiritual)
6	Masuk sekolah tepat waktu	Sekolah	Disiplin (Sosial)
7	Patuh pada tata tertib atau aturan sekolah maupun asrama	Sekolah dan Asrama	Disiplin (Sosial)
8	Piket Asrama	Asrama	Tanggung Jawab (Sosial)
9	Piket Adzan	Asrama	Tanggung Jawab (Sosial)
10	Hafalan Al-Qur'an minimal 3 juz sampai lulus	Asrama	Tanggung Jawab (Sosial)
11	Kantin Kejujuran	Asrama	Jujur (Sosial)
12	Beribadah tepat waktu	Asrama	Beriman (Spiritual)
13	Rolling teman sekamar	Asrama	Menghargai perbedaan (Sosial)
14	Bersikap 3S (salam, senyum, sapa)	Sekolah dan Asrama	Santun (Sosial)
15	Mengikuti pemilu OSIS dan pemilu ASTRA	Sekolah dan Asrama	Partisipatif (Sosial)

Sumber : Data Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa proses penguatan *civic disposition* siswa di SMP MTA Gemolong yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah maupun di asrama, dan juga pemberian teladan oleh guru dan pembina cukup berperan dalam menguatkan aspek *civic disposition* siswa. Hal ini bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan tersebut, di mana banyak kegiatan diantaranya dapat melatih siswa untuk menjadi pribadi yang memiliki *civic disposition* (watak kewarganegaraan) yang bagus, baik itu watak sosial maupun watak spiritual.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang telah di kumpulkan di lapangan dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan program *boarding school* di SMP MTA Gemolong berperan dalam membentuk *smart and good*

citizen. Peran tersebut dapat dilihat dari berbagai macam kegiatan pembelajaran yang berlangsung di sekolah maupun di asrama yang mendukung penguatan tiga aspek pendidikan kewarganegaraan, yakni *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skill* (ketrampilan kewarganegaraan), dan *civic disposition* (watak kewarganegaraan) dalam rangka membentuk *smart and good citizen* seperti yang telah dijelaskan di bagian hasil dan pembahasan diatas.

Penulis menyarankan agar dapat lebih maksimal dalam membentuk *smart and good citizen*, pendidikan kewarganegaraan di sekolah seharusnya tidak hanya dilakukan melalui mata pelajaran PKn saja melainkan juga dapat diintegrasikan di semua mata pelajaran, dimana setiap mata pelajaran bisa menyisipkan watak-watak kewarganegaraan baik itu watak religius maupun watak sosial seperti disiplin, tanggung jawab, toleran, partisipatif. Selain itu penulis juga menyarankan bahwa masyarakat disekitar sekolah maupun asrama SMP MTA Gemolong dapat dilibatkan dalam proses pendidikan kewarganegaraan siswa, seperti dengan mengadakan bakti sosial ataupun kerja bakti sehingga akan melatih interaksi siswa dengan masyarakat di luar asrama.

DAFTAR PUSTAKA

Djahiri, Kosasih. 2006. *Pendidikan Nilai Moral dalam dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium PKn FPIPS UPI.

Heater, Derek. 2004. *A History of Education for Citizenship*. New York: RoutledgeFalmer.

Kerr, D. 1999. *Citizenship Education: An International Comparison*. London: Quality Curriculum Association.

Maksudin. 2006. *Pendidikan Nilai Sistem Boarding School di SMP IT Abu Bakar (Hasil Penelitian Untuk Disertasi)*. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga.

Permendiknas No. 22 tahun 2006

Triyanto, 2015, *PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: ANTARA CITA DAN REALITA*. Laboratorium PKn FPIPS UPI

Winarno, 2013. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi, Dan Penilaian*. Jakarta: Bumi Aksara

PEMBELAJARAN BERBASIS NILAI-NILAI LUHUR AJARAN KI HAJAR DEWANTARA UNTUK MENGEMBANGKAN KARAKTER SISWA

Warsito[1], Sri Wiyata[2]
Universitas Widya Dharma Klaten
ronggo_warsito@unwidha.ac.id[1]
sriwiyata107@gmail.com[2]

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) untuk menemukan beberapa alasan mengapa proses pembelajaran berbasis nilai-nilai luhur ajaran Ki Hajar Dewantara efektif mengembangkan karakter siswa, (2) untuk mendeskripsikan efektivitas pembelajaran berbasis nilai-nilai luhur ajaran Ki Hajar Dewantara dalam upaya pengembangan karakter siswa, dan (3) untuk membandingkan efektivitas pengembangan karakter siswa yang menerapkan pembelajaran berbasis nilai-nilai luhur ajaran Ki Hajar Dewantara dengan pembelajaran konvensional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (mixed methods). Subjek dalam penelitian ini adalah para siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama di Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, dan Klaten. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, kuesioner, wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan analisis interaktif dan uji beda. Hasil penelitian sebagai berikut: (1) beberapa alasan sehingga pembelajaran berbasis nilai-nilai luhur ajaran Ki Hajar Dewantara efektif mengembangkan karakter siswa karena bersumber dari nilai-nilai asli bangsa Indonesia dan realistik, (2) sangat efektif pembelajaran berbasis nilai-nilai luhur ajaran Ki Hajar Dewantara dalam upaya pengembangan karakter siswa, dan (3) pembelajaran berbasis nilai-nilai luhur ajaran Ki Hajar Dewantara lebih efektif dibandingkan pembelajaran konvensional.

PENDAHULUAN

Membangun karakter bangsa merupakan kebutuhan fundamental dalam proses berbangsa dan bernegara. Hal ini didasari dari salah satu statemen *The founding fathers* yang menyatakan: "Bangsa ini harus dibangun dengan mendahulukan pembangunan karakter *(character building*), karena dengan *character building* inilah akan membawa Indonesia menjadi bangsa yang besar, maju dan jaya, serta bermartabat. Kalau pembangunan karakter ini tidak dilakukan, maka Indonesia akan menjadi bangsa kuli" (Muchlas Samani dan Haryanto, 2012: 2)

Pakar ke-Tamansiswaan, Ki Supriyoko (2013: 1) dalam makalahnya yang berjudul Konsep Pendidikan Karakter Bangsa yang disajikan pada Seminar Nasional Memperingari Hari Pahlawan dan Hari Guru Bertemakan "*Pendidikan Karakter Terpadu dalam Membangun Generasi Muda di Era Global*" menjelaskan tentang pentingnya pendidikan karakter. Urgensi pendidikan karakter terkait dengan kemunculannya dijelaskan bahwa pendidikan karakter bangsa bukan menjadi sesuatu yang baru bagi bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa ini, sejak jauh hari sudah memikirkan pentingnya karakter untuk menjadikan bangsa ini menjadi besar dan terhormat di tengah-tengah masyarakat dunia.

Pentingnya pendidikan karakter sebagaimana dikemukakan oleh Charles (dalam Borba, 2001:1) disebutkan: "*Make a good mainsait, you will get a good action; Make a good action, you will get a good habit; Make a good habit, you will get a good character; Make a good character, you will get a good benefit*." Dari statemen di atas, dapat disampaikan bahwa dengan ide-ide positif, para siswa akan merespon dengan tindakan yang positif. Dengan tindakan yang positif (bagus) secara berulang, akan menumbuhkan kebiasaan yang bagus pula. Dengan kebiasaan yang bagus, akan diperoleh karakter yang baik. Dengan karakter yang baik, diperoleh keuntungan yang besar.

Penanaman pendidikan karakter di sekolah, khususnya di Sekolah Menengah Pertama dicoba dengan menciptakan sebuah pembelajaran berbasis nilai-nilai luhur ajaran Ki Hajar Dewantara. Pentingnya strategi ini dilandasi dari beberapa realita dalam pembelajaran yang dilakukan di sekolah-sekolah khususnya

di Sekolah Menengah Pertama. Di lembaga pendidikan masih banyak dijumpai sekolah-sekolah yang di dalam proses pembelajarannya hanya bertumpu pada teori dan condong ke dimensi pengetahuan (*cognitive oriented*), cenderung intelektualitas serta mengabaikan pendidikan karakter.

Pembelajaran yang dilakukan di sekolah-sekolah, khususnya Sekolah Menengah Pertama, masih banyak menerapkan pada penguasaan konseptual. Pembelajaran lebih banyak berorientasi pada hal-hal yang bersifat teoritis. Hasil belajar siswa lebih banyak didasarkan pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Penilaian prestasi siswa mengesampingkan pendidikan nilai. Kondisi ini tidak sejalan dengan harapan bangsa Indonesia saat ini yang sedang mencanangkan pentingnya pendidikan karakter.

Tahapan studi eksplorasi atau studi pendahuluan, dengan teknik angket diperoleh data sebagai berikut ini. (1) Pentingnya pendidikan karakter dalam pembelajaran, dari 392 siswa yang menjawab sangat setuju ada 114 (29,08%), setuju 267 (68,11%), kurang setuju 8 (2,04%), dan tidak setuju 3 (0,77%). (2) Pentingnya nilai-nilai luhur ajaran Ki Hajar Dewantara dimasukkan dalam pembelajaran, dari 392 responden yang menjawab sangat setuju ada 99 (25,26%), setuju 243 (61,99%), kurang setuju 46 (11,73%), dan tidak setuju 4 (1,02%).

Hasil observasi dan dokumentasi yang dilakukan di Museum Dewantara Kirti Griya Yogyakarta diperoleh data bahwa Ki Hajar Dewantara banyak memberikan pendidikan karakter bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur berupa trilogi kepemimpinan tersajikan dengan sangat lengkap dan terperinci, serta terkait erat dengan nilai-nilai luhur yang lain misalnya trihayu (memayu hayuning sarira, memayu hayuning bangsa, memayu hayuning bawana/manungsa). Selain itu juga terkait dengan among sistem (asah, asih, asuh), trisakti jiwa (cipta, rasa, dan karsa), tripantang (pantang harta, praja, dan wanita), dan lain-lain.

Temuan/inovasi yang ditargetkan dalam penelitian ini adalah dihasilkannya sebuah strategi pengembangan karakter dengan pembelajaran berbasis nilai-nilai luhur ajaran Ki Hajar Dewantara. Dengan peningkatan karakter ini maka rendah derajat/inferiority complex di kalangan siswa tidak menjangkiti dirinya. Selain itu, penyimpangan tingkah laku yang sering terjadi pada kalangan remaja dapat teratasi.

KAJIAN LITERATUR

Pengembangan pendidikan karakter merupakan sesuatu yang urgen dan harus dilakukan secara integral dan menyeluruh. Relevan dengan hal ini, Suyanto (2010:1) menyatakan, "pendidikan karakter dilakukan secara holistik dan sistematik dengan menggunakan metode *knowing the good*, *feeling loving the good*, dan *acting the good*." *Knowing the good* dengan mudah dapat diajarkan, sebab pengetahuan bersifat kognitif. Langkah berikutnya setelah *knowing the good* adalah *feeling loving the good*, yakni bagaimana merasakan dan mencintai kebajikan menjadi *engine* yang bisa membuat orang senantiasa mau berbuat kebaikan. Selanjutnya akan tumbuh kesadaran bahwa orang melakukan perilaku kebajikan karena dia cinta dengan perilaku kebajikan itu. Setelah terbiasa melakukan kebaikan, maka *acting the good* itu berubah menjadi kebiasaan.

Sebuah teori dari Ki Hajar Dewantara yang hingga saat ini masih relevan dan memiliki makna yang sangat dalam adalah konsep "*Tringa*" (Ki Supriyoko, 2013: 6). Konsep *Tringa* terdiri dari *ngerti*, *ngrasa*, dan *nglakoni*. Konsep ini menyatakan bahwa untuk mengoptimalkan hasil pembelajaran maka anak perlu menguasai pengetahuan yang sedang dipelajari (*ngerti*), mengambil sikap positif terhadap sesuatu yang dipelajari (*ngrasa*), dan mempraktekkan apa yang dipelajari (*nglakoni*).

Karakter seseorang bisa diubah, dibentuk, dan dikembangkan. Hal ini sangat relevan dengan alur pola pikir Ki Supriyoko (2013: 3) sebagai berikut. "Pada dasarnya karakter seseorang itu dapat diubah, dibentuk atau pun dikembangkan, demikian juga dengan keterampilan." Dalam hal ini jelas bahwa karakter setiap manusia atau sekelompok manusia bisa dikembangkan; oleh karena itu usaha untuk membangun karakter generasi muda menjadi sesuatu yang sangat realistik. Bagi bangsa Indonesia, karakter itu identik dengan budi pekerti.

Nilai-nilai luhur ajaran Ki Hajar Dewantara sangat banyak misalnya asas Trikon (*kontinuitet, konvergensi, konsentrisitet*), Trisakti Jiwa (cipta, rasa, dan karsa), Trihayu (*memayu hayuning sarira, memayu hayuning bangsa, memayu hayuning Bawana*), Sistem Among (asah, asih, asuh), Trilogi Kepemimpinan (*ing*

ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani), dan sebagainya. Nilai-nilai luhur ajaran Ki Hajar Dewantara tersebut, satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang sangat erat, saling mengisi sehingga terasa hidup dan dinamis semuanya.

Pengembangan karakter dalam penelitian ini diambil langkah dengan mengimplementasikan nilai-nilai luhur ajaran Ki Hajar Dewantara dengan strategi trilogi kepemimpinan dalam pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama. Nilai-nilai luhur ajaran Ki Hajar Dewantara perlu digali karena merupakan nilai-nilai asli bangsa Indonesia yang sangat bermanfaat dalam upaya menanamkan dan mengembangkan karakter siswa.

Menurut Ki Hajar Dewantara (1962), penerapan pendidikan karakter dilakukan untuk membantu perkembangan hidup ke arah yang positif. Perkembangan hidup ini diarahkan untuk menuju kepada satu sasaran positif yakni arah peradaban dalam sifatnya yang umum." Cara yang dapat dilakukan misalnya mengajarkan anak bagaimana duduk yang baik, hormat terhadap ibu bapak dan orang lain, suka menolong dan lain sebagainya.

Dalam bukunya yang berjudul Karya Ki Hajar Dewantara Bagian II A-Kebudajaan (1967), Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai tokoh pendidikan mengharapkan, anak-anak didik hendaknya diberikan anjuran-anjuran positif. Anjuran itu dimaksudkan agar anak terbiasa melakukan pelbagai laku yang baik dengan cara disengaja. Dengan begitu maka syarat pendidikan karakter yang dahulu biasa dikenal dengan istilah *ngerti, ngerasa, dan ngelakoni* ("*tri-nga"*) dapat terpenuhi.

Cara penyajian pendidikan Ki Hajar Dewantara disebut metode among, yang menurut berlakunya dapat juga disebut metode tutwuri handayani, dalam rangka pelaksanaan sistem pendidikan (Ki Soeratman, 1980: 2). Penyebutan tutwuri handayani itu sudah dikandung di dalamnya suatu proses belajar mengajar tertentu dan memiliki ciri khas tersendiri. Dianutnya prinsip tutwuri handayani menuntut pula sebuah perwujudan dalam penyusunan kurikulum.

Ki Hajar Dewantara menghendaki dan mengharapkan pendidikan karakter yang bersifat terintegrasi dengan pengajaran pada setiap bidang studi. Harapan Ki

Hajar Dewantara tersebut dikemukakan lagi oleh Ki Supriyoko dalam Harian Jawa Pos tanggal 15 Februari 2013 sebagai berikut. Ki Hajar Dewantara menyatakan budi pekerti wajib disampaikan kepada siswa oleh semua guru. Pengajaran budi pekerti sebaiknya diberikan secara spontan oleh sekalian pamong; menurut adanya setiap kesempatan dan tidak harus menurut daftar pelajaran.

Menurut Departemen Pendidikan Nasional, ada 18 nilai-nilai dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Mulai tahun pelajaran 2011/2012, seluruh tingkat pendidikan di Indonesia harus menyisipkan pendidikan berkarakter tersebut dalam proses pendidikannya. Adapun nilai-nilai karakter yang dimaksud adalah sebagai berikut:
(1) religius, (2) jujur, (3) toleransi, (4) disiplin, (5) kerja keras, (6) kreatif, (7) mandiri, (8) demokratis, (9) rasa ingin tahu, (10) semangat kebangsaan, (11) cinta tanah air, (12) menghargai prestasi, (13) bersahabat/ komunikatif, (14) cinta damai, (15) gemar membaca, (16) peduli lingkungan, (17) peduli sosial, (18) tanggung jawab.

Relevan dengan yang dikaji dalam penelitian ini, maka dari 18 nilai-nilai pendidikan karakter tersebut, dikaji nilai-nilai yang terkait erat dengan lima aspek pendidikan karakter. Nilai empati ditopang oleh nilai peduli lingkungan dan peduli sosial, Pengembangan hati nurani ditopang oleh nilai religius dan jujur. Kontrol diri ditopang oleh nilai disiplin dan tanggung jawab, nilai rasa hormat ditopang oleh menghargai prestasi dan demokratis, nilai toleransi didukung oleh toleransi dan bersahabat/komunikatif.

Selain mengaitkan dengan nilai-nilai yang diamanatkan oleh pemerintah, kelima nilai tersebut juga dikaitkan dengan nilai-nilai luhur ajaran Ki Hajar Dewantara. Trilogi Kepemimpinan yang meliputi *Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tutwuri Handayani*, merupakan nilai-nilai luhur ajaran Ki Hajar Dewantara yang relevan dengan empati. "Tri Sakti Jiwa (cipta, rasa, karsa)" merupakan nilai-nilai luhur yang relevan dengan menumbuhkan hati nurani. Nilai-nilai luhur KHD lain yang terkait dengan hati nurani adalah *neng, ning, nung*, dan *nang*. Nilai-nilai luhur ajaran Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan kontrol diri adalah Tripantang (harta, praja, wanita). Nilai-nilai luhur yang terkait dengan

rasa hormat adalah tentang perhubungan antara anak laki-laki dan perempuan. Azas Tri-kon merupakan nilai-nilai luhur yang relevan dengan toleransi.

Kelima kelompok nilai-nilai tersebut selanjutnya dikaitkan dengan nilai-nilai luhur ajaran Ki Hajar Dewantara yakni trilogi kepemimpinan yang meliputi *ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani* dalam hal cara penerapannya. Setelah terjadinya pengaitan nilai-nilai pendidikan karakter dengan trilogi kepemimpinan dalam hal cara penyampaiannya.

Proses pembelajaran yang bermuatan pendidikan karakter dapat diimplementasikan dari konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara melalui Trilogi Kepemimpinan yang diajarkannya. Konsep trilogi kepemimpinan meliputi *ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani*. Maksud dari semboyan trilogi kepemimpinan ini adalah: *ing ngarsa sung tulada* (di depan, seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik), *ing madya mangun karsa* (di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide), *tutwuri handayani* (dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan).

Artikel dalam Jurnal Internasional "*Ethos*" berjudul *A Javanese Metropolis and Mental Life* yang ditulis oleh Ferzacca, Steve. Inti dari isi jurnal yang relevan dengan kajian penulis adalah bahwa kehidupan orang Jawa senantiasa mengutamakan kehidupan sosial, serta kehidupan spiritual. Orang Jawa biasa melakukan kontemplasi atau perenungan. Diketahui bahwa Ki Hajar Dewantara adalah tokoh nasional Bangsa Indonesia yang berasal dari Jawa pula, tepatnya dari Yogyakarta. Dengan melakukan suatu kajian, terlihat bahwa Ki Hajar Dewantara banyak memunculkan ide-ide atau gagasan yang ditulis dalam karya-karyanya yang cukup banyak. Karya-karya itu, jika disarikan sebagian besar berupa nilai-nilai luhur.

Randall, Colin (2012), dalam artikel berjudul *And what is the moral of this lesson, class?: News* dalam jurnal *The Times Educational Supplement Scotland Journal* 2287 (Oct 12, 2012): 11. Dalam artikel tersebut dinyatakan bahwa ada suatu gagasan besar pendidikan di Perancis, yakni pembelajaran moral di kelas. Sebuah nilai atau moral perlu di-*share*-kan kepada anak-anak. Pendidikan

intelektual dan moral dilakukan secara bersama-sama dalam upaya memberi bekal kepada pemuda.

Warwick Anderson & Hans Pols. (2012) dalam artikel *Scientific Patriotism: Medical Science and National Self-Fashioning in Southeast Asia,* pada *Journal of Comparative Studies in Society and History* (2012): 54 (1): 93-111. Cipto Mangunkusumo, salah seorang tokoh nasionalis Indonesia membantu dalam pendirian Budi Utomo. Pada tahun 1912 mulai didirikan organisasi Indische Partij (Partai Hindia), bersama-sama dengan Ernest Douwes Dekker FE seorang kerabat Multatuli - dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Keikutsertaan Suwardi Suryaningat, Douwes Dekker, Cipto, dan kemudian Sutomo menjadikan organisasi ini lebih radikal.

Mark Rushton (2013) dalam artikel berjudul *Modern Knowledge with Local Wisdom* pada jurnal *Phoenix Pulp and Paper (**PPI)*** 55.4 (Apr 2013): 27-30. Dari artikel tersebut dinyatakan bahwa kombinasi antara pengetahuan modern dengan kearifan lokal sangat diperlukan. Perpaduan kedua unsur amat dibutuhkan, terutama untuk menumbuhkan generasi muda yang kuat, menyongsong hari esok yang lebih memberi harapan. Dikaitkan dengan penelitian yang penulis lakukan, maka letak relevansinya terdapat pada kajian nilai-nilai kearifan lokal (lokal wisdom).

Fu, Qiufang; Dienes, Zoltan; Shang, Junchen; Fu, Xiaolan (2013) dalam artikel berjudul *Who Learns More? Cultural Differences in Implicit Sequence Learning pada Journal of PLoS One 8.8 (Aug 2013). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki lebih l*anjut apakah pengaruh budaya mempunyai andil dalam pembelajaran. Terkait dengan penelitian yang relevan, artikel ini dapat digunakan untuk memperkaya kajian budaya.

Ronggo Warsito, Asrowi, Mulyoto, dan Sri Anitah W. dari artikel berjudul *The Effectiveness of IPS-based Contextual Learning to Improve Students Character* dalam *International Journal of Active Learning, p-ISSN 2528-505X* *http://aseanjournals.com* Universitas Negeri Semarang (*Published*: October 2016), Volume 1 No. 1. Dalam artikel disebutkan bahwa Pembelajaran IPS membantu siswa menumbuhkan rasa sosial, kepedulian terhadap orang lain, dan menumbuhkan sikap toleransi serta menghargai sesama. Dalam pembelajaran IPS

bukan hanya mengutamakan aspek kognitif maupun psikomotor, tetapi juga aspek afektif atau nilai dan sikap. Pembelajaran IPS berbasis kontekstual sangat efektif dalam meningkatkan karakter siswa, karena materi pembelajaran diambil dan berasal dari lingkungan kehidupan siswa.

Ronggo Warsito dan Asrowi dalam artikel berjudul *Effectiveness of Social Science Learning Based on Noble Values of Ki Hajar Dewantara's Teaching to Strengthen the Students' Character* dalam *International Journal of Active Learning, p-ISSN 2528-505X*, http://aseanjournals.com Universitas Negeri Semarang IJAL 2 (1) (*Published*: April 2017) Volume 2 No. 1. Dalam artikel ini disebutkan bahwa nilai-nilai luhur ajaran Ki Hajar Dewantara sangat kaya memuat tuntunan moral dan pendidikan karakter. Nilai-nilai luhur yang dimaksud diantaranya trisakti jiwa (cipta, rasa, dan karsa), trihayu (*memayu hayuning sarira, memayu hayuning bangsa, memayu hayuning bawana*), trilogi kepemimpinan (*ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani*), tripantang (harta, praja, wanita), tritep (*tetep, antep, mantep*), dan sebagainya. Pembelajaran IPS berbasis nilai-nilai luhur ajaran Ki Hajar Dewantara sangat efektif memperkuat karakter siswa.

METODE PENELITIAN

Tempat/lokasi penelitian untuk studi eksplorasi adalah (1) SMP Negeri 1 Surakarta, (2) SMP Negeri 2 Surakarta, (3) SMP Negeri 12 Surakarta, (4) SMP Negeri 1 Ngemplak, Boyolali, (5) SMP Negeri 2 Ngemplak, Boyolali, (6) SMP Negeri 1 Mojosongo, Boyolali, (7) SMP Negeri 1 Kartasura, Sukoharjo, (8) SMP Negeri 1 Sukoharjo, (9) SMP Negeri 1 Colomadu, Karanganyar, (10) SMP Negeri 3 Colomadu, Karanganyar, (11) SMP Negeri 1 Klaten, dan (12) SMP Negeri 2 Karanganom, Klaten.

Selain dilakukan di 12 sekolah tersebut, studi eksplorasi juga dilakukan di Museum Dewantara Kirti Griya Yogyakarta yang sangat representatif untuk memperkuat alasan mengapa perlu digali nilai-nilai luhur ajaran Ki Hajar Dewantara. Peneliti juga datang ke Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa Yogyakarta, untuk bisa bertemu secara langsung dan memperoleh banyak informasi

dari *key informan* yakni Prof. Dr. H. Ki Supriyoko, S.D.U., M.Pd. Key informan saat ini adalah Direktur Program Pascasarjana UST Yogyakarta. Waktu penelitian untuk studi eksplorasi dimulai pada semester gasal tahun akademik 2016/2017. Di Museum Dewantara Kirti Griya Yoyakarta, peneliti mendapatkan banyak sekali karya-karya Ki Hajar Dewantara termasuk kumpulan surat KHD yang lebih dari 800 surat.

Pada tahap eksplorasi/studi pendahuluan ini, teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara mendalam (*indepth interviewing*), observasi atau pengamatan, dokumentasi, dan analisis isi. Informan dalam kegiatan wawancara mendalam adalah Ketua dan Pengelola Museum Dewantara Kirti Griya Yogyakarta, key informan, para guru IPS dan kepala sekolah SMP di Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, dan Klaten. Teknik observasi diterapkan untuk mengamati jalannya proses belajar mengajar di SMP misalnya bagaimana guru memberikan arahan tentang sikap dan tingkah laku, bagaimana perilaku siswa saat mengikuti proses belajar mengajar, kemajuan belajar siswa dan sebagainya.

Teknik dokumentasi salah satunya dilakukan di Museum Dewantara Kirti Griya Yogyakarta. Di museum ini, peneliti mendapatkan banyak sekali informasi yang jarang didapatkan di tempat lain, misalnya kumpulan surat Ki Hajar Dewantara (lebih dari 800 surat), buku-buku karya KHD, peninggalan-peninggalan Ki Hajar Dewantara dan telah diambil gambarnya oleh peneliti. Dalam hal ini berlaku prinsip *snowball* atau bola salju yang menggelinding, semakin lama semakin besar.

Pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi (Patton, 1983: 331). Tashakkori dan Teddlie (2003: 14) menyatakan "*the term triangulation does occur in each of the other six sparate "discipline" chapters noted previously, but primarily as a historical artifact rather than as a currently dominant term.*"Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi data/sumber dan triangulasi metode. Triangulasi data adalah menguji keabsahan data dengan sumber yang berbeda, sedangkan triangulasi metode adalah dengan menguji data menggunakan metode yang berbeda. Menurut Tashakkori dan Teddlie (2010: 67), konsep "metode

triangulasi" telah mendesak cendekiawan, yang pada akhirnya meruntuhkan hegemoni metodologis penganut metode tunggal.

Untuk triangulasi data atau sumber, salah satunya dilakukan dengan mengkaji informasi dari nara sumber yang berbeda, yakni dari Ki Supriyoko (pakar ketamansiswaan dan nilai-nilai luhur ajaran Ki Hajar Dewantara), Nyi Sri Muryani dan Ki Agus Purwanto (Ketua dan Pengelola Museum Dewantara Kirti Griya Yogyakarta), perwakilan kepala sekolah dan guru IPS SMP di Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, dan Klaten. Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang bervariasi seperti dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah dikroscek atau melalui proses triangulasi adalah data yang akurat, valid/sahih atau dapat dipercaya.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif yakni berupa *Components of Data Analysis: Interactive Model* (Miles & Huberman, 1984: 23) untuk data-data kualitatif. Model ini terdiri atas tiga komponen analisis yang saling terkait satu dengan yang lain secara simultan. Adapun ketiga komponen tersebut adalah (1) *Data reduction* (reduksi data), (2) *Data display* (penyajian data), dan (3) *conclusions drawing*/*verification* (penarikan kesimpulan/ verifikasi).

Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin-menjalin. Hal ini terjadi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut "analisis." Hal ini relevan dengan yang disampaikan oleh Miles & Huberman (1984: 21) sebagai berikut: *The data reduction/transforming process continues after fieldwork, until a final report is complete. Data Reduction is not something separate from analysis. It is part of analysis. The researcher's choices of which data chunks to code, which to pull out, which patterns summarize a number of chunks, what the evolving story is, are all analytic choices.*

Metode penelitian yang digunakan pada tahap ketiga ini adalah eksperimen. Eksperimen ini dilakukan untuk pengujian model pembelajaran pendidikan karakter berbasis nilai-nilai luhur ajaran Ki Hajar Dewantara ditambah nilai-nilai karakter yang diamanatkan pemerintah. Selain prestasi belajar, fokus lain adalah

mengetahui karakter siswa yang dicapai setelah diberi pembelajaran berbasis nilai-nilai luhur ajaran Ki Hajar Dewantara dibandingkan dengan pembelajaran konvensional.

Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen semu, karena peneliti tidak dapat melakukan kontrol terhadap variabel luaran yang mungkin berpengaruh terhadap peningkatan karakter serta tidak mungkin melakukan pengelompokan responden secara ketat. Dalam hal ini peneliti akan membandingkan keefektifan pembelajaran berbasis nilai-nilai luhur ajaran Ki Hajar Dewantara dengan pembelajaran konvensional terhadap pengembangan karakter siswa.

Pada tahapan pengujian model ini, sebelum *treatment*/perlakuan, siswa diberi pretes baik untuk kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Selanjutnya dilakukan eksperimen dengan menerapkan pembelajaran berbasis nilai-nilai luhur ajaran Ki Hajar Dewantara dengan pembelajaran konvensional. Setelah selesai *treatment*, kedua kelompok diberi postes dengan soal yang sama. Selesai postes, langkah berikutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan rumus uji beda atau uji t. Sebelum dilakukan analisis uji beda, terlebih dahulu dilakukan dua uji persyaratan, yakni uji normalitas dan uji homogenitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsepsi "*Tringa*" yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara (Ki Supriyoko, 2013: 6) terdiri dari *ngerti*, *ngrasa*, dan *nglakoni*. Konsep ini menyatakan bahwa untuk mengoptimalkan hasil pembelajaran maka anak perlu menguasai pengetahuan yang sedang dipelajari (*ngerti*), mengambil sikap positif terhadap sesuatu yang dipelajari (*ngrasa*), dan mempraktekkan apa yang dipelajari (*nglakoni*). Konsepsi Tringa ini jauh lebih dulu muncul dibandingkan dengan Taksonomi Bloom (kognitif, afektif, dan psikomotor) yang memang memiliki kesamaan. Dari tokoh yang menyampaikan gagasan dapat dibandingkan bahwa Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 (Yogyakarta, Indonesia) dan Benjamin Samuel Bloom lahir pada tanggal 21 Februari 1913 (London, Inggris).

Ki Hajar Dewantara lebih lanjut memperjelas konsep Tringa tersebut dengan konsepsi Trisakti Jiwa yang meliputi cipta, rasa, dan karsa (1962: 451-452).

Cipta adalah daya berpikir, yang bertugas mencari kebenaran sesuatu, dengan jalan membanding-bandingkan keadaan yang satu dengan yang lain hingga dapat diketahui bedanya dan samanya atau mana yang benar dan yang salah. Dalam proses kejiwaan ini diperlukan adanya pengalaman-pengalaman tentang "kebenaran" dan "kesalahan" yang menjadi objek perbandingan. Dapat dimengerti, bahwa pengalaman atau pengetahuan tentang akibat-akibat dari kebenaran serta kesalahan besar faedahnya guna membuat ketetapan yang terakhir tentang kebenaran dan kesalahan pada umumnya.

Rasa adalah segala gerak-gerik hati yang menyebabkan seseorang mau atau tidak mau, merasa senang atau susah, malu atau bangga, puas atau kecewa, berani atau takut, marah atau belas kasih, serta benci atau cinta. Di sini hati manusialah yang mengalami segala perasaan tadi, bukan pikirannya. Pikiran tidak mungkin melakukan perasaan itu. Boleh orang mencoba berpikir: "dirinya tidak mau susah," atau "dirinya hendak bergembira," sepuluh menit saja, atau menganjurkan orang yang sedang sedih dan atau menangis, untuk jangan susah/ sedih.

Karsa selalu timbul di samping dan seakan-akan sebagai hasil buah pikiran dan perasaan. Makna pernyataan ini adalah bahwa untuk melaksanakan segala sesuatu maka harus ada kombinasi yang sinergis antara hasil olah pikir, hasil olah rasa, serta motivasi yang kuat di dalam dirinya. Kemauan adalah permulaan segala perbuatan dan tindakan yang pasti dan tertentu dari manusia yang berbudi.

Dalam dunia modern seperti sekarang ini, konsep trisakti bisa diselaraskan dengan upaya memfasilitasi seluruh potensi anak didik dalam perkembangan belajarnya yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiga kesaktian tadi adalah syarat mutlak untuk mewujudkan manusia susila atau makhluk yang beradab. Ajaran hubungan antara cipta, rasa, dan karsa dijelaskan dalam satu tembang Macapat Asmaradana karya Ki Hajar Dewantara (1962: 359). Dari kutipan tembang asmaradana ini dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi ketiga ranah, yakni kognitif, afektif, dan psikomotor.

Pembelajaran yang berlangsung di Sekolah Menengah Pertama saat ini sebagian besar masih bersifat teoritis (kognitif). Kajian yang mengarah ke perilaku tampak masih kurang. Kajian yang secara langsung membahas nilai-nilai luhur Ki

Hajar Dewantara sangat minim. Berdasarkan fakta-fakta ini, maka penulis sangat termotivasi untuk menawarkan sebuah pembelajaran berbasis nilai-nilai luhur ajaran Ki Hajar Dewantara.

Mata pelajaran IPS sudah mengajarkan pendidikan karakter. Sebagai bukti bahwa di dalam Pelajaran IPS kelas VIII terdapat pendidikan tentang mencintai lingkungan sekitar, mengajarkan bagaimana menjaga lingkungan dan mengajarkan bagaimana bergaul dalam masyarakat, agar terjalin hubungan yang harmonis antar sesama dan tidak saling menyakiti. Materi mencintai lingkungan berarti relevan dengan butir ke-16 pendidikan karakter dari Kemendikbud RI. Menjaga lingkungan relevan dengan butir ke-18 yakni tanggung jawab. Bagaimana bergaul dalam masyarakat, relevan dengan butir ke-17, yakni peduli sosial (C.l. Senin, 11 April 2016 di SMP Negeri 1 Ngemplak, Boyolali).

Tanggapan siswa tentang pengamalan nilai-nilai karakter dilaporkan sebagai berikut. Tentang kepedulian siswa (empati), secara umum para siswa masih memiliki empati terhadap sesama. Namun demikian, ada dari sebagian siswa yang menunjukkan empati kepada teman yang kecelakaan selama dirinya tidak tergesa-gesa. Terhadap teman yang meminta maaf atas sebuah kesalahan, semua akan memaafkan. Namun demikian ada sebagian siswa yang memaafkan tetapi dengan beberapa syarat. Rasa hormat siswa kepada guru salah satunya ditunjukkan dengan menyapa dan berjalan pelan bila berpapasan. Namun demikian tidak semua siswa menunjukkan perilaku yang demikian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan pembahasan dapat disampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Beberapa alasan sehingga pembelajaran berbasis nilai-nilai luhur ajaran Ki Hajar Dewantara efektif mengembangkan karakter siswa karena nilai-nilai luhur tersebut bersumber dari nilai-nilai asli bangsa Indonesia dan realistik, serta relevan dengan perkembangan dan kondisi zaman saat ini.
2. Pembelajaran berbasis nilai-nilai luhur ajaran Ki Hajar Dewantara sangat efektif dalam upaya pengembangan karakter siswa. Selain aspek kognitif dan

psikomotor, pembelajaran berbasis nilai-nilai luhur ajaran Ki Hajar Dewantara juga mampu menembus sampai pada aspek afektif atau nilai dan sikap siswa.

3. Pembelajaran berbasis nilai-nilai luhur ajaran Ki Hajar Dewantara lebih efektif dibandingkan pembelajaran konvensional terutama pengembangan aspek afektif tanpa meninggalkan sisi kognitif dan psikomotor.

Beberapa saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam pembelajaran perlu dilakukan suatu perubahan paradigma, bukan hanya *transfer of knowledge* akan tetapi yang lebih penting adalah *transfer of values*. Hal ini berkaitan dengan dasar sebelumnya bahwa pembelajaran IPS sarat dengan nilai. Oleh karena itu guru perlu mengubah tradisi pembelajaran yang berorientasi pada hasil (*by product*) menjadi berorientasi pada proses berpikir kritis, rasional, dan proses penemuan nilai-nilai karakter dari materi pembelajaran (*by process*).
2. Pendidikan karakter diawali dari pengetahuan, kemudian ke perasaan atau sikap dan akhirnya ke tindakan nyata/perilaku. Dengan kata lain, pendidikan karakter berawal dari *knowing the good*, kemudian ditumbuhkan menjadi *feeling the good*, dan akhirnya menjadi *acting the good*. Dengan demikian akan terjadi proses internalisasi nilai-nilai karakter secara berkelanjutan dalam konteks lingkungan sosialnya. Budaya sekolah ini akan terinternalisasi dalam kepribadian peserta didik yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilakunya.
3. Guru adalah pelaksana terdepan dari kurikulum dan pembelajaran. Para guru dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajaran.
4. Kepala sekolah adalah pengelola dan sekaligus juga pemimpin di sekolah. Inovasi dan upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan/pembelajaran yang dilakukan guru, harus diarahkan, didorong, dibantu dan difasilitasi oleh kepala sekolah. Untuk membantu memfasilitasi inovasi yang dilakukan guru, kepala sekolah terlebih dahulu harus memahami pembelajaran berbasis nilai-nilai luhur ajaran Ki Hajar Dewantara untuk mengembangkan karakter siswa.

5. Fokus penelitian ini adalah pengembangan pengetahuan yang ditunjukkan dengan prestasi belajar (aspek kognitif) dan penguatan nilai-nilai karakter (aspek afektif) dan keterampilan atau pun perilaku. Kepada peneliti lain disarankan untuk dapat melakukan penelitian yang relevan dengan fokus penelitian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Borba, M. (2001). *Building moral intelligence.(Membangun kecerdasan moral).* Alih bahasa: Lina Jusuf. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Ferzacca, S. (2002). A Javanese metropolis and mental life. *Ethos*. 301/2. Source: http://search.proquest.com/docview. Diunduh: Senin, 18 Maret 2013 pukul 15.05 WIB.

Fu, Qiufang; Dienes, Zoltan; Shang, Junchen; Fu, Xiaolan. (2013). Who learns more? Cultural Differences in Implicit Sequence Learning. *Journal of PLoS One* 8.8 (Aug 2013).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.(2013). *Kurikulum 2013 SMP/ MTs Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial.* Jakarta.

Ki Hadjar Dewantara. (1962). *Karja Ki Hadjar Dewantara*. Jogjakarta: Madjelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

_____. (1967). *Karja Ki Hadjar Dewantara Bagian IIA: Kebudajaan.* Jogjakarta: Madjelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

Ki Soeratman. (1980). *Tutwuri Handayani*. Yogyakarta: Majelis Luhur Tamansiswa.

Ki Supriyoko. (2013). Budi pekerti masuk perdais. 27 Februari 2013. *Kedaulatan Rakyat*, p. 2

_____. (2013). *Konsep pendidikan karakter bangsa: pendidikan karakter terpadu dalam membangun generasi muda di era global*. *Makalah*. Disampaikan dalam Forum Seminar Nasional Memperingari Hari Pahlawan dan Hari Guru di Semarang, 30 November 2013.

_____. (2013). Makrifat budi pekerti Ki Hajar.15 Februari 2013. *Jawa Pos*.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative data analysis, A Sourcebook of New Methods*. Beverly Hills, London: Sage Publications.

Muchlas Samani dan Haryanto. (2012). *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Patton, M.Q. (1983). *Qualitative evaluations methods*. london: sage publication.

Randall, Colin. (2012). And what is the moral of this lesson, class?: News. *The Times Educational Supplement Scotland Journal* 2287 (Oct 12, 2012): 11.

Rushton, Mark. (2013). Modern knowledge with local wisdom. *Journal of Phoenix Pulp and Paper (**PPI**)* 55.4 (Apr 2013): 27-30.

Suyanto. (2010). *Urgensi pendidikan karakter*.http://www.mendikdasmen. depdiknas.go.id/web/ pages/urgensi.html, diunduh 17-1-2014.

Tashakkori, A. & Teddlie, C. (2010). *Mixed methodology: Combining qualitative and quantitative approaches (mixed methodology: Mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif).* Alih Bahasa Budi Puspa Priadi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Warsito, Asrowi, Sri Anitah, dan Mulyoto. (2016). The effectiveness of IPS-based contextual learning to improve students character. *International Journal of Active Learning*. Vol. 1 No. 1, Oct. 2016. (66-75), p-ISSN 2528-505X, http: //aseanjournals.com

Warsito, Asrowi. (2017). Effectiveness of Social Science Learning Based on Noble Values of Ki Hajar Dewantara's Teaching to Strengthen the Students' Character. *International Journal of Active Learning*. Vol. 2 No. 1, April. 2017. (1-14), p-ISSN 2528-505X, http://asean journals.com

Warwick Anderson & Hans Pols. (2012). Scientific patriotism: Medical science and national self-fashioning in Southeast Asia. *Journal of Comparative Studies in Society and History* (2012): 54 (1): 93-111

PENDIDIKAN KARAKTER: BUDAYA SEKOLAH SEBAGAI WAHANA PENGEMBANGAN KARAKTER PADA DIRI SISWA

Margi Wahono[1]; AT. Sugeng Priyanto[2]; Andi Suhardiyanto[3]
Universitas Negeri Semarang, Semarang
margi85@mail.unnes.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan identifikasi dan mendeskripsikan kondisi pengembangan pendidikan karakter dalam budaya sekolah di SMP se-Kota Semarang. Tema penelitian ini sejalan dengan visi dan missi Universitas Negeri Semarang yang mengembangkan "wawasan konservasi", mestinya di dalamnya terkandung muatan penguatan pendidikan karakter dalam konservasi nilai-nilai sosial. Penelitian ini didesain untuk penelitian berkelanjutan selama tiga tahun. Tahun ke-1 menghasilkan identifikasi pengembangan pendidikan karakter dalam budaya sekolah di SMP se-Kota Semarang. Temuan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah 1). bahwasannya sekolah yang telah menerapkan budaya sekolah secara optimal memiliki prestasi akademik dan non-akademik yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah yang belum menerapkan budaya sekolah sebagai pengembangan karakter siswa; 2) Budaya sekolah memiliki peran strategis dalam mengembangkan karakter pada diri siswa.

LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari kehidupan. Dengan pendidikan bisa memajukan kebudayaan dan mengangkat derajat bangsa di mata internasional. Pendidikan akan sangat terasa gersang apabila tidak berhasil mencetak sumber daya manusia yang berkualitas (baik segi spiritual, intelegensi, dan *skill*). Sehingga diperlukan peningkatan mutu pendidikan supaya bangsa ini tidak tergantung pada status bangsa yang sedang berkembang tetapi bisa menyandang predikat bangsa maju. Untuk memperbaiki kehidupan bangsa harus dimulai dari penataan dalam segala aspek dalam pendidikan, mulai dari aspek tujuan, sarana, pembelajaran, manajerial dan aspek lain yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran. Hal ini

[1] Dosen Program Studi PPKn FIS Universitas negeri Semarang
[2] Dosen Program Studi PPKn FIS Universitas negeri Semarang
[3] Dosen Program Studi PPKn FIS Universitas negeri Semarang

dimaksudkan untuk mempersiapkan pendidikan yang mampu meyiapkan Sumber Daya Manusia yang memiliki moralitas yang tinggi. Karena bagaimanapun juga Pendidikan dan moral adalah dua pilar yang sangat penting bagi teguh dan kokohnya suatu bangsa. Dua pilar ini perlu untuk dipahami secara mendalam dan bijaksana oleh semua elemen bangsa ini dari masyarakat maupun pemegang kebijakan dan pelaksana pendidikan. Dalam suatu negara yang sedang berusaha lepas dari badai krisis, sangatlah tepat apabila kita mencoba untuk melihat kembali posisi dan interrelasi dua pilar ini bagi bangsa Indonesia.

Krisis tersebut bersumber dari krisis moral, akhlak (karakter) yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan dimensi pendidikan. Krisis karakter yang dialami bangsa Indonesia saat ini disebabkan oleh kerusakan yang terjadi pada individu-individu masyarakat yang terjadi secara kolektif sehingga seolah-olah telah menjadi sebuah budaya dalam masyarakat. Budaya inilah yang menginternal dalam sanubari masyarakat Indonesia dan menjadi karakter bangsa. Ironis, pendidikan yang seharusnya menjadi tujuan mulia sebuah bangsa justru menghasilkan output yang tidak dikehendaki.

Sekolah adalah institusi sosial. Institusi adalah organisasi yang dibangun masyarakat untuk mempertahankan dan meningkatkan taraf hidupnya. Untuk maksud tersebut sekolah harus memiliki budaya sekolah yang kondusif, yang dapat memberi ruang dan kesempatan bagi setiap warga sekolah untuk mengoptimalkan potensi dirinya masing-masing. Budaya sekolah adalah keyakinan dan nilai-nilai milik bersama yang menjadi pengikat kuat kebersamaan mereka sebagai warga suatu masyarakat. Jika definisi ini diterapkan di di sekolah, sekolah dapat saja memiliki sejumlah kultur dengan satu kultur dominan dan kultur lain sebagai subordinasi.(Kennedy, 1991)

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interpretasi, karena tujuan penelitian untuk mendiskripsikan bagaimana pengembangan pendidikan karakter dalam budaya sekolah di smp se-Kota Semarang. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini adalah

teknik-teknik dokumentasi, wawancara atau *(interview),* dan pengamatan *(observation).*

Tahapan penelitian meliputi; persiapan dan pelaksanaan. *Pertama*, Persiapan meliputi kegaiatan a). Menetapkan populasi dan sample; b) Membuat Instrumen; c). Menetapkan informan. *Kedua*, tahap Pelaksanaan. Pada tahap ini dilakukan kegaiatan diantaranya adalah: a). Melakukan interview dengan subjek penelitian yang sudah ditetapkan; b). Melengkapi dokumen-dokumen yang mendukung; c). Melakukan analisis disetiap selesai tahapan penelitian. *Ketiga*, yaitu tahap pelaporan hasil penelitian. Pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan diantaranya yaitu: a). Memaparkan data dan fakta yang ditemukan; b). Mendiskripsikan hasil penemuan; c). Menulis hasil penelitian; dan d). Membuat artikel hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN

Dari penelitian yang dilakukan di tiga (3) Sekolah Menengah Pertama Negeri di kota semarang menunjukkan hasil yang beragam. Ada beberapa persamaan diantara ketiga sekolah tersebut diataranya ialah ketoga Sekolah menengah pertama tersebut dalam memulai pembelajaran diawali dengan kegiatan berdoa. Setiap siswa berdoa sebelum memulai pembelajaran di kelas. Kegiatan berdoa merupakan wujud karakter yakin dan percaya dengan keeberadaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kegiatan semacam ini dapat mengembangkan karakter pada diri siswa, karena dengan begitu ini mengembangkan budaya untuk selalu yakin dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin sekolah tersebut Mengambangkan pendidikan karakter yang ada dalam budaya sekolah maka prestasi akademik siswanya pun akan semakin meningkat. Pihak sekolah menyadari bahwa untuk menjadikan sekolah tersebut menjadi sekolah yang maju dan berprestasi, membutuhkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Dalam hal ini sekolah Secara berkala menyelenggarakan acara sarasehan atau temu wicara yang melibatkan seluruh warga sekolah untuk bertukar fikiran mengenai perkembangan dan kemajuan pendidikan di sekolah ini. Hal ini akan menumbukan

karakter kerjasama diantara seluruh pemangku kepentingan di sekolah bqaik kepala sekolah, guru, siswa bahkan sampai kepada pihak penjaga sekolah. Hal ini penting untuk menumbuhkan keadaran akan pentingnya kerjasama dan komunikasi guna mengembankan sekolah ke arah yang lebih baik.

Sebagai bangsa Indonesia dan khususnya masyarakat jawa, bertutur kata merupakan cerminan diri bagi setiap individu, jika tuturkatanya santun dan ramah menunjukkan bahwa individu tersebut memiliki karakter dan watak ang baik dari segi perilakunya. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan jika sekolah menengah pertama negeri 1, 2 dan 13 kota semarang memiliki warga sekolah yang dalam percakapan sehari-hari dengan sesama siswa, para siswa menggunakan bahasa yang sopan dan dapat menunjukkan keterpelajarannya. Dari tutur kata dan bahasa yang sopan dan dapat menunjukkan sikap keterpelajarannya tersebut maka sikapnya jika ada tamu yang datang kesekolahya pun akan mengikuti sikap tutur katanya. Jika ada tamu yang datang ke sekolah, khususnya orang tua siswa, kami selalu menyambut ramah dengan mengatakan *ada yang bisa saya bantu* ? atau ungkapan kalimat lain yang sejenis.

Gerakan PPK menempati kedudukan fundamental dan strategis pada saat pemerintah mencanangkan revolusi karakter bangsa sebagaimana tertuang dalam Nawacita (Nawacita 8), menggelorakan Gerakan Nasional Revolusi Mental, dan menerbitkan RPJMN pemerintahan Kabinet kerja 2014-2019 berlandaskan Nawacita. Oleh sebab itu, Gerakan PPK dapat dimaknai sebagai pengejawantahan Gerakan Revolusi Mental sekaligus bagian integral Nawacita. Dalam hubungan ini **pengintegrasian** dapat berupa pemaduan kegiatan kelas, luar kelas di sekolah, dan luar sekolah (masyarakat/komunitas); pemaduan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler; pelibatan secara serempak seluruh warga sekolah, keluarga, dan masyarakat; pendalaman dan perluasan dapat berupa pembiasaan (habituasi) dan pengintensifan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pengembangan karakter siswa, penambahan dan penajaman kegiatan belajar siswa, dan pengaturan ulang waktu belajar siswa di sekolah atau luar sekolah.

Lickona (1992) menjelaskan beberapa alasan perlunya pendidikan karakter, di antaranya: (1) Banyaknya generasi muda saling melukai karena lemahnya

kesadaran pada nilai-nilai moral, (2) Memberikan nilai-nilai moral pada generasi muda merupakan salah satu fungsi peradaban yang paling utama, (3) Peran sekolah sebagai pendidik karakter menjadi semakin penting ketika banyak anak-anak memperoleh sedikit pengajaran moral dari orangtua, masyarakat, atau lembaga keagamaan, (4) masih adanya nilai-nilai moral yang secara universal masih diterima seperti perhatian, kepercayaan, rasa hormat, dan tanggungjawab, (5) Demokrasi memiliki kebutuhan khusus untuk pendidikan moral karena demokrasi merupakan peraturan dari, untuk dan oleh masyarakat, (6) Tidak ada sesuatu sebagai pendidikan bebas nilai. Sekolah mengajarkan pendidikan bebas nilai. Sekolah mengajarkan nilai-nilai setiap hari melalui desain ataupun tanpa desain, (7) Komitmen pada pendidikan karakter penting manakala kita mau dan terus menjadi guru yang baik, dan (8) Pendidikan karakter yang efektif membuat sekolah lebih beradab, peduli pada masyarakat, dan mengacu pada performansi akademik yang meningkat.

Alasan-alasan di atas menunjukkan bahwa pendidikan karakter sangat perlu ditanamkan sedini mungkin untuk mengantisipasi persoalan di masa depan yang semakin kompleks seperti semakin rendahnya perhatian dan kepedulian anak terhadap lingkungan sekitar, tidak memiliki tanggungjawab, rendahnya kepercayaan diri, dan lain-lain.

Gerakan PPK menempatkan nilai karakter sebagai dimensi terdalam pendidikan yang membudayakan dan memberadabkan para pelaku pendidikan. Ada lima nilai utama karakter yang saling berkaitan membentuk jejaring nilai yang perlu dikembangkan sebagai prioritas Gerakan PPK (Kemdikbud). Kelima nilai utama karakter bangsa yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Religius

Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Nilai karakter religius ini meliputi tiga dimensi relasi sekaligus, yaitu hubungan individu dengan Tuhan, individu dengan sesama,

dan individu dengan alam semesta (lingkungan). Nilai karakter religius ini ditunjukkan dalam perilaku mencintai dan menjaga keutuhan ciptaan.

Subnilai religius antara lain cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri, kerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan, antibuli dan kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan kehendak, mencintai lingkungan, melindungi yang kecil dan tersisih.

2. Nasionalis

Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

Subnilai nasionalis antara lain apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa,rela berkorban, unggul, dan berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan,taat hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya, suku,dan agama.

3. Mandiri

Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita.

Subnilai mandiri antara lain etos kerja (kerja keras), tangguh tahan banting, daya juang, profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat.

4. Gotong Royong

Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan/pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan.

Subnilai gotong royong antara lain menghargai, kerja sama, inklusif, komitmen atas keputusan bersama, musyawarah mufakat, tolongmenolong, solidaritas, empati, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan.

5. Integritas

Nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral (integritas moral).

Kelima hal di atas akan lebih efektif apabila pihak sekolah menerapkan budaya sekolah yang secara nyata dapat menunjang pelaksanaan. Budaya sekolah yang positif akan mendorong semua warga sekolah untuk bekerjasama yang didasarkan saling percaya, mengundang partisipasi seluruh warga, mendorong munculnya gagasan-gagasan baru, dan memberikan kesempatan untuk terlaksananya pembaharuan di sekolah yang semuanya ini bermuara pada pencapaian hasil terbaik. Budaya sekolah yang baik dapat menumbuhkan iklim yang mendorong semua warga sekolah untuk belajar, yaitu belajar bagaimana belajar dan belajar bersama. Akan tumbuh suatu iklim bahwa belajar adalah menyenangkan dan merupakan kebutuhan, bukan lagi keterpaksaan. Belajar yang muncul dari dorongn diri sendiri, *intrinsic motivation*, bukan karena tekanan dari luar dalam segala bentuknya. Akan tumbuh suatu semangat di kalangan warga sekoalah untuk senantiasa belajar tentang sesuatu yang memiliki nilai-nilai kebaikan.

Budaya sekolah yang baik dapat memperbaiki kinerja sekolah, baik kepala sekolah, guru, siswa, karyawan maupun pengguna sekolah lainnya. Situasi tersebut akan terwujud ketika kualifikasi budaya tersebut bersifat sehat, solid, kuat, positif, dan professional. Dengan demikian suasana kekeluargaan, kolaborasi, ketahanan belajar, semangat terus maju, dorongan untuk bekerja keras dan belajar mengajar dapat diciptakan. Selanjutnya, dalam analisis tentang budaya sekolah dikemukakan bahwa untuk mewujudkan budaya sekolah yang akrab-dinamis, dan positif-aktif perlu adanya sebuah semacam rekayasa sosial. Dalam mengembangkan budaya baru, sekolah perlu diperhatikan dua level kehidupan sekolah: yaitu level individu

dan level organisasi atau level sekolah, tujuannya adalah agar budaya baru yang akan diterapkan agar dapat menyatu dengan baik dengan iklim dan suasana yang ada di sekolah tersebut. Level individu, merupakan perilaku siswa selaku individu yang tidak lepas dari budaya sekolah yang ada. Perubahan budaya sekolah memerlukan perubahan perilaku individu. Perilaku individu siswa sangat terkait dengan prilaku pemimpin sekolah.

Sesuai dengan Desain Induk Pendidikan karakter yang dirancang Kemendiknas (2010) strategi pengembangan pendidikan karakter dapat dilakukan melalui transformasi budaya sekolah (*school culture*) dan habituasi melalui kegiatan pengembangan diri (ekstrakurikuler). Hal ini sejalan dengan pemikiran Berkowitz, yang dikutip oleh Elkind dan Sweet (2004) serta Samani (2011) yang menyatakan bahwa: implementasi pendidikan karakter melalui transformasi budaya dan perikehidupan sekolah, dirasakan lebih efektif daripada mengubah kurikulum dengan menambahkan materi pendidikan karakter dalam muatan kurikulum.

Dalam kaitan pengembangan budaya sekolah yang dilaksanakan dalam kaitan pengembangan diri, Kemendiknas menyarankan melalui empat hal, yang meliputi : 1. Melalui kegiatan rutin, 2. Kegiatan spontan, 3. Keteladanan, dan 4. Melalui pengondisian. Secara substantif karakter terdiri dari 3 (tiga) nilai operatif, nilai-nilai dalam tindakan, atau unjuk perilaku yang satu sama lain saling berkaitan. Ketiga nilai tersebut adalah : pengetahuan tentang moral (*moral knowing*, aspek kognitif); perasaan berdasarkan moral (*moral feeling*, aspek afektif); dan perilaku berlandaskan moral (*moral action*, aspek psikomotor).

Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan merupakan small community, suatu masyarakat dalam skala kecil, sehingga gagasan untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan berkarakter di dalamnya perlu diwujudkan dengan tata kehidupan sekolah yang mencerminkan bahwa sekolah tersebut sebagai perwujudan small community yang berbudayam bertatakrama, dan bertata tertib. Salah satunya melalui praktek pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang dilakukan (in action), bukan semata mata yang dipersepsikan.

Tujuan dari dikembangkannya budaya sekolah ialah untuk membangun suasana sekolah yang kondusif melalui ditumbuhkannya pola komunikasi dan interaksi yang sehat diantara seluruh *stakeholder* sekolah, baik antara kepala sekolah dengan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, ataupun dengan pihak yang berada di luar lingkungan sekolah seperti dengan orang tua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah. Manfaat yang bisa diambil dari upaya pengembangan budaya sekolah, diantaranya : (1) Menjamin kualitas kerja yang lebih baik; (2) Membuka seluruh jaringan komunikasi dari segala jenis dan level baik komunikasi vertikal maupun horizontal; (3) Lebih terbuka dan transparan; (4) Menciptakan kebersamaan dan rasa saling memiliki yang tinggi; (5) meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan; (6) jika menemukan kesalahan akan segera dapat diperbaiki; dan (7) dapat beradaptasi dengan baik terhadap perkembangan IPTEK.

Tujuan kegiatan penegakan tatakrama dan tata tertib kehidupan akademik dan sosial sekolah adalah untuk memberikan ramburambu kepada sekolah dalam:

1. Memahami dasar pemikiran pentingnya pendidikan budi pekerti in-action dalam praktik kehidupan sekolah untuk membentuk akhlak dan kepribadian siswa melalui penciptaan iklim dan kultur;
2. Memahami acuan nilai dan norma serta aspek-aspek yang perlu dikembangkan dalam menyusun tatakrama dan tata tertib sekolah bagi siswa, tata kehidupan akademik dan sosial sekolah bagi kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya, serta tata hubungan sekolah dengan orangtua dan masyarakat pada umumnya;
3. Menyusun tatakrama dan tata tertib kehidupan akademik dan sosial sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma agama, nilai kultur dan sosial kemasyarakatan setempat, serta nilai-nilai yang mendukung terwujudnya sistem pembelajaran yang efektif di sekolah; dan
4. Melaksanakan tatakrama dan tata tertib kehidupan akademik dan sosial sekolah secara tepat dengan mengorganisasikan semua potensi sumber daya yang tersedia untuk membudayakan akhlak mulia dan budi pekerti luhur, memonitor dan mengevaluasi secara berkesinambungan, dan memanfaatkan hasilnya untuk kenaikan kelas dan ketamatan belajar siswa.

Beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan sekolah dalam rangka menegakkan tatakrama dan tata tertib kehidupan akademik dan sosial sekolah antara lain:

1. Melaksanakan tata tertib dan kultur sekolah
2. Melaksanakan norma-norma yang berlaku dan tatakrama pergaulan
3. Menumbuhkembangkan sikap hormat dan menghargai warga sekolah

Dengan demikian pengembangan karakter pada diri siswa melalui budaya sekolah yang dilaksanakan akan menjadi efektif apabila diintegrasikan kedalam pelaksanaan pembelajaran dan perilaku siswa yang didasari oleh tatakrama, budi pekerti yang sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Azra, Azyumardi. *Agama, Budaya, dan Pendidikan Karakter Bangsa*. 2006

Elkind, David H. dan Sweet, Freddy. *How to Do Character Education*. Artikel yang diterbitkan pada bulan September/Oktober 2004.

Kementerian Pendidikan Nasional, Badan penelitian dan pengembangan, Pusat kurikulum. 2011, *Pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa pedoman sekolah.* Jakarta: Pusat Kurikulum

Kennedy,M. 1991, *Some Surprising Finding on How Teachers Learn to Teach*,Educational Leadership.

Lickona, Thomas, *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books, 1992.

Lickona, Tom; Schaps, Eric, dan Lewis, Catherine. *Eleven Principles of Effective Character Education*. Character Education Partnership, 2007.

Megawangi, Ratna. *Pengembangan Program Pendidikan Karakter di Sekolah: Pengalaman Sekolah Karakter*, 2010.

Parkay, Forrest W. dan Stanford,Beverly H. 2011, *Menjadi Seorang Guru,* Jakarta : PT Indeks.

Samani, Muchlas, Hariyanto. 2011. Konsep dan Model Pendidikan Karakter. Bandung Remaja Rosdakarya.

Tilaar, HAR. 2002,*Pendidikan Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia,* Bandung : PT Remaja Rosda Karya.

PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN MELALUI BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADik) (STUDI KASUS PADA MAHASISWA AFIRMASI PAPUA DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET)

Triyanto[1], Itok Dwi Kurniawan[2]
[1,2]Prodi PPKn FKIP Universitas Sebelas Maret
E-mail: *try_uns@yahoo.com*

ABSTRAK

Hak atas pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang paling mendasar. Pada kenyataannya terdapat berbagai hambatan dalam pemenuhan hak atas pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsiksan pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan melalui program beasiswa afirmasi pendidikan tinggi (ADik) bagi mahasiswa Papua di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Informan terdiri dari 10 Mahasiswa Papua yang memperoleh beasiswa afirmasi pendidikan tinggi di UNS. Pengumpulan data menggunakan studi pustaka, observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan bagi mahasiswa Papua melaui program ADik mengalami berbagai hambatan salah satunya adalah kesulitan mahasiswa beradaptasi dengan lingkungan pembelajaran. Kendala ini menyebabkan mereka kesulitan mengikuti pelajaran sehingga mendapat prestasi akademik yang buruk. Mahasiswa afirmasi Papua juga kesulitan beradaptasi dengan masyarakat tempat tinggalnya yang menyebabkan mereka kurang percaya diri dalam berkomunikasi dengan masyarakat sekitar.

Kata kunci: Pemenuhan, Hak Atas Pendidikan, Afirmasi, Mahasiswa Papua

PENDAHULUAN

Hak atas pendidikan telah diakui sebagai hak asasi manusia di sejumlah konvensi internasional, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang mengakui hak atas kebebasan, pendidikan dasar untuk semua, sebuah kewajiban untuk mengembangkan pendidikan menengah yang dapat diakses oleh semua, khususnya pendidikan menengah gratis, serta kewajiban untuk mengembangkan akses yang adil terhadap pendidikan tinggi yang sebisa mungkin dapat diselenggarakan secara gratis. Saat ini, hampir 70 juta anak di seluruh dunia tidak dapat pergi ke sekolah setiap hari (UNICEF, 2016).

Hak atas pendidikan juga mencakup tanggung jawab untuk menyediakan pendidikan dasar bagi individu yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Selain akses terhadap ketentuan pendidikan ini, hak atas pendidikan mencakup kewajiban untuk menghindari diskriminasi di semua tingkat sistem pendidikan, menetapkan standar minimum dan meningkatkan kualitas pendidikan, menghindari diskriminasi di semua tingkat sistem pendidikan, menetapkan standar minimum dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Hak atas pendidikan tercermin dalam hukum internasional dalam Pasal 26 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 13 dan 14 dari Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pasal 26 menyatakan, "Setiap orang berhak atas pendidikan Pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidak-tidaknya di tingkat dasar. Pendidikan dasar adalah wajib. Pendidikan teknis dan profesional harus tersedia secara umum dan pendidikan tinggi dapat diakses secara setara oleh semua lapisan masyarakat. Pendidikan ditujukan untuk pengembangan kepribadian manusia secara penuh dan untuk menguatkan rasa hormat terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, untuk mempromosikan pemahaman, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras atau agama. Orang tua memiliki hak untuk memilih jenis pendidikan yang harus diberikan kepada anak-anak mereka".

Setiap negara wajib menyelenggarakan pendidikan secara adil dan bebas diskriminasi. Indonesia masih memiliki berbagai tantangan dalam mewujudkan pendidikan yang adil dan anti diskriminasi. Kesenjangan pembangunan antara Indonesia barat dan timur berdampak pula pada kesenjangan pendidikan. Warga negara di Indonesia timur khususnya di Provinsi Papua masih tertinggal jauh dalam hal pendidikan dibandingkan dengan warga negara di bagian barat. Hal ini berpotensi menimbulkan diskriminasi pendidikan bagi warga negara di Indonesia timur.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, pemerintah Indonesia meluncurkan berbagai program pendidikan untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di Papua. Salah satu program yang disediakan untuk rakyat Papua adalah Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik). Program ini disediakan khusus bagi siswa

Papua untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi yang ditunjuk pemerintah. Salah perguruan tinggi yang mendapat mandat pemerintah untuk menyelenggarakan ADik adalah Universitas Sebelas Maret (UNS) di Surakarta, Jawa Tengah. UNS merupakan salah satu perguruan tinggi klaster I dan terakreditasi A di Indonesia.

Program ADik telah dirancang sedemikian rupa untuk mendidik mahasiswa asal Papua agar memiliki kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik. Akan tetapi pada praktiknya, terdapat berbagai hambatan dan tantangan yang mengiringi penyelenggaraan program ini. Penelitian ini membahas berbagai hambatan dan tantangan pelaksanaan program ADik bagi mahasiswa Papua di UNS.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Di UNS terdapat 50 mahasiswa asal Papua. Informan terdiri dari 10 Mahasiswa Papua yang memperoleh beasiswa afirmasi pendidikan tinggi di UNS. Pengumpulan data menggunakan studi pustaka, observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles & Huberman. Analisis model interaktif terdiri dari empat langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang diwujudkan dalam siklus interaktif sebagai berikut:

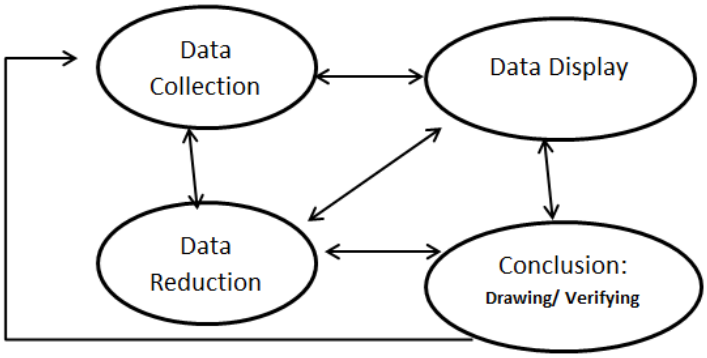

Bagan 1. Model Analisis Interaktif (Miles & Huberman, 1994)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) merupakan program keberpihakan pemerintah Indonesia kepada Putra-Putri asal daerah *Terdepan*, *Terluar* dan Tertinggal (3T) dan orang asli Papua (OAP), untuk memeroleh pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Peserta terdiri dari siswa putra-putri asli daerah 3T atau anak OAP yang diusulkan oleh Kepala Sekolah dan mendapat rekomendasi dari Pemda Kabupaten/ Kota dengan mempertimbangkan kebutuhan sumberdaya manusia daerahnya.

Komponen beasiswa terdiri dari tiga komponen yaitu (1) bantuan pengelenggaraan pendidikan, (2) bantuan biaya hidup dan (3) asuransi. Bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan diberikan maksimal sebesar Rp. 2.400.000,- per semester yang ditransfer langsung ke rekening perguruan tinggi. Bantuan biaya hidup diberikan sebesar Rp. 6.000.000,- per semester yanga ditransfer langsung ke rekening rekening perguruan tinggi. Bantuan biaya hidup selanjutnya oleh PTN ditransfer ke rekening mahasiswa per-triwulan Rp. 3.000.000,-. Adapun biaya asuransi teridiri dari asusransi kesehatan, kecelakaan dan kematian selama mengikuti program ADik Papua yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kota asal mahasiswa masing-masing.

Pada tahun 2017 terdapat 1.750 kuota beasiswa Adik. Adapun khusus untuk OAP diberikan kuota sebesar 600 mahasiswa. Terdapat 48 PTN dan 22 Politeknik yang ditunjuk pemerintah menjadi penyelenggaran program Adik. Salah satu PTN yang ditunjuk adalah Universitas Sebelas Maret.

Pada kenyataaannya, kuota 600 mahasiswa Papua tidak terpenuhi. Terdapat 203 mahasiswa yang tidak melakukan registrasi. Menurut Kemristekdikti (2017), calon mahasiswa asal Papua tidak registrasi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: (1) Mayoritas mahasiswa tidak mempunyai biaya transport dari dearah asal ke PTN tujuan, (2) Program studi yang disediakan tidak sesuai harapan mahasiswa, (3) mengalami gangguan kesehatan yang serius.

Program beasiwa ADik merupakah salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi hak atas pendidikan. Program ini merupakan perwujudan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 tentang jaminan hak atas Pendidikan. Warga Papua

perlu mendapat tindakan afirmasi karena kondisi mereka yang jauh tertinggal dibanding warga Indonesia di tempat lain. Tindakan afirmasi pendidikan adalah pemberian jalur khusus untuk masuk PTN. Warga Papua akan kesulitan bersaing dengan warga pada umumnya jika tidak diberikan jalur khusus karena kondisi sosial, ekonomi dan geografis mereka tidak sama dengan wilayah lain. Tidak adil apabila warga Papua harus menempuh jalur umum untuk masuk PTN. Jadi program afirmasi adalah penerapan prinsip keadilan bagi warga Papua untuk mengejar ketertinggalan di bidang Pendidikan.

Prinsip afirmasi merupakan salah satu teori keadilan dari John Rawls (1973) yaitu prinsip perbedaaan (*difference principle*). Prinsip afirmasi diadopsi oleh Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, *"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan"*. Negara lain yang menerapkan prinsip sejenis adalah India. Konstitusi India mengadopdsi sistem "reservation" untuk membantu kelas terbelakang (*backward class*) dalam bidang pendidikan. Tindakan afirmatif juga diatur dalam Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya dalam Komentar Umum No.18.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi mahasiswa Papua yang kuliah di UNS. Hambatan ini terdiri dari hambatan internal dan eksternal.

Pertama, mahasiswa Papua kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Mahasiswa mengalami *culture shock* berada di lingkungan yang baru. Hal ini adalah wajar karena mereka terkaget-kaget dengan kondisi sosial budaya di UNS yang jauh berbeda dengan daerah asal. Salah satu mahasiswa menyatakan bahwa "disini ramai sekali, beda dengan di Papua yang sepi" (Wawancara, 12 Juli 2017). Mahasiswa lain mengatakan "di sini seperti ada dalam dunia baru, tidak sama dengan di Papua" (Wawancara, 15 Agustus 2017).

Culture shock yang dialami mahasiswa Papua dapat disebut sebagai "*culture distance*" atau kesenjangan budaya. *Culture distance* merupakan perbedaan dua perilaku budaya yang dialami seseoorang dalam lingkungan baru yang berbeda dengan lingkungan dia sebelumnya (John W. Berry, 1997; Furnham & Alibhai,

1985). *Culture shock* dapat terjadi karena tingginya kesenjangan budaya antara lingkungan baru dengan lingkungan sebelumnya. Semakin tinggi perbedaan budaya antara budaya asli dibanding budaya baru, maka akan semakin tinggi pulan tingkat stress yang dialami oleh pendatang (Barker, Child, Gallois, Jones, & Callan, 1991; J. W. Berry, Kim, Minde, & Mok, 1987)

Kedua, mahasiswa Papua kesulitan mengikuti materi kuliah. Kesulitan mengikuti materi kuliah membuat mahasiswa Papua mempunyai prestasi akademik yang buruk. Buruknya prestasi akademik mahasiswa bukan karena mereka bodoh, tetapi lebih disebabkan rendahnya kualitas pendidikan yang mereka dapatkan dari daerah asal. Seorang mahasiswa mengatakan tidak pernah mengalami pendidikan lengkap selama di SD dan SMP. Faktor geografis menyebabkan siswa-siswa di pedalaman Papua tidak dapat bersekolah setiap hari. "Saya baru dapat sekolah secara penuh setelah SMA di Kota Jayapura. Jenjang SD dan SMP di daerah asal tidak dapat saya ikuti secara penuh karena faktor geografis dan gangguan keamanan dari kelompok separatis" (Wawancara, 15 September 2017). Ada juga mahasiswa asal Papua memiliki prestasi akademik yang buruk karena kuliah di program studi yang sebenarnya tidak mereka minati (Wawancara, 21 September 2017).

Komite hak Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB telah menetapkan standar pemenuhan hak atas pendidikan yang terdiri dari empat prinsip yaitu ketersediaan (*availibility*), keterjangkauan (*accessibility*), keberterimaan (*acceptability*), kebersesuaian (*adaptability*). Progam beasiswa ADik bagi mahasiswa Papua telah memenuhi prinsip ketersediaan dan keterjangkauan. Akan tetapi untuk prinsip keberterimaan dan kebersesuaian masih perlu diperjuangkan lebih lanjut. Ketidakcocokan program studi yang mereka tempuh dengan minat mereka merupakan masalah keberterimaan. Adapaun kesulitan adaptasi merupakan masalah kebersesuaian.

KESIMPULAN

Program beasiswa ADik bagi mahasiswa Papua merupakan bentuk pemenuhan hak atas pendidikan. Tindakan afirmatif juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan John Rawls terutama *difference principle*. Akan tetapi pada

pelaksanaanya program beasiswa ADik bagi mahasiswa belum dapat memenuhi empat standar pemenuhan hak atas pendidikan khususnya standar *acceptability* dan *adaptability*. Hampir semua mahasiswa asal Papua mengalami *culture shock* di UNS. Penelitian ini menyarankan kepada pemerintah pusat maupun daerah asal untuk memberikan pembekalan yang lebih intensif kepada calon mahasiswa penerima beasiswa ADik sebelum menuju lokasi kuliah. Pembekalan terdiri dari pembelakan akademik maupun lingkungan agar mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan dengan baik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terimakasih kepada perkumpulan mahasiswa asal Papua di UNS terutama kepada Sdr Piter Yikwa yang telah membantu penelitian dalam berkomunikasi dengan para mahasiswa asal Papua. Kami berdoa semua para mahasiswa asal Papua yang kuliah di UNS dapat berjalan lancar dan kembali ke Papua untuk memajukan wilayah Papua.

DAFTAR PUSTAKA

Barker, M., Child, C., Gallois, C., Jones, E., & Callan, V. J. 1991. *Difficulties of overseas students in social and academic situations*, Australian Journal of Psychology, *43*(2), 79–84. https://doi.org/10.1080/0004953910825910.

Berry, J. W., Kim, U., Minde, T., & Mok, D. 1987. *Comparative studies of acculturative stress*, *The International Migration Review*, *21*(3), 491–511. https://doi.org/10.2307/2546607.

Berry, John W. 1997. *Immigration, acculturation, and adaptation*, Applied Psychology, *46*(1), 5–34. https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.1997.tb01087.x

Furnham, Adrian, & Alibhai, N. 1985. *The friendship networks of foreign students: A replication and extension of the functional model**, International Journal of Psychology, *20*(3–4), 709–722. https://doi.org/10.1080/00207598508247565

Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 231/B/SK/2017 tentang Calon Mahasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Daerah Papua Tahun 2017.

Miles, M. B., & *Huberman*, A. M. *1994. Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.), Sage, London.

Rawls, John. 1973. *A. Theory of Justice*, Oxford University, London

The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (**ICESCR**) 1966

The *Universal Declaration of Human Rights* (*UDHR*) 1948

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

UNICEF. 2016. *Human Rights-based Approach to Programming*, Retrieved 2016-09-28.

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN *ACTIVE LEARNING* MELALUI MEDIA VIDEO UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PADA MAHASISWA

Ayu Dian Ningtias[1]
[1] Universitas Islam Lamongan, Lamongan
Ayudian.ningtias@yahoo.com

ABSTRAK

Pendidikan Kewarganegaraan ini memiliki peran strategis dalam mempersiapkan warganegara yang cerdas, bertanggungjawab dan berkeadaban. Untuk memaksimalkan daya pikir dan kemampuan analisis mahasiswa dalam proses pemebelajaran pendidikan kewarganegaraan tentunya diperlukan konsep pembelajaran yang matang dan efisien. Dengan konsepsi yng makin mantap, fungsi media dalam kegiatan pembelajaran tidak hanya sekedar alat bantu pengajar, melainkan sebagai pembawa informasi atau pesan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Dengan demikian seorang guru dapat memusatkan tugasnya pada aspek-aspek lain seperti pada kegiatan bimbingan dan penyuluhan individual dalam kegiatan pembelajaran. Sebagai bahan ajar non cetak, video kaya akan informasi untuk diinformasikan dalam proses pembelajaran karena pembelajaran dapat sampai ke peserta didik secara langsung. Selain itu, video menambah dimensi baru dalam pembelajaran,peserta didik tidak hanya melihat gambar dari bahan ajar cetak dan suara dari program audio, tetapi di dalam video, peserta didik bisa memperoleh keduanya, yaitu gambar bergerak beserta suara yang menyertainya. Dengan demikian penelitian ini terfokus menganalisis efektifiifitas media video pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan daya analisis mahasiswa terhadap materi perkulihanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan kemudian diinterprestasikan. Dengan teknik pengolahan data menggunakan skala Likert pada hasil angket yang telah diberikan kepada responden mahasiswa Universitas Islam Lamongan Fakultas Teknik Informatika Angkatan 2016, diperoleh hasil bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang cukup sulit untuk dipahami, dengan menggunakan media video pembelajaran materi perkuliahan lebih mudah dipahami dan dengan membuat video pembelajaran sendiri, daya analisis anda terhadap permasalahan terkait dengan materi meningkat.

Kata Kunci : *Media Video Pembelajaran, Efektifitas Hasil Belajar , Pendidikan Kewarganegaraan*

PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan dipandang, oleh sebagian mahasiswa sebagai mata kuliah yang kurang menantang dan kurang diminati, dikarenakan Pendidikan Kewarganegaraan dianggap bermuatan kepentingan politik oleh penguasa, terlepas dari itu pendidikan kewarganegaraan telah diterapkan dan dikembangkan di seluruh dunia, meskipun dengan berbagai macam istilah atau nama, mata kuliah tersebut

sering disebut juga *civic education, citizenship education,* dan bahkan ada yang menyebutnya sebagai *democracy education.*[4]Pendidikan Kewarganegaraan ini memiliki peran strategis dalam mempersiapkan warganegara yang cerdas, bertanggungjawab dan berkeadaban.

Untuk memaksimalkan daya pikir dan kemampuan analisis mahasiswa dalam proses pemebelajaran pendidikan kewarganegaraan tentunya diperlukan konsep pembelajaran yang matang dan efisien. Dengan konsepsi yng makin mantap, fungsi media dalam kegiatan pembelajaran tidak hanya sekedar alat bantu pengajar, melainkan sebagai pembawa informasi atau pesan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Dengan demikian seorang guru dapat memusatkan tugasnya pada aspek-aspek lain seperti pada kegiatan bimbingan dan penyuluhan individual dalam kegiatan pembelajaran.

Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi, proses pembelajaran mengandung lima komponen komunikasi, guru (komunikator), bahan pembelajaran, media pembelajaran, siswa (komunikan), dan tujuan pembelajaran.sehingga, Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar.

Oleh karena proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan berlangsung dalam suatu sistem, maka media pembelajaran menempati posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak akan bisa berlangsung secara optimal. Media pembelajaran adalah komponen integral dari sistem pembelajaran. Posisi media pembelajaran sebagai komponen komunikasi ditunjukkan pada Gambar 1.

[4]Kaelan Dan Achmad Zubaidi,*Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Paradigma, Yogyakarta, 2012, h.1

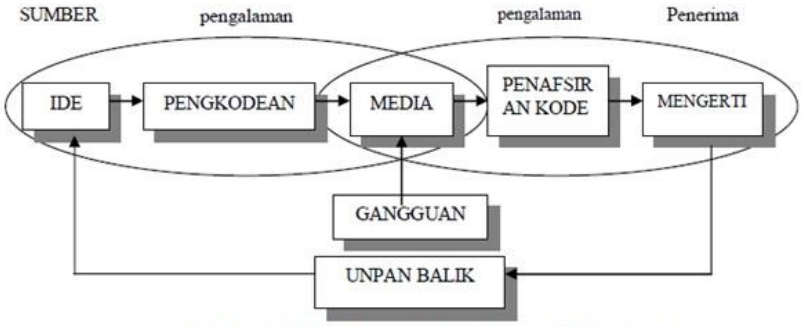

Gambar 1: Posisi Media dalam Sistem Pembelajaran

Dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber (guru) menuju penerima (siswa). Sedangkan metode adalah prosedur untuk membantu siswa dalam menerima dan mengolah informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Fungsi media dalam proses pembelajaran ditunjukkan pada Gambar 2.

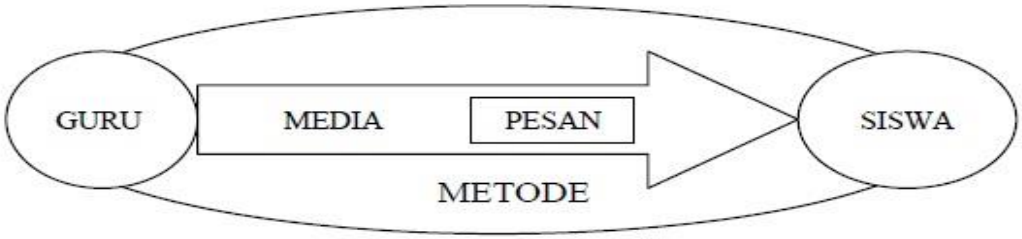

Gambar 2: Fungsi Media

Dengan memperhatikan kompleks dan uniknya proses belajar, maka ketepatan pemilihan media dan metode pembelajaran akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Di samping itu, persepsi siswa juga sangat mempengaruhi hasil belajar. Oleh sebab itu, dalam pemilihan media, di samping memperhatikan kompleksitas dan keunikan proses belajar, memahami makna persepsi serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penjelasan persepsi hendaknya diupayakan secara optimal agar proses pembelajaran dapat berangsung secara efektif. Untuk maksud tersebut, perlu: (1) diadakan pemilihan media yang tepat sehingga dapat menarik perhatian siswa serta memberikan kejelasan obyek yang diamatinya, (2) bahan pembelajaran yang akan diajarkan disesuaikan dengan pengalaman siswa.

Kajian psikologi[5] menyatakan bahwa anak akan lebih mudah mempelajari hal yang konkrit ketimbang yang abstrak. Berkaitan dengan kontinuum konkrit bstrak dan kaitannya dengan penggunaan media pembelajaran, ada beberapa pendapat. Pertama Jerome Bruner, mengemukakan bahwa dalam proses pembelajaran hendaknya menggunakan urutan dari belajar dengan gambaran atau film (*iconic representation of experiment*) kemudian ke belajar dengan simbul, yaitu menggunakan kata-kata (*symbolic representation*). Menurut Bruner, hal ini juga berlaku tidak hanya untuk anak tetapi juga untuk orang dewasa. Kedua, Charles F. Haban, mengemukakan bahwa sebenarnya nilai dari media terletak pada tingkat realistiknya dalam proses penanaman konsep, ia membuat jenjang berbagai jenis media mulai yang paling nyata ke yang paling abstrak .

Temuan-temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara penggunaan media pembelajaran dan karakteristik belajar maha siswa dalam menentukan hasil belajar mahasiswa. Artinya, mahasiswa akan mendapat keuntungan yang signifikan bila ia belajar dengan menggunakan media yang sesuai dengan karakteristik tipe atau gaya belajarnya. Siswa yang memiliki tipe belajar visual akan lebih memperoleh keuntungan bila pembelajaran menggunakan media visual, seperti gambar, diagram,video, atau film. Sementara siswa yang memiliki tipe belajar auditif, akan lebih suka belajar dengan media audio, seperti radio, rekaman suara, atau ceramah guru. Akan lebih tepat dan menguntungkan siswa dari kedua tipe belajar tersebut jika menggunakan media audio-visual. Berdasarkan landasan rasional empiris tersebut, maka pemilihan media pembelajaran hendaknya jangan atas dasar kesukaan guru, tetapi harus mempertimbangkan kesesuaian antara karakteristik pebelajar, karakteristik materi pelajaran, dan karakteristik media itu sendiri.

Penggunaan media pembelajaran pada proses belajar mengajar tidak hanya satu macam saja, namun harus beberapa macam media pembelajaran atau multimedia. Penggunaan multimedia dapat memberikan variasi penggunaan media,

[5] I Wayan Santyasa, Landasan Konseptualmedia Pembelajaran, Disajikan dalam Workshop Media Pembelajaran bagi Guru-Guru SMA Negeri Banjar Angkan Pada tanggal 10 Januari 2007 di Banjar Angkan Klungkung Pemakalah adalah Guru Besar Tetap Bidang Pendidikan Fisika Di Fakultas Pendidikan Matematika dan Iilmu Pengetahuan Alam, Bali, 2007, h. 7

sehingga memberikan lebih banyak pengalaman-pengalaman nyata pada peserta didik. Dengan demikian penggunaan multimedia dapat mendorong dan merangsang motivasi belajar dan daya analisis pada mahasiswa.

Media video merupakan salah satu jenis media audio visual. Media audio visual adalah media yang mengandalkan indera pendengaran dan indera penglihatan. Media audio visual merupakan salah satu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran menyimak. Media ini dapat menambah minat mahasiswa dalam belajar karena mahasiswa dapat menyimak sekaligus melihat gambar.

Sebagai bahan ajar non cetak, video kaya akan informasi untuk diinformasikan dalam proses pembelajaran karena pembelajaran dapat sampai ke peserta didik secara langsung. Selain itu, video menambah dimensi baru dalam pembelajaran,peserta didik tidak hanya melihat gambar dari bahan ajar cetak dan suara dari program audio, tetapi di dalam video, peserta didik bisa memperoleh keduanya, yaitu gambar bergerak beserta suara yang menyertainya. Dengan demikian penelitian ini terfokus menganalisis efektififitas media video pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan daya analisis mahasiswa terhadap materi perkulihanan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakekat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong penelitian untuk melakukan penelitian. Setiap orang mempunyai motivasi yang berbeda, di antaranya dipengaruhi oleh tujuan dan profesi masing-masing. Motivasi dan tujuan penelitian secara umum pada dasarnya adalah sama, yaitu bahwa penelitian merupakan refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu. Keinginan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan merupakan kebutuhan dasar manusia yang umumnya menjadi motivasi untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian efektifitas video pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini peneliti

menggunakan video pembelajaran sebagai tolak ukur penelitian ini, video pemebelajaran berdurasi 4 menit ini mengulas tentang pembentukan negara, [6] Banyak permasalahan di negeri kita, membuat kita sering bertanya, "apakah kita bisa membuat negara sendiri?" Negara yang tak dipenuhi cek-cok, huru-hara serta pertikaian dan perselisihan tiap harinya. Jadi, apakah mungkin kita bisa membuat negara sendiri?

Berikut merupakan cuplikan frame video dari video bisakah kita membuat negara sendiri;

Gambar .3

Gambar.4

Gambar.5

Dalam frame video Gbr. 1 dijelaskan mengenai pertanyaan apakah kita dapat mendirikan negara sendiri, kemudian dalam keterangan Gbr.2 dijelaskan mengenai syarat deklaratif dalam mendirikan suatu negara dan dilanjutkan dengan frame video Gbr.3 dijelaskan mengenai syarat konstitutif sebuah negara.

a. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono[7]penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya (tingkat kejelasan) dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Penelitian diskriptif

   Penelitian diskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

2. Penelitian komparatif

   Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Disini variabelnya masih sama dengan variabel

[6] Kok bisa, https://www.youtube.com/watch?v=pGwjuShxNjc, 10 Oktober 2017
[7] Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*, Pusat Bahasa Depdiknas, Bandung, 2003, h. 11

mandiri tetapi untuk sample yang lebih dari satu, atau dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian asosiatif

   Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini mempunyai tingkatan tertinggi dibandingkan dengan diskriptif dan komparatif karena dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi unguk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

Menurut Sugiyono,[8] terdapat beberapa jenis penelitian antara lain:

1. Penelitian kuantitatif, adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.
2. Penelitian kualitatif, data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar.

Berdasarkan teori tersebut diatas, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan kemudian diinterprestasikan.

b. Subyek Penelitian

1. Populasi

   "Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan".[9] Dalam penelitian ini populasinya adalah semua Mahasiswa Universitas Islam Lamongan, Fakultas Teknik Informatika tahun angkatan 2016 yang perkirakan mencapai 115 mahasiswa.

2. Sampel

[8] Sugiyono , Ibid, h. 11
[9] Ibid, h.115

Menurut Sugiyono [10]"sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut". [11]Sedangkan menurut Arikunto "Penentuan pengambilan Sample sebagai berikut:[12] Apabila kurang dari 100 lebih baik diambil semua hingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-55% atau lebih tergantung sedikit banyaknya dari:

1. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana
2. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya dana.
3. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti untuk peneliti yang resikonya besar, tentu saja jika samplenya besar hasilnya akan lebih baik. Penelitian ini menggunakan 50% sampel dari jumlah populasi yaitu, 100 mahasiswa dari anggota populasi.

c. Teknik Pengumpulan Data

Arikunto" metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data penelitiannya ".[13] Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa metode penelitian adalah cara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data yang di perlukan dalam penelitian.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu Kuesioner atau angket. Pengertian metode angket menurut Arikunto [14]"Angket adalah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-hal yang ia ketahui". Sedangkan menurut Sugiyon[15] "Angket atau kuesioner merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

[10] Ibid, h.116
[11] Ibid,.
[12] Arikunto, Suharsimi. *Metodelogi penelitian*. Bina Aksara. Yogyakarta,2006, h.116
[13] Arikunto, Suharsimi. *Metodelogi penelitian*. Bina Aksara. Yogyakarta,2006,h. 136
[14] *Ibid*,. 151
[15] Sugiyono, *ibid,*.h.*199*

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab". Kuesioner atau angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kuesioner atau angket langsung yang tertutup karena responden hanya tinggal memberikan tanda pada salah satu jawaban yang dianggap benar.

- **Kebaikan metode angket :**
  a. Menghemat waktu, maksudnya dengan waktu yang singkat dapat memperoleh data
  b. Menghemat biaya , karena tidak memerlukan banyak peralatan
  c. Menghemat tenaga
- **Kelemahan metode angket** :
  a. Ada kemungkinan dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang diampaikan adalah tidak jujur
  b. Apabila pertanyaan kurang jelas dapat mengakibatkan jawaban bermacam-macam

Langkah-langkah pelaksanaan angket adalah sebagai berikut :

a. Penulis membuat daftar pertanyaan angket
b. Setelah itu diberikan kepada reponden
c. Setelah selesai dijawab segera disusun untuk diolah sesuai dengan standar yang ditetapkan sebelumnya, kemudian disajikan dalam laporan penelitian.

Angket yang diberikan kepada responden mahasiswa adalah sebagai berikut;

Tabel 1. Angket

No	Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju	Tidak SangatSetuju
1	Apakah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang sulit dipahami?					
2	Apakah dengan media video pembelajaran materi perkuliahan lebih mudah dipahami ?					
3	Apakah dengan membuat video pembelajaran sendiri, daya analisis anda terhadap permasalahan terkait dengan materi meningkat					

b. Analisis Data

Dalam penelitian ini data dianalisis menggunakan skala likert, skala likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner, dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Penggunaan yang penelitian yang sering menggunakan skala ini adalah bila penelitian menggunakan jenis penelitian survei deskriptif (Gambaran). *"Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh peneliti"*[16]

Nama skala ini diambil dari nama penciptanya Rensis Likert, yang menerbitkan suatu laporan yang menjelaskan penggunaannya. Sewaktu menanggapi pertanyaan dalam skala Likert, responden menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Peneliti mengumpulkan item-item yang cukup banyak, relevant dengan masalah yang sedang diteliti, dan terdiri dari item yang cukup jelas disukai dan tidak disukai. Kemudian item-item itu dicoba kepada sekelompok responden yang cukup representatif dari populasi yang ingin diteliti. Responden di atas diminta untuk mengecek tiap item, apakah ia menyenangi (+) atau tidak menyukainya (-). Respons tersebut dikumpulkan dan jawaban yang memberikan indikasi menyenangi diberi skor tertinggi. Tidak ada masalah untuk memberikan angka 5 untuk yang tertinggi dan skor 1 untuk yang terendah atau sebaliknya. Yang penting adalah konsistensi dari arah sikap yang diperlihatkan. Demikian juga apakah jawaban "setuju" atau "tidak setuju" disebut yang disenangi, tergantung dari isi pertanyaan dan isi dari item-item yang disusun. Total skor dari masing-masing individu adalah penjumlahan dari skor masing-masing item dari individu tersebut.

[16] http://naufansapoetra.blogspot.co.id/2015/11/cara-menghitung-kuesioner-skala-likert.html

Respon dianalisis untuk mengetahui item-item mana yang sangat nyata batasan antara skor tinggi dan skor rendah dalam skala total. Misalnya, responden pada upper 25% dan lower 25% dianalisis untuk melihat sampai berapa jauh tiap item dalam kelompok ini berbeda. Item-item yang tidak menunjukkan beda yang nyata, apakah masuk dalam skor tinggi atau rendah juga dibuang untuk mempertahankan konsistensi internal dari pertanyaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut merupakan hasil analisis data responden angket yang dilakukan terhadap mahasiswa Fakultas Teknik Informatika Universitas Islam Lamongan Angkatan 2016 tentang Efektifitas Media Video Pembelajaran Sebagai Sarana Peningkatan Daya Pikir Dan Kemampuan Analisis Mahasiswa;

Tabel.2 Responden

No	Kelas	Jumlah Mahasiswa
1	III A	31 Orang
2	III B	42 Orang
3	III C	24 Orang
4	III D	18 Orang
5	Jumlah Total Mahasiswa	115 Orang

Tabel.3 Hasil Angket

No	Kelas	No Pertanyaan	SS	S	N	TS	TSS	Jumlah Mahasiswa
1	III A	1	-	1	7	14	2	24
		2	5	9	7	3	-	24
		3	4	13	7	-	-	24
2	III B	1	-	-	3	5	10	18
		2	12	5	1	-	-	18
		3	6	11	1	-	-	18
3	III C	1	-	2	14	20	3	42
		2	3	21	18	1	-	42
		3	3	18	16	-	-	42
4	III D	1	-	4	17	10	-	31
		2	4	18	6	2	1	31
		3	2	16	13	-	-	31

Keterangan;

A. (SS) Sangat Setuju
B. (S) Setuju
C. (N) Netral
D. (TS) Tidak Setuju
E. (TSS) Tidak Sangat Setuju

Tabel .4 Bobot Nilai

A	5
B	4
C	3
D	2
E	1

Tabel .5 Tabel Presentase Nilai

Jawaban	**Keterangan**
0% - 19.99%	Sangat (Tidak Setuju, Buruk atau Kurang Sekali)
20% - 39.99%	Tidak Setuju atau Kurang Baik
40% - 59.99%	Cukup atau Netral
60% - 79.99%	Setuju, Baik atau Suka
80% - 100%	Sangat (Setuju, Baik, Suka)

Dari data yang didapat diatas kemudian diolah dengan cara mengkalikan setiap point jawaban dengan bobot yang sudah ditentukan dengan tabel bobot nilai.

Maka Hasil Perhitungan jawaban responden sebagai berikut :

A. Pertanyaan Pertama

1. Apakah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang sulit dipahami?

SS	**S**	**N**	**TS**	**TSS**
0	**7**	**41**	**49**	**15**

1) Responden yang menjawab sangat setuju (5) = 0 x 5 = 0
2) Responden yang menjawab setuju (4) = 7 x 4 = 28
3) Responden yang menjawab netral (3) = 41 x 3 = 123
4) Responden yang menjawab tidak setuju (2) = 49 x 2 = 98
5) Responden yang menjawab tidak sangat setuju (1) = 15 x 1 = 15

Total Skor = 0 + 28 + 123 + 98 + 15 = 264

Untuk mendapatkan hasil interpretasi, harus diketahui dulu skor tertinggi (X) dan angka terendah (Y) untuk item penilaian dengan rumus sebagai berikut :

Y = Skor tertinggi likert x jumlah responden (Angka Tertinggi 5) "Perhatikan Bobot Nilai"

X = Skor terendah likert x jumlah responden (Angka Terendah 1) "Perhatikan Bobot Nilai"

Jumlah skor tertinggi untuk item **SANGAT SETUJU** ialah 5 x 115 = 575, sedangkan item **SANGAT TIDAK SETUJU** ialah 1 x 115 = 115. Jadi, jika total skor responden di peroleh angka 115, maka penilaian interpretasi responden terhadap media pembelajaran tersebut adalah hasil nilai yang dihasilkan dengan menggunakan rumus Index %.

Rumus Index % = Total Skor / Y x 100

Maka penyelesaian akhir dari contoh kasus :

= Total Skor / Y x 100

= 264/575 x 100

= 45,9 % = 46 % Kategori **CUKUP**

Dari hasil di atas maka dapat disimpulkan bahwa menurut responden Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang **CUKUP** sulit dipahami.

B. Pertanyaan Kedua

2. Apakah dengan media video pembelajaran materi perkuliahan lebih mudah dipahami?

SS	**S**	**N**	**TS**	**TSS**
24	**53**	**32**	**6**	**2**

1) Responden yang menjawab sangat setuju (5) = 24 x 5 = 120
2) Responden yang menjawab setuju (4) = 53 x 4 = 212
3) Responden yang menjawab netral (3) = 32 x 3 = 96
4) Responden yang menjawab tidak setuju (2) = 6 x 2 = 12

5) Responden yang menjawab tidak sangat setuju (1) = 2 x 1 = 2

Total Skor = 120 + 212+ 96+ 12 + 2 = 442

Untuk mendapatkan hasil interpretasi, harus diketahui dulu skor tertinggi (X) dan angka terendah (Y) untuk item penilaian dengan rumus sebagai berikut :

Y = Skor tertinggi likert x jumlah responden (Angka Tertinggi 5) "Perhatikan Bobot Nilai"

X = Skor terendah likert x jumlah responden (Angka Terendah 1) "Perhatikan Bobot Nilai"

Jumlah skor tertinggi untuk item **SANGAT SETUJU** ialah 5 x 115 = 575, sedangkan item **SANGAT TIDAK SETUJU** ialah 1 x 115 = 115. Jadi, jika total skor responden di peroleh angka 115, maka penilaian interpretasi responden terhadap media pembelajaran tersebut adalah hasil nilai yang dihasilkan dengan menggunakan rumus Index %.

Rumus Index % = Total Skor / Y x 100

Maka penyelesaian akhir dari contoh kasus :

= Total Skor / Y x 100

= 442/575 x 100

= 76,8 % = 77 % Kategori **SETUJU**

Dari hasil di atas maka dapat disimpulkan bahwa responden **SETUJU** dengan media video pembelajaran materi perkuliahan lebih mudah dipahami

C. Pertanyaan Ketiga

2. Apakah dengan membuat video pembelajaran sendiri, daya analisis anda terhadap permasalahan terkait dengan materi meningkat?

SS	S	N	TS	TSS
15	**58**	**37**	**0**	**0**

3. Apakah dengan membuat video pembelajaran sendiri, daya analisis anda terhadap permasalahan terkait dengan materi meningkat?

1) Responden yang menjawab sangat setuju (5) = 15 x 5 = 75
2) Responden yang menjawab setuju (4) = 58 x 4 = 232
3) Responden yang menjawab netral (3) = 37 x 3 = 111

4) Responden yang menjawab tidak setuju (2) = 0 x 2 = 0
5) Responden yang menjawab tidak sangat setuju (1) = 0 x 1 = 0

Total Skor : 75+232+111+0+0 = 418

Untuk mendapatkan hasil interpretasi, harus diketahui dulu skor tertinggi (X) dan angka terendah (Y) untuk item penilaian dengan rumus sebagai berikut :

Y = Skor tertinggi likert x jumlah responden (Angka Tertinggi 5) "Perhatikan Bobot Nilai"

X = Skor terendah likert x jumlah responden (Angka Terendah 1) "Perhatikan Bobot Nilai"

Jumlah skor tertinggi untuk item **SANGAT SETUJU** ialah 5 x 115 = 575, sedangkan item **SANGAT TIDAK SETUJU** ialah 1 x 115 = 115. Jadi, jika total skor responden di peroleh angka 115, maka penilaian interpretasi responden terhadap media pembelajaran tersebut adalah hasil nilai yang dihasilkan dengan menggunakan rumus Index %.

Rumus Index % = Total Skor / Y x 100

Maka penyelesaian akhir dari contoh kasus :

= Total Skor / Y x 100

= 418/575 x 100

= 72,6 % = 73% Kategori **SETUJU**

Dari hasil di atas maka dapat disimpulkan bahwa responden **SETUJU** dengan membuat video pembelajaran sendiri, daya analisis anda terhadap permasalahan terkait dengan materi meningkat.

Dengan teknik pengolahan data menggunakan skala Likert pada hasil angket yang telah diberikan kepada responden mahasiswa Universitas Islam Lamongan Fakultas Teknik Informatika Angkatan 2016, diperoleh hasil bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang cukup sulit untuk dipahami, dengan media video pembelajaran materi perkuliahan lebih mudah dipahami dan dengan membuat video pembelajaran sendiri, daya analisis anda terhadap permasalahan terkait dengan materi meningkat.

KESIMPULAN

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi pedidik dan peserta yang saling bertukar informasi. Proses pembelajaran merupakan peristiwa komunikasi, dalam proses pembelajaran terdapat unsur-unsur komunikasi diantaranya adalah; Komunikator (*Source, Sender*), Pesan (*Message*), Media (*Channel*), Komunikan (*Receiver*) dan Efek (*Effect, Influence*), di dalam proses pembelajaran maka Pendidik sebagai komunikator, Bahan pembelajaran merupakan Pesan, Media pembelajaran adalah perantara, Peserta didik adalah komunikan dan Tujuan pembelajaran merupakan efek.

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), sehingga dapat merangsang perhatian, minat,pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Oleh karena proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan berlangsung dalam suatu sistem, maka media pembelajaran menempati posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak akan bisa berlangsung secara optimal. Media pembelajaran adalah komponen integral dari sistem pembelajaran. Pemilihan media ini harus didasarkan atas kesesuaian dengan teori. Media yang dipilih bukan karena fanatisme pendidik terhadap suatau media yang dianggap paling bagus, namun didasrkan atas teori yang diangkat dari penelitian dan riset sehingga telah teruji validitasnya. Pemilihan media harus merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran yang fungsinya untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas pembelajaran.

Menurut hasil skala likert pendidikan merupakan mata kuliah yang cukup sulit dipahami oleh mahasiswa, untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan media pembelajaran Audio Visual, karena penggunaan media pembelajaran Audio visual diharapkan mampu memperbaiki proses pembelajaran di dalam kelas yang nantinya juga akan berdampak pada hasil belajar mahasiswa. Media pembelajaran Audio Visual sebenarnya ada beberapa bentuk,salah satunya adalah penggunaan media

Audio Visual bentuk Video Media pembelajaran berbasis Audio Visual adalah media penyaluran pesan dengan memanfaatkan indera pendengaran dan penglihatan serta dapat diterimasecara bersamaan. video merupakan media pembelajaran yang dapat membuat pembelajaran menjadi lebih hidup dan lebih menarik. Berbagai keuntungan penggunaan video sebagai media menjadikan pembelajaran terfasilitasi dengan baik karena video dapat memotivasi, menciptakan suasana kelas yang lebih baik, meningkatkan pemahaman dan partisipasi mahasiswa.

Bloom mengemukakan tiga aspek penting dalam tujuan pembelajaran yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Tujuan pembelajaran pada aspek kognitif adalah untuk melatih kemampuan intelektual siswa. Tujuan pada ranah ini membuat siswa mampu menyelesaikan tugas-tugas bersifat intelektual. Aspek afektif sangat terkait dengan sikap, emosi, penghargaan dan penghayatan atau apresiasi terhadap nilai, norma, dan sesuatu yang sedang dipelajari. Aspek psikomotor memiliki kaitan yang erat dengan kemampuan dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik dalam berbagai mata pelajaran. dalam membuat atau menciptakan video pembelajaran sendiri mahasiswa telah mengembangkan indikator capaian pembelajaran yakni aspek yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik, secara bersamaan dikarenakan program video yang akan digunakan dalam aktivitas pembelajaran dapat diproduksi sendiri dengan menggunakan langkah-langkah : (1) penemuan ide atau gagasan; (2) penyusunan kerangka program; (3) penulisan treatment atau informasi rinci tentang tayangan program; (4) penulisan naskah; (5) revisi atau perbaikan naskah; (6) finalisasi naskah; (7) revisi program. Penulisan naskah program video untuk pembelajaran dimulai dari ide atau gagasan tentang materi yang akan ditulis. Gagasan untuk menulis biasanya dipicu oleh pertanyaan: "informasi atau pengetahuan apa yang akan kita sampaikan kepada pemirsa" setelah kita berhasil menentukan informasi yang akan kita sampaikan kepada pemirsa, maka langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data atau bahan yang akan ditulis menjadi naskah program video. Data untuk menulis naskah program video pembelajaran dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan dari buku, laporan, dokumen, artikel dan bahan rujukan

lain. Langkah selanjutnya yang akan ditulis terkumpul yaitu menulis kerangka program. Kerangka program berisi garis besar susunan informasi yang akan ditulis menjadi naskah program video. Informasi yang disusun harus sistematik dan memudahkan orang untuk belajar. Kerangka program yang ditulis selanjutnya kita kembangkan menjadi treatment. Sebuah treatment adalah deskripsi rinci dan sistematik tentang alur informasi yang akan ditayangkan, dengan demikian daya analisa terhadap suatu permasalahan terkait dengan materi ajar akan meningkat dikarenakan dalam proses pembuatan video pembelajaran sendiri ada 3 (tiga) aspek capaian pembelajaran dicapai.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat Nya kepada Kita Semua, dalam penelitian ini saya ingin menyampaikan terimakasih pihak Universitas Islam Lamongan khususnya Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika telah memberikan kesempatan untuk dilakukannya penelitian ini, kepada suami saya Anjar Kumboro, S.H., M.H. *thanks for your full support and all over the world.* dan teruntuk M. Haryo Pamenang *you are my pride.* Dan terimakasih banyak Ayah Ibu, untuk *semuanya i can't thank you enough for all that you have done for me.*

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi, 2006,*Metodelogi penelitian*. Bina Aksara. Yogyakarta.

Azhar, Arsyad , 2003, *Media Pembelajaran,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hamzah B.Uno dan Nurdin Mohamad, 2012, Belajar Dengan Pendekatan PAILKEM, Bumi Aksara, Jakarta.

Kaelan Dan Achmad Zubaidi, 2012, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Paradigma, Yogyakarta.

Muhammad Ali dan Muhammad Asrori, *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik*, PT Bumi Aksara, Jakarta , 2006.

Nasution, Zulkarimein, *Media Dalam Pembelajaran.* CV. Rajawali Jakarta, 1984.

----------, *Teknologi Pendidikan.* Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Sudjana, Nana. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Sinar Baru Algensindo, Bandung,1995.

Sugiyono, 2003, *Metode Penelitian Bisnis*, Pusat Bahasa Depdiknas, Bandung.

Suprijanto, 2009, *Pendidikan Orang Dewasa*, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Usman, Basyiruddin, 2002, *Media Pembelajaran.* Ciputat Pers, Jakarta.

Wina Sanjaya, 2010, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Prenada Media Group*, Jakarta.

I Wayan Santyasa, 2007, *Landasan Konseptual media Pembelajaran, Disajikan dalam Workshop Media Pembelajaran bagi Guru-Guru SMA Negeri Banjar*. Fakultas Pendidikan Matematika dan Iilmu Pengetahuan Alam, Bali

Kok bisa, 27 September 2016, https://www.youtube.com/watch?v=pGwjuShxNjc, 10 Oktober 2017.

Naufan sapoetra, 2015, http://naufansapoetra.blogspot.co.id/2015/11/cara-menghitung-kuesioner-skala-likert.html, 10 Oktober 2017.

PENERAPAN MODEL *PROBLEM BASED LEARNING* UNTUK MEMBENTUK MAHASISWA YANG KRITIS PADA PEMBELAJARAN PPKN

Mutiara Nurmanita
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta
mutiara.nurmanita@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini untuk menggambarkan penerapan model *problem based learning* untuk membentuk mahasiswa yang kritis pada pembelajaran PPKn. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh masih kurangnya sikap kritis mahasiswa terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi termasuk masalah sosial, politik, ekonomi bahkan agama. Permasalahan tersebut merupakan ranah dari pembelajaran PPKn. Pembelajaran PPKn mengharuskan warga negara muda yaitu mahasiswa untuk memiliki kompetensi kewarganegaraan yang tidak hanya *civic knowledge* akan tetapi juga *civic skill* dan *civic values*. Kompetensi kewarganegaraan pada mahasiswa dapat meningkatkan kekritisan mahasiswa pada permasalahan yang ada dengan sikap kritis. Sikap kritis pada mahasiswa perlu diterapkan melalui model pembelajaran yang cocok dan sesuai yaitu dengan model pembelajaran *problem based learning*. *Problem based learning* merupakan pembelajaran yang berbasis masalah dengan tujuan untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah secara lebih mendalam dan kritis. Penerapan dari *problem based learning* pada mahasiswa tidak hanya sebatas diskusi tetapi juga dituntut memberikan solusi terhadap masalah. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu dengan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu mengkaji beberapa literatur yang terkait dengan model *problem based learning*, sikap kritis, dan pembelajaran PPKn untuk kemudian dianalisis. Hasil penulisan menunjukkan bahwa penerapan model *problem based learning* dapat membentuk mahasiswa yang kritis pada pembelajaran PPKn sehingga mahasiswa akan terdorong dan termotivasi untuk belajar meningkatkan kompetensi kewarganegaraan secara lebih baik. Dengan demikian, mahasiswa yang belajar PPKn dengan diterapkan model pembelajaran *problem based learning* dapat menjadikan mahasiswa yang kritis sesuai dengan misi dari pembelajaran PPKn.
Kata kunci : *Problem Based Learning, Pembelajaran PPKn, Sikap Kritis*

PENDAHULUAN

Warga negara yang bertempat tinggal di sebuah negara memiliki peran terhadap kemajuan negaranya. Baik dibidang ekonomi, sosial, politik, agama. Kesemua bidang tersebut harus dikuasi oleh warga negara agar mampu bersaing secara global dalam hubungan internasional. Proses menjalin hubungan secara internasional diperlukan sikap-sikap yang mampu menangkal berbagai hal

permasalahan baik yang terjadi dalam negeri maupun luar negeri. Seperti permasalahan di bidang ekonomi seperti adanya pasar bebas yang menyebabkan produk hasil Indonesia yang kurang diminati pasar dunia, selain itu banyak produk luar negeri yang masuk ke Indonesia seperti produk tas dan sepatu dari China dan Korea. Selanjutnya di bidang politik seperti adanya politik kesejahteraan yang banyak dilakukan oleh kaum elit yang biasa disebut dengan kaum borjuis. Tentu saja sangat merugikan bangsa ini jika hal tersebut tidak segera diatasi dikarenakan rakyat membutuhkan aspirasinya di dengar oleh badan perwakilan. Sebenarnya masih banyak sekali yang perlu dikaji terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Negara Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri jika hal tersebut perlu adanya warga negara muda yang mampu memperbaiki dan mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang besar dan beragam budaya menjadikan negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Maka tuntutan menjadi manusia yang mampu memecahkan masalah sebagai wujud nyata dari warga negara muda yang kritis. Sikap kritis diperlukan agar tidak hanya melihat masalah hanya sekedar pemahaman akan tetapi aspek yang perlu dikembangkan. Lau, Joe & Chan (2009) menyatakan bahwa sikap kritis sangat berdampak pada penerapan model pembelajaran yang dilakukan oleh pengajar yaitu dosen kepada mahasiswa. Mahasiswa sebagai warga negara muda berperan memberikan kritik dan masukkan terhadap kinerja pemerintah yang sedang berjalan.

Penelitian yang dilakukan oleh Schaefer & Lamm (1998) mengemukakkan bahwa pemahaman dosen terhadap tingkat kemampuan kritis mahasiswa sangat dipengaruhi dengan model yang digunakan saat mengajar. Hal ini berarti bahwa sikap kritis sangat diperlukan dalam pendidikan yaitu melalui mata kuliah pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Widiatmaka (2016: 193) menyatakan bahwa PPKn sebagai mata kuliah yang sangat membosankan karena hanya kognitif dan bukan aplikatif sehingga banyak mahasiswa menganggap bahwa mata kuliah hanya untuk formalitas saja untuk syarat kelulusan nantinya. Tentu saja hal ini

menjadi dorongan kuat dari beberap peneliti PPKn maupun pendidikan ilmu sosial untuk melakukan riset dalam memperbaiki sistem pendidikan di perguruan tinggi.

Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib yang ada di perguruan tinggi sehingga mahasiswa jurusan PPKn. Tujuan dari mata kuliah ini yaitu untuk membentuk warga negara muda atau mahasiswa agar dapat membangun dan mengkondisikan masyarakat secara demokratis (Print et al, 1999: 25). Artinya mahasiswa tidak memecahkan masalah dengan cara kekerasan akan tetapi lebih demokratis. Agar proses pembelajaran PPKn dapat berjalan dengan baik dan efektif maka diperlukan pembelajaran yang dapat menunjang kritisan mahasiswa melalui kerja kelompok dengan diskusi. Pembelajaran yang dimaksud yaitu *problem based learning* atau pembelajaran berbasis masalah dimana mahasiswa akan belajar untuk menyelesaikan setiap permasalahan secara kritis (Sanjaya, 2006: 214). Pembelajaran berbasis masalah sangat diperlukan oleh mahasiswa dalam membahas berbagai permasalahan yang terjadi untuk dipecahkan dan dicari solusinya. Tidak dapat dipungkiri jika *problem based learning* merupakan model pembelajaran yang sangat penting dalam kekritisan mahasiswa dikarenakan mahasiswa tidak hanya memahami masalah akan tetapi juga mampu memecahkan masalah dengan tahapan-tahapan secara ilmiah (Ward, 2002: 18). Mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan tetapi juga keterampilan dalam memecahkan masalah sehingga menunjang daya berpikir kritis serta daya kreativitasnya. Hal tersebut merupakan kegiatan pembelajaran yang diharuskan dan diperlukan oleh mahasiwa dalam menyelesaikan berbagai permasalahan secara bijak dan benar.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakan yang mana data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti jurnal dan buku untuk dianalisis kemudian disajikan dalam hasil dan pembahasan agar dapat dibuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problem Based Learning

Interaksi dosen dan mahasiswa di kelas merupakan bagian dari proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang terdiri dari berbagai komponen seperti tujuan perkuliahan, silabus, bahkan rencana pembelajaran yang akan dipelajari oleh mahasiswa. Hal tersebut tentu saja memerlukan sebuah pembelajaran yang menarik dengan model-model pembelajaran yang mampu menunjang sikap kritis mahasiswa. Model pembelajaran sebagai pendekatan yang dilakukan oleh dosen kepada mahasiswa dengan menggunakan berbagai cara yang interaktif (Nanang, 2009: 41). Selanjutnya model pembelajaran bertujuan untuk melakukan perubahan perilaku mahasiswa yang meliputi pembelajaran awal sampai akhir (Zubaidi, 2011: 185).

Pembelajaran yang diterapkan oleh dosen harus memuat keterlibatan mahasiswa sehingga mahasiswa tidak hanya pasif dalam mendengarkan akan tetapi mahasiswa dituntut untuk dapat aktif dalam perkuliahan (Rustaman, 2005: 217). Tuntutan kepada mahasiswa agar mampu terlibat dan berperan dalam berbagai kegiatan perkuliahan maka perlu pembelajaran yang kooperatif dimana pembelajaran ini dapat mengaktifkan mahasiswa dalam berpartisipasi. Salah satu model pembelajaran yang mampu mendorong mahasiswa agar mampu memecahkan dan mencari solusi dari berbagai masalah yaitu dengan *problem based learning*. *Problem based learning* atau biasa disebut dengan pembelajaran berbasis masalah sebagai sebuah pembelajaran yang menantang mahasiswa untuk mencari solusi terhadap masalah yang nyata dan terjadi di sekitarnya (Aris, 2014: 130). Pembelajaran berbasis masalah sebagai sebuah inovasi yang mampu mengoptimalkan kinerja mahasiswa melalui kerja secara berkelompok untuk mengasah dan mengembangkan kemampuan dengan lebih kritis (Rusman, 2013: 229).

Pembelajaran berbasis masalah menjadikan mahasiswa tidak hanya mampu memecahkan masalah akan tetapi dituntut agar mampu mencari solusi terhadap masalah yang telah dipecahkan (Sanjaya, 2006: 214). Pembelajaran ini bertujuan

untuk menjadikan mahasiswa terampil dalam berbagai pemecahan masalah dengan sikap interaktif, kerja sama, dan mampu mengevaluasi secara bijak (Rusman, 2010: 238). Model pembelajaran berbasis masalah memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan model yang lain yaitu memiliki unsur masalah dalam berbagai temuan, memiliki proses penyelidikan, dapat menciptakan karya yang mampu untuk disampaikan di depan kelas, adanya unsur kerja kelompok (Trianto, 2009: 93).

Karakteristik pembelajaran berbasis masalah yang dikemukakan oleh Rusman (2010: 232) yaitu sebagai berikut. *Pertama,* masalah sebagai hal yang utama. *Kedua,* masalah yang yang dikemukakan merupakan masalah yang nyata. *Ketiga,* masalah harus yang baru sehingga akan menambah pengetahuan mahasiswa terhadap masalah yang akan diselesaikan. *Keempat,* terjadi proses interaktif mahasiswa kepada dosen. *Kelima,* keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penyelidikan akan mendorong keterampilan dalam berkomunikasi dengan mahasiswa lainnya. Kesemua karakteristik tersebut sangat perlu ada dalam pembelajaran berbasis masalah sehingga mahasiswa dapat terlatih untuk memecahkan dan mencari solusi terhadap masalah.

Model pembelajaran berbasis masalah memiliki kelebihan yaitu mahasiswa terampil dalam memecahkan masalah dalam kehidupannya, dapat terjalin hubungan kekerabatan antarmahasiswa, mahasiswa akan terbiasa untuk melakukan penyelidikan sedangkan kelemahan dari pembelajaran ini yaitu mahasiswa yang kurang terampil dalam memecahkan masalah akan kesulitan untuk menyesuaikan pembelajaran yang digunakan dan membutuhkan waktu yang banyak (Warsono & Hariyanto, 2012: 152). Selanjutnya langkah-langkah dalam pembelajaran berbasis masalah yaitu sebagai berikut. *Pertama,* dosen menjelaskan maksud dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sehingga mahasiswa akan terfokus pada pembelajaran yang disampaikan. *Kedua,* membantu mahasiswa untuk melihat dan menghubungkan setiap masalah dengan teori yang telah dipelajari.

Ketiga, mahasiswa setelah memahami masalah yang akan dibahas maka mahasiswa mengumpulkan berbagai sumber untuk dilakukan proses analisis. *Keempat,* mahasiswa akan menyiapkan bahan untuk disampaikan setelah dilakukan perencanaan secara berkelompok (Aris, 2014: 131). Selanjutnya langkah-langkah

pembelajaran berbasis masalah yang dikemukakan oleh Amir (2009: 21) menyatakan ada beberapa langkah yaitu sebagai berikut. *Pertama,* mahasiswa memilih masalah yang akan dipecahkan. *Kedua,* setelah masalah dipilih maka dilakukan proses perumusan. *Ketiga,* mengaitkan masalah dengan teori yang ada untuk dihubungkan dengan sumber yang telah didapat. *Keempat,* proses menghubungkan teori dengan fakta maka ada proses pemilihan, penyeleksian untuk dikatakan mendukung atau menentang hal tersebut. *Kelima,* mahasiswa melakukan proses analisis terhadap masalah yang sudah dikaji. *Keenam,* setelah selesai proses analisis maka mahasiswa membuat tugas akhir untuk dipresentasikan di depan kelas.

Sikap Kritis

Pembelajaran yang ada dengan menggunakan *problem based learning* memerlukan berbagai sikap yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Sikap sebagai perasaan untuk menyatakan pendapat terhadap objek yang diamati seperti perilaku atau tingkah laku (Suyanto, dkk, 2013). Sikap sebagai mahasiswa harus menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai banga yaitu nilai demokrasi yang berdasarkan pancasila dan undang-undang (Subroto, 2012). Perwujudan nilai-nilai demokrasi sebagai upaya proses kritisan mahasiswa dalam memandang dan bertingkah laku. Sikap kritis sebagai sebuah pemikiran yang memerlukan akal untuk berpendapat dan memutuskan apa yang dipercayai. Sikap ini perlu dilakukan secara sadar dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai (Maftukhin, 2013: 22).

Standar pemikiran mahasiswa sangat dipengaruhi oleh cara berpikirnya, apakah kritis dalam menanggapi masalah atau hanya pasif saja dalam situasi yang memungkinkan untuk memecahkan masalah (Paul & Eider, 2006: 1). Mahasiswa harus bersikap secara kritis karena hal ini penting untuk membentuk kepribadian yang sosial dan ahli dalam mempengaruhi masyarakat secara positif (Chen & Kraus, 2002: 84). Sikap positif perlu diwujudkan melalui pemikiran menalar setiap permasalahan dengan logika dan argumen yang jelas sesuai dengan teori agar hal yang disampaikan tidak keliru (Arends, 2012: 326). Untuk itu, perlu ada proses penalaran yang mengubah proses berpikir menjadi tindakan yang telah diyakini itu benar berdasarkan sumber-sumber yang benar (Fisher, 2008: 4). Agar proses

pemikiran kritis dapat dilakukan mahasiswa maka perlu kegigihan dalam memandang sudut pandang yang berbeda untuk disimpulkan (Surya, 2011: 129). Kekritisan ini menjadikan mahasiswa dapat memahami, menganalisis, dan mengkaji berbagai gagasan yang sulit untuk dipecahkan dengan secara terstruktur (Inch, 2006: 5).

Pembelajaran PPKn

Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan merupakan paradigma baru yang bertujuan untuk menjadikan mahasiswa dapat berpikir secara kritis sehingga dapat mewujudkan cita-cita bangsa yaitu berdemokratis (Hariyanto, 2013: 8-9). Mata kuliah PPKn memiliki fungsi sebagai mata kuliah untuk menjadikan mahasiswa agar tidak hanya memiliki wawasan kebangsaan akan tetapi juga penerapan dalam wawasan yang ada seperti tentang demokrasi atau kebebasan berpendapat yang menjadi salah satu aspek dari demokrasi. Mahasiswa diupayakan agar memiliki sikap dan keterampilan dalam menganalisis berbagai permasalahan yang berlandaskan pancasila. Capaian dari pembelajaran PPKn di perguruan tinggi yaitu agar mahasiswa mampu menganalisis berbagai masalah dalam ruang lingkup PPKn sehingga akan terampil secara positif, memiliki kemampuan dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, dan berpenampilan sesuai dengan aturan dalam masyarakat dimana ia berada (Santoso, 2012: v-vi).

Penerapan *Problem Based Learning* untuk Membentuk Mahasiswa yang Kritis dalam Pembelajaran PPKn

Proses penerapan pembelajaran berbasis masalah melalui pembelajaran PPKn dapat dilihat dari standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Standar kompetensi merupakan ukuran yang akan dicapai mahasiswa dalam pembelajaran yang meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tujuan dari pembelajaran PPKn menjadikan mahasiswa agar cerdas dan lebih berkompeten serta beradab dalam berperilaku sehari-hari. Sedangkan kompetensi dasarnya yang terdiri dari pengetahuan kewarganegaraan mencakup demokrasi, masyarakat yang madani sehingga mahasiswa dapat memahami. Sikap kewarganegaraan yang dimiliki mahasiswa sehingga ia sadar sebagai warga negara yang berkomitmen untuk

kemajuan bangsa, dan keterampilan kewarganegaraan yang dimiliki mahasiswa seperti dalam berpartisipasi sesuai dengan perumusan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (Hariyanto, 2013: 7-8).

Pembelajaran PPKn dapat diterapkan melalui pembelajaran berbasis masalah yang dapat dilakukan melalui beberapa strategi yaitu memahami setiap masalah yang akan diselesaikan, melakukan kegiatan yang telah didiskusikan terkait masalah yang direncanakan, dan mengecek kembali (Suherman, 2003: 91). Mahasiswa sebagai warga negara muda mempunyai sikap kritis dalam menghadapi masalah dengan cara yang benar dalam memecahkannya yang memerlukan strategi yang sesuai dengan langkah-langkah yang telah direncanakan sebelumnya. Langkah-langkah tersebut melalui pembelajaran berbasis masalah yang dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis mahasiswa (Tiwari et al, 2006).

Sikap kritis diperlukan agar mahasiswa dapat berpikir secara mandiri dalam menyelesaikan masalah dengan pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran PPKn (Arend, 2009: 5). Kritis menjadi standar bagi pemikiran mahasiswa yang dikatakan berkompeten dalam menghasilkan berbagai karya (Paul, 2013). Beberapa indikator dalam sikap kritis mahasiswa yaitu proses klarifikasi masalah, memberikan jawaban terhadap masalah yang telah dikemukakan, memberikan penyimpulan, melakukan klarifikasi terhadap masalah yang bertentangan dan tidak sesuai dengan teori, dan memberikan dugaan terhadap masalah yang telah dijabarkan (Maftukhin, 2012: 24). Proses penerapan *problem based learning* atau pembelajaran berbasis masalah untuk membentuk sikap kritis mahasiswa dalam pembelajaran PPKn dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Penerapan *problem based learning* untuk membentuk kritis mahasiswa

Langkah-Langkah *Problem Based Learning*	**Sikap Kritis**	**Pembelajaran PPKn**
Dosen menjelaskan maksud dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sehingga mahasiswa akan terfokus pada pembelajaran yang disampaikan	Memahami	Pengetahuan kewarganegaran *(civic knowledge)*
Membantu mahasiswa untuk melihat dan menghubungkan setiap masalah dengan teori yang telah dipelajari	Memahami Menganalisis	Sikap kewarganegaraan *(civic disposition)*
Mahasiswa setelah memahami masalah yang akan dibahas maka mahasiswa mengumpulkan berbagai sumber untuk dilakukan proses analisis	Memahami Menganalisis Mengkaji	Pengetahuan kewarganegaran *(civic knowledge)* Sikap kewarganegaraan *(civic disposition)* Keterampilan kewarganegaraan *(civic skill)*
Mahasiswa akan menyiapkan bahan untuk disampaikan setelah dilakukan perencanaan secara berkelompok	Memahami Menganalisis Mengkaji	Pengetahuan kewarganegaran *(civic knowledge)* Sikap kewarganegaraan *(civic disposition)* Keterampilan kewarganegaraan *(civic skill)*

Berdasarkan pada tabel 1 bahwa dapat dikatakan penerapan pembelajaran berbasis masalah dapat dilakukan kepada mahasiswa agar mahasiswa menjadi warga negara yang kritis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dengan bijak mencakup bidang ekonomi, sosial, politik, agama. Sehingga mahasiswa dapat kritis melalui langkah-langkah dalam pembelajaran berbasis masalah pada pembelajaran PPKn. Mahasiswa ditujukan agar tidak hanya memahami konsep secara teori yaitu pengetahuan akan tetapi juga sikap dan keterampilan perlu dimunculkan dalam pembelajaran yang dilakukan oleh dosen.

DAFTAR PUSTAKA

Amir, M. T. (2009). *Inovasi pendidikan melalui problem based learning*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Arend, B. (2009). Encouraging critical thinking in online threaded discussions. *The Journal of Educators Online*, 6 (1), 1-23.

Arends. R.I. (2012). *Learning to teach*. Americas, New York: McGraw-Hill Companies, Inc.

Aris, S. (*2014). 68 model pembelajaran inovatif dalam kurikulum 2013*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.

Chen, S., Boucher, H., & Kraus, M. W. (2011). The relational self. In S. J. Fisher, A. (2008). *Berpikir kritis*. Jakarta: Erlangga.

Hariyanto, E. (2013). *Pendidikan pancasila dan kewarnegaraan (PPKn)*. Pamekasan: Pena Salsabila

Inch S. E. (2006). *Critical thinking and communication*. Boston: pearson education.inc.

Lau, Joe & Jonathan Chan. (2009). *About critical thinking*. Diakses pada tanggal 2 Mei 2016, dari http://creativecommons.org.

Maftukhin**.** M. (2013). Keefektifan model pembelajaran *cps* berbantuan cd pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kritis materi pokok geometri kelas X. *Skripsi*. Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang.

Nanang, *H*. (*2009). Konsep strategi pembelajaran*. Bandung: PT Refika Aditama.

Paul, R.W. (2002). *Critical thinking*. New Jersey: Prentice Hall.

Paul, R., & Elder, L. (2006). *The miniature guide to critical thinking:* Concepts & tools. Foundation Critical Thinking.

Print, M, et.al. (1999). *Civic education for civil society*. London: Asian Academic Press.

Rusman. (*2010). Model-model pembelajaran*. Bandung: Rajawali Pers.

_____(*2013). Model-model pembelajaran: mengembangkan profesionalisme*. guru. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rustaman (2005). *Model-model pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.

Sanjaya, W. (2006). *Strategi pembelajaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Santoso, D. (2012). *Buku Modul Kuliah Kewarganegaraan.* Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Schaefer, R.T. & Lamm, R.P. (1998). *Sociology*. New York: McGraw Hill.

Subroto, W. T. (2012). Role of Citizenship Education for Sustaining Culuture and Character in The Nation. *Jurnal Pendidikan Dasar Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya*, 11-14.

Suherman, E. dkk. (2003). *Stategi pembelajaran matematika kontemporer*. Universitas Pendidikan Indonesia.

Surya, H. (2011). *Strategi jitu mencapai kesuksesan belajar*. Jakarta: Elek Media Komputindo.

Suyanto, dkk. (2013). *Menjadi guru profesional, strategi meningkatkan kualifikasi dan kualitas guru di era global*. Jakarta: Esensi.

Tiwari, A., Lai, P., So, M., & Yuen, K. (2006). *A comparison of the effects of problem-based learning and lecturing on the development of students' critical thinking*. Medical education, 40 (6), 547-554.

Trianto. (2009). *Mendesain model pembelajaran inofatif-progresif*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group.

Ward, J. D., & Lee, C.L. (2002). A review problem based learning. *Journal of family and consumer sciences education,* 2, (1), 16-25.

Warsono & Hariyanto. (2012). *Pembelajaran aktif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Widiatmaka. P. (2016). Pembangunan karakter nasionalisme peserta didik di sekolah berbasis agama islam . *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan,* 1(1).

Zubaidi. (*2011). Desain pendidikan karakter*. Jakarta : Kencana Prenada Media.

PROJECT CITIZEN BERBASIS MEDIA MASSA SEBAGAI MODEL PEMBELAJARAN PPKN INOVATIF

Dian Eka Putri[1]
[1]Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta
dianeka1420@gmail.com

ABSTRAK

Dunia pendidikan dewasa ini mengarah pada suatu perkembangan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Kreativitas dan paradigma baru pendidik harus terus diperbarui demi mengimbangi perkembangan di dunia pendidikan seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembaharuan dapat dilakukan secara kontekstual untuk menjadikan proses pembelajaran di kelas menjadi lebih bermakna. Pada pembelajaran PPKn, salah satu praktik konkretnya yaitu dengan melakukan inovasi model pembelajaran melalui praktik belajar kewarganegaraan (*project citizen*) berbasis media massa. Model pembelajaran *project citizen* bertujuan untuk memotivasi dan memberdayakan siswa dalam menggunakan hak dan tanggung jawab kewarganegaraan yang demokratis melalui kajian yang intensif mengenai permasalahan yang berkembang di masyarakat. Melalui media massa, peserta didik dapat memanfaatkan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi terkait isu-isu yang berkembang di masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji *project citizen* berbasis media massa sebagai model pembelajaran PPKn inovatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah riset kepustakaan (*library research*) yakni riset dengan memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya inovasi model pembelajaran yang menjadi terobosan sekaligus sebagai solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan pembelajaran PPKn. Inovasi penggunaan model pembelajaran yang dapat dilakukan yaitu dengan pemanfaatan media massa sebagai sumber informasi belajar untuk kemudian dianalisis dan dijadikan bahan kajian dalam pembelajaran. Kemampuan analisis informasi atau berita dalam media massa di era digital saat ini sangat penting mengingat keterbukaan informasi yang sangat luas dan mudahnya penyebaran berita *hoax.* Melalui praktik belajar kewarganegaraan (*project citizen*) berbasis media massa, guru dan siswa dituntut untuk lebih kritis dan cakap dalam pengambilan keputusan. Selain itu, siswa juga dapat memahami teori kewarganegaraan melalui pengalaman belajar praktik-empirik dengan cara diarahkan dan diberikan latihan untuk belajar secara kontekstual. Adapun saran dari penelitian ini, yaitu bahwa suatu inovasi dalam dunia pendidikan harus terus dilakukan sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi termutakhir untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.

Kata kunci : *Project Citizen, Media Massa, Model Pembelajaran PPKn*

PENDAHULUAN

Dunia pendidikan dewasa ini mengarah pada suatu perkembangan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Era globalisasi secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak pada proses pendidikan yang berlangsung di Indonesia. Berkembangnya teknologi berdampak secara positif dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana proses pendidikan, namun di sisi lain, era globalisasi juga memberikan dampak negatif pada dunia pendidikan, terutama perihal ketidak-tertarikan siswa pada pembelajaran yang dianggap tidak menarik karena tidak mengikuti perkembangan teknologi. Kreativitas dan paradigma baru pendidik harus terus dibangun demi mengimbangi perkembangan di dunia pendidikan seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi.

Pembahasan tentang pendidikan tidak bisa terlepas dari pembahasan praktik pendidikan di ranah sekolah. Fenomena proses pergantian kurikulum, proses pembelajaran di kelas dan permasalahan pada guru serta peserta didik di sekolah menjadi bagian dari keberlangsungan sistem pendidikan nasional. Pembahasan masalah pendidikan, secara otomatis akan berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah. Sekolah sebagai komponen utama pendidikan perlu memperhatikan kegiatan pembelajaran yang berlangsung, apakah sudah sesuai atau belum dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Pada dasarnya, kegiatan pembelajaran memerlukan suatu arah yang menuju pada tujuan dari pembelajaran yang ditentukan, beberapa hal yang dapat mengarahkan proses pembelajaran pada tujuan pembelajaran yaitu: 1) pembelajaran yang berpusat pada siswa; 2) mengembangkan kreativitas siswa; 3) menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang; 4) bermuatan nilai, etika, estetika, dan kinestetika; dan 5) menyediakan pengalaman belajar yang beragam (Fajar, 2004: 15).

Pendidikan yang modern, menuntut civitas akademika untuk memiliki strategi yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang sedang berlangsung. Orientasi kurikulum saat ini yakni kurikulum 2013 cenderung mengarah ke sistem pembelajaran *student centered learning*. Hal tersebut menuntut para pendidik untuk lebih kreatif dan inovatif dalam rangka menentukan model dan media pembelajaran

yang akan digunakan. Begitu pula dengan mata pelajaran PPKn, proses pembelajaran PPKn berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat serta berfokus pada warga negara. Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri merupakan pendidikan sosial yang terintegrasi yang diharapkan dapat melahirkan warga negara yang cerdas, kritis, bertanggung jawab, terampil, dan partisipatif dalam pengambilan keputusan-keputusan publik, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global (Djahiri, 2006: 173).

Melihat realitas pembelajaran PPKn di Indonesia saat ini, menurut hasil penelitian David Kerr (1999: 5-7) Pendidikan Kewarganegaraan di Asia pada umumnya, termasuk di Indonesia menunjukkan kategori minimal yang hanya mewadahi aspirasi tertentu, berbentuk pengajaran kewarganegaraan yang bersifat formal, terikat oleh isi, berorientasi pada pengetahuan, menitikberatkan pada proses pengajaran, dan hasilnya mudah diukur. Pendapat David Kerr tersebut didukung dengan penjelasan Winataputra dan Budimansyah (2007: 121) yang mengemukakan tiga sumber kegagalan pengembangan *civic education*, yaitu: (1) penggunaan alokasi waktu yang tercantum dalam struktur kurikulum pendidikan dijabarkan secara kaku dan konvensional sebagai jam pelajaran tatap muka di kelas yang sangat dominan, sehingga guru tidak berimprovisasi secara kreatif untuk melakukan aktivitas lainnya selain pembelajaran rutin tatap muka yang terjadwal dengan ketat; (2) pelaksanaan proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang lebih didominasi oleh kegiatan peningkatan dimensi kognitif mengakibatkan porsi peningkatan dimensi lainnya menjadi terbengkalai, disamping keterbatasan dukungan media pembelajaran; dan (3) pembelajaran yang terlalu menekankan pada dimensi kognitif berimplikasi pada penilaian yang juga menekankan pada penguasaan kemampuan kognitif saja, sehingga mengakibatkan guru harus selalu mengejar target pencapaian materi. Oleh karena itu, penting diperlukan adanya pembaharuan sistem pembelajaran di kelas pada mata pelajaran PPKn.

Pembaharuan pada mata pelajaran PPKn dapat dilakukan secara kontekstual untuk menjadikan pembelajaran dikelas menjadi lebih bermakna. Salah satunya yaitu dengan melakukan pembaharuan inovasi model pembelajaran yakni, melalui model Praktik Belajar Kewarganegaraan (*project citizen*) yang berbasis media

massa. Budimansyah (2009: 1) menjelaskan *project citizen* adalah satu *instructional treatment* yang berbasis masalah untuk mengembangkan pengetahuan, kecakapan, dan watak kewarganegaraan demokratis yang memungkinkan dan mendorong pada suatu keikutsertaan dalam pemerintahan dan masyarakat sipil (*civil society*). Melalui *project citizen* dalam pembelajaran PPKn, siswa berpartisipasi dalam permasalahan yang ada dalam masyarakat. Partisipasi merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan kewarganegaraan (Torney-Purta dan Armadeo, 2003: 270). Hal demikian dapat dilakukan melalui media massa, dimana peserta didik dapat memanfaatkan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi terkait isu-isu yang berkembang di masyarakat. Penggunaan media massa dapat diperoleh melalui media massa elektronik: siaran radio, televisi, film, dan media *online* (internet) dan media massa non elektronik: surat kabar dan majalah (Ardianto, 2007: 103).

Ulasan tentang keterkaitan *project citizen* dengan media massa, sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam sehingga dapat diperoleh hasil kajian yang komprehensif mengenai *project citizen* berbasis media massa sebagai model pembelajaran PPKn inovatif. Hal ini dikarenakan, sudah banyak penelitian tentang *project citizen* yang dilakukan, akan tetapi belum ada yang secara fokus memanfaatkan media massa sebagai sumber belajar di era digital saat ini, dimana perkembangan dan penyebaran informasi sangat cepat dan mudah tersebarnya informasi *hoax* di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pada pembahasan penelitian ini penulis akan memfokuskan kajian pada beberapa topik bahasan yaitu: Bagaimana penelitian-penelitian dengan topik *project citizen* yang telah dilakukan di Indonesia? Bagaimana konsep pembelajaran PPKn inovatif? dan Bagaimana kajian *project citizen* berbasis media massa sebagai model pembelajaran PPKn inovatif?. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kajian penelitian dengan topik *project citizen* yang telah dilakukan di Indonesia, mengetahui konsep pembelajaran PPKn inovatif, dan mengkaji *project citizen* berbasis media massa sebagai model pembelajaran PPKn inovatif.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu riset kepustakaan (*library research*). Riset pustaka dengan memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian, artinya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan (Zed, 2008: 1-2). Adapun data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian kepustakaan tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan lain sebagainya (Harahap, 2014: 68). Dalam penulisan ini, literatur yang digunakan berkenaan dengan *project citizen*, media massa, dan model pembelajaran PPKn.

Waktu penelitian dalam penulisan ini dilaksanakan selama dua bulan yaitu bulan September sampai dengan bulan Oktober. Metode penelitian yang berjenis studi literatur atau kepustakaan tidak mengikat peneliti untuk menentukan tempat penelitian dan subjek penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah *project citizen* berbasis media massa sebagai model pembelajaran PPKn inovatif. Penggalian data dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber literatur yang berkenaan dengan judul melalui kegiatan membaca dan menyimak dengan teliti serta melakukan pencatatan melalui anotasi literasi. Prosedur teknik analisis data dilakukan melalui proses yang digambarkan dalam diagram alur pada gambar 1.

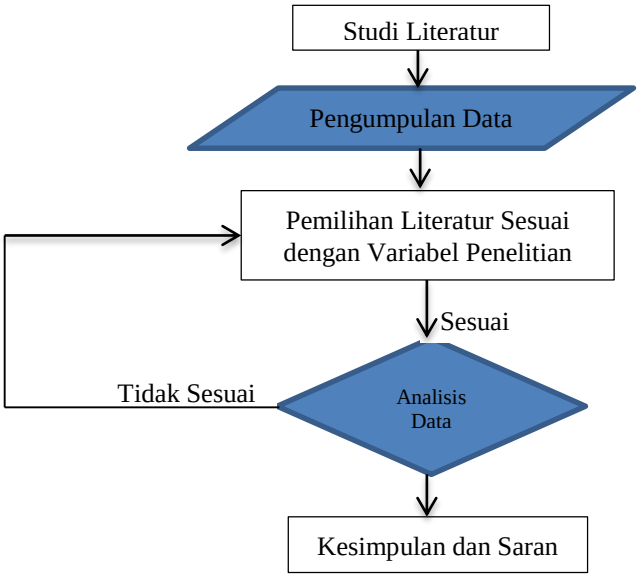

Gambar 1. Prosedur Teknik Analisis Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Pembelajaran *Project Citizen*

Secara adaptif, di Indonesia telah dikembangkan model praktik belajar kewarganegaraan atau *project citizen* yang di dalamnya terdapat portofolio hasil belajar siswa. Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang, bahwa *project citizen* merupakan satu *instructional treatment* yang berbasis masalah untuk mengembangkan pengetahuan, kecakapan, dan watak kewarganegaraan demokratis yang memungkinkan dan mendorong keikutsertaan dalam pemerintahan dan masyarakat sipil. Adapun tujuan *project citizen* itu sendiri ialah untuk memotivasi dan memberdayakan para siswa dalam menggunakan hak dan tanggung jawab kewarganegaraan yang demokratis melalui penelitian yang intensif mengenai masalah kebijakan publik di sekolah atau di masyarakat tempat mereka berinteraksi (Budimansyah, 2009: 1-2). *Project citizen* seringkali dikembangkan dari model pendekatan berpikir kritis atau reflektif sebagaimana dirintis oleh John Dewey (1900) dengan paradigma "*how we think*" atau model *reflective inquiry* yang dikemukakan oleh Barr (1978) (Budimansyah, 2009: 10).

Secara hitoris, model *project citizen* ini pertama kali digunakan di California pada tahun 1992 dan kemudian dikembangkan menjadi satu program nasional oleh *Center for Civic Education* (CCE) dan Konferensi Nasional Badan Pembuat Undang-Undang Negara pada tahun 1995. Selanjutnya secara paradigmatik model ini diadaptasi di Indonesia dari "*We the People Project Citizen*" yang dikembangkan oleh *Center for Civic Education* (CCE) Calabasas, dan dalam 15 tahun terakhir ini telah diadaptasi di sekirar 50 negara di dunia (*Center for Indonesia Civic Education*, 1999: 2-4).

Di Indonesia model *project citizen* dikenal dengan model praktik belajar kewarganegaraan, yang mulai dirintis pengembangannya di sekolah dasar dan menengah. Sebagai model pembelajaran, dipilih topik generik "*Public Policy*" (Kebijakan Publik), yang memang berlaku di negara manapun. Misi dari model ini yaitu mendidik para siswa agar mampu menganalisis berbagai dimensi kebijakan publik dalam konteks proses demokrasi, dan dengan kapasitasnya sebagai "*young citizen"* atau warga negara muda mencoba memberi masukan terhadap kebijakan

publik di lingkungannya. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas warga negara yang cerdas, kreatif, partisipatif, prospektif, dan bertanggung jawab.

Beberapa penelitian tentang *project citizen*, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Trisiana, dkk (2015) dengan judul "*The Development Strategy Of Citizenship Education In Civic Education Using Project Citizen Model In Indonesia*" dalam *Journal of Psychological and Educational Research (JPER)*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa strategi pengembangan pendidikan karakter perlu dilakukan terus menerus. Melalui model *project citizen*, proses pembelajaran mengarah pada pembelajaran aktif, untuk mencapai kognitif, afektif, dan aspek psikomotor oleh siswa SMA di Kota Surakarta. Selanjutnya, siswa diharapkan untuk memiliki wawasan tentang bangsa, sikap sebagai bangsa, dan keterampilan signifikan untuk mengembangkan kemampuan pribadi, sosial, dan kehidupan nasional. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Jayadiputra (2015) dengan judul "Model *Project Citizen* dalam Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa" yang dipublikasikan melalui jurnal ilmiah *Cisoc* memaparkan hasil penelitian bahwa *project citizen* pada pembelajaran Pendidikan Kewarganeagraan terbukti dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Aktivitas peserta didik dalam kegiatan mengidentifikasi masalah diantaranya berbagi informasi dengan teman, berdiskusi, mencari informasi seputar permasalahan apa yang sedang terjadi yang menarik untuk dikaji, mengumpulkan bahan-bahan materi/permasalahan, mengumpulkan informasi seputar permasalahan yang akan dikaji, bermusyawarah mengenai masalah apa yang menjadi bahan kajian kelas.

Dari sejumlah aktivitas tersebut, dalam proses pembelajaran melalui *project citizen* peserta didik dituntut untuk bisa peka terhadap permasalahan yang sedang terjadi di lingkungan sekitarnya dan aktif dalam memberikan solusi permasalahan. Sehingga, dalam pembelajaran tidak lagi menempatkan guru sebagai pemeran utama yang memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada peserta didik, melainkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator dan mengorganisir berbagai sumber belajar untuk dipelajari oleh peserta didik (Murdiono, 2012: 24).

Penelitian-penelitian dengan kajian *project citizen* tersebut menunjukkan hasil penelitian yang positif dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Kesimpulan penelitian menunjukkan adanya implikasi yang positif bagi siswa yaitu berupa pengembangan strategi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *project citizen* sebagai model pembelajaran, dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif solusi pemilihan model pembelajaran bagi pendidik dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Hanya saja, dalam hasil penelitian terlihat bahwa model *project citizen* yang diteliti masih mengarah pada suatu penelitian *project citizen* secara umum dan hanya sekedar untuk meningkatkan kapasitas tertentu dari siswa. Dengan adanya kemajuan pemikiran dan perkembangan teknologi, *project citizen* sangat memungkinkan untuk terus dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi, sehingga perlu suatu pemikiran atau paradigma baru yang inovatif untuk mengembangkan model *project citizen* yang lebih modern sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

Pentingnya Pembelajaran PPKn Inovatif

Permasalahan kritis tentang sekolah, kurikulum, proses pembelajaran, pendidik, dan peserta didik selalu menjadi permasalahan nasional. Banyak sekolah yang digunakan sebagai ajang tempat seleksi dan menutup diri, banyak juga sekolah yang akan dijadikan tembok-tembok pembatas sosial. Bagi sekolah dengan sistem ini akan menjadikan sesuatu menjadi dinamis sebagai tuntutan modern ke arah perubahan pengetahuan. Permasalahannya bahwa tujuan pendidikan yang sudah ada sangat terbatas dan beragam, dan sedikit sekali yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran saat ini.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian atau usaha salah satu tujuan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (*Social Science Education*) yaitu yang bahan pendidikannya diorganisir secara terpadu (*integrated*) dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial, humaniora, dokumen negara, terutama Pancasila, UUD 1945, dan perundangan negara, dengan bahan pendidikan pada hubungan warga negara dan negara. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan warga negara dan warga negara dengan negara serta

pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Pendidikan Kewarganegaraan adalah seleksi dan adaptasi dari lintas disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu kewarganegaraan, humaniora, dan kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara psikologis dan ilmiah untuk ikut mencapai salah satu tujuan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Pendidikan Kewarganegaraan yang memasukan berbagai disiplin ilmu menambah keanekaragaman materi yang dibahas dalam PPKn. Pembentukan seorang warga negara bukan hanya dari ilmu kewarganegaraan saja, tetapi bisa didapatkan dari ilmu pengetahuan yang lainnya (Somantri, 2001: 159). Sedangkan dalam Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (2006: 2) ditegaskan bahwa, Pendidikan Kewarganegaraan (*Citizenship*) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial-budaya, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Dengan adanya ragam disiplin ilmu dalam Pendidikan Kewarganegaraan, serta tujuan mulia Pendidikan Kewarganegaraan, maka pemikiran-pemikiran baru atau inovasi baru harus terus didorong dalam mengembangkan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Alasan mendasar perlunya inovasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yaitu; *pertama*, PPKn merupakan bidang kajian kewarganegaraan yang ditopang berbagai disiplin ilmu yang relevan, yaitu: ilmu politik, hukum, sosiologi, antropologi, psikologi, dan disiplin ilmu lainnya, yang digunakan sebagai landasan untuk melakukan kajian-kajian terhadap proses pengembangan konsep, nilai, dan perilaku demokrasi warganegara. *Kedua*, PPKn mengembangkan daya nalar (*state of mind*) bagi para peserta didik. Pembangunan karakter bangsa merupakan proses pengembangan warga negara yang cerdas dan berdaya nalar tinggi. PPKn memusatkan perhatiannya pada pengembangan kecerdasan (*civic intelligence*), tanggung jawab (*civic responsibility*), dan partisipasi (*civic participation*) warga negara sebagai landasan pengembangan nilai dan perilaku demokrasi. *Ketiga*, PPKn sebagai suatu proses pencerdasan, maka pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah yang lebih

inspiratif dan partisipatif dengan menekankan pada pelatihan penggunaan logika dan penalaran.

***Project Citizen* Berbasis Media Massa sebagai Model Pembelajaran PPKn Inovatif**

Sebagai suatu inovasi model *project citizen* dilandasi oleh Empat pilar pendidikan yakni *learning to do*, *learning to know*, *learning to be*, *learning to live together*; pandangan konstruktivisme; *democratic teaching* dan beberapa prinsip pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi prinsip belajar siswa aktif, kelompok belajar kooperatif, pembelajaran partisipatorik, *reactive teaching* (Budimansyah, 2002: 8-13). Fokus perhatian dari model ini adalah pengembangan tentang "*civic knowledge* (pengetahun kewarganegaraan), *civic dispositions* (kebajikan kewarganegaraan), *civic confidence* (kepercayaan diri kewarganegaraan), *civic commitment* (komitmen kewarganegaraan), *civic competence* (kompetensi kewargenagaraan)" yang bermuara pada berkembangnya *well-informed, reasoned, and responsible decision making* (kemampuan mengambil keputusan, berwawasan, bernalar, dan bertanggung jawab)". Langkah-langkah pembelajaran model *project citizen*, yaitu: 1) mengidentifikasi masalah, 2) memilih suatu masalah untuk dikaji oleh kelas, 3) mengumpulkan informasi yang terakit pada masalah itu, 4) mengembangkan portofolio kelas, 5) menyajikan portofolio dihadapan dewan juri, 6) melakukan refleksi pengalaman belajar.

Sumber belajar pada model *project citizen* dapat bersumber dari mana saja, salah satunya yaitu dari media massa. Bahwa saat ini, media massa menjadi bagian dari rutinitas kehidupan masyarakat. Di era modern ini, media massa memegang peranan penting dalam proses penyampaian informasi publik. Masalahnya yaitu semakin banyak dan berkembangnya media massa dewasa ini, muncul suatu fenomena dalam penyampaian informasi yang dilakukan dengan cara yang semakin beragam dan memiliki tujuan dan motif tertentu, terlebih jika informasi tersebut berkaitan dengan informasi politik. Informasi yang disampaikan oleh media massa saat ini lebih menarik karena seringkali adanya analisis yang kontradiktif antara satu media massa dengan media massa yang lain. Misalnya dalam suatu kasus ada satu objek bahasan yang sama, akan tetapi ada dua sudut pandang yang berbeda

yang bisa jadi berlawanan. Lebih lanjut, informasi atau berita semakin berkembang hingga tidak jarang ditemukan berita-berita yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan atau yang disebut dengan berita "*hoax*". Hal tersebut menjadi menarik untuk dianalisis lebih lanjut, dan dijadikan suatu pembahasan sebagai sarana dalam menyampaikan materi pembelajaran, dengan tujuan untuk menumbuhkan suatu keterampilan berpikir kritis siswa. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sangat terkait dengan isu-isu terkini di masyarakat. Isu-isu yang berkembang di masyarakat selalu terkait dengan kehidupan politik, ekonomi, sosial-budaya, agama, sampai dengan teknologi.

Media massa dapat berbentuk cetak (koran, majalah, tabloid) dan elektronik (internet, televisi, film, radio, CD dan lain-lainnya) (Ardianto, 2007: 103). Adapun fungsi dari media massa Sutaryo (2005: 290) memaparkan yakni, 1) kepentingan bisnis, seperti kepentingan penjualan produk, dan propaganda, 2) kepentingan dan komunikasi politik, 3) pendidikan, 4) hiburan, 5) jurnalistik, dan 6) pelayanan publik. Selain itu, kaitannya dengan masalah politik, menyatakan bahwa media massa berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat melalui informasi-informasi yang disampaikan. Media massa merupakan salah satu saluran yang digunakan dalam komunikasi massa. Komonikasi massa merupakan kegiatan komunikasi yang ditujukan kepada orang banyak yang tidak dikenal (Sutaryo, 2005: 292). Pemanfaatan media pembelajaran sebagai penunjang proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologi terhadap siswa (Arsyad, 2005: 15). Kemp & Dayton (Arsyad, 2005: 19) menjelaskan media pembelajaran memiliki tiga fungsi utama apabila media itu digunakan untuk perorangan, kolompok, atau kelompok pendengar yang besar jumlahnya, yaitu (1) memotivasi minat atau tindakan, (2) menyajikan informasi, dan (3) memberi instruksi.

Beberapa fungsi dari adanya penggunaan media pembelajaran yaitu mengungkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu, menanipulasi keadaan, peristiwa, atau objek tertentu, dan menambah gairah dan motivasi belajar siswa. Dari beberapa fungsi di atas media pembelajaran juga memiliki fungsi praktis,

antara lain (1) media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa, (2) media dapat mengatasi batas ruang kelas, (3) media dapat memungkinkan terjadinya interaksi antara peserta dengan lingkungan, (4) media dapat menghasilkan keseragaman pengalaman, (5) media dapat menanamkan konsep-konsep dasar yang benar, nyata, dan tepat, (6) media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang peserta didik untuk belajar dengan baik, (7) media dapat membangkitkan keinginan dan minat baru, (8) media dapat mengontrol kecepatan belajar siswa, dan (9) media dapat memberikan pengalaman yang menyeluruh dari hal-hal yang konkret sampai yang abstrak (Sanjaya, 2006: 167-170). Adapun manfaat media pembelajaran dijeaskan oleh Arsyad (2005: 26-27), sebagai berikut.

a) Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar
b) Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungan, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya
c) Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu
d) Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta kemungkinan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan juga lingkungan.

Beberapa manfaat media pembelajaran tersebut, mengindikasikan bahwa media pembelajaran merupakan komponen pendukung yang penting dalam proses keberhasilan implementasi model pembelajaran. Hal ini yang kemudian mendasari bahwa media massa dapat juga dijadikan sebagai media pembelajaran dan dapat menjadi sumber belajar yang relevan untuk mengkaji isu-isu terkini yang berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Model *project citizen* berbasis media massa merupakan model pembelajaran PPKn yang inovatif. Selain adanya pemanfaatan media massa dalam proses pembelajaran, di dalam proses model *project citizen* peserta didik diharapkan untuk berpikir kritis dan sekaligus memahami tiga ranah atau komponen utama kewarganegaraan sekaligus yang dapat berwujud pengetahuan (*kognitif*), keterampilan (*skill*),

maupun nilai dan sikap (*afektif*) inovasi ini yang membedakan model *project citizen* dengan model pembelajaran yang lain.

KESIMPULAN

Dari studi literatur yang dilakukan, bahwa *project citizen* merupakan model pembelajaran dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang memberikan implikasi positif bagi peserta didik seperti meningkatkan kapasitas kecakapan dan intelektual, serta menumbuhkan sikap berpikir kritis siswa. Namun begitu, penelitian-penelitian dengan topik *project citizen* yang telah dilakukan cenderung hanya mengarah pada suatu implikasi peningkatan kapasitas peserta didik tanpa adanya inovasi yang mengarah pada perkembangan teknologi dan informasi. Sehingga perlu adanya paradigma baru atau inovasi dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan model *project citizen.* Oleh sebab itu, perlu adanya gagasan pembelajaran PPKn yang inovatif. Adapun salah satu kajian model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang inovatif ialah dengan memanfaatkan media massa sebagai sumber belajar dalam pembelajaran praktik belajar kewarganegaraan (*project citizen*). Kajian *project citizen* berbasis media massa sebagai model pembelajaran PPKn inovatif mengarahkan pada pemanfaatan media massa yang kita ketahui dewasa ini, pengaruh media massa di masyarakat sangat kuat. Terutama terkait dengan informasi atau berita-berita yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, model *project citizen* dapat membuat peserta didik menguasai tiga komponen utama kewarganegaraan sekaligus yang dapat berwujud pengetahuan (*kognitif*), keterampilan (*skill*), maupun nilai dan sikap (*afektif*). Hal ini yang membedakan model *project citizen* dengan model pembelajaran yang lain.

Sebagai insan yang aktif dalam bidang akademik Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, inovasi dalam proses kajian dan pembelajaran di sekolah harus terus menerus dikembangkan, tentunya dengan menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Ardianto, E. 2007. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar: Edisi Revisi*, Simbiosa Rekatama Media, Jakarta.

Arsyad, A. 2005. *Media Pembelajaran*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Budimansyah, D. 2002. *Model Pembelajaran dan Penilaian Berbasis Portofolio*, PT Ganesindo, Bandung.

————————. 2009. *Inovasi Pembelajaran Project Citizen*, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, UPI.

Center For Indonesia Civic Education/CICED. 1999. *Democratic Citizens in a Civic Society: Report of the Conference on Civic Education for Civic Society*, CICED, Bandung.

Departemen Pendidikan Nasional. 2006. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Depdiknas, Jakarta.

Djahiri, K. 2006. *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*, Laboratorium PKn FPIPS UPI, Bandung.

Fajar, A. 2004. *Portofolio dalam Pembelajaran IPS*, Rosda, Bandung.

Harahap, N. 2014. *Penelitian Kepustakaan*, Jurnal Iqra, Vol. 08, No. 01, Hal 68-74.

Jayadiputra, E. 2015. *Model Project Citizen dalam Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa*, Jurnal Ilmiah Cisoc: Kajian Kampus Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 2, No. 01 Juni 2015/ISSN 2460-1802.

Kerr, D. 1999. *Citizenship Education: an International Comparison*, London Quality Curriculum Association.

Murdiono, M. 2012. *Strategi Pembelajaran Kewarganegaraan Berbasis Portofolio*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.

Sanjaya, W. 2006. *Srategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Somantri, M.N. 2001. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.

Sutaryo. 2005. *Sosiologi Komunikasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.

Torney-Purta, J., & Armadeo, J.A. 2003. *A Cross-national Analysis of Political and Civic Involvement Among Adolescents*, Political Science and Politics, Vol. 36, No. 2, Hal 269-274.

Trisiana, A., dkk .2015. *The Development Strategy of Citizenship Education In Civic Education Using Project Citizen Model In Indonesia*, dalam Journal of Psychological and Educational Research (JPER)-2015, Vol. 23, No. 2, November, Hal 111-124.

Winataputra, U.S., & Budimansyah, D. 2007. *Kewarganegaraan dalam Perspektif Internasional*, dalam Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Acta Civicus Vol. 1, No. 1, Oktober 2007.

Zed, M. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

PENINGKATAN KEAKTIFAN DAN HASIL BELAJAR PPKN MELALUI METODE PROBLEM BASED LEARNING (PBL) BAGI PESERTA DIDIK KELAS X IPS1 SEMESTER 1 SMAN 1 SUMBERLAWANG TAHUN PELAJARAN 2016/2017 *(Sebuah Tinjauan Ilmiah)*

Mujiyono
Pasca Sarjana Ppkn UNS, Surakarta
Hot.Ono.17@Gmail.com

ABSTRAK

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk Peningkatan Keaktifan Dan Hasil Belajar PPKn Melalui Metode Problem Based Learning (PBL) Bagi Peserta Didik Kelas X IPS1 Semester 1 SMAN 1 Sumberlawang Tahun Pelajaran 2016/2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa Terdapat peningkatan keaktifan dan hasil belajar PPKn dapat dilakukan melalui metode problem based learning (PBL) bagi peserta di dikkelas X IPS1 Semester 1 SMAN 1 Sumberlawang Tahun Pelajaran 2016/2017 yaitu. Peningkatan kinerja guru Antara Siklus I dan Siklus II meningkat dari rata-rata 79,4 menjadi 85,6 pada akhir Siklus II meningkat 6,2. Sikap sosial mengalami peningkatan kualitasnya dari akhir Siklus I ke akhir Siklus II, untuk katagori predikat cukup (C) mengalami penurunan dari 3 peserta didik menjadi tidak ada, untuk katagoti baik (B) mengalami peningkatan dari 29 peserta didik menjadi 32 peserta didik, meningkat 3 point. Peningkatan Sikap spiritual dari akhir Siklus I yang berkatagori predikat C terdapat 1 peserta didik, menjadi tidak ada yang predikat C pada akhir Siklus II, sedangkan untuk predikan B pada akhir Siklus I berjumlah 31 peserta didk menjadi 32 peserta didik , meningkat 1 point. Peningkatan kompetensi keterampilan pada akhir Siklus I rata-rata 81,1 menjadi 86,5 pada akhir Siklus II meningkat sebesar 5,4 poin. Mengalami peningkatan keaktifan peserta didik dari akhir Siklus I mencapai rata-rata 81,1 menjadi 86,5 pada akhir Siklus II, mengingkat 5,4 poin. Peningkatan rata-rata hasil belajar pada akhir Siklus I = 80,3, menjadi 84,6 pada akhir Siklus II, naik 4,3 poin

Kata Kunci : *Keaktifan, Hasil Belajar PPKn,Metode PBL*

PENDAHULUHAN

Pada kenyataannya, proses pembelajaran yang selama ini terjadi, khususnya pada pelajaran PPKn yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sumberlawang yang dilaksanakan oleh peneliti hanya ceramah, monoton dan sangat mungkin akan menghadirkan kebosanan bagi para peserta didik, dari dokumen arsip diketahui bahwahasil ulangan harian yang dilaksanakan masih terdapat 11 peserta didik yang belum tuntas dari jumlah seluruh siswa yaitu 32 peserta didik. Ini berarti masih

terdapat 34,4% peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar yang telah ditetapkan yaitu KKM 75. Hanya 65,6 % atau 21 peserta didik saja yang berhasil mencapai KKM.

Salah satu dari metode tersebut adalah "Metode Problem Based Learning (PBL) atau dengan istilah bahasa indonesia adalah proses pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran ini sekiranya akan menggairahkan peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran, karena peserta didik terdorang untuk mengatasi persoalan yang dihadapi baik secara sendiri maupun kelompok. Ketika pesrta didik aktif dalam proses pembelajaran diharapkan mampu meraih hasil belajar yang sangat memuaskan.

Agar lebih fokus dalam penelitian ini maka ada pembatasan masalah sebagai berikut;

1. Keaktifan peserta didik masih rendah
2. Subyek penelitian ini adalah peserta didik kelas X IPS.1
3. Kajian materi hanya ditekankan pada upaya peningkatan keaktifan dan hasil belajar PPKn pada kelas tersebut
4. Metode yang di gunakan adalah Problem BASED LEARNING (PBL) pembelajaran berbasis masalah

Berdasakan identifikasi masalah dan pembatasan masalah tersebut maka dapat dirumuskan "Apakah Peningkatan Keaktifan Dan Hasil Belajar PPKndapat dilakukan Melalui Metode Problem Based Learning (PBL) Bagi Peserta Didik Kelas X IPS1 Semester 1 SMAN 1 Sumberlawang Tahun Pelajaran 2016/2017

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk Peningkatan Keaktifan Dan Hasil Belajar Ppkn Melalui Metode Problem Based Learning (PBL) Bagi Peserta Didik Kelas X IPS1 Semester 1 SMAN 1 Sumberlawang Tahun Pelajaran 2016/2017.

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN

1. Pengertian Keaktifan dalam pembelajaran

Keaktifan berasal dari kata aktif yang artinya giat bekerja, giat berusaha. Sedangkan arti kata keaktifan adalah kesibukan atau kegiatan (Kamus Besar Bahasa

Indonesia Edisi Ketiga, 2002). Keaktifan belajar ditandai oleh adanya keterlibatan secara optimal, baik intelektual, emosional, dan fisik jika dibutuhkan (Aunurrahman, 2012).

Keaktifan siswa dalam belajar adalah kegiatan yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran dengan mengaktifkan aspek jasmani maupun aspek rohaninya dan harus dipahami serta dikembangkan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yaitu adanya keterlibatan pada aspek intelektual, emosional, dan fisik. Keaktifan belajar peserta didik tersebut akan mempengaruhi hasil belajar yang akan dicapai.

2. Indikator keaktifan belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a) merespon motivasi yang diberikan oleh guru, b) membaca atau memahami masalah yang terdapat dalam lembar kerja siswa (LKS), c) menyelesaikan masalah atau menemukan jawaban dan cara untuk menjawab, d) mengemukakan pendapat, e) berdiskusi atau bertanya antar peserta didik maupun guru, f) mempresentasikan hasil kerja kelompok, g) merangkum materi yang telah didiskusikan (Harahap, 2011).

Selain itu indikator keaktifan siswa dapat dilihat dari: a) perhatian siswa terhadap penjelasan guru, b) kerjasamanya dalam kelompok, c) kemampuan siswa mengemukakan pendapat dalam kelompok ahli, d) kemampuan siswa mengemukakan pendapat dalam kelompok asal,e) memberi kesempatan berpendapat kepada

3. Jenis jenis Keaktifan dapat dijelaskan sebagai berikut;

a. Keaktifan panca indra b. Keaktifan akal c.Keaktifan Ingatan d.Keatifan Emosional

4. Pengertian belajar dan pembelajaran

Suprayeti mengatakan bahwa Belajar secara umum dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku akibat interaksi individu dengan lingkungan (Suprayekti : 2004: 2). Belajar merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi, ketrampilan dan sikap. Belajar juga dapat dipahami sebagai suatu

proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang relatif menetap.

Sedangkan Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada lingkungan belajar .Interaksi peserta didik dengan lingkungan belajar didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran (Saidihardjo : 2004 : 13). Pembelajaran merupakan proses membuat orang belajar dengan merekayasa lingkungan untuk memudahkan orang belajar. Kegiatan pembelajaran berupaya merumuskan cara terbaik agar individu dapat belajar dengan mudah. Pendidik bukan hanya berfungsi memberikan materi saja melainkan memanfaatkan segala potensi lingkungan belajar (media, sumber informasi belajar, dan lainnya) bagi pencapaian tujuan belajar yang diharapkan. Bruce weil (Wina sanjaya : 2008: 216-217) mengemukakan tiga prinsip penting dalam proses pembelajaran; pertama proses pembelajaran adalah membentuk kreasi lingkungan yang dapat membentuk atau mengubah struktur kognitif siswa. Kedua berhubungan dengan tipe-tipe pengetahuan yang dipelajari, yaitu pengetahuan : fisis, sosial dan logika. Ketiga, dalam proses pembelajaran harus melibatkan peran lingkungan sosial.

5. Pengertian Hasil belajar

Hasil adalah suatu istilah yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dicapai seseorang setelah melakukan suatu usaha. Bila dikaitkan dengan belajar berarti hasil menunjuk sesuatu yang dicapai oleh seseorang yang belajar dalam selang waktu tertentu. Hasil belajar termasuk dalam kelompok atribut kognitif yang "respons" hasil pengukurannya tergolong pendapat (judgment), yaitu respon yang dapat dinyatakan benar atau salah (Suryabrata, 2000: 19).

Soedijarto (1993: 49) menyatakan bahwa hasil belajar adalah tingkat penguasaan yang dicapai oleh pelajar dalam mengikuti program belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan.

Briggs (1979: 149) menyatakan bahwa, hasil belajar adalah seluruh kecakap-an dan segala hal yang diperoleh melalui proses belajar mengajar di sekolah yang dinyatakan dengan angka dan diukur dengan menggunakan tes hasil belajar.

Sedang menurut Sudjana (2004: 22) hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajar. Sudjana (1991: 22) mengemukakan bahwa, dalam sistem pendidikan nasio-nal rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi tiga ranah, yaitu: ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotoris.

Di samping itu hasil belajar dapat dioperasionalisasikan dalam bentuk indikator-indikator berupa nilai rapor, indeks prestasi studi, angka kelulusan, dan predikat keberhasilan (Azwar, 1996: 44).

Dalam penelitian ini, hasil belajar diartikan sebagai hasil tes prestasi terbatas pada ranah kognitif saja. Menurut Benjamin S. Bloom, ranah kognitif terdiri dari: pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta nilai-nilai dapat diukur tinggi rendahnya dengan jalan memberi tugas-tugas kepada siswa yang relevan dengan sasaran yang diinginkan. Hasil belajar yang diperoleh siswa dalam suatu mata pelajaran dinyatakan dalam bentuk nilai yang disebut hasil belajar.

6. Pengertian Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL)

Menurut Sudarman (2005: 69) mendefinisikan Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi kuliah atau materi pelajaran.

Problem based learning atau strategi pembelajaran berbasis masalah (SPBM) memiliki tiga ciri utama yaitu : pertama SPBM merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran ini artinya dalam implementasi SPBM ada sejumlah aktivitas yang haris dilakukan siswa. Kedua aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah karena dalam SPBM menempatkan masalah sebagai kunci dari proses pembelajaran. Ketiga pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berfikir ilmiah (Wina Sanjaya : 2008 : 214).

Arends (1997: 156) menyatakan bahwa Problem Based Learning (PBL)

…use in promoting higher-level thinking in problem oriented situations, including learning how to learn. Menurut Arends, PBL merupakan salah satu model pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan level berpikir tinggi yangdiorientasikan pada masalah, termasuk belajar bagaimana belajar. Proses berpikirdalam pembelajaran PBL ini diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Masalah yang dihadapkan pada siswa berupa konsep materi pembelajaran, sehingga denganadanya permasalah tersebut maka dapat merangsang proses berpikir siswa yanglebih tinggi dalam memecahkan permasalahan.Menurut Nurhadi (2004: 109), PBL adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untukbelajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah sertauntuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran.Hal ini sesuai dengan pendapat Hong (2007: 4) yang menyatakan bahwa dalampembelajaran PBL guru memberikan permasalahan dari dunia nyata kepada siswauntuk dipecahkan bersama.

KERANGKA BERPIKIR

Kondisi awal sebelum ada penelitian ini, dalam proses pembelajaran masih bersifat satu arah di mana guru berperan sangat sentral dalam proses pembelajarnnya. Keaktifan peserta didik belum terbangun dengan baik. Hasil belajrnya pun belum mencapai KKM secara klasikal.

Kondisi tersebut harus segera untuk di atasi dengan cara mengubah model pembelajaran dengan Problem based Learning., dimana model pembelajaran ini diharapkan mampu meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran, situasi belajar menjadi lebih hidup dan bermakna

Akhir dari proses pembelajaran dengan metode Problem Based Learning diharapkan kualitas pembelajaran menjadi lebih meningkat , guru lebih bervariasi dalam mengajar, keaktifan siswa dalam proses pembelajaran lebih meningkat dan hasil belajar siswa juga meningkat.

Adapun kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut;

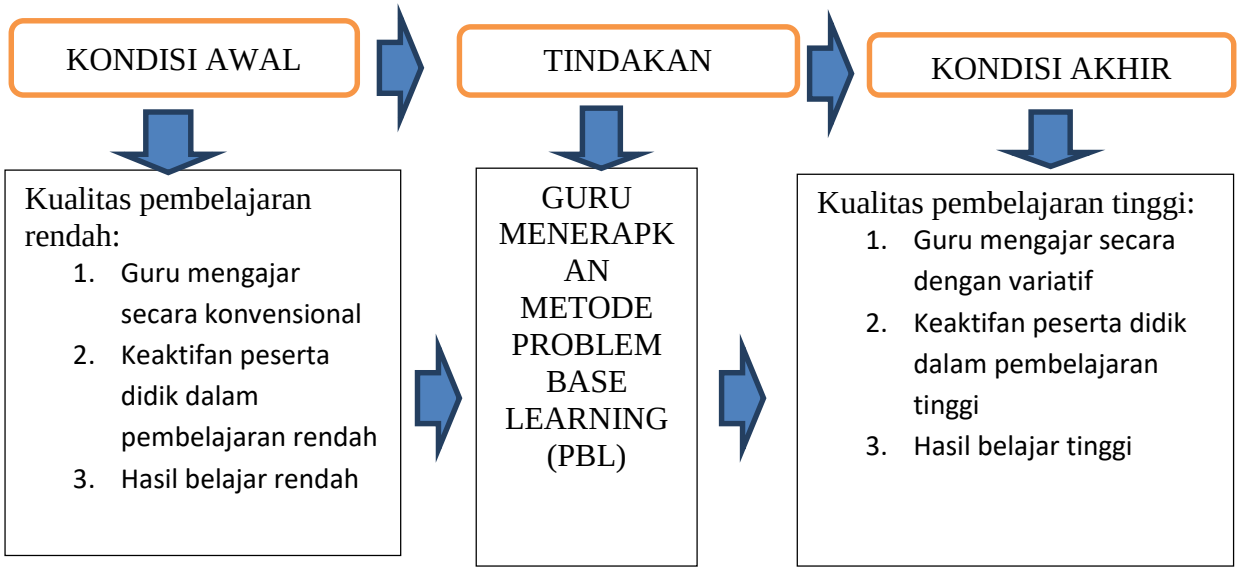

Hipotesis Tindakan

Berdasarkan teori dan kerangka berpikir tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis tindakan nya adalah "Peningkatan Keaktifan Dan Hasil Belajar PPKn dapat dilakukan Melalui Metode Problem Based Learning (Pbl) Bagi Peserta Didik Kelas X IPS1 Semester 1 SMAN 1 Sumberlawang Tahun Pelajaran 2016/2017.

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi pelaksanaan penelitian ini adalah di Kelas X IPS.1 SMA Negeri 1 Sumberlawang. Hal tersebut dengan pertimbangan bahwa, peneliti adalah guru PPKn di kelas tersebut sehingga mengetahui secara obyektif kondisi yang ada dan memudahkan peneliti untuk memperoleh data.

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada semester satu tahun pelajaran 2016/2017 yaitu dimulai pada bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016, yang di mulai dari analisis dan refleksi awal, pembuatan proposal dan pengajuan suarat ijin.Pelaksanaan siklus I dan siklus II sebagai berikut;

a. Siklus I : Pertemuan pertama hari Jum'at, 12 Agustus 2016
: Pertemuan kedua hari Jum'at, 19 Agustus 2016
b. Siklus II : Pertemuan pertama, hari Jum'at, 2 September 2016

: Pertemuan kedua hari Jum'at, 9 September 2016

Subjek dalam penelitian ini adalah Siswa Kelas X IPS1 dengan jumlah siswa 32, yang terdiri dari laki-laki 10 dan perempuan 32.Sedang Objek dari penelitian ini adalah, Keaktifan dan hasil belajar peserta didik sebagai objek terikatnya dan objek bebasnya adalah metode Problem Based Learning

Adapun prosedur penelitian ini, seperti yang dikatakan oleh Suharsimi Arikunto (2010 : 16) dalam pelaksanaan PTK ini, mekanisme kerja diwujudkan dalam bentuk siklus yang tercakup empat yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi.

Dalam penelitian ini melalui dua siklus yaitu siklus I dan siklus II, sedang setiap siklusnya terdiri dari 2 pertemuan. Setiap siklus meliputi tahapan kegiatan: perencanaan tindakan (*planing*), pelaksanaan tindakan (*acting*), pengamatan pelaksanaan (*observing*), dan kemudian dilakukan refleksi (*reflecting*). Hasil refleksi akan dipergunakan untuk perbaikan pada pelaksanaan siklus berikutnya.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data utama dan data pendukung . Sumber data utama adalah peserta didik kelas X IPS 1 SMA Negeri 1 Sumberlawang semester 1 tahun pelajaran 2016/2017 dan data utama diperoleh dari daftar nilai peserta didik serta catatan harian peserta didik , sedangkan data pendukung berasal dari guru mitra kolaborasi yang menjadi observer

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitiannya adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). "Penelitian Tindakan Kelas adalah suatu bentuk penelitian yang dilaksanakan oleh para praktisi untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu mengelola pelaksanaan kegiatan belajar mengajar" (Agung Purwadi, 2000: 1). Sedangkan Syukur (2001:12) menyatakan bahwa "Penelitian Tindakan kelas adalah jembatan antara teori dengan praktik yang secara kolaboratif pendidik dapat melakukan penelitian terhadap proses dan produk pembelajaran secara reflektif di dalam kelas".

Sejalan dengan pendapat di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan bentuk penelitian yang didesain untuk

memecahkan masalah-masalah yang dihadapi para praktisi terutama oleh para guru dalam melaksanakan tugas pokoknya yakni keterlibatannya secara langsung dalam kegiatan pembelajaran di kelas, di mana dengan penelitian tersebut akan diperoleh hasil yang sangat diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam peningkatan hasil belajar siswa di sekolah.

Sedangkan variabel yang di gunakan adalah seperti yang dikatakn oleh Djarwanto PS (1998:3) menyatakan bahwa "Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai dan minimal dapat dibedakan dalam dua atribut". Selanjutnya definisi tentang variabel juga disampaikan oleh Suharsimi Arikunto (2010:93), beliau menyatakan bahwa "Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel penyebab yang sering diberi kode (X), sedangkan variabel terikat adalah variabel akibat atau variabel yang dipengaruhi atau variabel tergantung yang sering diberi kode (Y)".

Sebagai variabel bebas dalam penelitian ini adalah penerapan atau pelaksanaan metode problem based Learning. Sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar PPKn. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu jenis penelitian yang menyajikan deskripsi data berupa angka yang menunjukkan peningkatan keaktifan dan hasil belajar PPKn dengan menerapkan metode Problem based learning terhadap peserta didik kelas X IPS1 SMA Negeri 1 Sumberlawang pada semester satu tahun pelajaran 2016/2017.

Data yang diperlukan dari hasil penelitian tindakan kelas (PTK) ini dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi dan dokumentasi.

Sutrisno Hadi (1982:155) menjelaskan bahwa "Observasi adalah pengamatan tingkah laku suatu objek dalam waktu, ruang, dan keadaan tertentu". Sedangkan Nana Sudjana (1989:109) menyatakan bahwa "Observasi adalah alat pengumpul adata untuk mengukur tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan".

Sesuai dengan pengertian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa observasi adalah tindakan pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap tingkah laku suatu objek dalam waktu, ruang dan keadaan tertentu.

Adapun data yang dikumpulkan melalui penggunaan metode observasi ini adalah: aktivitas peserta didik kelas X IPS1. SMA Negeri 1 Sumberlawang semester satu tahun pelajaran 2016/2017 dalam melaksanakan penerapan metode problem based learning dalam pembelajaran PPKn yang dilakukan terus menerus dalam dua siklus penelitian.

Winarno Surakhmad (1994:66) menjelaskan bahwa "Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan klasifikasi bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian baik yang bersumber dari dokumen maupun buku-buku laporan, koran, majalah, dan buku referensi". Sedangkan Suharsimi Arikunto (1996:149) menyatakan bahwa: "Dokumentasi penelitan dilakukan terhadap benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan catatan harian".

Adapun data penelitian yang dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi ini adalah: hasil belajar PPKnpesrta didik kelas X IPS1. SMA Negeri 1 Sumberlawang pada semester 1 tahun pelajaran 2016/2017, yang diperoleh dari dokumentasi hasil tes selama pelaksanaan penerapan metode problem based learning.

Teknik Analisis Data

Data aktivitas peserta didik kelas X IPS.1 SMA Negeri 1 Sumberlawang semester satu tahun pelajaran 2016/2017 yang dikumpulkan melalui observasi selama pelaksanaan penerapan metode problem based learning dalam pembelajajaran PPKn, dilakukan dengan memberikan kriteria tertentu

Data hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan peserta didik kelas X IPS 1 SMA Negeri 1 Sumberlawang semester satu tahun pelajaran 2016/2017 yang diperoleh dengan metode dokumnetasi hasil tes diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Guru mencatat hasil belajar siswa dari hasil tes mata pelajaran PPKn pada setiap pelaksanaan siklus penelitian;
b. Guru menganalisis dokumentasi hasil belajar PPKn kedua siklus penelitian untuk menguji hipotesis.

Pengujian Hipotesis Penelitian

Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan rumus mean hasil belajar dari Zainal Arifin (1988:92) sebagai berikut:

$$Mean(M) = \frac{\Sigma X}{n}$$

Keterangan:

M = Mean atau rata-rata hasil belajar PPKn

Σx = Jumlah total hasil belajar dari keseluruhan sampel penelitian

n= Jumlah sampel penelitian

Berdasar pada hasil perhitungan yang didasarkan pada rumus tersebut di atas, kemudian diambil kesimpulan sebagai berikut:

Apabila hasil perhitungan telah menunjukkan peningkatan mean hasil belajar PPKn, maka hipotesis yang berbunyi "Peningkatan Keaktifan Dan Hasil Belajar PPKn dapat dilakukan Melalui Metode Problem Based Learning (Pbl) Bagi Peserta Didik Kelas X IPS.1 Semester 1 SMAN 1 Sumberlawang Tahun Pelajaran 2016/2017" kebenarannya telah terbukti.

Apabila hasil perhitungan tidak menunjukkan peningkatan mean hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan, maka hipotesis yang berbunyi "Peningkatan Keaktifan Dan Hasil Belajar PPKn dapat dilakukan Melalui Metode Problem Based Learning (Pbl) Bagi Peserta Didik Kelas X IPS.1 Semester 1 SMAN 1 Sumberlawang Tahun Pelajaran 2016/2017" kebenarannya tidak terbukti.

Cara Pengambilan Kesimpulan

Untuk mengukur pencapaian tujuan penelitian , maka indikator kerja penelitian sebagai berikut ;

a.Mean (nilai rata-rata siswa) telah mencapai ketuntasan untuk KKM 75 b.Ada 90% anak (siswa) telah mencapai nilai yang yang dipersyaratkan dalam KKM yaitu 75 c.Terdapat 80 % siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran.

Berdasarkan indikator kinerja maka pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini adalah jika mean nilai peserta didik minimal 75 dan 90% peserta didiksudah mencapai nilai 75, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian ini berhasil. Sedangkan indikator kinerja aktivitas peserta didik sebesar 80 %

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Kinerja Guru

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh mitra kolaborasi dipeoleh data tentang kinerja guru dalam proses pembelajaran dengan metode Problem Based Learning diperoleh data sebagai berikut;

Tabel 1. Peningkatan Kinerja Guru Antar Siklus

No	Pra Siklus	Siklus I	Siklus II	Peningkatan
1	Rata-rata Kinerja Guru pra Siklus 75	Rata-rata Kinerja Guru akhir Siklus I 79,4	Rata-rata Kinerja Guru akgir Siklus II 85,6	Antara Siklus I dan Siklus II meningkat dari rata-rata 79,4 menjadi 85,6 pada akhir Siklus II berarti meningkat 6,2

Peningkatan Sikap Sosial Peserta Didik

Untuk data sikap sosial diperoleh informasi sebagai berikut

Tabel 2. Peningkatan Sikap Sosial Peserta Didik

No	**Uraian**	**Pra Siklus**	**Siklus I**	**Siklus II**	**Peningkatan**
1	Sikap Sosial Peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung	Sikap Sosial Peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung Katagori predikat C = 7 peserta didik setara dengan 21,9% Katagori B = 25 peserta didik setara dengan 78,1%	Sikap Sosial Peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung pada akhir Siklus I Katagori predikat C = 3 peserta didik setara dengan 9,4 % Katagori B = 29 peserta didik setara dengan 90,6 %	Sikap Sosial Peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung pada akhir Siklus I Katagori predikat C tidak ada Katagori B = 32 peserta didik setara dengan 100 %	Sikap sosial mengalami peningkatan kualitasnya dari akhir Siklus I ke akhir Siklus II, untuk katagori predikat cukup (C) mengalami penurunan dari 3 peserta didik menjadi tidak ada, untuk katagoti baik (B) mengalami peningkatan dari 29 peserta didik menjadi 32 peserta didik, berarti meningkat 3 point

Peningkatan Sikap Spiritual Paserta Didik

Sikap spiritual peserta didik berdasarkan observasi yang dilakukan, maka diperoleh data sebagai berikut;

Tabel 3. Peningkatan Sikap Spiritual Peserta Didik

No	Uraian	Pra Siklus	Siklus I	Siklus II	Peningkatan
1	Sikap spiritual peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung	Sikap spiritual peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung, rata-rata berkatagori predikat cukup (C) sebanyak 4 peserta didik setara dengan 12,5%, sedangkan yang katagori predikat baik (B) sebanyak 28 peserta didik setara dengan 87,5%	Sikap spiritual peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung pada akhir Siklus I rata-rata berkatagori predikat cukup (C) sebanyak 1 peserta didik setara dengan 3,1 %, sedangkan yang berkatagori predikat baik sebanyak 31 peserta didik setara dengan 96,9%	Sikap spiritual peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung pada akhir Siklus II rata-rata berkatagori predikat cukup (C) tidak ada sedangkan yang berkatagori predikat baik sebanyak 32 peserta didik setara dengan 100 %	Peningkatan Sikap spiritual dari akhir Siklus I yang berkatagori predikat C terdapat 1 peserta didik, menjadi tidak ada yang predikat C pada akhir Siklus II, sedangkan untuk predikan B pada akhir Siklus I berjumlah 31 peserta didk menjadi 32 peserta didik , berarti meningkat 1 point

Peningkatan Kompetensi Keterampilan Peserta Didik

Data hasil observasi kompetensi keterampilan selama proses perlangsungnya pembelajaran dapat di sajikaan dalam tabel sebagai berikut;

Tabel 4. Peningkatan Keterampilan Peserta Didik

No	Uraian	Pra Siklus	Siklus I	Siklus II	Peningkatan
1	Kompetensi keterampilan peserta didik selama proses	Kompetensi keterampilan peserta didik selama proses	Kompetensi keterampilan peserta didik selama proses	Kompetensi keterampilan peserta didik selama proses	Peningkatan kompetensi keterampilan pada akhir Siklus I rata-

	pembelajran berlangsung	pembelajran berlangsung dengan rata-rata penilian 73 dengan katagori predikat cukup (C)	pembelajran berlangsung pada akhir Siklus I dengan rata-rata penilian 81,1 dengan katagori predikat baik (B)	pembelajran berlangsung pada akhir Siklus II dengan rata-rata penilian 86,5 dengan katagori predikat baik (B)	rata 81,1 menjadi 86,5 pada akhir Siklus II berarti mengalami peningkatan sebesar 5,4

Peningkatan Keaktifan Peserta Didik

Peningkatan keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran selalu mengalami peningkatan yang bagus, adapun data peningkatan keaktifan dapat tersaji dalam tabel berikut;

Tabel 5. Peningkatan Keaktifan Peserta Didik

NO	**Uraian**	**Pra Siklus**	**Siklus I**	**Siklus II**	**Peningkatan**
1	Keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran yang dilakukan	Keaktifan peserta didik dalam pembelajaran rata-rata yang di capai 73 dengan katagori predikat cukup (C)	Keaktifan peserta didik dalam pembelajaran pada akhir Siklus I rata-rata yang di capai 81,1 dengan katagori predikat Baik (B)	Keaktifan peserta didik dalam pembelajaran pada akhir Siklus II rata-rata yang di capai 86,5 dengan katagori predikat Baik (B)	Mengalami peningkatan dari akhir Siklus I mencapai rata-rata 81,1 menjadi 86,5 pada akhir Siklus II

Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik

Setelah berakhirnya Siklus I dan Siklus II, untuk hasil belajar dari peserta didik juga menunjukkan gejala peningkatan yang bagus, adapun data dapat disjikan dalam tabel sebagai berikut;

Tabel .6. Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik

No	Uraian	Hasil Belajar Peserta Didik			Keterangan
		Pra Siklus	Siklus I	Siklus II	
1	Nilai tertinggi	85	90	100	Peningkatan hasil belajar pada akhir Siklus I , untuk nilai tertinggi dari 90 menjadi 100 pada akhir Siklus II, berarti naik 10 poin
2	Nilai terendah	65	65	73	Peningkatan hasil belajar pada akhir Siklus I , untuk nilai terendah dari 65 menjadi 73 pada akhir Siklus II, berarti naik 8 poin
3	Rata-rata	75	80,3	84,6	Peningkatan rata-rata hasil belajar pada akhir Siklus I = 80,3, menjadi 84,6 pada akhir Siklus II, berarti naik 4,3 poin
4	Yang sudah tuntas	21 peserta didik	28 peserta didik	31 peserta didik	Peningkatan hasil belajar yang telah tuntas pada akhir Siklus I terdapat 28 peserta didik, menjadi 31 peserta didik berarti menunjukkan kenaikan 3 poin
5	Yang tidak tuntas	11 peserta didik	4 peserta didik	1 peserta didik	Sedangkan yang tidak tuntas mengalami penurunan dari 4 peserta didik pada akhir Siklus I menjadi 1 peserta didik pada akhir Siklus II, berarti menurun 3 poin

KESIMPULAN

Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa Terdapat peningkatan keaktifan dan hasil belajar PPKn dapat dilakukan melalui metode problem based learning (PBL) bagi peserta didik kelas X IPS1 Semester 1 SMAN 1 Sumberlawang Tahun Pelajaran 2016/2017 yaitu;

(1). Peningkatan kinerja guru Antara Siklus I dan Siklus II meningkat dari rata-rata 79,4 menjadi 85,6 pada akhir Siklus II berarti meningkat 6,2 (2). Sikap sosial mengalami peningkatan kualitasnya dari akhir Siklus I ke akhir Siklus II, untuk katagori predikat cukup (C) mengalami penurunan dari 3 peserta didik menjadi

tidak ada, untuk katagoti baik (B) mengalami peningkatan dari 29 peserta didik menjadi 32 peserta didik, berarti meningkat 3 point (3). Peningkatan Sikap spiritual dari akhir Siklus I yang berkatagori predikat C terdapat 1 peserta didik, menjadi tidak ada yang predikat C pada akhir Siklus II, sedangkan untuk predikan B pada akhir Siklus I berjumlah 31 peserta didk menjadi 32 peserta didik , berarti meningkat 1 point (4). Peningkatan kompetensi keterampilan pada akhir Siklus I rata-rata 81,1 menjadi 86,5 pada akhir Siklus II berarti meningkat sebesar 5,4 poin (5). Mengalami peningkatan keaktifan peserta didik dari akhir Siklus I mencapai rata-rata 81,1 menjadi 86,5 pada akhir Siklus II, berarti mengingkat 5,4 poin (6). Peningkatan rata-rata hasil belajar pada akhir Siklus I = 80,3, menjadi 84,6 pada akhir Siklus II, berarti naik 4,3 poin

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

Untuk Guru

- **a.** Secara konsisten dan simultan menyusun program pembelajaran PPKn yang menerapkan metode problem based learning sesuai karakteristik standar kompetensinya;
- **b.** Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk turut serta terlibat dalam pembuatan skenario pembelajaran PPKn;
- **c.** Memberikan motivasi kepada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar;
- **d.** Berkolaborasi dengan guru lainnya baik yang satu mata pelajaran maupun yang berbeda mata pelajaran untuk bersama-sama meningkatkan pemberdayaan penerapan metode problem based learning dalam kegiatan belajar mengajar;
- **e.** Berusaha melatih dan mengembangkan kompetensi diri untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih menarik, berbobot dan berkualitas.

Untuk Peserta didik

(1). Agar membiasakan diri untuk gemar membaca dan belajar dengan melakukan analisis. (2). Berpartisipasi aktif secara konsisten dalam setiap pembelajaran PPKn atau mata pelajaran lainnya. (3).Bertanya kepada teman atau guru apabila menemui kesulitan memahami materi pelajaran PPKn atau mata pelajaran lainnya (4). Membagi pengetahuan dan pemahamannya kepada teman yang lain apabila telah mampu menguasai materi pelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

Agung Purwadi 200. Pelatihan dan Pengembangan Konsep dasar. Makalah. Jakarta.

Arends, Richard I. 1997. *Classroom Instruction and Management*. USA: theMc.Graw-Hill Companies.

Aunurrahman.(2012). *Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta

Azwar, Saipuddin. 2001. *Reliabilitas dan Validitas*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Briggs, Leslie J. 1979. *Instructional Design: Principles and Aplication*. Engelwood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall,Inc.

Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi ketiga. Jakarta . Balai Pustaka

Djarwanto PS dan Subagyo Pangestu. 1998. Statistik Induktif , Jakarta.BPFE

Saidihardjo, (2004) *Pengembangan Kurikulum Ilmu Pengetahuan Sosial*, Yogyakarta UNY

Sudarman, 2005."Problem Based Learning Suatu Model Pembelajaran Untuk Mengembangkan dan Meningkatkan Kemampuan Memecahkan Masalah".*Artikel Ilmiah* FKIP Universitas Mulawarman Samarinda

Sudjana, H.D., 2005. *Strategi Pembelajaran Pendidikan* Luar Sekolah, Falah Production, Bandung.

Sudijarto. 1993. *Menuju Pendidikan Nasional yang Relevan dan Bermutu*. Jakarta: Balai Pustaka

Suprayekti, (2004) *Interaksi Belajar Mengajar*, Jakarta, Depdiknas

Suryabrata, Sumadi, 2004. *Psikologi Pendidikan, Cetakan Keduabelas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suharsimi Arikunto,1996, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sutrisno Hadi, 1982, *Metodelogi Reseach*, Yogyakarta: Universita Gajah Mada.

Syukur 2001. *Metode Penelitian dan Penyajian Data Pendidikan*, Semarang: Medya Wiyata.

Wina Sanjaya, (2006) *Strategi Pembelajaran*, Jakarta, Kencana Prenada Group

----------, (2008) *Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta, Kencana Prenada Group

Winarno Surakhmad 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah dasar dan Metode, Teknik*. Bandung. Tarsito

Zainal Arifin 1988. *Evaluasi Instruksional Prinsip-Teknik- Prosedural*. Bandung. Remaja Rosdak Karya.

PEMANFAATAN FACEBOOK DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Fitra Waluyandi
Pasca Sarjana UNS
fitrawaluyandi08@gmail.com

ABSTRAK

Facebook merupakan salah satu media sosial yang paling populer di dunia. Di Indonesia Facebook telah dimanfaatkan dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Dalam dunia pendidikan penulis mencoba menguraikan pemanfaatan Facebook dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Makalah ini merupakan wacana yang dapat diaplikasikan oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan untuk mendidik siswa-siswinya agar dapat mengikuti pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini dengan optimal. Pemanfaatan Facebook dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat dilakukan dengan berbagai sarana yang variatif yang telah disediakan oleh Facebook sendiri sehingga guru tidak perlu bingung membuat aplikasi lainnya. Hal ini tentu memudahkan guru dalam menggunakan Facebook untuk pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Metode penulisan makalah ini adalah deskripsi yang diawali dengan pendahuluan yang memberikan gambaran awal tentang sosial media terutama Facebook, Tinjauan teori merupakan kajian terhadap media sosial khusunya Facebook serta di bagian akhir dijelaskan bagaimana Facebook dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Facebook sebagai salah satu media sosial yang paling populer digunakan di dunia termasuk di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan karena sesungguhnya penelitian terdahulu telah banyak mengupas masalah ini namun masih sedikit hasil penelitian tersebut diaplikasikan dalam prose pembelajaran di kelas. Pemanfaatan Facebook ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai fitur yang tersedia dalam Facebook, yaitu: (1) pendaftaran akun (2) *posting*, (3) *sharing*, (4) *chating*, (5) membuat grup Facebook (6) *mesengger*, (7) Catatan (*note*), (8) *Quiz.*Dengan adanya tulisan ini semoga memberi manfaat kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan dan juga kepada para siswa yang akan mengikuti pembelajaran dengan Facebook ini.

Kata kunci: Facebook, Media Sosial, Pembelajaran, Pendidikan Kewarganegaraan

PENDAHULUAN

Media sosial seperti yang dijelaskan oleh Kaplan dan Haenlein adalah sebuah grup aplikasi internet yang dibangun diatas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 yang memungkinkan penciptaan dan pertukanran muatan atau konten pengguna.

A group of internet applications built on the ideological and technological faoundations of web 2.0 that allow the creation and exchange of user-generated content." (Kaplan dan Haenlaein, 2010)

Saat ini media sosial merupakan salah satu kekuatan besar yang diperhitungkan dalam mempengaruhi cara pandang dan melakukan perubahan. Perkembangan media sosial sangat pesat bahkan mampu menggeser kekuatan media massa konvensional seperti surat kabar dan televisi. Pada Januari 2009 saja pendaftar Facebook sebagai salah satu media sosial telah mencapai lebih dari 175 juta pengguna aktif. Jumlah tersebut separoh lebih penduduk Indoenesia yang berjumlah 230 jiwa

As of January 2009, the online social networking application Facebook registered more than 175 million active users (Kaplan and Haenlein, 2010)

Pada saat yang sama setiap menit 10 jam konten video telah diunggah ke Youtube dan lebih dari 3 juta gambar atau foto telah dapat diakses memlalui Flickr. Berdasarkan rilis Forester Research sebanyak 75% peselancar internet menggunakan Media Sosial pada kuartal kedua tahun 2008 dngan bergabung sosial media, memabaca blog, atau review situs belanja online. Bahkan menurut penelitian Kaplan dan Haenlein pertumbuhan pengguna internet ini tidak terbatas pada remaja, pengguna internet yang berusia 35 – 44 tahun pun mengalami peningkatan.

Makalah ini mencoba untuk mengkaji pemanfaatan Facebook untuk pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Facebook merupakan salah satu aplikasi media sosial yang paling populer diantara media sosial yang ada. Media sosial terutama Facebook saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, selain digunakan sebagai sarana komunikasi massa, media sosial Facebook saat ini juga digunakan untuk berbagai kepentingan. Hal ini disampaikan oleh Acar dan Murakami yang dikutip oleh Attouni dan Mustaffa

> *The most popularly used social media like Facebook has been used as a platform for the realization of important goals like safety identification in a disaster, location of displaced-persons, providing support for the disabled*

> *people, attracting volunteer organization, and fundraising among others (Acar & Murakami, 2011 dalam Attouni dan Mustaffa, 2014)*

Berdasarkan pendapat Acar dan Murakami yang dikutip Attouni dan Mustaffa di atas dapat diketahui bahwa Facebook telah digunakan sebagai platform untuk merealisasikan tujuan-tujuan penting seperti identifikasi keselamatan dalam bencana, lokasi hilangnya seseorang, mendukung disable, menarik organisasi relawan dan pengumpulan dana. Namun penggunaan Facebook untuk pembelajaran masih kecil persentasenya, bahkan dari uraian Acar dan Mukarami tidak memasukkan sama sekali pemanfaat Facebook untuk pembelajaran, padahal pengguna Facebook sangat banyak dan digemari berbagai kalangan. Sebuah Survey yang dilakukan dailysocial.id telah mensurvey penggunaan media sosial di Indonesia melaporkan bahwa pada bulan Mei 2017 penggunaan Facebook dibandingkan dengan media sosial lainnya menempati posisi teratas yaitu sebesar 70,94% disusul Line sebesar 50,64%, Whatsapp Group sebesar 27,39% dan Twitter diposisi buncit sebesar 20,2%. Selain banyak penggunanya, Facebook juga memiliki fitur yang mudah dan lengkap seperti posting tulisan, audio, video, fans page, group, percakapan (chating) dll. Hal inilah yang mendorong pengguna lebih senang dan nyaman menggunakan Facebook.

> There are also other online sites such as MySpace and Friedster used for connecting people, but Facebook is regarded as the leading social network of the greatest benefit for students (Golder et al., 2007; Stutzman, 2006 dalam Isidora Miloševic, Dragana Zivkovic, Sanela Arsic, dan Dragan Manasijevic).

Berdasarkan data-data di atas maka dapat dikatakan bahwa penggunaan media sosial terutama Facebook yang sangat besar memberi dampak perubahan pada masyarakat yang sangat besar pula. Pendukung Facebook seperti Munoz dan Towner pada tahun 2009 dalam Isidora Miloševic, Dragana Zivkovic, Sanela Arsic, dan Dragan Manasijevic (2015) menerangkan bawa Facebook dapat memiliki pengaruh pasitif pada kehidupan siswa. Sebagai contoh siswa menggunakan Facebook untuk melakukan kontak dengan siswa lain agar dapat

memecahkan tugas lebih baik, berpartisipasi dalam proyek bersama, dan para guru juga dapat bergabung dengan mengirimkan sebuah link yang relevan bagi siswa untuk pelajaran yang mereka butuhkan untuk dipelajari.

Pengaruh Facebook disadari atau tidak telah memberikan dampak yang besar dalam kehidupan kita bahkan telah dimanfaatkan dalam berbagai bidang termasuk dalam pembelajaran. Pemanfaatan Facebook dalam bidang Humaniora, Seni dan Ilmu Sosial sebagai induk Pendidikan Kewarganegaraan telah disurvey oleh Stefania Manca dan Maria Ranieri pada tahun 2016 dimana pemanfaatan Facebook dalam bidang bidang Humaniora, Seni dan Ilmu Sosial sebanyak 23,99%. Hal ini lebih tinggi daripada bidang Matematika, Komputer dan IPA yaitu serta bidang Profesi dan Ilmu Terapan

Oleh karena itu sudah Facebook sebagai sosial media paling populer dan juga telah dimanfaatkan untuk pembelajaran maka guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan dapat memanfaatkan Facebook untuk pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Makalah ini dibuat untuk menjelaskan mengenai hal-hal yang dapat dilakukan oleh Guru Pendidikan Kewarganegaran dalam memanfaatkan Facebook untuk pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

TINJAUAN TEORI

Facebook pada awalnya dibuat oleh Mark Zukerberg, Dustin Moskovitz dan Chris Hughes untuk meundukung komunikasi di Universitas Harvard, setelah sukses di Universitas Harvard kemudian sistem komunikasi ini dikembangkan dan dibuka untuk publik pada tahun 2006. Facebook setiap hari terus bertambah dan situs ini menjadi situs paling populer di dunia dengan pengguna aktif mencapai lebih dari satu milyar. Pada Desember 2006 pengguna Facebook telah mencapai 12 juta pengguna, kemudian 3 tahun berikutnya yakni pada Desember 2009 pengguna Facebook telah mencapai 350 juta pengguna hingga saat ini pada tahun 2017 lebih dari 1 miliar telah menjadi pengguna Facebook. Hal ini berarti hampir setengah penduduk dunia menggunakan Facebook sehingga telah menempatkan dirinya sebagai jaringan media sosial paling populer saat ini dengan pengguna aktif yang banyak, rata-rata 50% pengguna Facebook memiliki 137 teman.

Manfaat penggunaan media sosial menurut S. Manca, M. Ranieri (2016) diantaraya adalah:

1. dapat meningkatkan motivasi siswa dan keterlibatan siswa
2. merupakan cara pembelajaran kolaborativ dan partisipative
3. membuka kesempatan siswa untuk terbiasa dengan perangkat-perangkat pembelajaran dalam Facebook
4. dapat meningkatkan kualitas pembelajaran
5. dapat digunakan untuk eksperimen perangkat atau cara pembelajaran baru
6. dapat saling bertukar materi dengan siswa secara mudah

Dari keenam manfaat media sosial di atas Facebook dan Tweeter pada umumnya digunakan untuk meningkatkan motivasi siswa dan keterlibatan siswa disamping itu juga dapat digunakan untuk mengeklpoitasi siswa agar akrab dengan Facebook. Untuk lebih jelasnya digambarkan dengan tabel berikut:

Motivations to use Social Media for teaching.

	Twitter (N = 332)	Facebook (N = 911)	LinkedIn (N = 329)	Podcast (N = 358)	Blog-Wiki (N = 1049)	YouTube-Vimeo (N = 1577)	ResearchGate-Academia.edu (N = 826)	SlideShare (N = 599)
To increase students' motivation and involvement	84 (25.3%)	232 (25.5%)	60 (18.2%)	56 (15.6%)	130 (12.4%)	395 (25.0%)	78 (9.4%)	42 (7.0%)
To fulfil ways of collaborative and participative learning	53 (16.0%)	183 (20.1%)	64 (19.5%)	34 (9.5%)	234 (22.3%)	146 (9.3%)	116 (14.0%)	44 (7.3%)
To capitalize on students' familiarity with these tools	47 (14.2%)	205 (22.5%)	35 (10.6%)	20 (5.6%)	71 (6.8%)	99 (6.3%)	32 (3.9%)	15 (2.5%)
To improve the quality of teaching	23 (6.9%)	31 (3.4)	44 (13.4%)	99 (27.7%)	261 (24.9%)	449 (28.5%)	228 (27.6%)	191 (31.9%)
To experiment with new tools	38 (11.4%)	30 (3.3%)	45 (13.7%)	42 (11.7%)	71 (6.8%)	145 (9.2%)	79 (9.6%)	44 (7.3%)
To share content material with students easily	57 (17.2%)	202 (22.1%)	40 (12.2%)	89 (24.9%)	242 (23.1%)	293 (18.6%)	234 (28.3%)	236 (39.4%)
Other motivation	30 (9.0%)	28 (3.1%)	41 (12.5%)	18 (5.0%)	40 (3.8%)	50 (3.2%))	59 (7.1%)	27 (4.5%)

Sumber: S. Manca, M. Ranieri (2016)

Stevania Manca dan Marie Ranieri (2016) merilis survey tentang persepsi pemanfaatan sosial media untuk pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan "Apakah menurutmu media sosial bisa digunakan untuk pembelajaran?" Hasil survey menjelaskan bahwa 38,6% menyatakan bahwa media sosial bisa digunakan untuk pembelajaran sedangkan 37,4% menyatakan sebaliknya dan 24% menyatakan tidak tahu. Kemudian pertanyaan lebih spesifik mengenai media sosial yang dapat digunakan untuk pembelajaran mayoritas mereka menjawab Youtube-Vimeo (19.8%), Blog-Wiki (14%) dan Facebook (12,8%). Pemanfaatan Media Sosial untuk pembelajaran berdasarkan data diatas

ternyata media sosial dapat digunakan untuk pembelajaran sedangkan sebanyak 12,8% diantaranya menggunakan Facebook (dalam kotak merah). Untuk lebih jelas dapat digambarkan dengan tabel di bawah ini.

Perceived usefulness of Social Media.

	N (%)
Twitter	248 (4.3%)
Facebook	748 (12.8%)
LinkedIn	239 (4.1%)
Podcast	271 (4.6%)
Blog-Wiki	817 (14.0%)
YouTube-Vimeo	1156 (19.8%)
ResearchGate-Academia.edu	685 (11.7%)
SlideShare	510 (8.7%)
TOT of positive answers	2249 (38.6%)
TOT of negative answers	2179 (37.4%)
TOT of undecided answers	1405 (24.0%)
TOT of answers	5833 (100.0%)

Sumber: S. Manca, M. Ranieri (2016)

Pemanfaatan Facebook dalam pembelajaran telah dicontohkan oleh Bosch pada tahun 2009 (dalam Isidora Miloševic, Dragana Zivkovic, Sanela Arsic, dan Dragan Manasijevic) dimana Bosch menjelaskan proses pembelajaran dengan memanfaatkan Facebook oleh 50 orang siswa dan 5 profesor di Afrika Selatan. Mereka menggunakan Facebook untuk mencari jawaban tentang materi yang sedang mereka pelajari secara lebih mudah dengan demikian mereka dapat berbagi informasi dan ide tentang materi. Demikian juga para profesor dapat mengirimkan materi-materi penting untuk dipelajari para siswa sehingga mereka dapat mempersiapkan diri untuk memasuki kelas yang lebih baik. Pengalaman-pengalaman dapat ditunjukkan melalui facebook dan diskusi dapat dilakukan dengan berbagai variasi tema bahkan tema-tema yang sangat sensitif atau dapat membuat malu mereka saat bertatap muka. Pengguna Facebook menggunakan Facebook untuk mempublis foto-foto mereka, opini dan pandangan pribadi, bergabung grup yang memiliki kesamaan kepentingan sebagaimana mereka bersentuhan dengan masyarakat yang mereka jarang bertemu karena jarak

sebagaimana diungkapkan oleh Buckman 2005 dalam Isidora Miloševic, Dragana Zivkovic, Sanela Arsic, dan Dragan Manasijevic (2015).

> Facebook users use Facebook to publish their photos, personal opinions and views, join groups with whom they have common interests as well as to keep in touch with people who they do not see often due to the distance (Buckman, 2005 dalam Isidora Miloševic, Dragana Zivkovic, Sanela Arsic, dan Dragan Manasijevic (2015)

PEMANFAATAN FACEBOOK DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Dari berbagai penjelasan di atas Facebook dapat digunakan untuk pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pemanfaatan Facebook ini dapat dilakukan dengan cara:

1. Interaksi dengan pengguna lain

   Untuk melakukan interaksi dengan pengguna Facebook lainnya tentu siswa harus memiliki akun Facebook sendiri. Untuk mendapatkan akun maka siswa harus membuat akun (*create account*). Interaksi dengan pengguna lain dalam hal konteks pemanfaatan Facebook dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini berarti dengan siswa lain atau dengan guru. Interaksi dapat diwujudkan dengan membaca postingan materi dari guru, diskusi dalam group, melakukan percakapan (*chating*) baik dalam grup maupun secara personal melalui pesan (*mesenger*)
2. Mem-*posting* materi

   Menyampaikan materi dalam Facebook dapat dilakukan dengan berbagai cara secara variatif baik berupa tulisan, foto atau pun video. Penyampaian materi dilakukan semenarik mungkin agar siswa memiliki ketertarikan terhadap bahan materi yang akan disampaikan atau didiskusikan. Materi ini dapat dibuat endiri ataupun mencari link/situs yang relevan dengan materi yang akan disampaikan
3. Berbagi (*share*) materi

   Membagikan materi (*share*) hampir sama dengan mem-*posting* materi seperti telah dijelaskan di atas, perbedaanya terletak pada materi yang disampikan, biasanya berbagi (*share*) tidak dibuat oleh guru sendiri akan tetapi materi itu

berasal dari sumber lain seperti situs di internet ataupun *postingan* orang lain di Facebook

4. Membuat grup

   Grup Facebook sangat menarik untuk digunakan. Dengan grup memungkinkan siswa berinteraksi sebagaimana sebuah kelas virtual. Agar diskusi dalam kelas bisa berjalan dinamis maka diperlukan guru yang mampu membangkitkan keingintahuan dan keberanian siswa dalam menyampaikan pendapat

5. Percakapan (*chat*)

   Facebook juga menyediakan fitur percakapan (*chat*) yang memungkinkan siswa berinteraksi dan berdiskusi dengan siswa lain ataupun dengan guru baik secara personal maupun grup. *Chat* ini dapat dimanfaatkan untuk ajang tanya jawab antar sesama siswa maupun siswa dengan guru. *Chat* ini juga menyediakan sarana untuk mengirim dokumen baik berupa teks, foto, foto GIF bahkan video

6. Catatan (*note*)

   Catatan (*note*) ini memungkinkan guru membuat catatan panjang sehingga mampu mengajak siswa untuk memahami penjelasan guru dan mendiskusikannya secara panjang lebar.

7. Pesan (*messenger*)

   Fitur pesan (*messenger*) ini menyediakan sarana untuk chat secara personal. Saat ini telah tersedia fitur *voce call* yaitu fitur yang dapat digunakan untuk mengirim suara sebagaimana telepon juga *video chat* yang dapat digunakan untuk melihat lawan bicara. Video chat ini bisa digunakan jika komputer yang digunakan menggunakan kamera.

8. Quiz

   Facebook juga telah menyediakan perangkat *quiz* yang dapat digunakan guru untuk menguji dan mengukur pemahaman siswanya secara kognitif maupun keterampilan.

KESIMPULAN

Facebook sebagai salah satu media sosial yang dikenal saat ini memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia modern saat ini. Walaupun

kita mengenal sosial media lain selain Facebook namun Facebook merupakan media sosial yang yang memberikan manfaat sangat besar bagi kehidupan siswa seperti diungkapkan oleh Golder dam Stutzman, (2006) dalam Isidora Miloševic, Dragana Zivkovic, Sanela Arsic, dan Dragan Manasijevic. (2015).

> There are also other online sites such as MySpace and Friedster used for connecting people, but Facebook is regarded as the leading social network of the greatest benefit for students (Golder et al., 2007; Stutzman, 2006 dalam Isidora Miloševic, Dragana Zivkovic, Sanela Arsic, dan Dragan Manasijevic. (2015).

Sebagai media sosial yang paling berpengaruh, maka Facebook memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai media pembelajaran termasuk dimanfaatkan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian tentang Facebook dan pemanfaatannya dalam pembelajaran telah banyak dilakukan para peneliti yang menunjukkan perkembangan atau pengaruh yang positif terhadap siswa. Pemanfaatan Facebook ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai fitur yang tersedia dalam Facebook, yaitu: (1) pendaftaran akun (2) *posting*, (3) *sharing*, (4) *chating*, (5) membuat grup Facebook (6) *mesengger*, (7) Catatan (*note*), (8) *Quiz*

DAFTAR PUSTAKA

Isidora Miloševic, Dragana Zivkovic, Sanela Arsic, dan Dragan Manasijevic. 2015. *Facebook as virtual classroom – Social networking in learning and teaching among Serbian students*. Telematics and Informatics 32 (2015) 576–585

Stefania Manca, Maria Ranieri . 2016. *Facebook and the others. Potentials and obstacles of Social Media for teaching in higher education*. Computers & Education 95 (2016) 216 – 230

Mohamed Aabeid Khalfalla Attouni and Che Su Mustaffa. 2014. *How do Non-profit Organizations in Libya Adopt and Use Social Media to Communicate with The Society*. Procedia - Social and Behavioral Sciences 155 (2014) 92 – 97

PEMANFAATAN INTERNET SEBAGAI SUMBER BELAJAR TERHADAP KOMPETENSI PROFESIONAL GURU

Roni Yudo Kuncoro
s2 Pascasarjana PPKn UNS, Surakarta
iruna.4nieh@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Guru PPKn memanfaatkan internet untuk kompetesi mereka, bagaimana kendala yang dihadapi Guru PPKn dalam memanfaatkan untuk kompetensi mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan dan memperoleh informasi dari sumber data. Sumber data yang digunakan adalah informa (Guru PPKn SMP dan SMA). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif. Langkah-langkah prosedur penelitian yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap analisis data, tahap penyusunan makalah.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Guru PPKn di ketiga sekolah yang berbeda telah memanfaatkan media pembelajaran internet dimana mereka tahu dan menggunakan internet sebagai sumber belajar seperti mendownload file materi dalam bentuk pdf di situs web ataupun blogspot, mendownload video dari situs youtube yang kemudian digunakan sebagai bahan ajar, dimana mereka dapat terhubung ke internet setiap harinya.(2) Kendala yang dihadapi Guru PPKn adalah terletak dalam masalah koneksi internet dimana internet membutuhkan koneksi agar tetap terhubung. Selanjutnya apabila deskripsi di atas dikaitkan maka kendala tersebut dalam kategori fisik.

Kata kunci : *Internet,Sumber belajar,Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kompetensi Profesional Guru*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini dunia mengalami perkembangan yang begitu pesat, salah satunya bidang pendidikan. Banyak negara-negara yang mulai sadar akan pentingnya pendidikan di era globalisasi ini. Menurut Agus N Cahyo (2013, 16), "Bangsa yang ingin maju, membangun, dan berusaha memperbaiki keadaan masyarakat dan dunia tentu mengatakan bahwa pendidikan merupakan kunci keberhasilan suatu bangsa". Bangsa Indonesia telah merumuskan tujuan pendidikan di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 yang menyatakan bahwa :

> Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.

Data terbaru terkait dengan tingkat literasi Indonesia pada tahun 2016, disampaikan oleh Central Connecticut State University, Amerika Serikat dengan data bertajukWorld's Most Literate Nations Ranked yang dirilis pada 9 Maret 2016. Penelitian tersebut menempatkan Indonesia di peringkat ke 60 dari total 61 negara yang diteliti (Firman,2016: https://tirto.id/literasi-indonesia-yang-belum-merdeka-bBJS).

Rendahnya peringkat literasi di Indonesia berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. The learning Curve Pearson, sebuah lembaga pemeringkatan pendidikan dunia pada bulan Mei 2014 merilis data mengenai peringkat mutu pendidikan dunia. Indonesia duduk di posisi terakhir dari 40 negara yang terdata dengan penilaian secarakeseluruhan minus 1,84. Fenomena rendahnya tingkat literasi dan mutu pendidikan di Indonesia bertolak belakang dengan perkembangan teknologi Informasi terkait dengan media sosial di Indonesia. Pada jejaring sosial dunia seperti instagram, facebook, path dan lain sebagainya, pengguna asal Indonesia menduduki peringkat 10 besar pengguna terbesar situs-situs tersebut (Chandra, 2014: http://www.kompasiana.-com-/10-peringkat-indonesia-di-dunia).

Mulyasa berpendapat (2008: 5), "Guru mempunyai peran yang strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional, khususnya pada bidang pendidikan, sehingga perlu dikembangkan sebagai tenaga profesi yang professional dan bermartabat". Iskandar (2010: 1) mengungkapkan, "Guru merupakan ujung tombak berlangsungnya kegiatan proses belajar mengajar, sehingga guru memiliki peran yang penting sebagai sumber belajar dalam transformasi nilai ilmu pengetahuan".

Namun, Jika kita perhatikan secara bersama, bahwa guru Indonesia belum menempatkan perannya berdasarkan profesi sebagai seorang pendidik. Menurut Balitbang Depdiknas, guru-guru yang layak mengajar untuk tingkat SD baik negeri maupun swasta ternyata hanya 28,94 %. Guru SMP Negeri

54,12%, swasta 60,99 %, Guru SMA Negeri 65,29 %, swasta 64,73%, Guru SMK Negeri 55,91, swasta 58,26 %.(Siti Fatonah & Hasan Qodri: 2014).

Menurut Peoples (dalam Zainal Aqib, 2013:48) seluruh pengetahuan yang kita peroleh didapatkan dari 75 % dari melihat, 13% dari mendengar, 12% dari mengecap, mencium, dan meraba. Pendapat Peoples tadi dapat disimpulkan bahwa manusia memperoleh pengetahuan yang terbesar adalah dari melihat. Pembelajaran PPKn yang dilakukan sekarang ini memungkinkan untuk melakukan pembelajaran yang akan memperoleh pengetahuan pada tingkat pertama sesuai dengan pendapat Peoples tadi, yaitu dengan melihat. Tentunya hal ini dapat dilakukan dengan pembelajaran terkini yang menggunakan media internet, yang mana hal ini berbeda dengan pembelajaran yang dilakukan pada masa dahulu, yang hanya menggunakan media berupa papan tulis atau buku. Berdasarkan hal tersebut Pemanfaatan Internet sebagai sumber belajar dibutuhkan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Berdasarkan permasahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana guru PPKn dalam memanfaatkan internet untuk kompetensi mereka dan yang kedua bagaimana kendala yang dihadapi oleh guru PPKn dalam memanfaatkan internet untuk kompetensi mereka.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Guru PPKn memanfaatkan internet untuk kompetesi mereka?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Guru PPKn dalam memanfaatkan internet untuk kompetensi mereka?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini, untuk waktunya dimulai dari 5-15 November 2017 dan tempat penelitian Pascasarjana PPKn UNS, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Secara definisi penelitian kualitatif suatu penelitiaan yang dilakukan untuk mengetahui dan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti dan disajikan dalam bentuk data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jenis

penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, karena memaparkan objek yang obyek yang diteliti (orang, lembaga atau yang lainnya) yang berdasarkan fakta. Menurut H,B Sutopo menyatakan bahwa "Sumber data dalam penelitian kualitatif dapat berupa manusia, peristiwa, atau aktifitas, tempat atau lokasi, benda, beragam gambar, atau rekaman, dokumen atau arsip" (2002: 50-54), subyek adalah Guru PPKn dan obyek penelitian sumber belajar, penggalian data teknik analisis data : H. B Sutopo (2002: 91) menyatakan bahwa "dalam proses analisis data terdapat 4 komponen utama yang harus dipahami oleh setiap peneliti kualitaif. Empat komponen tersebut adalah : (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) sajian data, (4) penarikan kesimpulan atau verifikasi".

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Peneliti memperoleh data dari wawancara dengan mewancarai 3 Guru PPKn yang berbeda yaitu yang berinisial A, I dan L. Dari wawancara yang dilakukan dengan A yang merupakn seorang pengajar Guru PPKn di SMP An Nur Ungaran, didapatkan hasil bahwa A mengetahui bahwa internet sebagai sumber belajar dikarenakan karena sekarang merupakan jaman yang sudah modern atau global jadi tergantung pada internet, jadi internet mempunyai referensi yang banyak sekali sebagai media belajar. Dalam kesehariaannya A sering menggunakan internet dan lebih banyak ke media sosialnya untuk penggunaan sebagai sumber belajar ketika membutuhkan referensi. Tetapi walaupun demikian, media sosial yang digunakan tetap bisa menjadi sumber belajar karena menurut A, dalam media sosial tidak hanya berisi tentang postingan pribadi seseorang, melainkan di media sosial juga terdapat berita-berita tentang masalah sosial yang bisa digunakan sebagai referensi sebagai sumber belajar. A mencotohkan seperti media yang digunakannya yaitu Instagram dalam media ini, dia mendapatkan informasi seperti berita mengenai isu pelanggaran Hak Asasi Manusia di Myanmar yang berkaitan dengan etnis Rohingnya. A lebih lanjut mejelaskan mengenai kendala yang dihadapi dalam memanfaatkan internet sebagai sumber belajar adalah masalah sarana

prasarana dimana dalam internet membutuhkan koneksi agar tetap terhubung agar bisa memanfaatkannya, yang kedua adalah kita harus pintar dalam mencari referensi karena di internet banyak sekali materi dan kita harus pandai memilah sesuai yang kita butuhkan. A mengungkapkan bahwa macam-macam media internet yang sering digunakan sebagai sumber belajar antara lain google, instagram, facebook, dan youtube.A menjelaskan dalam penyusunan materinya kadang menggunakan video yang dapat diambil dari youtube, karena dengan menggunakan media youtube ini dia bisa mendownload atau mengunduh film dokumenter, sejarah dari animasi agar memotivasi belajar siswa supaya tidak bosan dalam kegiatan belajar mengajar.

Selanjutnya dari wawancara yang dilakukan dengan I dia adalah seorang Guru PPKn yang mengajar di SMK Muhammadiyah 11 Sumberlawang didapatkan hasil bahwa, I mengetahui internet sebagai sumber belajar dikarenakan menurut dia internet merupakan salah satu sumber belajar selain buku paket karena untuk Kurikulum 2013 tidak menggunakan LKS. Internet digunakan oleh I seperti untuk mencari ringkasan atau melengkapi buku, dan mencari soal-soal dapat memanfaatkan internet. I menjelaskan bahwa ia mengakses internet sekitar 12 jam sehari, lalu dia mengungkapkan bahwa yang dibuka dalam internet yaitu berkaitan dengan social media dan berkaitan dengan mempersiapkan bahan ajar, seperti yang dilakukannya sekarang dia sedang menyusun soal-soal UAS yang akan diberikan oleh siswa, dan internet menjadi salah satu referensi bagi I sebagai sumber belajar. Sosial media yang digunakan oleh I diantaranya adalah Instagram, Whats App, dan Black Berry Messenger (BBM). I dalam menggunakan bahan ajar salah satunya menggunakan file dalam bentuk pdf atau ebook yang didownload atau diunduh di internet, sementara untuk latihan soal-soal dia biasanya mengambil dari blog atau situs yang ada di internet. Selanjutnya I menjelaskan mengenai materi dalam bentuk video yang di unduh atau didownload di Youtube, dia menggunakannya salah satunya untuk menerangkan atau menjelaskan kepada siswa mengenai pelanggaran-pelanggaran pemilu. Sementara itu kendala yang

dihadapi oleh I sama dengan kendala yang dihadapi oleh A yaitu berkaitan dengan sarana dan prasarana dalam bentuk koneksi internet.

Sedangkan dari wawancara yang dilakukan dengan L yang merupakan pengajar sebagai Guru PPKn pada tingkat SMP dan SMA di Homeschooling Kak Seto didapatkan hasil bahwa, L mengetahui bahwa internet sebagai salah satu sumber belajar bagi Guru PPKn. L menjelaskan bahwa dalam sehari dia mempunyai akses internet sebanyak 6 jam. Berkaitan dengan bahan ajar kepada siswa L sering mengambilnya dari internet dikarenakan L mengajar SMP dan SMA, dia mengambil dari internet melalui blog, website, jurnal yang kemudian dia lengkapi dan perbaiki sendiri agar materinya menjadi lebih baik. L juga mengungkapkan bahwa internet bermanfaat bagi siswa maupun guru dimana internet dapat menjadi pembelajaran bagi individu atau guru itu sendiri maupun siswa.

B. Pembahasan

1. Guru PPKn Memanfaatkan Internet untuk Kompetensi Mereka

Pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Fungsi pemanfaatan sangat penting karena membicarakan kaitan antara peserta didik dengan bahan atau sistem pembelajaran (Yusufhadi, 1994: 45). Menurut Allan (2005: 12) internet adalah sekumpulan jaringan komputer yang saling terhubung secara fisik dan memiliki kemampuan untuk membaca dan menguraikan protokol komunikasi tertentu yang disebut Internet Protocol (IP) dan Transmission Control Protokol (TCP). Jadi dapat dimaknai bahwa Pemanfaatan Internet merupakan menggunakan sekumpulan jaringan komputer yang saling terhubung dan mempunyai kemampuan untuk membaca dan menguraikan yang digunakan sebagai sumber untuk belajar.

Berdasarkan teori tersebut dapat diketahui bahwa A, I, dan L telah memanfaatkan media pembelajaran internet dimana mereka tahu dan menggunakan internet sebagai sumber belajar seperti mendownload file materi dalam bentuk pdf di situs web ataupun blogspot, mendownload video dari situs youtube yang kemudian digunakan sebagai bahan ajar, dimana mereka dapat terhubung ke internet setiap harinya. Materi atau bahan ajar

yang sudah diunduh atau didownload mereka lengkapi dan perbaiki sendiri. Untuk social media seperti WA, Instagram, Facebook mereka gunakan untuk pembelajaran baik bagi Guru PPKn sendiri ataupun siswa dimana dalam sosial media tidak hanya berisi mengenai postingan pribadi seseorang tetapi juga berisi isu-isu atau berita-berita baik dalam lingkup nasional ataupun internasional.

2. Kendala yang Dihadapi Guru PPKn dalam Memanfaatkan Internet untuk Kompetensi Mereka

Menurut Guru PPKn yaitu A, I, dan L kendala yang dihadapi mereka adalah sama yaitu terletak dalam masalah koneksi internet dimana internet membutuhkan koneksi agar tetap terhubung. Selanjutnya apabila deskripsi di atas dikaitkan maka kendala tersebut dalam kategori fisik, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Unhy Sriwahyuni (2013: http://unhysriwahyuni.blogspot.co.id/2013/03/kendala-pemanfaatan-tik-dalam-dunia.html) yang membagi hambatan-hambatan pengintegrasian TIK dalam pembelajaran menjadi dua kelompok, yaitu :

a. Secara Fisik

Secaca fisik dapat berupa sarana dan prasarana yang belum memadai terutama untuk sekolah-sekolah yang berlokasi di pelosok. kalaupun sudah ada sarana dan prasarana, tetapi masih sangat minim baik dari segi jumlah maupun segi mutu peralatan tersebut. Masih digunakannya perangkat multimedia bekas di lembaga-lembaga pendidikan yang terdapat di daerah pedesaan. Perangkat multimedia bekas ini tentunya masih menggunakan spesifikasi yang sudah tertinggal jamannya. Sehingga penggunaannya tidak mampu bersaing dengan laju perkembangan TIK yang begitu pesat.

b. Secara Non-fisik

1) Kepercayaan diri guru kurang dalam menggunakan TIK dalam melaksanakan proses PBM.

Guru takut gagal mengajar melalui penggunaan TIK yang saat ini sangat disarankan. Walaupun penggunaannya TIK dalam proses pembelajaran sangat disarankan oleh para ahli.

2) Kurangnya kompetensi guru

Yang dimaksud disini adalah kurangnya kompetensi guru dalam mengintegrasikan TIK kedalam pedagogis praktek, yaitu tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan komputer dan tidak antusias tentang perubahan dan integrasi dengan belajar yang menggunakan komputer dalam kelas mereka.

3) Sikap guru dan resistensi yang melekat terhadap perubahan.

Sikap dan resistensi guru untuk mengubah tentang penggunaan strategi baru yaitu dengan integrasi TIK dalam PBM. Hal ini dimaksudkan dengan sikap guru bahwa penggunaan TIK dalam PBM tidak memiliki mamfaat atau keuntungan yang jelas.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Guru PPKn dalam tiga sekolah yang berbeda ini telah memanfaatkan media pembelajaran internet dimana mereka tahu dan menggunakan internet sebagai sumber belajar seperti mendownload file materi dalam bentuk pdf di situs web ataupun blogspot, mendownload video dari situs youtube yang kemudian digunakan sebagai bahan ajar, dimana mereka dapat terhubung ke internet setiap harinya.

Kendala yang dihadapi mereka adalah sama yaitu terletak dalam masalah koneksi internet dimana internet membutuhkan koneksi agar tetap terhubung. Selanjutnya apabila deskripsi di atas dikaitkan maka kendala tersebut dalam kategori fisik.

B. Saran

Internet sebagai salah satu sumber belajar yang baik dan memiliki kelebihan dibandingkan buku dan bisa dijadikan referensi bagi Guru PPKn untuk memanfaatkan media ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Wijianto S.Pd M.Si

Dr. Triana Rejekiningsih, SH., KN, MPd

Dr. Triyanto S.H, M.Hum

Dr. Dewi Gunawati, S.H,M.Hum

DAFTAR PUSTAKA

Allan .2005. *Pengertian Internet dan asal usul dari kata internet*. Surabaya: Penerbit Indah

Chandra, 2014, 10 *Peringkat Indonesia di Dunia*, https://www.kompasiana.com/mulyady1688/10-peringkat-indonesia-di-dunia_54f934b0a333112c048b4a1a, 19 November 2017

Firman, 2016, *Literasi Indonesia yang Belum Merdeka*, https://tirto.id/literasi-indonesia-yang-belum-merdeka-bBJS, 19 November 2017

Iskandar Agung. 2010. *Meningkatkan Kreativitas Pembelajaran Bagi Guru*. Jakarta: Bestari Buana Murni

Mulyasa, E.2008. *Standar Kompetensi dan sertifikasi Guru*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Siti Fatonah dan Hasan Qodri, 2014. *Peran Sertifikasi Pendidik dalam Meningkatkan Kualitas Proses Pembelajaran Ipa Sd di Kabupaten Magelang*, Al-Bidayah, Vol. 6 No. 292

Sutopo H.B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press

Unhy Sriwahyuni. 2013. *Kendala Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Dunia Pendidikan*, http://unhysriwahyuni.blogspot.co.id/2013/03/kendala-pemanfaatan-tik-dalam-dunia.html, 19 oktober 2015

Yusufhadi Miarso, dkk.1994. *Definisi Teknologi Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Zainal Aqib.2013. *Model – Model, Media, dan Strategi Pembelajaran Konstekstual (Inovatif)*. Bandung : Yrama Widya

PENGUATAN MODEL PEMBELAJARAN *CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING* DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN *ACTION LEARNING APPROACH* DALAM UPAYA PEMBENTUKAN *GOOD CITIZEN*

Achmad Marwan Nurhadi
PPKn Pascasarjana UNS, Surakarta
marwannur@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* dengan menggunakan pendekatan *Action Learning Approach* dalam upaya pembentukan *good citizen* tersebut dalam mata pelajaran PKn di SMPN 16 Surakarta sebagai upaya pembentukan *good citizen*. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, jenis deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari informan, tempat, peristiwa, dan dokumen. Teknik sampling menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Validitas data menggunakan trianggulasi data dan trianggulasi metode. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan Penerapan penguatan model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* dengan menggunakan pendekatan *Action Learning Approach* tersebut dalam mata pelajaran PKn di SMPN 16 Surakarta dalam upaya pembentukan *good citizen* langkah yang harus di terapkan kan guru pada penguatan model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* dengan menggunakan pendekatan *Action Learning Approach* yakni: Pada tahap pendahuluan guru melakukan mengintegrasikan serta menyisipkan nilai-nilai karakter pada setiap tahapnya dan Nilai karakter yang ingin dikembangkan oleh guru yakni karakater berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif sesuai yang tercantum pada rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada tahapan kegiatan inti guru mencoba menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* dengan menggunakan pendekatan *Action Learning Approach.* Pada kegiatan penutup seorang guru juga harus mampu menyampaikan pembelajaran dengan nilai-nilai karakter.

Kata kunci: *Action Learning Approach, Good Citizen, Karakter.*

PENDAHULUAN

Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk karakter individu yangbertanggung jawab, demokratis, serta berakhlak mulia. Proses pembelajaran lebih menekankan pada kemampuan dan keterampilan peserta didik untuk memahami serta menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan yang baik, dan menuntut partisipasi aktif siswa.Hal ini sejalan dengan pandangan Numan Sumantri (2001: 161), "Pendidikan Kewarganegaraan menitik beratkan pada kemampuan dan ketrampilan berfikir aktif warga negara, terutama generasi muda, dalam menginternalisasikan nilai-nilai warga Negara yang

bail (*good citizen*) dalam suasana demokratis dalam masalah kemsyarakatan (*civic affair*)".

Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah sangatlah penting dalam membangun karakter bangsa.Hal ini bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik dan cerdas *(to be smart and good citizenship)*. Menurut Cholisin (2000: 2) "Pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan merupakan basis bagi terbentuknya karakter kewarganegaraan". Karakter kewarganegaraan berisikan sifat-sifat yang melekat pada diri setiap warga negara dalam melakukan perannya sebagai warga negara, hal ini akan terbentuk ketika pada dirinya telah terbentuk pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan

Pendidikan sebagai salah satu cara untuk membentuk perilaku warga negara yang baik, antara lain diwujudkan dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*). Depdiknas (2006: 3) mengemukakan bahwa "sebagaimana lazimnya semua mata pelajaran, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tentu memiliki visi, misi, dan tujuan. Visi dari mata pelajaran PKn sendiri adalah terwujudnya suatu mata pelajaran yang berfungsi sebagai sarana watak dan karakter bangsa (*nation and character building*) dan pemberdayaan warga negara".

Ada pun misi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini adalah membentuk warga negara yang baik, yakni warganegara yang demokratis, yang sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Berdasarkan pemaparan visi dan misi pendidikan kewarganegaraan, dapat kita lihat bahwa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan memiliki posisi yang strategis untuk dikembangkan sebagai sarana untuk pembentukan karakter bangsa di era globalisasi ini khususnya pada siswa atau peserta didik agar mampu menjadi warga negara yang baik.

Penerapan proses pembelajaran dapat dilakukan dengan penggunaan model pembelajaran yang dipilih oleh guru disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan dan juga disesuaikan dengan kondisi peserta didik di kelas, karena kondisi peserta didik di setiap kelas pasti beraneka ragam. Penggunaan penguatan model pembelajaran tersebut bertujuan untuk membawa situasi keadaan proses

pembelajaran yang baru terhadap peserta didik dan bertujuan ke arah yang lebih baik.

Pada kurikulum Kurikulum 2013 guru berhak untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah.Ini yang mengharuskan para siswa dan guru untuk mendapatkan sumber informasi dan sumber belajar yang sebanyak-banyaknya. Guru juga dituntut untuk menggunakan model pembelajaran yang lebih bervariasi dan mengajak siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. E Mulyasa dalam Winarno (2013: 43) menyatakan bahwa "tugas guru yang paling utama adalah bagaimana mengkondisikan lingkungan belajar yang menyenangkan, agar dapat membangkitkan rasa ingin tahu semua peserta didik sehingga timbul minat dan nafsunya untuk belajar".Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, guru harus mampu menggunakan model pembelajaran yang menyenangkan agar berdampak pada kualitas hasil belajar yang didapat oleh siswa.

Sebuah proses pembelajaran khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan proses belajar mengajar di kelas masih berfokus kepada guru sebagai sumber informasi dan guru masih menggunakan model pembelajaran klasik yaitu berupa ceramah. Penggunaan model pembelajaran yang di gunakan guru yang masih konvensional siswa merasa bosan dan jenuh dalam mengikuti pembelajaran di kelas.Selain itu, siswa juga kurang antusias dan aktif selama kegiatan pembelajaran berlangsung.Sehingga hal tersebut juga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan pelajaran yang berlaku pada kurikulum dasar dan menengah yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan membentuk warga negara yang baik. Namun permasalahan yang dijumpai terkait dengan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah khususnya di SMPN 16 Surakarta setelah dilakukan kegiatan observasi, ditemukan bahwa pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berlangsung di dalam kelas, siswa dalam bersikap atau berperilaku belum sesuai dengan norma atau peraturan yang berlaku serta belum maksimal dalam berpartisipasi aktif pada saat berlangsungnya pembelajaran

dimana siswa hanya menerima informasi yang disampaikan oleh guru tanpa terlibat aktif secara langsung. Sehingga siswa ada yang tidak sopan dalam bertingkah laku, siswa yang merasa bosan dan tidak memperhatikan ketika guru menyampaikan materi pelajaran.Hal ini dikarenakan guru belum dapat memaksimalkan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah, sehingga berdampak pada siswa yang belum dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas dan menyebabkan siswa mudah merasa jenuh dan bosan selama mengikuti pembelajaran PKn.

Peserta didik di SMP Negeri 16 Surakarta merupakan generasi penerus bangsa yang memegang peranan penting dalam memajukan negara Indonesia. Generasi muda diberi amanat untuk mengemban tugas untuk mengisi kemerdekaan serta menghargai jasa para pahlawan Indonesia di kemudian hari yang mempunyai keinginan, cita-cita yang mengarah ke masa depan dan sebagai generasi yang dinamis, inovatif untuk kepentingan bangsa yang pada akhirnya akan menjadi seseorang yang mempunyai nilai dan karakter yang terinternalisasi.

Secara tidak langsung dengan kurangnya generasi penerus dalam bersikap, bersopan santun dan bertata krama sebagai bangsa Indonesia berlahan luntur. Persoalan yang mendasar yang menjadi permasalahan bangsa Indonesia saat ini. Krisis jati diri mungkin itu kata yang tepat untuk menyebutkan situasi bangsa Indonesia saat ini. Sebenarnya kata itu sangat membuat cengang bagi orang-orang yang mau berfikir secara kritis dan mendalam. Bangsa ini merupakan bangsa yang berbudaya , namun bangsa ini kini telah kehilangan jati dirinya. Bangsa yang dahulu hebat karena budayanya, kini mulai beranjak rapuh dengan berjalnnya waktu. Hal demikian menjadi keprihatinan kita semua khusus nya kaum akademisi. Model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* dengan menggunakan pendekatan *Action Learning Approach* tersebut di terapkan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan pamong belajar melalui pendekatan analisis dan klarifikasi nilai moral. Model Pembelajaran dengan pendekatan diatas juga dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan pamong belajar dalam kegiatan sosial serta mendorong peserta didik untuk melihat diri sendiri sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan masyarakat.

Karakteristik model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* dengan menggunakan pendekatan *Action Learning Approach*ialah berupaya menekankan pada usaha guru untuk memfasilitasi dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbuatan-perbuatan moral yang dilakukan baik secara perseorangan maupun secara berkelompok.

Menurut Bank (1990) tentang pentingnya pembelajaran berbuat menyebutkan bahwa *"Helping student to develop a greater sense of personal, social, and civic efficacy, and to develop greater skills in influencing their social and civic environment, should be the major goals of citizen action an participation project and activities*". Membantu siswa untuk membangun sikap yang lebih dan berkembang / dalam sikap sosial, dan sebagai warga negara yang baik, dan untuk mengembangkan kemampuan yang lebih besar dalam mempengaruhi sikap sosial mereka dan lingkungan kewarganegaraan, yang seharusnya menjadi tujuan utama dari sikap warga negara sebagai sasaran partisipasi dan kegiatan.

Oleh karena itu, sejak awal siswa senantiasa dibimbing dan dibekali dengan pembinaan pendidikan kepribadian, watak dan karakter sehingga di masa yang akan datang mereka menjadi warga negara yang baik (*well educated men and good citizenship*). Berdasarkan uraian data dan berdasarkan observasi awal di SMPN 16 Surakarta, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang lebih lanjut tentang Penguatan model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* dengan menggunakan pendekatan *Action Learning Approach* yang di terapkan di SMP Negeri 16 Surakarta sebagai salah satu upaya untuk membentuk warga negara yang baik / *Good Citizen*.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui penerapan model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* dengan menggunakan pendekatan *Action Learning Approach*tersebut dalam mata pelajaran PKn di SMP N 16 Surakarta dalam upaya pembentukan *good citizen*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif.Hal ini

dikarenakan hasil penelitian ini memaparkan obyek yang diteliti (orang, lembaga atau lainnya) berdasarkan fakta. Penulis berusaha menyajikan data deskriptif berupa keterangan atau tanggapan dari informan, observasi lapangan serta studi dokumen yang berhubungan dengan obyek, dalam hal ini ditekankan pada Penguatan model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* dengan menggunakan pendekatan *Action Learning Approach* yang di terapkan di SMP Negeri 16 Surakarta sebagai salah satu upaya untuk membentuk warga negara yang baik / *Good Citizen*.

Sumber data diperoleh dari informan, tempat, peristiwa dan dokumen.Teknik sampling yang digunakan adalah Sampling Insidental. Peneliti mengambil sampel berdasarkan kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber datamengenai masalah yang akan diteliti yaitu penguatan model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* dengan menggunakan pendekatan *Action Learning Approach* dalam upaya pembentukan good citizenyang di terapkan di SMP Negeri 16 Surakarta sebagai salah satu upaya untuk membentuk warga negara yang baik/*Good Citizen*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh dan menyusun data penelitian adalah dengan wawancara, observasi dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan dengan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan beberapa peserta didikSMPN 16 Surakarta.Observasi dilakukan dengan mengamati keadaan atau kondisi kegiatan belajar mengajar guru PPKn dan aktivitas peserta didik SMPN 16 Surakarta.pada proses atau setelah pembelajaran penguatan model pembelajaran *Contextual Teaching And Learning* dengan menggunakan pendekatan *Action Learning Approach* serta pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan perubahan sikap peserta didik di lingkungan sekolah. Dokumen yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah visi dan misi SMPN 16 Surakarta dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang digunakan guru PKn ketika proses pembelajaran.

Guna menjaga keabsahan dan kesahihan data yang dikumpulkan, maka perlu adanya validitas data.Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi data dan triangulasi metode sebagai teknik untuk memeriksa keabsahan data.Teknik analisis data dalam bahasan ini menggunakan model analisis interaktif dengan tahap-tahap, 1) Pengumpulan data, 2) Reduksi data, 3) Sajian data, dan 4) Pengambilan kesimpulan atau verifikasi (Miles & Huberman, 1992: 20). Adapun prosedur penelitian dengan langkah-langkah yaitu: tahap penyusunan proposal dan ijin penelitian, tahap pengumpulan data, tahap analisis data awal, tahap analisis data akhir dan tahap penyususnan laporan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penguatan Model Pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* dengan menggunakan Pendekatan *Action Learning Approach* yang di Terapkan dalam Pembelajaran PPKn di SMP N 16 Surakarta:

Berdasarkan hasil penilitian dari wawancara, observasi dan analisis dokumenmodel pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* dengan menggunakan pendekatan *Action Learning Approach* yang di gunakan untuk memberi penekanan pada usaha memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbuatan-perbuatan moral, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama dalam suatu kelompok. Tujuan dari penguatan model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* dengan menggunakan pendekatan *Action Learning Approach,* siswa diharapkan akan mampu mengenal dan mengembangkan kapasitas belajar dan potensi yang mereka miliki. Di samping itu, siswa secara penuh dan sadar dapat menggunakan potensi sumber belajar yang terdapat di lingkungan sekitarnya, lebih terlatih untuk berprakarsa, berpikir secara sistematis, krisis dan tanggap, sehingga dapat menyelesaikan masalah sehari-hari melalui penelusuran informasi yang bermakna baginya.

Karakter juga merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan

perbuatan. Di dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terdapat Nilai karakter yang terkandung yakni mencakup nilai Kereligiusan, kejujuran, kecerdasan, ketangguhan, kepedulian, kedemokratisan, nasionalisme, kepatuhan pada aturan sosial, menghargai keberagaman, kesadaran akan hak dan kewajiban diri dan orang lain. Model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* dengan menggunakan pendekatan *Action Learning Approach* dapat diterapkan kepada siswa untuk menerapkan salah satu pendidikan karakter yaitu karakter demokrasi dalam bentuk program-program moral. Selain itu tujuannya mempersiapkan seorang sebagai warga negara yang baik. Bahkan sekarang ini ditambahkan dengan istilah karakter cerdas sehingga menjadi warga negara yang baik dan cerdas (*smart and good citizen*) atau *Intellegent*. Selain itu model pembelajaran yang paling cocok atau tepat untuk mengintgrasikan sebuah nilai nilai karater kemudian nilai karakter tersebut tertanam pada siswa serta menjadikan siswa memiliki sikap hidup yang baik atau *good citizen*.

Model-model pembelajaran merupakan juga kerangka konseptual sedangkan strategi lebih menekankan pada penerapannya di kelas sehingga model-model pembelajaran dapat digunakan sebagai acuan pada kegiatan perancangan kegiatan yang sistematik dalam mengkomunikasikan isi pelajaran kepada siswa. Sebelum guru memetukan model pembelajaran terlebih dahulu memperhatikan serta mengkaji terlebih dahulu sebuah nilai-nilai karakter yang terintegrasi pada mata pelajaran masing-masing yang akan di sampaikan kepada siswa. Penguatan model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* dengan menggunakan pendekatan *Action Learning Approach* juga untuk menjaga perhatian siswa atau anak didik agar tetap tertuju pada proses pembelajaran. Dalam proses kegiatan belajar mengajar akan lebih mudah dipahami serta lebih lama diingat siswa, apabila siswa dilibatkan secara aktif baik mental, fisik, dan sosial Dalam pelaksanaan pembelajaran aktif guru dapat menggunakan berbagai metode yang sesuai dengan kondisi siswa. Pada tahap mengidentifikasi penguatan model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* dengan menggunakan pendekatan *Action Learning Approach*

diterapkan dengan mengaitkan Standart Kompetensi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan Kelas VII dari analisis dokumen dari Silabus mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, Nilai-nilai karakter yang di kembangkan dalam upaya pembetukan *Good Citizen.* Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Berdasarkan analisis dari dokumen, nilai-nilai pendidikan karakter telah dimasukkan oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan ke dalam Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan guru Pendidikan Kewarganegeraan yang menyatakan bahwa nilai-nilai sebuah karakter selalu disisipkan dalam silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Setelah menyusun silabus mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran guru Pendidikan Kewarganegaraan juga terlebih dahulu menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sebelum mengajar membuat atau merencanakan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran (RPP) sesuai kurikulum yang digunakan. Sebelum membuat rencana pelaksanaan pembelajaran guru terlebih dahulu mempelajari dan memahami Silabus dari kurikulum tersebut.

Langkah-langkah pembelajaran PKn yang dilakukan Pada tahap penerapan model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* dengan menggunakan pendekatan *Action Learning Approach* yakni: Pendahuluan, guru melakukan hal-hal yang mampu menyisipkan nilai-nilai karakter pada setiap tahapnya, seperti guru mempersiapkan keadaan kelas dan siswa sebelum memulai pelajaran, kemudian mengabsensi dan menanyakan kabar siswa, melakukan apersepsi atau pembukaan memulai proses pembelajaran guru menjelaskan tujuan yang hendak dicapai salah satunya adalah dapat menjelaskan pentingnya menyampaikan aspirasi atau pendapat dengan menanyakan kepada siswa materi sebelumnya dan mencoba menghubungkan dengan materi sekarang, guru juga menyampaikan kompetensi dan cakupan materi yang akan dipelajari.

Selanjutnya, tahapan kegiatan inti.Pada tahapan kegiatan inti guru mencoba menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* dengan menggunakan pendekatan *Action Learning Approach.* Guru juga berusaha melibatkan siswa secara aktif.Inti dari pendekatan *Action Learning Approach* adalah siswa dilibatkan untuk lebih banyak terlibat, jadi pembelajaran tidak hanya berpusat kepada guru melainkan kepada siswa.Pada langkah-langkah pembelajaran di kegiatan inti guru telah mencoba untuk lebih banyak melibatkan siswa, misalnya dalam penyampaian materi guru hanya menyampaikan secara umum saja dan siswa diarahkan untuk menggali sendiri informasi secara mendalam dari berbagai sumber, selanjutnya guru sering menampilkan berbagai video atau film yang berhubungan dengan materi. Pada kegiatan ini, guru mengarahkan siswa untuk mengamati tayangan video atau film dan diminta memberikan komentarnya.

Hal lain juga yang dilakukan oleh guru pada kegiatan inti adalah siswa sering dilatih untuk berdiskusi memecahkan permasalahan secara bersama-sama. Kemudian guru memberikan sedikit penjelasan terkait bagaimana menjadi warga negra yang baik dalam menyampaikan pendapat dengan bahasa yang sangat sederhana sehingga siswa mudah mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh guru.

Siswa lebih aktif dan hasilnya informan menyampaikan bahwa secara tidak langsung dapat kita lihat atau kita pantau anak di dalam lingkungan sekolah contohnya dalam aspek tanggung jawab, kejujuran, religius, toleransi, kerjasama seperti karakter yang di kembangkan dalam membuat rencana pembelajaran diatas. Selanjutnya, tahapan terakhir dalam pembelajaran, yaitu kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup seorang guru juga harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai karakter.

Berdasarkan data observasi dan wawancara, guru telah melakukan kegiatan penutup dengan baik dalam membantu mengembangkan karakter siswa. Langkah-langkah yang disebutkan di atas, telah dilakukan oleh guru pada kegiatan penutup, dimana guru telah mengajak siswa untuk menyimpulkan

materi pembelajaran bersama-sama, kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengomentari atau memberikan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilalui, serta bisa memberikan saran untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya, dan terakhir guru selalu menyampaikan materi selanjutnya dan menutup dengan salam.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan penguatan model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* dengan menggunakan pendekatan *Action Learning Approach*dalam mata pelajaran PKn di SMP Negeri 16 Surakarta, dalam upaya pembentukan *good citizen* adalah sebagai berikut:
   a. Langkah-langkah pembelajaran PKn yang dilakukan Pada tahap penerapan penguatan model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* dengan menggunakan pendekatan *Action Learning Approach* yakni: Pada tahap pendahuluan guru melakukan hal-hal yang mampu menyisipkan nilai-nilai karakter pada setiap tahapnya, seperti guru mengajak siswa berdoa bersama sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar nilai karakter yang di kembangkan yakni kereligius an kemudian guru mempersiapkan keadaan kelas, kemudian mengabsensi dan menanyakan kabar siswa, melakukan apersepsi atau pembukaan memulai proses pembelajaran guru menjelaskan tujuan yang hendak dicapai salah satunya adalah dapat menjelaskan pentingnya menyampaikan aspirasi atau pendapat dengan menanyakan kepada siswa materi sebelumnya dan mencoba menghubungkan dengan materi sekarang, guru juga menyampaikan kompetensi dan cakupan materi yang akan dipelajari. Nilai karakter yang ingin dikembangkan oleh guru yakni karakater berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif.
   b. Pada tahapan kegiatan inti guru mencoba menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan penguatan *model action learning approach*. Guru juga berusaha melibatkan siswa dalam proses pembelajaran dengan suasana kelas yang aktif.

c. Inti dari penguatan model pembelajaran *action learning approach* adalah siswa dilibatkan untuk lebih banyak terlibat atau aktif dalam memecahkan permasalahan, jadi pembelajaran tidak hanya berpusat kepada guru melainkan kepada siswa. Nilai-nilai karakter yang di tampilkan oleh guru pada saat pembelajaran berlangsung karakter yang ditampilkan oleh guru pada kegiatan inti yakni:Kecerdasan,Kedemokratisan, Kepedulian,Nasionalisme, Menghargai keberagaman, Kesadaran hak dan kewajiban diri dan orang lain.
d. Pada kegiatan penutup seorang guru juga harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai karakter. Guru di dalam pembelajaran melakukan kegiatan penutup dengan baik dalam membantu mengembangkan karakter kepada siswa.
e. Langkah-langkah yang disebutkan di atas, telah dilakukan oleh guru pada kegiatan penutup, dimana guru telah mengajak siswa untuk menyimpulkan materi pembelajaran bersama-sama, kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengomentari atau memberikan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilalui.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada semua pihak yang terkait dengan penelitian ini. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna dan hal ini antara lain karena keterbatasan penulis. Meskipun demikian, penulis berharap semoga artikel jurnal ini bermanfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu.

DAFTAR PUSTAKA

Kolhberg's.(2002).*Theory of Moral Development and Education"*. Dalam A.Kosasih Djahiri (editor). *Moral and Character Development, Teaching Value and Social Moral Development*. Tanpa kota dan penerbit.

Lickona, Thomas, *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility.* New York: Bantam Books, 1992.

Lickona, Tom; Schaps, Eric, dan Lewis, Catherine. Eleven *Principles of Effective Character Education.*Character Education Partnership, 2007.

Matthew, B Miles.dan Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metode-metode Baru*, Universitas Indonesia Press,Jakarta.

Moleong, Lexy J. (2009).*Metodologi Penelitian Kualitaif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Razak, Abdul. (2011). *Analisis Pembelajaran dan Identifikasi Perilaku dan Karakterisitik Awal Siswa.*Agama, Budaya, dan Pendidikan Karakter Bangsa. Jakarta: Azra, Azyumardi.

Rohman, Muhamad dan Sofan Amri.(2013). *Strategi dan Desain Pengembangan Sistem Pembelajaran.* Jakarta: Prestasi Pustaka

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta.

Sutopo, HB. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Tim ICCE UIN Jakarta.(2003). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.

Winarno & Wijianto.(2010). *Ilmu Kewarganegaraan Dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan (Ikn-Pkn).* Surakarta: Sebelas Maret University Press

Winarno. (2012). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan : Isi, Strategi, Dan Penilaian*. Jakarta: PT Bumi Aksara

URGENSI PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PEMBELAJARAN PPKN

Anggi Agustin
PPKn Pascasarjana UNS, Surakarta
anggi.agustin@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Pendidikan karakter merupakan upaya yang paling penting untuk membentuk kepribadian peserta didik. Melalui pendidikan karakter pula, dapat dilaksanakan penanaman niali-nilai moral pada peserta didik yang semakin lama semakin luntur menunjukkan hilangnya nilai-nilai kepribadian luhur bangsa Indonesia. Pendidikan karakter sangat erat kaitannya dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan inilah diharapkan mampu mengimplemetasikan pendidikan karakter secara menyeluruh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menggunakan studi dokumen/ analisis dokumen yang terkait dengan pendidikan karakter dan pembelajaran PPKn. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dan hasilnya berupa narasi kualitatif guna menemukan urgensi pendidikan karakter melalui pembelajaran PPKn. Hasil penelitian ini yakni strategi yang dapat dilaksanakan oleh guru dalam menerapkan pendidikan karakter melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan antara lain: (1) guru memahami dengan baik mengenai konsep dan indikator karakter yang hendak diinternalisasikan kepada peserta didik yang diwujudkan dalam silabus dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), (2) guru mengembangkan pembelajaran aktif dengan menggunakan metode-metode pembelajaran untuk menanamkan nilai berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif, (3) guru sebagai teladan bagi siswa dalam menginternalisasikan nilai-nilai berbasis karakter.
Kata kunci : *pendidikan karakter, pendidikan kewarganegaraan*

PENDAHULUAN

Pendidikan karakter merupakan isu yang sangat penting dalam dunia pendidikan dewasa ini, berkaitan dengan fenomena degradasi moral yang terjadi ditengah-tengah masyarakat maupun di lingkungan pemerintah yang semakin meningkat dan beragam. Kriminalitas, ketidak adilan, korupsi, kekerasan pada perempuan dan anak, pelangggaran HAM, menjadi bukti nyata bahwa telah terjadi krisis jati diri dan karakteristik pada bangsa Indonesia. Budi pekerti luhur, kesantunan, dan keramahan yang dijunjung tinggi dan menjadi budaya bangsa Indonesia seakan-akan menjadi asing dan jarang ditemui di tengah-tengah masyarakat. Karakter masyarakat yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak

usia dini, karena usia dini merupakan masa "emas" namun "kritis" bagi pembentukan karakter seseorang.

Munculnya gagasan program pendidikan karakter di Indonesia, dikarenakan selama ini proses pendidikan dirasa belum mampu membangun manusia Indonesia yang berkarakter. Hal ini terbukti dari beberapa kasus yang menyeret petinggi-petinggi negara yang merupakan lulusan dari lembaga pendidikan tinggi yang pandai dan mahir, berotak cerdas, namun tidak memiliki karakter kepribadian yang kuat bahkan cenderung amoral. Bahkan terdapat pula pakar-pakar bidang moral maupun bidang agama yang dalam kesehariannya mengajarkan tentang kebaikan namun perilakunya tidak sesuai dengan ilmu yang diajarkannya. Sejak kecil anak-anak diajarkan menghafal tentang bagusnya sikap jujur, berani, tanggungjawab, kerja keras, dan jahatnya kecurangan. Namun, nilai-nilai tersebut hanya diujikan sebatas pengetahuan diatas kelas dan belum terinternalisasi ke dalam diri siswa.

Pendidikan karakter bukanlah sebuah proses menghafal materi soal ujian, dan teknik-teknik menjawabnya. Pendidikan karakter memerlukan pembiasaan. Pembiasaan untuk berbuat baik, berlaku jujur, malu berbuat curang, malu bersikap malas, malu lingkungannya kotor dan lainnya. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan dalam melaksanakan pendidikan karakter disekolah adalah mengoptimalkan pembelajaran materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sangat strategis dalam mewujudkan pembentukan karakter siswa. PPKn merupakan sarana menimba pengetahuan dalam aspek kenegaraan (aspek kognitif), sebagai sarana perwujudan norma serta nilai moral untuk membentuk sikap (aspek afektif), yang berperan dalam mengendalikan perilaku (aspek psikomotorik) sehingga tercipta kepribadian manusia seutuhnya dan mampu menjadi warga negara yang baik (*smart and good citizen*).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif, karena menunjukkan adanya deskripsi terhadap urgensi pendidikan karakter melalui pembelajaran PPKn. Sutopo (2002: 110) menyatakan bahwa

"penelitian deskriptif merupakan tigkat kedua, yang merupakan pengembangan lanjut dari penelitian eksploratif. Peneliti mulai memprediksi variabel-variabel yang terlibat". Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif ialah metode yang memberikan gambaran secara jelas dan rinci tentang situasi yang terjadi saat sekarang berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

Metode kualitatif yang digunakan adalah studi dokumen yang terkait dengan pendidikan karakter dan pembelajaran PPKn. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dan hasilnya berupa narasi kualitatif guna menemukan urgensi pendidikan karakter melalui pembelajaran PPKn.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep tentang Pendidikan Karakter

Istilah karakter dihubungkan dengan istilah etika, ahlak, dan atau nilai dan berkaitan dengan kekuatan moral, berkonotasi "positif" bukan netral. Karakter adalah nilai-nilai yang melandasi perilaku manusia berdasarkan norma agama, kebudayaan, hukum/konstitusi, adat-istiadat, dan estetika. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai perilaku (karakter) kepada warga sekolah yang meliputi pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi insan kamil (Tim Pendidikan Karakter, 2010). Oleh karena itu Pendidikan Karakter secara lebih luas dapat diartikan sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya sebagai anggota masyarakat, dan warga negara yang religius, nasionalis, produktif, dan kreatif.

Konsep tersebut harus disikapi secara serius oleh pemerintah dan masyarakat sebagai jawaban dari kondisi riil yang dihadapi bangsa Indonesia akhir-akhir ini yang ditandai dengan maraknya tindakan kriminalitas, memudarnya nasionalisme, munculnya rasisme, memudarnya toleransi beragama serta hilangnya religiusitas dimasyarakat, agar nilai-nilai budaya bangsa yang telah memudar

tersebut dapat kembali membudaya ditengah-tengah masyarakat. Salah satu upaya yang dapat segera dilakukan adalah memperbaiki kurikulum dalam sistem pendidikan nasional yang mengarahkan pada pendidikan karakter secara nyata. Membangun karakter bangsa sangat tergantung kepada bangsa itu sendiri. Bila bangsa tersebut memberikan perhatian yang cukup untuk membangun karakter maka akan terciptalah bangsa yang berkarakter. Pembangunan karakter yang paling efektif dan berkesinambungan yakni melalui pendidikan, yang kita kenal hari ini dengan istilah pendidikan karakter. Pendidikan merupakan media paling sistematis dan efektif untuk memperkuat *character building* (Ngainun, 2012: 24).

Di dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebenarnya pendidikan karakter menempati posisi yang penting, hal ini dapat kita lihat dari tujuan pendidikan nasional yang menyatakan bahwa: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."Strategi Pendidikan Karakter melalui pembelajaran PPKn

Pendidikan karakter tidak bisa dijadikan terobosan apalagi bersifat instan atau seketika. Pembentukan karakter yang mantap tidak muncul hanya dilakukan di sekolah. Namun, demikian pendidikan karakter dapat dilakukan di sekolah dengan mensosialisasikan dan melakukan karakter utama seperti solidaritas, toleransi, penghargaan, kejujuran, tanggung jawab, dalam masyarakat yang multikultural yang mencintai Identitas Nasional yang diperoleh dari pemahaman dan komitmenya pada ide-ide demokrasi seperti martabat manusia, keadilan dan persamaan. Sebagai anggota masyarakat siswa berkembang baik berdasar etnisitas dan identitas nasional memiliki perspektif global dan mengidentifikasi sebagai warganegara yang baik dan merasa jadi komunitas dunia.

Menurut Lickona melalui Khoiruddin Bashori (2010) terdapat 11 prinsip agar pendidikan karakter dapat berjalan efektif sebagai berikut: (1) kembangkan

nilai-nilai etika inti dan nilai-nilai kinerja pendukungnya sebagai pondasi karakter yang baik, (2) definisikan 'karakter' secara komprehensif yang mencakup pikiran, perasaan, dan perilaku, (3) gunakan pendekatan yang komprehensif, disengaja, dan proaktif dalam pengembangan karakter, (4) ciptakan komunitas sekolah yang penuh perhatian, (5) beri siswa kesempatan untuk melakukan tindakan moral, (6) buat kurikulum akademik yang bermakna dan menantang yang menghormati semua peserta didik, mengembangkan karakter, dan membantu siswa untuk berhasil, (7) usahakan mendorong motivasi diri siswa, (8) libatkan staf sekolah sebagai komunitas pembelajaran dan moral untuk berbagi tanggung jawab dalam pendidikan karakter dan untuk mematuhi nilai-nilai inti yang sama dalam membimbing pendidikan siswa, (9) tumbuhkan kebersamaan dalam kepemimpinan moral dan dukungan jangka panjang bagi inisiatif pendidikan karakter, (10) libatkan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam upaya pembangunan karakter, (11) evaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai pendidik karakter, dan sejauh mana siswa memanifestasikan karakter yang baik.

Untuk membangun karakter menurut Soedarsono, (2009: 37) tidak mungkin hanya dengan diajarkan akan tetapi harus melalui empat koridor yang dijalankan sepanjang berlangsungnya kurikulum, yaitu:

1. Menginternalisasikan nilai moral dari luar yang dipadukan dengan nilai-nilai dari dalam;
2. Memberitahukan apa yang boleh dan tidak boleh dipahami sehingga peserta didik dengan senang hati akan melakukan yang boleh dan meninggalkan yang tidak boleh;
3. Membentuk kebiasaan yang harus selalu dipantau; dan,
4. Mendapat suri teladan dari guru secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Melalui PPKn selain substansi dari materi-materi pembelajaran/kognitif, guru juga diharapkan mampu mengembangkan pembelajaran menuju ke ranah afektif serta psikomotor. Guru tidak hanya sebagai

orang yang melakukan *transfer of knowlegde* tetapi guru sebagai model yang pantas untuk ditiru siswa dan sebagai orang yang mampu melakukan *transfer of value.*

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara yang berkarakter, cerdas, dan terampil yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Tiga kompetensi yang harus diperhatikan guru dalam PPKn yang mampu mengotrol kebijakan pemerintah, yaitu (1) peserta didik mampu berpikir kritis, rasional dan kreatif, dalam merespon isu-isu Kewarganegaraan, (2) peserta didik mampu berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan (3) peserta didik mampu membentuk diri berdasakan kepada karakter-karakter positif masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia yang demokratis.

Sejalan dengan tujuan PPKn, aspek-aspek kompetensi yang hendak dikembangkan dalam Pembelajaran PPKn mencakup pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) yang menyangkut berbagai teori dan konsep politik, hukum, dan moral, keterampilan kewarganegaraan (*civic sklils*), meliputi keterempilan intelektual (*intelectual skills*), keterampilan berpartisipasi (*participatory skills*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) ini merupakan dimensi yang paling substansif dan essensial dalam pembelajaran PPKn, karena dengan menguasai pengetahuan kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan akan membentuk watak/karakter, sikap dan kebiasaan hidup sehari-hari yang mencerminkan warga negara yang baik. Misalnya, religius, jujur, adil, demokratis, menghargai perbedaan, menghormati hukum, menghormati HAM, memiliki semangat kebangsaan yang kuat, rela berkorban dan sebagainya.

Untuk mewujudkan pendidikan PPKn sebagai bagian dari pendidikan karakter yang mengandung moral, nilai, demokrasi serta Pancasila, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan guru PPKn, yakni sebagai berikut:

1. Dalam pembelajaran PPKn sebaiknya dilakukan dengan pendekatan komprehensif, baik komprehensif dalam isi, metode, maupun dalam keseluruhan

proses pendidikan. Isi pendidikan PPKn hendaknya meliputi semua permasalahan yang berkaitan dengan pilihan nilai pribadi sampai nilai-nilai etika yang bersifat umum. Selain itu, guru PPKn juga perlu memahami dengan baik mengenai konsep dan indikator karakter yang hendak diinternalisasikan kepada peserta didik supaya guru PPKn dapat membuat silabus dan RPP dengan baik sehingga dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif.

2. Metode pembelajaran PPKn yang digunakan oleh guru PPKn, harus mengembangkan pembelajaran aktif dengan menggunakan banyak metode belajar seperti penanaman nilai melalui studi pustaka, klarifikasi nilai melalui mengamati/mengobservasi, analisis nilai melalui pemecahan masalah/kasus, maupun diskusi kelas untuk menanamkan nilai berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif.
3. Guru PPKn hendaknya menjadi model atau contoh bagi peserta didik sebagai guru yang berkarakter. Jadi dalam setiap sikap dan tindakan guru PPKn harus menggambarkan karakter yang diinternalisasikan kepada peserta didiknya.

Untuk mewujudkan PPKn sebagai bagian dari pendidikan karakter maka harus menciptakan kultur sekolah yang kondusif bagi pengembangan karakter peserta didik. Sehingga, kultur sekolah yang berupa norma-norma, nilai-nilai, sikap, harapan-harapan, dan tradisi yang ada di sekolah yang telah diwariskan dan dipegang bersama yang mempengaruhi pola pikir, sikap, dan pola tindakan seluruh warga sekolah. Karena kultur sekolah yang positif dan sehat akan berdampak pada motivasi, prestasi, produktivitas, kepuasan serta kesuksesan siswa dan guru.

KESIMPULAN

Upaya pembentukan karakter bangsa bukanlah upaya yang mudah dan dengan cepat dapat dilakukan. Tetapi dengan upaya yang sungguh-sungguh dan meliputi berbagai aspek serta dibutuhkan kerjasama antar komponen masyarakat. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah salah satu upaya serius yang dilakukan pemerintah melalui penyusunan kurikulumnya yang menitikberatkan tidak hanya pada kecerdasan intelektual juga namun lebih menekankan pada upaya

pembentukan karakter siswa (*character building*). Dengan terwujudnya pembelajaran PPKn yang terpadu dan menyeluruh maka penyelenggaraan pendidikan karakter yang dilakukan sekolah dapat berhasil dan membentuk bangsa Indonesia yang berbudaya dan beradab. Satuan Pendidikan terutama Guru hendaknya bersungguh-sungguh dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional agar pendidikan karakter yang terpadu dalam PPKn dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi pembentukan budaya perilaku bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Damayanti, Deni. 2014. *Panduan Implementasi Pendidikan Karakter Di Sekolah*. Yogyakarta : Araska.

Daryanto., Darmiyatun, S. 2013. *Impelementasi Pendidikan Karakter Di Sekolah*. Yogyakarta : Gava Media.

Gunawan, Heri. 2012. *Pendidikan Karakter : Konsep Dan Implementasi*. Bandung : Alfabeta.

Khoiruddin Bashori. 2010. *Menata Ulang Pendidikan Karakter Bangsa*. Media Indonesia.com, diakses pada tanggal 18 November 2017.

Naim, Ngainun. 2012. *Character Building*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Soedarsono, S. 2009. *Karakter Mengantar Chicago Bangsa Dari Gelap Menuju Terang*. Jakarta : Alex Media Komputindo.

Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press.

Tim Pendidikan Karakter, 2010. *Pendidikan Karakter di SMP*, Kementerian Pendidikan Nasional.

Artikel Jurnal:

Abidinsyah. *Urgensi Pendidikan Karakter Dalam Membangun Peradaban Bangsa Yang Bermartabat*. Jurnal Socioscientia. Februari 2011, Volume 3 Nomor 1.

Nur Ainiyah. *Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan*. Jurnal Al-Ulum Volume. 13 Nomor 1, Juni 2013 Hal 25-38.

PENGUATAN KOMPETENSI GURU PPKN DI ABAD 21 UNTUK PEMBENTUKAN SISWA SEBAGAI WARGA NEGARA MUDA YANG BAIK

Primandha Sukma Nur Wardhani
Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
Primandhas@gmail.com

ABSTRAK

Guru merupakan salah satu tenaga kependidikan yang mempunyai peran penting sebagai salah satu penentu keberhasilan tujuan pendidikan, karena guru yang langsung bersinggungan dengan siswa untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien yang muaranya akan menghasilkan lulusan siswa yang diharapkan menjadi generasi penerus bangsa. Guru PPKn di abad 21 merupakan salah satu guru yang memiliki peran yang sangat penting untuk membentuk siswa menjadi warga negara muda yang baik. Guru PPKn yang profesional harus memiliki empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dari keempat kompetensi yang harus dimiliki guru tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena keempat-empatnya merupakan komponen yang terintergrasi dalam kinerja guru sebagai pengajar yang profesional. Guru PPKn diharapkan tidak hanya transfer pengetahuan, tetapi harus bisa membentuk perilaku siswa yang berbudi pekerti luhur sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar menjadi warga negara muda yang baik. Metode yang digunakan adalah studi literatur yang didukung oleh jurnal yang relevan. Penguatan kompetensi guru PPKn di abad 21 harus terus ditingkatkan mengingat guru PPKn dituntut untuk menjadi guru yang bisa membentuk siswa menjadi warga negara muda yang baik dan dapat memiliki moral yang baik. Untuk membentuk siswa menjadi warga negara muda yang baik dan memiliki moral yang baik tidaklah mudah karena perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat memiliki dampak positif dan negatif. Memberdayakan warga negara muda melalui pendidikan agar mampu berperan aktif dalam sistem pemerintahan yang demokratis saat mereka dewasa nanti. Oleh karena itu, guru PPKn harus terus memperkuat kompetensi-kompetensi yang ada dan selalu merasa ingin ditingkatkan lagi kompetensi yang belum maksimal agar dapat membentuk siswa menjadi warga negara muda yang baik. Simpulan penguatan kompetensi pedagogik melalui MGMP, UKG, kompetensi sosial dapat berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan siswa, wali murid dan masyarakat, kompetensi kepribadian guru jadi teladan, kompetensi profesional dengan guru rajin membuat penelitian.

Kata kunci : *Kompetensi guru, Guru PPKn, Warga Negara muda*

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara Indonesia sudah merdeka dari Tahun 1945, akan tetapi kalau kita lihat apakah tujuan negara tersebut sudah tercapai dengan baik? Tentunya masih belum. Hal ini bisa kita lihat dari kualitas pendidikan yang masih tertinggal dengan negara lainnya di Asia. Menurut survei *Political and Economic Risk Consultant*

(PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan *The World Economic Forum Swedia* (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang di survei di dunia.

Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah itu juga ditunjukkan data Balitbang (2003) bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya delapan sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori *The Primary Years Program (PYP)*. Dari 20.918 SMP di Indonesia ternyata juga hanya delapan sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori *The Middle Years Program (MYP)* dan dari 8.036 SMA ternyata hanya tujuh sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori *The Diploma Program (DP).* Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah efektifitas, efisiensi dan standardisasi pengajaran (Mulyasa, 2005: 5).

Berdasarkan data di atas sudah saatnya pendidikan di Indonesia segera untuk di tingkatkan kualitasnya supaya tidak tertinggal dengan negara lainnya. Pendidikan sebagai salah satu pilar penting di era global untuk menghadapi tantangan ke depan yang semakin kompetitif maka pendidikan selayaknya sudah menjadi perhatian utama yang harus dibenahi, salah satunya adalah membenahi kualitas guru. Guru sebagai salah satu komponen yang penting untuk perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia.

Pada dasarnya tanggung jawab untuk memperbaiki kualitas pendidikan diantaranya ada pada guru PPKn, karena guru PPKn merupakan guru yang memiliki tugas yang besar untuk perbaikan moral siswa yang sekarang ini mengalami degradasi moral, apabila moral siswa baik perilaku siswa akan bisa amanah untuk menjalankan pengetahuan yang diperoleh pada mata pelajaran lainnya. Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai pilar yang terdepan dalam perbaikan kualitas pembelajaran yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai warga negara yang baik terutama membentuk siswa menjadi warga negara muda yang baik. Untuk mewujudkan warga negara muda yang baik guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berperan penting untuk hal tersebut,

karena salah satu tujuan adanya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah membentuk pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik pada warga negara. Akan tetapi, tantangan ke depan di era globaliasi ini tidak mudah, karena pengaruh dari luar terhadap perilaku siswa juga besar. Apabila guru tidak mampu menghadirkan pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai dengan perubahan yang terjadi maka bisa saja siswa tidak termotivasi untuk belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Guru PPKn di abad 21 merupakan salah satu guru yang memiliki peran yang sangat penting untuk membentuk siswa menjadi warga negara muda yang baik. Guru PPKn yang profesional harus memiliki empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dari keempat kompetensi yang harus dimiliki guru tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena keempat-empatnya merupakan komponen yang terintergrasi dalam kinerja guru sebagai pengajar yang profesional. Guru PPKn diharapkan tidak hanya transfer pengetahuan, tetapi harus bisa membentuk perilaku siswa yang berbudi pekerti luhur sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar menjadi warga negara muda yang baik.

Penguatan kompetensi guru PPKn di abad 21 harus terus ditingkatkan mengingat guru PPKn dituntut untuk menjadi guru yang bisa membentuk siswa menjadi warga negara muda yang baik dan dapat memiliki moral yang baik. Untuk membentuk siswa menjadi warga negara muda yang baik dan memiliki moral yang baik tidaklah mudah karena perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat memiliki dampak positif dan negatif. Memberdayakan warga negara muda melalui pendidikan agar mampu berperan aktif dalam sistem pemerintahan yang demokratis saat mereka dewasa nanti. Oleh karena itu, guru PPKn harus terus memperkuat kompetensi-kompetensi yang ada dan selalu merasa ingin ditingkatkan lagi kompetensi yang belum maksimal agar dapat membentuk siswa menjadi warga negara muda yang baik.

Perumusan masalahnya adalah penguatan kompetensi guru PPKn di abad 21 untuk pembentukan siswa sebagai warga negara muda yang baik. Tujuannya untuk

mengetahui penguatan kompetensi guru PPKn di abad 21 untuk pembentukan siswa sebagai warga negara muda yang baik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah adalah studi literatur dari berbagai buku pustaka yang didukung oleh jurnal yang relevan. Disebut penelitian kepustakaan karena data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya (Harahap, 2014: 68). Menurut Nasution (1988: 126) analisis data adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Model analisis data yang digunakan adalah model analisis induktif. Patton (Poerwandari, 2005) menjelaskan bahwa melalui analisis induktif akan memunculkan berbagai macam tema, kategori dan pola hubungan di antara kategori tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji penguatan kompetensi guru PPKn di abad 21, pembentukan siswa sebagai warga negara muda yang baik dari berbagai tulisan dan hasil penelitian yang terkait dengan yang didapatkan baik dari peraturan perundang-undangan, buku, maupun jurnal nasional dan hasil penelitian yang relevan. Setelah dianalisis, maka tersusunlah gagasan pikiran tentang Penguatan Kompetensi Guru PPKn di Abad 21 untuk Pembentukan Siswa sebagai Warga Negara Muda yang Baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kompetensi Guru

Guru yang profesional pada umumnya sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yaitu memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Hamalik (2002: 35), menjelaskan bahwa: Kompetensi guru merupakan alat seleksi penerimaan guru perlu ditentukan secara umum kompetensi apakah yang perlu dipenuhi sebagai syarat agar seseorang dapat diterima menjadi guru. Dengan adanya syarat sebagai kriteria penerimaan calon guru, maka akan

terdapat pedoman bagi administrator dalam memilih mana guru yang diperlukan untuk satu sekolah. Asumsi yang mendasaari kriteria ini adalah bahwa setiap calon guru yang memenuhi syarat tersebut diharapkan akan berhasil mengemban tugasnya selaku pengajar di sekolah.

Di dalam menciptakan guru-guru yang memenuhi kualifikasi profesional, pada masa sekarang, pemerintah telah menciptakan program-program pendidikan profesi yang dilaksanakan terhadap seluruh guru-guru di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja guru dalam proses pembelajaran.

Sebagian ahli memandang bahwa mengajar adalah sebuah seni, bukan ilmu. Karena tidak semua orang berilmu bisa menjadi guru yang piawai dalam hal mengajar. Oleh karena itu, mengajar merupakan sebuah pekerjaan yang termasuk pekerjaan profesional, karena di butuhkan keahlian khusus yang di dapat melalui pendidikan di lembaga tertentu.

Berdasarkan pendapat diatas, menurut penulis, Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang profesional, bukan hanya terpaku pada keahlian dan kemahiran, namun juga mencakup perilaku, moralitas, dan panggilan jiwa untuk mengabdi dan menjadi guru yang seutuhnya. Guru PPKn yang profesional di abad 21 harus mampu memberikan teladan yang nyata tidak hanya teori saja.

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, baik di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun di Perguruan Tinggi (PT), merupakan mata pelajaran yang bertujuan atau membicarakan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, disebut juga sebagai mata pelajaran pembentukan kepribadian, menurut Zamroni, sebagaimana dikutip Sofhian dan Asep Sahid (2011: 9), "Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru, bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat".

Sebagai sebuah mata pelajaran PPKn juga menuntut profesionalisme guru dalam mengajar karena guru dituntut untuk menguasai seluruh aspek kompetensi, baik pedagogik, sosial, kepribadian maupun kompetensi profesional, namun, masih banyak ditemukan guru yang mengajar mata pelajaran PPKn tidak berkompeten dalam melaksanakan pembelajaran, atau lebih tepatnya tidak profesional yang paling umum ditemui adalah ketidaksesuaian rumpun ilmu, artinya guru yang mengajar PPKn tidak berasal dari lembaga yang khusus mendidik calon guru-guru PPKn seharusnya jika ingin menciptakan pembelajaran yang baik, dan mendapatkan guru yang profesional dalam mengajar, perekrutan guru tidak didasarkan suka atau tidak suka, atau karena alasan yang bersifat subjektif, melainkan atas dasar yang objektif, yaitu kompetensi yang berlaku secara umum untuk semua calon guru.

Hamalik (2002: 35) menjelaskan bahwa: Kompetensi sangat diperlukan untuk melaksanakan fungsi profesi. Dalam masyarakat yang kompleks seperti masyarakat modern dewasa ini, guru yang professional harus mampu membuat keputusan yang tepat dan kemampaun membuat kebijaksanaan yang tepat. Untuk itu diperlukan banyak keterangan yang lengkap agar jangan menimbulkan kesalahan yang akan menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat. Kesalahan dapat menimbulkan akibat yang fatal dan malapetaka yang dahsyat. Itu sebabnya kebijaksanaan, pembuatan keputusan, perencanaan, dan penanganan harus ditangani oleh para ahlinya yang memiliki kompetensi profesional dalam bidangnya.

Guru merupakan komponen dalam belajar mengajar yang berinteraksi langsung dengan peserta didik, sehingga dituntut profesional. Jika memperhatikan beberapa karakteristik profesional guru, maka sudah sewajarnya bahwa guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang profesional harus didukung oleh beberapa kompetensi sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, diantaranya:

1. Guru PPKn harus memiliki kompetensi pedagogik

   Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi: pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum/silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

   Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Jika dikaitkan dengan strategi mengajar, seorang pengajar memiliki keyakinan filosofis tentang pengajaran yang memperhatikan latar belakang pengetahuan dan pengalaman, situasi kepribadian dan lingkungan sebagai tujuan pembelajaran yang melibatkan siswa dan guru.

   Guru PPKn harus bisa melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dicapai. Menggunakan metode pembelajaran yang kontekstual sesuai dinamika yang terjadi pada lingkungan siswa. Guru PPKn tidak hanya teori tetapi mencoba semaksimal mungkin untuk memberikan pembelajaran yang memberikan contoh yang relevan sesuai dengan kondisi yang ada di sekitar kita.

2. Guru PPKn harus memiliki kompetensi kepribadian, yaitu: memiliki kepribadian yang baik mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri, mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

   Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran yang memiliki tugas mulia untuk membentuk kepribadian warga negara yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk membentuk kepribadian yang baik maka dibutuhkan guru yang memiliki kepribadian yang baik. Guru yang memiliki kepribadian yang baik berperan penting untuk memberikan contoh yang baik terhadap siswa,

sehingga siswa akan tertarik untuk mengikuti pribadi yang baik tersebut. Apabila guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tidak memiliki kepribadian yang baik, tentunya menjadi permasalahan tersendiri yang dapat menghambat semangat belajar siswa karena gurunya kurang bisa memberikan contoh kepribadian yang baik.

3. Guru PPKn harus memiliki kompetensi sosial, yaitu kemampuan dalam hubungan dengan kemasyarakatan, sekurang-kurangnya meliputi: berkomunikasi lisan, tulisan, dan/atau isyarat, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi (TIK) secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Guru PPKn ketika di masyarakat juga harus bisa berperan dan memberikan teladan yang baik.
4. Guru PPKn harus memiliki kompetensi profesional, meliputi: menguasai materi PPKn secara baik sesuai dengan perkembangan zaman, penguasaan kurikulum, penguasaan substansi keilmuan, penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.

   Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. kompetensi profesional merupakan kemampuan yang diperlukan agar dapat mewujudkan dirinya sebagai guru profesional. Kompetensi profesional meliputi kepakaran atau keahlian dalam bidangnya yaitu penguasaan bahan yang harus diajarkannya beserta metodenya, rasa tanggung jawab akan tugasnya dan rasa kebersamaan dengan sejawat guru lainnya.

Dengan demikian, maka guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang profesional harus memiliki kompetensi-kompetensi tersebut, sehingga guru PPKn dituntut bukan hanya sebagai pemberi materi saja, tetapi juga bertanggung jawab terhadap pembinaan moral dan perilaku siswa yang sesuai dengan nilai, moral, dan norma yang berlaku di masyarakat sehingga akan terbentuk menjadi warga negara indonesia yang baik.

B. Pendidikan Pancasilda dan Kewarganegaraan

Di abad 21 ini, tugas guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) semakin berat, karena secara langsung maupun tidak langsung globaliasi akan berpengaruh pada pendidikan pada umumnya dan berdampak pada perilaku siswa pada khususnya. Globalisasi memiliki dampak positif dan negatif. Siswa pada dasarnya tidak mudah untuk menyerap dampak positif dari globalisasi dan siswa apabila tidak memiliki moral dan etika yang baik, bisa saja siswa akan lebih mudah terpengaruh dampak negatif dari globalisasi, sehingga perilaku siswa menjadi kurang baik. Tentunya dengan adanya globalisasi tugas guru PPKn untuk membentuk perilaku siswa yang baik tidak mudah. Memang di abad 21 pendidikan harus bisa menyediakan sumber daya manusia yang memiliki daya saing di abad 21.

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tidak mudah, butuh peran serta dan kerjasama yang baik dari para guru diantara guru PPKn. Sesuai dengan Pasal 3 UU No. 20 tahun 2003 menegaskan: pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Rumusan pasal 3 di atas, jelaslah bahwa pendidikan nasional memiliki tujuan jangka panjang yang sangat mulia, yaitu menjadikan peserta didik beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, di samping memiliki kompetensi sifat-sifat lain yang juga sangat penting dalam rangka pencapaian kualitas manusia yang sesuai dengan karakter jatidiri bangsa Indonesia. Poin penting yang perlu diperhatikan dari pasal diatas adalah manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak atau berkarakter mulia. Ketiga kompetensi ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Iman adalah fondasi yang mendasari ketaqwaan dan karakter seseorang. Taqwa menjadi bentuk pengamalan (aplikasi) dari keyakinan seseorang terhadap Tuhan (iman). Sedangkan karakter (akhlak) sebenarnya merupakan hasil atau

akibat dari pelaksanaan taqwa. Jadi, dapat dikatakan bahwa orang yang berkarakter seharusnya sudah memiliki iman yang kuat dan sudah memiliki ketaqwaan yang benar.

Berangkat dari hal tersebut diatas, secara formal guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki tugas yang besar untuk melaksanakan kegiatan proses pembelajaran yang efektif dan efisien yang mengarah kepada pembentukan watak dan budi pekerti generasi muda bangsa memiliki landasan yuridis yang kuat. Namun, sinyal tersebut baru disadari ketika terjadi krisis akhlak yang menerpa semua lapisan masyarakat. Tidak terkecuali juga pada siswa-siswi Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP). Untuk mencegah lebih parahnya krisis akhlak, kini upaya tersebut mulai dirintis melalui pendidikan nilai-nilai karakter. Dalam pemberian pendidikan nilai karakter di sekolah, Kementerian Pendidikan Nasional membuat kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah, antara lain; pertama, bahwa pendidikan karakter bangsa tidak diberikan berdiri sendiri sebagai suatu mata pelajaran. Kedua, pendidikan karakter bangsa diberikan secara terintegrasi dalam mata pelajaran PPKn, pendidikan agama, dan mata pelajaran lain yang relevan. Ketiga, pendidikan karakter bangsa terintegrasi ke dalam semua mata pelajaran. Kebijakan tersebut pada dasarnya sudah dijalankan sekolah akan tetapi hasil yang diperoleh pada setiap siswa masih kurang maksimal. Hal ini bisa dilihat dari kondisi yang ada di masyarakat sering terjadi hal-hal yang menyimpang dari nilai-nilai yang ada dimasyarakat, diantaranya sering ada tawuran pelajar, mencontek massal, dan siswa kurang memiliki sopan santun.

Adanya kondisi diatas tugas guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) semakin menantang, mengingat materi yang harus disampaikan tidak hanya pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) akan tetapi juga harus bisa mengajarkan pendidikan karakter pada siswa. Adanya penambahan materi tentunya akan menambah materi maupun jam pembelajaran tetapi alokasi jam pembelajaran di kelas tidak ada penambahan. Guru PPKn merupakan salah satu guru yang

bertanggung jawab terhadap penanaman nilai-nilai karakter pada siswa di sekolah. Guru PPKn dituntut bukan hanya sebagai pemberi materi saja, tetapi juga bertanggung jawab terhadap pembinaan moral dan perilaku pelajar yang sesuai dengan nilai, moral, dan norma yang berlaku di masyarakat sehingga akan terbentuk menjadi warga negara indonesia yang baik.

Pencapaian tujuan pendidikan yang berkualitas akan lebih mudah dengan mempersiapkan guru yang profesional. Guru yang profesional tentu akan lebih mengefektifkan untuk mencapai tujuan pembentukan dan pengembangan karakter siswa. Akan tetapi banyaknya kasus-kasus yang menunjukkan kegagalan pendidikan dalam membentuk karakter seseorang dikarenakan ketersediaan guru profesional belum tercapai dengan baik. Merubah paradigma bahwa guru tidak hanya sebagai pengajar yang bertugas mentransferkan ilmu pengetahuan saja tetapi juga menjadi guru sebagai pendidik bukanlah mudah oleh karena itu, perlu dikembangkan peran guru dalam mencapai tujuan pembentukan dan pengembangan karakter peserta didik.

Pada dasarnya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah mata pelajaran yang bersifat dinamis. Dalam sejarahnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) kita telah mengalami banyak sekali pergantian dan perubahan. Pada tahun 1957 muncul dengan nama Kewarganegaraan. Tahun 1961 berubah nama menjadi pelajaran *Civics.* Tahun 1968 berganti menjadi Kewargaan Negara. Tahun 1975 berubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) hingga pada kurikulum 1984. Kurikulum tahun 1994 berubah kembali menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Tahun 2004 berubah menjadi Kewarganegaraan berdasar Kurikulum 2004, 2006 menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berdasarkan Standar Isi dan 2013 menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) kembali.

Barangkali diantara mata pelajaran lainnya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang paling sering mengalami perubahan. Para guru yang sebelumnya mengajarkan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan selanjutnya akan mulai mengajarkan Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan. Merupakan peluang sekaligus tantangan bagi guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk mampu mengembangkan pembelajaran sehingga berhasil sesuai dengan visi dan misi yang diembannya.

Dalam kurikulum Standar Nasional PPKn untuk Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan bahwa visi PPKn adalah mewujudkan proses pendidikan yang terarah pada pengembangan kemampuan individu sehingga menjadi warga negara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab yang pada gilirannya mampu mendukung berkembangnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia yang cerdas dan berbudi pekerti luhur. Sedangkan misi yang diemban mata pelajaran PPKn adalah sebagai berikut:

a. Memanfaatkan kenyataan dan kecenderungan masyarakat yang semakin transparan, tuntutan, kendali mutu yang semakin mendesak dan proses demokratisasi yang semakin intens dan meluas sebagai konteks dan orientasi pendidikan demokrasi.
b. Memanfaatkan substansi berbagai disiplin ilmu yang relevan sebagai wahana pedagogis untuk menghasilkan dampa instruksional dan pengiringnya wawasan, disposisi, dan keterampilan kewarganegaraan sehingga dihasilkan desain kurikulum yang bersifat interdisipliner.
c. Memanfaatkan berbagai konsep, prinsip, dan prosedur pembelajaran yang memungkinkan para peserta didik mampu belajar demokrasi dalam situasi yang demokratis.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) bertujuan untuk mengembangkan potensi individu warga negara Indonesia sehingga memiliki wawasan, disposisi, dan keterampilan kewarganegaraan yang memadai, yang memungkinkan untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia.

Pengembangan kemampuan atau kecerdasan warga negara sebagai tujuan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) akan diwujudkan melalui pemahaman, keterampilan sosial, dan intelektual, serta

partisipasi dalam memecahkan permasalahan lingkungan. Selanjutnya, upaya pengembangan kecerdasan warga negara sebagai tujuan PPKn diorganisasi dalam kurikulum yaitu Kurikulum Standar Nasional PPKn untuk Pendidikan Dasar dan Menengah.

Adanya perubahan pada materi dan tujuan pada mata pelajaran PPKn membuat paradigma mata pelajaran PPKn berubah. Paradigma baru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berorientasi pada terbentuknya masyarakat demokratis atau lebih dikenal dengan masyarakat madani *(civil society)* (Muchson AR, 2003). Paradigma baru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berupaya memberdayakan warga negara melalui proses pendidikan agar mampu berperan serta aktif dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menjadi strategis dan mutlak bagi perwujudan masyarakat dan negara demokrasi. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa negara demokrasi dalam suatu negara hanya akan tumbuh subur apabila dijaga oleh warga negara yang baik, berbudi pekerti yang luhur sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Menurut Lativa Hartiningtyas, dkk (2016) Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru SMK Melalui Pemberdayaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Menurut Handayani (2014) peningkatan kompetensi pedagogik guru ips sekolah dasar melalui penerapan keterampilan mengajar.

C. Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang karakteristik pembinaan kompetensi kepribadian guru di SMK Negeri 9 Surakarta meliputi: Aktivitas pembinaan kompetensi kepribadian guru dilakukan oleh kepela sekolah dengan memberikan keteladanan. Untuk meningkatkan kemantapan kepribadian guru, kepala sekolah menghimbau kepada guru agar guru selalu bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan norma sosial, memiliki kebanggaan sebagai guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Untuk meningkatkan kedewasaan guru, kepala sekoleh

menghimbau agar guru selalu memiliki etos kerja sebagai guru, dan menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik.

Karakteristik Pembinaan Kompetensi Sosial Guru di SMK Negeri 9 Surakarta yang dilakukan oleh Joko Agus Pambudi tahun 2012. Hasil analisis data menunjukan bahwa pelaksanaan kompetensi sosial guru pada aspek bertindak dan bersikap obyektif terhadap siswa dalam pembelajaran yaitu guru bersikap adil dan bertindak diskriminatif dalam berinteraksi dan memberikan penilaian hasil belajar siswa, beradaptasi dengan lingkungan kelas yaitu guru peduli dengan kebersihan dan ketenangan suasana kelas, dan berkomunikasi efektif, santun dan empati dengan siswa yaitu guru memberikan teguran dan kritik yang mendidik, guru peduli dengan keadaan siswa, guru berkomunikasi menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa yaitu Bahasa Indonesia.

Hasil penelitian tentang karakteristik pembinaan kompetensi sosial guru di SMK Negeri 9 Surakarta yang dilakukan oleh Joko Agus Pambudi tahun 2012 meliputi: pembinaan kompetensi bidang sosial dilakukan oleh kepala sekolah dalam kegiatan rutin, pembinaan mencakup 3 kompetensi yaitu: bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Kepala sekolah berupaya agar guru memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.

Karakteristik Strategi Pembinaan Profesionalisme Guru di SMK Negeri 9 Surakarta yang dilakukan oleh Joko Agus Pambudi tahun 2012. Berdasarkan hasil penelitian yang terkait dengan karakteristik strategi pembinaan profesionalisme guru di SMK Negeri 9 Surakarta yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi meliputi: strategi pembinaan profesionalisme guru di SMK Negeri 9 Surakarta dibedakan 2 (dua) jenis, yaitu pembinaan internal dan pembinaan eksternal. Secara internal, strategi pembinaan profesionalisme guru di SMK Negeri 9 Surakarta dibentuk berasarkan surat keputusan kepala SMK. Pembinaan profesionalisme guru di

SMK Negeri 9 Surakarta tercermin dalam bagan struktur organisasi wakil kepala sekolah 3 bidang sumber daya manusia (SDM).

Pembinaan profesionalisme guru merupakan tanggung jawab dari kepala sekolah yang diwakili oleh wakil kepala sekolah 3 (tiga) bidang SDM. Pembinaan profesionalisme guru merupakan tugas Wakil Kepala Sekolah 3, dan merupakan tugas dalam bidang pengembangan sumber daya manusia. Secara eksternal pembinaan profesional guru dilakukan dalam wadah organisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), yang terdiri dari ketua, bendahara, sekretaris, seksi akademik, seksi penyelenggara, dan anggota.

Melalui organisasi MGMP guru dapat mengembangakan profesionalnya. Peningkatan profesional guru ditandai dengan kemampuan dalam mengelola kelas, kemampuan dalam mengelola sarana dan prasarana, dan memiliki profesional ketrampilan dalam mengembangkan materi pembelajaran.

Membaca buku-buku pendidikan, membaca dan menulis karya ilmiah, mengikuti berita aktual dari media pemberitaan, mengikuti pelatihan, mengikuti Kelompok Kerja Guru (KKG), melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), dan berpartisipasi aktif dalam organisasi profesional.

Dengan penguatan kompetensi-kompetensi guru PPKn di abad 21 melalui berbagai cara diharapkan guru dapat membentuk siswa untuk menjadi warga negara muda yang baik karena sudah mendapatkan pengalaman-pengalaman yang dapat diterapkan kepada siswa.

SIMPULAN

Salah satu guru yang bertanggung jawab terhadap penanaman nilai-nilai karakter pada siswa di sekolah adalah guru PPKn. Guru PPKn dituntut bukan hanya sebagai pemberi materi saja, tetapi juga bertanggung jawab terhadap pembinaan moral dan perilaku pelajar yang sesuai dengan nilai, moral, dan norma yang berlaku di masyarakat sehingga akan terbentuk menjadi warga negara Indonesia yang baik. Guru PPKn yang profesional harus memiliki empat kompetensi yang sudah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, yang terdiri dari

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesianal. Dari keempat kopetensi yang harus dimiliki guru tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena ke empat-empatnya merupakan komponen yang terintegarsi dalam kinerja guru sebagai pengajar yang profesional. Guru PPKn diharapkan tidak hanya *transfer khowledge*, tetapi harus bisa membentuk perilaku siswa yang berbudi pekerti yang bermoral sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Tantangan guru PPKn di abad 21 semakin berat mengingat guru PPKn dituntut untuk menjadi guru yang bisa membentuk perilaku para siswa yang memiliki moral yang baik. Untuk membentuk menjadi warga negara yang memiliki moral yang baik tidak mudah karena perkembangan teknologi dan informasi (TIK) yang semakin pesat selain berdampak positif juga negatif. Apabila siswa tidak memiliki moral yang kuat tentunya siswa akan terpengaruh pada hal-hal yang negatif yang bisa merusak moral siswa. Materi mata pelajaran yang bersifat dinamis, dimana setiap saat materi mata pelajaran bisa berubah sesuai dengan kebijakan kementerian pendidikan nasional, sehingga guru PPKn harus aktif menyesuaikan materi ajarnya.

Penguatan kompetensi guru PPKn di abad 21 harus terus ditingkatkan mengingat guru PPKn dituntut untuk menjadi guru yang bisa membentuk siswa menjadi warga negara muda yang baik dan dapat memiliki moral yang baik. Untuk membentuk siswa menjadi warga negara muda yang baik dan memiliki moral yang baik tidaklah mudah karena perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat memiliki dampak positif dan negatif. Memberdayakan warga negara muda melalui pendidikan agar mampu berperan aktif dalam sistem pemerintahan yang demokratis saat mereka dewasa nanti. Oleh karena itu, guru PPKn harus terus memperkuat kompetensi-kompetensi yang ada dan selalu merasa ingin ditingkatkan lagi kompetensi yang belum maksimal agar dapat membentuk siswa menjadi warga negara muda yang baik. Penguatan kompetensi pedagogik melalui mengikuti MGMP, workshop, pelatihan-pelatihan, kompetensi sosial dapat berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan siswa, wali murid dan

masyarakat, kompetensi kepribadian guru jadi teladan, kompetensi profesional dengan guru rajin membuat penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Alwiyah Nurhayati. 2015. *Penguatan Kompetensi Guru Fisika MTS/SMP/MA/SMA Se-Kecamatan Ngaliyan melalui Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kuantitas Kontributor Jurnal Pendidikan Mipa*, DIMAS, Volume 15, Nomor 2, 135-150.

Asmani, Jamal Ma'mur. 2012. *Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah*, Yogyakarta, Diva press.

Depdikbud. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Emilia, Susanti., Dicki, Hartanto. 2015. *Peningkatan Kompetensi Guru melalui Penerapan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dalam Pendidikan Islam*, Jurnal Potensia, vol.14 Edisi 1 Januari-Juni 2015, 151-174.

E. Mulyasa. 2004. *Kurikulum Berbasis Kompentensi*, Bandung, PT Remaja Rosda Karya.

----------. 2005. *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan,* Bandung, PT Remaja Rosda Karya.

----------. 2007. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru,* Bandung, PT Remaja Rosdakarya.

Hamalik, Oemar. 2001. *Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta, Bumi Aksara.

----------. 2001. *Proses Belajar Mengajar*, Jakarta, Bumi Aksara.

Hamzah. B. Uno. 2007. *Profesi Kependidikan*, Jakarta, Bumi Aksara.

Harahap, N. 2014. *Penelitian Kepustakaan*, Jurnal Iqra,8 (1), 68-74.

Joko Agus Pambudi. 2012. *Pembinaan Kompetensi Sosial dan Kompetensi Kepribadian dalam Kerangka Profesionalisme Guru (Studi Situs Di SMK Negeri 9 Surakarta),* Artikel publikasi ilmiah.

Lanjar Utami, 2015, Pengembangan Kompetensi Profesional Guru melalui Collaborative Study Group (CSG), Prosiding seminar nasional pendidikan UNS & ispi Jawa Tengah.

Lativa Hartiningtyas., Purnomo., Hakkun Elmunsyah. 2016. *Meningkatkan Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru SMK melalui Pemberdayaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).* Seminar nasional pendidikan (snp). 79-88.

Lilies Noorjannah. 2014. *Pengembangan Profesionalisme Guru melalui Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Guru Profesional di SMA Negeri 1 Kauman Kabupaten Tulungagung,* Jurnal humanity, Volume 10, Nomor 1 dan 97-114.

M. Hasbi Ashsiddiqi. 2012. *Kompetensi Sosial Guru dalam Pembelajaran dan Pengembangannya,* TA'DIB, Vol. XVII, No. 01, 61-67.

Nasution, S. 1988. *Metode Penelitian Naturalistik kualitatif*, Bandung, Tarsito.

Nurhayati, Murniati AR, Khairuddin. 2015. *Kompetensi Profesional Guru dalam Pengelolaan Pembelajaran Bidang Studi Ips pada SMP Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh*, Jurnal Magister Administrasi Pendidikan, Volume 3, No. 3 dan 127-146.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Poerwandari, K. 2005. *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta, UI.

Sri Handayani. 2014. *Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru IPS Sekolah Dasar melalui Penerapan Keterampilan Mengajar,* Jurnal Ilmu Pendidikan Sekolah Dasar, Vol 2, No 1, 1-15.

Sudarwan Darwin. 2002. *Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*, Bandung, Pustaka Setia.

Suyanto. 2006. *Di Belantara Pendidikan Bermoral,* Yogyakarta, UNY Press.

Uzer Usman. 2006. *Menjadi Guru Profesional*, Bandung, Remaja Rosda Karya.

Wibowo, Agus. 2012. *Pendidikan Karakter Usia Dini*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Wuryandani, wuri dan Fathurrohman. 2011. *Pembelajaran PKn di Sekolah Dasar*, Yogyakarta, Nuha Litera.

Yetwirani Lampe. 2014. *Model Pengembangan Kompetensi Profesional Guru PKn Kota Palangka Raya Pasca Sertifikasi melalui MGMP,* Jurnal pendidikan ips, Volume 2, Nomor 2, 202-209.

Zuriah, Nurul. 2007. *Pendidikan Moral & Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan*, Jakarta, PT Bumi Aksara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

PENGUATAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU UNTUK MEMBENTUK WARGANEGARA YANG CERDAS MELALUI PILIHAN ISU & TEMA BARU

Machmud Al Rasyid
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
machmudalrasyid@yahoo.co.id

ABSTRAK

Kompetensi Profesional guru merupakan bagian mutlak yang harus dipunyai oleh profesi guru dan meliputi (1) penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung Mata Pelajaran PPKN; dan (2) mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif. Persoalan yang muncul di lapangan adalah "keberhentian" dalam motivasi untuk menguasai dan mengembangkan, sehingga keilmuan kewarganegaraan menjadi berhenti, dan konsekuensinya menimbulkan kejenuhan bagi siswa. Artikel ini ingin menunjukkan beberapa materi sebagai pengembangan penguasaan profesionalitas guru dalam kompetensi profesional. Metode yang dipergunakan Dalam menjawab permasalahan yang diajukan penulis menggunakan data sekunder dimana penulis melakukan riset kepustakaan (*Library Research*) dengan berbagai sumber pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhentian tersebut dapat dikurangi dengan memunculkan isu dan tema baru sesuai dengan kebutuhan kompetensi dasarnya

Kata kunci : *Kompetensi Profesional, Keberhentian Pengembangan, Isu & Tema Baru*

PENDAHULUAN

Guru pada dasarnya harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi. Kualifikasi akademik, harus memenuhi kualifikasi S1 atau D4 sesuai dengan mapel yang diampu atau bidang pendidikan SD/MI/SLB. Sedangkan kompetensi meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang terintegrasi dalam kinerja. Secara formal semua guru sudah memenuhi syarat tentang kualifikasi akademik, tetapi untuk kompetensi masih menjadi persoalan utama pendidikan di Indonesia, terbukti dari hasil Uji Kompetensi Guru menunjukkan hasil yang masih rendah, yaitu tahun 2015 rerata 56,69 (dan tertinggi adalah DIY sebesar 67,02) yang lebih baik dari tahun sebelumnya (2014) dengan rerata 47,00. Data yang lebih menarik lagi untuk menggambarkan pengetahuan (kognitif) guru - guru di Indonesia. Hasil nilai UKG di atas 60 ada 50,68%, Sekolah Dasar hanya 31,62%, SMP 43,84%, SMA 53,55% SMK 44,53% dan guru - guru SLB 42,19%. Data ini menunjukkan tidak lebih dari separuh guru - guru kita mendapat nilai lebih dari 60,

tentu data di atas menjadi evaluasi bersama baik bagi guru maupun bagi pengambil kebijakan. Data ini menggambarkan capaian kemampuan kognitif guru dalam hal pengetahuan profesional dan paedagogik[17] yang masih rendah.

Hasil UKG dengan nilai diatas 60 tersebut di atas menunjukkan bahwa yang mendapatkan nilai kurang dari 60 lebih banyak, yaitu jenjang SD 68,38 %, jenjang SMP 56,16 %, SMA 46,45 %, SMK 55, 47 %, dan SLB 57,81 %. Secara generik, maka kekuarangan tersebut juga dialami oleh guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) baik dalam kompetensi pedagogik maupun kompetensi profesional, yang dalam kesempatan ini akan ditelaah dari sisi kompetensi profesionalnya.

Atas dasar hal tersebut, maka penelaahan tentang kompetensi profesional guru PPKN, yang secara tidak langsung berbicara tentang kelemahan kompetensi profesional guru, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari persoalan guru di Indonesia pada umumnya. Harapan dari penelaahan ini adalah terbukanya wawasan dan kemungkinan untuk penguatan dan peningkatan profesional guru PPKN, yang dalam tataran yang lebih luas lagi untuk meningkatkan nasionalisme sekaligus mewujudkan eksistensi dan keberlangsungan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan yang dilengkapi dengan data lapangan melalui observasi lapangan dan pangalaman empiris guru – guru peserta Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG), maupun beberapa kali pengabdian masyarakat dalam Pelatihan-pelatihan Penyusunan Soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Berdasarkan data tersebut kemudian dilakukan analisis kualitatif untuk menjawab dan menyelesaiakan permasalahan yang ada.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

[17] Baca lebih lanjut di http://krjogja.com/web/news/read/25465/Uji_Kompetensi_Guru

1. Kompetensi Profesional Guru PPKN

Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru menyebutkan tentang Kompetensi Profesional Guru, yaitu :

Tabel 1 : Kompetensi Inti Profesional Guru Mapel PPKN

No.	Kompetensi Inti Guru	Kompetensi Guru Mata Pelajaran PPKN
1.	Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.	1.1.Memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 1.2.Memahami substansi Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), nilai dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*), dan ketrampilan kewarganegaraan (*civic skills*). 1.3.Menunjukkan manfaat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.
2..	Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.	2.1.Memahami standar kompetensi mata pelajaran yang diampu. 2.2.Memahami kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. 2.3 Memahami tujuan pembelajaran yang diampu.
3.	Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.	3.1.Memilih materi pembelajaran yang diampu sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. 3.2.Mengolah materi pelajaran yang diampu secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
4.	Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan	4.1.Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus.

	melakukan tindakan reflektif.	4.2.Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan. 4.3.Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan. 4.4.Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber.
5.	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.	5.1.Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi. 5.2.Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri.

Berdasarkan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tersebut menunjukkan bahwa kompetensi yang berkaitan dengan materi meliputi nomor 1, 2, dan 3. Sedangkan yang nomor 4 dan 5 merupakan faktor pendukung atau komplemen untuk PPKN.

Pada sisi lain Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017 mengeluarkan Silabus Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dengan Kompetensi yang Diharapkan Setelah Siswa Mempelajari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah sebagaiberikut :

Tabel 2: Kompetensi setelah mempelajari PPKn di SMP/MTs & SMA/MA

Kelas Rendah	Kelas Tinggi	SMP	SMA
Mencintai lambang garuda Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia	Berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar Negara Indonesia	Berintegritas sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Bangga sebagai bangsa Indonesia yang menghargai kewajiban dan hak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

Bekerjasama melaksanakan kewajiban dan memenuhi hak masing-masing dengan penuh percaya diri sebagai anggota keluarga dan warga sekolah	Melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggungjawab serta peduli terhadap hak yang dimilikinya sebagai anggota masyarakat	Berperan serta dalam menjaga kedaulatan Negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Repulbik Indonesia tahun 1945	Berpartisipasi aktif dalam upaya pelindungan dan penegakan hukum untuk menciptakan kedamaian di Negara Republik Indonesia
Bertanggung-jawab melaksanakan berbagai aktivitas dalam suasana kebersamaan di kehidupan yang beragam	Berperan serta dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang beragam dengan penuh percaya diri di masyarakat	Mendukung persatuan dan kesatuan dalam menyelesaikan masalah nasional	Bangga sebagai bangsa Indonesia yang mampu berperan dalam kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) dalam konteks lokal dan global
Mengenali dirinya dalam keberagaman anggota keluarga, teman di sekolah dan teman bermain di lingkungannya	Bertanggugjawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman kehidupan di masyarakat	Mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan membela kebenaran, persatuan dan kesatuan di lingkungannya	Berperan aktif dalam menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berpikir dan berperilaku positif

Berdasarkan kompetensi tersebut di atas, maka disusunlah ruang lingkup dalam kurikulumnya, yaitu :

- Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud filosofi kesatuan dalam keberagaman yang melandasi dan mewarnai harmoni kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kesepakatan final bentuk negara Republik Indonesia.

Berdasarkan kompetensi profesional yang ditentukan dalam Permendikbud Nomor 16 Tahun 2007 dan diaplikasikan pada Silabus Kurikulum 2013 yang direvisi versi 2017 menunjukkan bahwa terdapat struktur keilmuan yang belum masuk di dalam ruang lingkup, yaitu untuk kompetensi profesional yang pertama, terdiri (1.1) Memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan; dan (1.2) Memahami substansi Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), nilai dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*), dan ketrampilan kewarganegaraan (*civic skills*); dan (1.3) Menunjukkan manfaat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.

Merujuk pada pemahaman otoritatif tersebut dan kemudian dibandingkan dengan contoh-contoh soal UKG yang "hanya" setingkat untuk level persekolahan, tetapi nilai UKG nya masih rendah atau belum seperti yang diharapkan menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam kompetensi profesional masih dibawah standar. Pada sisi lain, berdasar kompetensi yang dituntut setelah mempelajari PPKN di sekolah tersebut di atas menuntut kebanggaan dan partisipasi aktif.

2. Isu dan Tema Baru

Secara teoritik Kewarganegaraan membahas tiga isu utama berkaitan dengan (1) jangkauan; (2) isi, dan (3) kadar. Jangkauan, dalam arti seberapa luas negara dapat menjangkau seluruh warganya tanpa ada eksklusi. Isi, dalam arti hak dan kewajiban. Kadar, dalam arti bukan sekedar legalitas formal, tetapi sebuah proses politik & klaim melalui gerakan-gerakan sosial yg menuntut terbukanya ruang partisipasi warga serta pemenuhan hak hukum, politik, & sosial. Kesemuanya tersebut masih dipengaruhi oleh ideologi liberal, atau komunitarian, maupun republik dan atau neo-republik. Akan tetapi secara sederhana dan garis besar lebih mudah dibedakan menjadi Liberal dan Komunitarian. Isu dan tema di bawah ini

diharapkan dapat membentuk dan membangun kebanggaan dan peningkatan kesadaran, sehingga bisa membentuk partisipasi.

2.1.Hak Menjadi Derma

Sebagai contoh, kesemua di atas diaplikasikan dalam harga minyak dalam kaitannya dengan subsidi energi, yaitu sebagai relasi antara hak dan kewajiban. Misalnya, alokasi sumberdaya dilakukan ketika persediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) menurun terhadap tingkat konsumsi, maka langkah yang dilakukan dapat berupa permintaan dibuat selaras dengan pasokan dengan cara membiarkan harga naik sampai akhirnya permintaan turun, karena ada sebagian yang tidak mampu membeli. Atau sampai titik, dimana permintaan itu sama besarnya dengan pasokan (dengan asumsi bahwa permintaan dan harga mempunyai hubungan terbalik). Atau sebaliknya, pemerintah bisa membuat permintaan menjadi setara dengan pasokan. Cara yang dipergunakan adalah menetapkan tingkat harga, dan kemudian penjualan BBM dibatasi/dijatah. Tetapi di Indonesia fluktuasi harga adalah hal yang sangat sensitif, termasuk di negara-negara lain. Artinya, subsidi apakah menjadi hak warganegara sehingga negara berkewajiban memenuhinya. Ataukah subsidi adalah kedermawanan (*charity*) dari negara, sehingga dapat memberikan dan dapat pula tidak?. Hal ini dalam pengertian antara hak dan kewajiban sebagai relasi, sehingga apabila subsidi adalah hak warganegara maka mensubsidi adalah kewajiban negara.

Sejak penerapan Paket *Structural Adjusment Program* sampai kebijakan pengetatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tiap tahunnya selama hampir dua dasa warsa terakhir, menggambarkan bahwa subsidi tampak lebih sebagai derma (*charity*) dibandingkan sebagai bagian dari relasi hak-kewajiban.

Praktek pencabutan subsidi tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Kwik Kian Gie (2016) :

> "....bahwa eksekutif maupun legislatif selalu mengatakan apabila harga minyak mentah internasional lebih tinggi dari harga minyak mentah yang terkandung dalam bensin premium, pemerintah

> Indonesia memberi subsidi kepada rakyatnya. "Subsidi" yang mereka artikan sama dengan uang tunai yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Karena jumlahnya besar, uang tunai ini tidak dimilikioleh pemerintah, sehingga APBN jebol, sehingga pemerintah harus menaikkan harga BBM jenis premium, yang selalu disebut dengan istilah BBM Bersubsidi".

2.2.Kewajiban Menjadi Kesukarelaan

Berkaitan dengan subsidi BBM yang dalam keterangan pemerintah selalu dianggap membebani APBN dan APBN bisa "jebol" sehingga secara bertahap subsidi akan dikurangi, menimbulkan pertanyaan dalam perspektif kewarganegaraan. Artinya, memberikan subsidi bagi rakyat, sebenarnya merupakan kewajiban negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Pada sisi lain, besaran subsidi terhadap BBM dan cicilan hutang & hutang pokok yang harus dibayar, justru lebih banyak cicilan hutang & pokoknya (Kompas, Rabu, 11-06-2014: hlm.15). Sehingga dapat disimpulkan, bahwa yang membebani APBN itu adalah cicilan hutang & pokoknya tersebut, sehingg bukan subsidi BBM.

Tabel 3 : Perbandingan Subsidi Energi & Cicilan Hutang

TAHUN	SUBSIDI ENERGI (Trilliun)	CICILAN HUTANG (Trilliun)	SELISIH (%)
2005	104.5	126.8	22.3
2006	94.6	156.6	62
2007	116.9	180.5	63.6
2008	223.0	192.2	-30.8
2009	138	210.4	72.4
2010	192.7	230.3	37.6
2011	192.7	240.1	47.4
2012	295.4	275.68	- 19.7
2013	346.4	350.43	4.03
2014	348.1	382.33	3.42
2015	274.7	479.12	204.4
2016	44.4	517.26	472.8

Sumber : Diolah dari Data Pokok APBN Kemenku RI & berbagai sumber

Atas dasar sikap pemerintah yang ingin mengurangi subsidi BBM, menunjukkan bahwa negara bisa menentukan sendiri *reduksi* dan *eliminasi* subsidi dengan atau tanpa peran warganegara. Hal ini bisa diartikan bahwa subsidi tidak dipandang sebagai hak, sebab hak tidak dapat direduksi apalagi dieliminasi. Sesuatu yang dapat direduksi atau dieliminasi menunjukkan bahwa sesuatu itu bersifat sukarela (*valuntaris*) dan bukan wajib (*imperatif*).

2.3.Warganegara menjadi Konsumen

Kewarganegaraan secara essensial adalah *universal suffrage*, dimana pilihan tersebut berlaku pada siapapun yang berada di dalam negara. Tetapi, semua yang *universal* pada dasarnya adalah *partikularistik*, yaitu klaim dan bertindak sebagai warga di suatu negara. Pada sisi ini akan menimbulkan kontradiksi, yaitu negara melindungi kedaulatan warganegara dengan membuat tiap warganegara setara dalam kehidupan publik dan menjamin hak-hak mereka termasuk kepemilikannya di ranah privat.

Pembedaan publik dan privat, membuat fasilitasi perlindungan, dengan membatasi campurtangan publik terhadap hubungan privat, demi melindungi hak warganegara secara privat. Oleh karena itu operasionalisasi kewarganegaraan menciptakan suatu paradoks ketika ":inferioritas natural" menjadi warganegara yang berdaulat, sehingga dapat meraih kesetaraan formal di ruang publik, tetapi menghadapi kebebasan politik dan kesetaraan menuntut negara untuk menjamin hak-hak mereka di ranah privat yang strukturnya tidak merata (Goodhart, 2005).

Atas dasar hal tersebut, maka kekuatan pasar berkontribusi besar dalam mengukuhkan "inferioritas natural" menjadi "inferioritas artifisial", yaitu transformasi status warganegara menjadi konsumen. Pasar membatasi ruang politik dengan cara membatasi ruang otoritas publik, dengan cara memindahkan aktivitas ekonomi dari kontrol otoritas politik. Artinya, pasar memungkinkan kekuatan ekonomi sebagai penyeimbang kekuatan politik, daripada sebagai pemberdayaan. Hal tersebut terjadi karena pasar adalah struktur relasi kuasa yang terdiri dari hirarki finansial dan industrial yang

sesungguhnya secara internal tidak demokratis. Oleh karena itu dalam konteks politik energi di Indonesia, pasar telah mendistorsistatus kewarganegaraan sedemikian rupa menjadi konsumen.

KESIMPULAN

Memunculkan tema atau isu baru dimungkinkan untuk menarik hasrat atau menimbulkan daya tarik, sehingga dengan daya tarik tersebut memudahkan pemahaman bagi yang sementara ini kesulitan untuk memahami, dan sekaligus mencerahkan bagi yang sudah memahami untuk ditingkatkan pada derajat aplikasi dalam dunia realitas. Pada sisi lain diharapkan dapat membentuk sikap kritis terhadap informasi maupun fenomena kebijakan publik, yang seringkali kurang dipahami secara lugas dan tepat. Harapan lain, isu dan tema baru dapat dipakai untuk mereduksi berbagai manipulasi informasi sepihak yang kurang adil dalam menjelaskan hubungan warganegara dengan negara, yaitu dalam bentuk top down.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ide tulisan ini muncul sesudah membaca buku hasil penulisan Tesis yang sudah dibukukan dan dilakukan oleh Vegitya Ramadhani Putri dengan judul buku "Denizenship: Kontestasi dan Hibridisasi Ideologi di Indonesia". Untuk itu sangat patut untuk diucapkan terimakasih, yang dapat membuka cakrawala isu-isu kewarganegaraan yang lebih populer dan terkini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Nasir, 2014, *Sejarah Sistem Fiskal Migas Indonesia*, Grasindo, Jakarta

Arif Jamali Muis, 2017, Uji Kompetensi Guru, http://krjogja.com/web/news/read/25465/Uji_Kompetensi_Guru, diakses tanggal 26 Nopember 2017

Goodhart, Michael, 2005, *Democracy as Human Rights: Freedom ans Equality in the Age of Globalization*, Rouledge, New York

Kwik Kian Gie, 2016, *Nasib Rakyat Indonesia dalam Era Kemerdekaan*, Gramedia, Jakarta

Rama Pratama, tt, *Utang Negara Dihapus atau Dikelola : Analisis Politik Kebijakan Utang Negara Masa Pemerintahan SBY*, BeningCitra, Jakarta

Vegitya Ramadhani Putri, 2012, *Denizenship: Kontestasi dan Hibridisasi Ideologi di Indonesia*, PolGov, Yogyakarta

Yenny Sucipto, dkk., 2015, *APBN Konstitusional, Prinsip dan Pilihan Kebijakan*, Galang Press, Yogyakarta

Yusuf Wibisono, dkk., (Eds.), 2016, *(Mimpi) Anggaran Untuk Rakyat Miskin: Arah dan Strategi Pengelolaan APBN dari Era Orde Baru Hingga Era Reformasi*, IDEAS – Indonesia Development and Islam Studies, Jakarta

PENDIDIKAN KEBANGSAAN MENURUT KI HAJAR DEWANTARA SEBAGAI UPAYA DALAM MENGEMBANGKAN KURIKULUM PPKN

Christmas Astriani
Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta
astri_koe@yahoo.com

ABSTRAK

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran strategis menyiapkan warganegara yang memiki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, seperti yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003. Maraknya permasalahan yang muncul di kalangan anak dan sistem ujian nasional menunjukkan belum optimalnya fungsi pendidikan. Tampaknya perlu adanya strategi untuk mengembangkan kurikulum sekolah agar tujuan dan fungsi pendidikan nasional dapat tercapai dengan baik. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan kebangsaan menjadi inspirasi untuk memberikan masukan dalam mengolah kurikulum sekolah sehingga akan muncul kurikulum sekolah yang mengusung nilai-nilai kebangsaan. Berdasarkan ulasan singkat di atas, makalah ini bertujuan memberikan gambaran pengelolaan kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang berkebangsaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari buku karya Ki Hajar Dewantara sebagai sumber utama, dan dilengkapi dengan jurnal ilmiah dan buku tentang pendidikan kebangsaan. Hasil dari pembahasan artikel ini adalah pendidikan kebangsaan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah memberikan bekal kepada anak untuk dapat berperan sebagai individu, sebagai warganegara; dan sebagai warga dunia, sehingga mampu mewujudkan keselamatan dan kebahagian untuk dirinya dan tertib damai untuk masyarakatnya. Pendidikan kebangsaan terintegrasi dalam semua pelajaran untuk lebih optimalnya. Dari pemaparan hasil penelitian di atas maka dapat disarankan perlunya pemahaman dan kerjasama semua pihak.

Kata kunci: pendidikan kebangsaan, Ki Hajar Dewantara, kurikulum ppkn

PENDAHULUAN

Remaja dan permasalahannya sudah banyak kita semua ketahui. Pada jam-jam sekolah tampak beberapa remaja kebut-kebutan di jalan raya, sambil membawa senjata tajam dan tawuran dengan kelompok remaja yang lain atau orang lain tanpa tahu apa yang menjadi penyebabnya. Yang terakhir terdengar santer di kota Yogyakarta dan sekitarnya adalah *klitih. Klitih* adalah aksi remaja yang ugal-ugalan dan menciptakan kerusuhan di jalan pada malam atau dini hari. Remaja ini akan melakukan pemukulan kepada siapa saja yang ditemuinya di jalan, tanpa harus punya sebab dan alasan untuk melakukannya (tribunnews.com, 2017). Banyak

orang tua dan masyarakat menjadi resah. Banyak pihak berusah mencari tahu ada apa di balik semua kejadian yang menimpa remaja saat ini.

Kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Nasional juga pernah diberitakan sebagai perilaku tidak jujur yang dilakukan beberapa guru (liputan6: 2016). Dikatakan bahwa guru mempunyai kekhawatiran bila nilai ujian nasional kurang baik maka guru dan sekolah akan memiliki kredibilitas yang kurang baik. Hal ini memberikan contoh yang kurang baik terhadap siswa sehingga sangat mudah ditiru. Ditambahkan bahwa nilai ujian nasional pada tingkan pendidikan dasar digunakan sebagai salah satu alat untuk mendaftarkan diri pada jenjang sekolah berikutnya sehingga menambahkan kekhawatiran anak untuk mencari nilai setinggi-tingginya.

Belum lagi kita semua dapat melihat secara jelas ketika para elite politik saling memojokkan satu dengan yang lain, saling ancam, saling sindir atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Para elite politik ini telah mengabaikan etika berpolitik dan membenarkan segala macam cara untuk mewujudkan tujuan pribadinya (antaranews, 2008). Mudahnya media komunikasi dewasa ini membuat apa yang para elite politik lakukan menjadi semakin mudah diakses masyarakat luas. Masyarakat serasa diberikan contoh langsung apa yang terjadi dan bagaimana cara penyelesaiannya. Sementara di lain pihak masyarakat diberikan pemahaman tentang pentingnya berdiskusi dalam perbedaan pendapat. Dengan demikian muncul kesenjangan antara apa yang dilihat dengan apa yang diajarkan.

Masih ditambah lagi beberapa pertikaian yang diberitakan berkaitan dengan pluralisme Indonesia (Herawati, 2016). Dimana agama, budaya, suku, dan ras sangat beragam di Indonesia sehingga membuka peluang untuk terjadinya konflik antar masyarakat. Bisa kita saksikan di banyak media massa perang antar suku di Waimena, pembakaran gereja, atau konflik etnis Tionghoa. Sementara pengetahuan dan pemahaman yang selalu dibangun adalah Indonesia sebagai negara multi etnis dan budaya dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan media pemersatu bangsa.

Dari beberapa kasus yang terjadi di atas maka muncul pertanyaan tentang bagaimana kita memberikan makna, apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan jalan terbaik. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 37 ayat (1) menjelaskan bahwa "Pendidikan Kewarganegaraan

dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air". Dari tujuan tersebut dapat diartikan bagaimana sekolai yang dijelaskan mampu mewujudkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam kondisi yang terjadi seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hajar Dewantara memiliki pemikiran tentang pengajaran kebangsaan yang disampaikan pada tahun 1940an. Dibawah ini akan disampaiakn pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pengajaran kebangsaan sebagai upaya mengembangkan kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mewujudkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Zed (2004: 54) menuliskan bahwa riset kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini diambil dari berbagai literatur kepustakaan yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan studi kepustakaan.

Literatur utama yang digunakan dalam penulisan ini adalah *Buku karya Ki Hadjar Dewantara I: Pendidikan,* beberapa buku tentang pengembangan kurikulum , serta dilengkapi dengan jurnal. Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu memberikan analisis terhadap data yang diperoleh, mengorganisasikan data, kemudian disusun untuk menjawab pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan kebangsaan sebagai upaya dalam mengembangkan kurikulum PPKn.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beragamnya permasalahan yang terjadi di kalangan anak-anak, baik usia anak sampai dengan remaja selalu dikaitkan dengan pelaksanaan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan sangat erat kaitannya dengan kurikulum sebagai format pengemban misi pendidikan. Berikut ini dijelaskan pendidikan kebangsaan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai upaya dalam mengembangkan kurikulum pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

1. Peranan Pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam Kurikulum PPKn

Kurikulum mempunyai peran yang sangat penting bagi pendidikan siswa. Hamalik (2013: 11) mengemukakan peranan kurikulum, antara lain: (1) *peranan konservatif*, yaitu melalui sekolah kurikulum mempunyai peran mempengaruhi dan membina tingkah laku siswa sesuai dengan berbagai nilai sosial yang ada dalam masyarakat, sejalan dengan peranan pendidikan sebagai suatu proses sosial; (2) *peranan kritis atau evaluatif*, yaitu turut aktifnya kurikulum dalam berpartisipasi sebagai kontrol sosial dan memberikan penekanan pada unsur berpikir kritis dalam pewarisan budaya pada anak didik; dan (3) peranan kreatif, yaitu melakukan kegiatan kreatif dan konstruktif untuk menciptakan dan menyusun suatu hal yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas, ada beberapa hal yang menarik dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada masanya memang tidak dituliskan secara eksplisit apa yang menjadi kurikulumnya, namun Ki Hajar Dewantara menuliskannya sebagai rencana pelajararan. Namun demikian hal ini bisa dinyatakan sebagai sebuah kurikulum yang diberlakukan khususnya di Perguruan Tamansiswa.

Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intellect), dan tubuh anak. Pengertian itu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, agar anak mendapatkan *kesempurnaan hidup* yaitu kehidupan dan penghidupan yang kita didik selaras dengan dunianya (Dewantara, 2013: 14). Dengan demikian pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan untuk anak, tetapi juga menumbuhkan budi pekerti dan tubuh anak. Pendidikan ditujukan untuk mendidik anak yang artinya mendidik rakyat. Hal ini dikarenakan anak-anak yang kita didik saat ini kelak akan menjadi warganegara (Dewantara, 2013: 3). Hal ini senada dengan pendapat Ananda (2005: 46-47) bahwa Pendidikan Kewarganegaraan diberikan kepada warganegara dalam rangka terwujudnya warganegara yang baik, sebagai warganegara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggungjawab. Dalam hal ini kurikulum dapat berperan konsevatif, yang berperan sebagai menanamkan perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Peranan kritis dan evaluatif kurikulum yaitu turut aktifnya kurikulum dalam berpartisipasi sebagai kontrol sosial dan memberikan penekanan pada unsur berpikir kritis dalam pewarisan budaya pada anak didik. Dalam banyak tulisan yang disampaikan, Ki Hajar Dewantara sangat focus pada penanaman nasionalisme dan budaya Indonesia ditengah perlawanan bangsa Indonesia pada Belanda. Usahanya ini dituangkannya dalam bentuk pendidikan yang berkebangsaan. Dalam pemilihan sistem pengajaran Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa sistem pengajaran akan bermanfaat bagi perikehidupan bersama, apabila disesuaikan dengan hidup dan penghidupan rakyat. Oleh karena itu wajiblah kita menyelidiki segala kekurangan dan kekecewaan dalam hidup kita berhubung dengan sifatnya masyarakat seperti yang kita kehendaki (Dewantara, 2013: 3). Bermanfaat artinya menggunakan metode belajar sesuai dengan kebudayaan sendiri. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa ibu atau setidaknya bahasa Indonesia. Bila kemudian ditemukan kesulitan menggunakan bahasa Indonesia untuk mata pelajaran tertentu, bisa digunakan bahasa Belanda. Namun untuk kelas-kelas bawah sangat dianjurkan menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia (Dewantara, 2013: 61).

Kurikulum mempunyai peranan kreatif, yaitu melakukan kegiatan kreatif dan konstruktif untuk menciptakan dan menyusun suatu hal yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ki Hajar Dewantara membagi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Pembagian tersebut didasarkan pada 3 hal, antara lain:

(1) *Kedudukan anak*, yaitu anak sebagai: anak sebagai individu, anak sebagai warganegara, dan anak sebagai warga dunia (Dewantara, 2013: 79). Ketiganya mempunyai hubungan yang saling berhubungan (tidak dapat dipisahkan) karena masing-masing kedudukan tersebut mempunyai kebutuhan yang berbeda sehingga pendampingan untuk mempersiapkan anak pada kedudukannya akan menyesuaikan. Dalam kurikulum 2013 mata pelajaran PPKn dilihat dari Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar mulai dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA, dimulai dari Kompetensi Inti 1 (sikap spiritual, Komptensi Inti 2 (sikap sosial), Kompetensi Inti 3 (pengetahuan, dan Kompetensi Inti 4 (keterampilan), memiliki kesinambungan pada tiap jenjang. Kesinambungan tersebut bila dianalisis dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan

kedudukan anak sebagai individu, warganegara, dan warga dunia, misalnya dilihat pada kompetensi Inti 2 (sikap sosial) pada jenjang SD menunjukkan anak sebagai individu, SMP anak sebagai warganegara, dan SMA anak sebagai warga dunia.

(2) *Tingkatan jiwa manusia yang dilihat dari sisi usia anak*, antara lain: masa kanak-kanak (sampai dengan usia 7 tahun), masa intelektuil (usia 7 tahun sampai dengan 14 tahun), dan masa sosial (usia 14 tahun sampai dengan 21 tahun) (Dewantara, 2013: 80). Metode pembelajaran yang diberikan disesuaikan dengan usianya, antara lain (a) Taman Anak sampai dengan Taman Muda awal mengutamakan pembiasaan anak pada ketertibandengan menjaga tingkah lakudan aturan lahir yang biasa disebut sebagai metode *wiraga*, dan (b) Taman Muda kelas tinggi sampai dengan Taman Dewasa dengan metode ketertiban dan keteguhan hati, yaitu dengan menyempurnakan *wirama.*

(3) *Pembagian pelajaran*: terbagi atas (a) mata pelajaran yang berkaitan dengan intelektual yang berpengaruh pada kemajuan batin, yaitu memasakkan pikiran, rasa, dan kemauan, (b) mata pelajaran yang memberi bekal hidup dalam masyarakat, mata pelajaran kulturil dan kemasyarakatan. Dalam Kurikulum 2013 berdasarkan Kompetensi Inti 2 (sikap sosial) juga menunjukkan kebutuhan anak sebagai calon warga negara muda yang mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya bangsa. Sikap dan perilaku ini yang dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dilaksanakannya pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti adalah menumbuhkan kekuatan batin anak dengan menggunakan syarat-syarat yang selaras dengan jiwa kebangsaanmenuju kepada kesucian, ketertiban, dan kedamaian lahir dan batin. Pendidikan budi pekerti ini yang kuat dengan pendidikan olah rasa pada anak. Pendidikan budi pekerti ini menjadi tanggungjawab semua guru, artinya semua guru turut serta dalam menumbuhkan sikap dan karakter anak. Di lingkungan Tamansiswa guru disebut dengan sebutan "pamong", yang berasal dari kegiatan konkrit seorang guru yaitu *momong, among, ngemong.* Yang bisa diartikan sebagai dasar pendidikan, tidak perlu adanya paksaan, memberikan kepercayaan kepada anak untuk melakukan apa yang menurutnya baik. Guru akan memberikan bimbingan pada saat diperlukan.

Walaupun dalam hal ini guru tidak berarti memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya kepada anak (Dewantara, 2013: 13).

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas dengan beberapa contoh uraian berdasarkan kurikulum 2013 maka tampak adanya usaha untuk mempersiapkan warga negara muda untuk mampu berperan aktif dalam kehidupan publik (Cogan, 1998: 131-132). Senada dengan Cogan, Winataputra, dkk (2012: 5) menuliskannya dalam istilah *citizenship Education* yang didefinisikan secara luas untuk mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggungjawabnya sebagai warganegara, dengan memanfaatkan peran pendidikan, pengajaran, dan belajar . Walaupun apa yang dilakukan pada pemikiran Ki Hajar Dewantara mempunyai latar belakang yang jauh berbeda dengan berlakunya kurikulum 2013 atau saat ini. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mempunyai latar belakang pada masa penjajahan, dimana warga negara muda dipersiapkan untuk membela tanah airnya dengan aktif berperang dalam bentuk fisik, sementara pada masa saat ini warga Negara dituntut untuk aktif dalam menunjukkan kecintaannya pada negaranya. Kesamaan dari keduanya adalah hal tersebut dilakukan dalam kegiatan persekolahan yang memerlukan persiapan yang terbungkus dalam perencanaan yang disebut sebagai kurikulum.

2. Pendidikan Kebangsaan yang Membumikan Olah Rasa

Ki Hajar Dewantara mempunyai pendapat bahwa pengajaran adalah memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedangkan merdekanya hidup batin itu terdapat dari pendidikan. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk perikehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai rakyat (Dewantara, 2013: 3). Dalam hidup merdeka maka seseorang akan selalu ingat bahwa dirinya tidak sedang sendiri, dirinya hidup bersama dengan orang lain. Dalam kebersamaan yang diikat oleh rasa yang sama tersebut maka kita akan selalu menunjukkan usaha untuk mencapai cita-cita bersama. Karenanya pendidikan kita harus dan hendak memberikan perasaan yang penuh kepada kebangsaan (Dewantara, 2013: 11). Oleh

karena itu sifat dan maksud pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain:

a. Pendidikan dan pengajaran yang terluhur adalah yang terkandung dalam kodrat alam.
b. Untuk mengetahui kodrat alam maka perlu orang mempunyai kebersihan budi, halusnya rasa, dan suci kuatnya kemauan, sehingga tercipta *cipta – rasa – karsa*
c. Maksud pendidikan adalah sempurnanya hidup manusia hingga dapat memenuhi segala keperluan hidup lahir dan batin yang kita dapat dari kodrat alam.

Atas apa yang dipaparkan di atas tampak bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat kental dengan yang disebut sebagai *rasa*. Apa saja yang akan menjadi sikap atau perilaku kita lebih dulu dipahami dan dirasakan untuk kemudian dapat dilakukan dengan sepenuh hati, ada tanggungjawab yang besar dalam sikap atau perilaku tersebut. Ki Hajar Dewantara sangat konsisten meletakkan rasa dalam olah cipta dan olah raga. Olah rasa ini akan sangat penting dalam memberikan dasar yang kuat untuk bercipta dan berkarsa, tidak menunjukkan semena-mena terhadap orang lain. Karenanya Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa tujuan dari pendidikan adalah penguasaan diri, sebab dengan penguasaan diri maka pendidikan itu memanusiakan manusia (Yusuf, 2015: 174). Penguasaan diri justru berakar pada kemampuan mengolah rasa secara cerdas. Olah rasa akan mencapai hasil manakala didasari oleh dorongan kemauan (karsa) yang kuat, sehingga tindak laku tetap berada dalam kendali pikir yang sehat (Sindhunata, 2006: 182). Hal ini tampak dari tiga fatwa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara dalam menutup pidatonya, antara lain:

a. *Tetep, antep,* dan *mantep.* Ketetapan pikiran dan batin itulah yang akan menentukan kwalitas seseorang. Dan jika tetep dan antep itu sudah ada, maka mantep itu datang juga, yaitu tiada dapat diundur lagi.
b. *Ngandel, kandel,kendel* dan *bandel.* Percaya akan memberikan pendirian yang tegak. Maka kemudian kendel (berani) dan bandel (tidak lekas ketakutan, tawakal) akan menyusul sendiri.

c. *Neng, ning, nung,* dan *nang*. Kesucian pikiran dan kebatinan yang didapat dengan ketenangan hati, itulah yang mendatangkan kekuasaan. Dan kalau ada tiga-tiganya itu, maka kemenangan akan jadi bagian kita (Dewantara, 2013: 14)

Tampak bahwa olah rasa menjadi unsur yang kuat dalam memberikan landasan atas apa yang hendak diciptakan dan dilakukannya.

Atas dasar ini pelaksanaan kurikulum yang berlaku di persekolahan akan makin optimal dengan didasarkan oleh cipta – rasa – karsa. Dengan menumbuhkan rasa yang kuat pada diri anak maka anak akan mampu melakukan pengendalian dirinya, sehingga mampu mencipta dan mendapatkan dorongan kemauan yang kuat pula.

KESIMPULAN

Atas uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intellect), dan tubuh anak. Melalui pendidikan diberikannya persiapan anak sebagai warga negara muda yang kelak akan memberikan segala kemampuannya untuk mencintai tanah airnya. Dengan cinta tanah air maka anak akan memberikan segala kemampuannya untuk membela tanah airnya.

Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dapat memberikan masukan atas kurikulum sekolah. Menumbuhkan olah rasa, selain olah cipta dan olah karsa. Dengan menumbuhkan rasa yang kuat pada diri anak maka anak akan mampu melakukan pengendalian dirinya, sehingga mampu mencipta dan mendapatkan dorongan kemauan yang kuat pula. Tiga fatwa yang diberikan Ki Hajar Dewantara mengandung arti yang mendalam untuk dapat dilakukan anak dalam mengolah rasa untuk dapat digunakan sebagai landasan dalam menentukan sikap dan perilakunya.

Dari paparan di atas dapat diberikan saran bahwa perlunya keseimbangan dalam mengembangkan kemampuan anak, dari Kompetensi Inti 1, Kompetensi Inti 2, Kompetensi Inti 3, dan Kompetensi Inti 4 dalam kurikulum 2013. Keseimbangan

ini akan membantu anak untuk mampu mengolah cipta – rasa – karsa sehingga dapat memberikan pondasi yang kuat. Hal ini diharapkan dapat memperkuat pertahanan diri anak agar mempunyai kepercayaandiri yang kuat, tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang kurang baik yang ada dalam kehidupan sehari-harinya.

DAFTAR PUSTAKA

Ananda, Azwar. (2005). *Esensi pendidikan kewarganegaraan: sebuah kilas balik pendidikan kewarganegaraan di Indonesia*. Jurnal demokrasi, vol. 4, no. 1, pp. 37-47.

antaranews.com. (2008). Elite politik abaikan etika. www.antaranews. 8 November 2017

Cogan, John J and Ray Derricot. (1998). *Citizenship for 21st century an international perspective education*. England: clays ltd

Dana Aditiasari. (2015). Kronologi adu jotos anggota DPR dari PD vs PPP. news.detik.com. 8 November 2017

Dewantara, K. H. (1977). Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian Pertama: Pendidikan. *Semarang: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa*.

Hamalik. O. (2013). *Dasar-dasar Pengembangan kurikulum*. Bandung, Remaja Rosdakarya

Herawati. (2016). Ini kronologis perang antar suku di Wamena. www.daerah.sindonews.com. 8 November 2017

Liputan 6. (2016). Mendikbud Muhajir: pelaku kecurangan ujian nasional adalah guru. News.liputan6.com. 20 November 2017

Purwastuti, L.A., Efianingrum. A., (2010). *Model pendidikan berwawasan kebangsaan bagi anak usia dini sebagai sarana integrasi bangsa*, Jurnal Pendidikan, 40(1), 99-118

tribunnews.com. (2017). Banyak 'Klitih' berkeliaran, Jogja taka man lagi. www.trunnews.com. 8 November 2017

Winataputra, Udin S dan Dasim Budiansyah. (2012). *Pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif internasional (konteks, teori dan profil pembelajaran).* Bandung: widya aksara press

Yusuf, T.S. Z. (2015). *Tamansiswa badan perjuangan: kebudayaan dan pendidikan mengusir penjajah dan memanusiakan manusia.* Yogyakarta: UST Press

Zed, Mestika. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

MEMBUMIKAN BUDAYA MEMBACA, MENCIPTAKAN MASYARAKAT ANTI HOAX, MEWUJUDKAN INDONESIA BERKEADABAN

Asmaul Husna[1], Fikstif Donal Lintong[2], Ghina Aisyah[3]
Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
asmaulhusna@student.upi.edu[1], Stifdonallintong@yahoo.com[3],
ghinaasiyah5@gmail.com[3]

ABSTRAK

Kemajuan serta peradaban suatu bangsa tidak terlepas dari sikap warga negaranya, warga negara yang baik menjadi tonggak utama pembangunan suatu bangsa. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membentuk warga negara yang baik itu adalah dengan menumbuhkan budaya membaca dikalangan peserta didik sejak dini. Dengan membaca peserta didik akan menjadi cerdas, kreatif, bijaksana, dan yang pasti memiliki wawasan yang lebih luas. Tidak sampai disitu, membaca sebagai pondasi dari pengetahuan, pengusir keraguan dan kecemasan bahkan kekeliruan dari berbagai kondisi masyarakat saat ini yang sangat rentan terkena isu-isu *hoax,* yang sangat mudah diakses dari berbagai media baik televisi, radio, internet dan lain sebagainya. Tujuan dari penulisan ini adalah dengan budaya membaca diharapkan mampu mengubah sudut pandang masyarakat saat ini agar tidak mudah percaya dengan isu *hoax* yang terselubung dalam muatan media. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi literatur, dimana melalui berbagai literatur tentang budaya membaca, masyarakat anti *hoax* dalam mewujudkan Indonesia yang berkeadaban serta literatur lain yang terkait, dapat merefleksikan problema yang ada, sehingga dapat menjawab melalui rangkaian solusi yang relefan. Kesimpulan dan saran melalui tulisan ini yaitu dalam budaya membaca, diperlukan peningkatan kinerja nyata melalui pendidikan formal, informal, maupun non formal. Tidak lupa juga, peran perintah dalam mengupayakan budaya membaca itu sendri dalam mewujudkan Indonesia yang berkeadaban.

Kata Kunci : *Membaca, Informasi Hoax, Peradaban Bangsa*

PENDAHULUAN

Refleksi kegelisahan terhadap media yang mencirikhaskan era kontemporer dengan beragam problematika yang menjadi pro-kontra terhadap muatan pemberitaan adalah sebuah keniscayaan. Mengapa tidak, insan yang mengonsumsi informasi terlalu naif dan tidak berbekal dalam memilih-memilah otentiknya suatu berita. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat di Bumi Pertiwi ini yang menjadi

korban dari pemberitaan bohong (*hoax*) karena berbagai isu tidak bertanggung jawab yang menjadi pemicu konflik. Berdasarkan data yang dilansir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bahwa laporan database Trust+Positif sampai dengan tahun 2016 mencatat konten negatif yang diblokir sebesar 773.339. Lebih lanjut, masyarakat dihimbau untuk memperhatikan konten yang tergolong negatif antara lain, pornografi, SARA, penipuan atau perdagangan ilegal, narkoba, perjudian dan radikalisme. Bayangkan saja, dengan jumlah konten negatif yang tidak sedikit, serta beragam berita maupun isu lainnya, jika warga negara tidak dibekali dengan usaha-usaha yang memanifestasikan utilitasnya tindakan preventif, maka tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa, warga negara yang demikian adalah warga negara yang tertindas oleh zaman serta terperdaya oleh media.

Bukan rahasia lagi, di era kovergensi media dengan berbagai muatan di dalamnya baik positif-negatif, order-disorder, tradisional-modern, spesifik-komprehensif, semuanya di konsumsi baik sengaja maupun tidak sengaja. Bahkan, lubernya informasi tersebar begitu cepat dan tidak dapat dibendung. Akibat dari tidak dibekalinya warga serta penanganan yang berbentuk edukatif maka berbagai konsekuensi dirasakan. Kepuasan terhadap muatan berita serta otentik tidaknya berita itu menjadi hiruk-pikuk dilema bagi masyarakat. Yang disayangkan adalah, menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kondisi media sebagai alat penyaluran informasi bagi khalayak ramai. Betapapun itu, di satu sisi media mengalami penurunan kepercayaan warga, di lain sisi sebagian warga tetap menikmati informasi yang ada.

Bukan menjadi sebuah ketakutan, bagi masyarakat urban-tradisional akan termarjinalkan oleh era kontemporer. Tetapi, bagaimana cara berselancar dengan baik-benar, sesuai-bermanfaat, dari urgensinya muatan media itu. Dari berbagai kepelbagaian lansiran informasi di media akan sangat berguna dan bisa menjadi bekal buat masyarakat dalam menjalani kehidupan di masa sekarang dan akan datang. Melihat pentingnya, isi dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 3 Ayat 1 yang menyatakan bahwa:

> *Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.*

Indah bila, media di Indonesia aman, steril, dan jauh dari penyebaran berita *hoax* sehingga utilitas dari peran informasi media itu tersampaikan dan dinikmati oleh khalayak ramai.

Dalam rangka membekali serta menyiapkan warga negara yang baik sebagai wujud pencerminan keadaban bangsa, maka motivasi budaya membaca menjadi faktor determinan. Mengingat, para pelajar sedang dilanda urgensi budaya membaca. Mengacu pada, studi yang dilakukan di bulan juni 2016 oleh *Stanford's Education History Group* terhadap 7802 pelajar dari bangku SMP sampai Perguruan Tinggi di Los Angeles Amerika dan di 12 negara lainnya menemukan bahwa 80 persen para pelajar belum dapat membedakan berita *hoax* dengan berita yang valid. Tidak jauh berbeda dengan, kondisi pendidikan ditanah air yang merefleksikan budaya membaca bukanlah kebutuhan yang terlalu penting. Sehingganya, pesarta didik bingung dalam membedakan antara berita *hoax* dan berita yang valid.

Faktor determinan lainnya, disamping motivasi internal adalah upaya eksternal dalam membentuknya budaya membaca itu. Disinilah, bisa dilihat peran lembaga pendidikan baik formal, informal, dan non formal dalam memaksimalkan usahanya untuk mewujudkan Indonesia yang berkeadaban. Berkaitan dengan media, bahwa sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang melek media. Mengingat, pada dasarnya literasi media ini merupakan upaya pembelajaran bagi khalayak media sehingga menjadi khalayak yang bergaya hidup di tengah dunia yang disebut sesak media "*media saturated*" (Iriantara 2009, hlm. 13). Ditengah dunia yang sesak akan media maka, tupoksi dari berbagai pihak perlu di diaplikasikan melalui tindakan nyata.

Tidak terkecuali, masayarakat primordial yang sering dikaitkan dengan masyarakat tradisional untuk dapat menikmati media dengan tindak-gerak berdasar pengetahuan seadanya. Teknologi yang sering dikaitkan dengan masyarakat urban menjadikan mereka sebagai penguasa abad ke-21 yang mencirikhaskan limpah-

ruahnya informasi. Tetapi, tidak sedikit juga bagi mereka yang dapat membedakan berita *hoax* dan berita yang valid. Demikian pula, dalam rangka membumikan budaya membaca itu sendiri untuk mewujudkan Indonesia yang berkeadaban melalui usaha berbagai pihak di berbagai lapisan masyarakat maka, kontribusi elit-elit pandai adalah sebuah keniscayaan. Dengan menciptakan masyarakat yang anti *hoax*, itu sudah menjadi resistensi yang tidak kontras dengan harapan bangsa.

Fluktuasi atau inkonsistennya usaha dalam membudayakan masyarakat yang melek media berdampak pada masyarakat itu sendiri, hal ini, layaknya bayi yang baru lahir ingin langsung berjalan. Penting, ditengah era yang serba tekhnologi dengan beragam muatan informasinya, jika tidak dibelajarkan melalui proses pembumian maka dengan sendirinya akan termarjinal oleh zaman. Artinya bahwa, dinamika zaman jangan dijadikan sebuah beban yang kemudian larut dengan ketidakberdayaan, namun melalui itu, bagaimana berselancar ditengah canggihnya tekhnologi dengan tidak terperdaya oleh media yang bisa melahirkan dekadensi intelektual.

Penulisan ini bertujuan untuk, perolehan ensensi problema yang masih terngiang dan menari-nari lewat bawaan zaman. Juga, meminimalisir bahkan meniadakan kasus akibat dampak dari masifnya sifat media, lewat pembumian budaya membaca yang menghasilkan masyarakat yang melek media. Serta pemaksimalan tupoksi lembaga (pendidikan dan pemerintah) dalam mengejawantahkan utopia ke realita (Indonesia yang berkeadaban).

METODE PENELITIAN

Peranti dalam pemaksimalan paper guna meminimalisir bias sistematika, maka, metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan. Menurut Nazir (1988), studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Harapan melalui media pencarian dalam studi kepustakaan yang relevan, dapat memperoleh data teoritis serta menginterpretasikan problema budaya

membaca di Indonesia guna membumikan budaya itu untuk menciptakan masyarakat yang anti *hoax* yang merupakan wujud keadaban bangsa.

PEMBAHASAN

1. Budaya Membaca

Pesatnya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi saat ini, haruslah disikapi dengan bijaksana. Tidak jarang informasi yang kita peroleh dari televisi, radio, internet dan lain sebagainya itu tidak sesuai dengan realita yang ada atau sering dikenal dengan *hoax*. Maka disinilah perlu adanya suatu cara untuk mengatasi hal tersebut, dan salah satunya adalah dengan membaca. Kemampuan membaca, akan membuka jalan kepada keterampilan berbahasa dan lainnya, seperti menyimak, berbicara dan menulis. Selain itu membaca akan mengasah kemampuan berfikir kritis, kratif, inovatif, serta menumbuhkan budi pekerti siswa (Akbar, 2017). Sebagai bagian dari suatu tingkah laku budaya (*cultural behavior*), baik dipandang dari sudut pembaca maupun penulis, seorang pembaca akan terbiasa mencari informasi, menambah pengetahuan, melakukan pengecekan pengetahuannya, atau mencari hiburan dan kesenangan dengan membaca buku-buku (Suwandi, 2015).

Membaca merupakan salah satu fungsi yang paling penting dalam hidup. Semua proses belajar didasarkan pada kemampuan membaca Gleen Doman (1991). Bahkan begitu pentingnya membaca Allah SWT menurunkan ayat pertamanya dalam Al- Qur'an itu ialah Iqra', yang artinya bacala. Membaca semua yang bisa dijadikan pembelajaran dan pengetahuan yang berguna di masa depan. Sybil 1984 (dalam Wawire, 2011, hlm. 001) '*defines reading as a process of communication through which most formal learning takes place. It involves understanding written language and respond to the author's message. Therefore, this means that when one is reading one has to be thinking, predicting, questioning, evaluating and defining and redefining'*.

Sybil mendifinisikan membaca sebagai sebuah kegiatan komunikasi yang menjadi dasar dalam proses belajar. Menurutnya ketika membaca seseorang akan mengalami proses berpikir, memprediksi, mempertanyakan, mengevaluasi dan

mendefinisikan ulang. Budaya membaca dapat membuat masyarakat jauh dari berita-berita hoax karena dengan membaca masyarakat akan mengkaji dengan dalam mengenai kebenaran berita yang di dapatkan.

Kegiatan membaca bukan merupakan kegiatan yang tidak bertujuan. Menurut Anderson (via Tarigan, 2008: 9-11), terdapat 7 tujuan membaca. Ketujuh tujuan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta (reading for details or facts).
b. Memperoleh ide-ide utama (reading for main ideas).
c. Mengetahui urutan atau susunan, organisasi cerita (reading for sequence ororganization)
d. Membaca bertujuan untuk menyimpulkan isi yang terkandung dalam bacaan (reading for inference)
e. Mengelompokkan atau mengklasifikasikan jenis bacaan (reading to classify).
f. Menilai atau mengevaluasi isi wacana atau bacaan (reading to evaluate).
g. Membandingkan atau mempertentangkan isi bacaan dengan kehidupan nyata(reading to compare or contrast).

Budaya dan minat baca masyarakat Indonesia saat ini cukup rendah. Menurut data *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), pada 2012, indeks minat baca masyarakat Indonesia baru mencapai angka 0,001. Artinya, dari setiap 1.000 orang Indonesia hanya ada 1 orang saja yang punya minat baca (http://www.republika.co.id/berita/nasional). Jika minat dan budaya baca masih rendah dan belum bertumbuh, maka sulit diharapkan budaya menulis akan berkembang. Kurangnya budaya membaca dan menulis bukan saja terjadi pada peserta didik, tetapi juga pada diri mahasiswa, guru, dan bahkan dosen di perguruan tinggi. Fakta menunjukkan bahwa jumlah terbitan buku di Indonesia tergolong rendah, tidak sampai 18.000 judul buku per tahun. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan Jepang yang mencapai 40.000 judul buku per tahun, India 60.000, dan China sekitar 140.000 judul buku per tahun. Jumlah produksi buku Indonesia hampir sama dengan Vietnam dan Malaysia. Namun, jika dibandingkan dengan

jumlah penduduk masing-masing negara tersebut, produksi Indonesia tergolong rendah (Suwandi, 2015)

Permasalahan diatas tidak bisa kita anggap enteng, karena bangsa yang hebat adalah bangsa yang memiliki minat baca warga negaranya tinggi. Dan salah satu tolak ukur kemajuan suatu bangsa itu dilihat dari kemampuan literasinya (membaca dan menulis). Oleh karena itu, menumbuhkan budaya membaca di kalangan peserta didik suatu keharusan. Pandangan menurut para ahli dan lembaga penelitian besar, seperti Ministry of Finance and Economic Planning (MINECOFIN) (dalam Canisius, 2012, hlm. 9):

> *The reading culture is one of the fundamental building blocks of learning. Becoming a skilled and adaptable reader enhances the chances of success at school and beyond. Reading is not just for school, it is for life. Reading, in all its variety, is vital to our becoming better informed, having a better understanding of ourselves and others, and to our development as thoughtful, constructive contributors to a democratic and cohesive society.*

Menurut MINECOFIN, budaya membaca adalah salah satu blok bangunan fundamental dari pembelajaran. Menjadi seorang pembaca yang terampil akan meningkatkan peluang keberhasilan di sekolah dan di luar sekolah. Membaca bukan hanya untuk keperluan sekolah atau akademis semata, membaca merupakan aktifitas seumur hidup. Selain itu, menurut Rozin (2008), budaya membaca adalah kegiatan positif rutin yang baik dilakukan untuk melatih otak untuk menyerap segala informasi yang terbaik diterima seseorang dalam kondisi dan waktu tertentu.

Dengan menumbuhkan budaya membaca, maka masyarakat akan memperoleh pengetahuan baru, menciptakan inovasi, dan yang terpenting yaitu mampu berfikir kritis sehingga bisa memfilter informasi-informasi yang mereka peroleh. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan budaya membaca ini, maka peran orang tua, guru, dan pemerintah sangat penting.

2. Masyarakat Anti Hoax

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, tetapi kekayaanya itu tidak cukup mengantarkan negara yang kita cintai ini untuk bejajar di barisan depan negara-negara maju. Berbagai permasalahan di Indonesia saat ini mulai dari bidang pendidikan, politik, ekonomi, budaya dan HANKAM mewarnai perajalan panjang bangsa Indonesia untuk mencapai titik kemajuan yang dicita-citakan. Salah satu faktor yang melandasi kemajuan suatu negara yaitu sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas dilihat dari banyak tidaknya masyarakat yang terdidik. Dan membentuk masyarakat terdidik tidak bisa dilepaskan dari peran pendidikan itu sendiri. Socrates pernah berpendapat bahwa seseorang yang terdidik itu adalah orang yang dapat mengendalikan situasi dengan baik, dan tidak dikendalikan oleh situasi. Dan seorang yang terdidik itu juga adalah mereka yang dapat mengontrol diri ketika sedang mendapatkan kesenangan, serta tidak lupa diri saat berhasil dan sukses dalam hidup. Dan dari kategori yang telah dijelaskan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa orang terdidik dapat diketahui dari budi pekerti mereka yang tercermin bagaimana menjalankan etiket dan bersopan santun serta mengendalikan diri.

Sejalan dengan itu sebuah buku yang terbit 1998 di Amerika Serikat menjelaskan bahwa orang yang terdidik atau berpendidikan tidak hanya dilihat dari kemampuan dia membaca, menulis, dan berhitung sesuai jenjang pendidikannya, tetapi mereka yang mampu memecahkan berbagai persoalan hidup, mampu mengetahui kebenaran dan kebaikan dalam kehidupan, serta toleran dan tidak menyakiti orang lain. Di tengah kehidupan bermasyarakat saat ini, kemampuan mengendalikan diri sangat dibutuhkan. Apalagi di tengah masyarakat yag sangat rentan termakan isu *hoax.* Penyebaran *hoax* di berbagai media ini memang sangat unik, karena ternyata level pendidikan seseorang tidak membuatnya kebal terhadap *hoax.* Ada yang pendidikan dosen alumni perguruan tinggi luar negeri ternama, meski dia sangat ahli dalam bidangnya, namun dia bisa termakan *hoax* dalam bidang lain. Ada yang merupakan tokoh agama, sangat alim, disegani oleh jama'ahnya, namun ada kalanya ia juga terjebak menyebarkan berita *hoax*. Apalagi masyarakat umum yang kadang belum paham kaidah untuk mengkonfirmasi kebenaran sebuah berita. Penyebaran *hoax* di berbagai media Indonesia, mulai

marak sejak media sosial populer digunakan oleh masyarakat Indonesia. Ini disebabkan sifat dari media sosial yang memungkinkan akun anonim untuk berkontribusi, juga setiap orang, tidak peduli latar belakangnya, punya kesempatan yang sama untuk menulis. Beberapa orang yang tidak bertanggungjawab, menggunakan celah ini untuk menggunakan media sosial dalam konteks negatif, yaitu menyebarkan fitnah, hasut dan *hoax*.

Dengan berbagai permasalahan di atas maka diperlukanlah suatu alat yang bisa dipakai untuk menetralisasi berbagai isu *hoax* yang ada, dan salah satunya dengan membumikan budaya membaca di kalangan masayarakat. Keseriusan terhadap pencegahan berita *hoax* dari pemerintah dan beberapa kalangan diharap juga diikuti oleh semua lapisan masyarakat. Masyarakat diharap mampu memilah mana berita yang mengandung fitnah dan mana yang tidak. Karena berita-berita hoax sangat membahayakan bagi orang-orang yang tidak bisa memilahnya.

3. Indonesia Berkeadaban

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan perangkat yang bisa mewadahi yang menjadi ikatan kebersamaan dan menjadi wadah agar manusia dapat menjalankan kehidupan dengan baik dengan aturan yang jelas dan mengikat bagi seluruh masyarakat. Keberadaan suatu institusi seperi negara menjadi hal yang tidak dapat dielakkan. Dalam kehidupan kenegaraan harus senantiasa dilandasi oleh moral kemanusiaan baik dalam kehidupan pemerintah Negara, politik ekonomi, hukum, sosial, budaya, pertahan dan keamanan serta dalam kehidupan keagamaan. Oleh karena itu dalam kehidupan bersama dalam Negara harus dijiwai oleh moral kemanusiaan untuk saling menghargai dan saling menjaga keharmonisan dalam kehidupan bersama. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar yang sangat menjunjung nilai kemanusiaa. Ini telah jelas dalam dasar Negara Indonesia sila ke-2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yakni makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki potensi, pikir, rasa, karsa dan cipta. Karena potensi ini manusia mempunyai, menempati kedudukan dan martabat yang tinggi. Kata adil mengandung makna bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas ukuran/

norma-norma yang obyektif, dan tidak subyektif, sehingga tidak sewenang-wenang. Kata beradab berasal dari kata adab, artinya budaya. Jadi adab mengandung arti berbudaya, yaitu sikap hidup, keputusan dan tindakan yang selalu dilandasi oleh nilai-nilai budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan/ moral. Nilai-nilai ini sangat dijunjung tinggi oleh rakyat Indonesia dan diwujudkan dalam norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dan Beradab artinya terlaksananya semua unsur-unsur hakikat manusia yaitu Jiwa: akal, Raga, makhluk individu, Makhluk sosial, Makhluk pribadi berdiri sendiri, Makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Itu semua dalam bentuk pelaksanaan hidup yang bermartabat setinggi-tingginya. Maka manusia yang beradab yaitu manusia yang melaksanakan kemanusiaannya yang melaksanakan hakikatnya sebagai manusia *(monopluralis)* secara optimal. Maka dalam realisasi tujuan pembangunan Indonesia yaitu realisasi *"manusia selengkapnya"* (Kaelan, 2013).

Bangsa yang beradab adalah bangsa yang punya sopan santun dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, selain itu bangsa yang beradab adalah bangsa yang menghormati bangsa lain dan tentunya bangsa yang cinta damai, bangsa yang mau menghargai, baik itu menghargai pendapat bangsa lain, menghargai perbedaan-perbedaan yang ada serta menjaga budaya dan martabat bangsanya sendiri. Kemajuan serta peradaban suatu bangsa tidak terlepas dari sikap warga negaranya, warga negara yang baik menjadi tonggak utama pembangunan suatu bangsa. Warga negara Indonesia diharapkan mampu mejadi menjadi masyarakat yang sopan dalam berkata dan bertindak, cerdas dalam menyikapi berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia, tidak hanya diam, acuh tak acuh dan menerima saja segala informasi yang dianggap dapat memicu konflik bangsa. Berbagai persoalan yang ada dan informasi yang di dapatkan diharapkan bisa di saring terlebih dahulu dan akhirnya dapat menentukan baik dan buruk serta benar dan salahnya, sehingga terbentuklah warga negara yang bijak. Budaya membaca membuat suatu keyakinan yang akan menghasilkan perilaku oleh karena itu sangat terbukti bahwa dalam membentuk Indonesia berkeadaban dibutuhkan budaya membaca dalam melawan penyebaran berita-berita hoax.

KESIMPULAN

Budaya membaca harus ditumbuhkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, karena penguasaan dalam membaca dapat membuka cakrawala, memperluas wawasan, dan memahami dunia dalam lingkup yang lebih luas. Orang yang menerapkan budaya membaca mempunyai logika yang lebih besar dan proses analisa yang lebih besar di bandingkan orang yang jarang membaca. Dengan ketajamanan analisa ini diharapkakan seseorang tersebut mampu memfilter semua informasi yang di terimanya dan menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga ia tidak mudah termakan dengan isu-isu *hoax* yang sedang berkembang di masyarakat, karena menciptakan masyarakat anti *hoax* pada saat ini merupakan suatu keharusan. Dan akhinya terwujudlah cita-cita bangsa yaitu menjadikan Indonesia yang berkeadaban. Beradab warga negaranya dan maju negaranya.

Dengan demikian, Menumbuhkan budaya membaca sangat penting, terlebih bagi generasi muda yang menjadi ujung tombak kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu, diperlukanlah peran orang tua, guru, dan pemerintah dalam menumbuhkan budaya membaca di kalangan peserta didik khususnya. Orang tua diharapkan mampu menumbuhkan minat baca anak sejak dini. Menurut Havighurts masa anak-anak. Usia 6-12 tahun memiliki tugas perkembangan untuk mengembangkan kemampuan dasar dalam membaca. Dalam meningkatkan kemampuan untuk membaca tersebut seorang anak perlu didampingi oleh orang lain. Di rumah pendampingan bisa dilakukan oleh orang tua. Selain itu, Orang tua sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap masa depan si anak harus menumbuhkan kebiasaan membaca sejak dini di lingkungan keluarga. Orang tua sebaiknya memberikan teladan bagi putra putrinya untuk gemar membaca. Sesuai dengan prinsip psikologi bahwa cara bertindak seseorang akan sangat dipengaruhi oleh kebiasaan yang terekam dalam memori otaknya semasa kecil.

Menumbuhkan budaya membaca juga tidak lepas dari peran seorang guru, Guru sebagai pelaksana pendidikan untuk lebih intensif dalam mendorong dan meningkatkan minat baca pada peserta didik. Di sekolah guru dapat mengajak peserta didik untuk membaca/menelaah buku-buku yang menarik di perpustakaan

dan memberi tugas yang sumbernya dicari di perpustakaan. Guru dapat pula mewajibkan peserta didik membaca sebuah buku setiap minggu, dan orang tua wajib menandatangani laporannya. Guru dibantu pustakawan sebaiknya mengajarkan juga kepada peserta didik bagaimana menggunakan perpustakaan; mengenal, mencari, mengumpulkan, mengorganisasikan informasi, dan menyajikan hasil informasi yang dibutuhkan. Sekolah dapat menumbuhkan minat baca peserta didik dengan menjadikan perpustakaan bersifat aktif dan kondusif. Selain itu, cara yang baik digunakan untuk meningkatkan budaya membaca di kalangan peserta didik adalah dengan memberikan keterampilan menulis. Misalnya memberikan tugas-tugas untuk membuat tulisan, seperti karangan, artikel, karya ilmiah, dan lain-lain. Dengan begitu, para remaja akan lebih terpacu untuk membaca. Terlebih lagi untuk para remaja yang suka menulis. Karena asumsinya, untuk menulis sebuah karya, setidaknya seseorang membutuhkan banyak bacaan untuk pembanding, referensi, atau bahan bacaan.

Peran pemerintah dalam peningkatan budaya membaca juga sangat penting. Sebenarnya pemerintah telah mengadakan program Gerakan Literasi Sekolah (GLS). GLS adalah upaya menyeluruh yang melibatkan semua warga sekolah (guru, peserta didik, orang tua/wali murid) dan masyarakat, sebagai bagian dari ekosistem pendidikan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menumbuhkan minat baca peserta didik serta meningkatkan keterampilan membaca agar pengetahuan dapat dikuasai secara lebih baik. Materi baca berisi nilai-nilai budi pekerti, berupa kearifan lokal, nasional, dan global yang disampaikan sesuai tahap perkembangan peserta didik. GLS memperkuat gerakan penumbuhan budi pekerti sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015, yang salah satu kegiatannya adalah "15 menit membaca buku nonpelajaran sebelum waktu belajar dimulai". Namun, tak kalah penting dari itu semua yaitu penyediaan perpustkaan yang layak, Pembangunan perpustakaan dan optimalisasi koleksi perpustakaannya perlu digalakkan. Sehingga buku dan perpustakaan menjadi semacam kebutuhan primer bagi kehidupan dan kegiatan masyarakat, terutama di pedesaan atau urban sektor informasi. Partisipasi perpustakaan perlu merambah sampai ke infrastuktur kehiupan masyarakat, seperti perpustkaan

keliling yang mampu menjangkau kawasan masyarakat terpencil. Sehingga jangan sampai daya beli buku menjadi penghambat minat baca masyarakat. Meningkatkan minat baca pada peserta ddik perlu didukung oleh gerakan meningkatkan penulisan buku. Terbitnya buku-buku hasil karya putera-puteri bangsa Indonesia akan meningkatkan kepercayaan bahwa anak bangsa kita inovatif. Hadirnya buku-buku karya remaja Indonesia sebagai penulis muda yang kreatif dan produktif, sangatlah membanggakan. Oleh karena itu, kini generasi baru penulis muda Indonesia membutuhkan pemerintah untuk mendukung hak berkreasi mereka melalui berbagai kebijakan. Program ini harus merupakan kegiatan yang terpadu baik di sekolah ataupun luar sekolah, baik di pemerintahan ataupun kalangan swasta.

Para penulis harus diberi kemudahan dan fasilitas yang memadai. Para penerbit diberi bantuan agar mempermudah mereka membantu para penulis baik dalam honorarium, insentif, serta royalti agar mereka bersemangat menerbitkan buku-buku baru yang murah. Pemerintah perlu menyediakan subsidi yang besar agar biaya produksi buku menjadi murah dan mudah, sehingga dapat dijual dengan harga murah dan terjangkau oleh masyarakat luas.

Oleh karena dapat ditarik kesimpulan bahwa pelahirkan Indonesia yang berkeadaban adalah ekspektasi kolektif. Dimana, optimalnya suatu pencapaian adalah refleksi dambaan masyarakat. Hal ini, layaknya anak yang sudah bisa berjalan. Maksimalnya sebuah proses pasti hasinya tidak akan menghianati. Dalam menciptakan masyarakat yang anti *hoax* melalui pembumian budaya membaca, maka pengoptimalan tupoksi lembaga perlu diaktualisasikan. *Pertama*, bagi pemerintah agar selalu peka dan tanggap dalam mencerna beragam isu media serta melakukan tindakan preventif melalui kebijakan ataupun inovasi dalam pembumian budaya membaca. *Kedua*, bagi lembaga pendidikan (formal, informal, non formal) supaya melakukan fungsi pengawasan, bimbingan, dan memaksimalkan peran lewat kerja nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Aulia. (2017). *Membudayakan Literasi dengan Program 6M di Sekolah Dasar.* JPSD Vol 3. No 1, Maret 2017

Canisius, Peirre. (2012). *The Makin Of Reading Society, Developing a Culture of Reading in Rwanda*. Linköping Studies in Behavioural Science No. 165. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.

Fahrurrozi. (2016). *Pengembangan Budaya Membaca Siswa Madrasah Ibtidaiyah di Kota Semarang.* Jurnal DIMAS Volume 16, No. 1, Mei 2016

Iriantara, Yosal. (2009). *Literasi Media: Apa, Mengapa, Bagaimana*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Jonsson & Olsson. (2008). *Reading Culture and Literacy in Uganda, The Case Of the Childern's Reading Tent*. Magisteruppsats I Biblioteks. Vid Institutionen Biblioteks. OCH.

Kaelan. (2013). *Negara Kebangsaan Pancasila.* Yogyakarta: Paradigma

Nurchaili. (2015). *Menumbuhkan Budaya Literasi Melalui Buku Digital.* Jurnal LIBRIA: Volume 8, Nomor 2, Desember 2016

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Sapril. (2010). *Budaya Membaca Masyarakat Kampus.* . Jurnal Iqra' Volume 04 No. 01. Mei 2010

Siregar, Solahuddin. (2009). *Buku dan Budaya Membaca (Melihat Peran dan Relevansi Perpustakaan.* Jurnal Iqra' Volume 03 No. 02 Oktober 2009

Suwandi, Sarwiji. (2015). *Peran Bahasa Indonesia Dalam Pengembangan Budaya Literasi Untuk Mewujudkan Bangsa Yang Unggul dalam Konteks Masyarakat Ekonomi Asean1*. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2015

Olasehinde, M.O. (2015). *Promoting the Reading Culture towards Human Capital and Global Development*. Journal English Language Teaching; Vol. 8, No. 6; 2015. Published by Canadian Center of Science and Education. Nigeria.

Wawire, Fredrick. (2011). *Reading culture, cultivation and its promotion among pupils: a Kenyan perspective*. International Research Journal of Library, Information and Archival Studies Vol. 1(1) pp. 001-005, August 2011.

Sumber Internet:

https://kominfo.go.id/content/detail/8732/ini-cara-melaporkan-konten-hoax/0/sorotan_media. [Di akses tanggal 17 November 2017]

http://www.mercurynews.com/2016/11/22/students-duped-by-fake-news-and-biased-sources-stanford-study-finds/. [Di akses tanggal 17 November 2017].

https://ed.stanford.edu/news/stanford-researchers-find-students-have-trouble-judging-credibility-information-online. [Di akses tanggal 17 November 2017].

http://www.republika.co.id/berita/nasional

LITERASI MEDIA UNTUK PENGENDALIAN UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM RANGKA MEMBENTUK KOMPETENSI WAWASAN GLOBAL WARGA NEGARA

Rima Vien Permata Hartanto
Universitas Sebelas Maret, Suarakarta
rimahartanto@yahoo.com

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan media sosial membawa dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah maraknya ujaran kebencian (*hate speech*). Fenomena mengenai ujaran kebencian (*hate speech*) sudah banyak terjadi di Indonesia. Melihat maraknya ujaran kebencian (*hate speech*) di Indonesia, Pemerintah Indonesia melalui Kepolisian RI (Polri) telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/06/X/2015 yang memberi ancaman terhadap pelaku penyebar ujaran kebencian (*hate speech*). Aspek regulasi memang diperlukan, tetapi tidak akan pernah cukup untuk mengendalikan ujaran kebencian (*hate speech*). Karena itu, diperlukan langkah lain, yakni upaya kultural dan edukasi untuk memberikan penyadaran pada para pengguna media sosial dengan literasi media atau kecerdasan bermedia salah satunya melalui pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan berfokus pada upaya mempersiapkan individu yang melek informasi dan warga yang bertanggung jawab, melalui studi hak, kebebasan, dan tanggung jawab. Perhatian pendidikan kewarganegaraan terkait ujaran kebencian (*hate speech*) meliputi pengetahuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi ujaran kebencian (*hate speech*), sehingga memungkinkan individu untuk menangkal ujaran kebencian. Literasi media sangat diperlukan untuk menyiapkan warna negara yang memiliki kompetensi wawasan global. Kompetensi wawasan global warga negara menghendaki warga negara yang dapat bekerja dan memiliki aktifitas hidup sebagai warga negara yang baik dalam tatanan kehidupan di tingkat nasional maupun internasional/dunia yaitu warga negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang siap membangun hubungan dan koneksi melintasi perbedaan namun sekaligus menjaga dan memperdalam rasa identitas dan integritas dirinya sebagai bagian dari warga negara suatu negara.

Kata kunci : *literasi media, ujaran kebencian, pendidikan kewarganegaraan, kompetensi wawasan global*

PENDAHULUAN

Proses globalisasi yang masuk dalam semua aspek kehidupan terjadi dengan cepat salah satunya karena dukungan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kecepatan perkembangan teknologi telah melahirkan era baru yaitu era digital. Globalisasi yang ditandai dengan digitalisasi pada hampir semua aspek kehidupan telah mengubah pola hidup warga negara menjadi serba digital. Proses globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi

(TIK) telah menghadapkan warga negara pada era keterbukaan informasi dan pesatnya perkembangan media sosial. Era ini ditandai dengan lahirnya kewargaan digital (*digital citizenship*), sebagai akibat dari penggunaan teknologi digital pada hampir seluruh aktivitas hidup manusia.

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi serta media sosial membawa dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah maraknya ujaran kebencian (*hate speech*) di ranah *on line.* Di Indonesia, fenomena mengenai ujaran kebencian (*hate speech*) sudah banyak terjadi misalnya saja kasus Florance Sihombing yang memaki-maki sebuah SPBU di Yogyakarta, tukang sate yang memaki-maki Presiden Joko Widodo meskipun akhirnya ada permintaan maaf dari tukang sate tersebut. Beberapa peristiwa bahkan menunjukkan dampak mengerikan dari beredarnya pesan kebencian, misalnya pada kasus kerusuhan Tanjung Balai. Peristiwa yang terjadi pada Juli 2016 ini berawal dari kesalahpahaman beberapa orang, yang kemudian diunggah dan disebarluaskan melalui media sosial sehingga berujung kerusuhan. Contoh lain yang cukup populer dan aktual misalnya adalah kasus Jonru Ginting, Saracen hingga musisi Ahmad Dani. Ujaran kebencian (*hate speech*) biasanya makin marak terutama pada saat hajatan politik seperti pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presidan (pilpres). Contoh paling akhir nyata misalnya pada pilkada DKI 2017 yang lalu.

Statistik yang memberikan gambaran global tentang meningkatnya fenomena ujaran kebencian (*hate speech*) memang belum tersedia, termasuk di Indonesia. Namun semua sepakat bahwa ujuran kebencian (*hate speech*) sangat berbahaya. Bahaya ujaran kebencian (*hate speech*) telah diafirmasi oleh PBB yang pada tahun 1966 mengeluarkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang melarang "kampanye kebencian terhadap kelompok kebangsaan, ras dan agama yang bersifat dorongan (*incitement*) kepada tindak diskriminasi, permusuhan dan kekerasan."

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masifnya ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial salah satunya melalui jalur hukum. Pada tanggal 8 Oktober 2015, Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor ; SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran

Kebencian (*Hate Speech*).[18] Aspek regulasi memang diperlukan, tetapi tidak akan pernah cukup untuk mengendalikan ujaran kebencian (*hate speech*). Karena itu, diperlukan langkah lain, yakni upaya kultural dan edukasi untuk memberikan penyadaran pada para pengguna media sosial dengan literasi media atau kecerdasan bermedia salah satunya melalui pendidikan kewarganegaraan.

Tulisan ini menguraikan pentingnya literasi media melalui pendidikan kewarganegaraan untuk pengendalian ujaran kebencian (*hate speech*) sehingga terbentuk kompetensi warga negara yang berwawasan global.

APA ITU UJARAN KEBENCIAN DAN MENGAPA BERBAHAYA

Ujaran kebencian (*hate speech*) memang belum memiliki definisi yang jelas dan pasti. Black's Law Dictionary (9th Edition) mendefinisikannya sebagai : "*Speech that carries no meaning other than expression of hatred for some group, such us a particular race, esp. in circumstances in which the communications is likely to provoke violence"* (Ucapan yang tidak memiliki makna lain selain ekspresi kebencian terhadap kelompok tertentu, misalnya ras, khususnya dalam situasi di mana ekspresi tersebut dapat memicu terjadinya kekerasan). Dua hal penting yang dapat ditarik dari definisi tersebut adalah unsur 'tidak memiliki makna selain ekspresi kebencian' dan 'memicu terjadinya kekerasan'.

Ujaran kebencian (*hate speech*) didefinisikan sebagai ucapan dengan motivasi bias yang mengandung nuansa permusuhan dan berbahaya yang ditujukan pada orang atau sekelompok orang yang dinilai tidak memiliki kesamaan karakteristik asal. Ujaran kebencian mengandung ungkapan diskriminatif, intimidasi, pernyataan antagonistik, dan/atau sikap yang merugikan terhadap karakteristik mereka yang dibenci, termasuk jenis kelamin, ras, agama, suku, warna

[18] Beberapa minggu sesudah SE tersebut beredar di publik, media mulai mengangkat isu ujaran kebencian (*hate speech*). Beberapa pengamat dan masyarakat mendukunng SE tersebut namun ada pula yang menolaknya. Bagi yang menolak sebagian berpendapat bahwa *beleid* tersebut dapat mengancam kebebasan berekspresi dan alat untuk membungkam kritik kebijakan pemerintah sebab SE ini dianggap terlalu kabur dan luas mengartikan ujaran kebencian (*hate speech*). Namun lepas dari pro dan kontra tersebut, Komnas HAM percaya bahwa Kapolri punya niat baik dalam menerbitkan SE tersebut.

kulit, asal negara, kecatatan atau orientasi seksual (Resolusi PBB Nomor 66/167, awal 2012).

Ujaran kebencian (*hate speech*) juga banyak didefinisikan oleh para ahli. Robert Post, salah satu ilmuan yang banyak dirujuk dalam diskursus ujaran kebencian (*hate speech*) mendefinisikan ujaran kebencian sebagai "*speech expressing hatred or intolerance of other social group especially on the basis of race and sexuality*.' (Post 2009: 123). Definisi ini mengandung dua aspek penting : pertama berkaitan dengan substansi atau konten ujaran dan yang kedua berkaitan dengan jenis kelompok yang disasar. Sebuah ujaran (*speech*) bisa dikatakan (*hate*) apabila yang pertama ia mengekspresikan perasaan kebencian atau intoleransi yang bersifat ekstrim dan yang kedua perasaan tersebut ditujukan kepada kelompok lain berdasarkan identitas mereka seperti ras dan orientasi seksual.

Menurut SE Kapolri Nomor SE/06/X/2015 menyatakan bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP yang berbentuk antara lain penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan penyebaran berita bohong dan semua tindakan tersebut memiliki tujuan atau dapat berdampak pada tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial. Aspeknya meliputi suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel dan orientasi sosial.

Mengapa ujaran kebencian sangat berbahaya ? Menurut Iqbal Ahnaf & Suhadi (2016) setidaknya ada 4 (empat) alasan mengapa ujaran kebencian sangat berbahaya. *Pertama*, ujaran kebencian pada dasaranya adalah intimidasi dan pembatasan terhadap kebebasan berbicara karena ujaran kebencian memperkuat situasi sosial yang menghambat partisipasi bebas warga negara dalam demokrasi. Bisa dikatakan *hate speech* pada dasarnya adalah *anti-free speech* karena ujaran kebencian menuntut pembatasan terhadap keragaman ujaran atau *pluralistic speech*. Ujaran kebencian menghambat terjadinya pertukaran gagasan secara bebas. *Kedua*, ujaran kebencian berperan penting dalam terciptanya polarisasi sosial berdasarkan kelompok identitas. *Ketiga*, ujaran kebencian tidak hanya

dimaksudkan untuk menciptakan wacana permusuhan, menyemai benih intoleransi atau melukai perasaan terhadap kelompok identitas lain, tetapi juga telah menjadi alat mobilisasi atau rekrutmen oleh kelompok-kelompok garis keras. *Keempat*, ujaran kebencian mempunyai kaitan baik secara langsung dan tidak langsung dengan terjadinya diskriminasi dan kekerasan. Hal ini banyak terjadi terutama dalam situasi konflik dan pertarungan politik seperti pemilu.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam buku saku penanganan ujaran kebencian (2015:3) mengungkapkan bahwa ujaran kebencian sangat berbahaya karena :

a. Merendahkan manusia lain
b. Menimbulkan kerugian materiil dan korban manusia
c. Bisa berdampak pada konflik
d. Bisa berdampak pada pemusnahan kelompok (*genosida*)

REGULASI UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*)

Berikut beberapa penjabaran singkat terkait regulasi yang mengatur tentang ujaran kebencian *hate speech* di Indonesia.

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
    1. Pasal 156 KUHP : Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongaan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
    2. Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP
        1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau denda paling banyak empat ribu liama ratus rupiah.

2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatahan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

3. Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP
   1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama abaik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaraan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
   2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
   3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.
4. Pasal 311 KUHP ayat (1) : Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empaat tahun.

b. UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
   1. Pasal 28 ayat (1) dan (2)
      1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)

2. Pasal 45 ayat (2) : setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

c. UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
   1. Pasal 16 : Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta)

LITERASI MEDIA

Literasi yang dalam bahasa Inggrisnya *literacy* berasal dari bahasa Latin *littera* (huruf) yang pengertiannya melibatkan penguasaan sistem-sistem tulisan dan konvensi-konvensi yang menyertainya. Literasi media merupakan bagian dari literasi informasi yang seiring dengan perkembangan zaman sehingga media juga ikut berkembang. Di Indonesia, *literasi media (media literacy)* lebih dikenal dengan istilah *melek media*.

Definisi media literasi yang secara luas dikenal disampaikan pada *'National Leadership Conference on Media Education'* pada tahun 1992, yaitu : kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi dan mengkomunikasikan pesan dalam pelbagai bentuknya (Christ & Potter, 1998, Aufderheide, 1992).

Menurut James Potter (2005: 22) *media literacy* adalah seperangkat cara pandang aktif kita untuk menampilkan diri kita pada sebuah media dalam rangka untuk menafsirkan makna pesan yang kita hadapi. Potter juga menambahkan bahwa *media literacy* adalah ketika kita tidak begitu saja menerima gambaran-gambaran

yang disampaikan olehh sebuah pesan. Menurut Potter, *media literacy* memberi kita kontrol terhadap berbagai interpretasi.

Dari beberapa definisi diatas, literasi media dapat dijelaskan sebagai kecakapan bermedia, yaitu sebuah kesadaran dan kecakapan komprehensif untuk menempatkan diri dan masyarakat di depan media sebagai pelaku aktif. Dengan adanya kecakapan bermedia, seseorang diharapkan mampu untuk menyeleksi media dan isinya untuk dikonsumsi, sehingga literasi media diartikan sebuah pemahaman akan sumber-sumber dan teknologi komunikasi, kode-kode yang digunakan, pesan-pesan yang dihasilkan serta seleksi, interpretasi dan dampak dari pesan-pesan tersebut.

Silverblatt (dalam Potter, 2001: 72) menyatakan bahwa *media literacy* memiliki lima elemen yaitu: (1) Sebuah kesadaran akan dampak media terhadap individu dan masyarakat, (2) Sebuah pemahaman akan proses komunikasi massa, (3) Pengembangan strategi-strategi yang digunakan untuk menganalisis dan membahas pesan-pesan media, (4) Sebuah kesadaran akan isi media sebagai „teks" yang memberikan wawasan dan pengetahuan ke dalam budaya kontemporer manusia dan diri manusia sendiri, (5) Peningkatan kesenangan, pemahaman dan apresiasi terhadap isi media.

Literasi media berfokus pada individu sebagai pihak yang memproduksi, mereproduksi, atau mengkonsumsi pesan. Dalam konteks media *online*, penekanan pada individu ini menjadi lebih strategis, karena pelaku komunikasi utama pada ranah *online* adalah individu (*netizen*). Seperti pada media sosial, kunci wacana ada pada para pemilik akun media sosial. Tujuan literasi media adalah memberi kita kontrol yang lebih besar atas interpretasi karena semua pesan media merupakan hasil konstruksi.

LITERASI MEDIA MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK PENGENDALIAN UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DALAM RANGKA MEMBENTUK KOMPETENSI WAWASAN GLOBAL WARGA NEGARA

Pesatnya kemajuan teknologi dan informasi telah menghadapkan warga negara pada era keterbukaan informasi yang ditandai oleh lahirnya kewargaan digital (*digital citizenship*) dimana seorang warga negara tidak hanya menjadi bagian dari negaranya saja tetapi memandang secara keseluruhan dari bagian dunia atau warga negara global (*global society*). Sebagai warga negara global, seseorang harus memiliki kompetensi wawasan global yang menghendaki warga negara yang dapat bekerja dan memiliki aktifitas hidup sebagai warga negara yang baik dalam tatanan kehidupan dunia.

Kompetensi untuk hidup secara global yang harus dimiliki oleh warga negara dikemukakan oleh Zhao (Wolbring, 2012) bahwa *As citizens of the globe, they need to be aware of the global nature of societal issues, to care about people in distant places, to understand the nature of global economic integration, to appreciate the interconnectedness and interdependence of peoples, to respect and protect cultural diversity, to fight for social justice for all, and to protect planet earth—home for all human beings".*

Seorang warga negara yang efektif dalam kehidupan globalisasi pada dasarnya dikehendaki memiliki kompetensi dalam tatanan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang siap memiliki hubungan dan koneksi melintasi perbedaan namun sekaligus menjaga dan memperdalam rasa identitas dan integritas dirinya sebagai bagian dari warga negara suatu negara.

Kompetensi wawasan global secara lebih lanjut sejalan dengan pemikiran warga negara yang diperlukan pada abad ke-21 sebagaimana dikemukakan oleh Cogan (1998:97) yang menjelaskan tentang delapan karakteristik yang merupakan ciri-ciri, keterampilan, dan kompetensi tertentu pada warga negara yang hidup di abad ke- 21. Karakteristik tersebut diperlukan untuk mengatasi dan mengelola gejala yang tidak diinginkan. Delapan karakteristik itu adalah :

1. *The ability to look at and approach problem as a member of global society*.
2. *The ability to work with others in a cooperative way and to take responsibility for one's rules/duties withn society*.
3. *The ability to understand, accept, appreciate, and tolerate cultural differences.*
4. *The capacity to think in a critical and systematic way*.

5. *The willingness to resolve conflict in a non violent marmer*.

6. *The willingness to change one's life style and consumption habits toprotect the environment*.

7. *The ability to be sensitive toward and to defend human right* (eg. Right of women, ethnic minorities)

8. *The willingness and ability to participate in politics at local, national, and international levels*.

Oleh sebab itulah, kewargaan digital (*digital citizenship*) melahirkan tantangan baru penguatan wawasan global warga negara karena pengembangan kewargaan digital adalah untuk menciptakan masyarakat pengguna teknologi digital dan media massa dapat dengan baik dan pintar mengevaluasi penggunaan teknologi mereka sendiri untuk menjadi anggota yang produktif dari masyarakat digital dan global. Kewargaan digital mensyaratkan terbentuknya norma-norma yang sesuai, serta perilaku yang bertanggung jawab dengan memperhatikan penggunaan teknologi, penyalahgunaan isu-isu penggunaan teknologi, serta etika dalam berkomunikasi termasuk dalam hal ini penyalahgunaan media sosial untuk ujaran kebencian (*hate speech*).

Penggunaan informasi dan teknologi digital oleh warga negara saat ini, tidaklah bebas nilai. Tetapi ia perlu digunakan secara baik dan benar, sebab penggunaan informasi dan tekonologi digital terikat oleh nilai dan norma tertentu sehingga warga negara terhindar dari dampak negatif pengunaan informasi dan teknologi digital dalam konteks ini adalah ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial.

UNESCO (Gagliardon, 2015) telah menjadikan pendekatan literasi media sebagai salah satu upaya melawan ujaran kebencian (*hate speech*) melalui pendidikan kewargaan (*citizenship education*). Mengapa literasi media melalui pendidikan kewarganegaraan? Sebab literasi media melalui pendidikan kewarganegaraan berfokus pada upaya mempersiapkan individu yang melek informasi dan warga yang bertanggung jawab, melalui studi hak, kebebasan, dan tanggung jawab. Literasi media melalui pendidikan kewarganegaraan dengan demikian menyiapkan warna negara untuk memiliki kompetensi wawasan global.

Secara operasional, aspek literasi media melalui pendidikan kewarganegaraan ini harus bisa memunculkan kesadaran tentang posisi dan peran media baru (*new media*) dalam kehidupan berbangsa. Warga harus sadar bahwa media ibarat pisau bermata dua, bisa untuk membangun masyarakat atau merusak masyarakat dengan dampak-dampak yang diakibatkannya. Warga harus sadar bahwa mereka berada di ruang publik ketika berselancar di dunia *online*, sehingga segala tindakannya tidak bebas nilai. Lebih dari itu, warga juga harus sadar dengan peran strategisnya. Setiap orang kini adalah wartawan (*citizen journalist*) ketika mereka terlibat dalam aksi mencari, menerima, mengolah, dan menyebarkan informasi. Sebagai wartawan, perhatian pada etika adalah mutlak. Dari sisi kompetensi, literasi media dalam pendidikan kewarganegaraan harus mampu melahirkan: (1) daya kritis dalam menerima dan memaknai pesan, (2) kemampuan untuk mencari dan memverifikasi pesan, (3) kemampuan untuk menganalisis pesan dalam sebuah diskursus, (4) memahami logika penciptaan realitas oleh media, dan (5) kemampuan untuk mengkonstruksi pesan positif dan mendistribusikannya kepada pihak lain. Dengan kata lain kepemilikan pengetahuan dan pemahaman terhadap *content* media diharapkan warga dapat menentukan pilihan, dan mengedukasikan kepada komunitasnya mana informasi yang bermanfaat, dan sebaliknya.

Perhatian literasi media melalui pendidikan kewarganegaraan terkait ujaran kebencian meliputi pengetahuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi pesan kebencian, sehingga memungkinkan individu untuk menangkal pesan kebencian. Salah satu tantangan saat ini adalah mengadaptasi tujuan dan strategi ini ke dunia digital, tidak hanya menyediakan argumen, tetapi juga pengetahuan dan keterampilan teknologis bahwa warga negara mungkin perlu untuk menetralkan kebencian *online*. Sebuah konsep baru kewarganegaraan digital sedang diusulkan oleh beberapa organisasi yang menggabungkan tujuan inti dari literasi media dan informasi, bertujuan untuk mengembangkan ketrampilan teknis dan kritis bagi konsumen dan produsen media, dan yang menghubungkan mereka dengan etika dan hak sipil.

Di Indonesia, pendidikan kewarganegaraan telah menjadi bagian dari kurikulum, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Melihat dampak dari minusnya pemahaman media, sehingga meningkatnya pesan kebencian di media *online*, isi pendidikan kewarganegaraan perlu memasukkan aspek-aspek yang berkaitan dengan pesan kebencian pada media. Target pendidikan ini terutama diarahkan pada kalangan/warga negara muda karena beberapa alasan. Pertama, secara umum, usia muda adalah fase rawan, di mana mereka belum memiliki konsp diri yang kokoh. Jiwa muda diwakili oleh semangat yang menggebu dan kecederungan cepat bereaksi pada stimulus dari luar. Kedua, kalangan/warga negara muda inilah pengguna media baru terbesar. Mereka ini adalah penduduk asli dunia digital (*native digital*) yang akan mewarnai hiruk pikuk dalam dunia *online*.

PENUTUP

Pesatnya penggunaan teknologi, informasi dan media massa oleh warga negara tidaklah bebas nilai. Teknologi, informasi dan media massa yang membawa penggunanya menjadi warga negara global perlu digunakan secara baik dan benar, sebab penggunaan informasi dan tekonologi digital terikat oleh nilai dan norma tertentu. Untuk menghindari dampak negatif pengunaan teknologi, informasi dan media massa dalam konteks ini adalah ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial literasi media melalui pendidikan kewarganegaraan perlu secara masif dilakukan sebab literasi media melalui pendidikan kewarganegaraan berfokus pada upaya mempersiapkan individu yang melek informasi dan warga yang bertanggung jawab, melalui studi hak, kebebasan, dan tanggung jawab. Bila warga negara memiliki literasi media ia akan dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi tersebut berkaitan dengan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki dalam memaknai pesan. Pengetahuan literasi media akan mendorong orang untuk selalu mempertanyakan atas apa yang mereka tonton, baca atau dengarkan. Pengetahuan yang baik akan mengembangkan rasa kritis untuk menganalisa pesan, dan bias berita pada program-program yang ada dalam media massa.

DAFTAR PUSTAKA

Ahnaf, M.I. dan Suhadi. 2015. "Isu-Isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi". dalam *Harmoni: Jurnal Multikultur Multireligius.* Jakarta: Kementerian Agama RI, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan.

Aufderheide, Patricia. 1992. *Media Literacy. A Report of the National Leadership Conference on Media Literacy*. The Aspen Institute Wye Center : Queenstown Maryland.

Cogan, J., 1998. *Citizethnship Education for the 21st Century: Setting the Context"*. Kogan Page Ltd : London.

Gagliardon, et.al. 2015. *Countering Online Hate Speech*. UNESCO Publishing : Paris.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Post, Robert. 2011. "Hate Speech," in Hare, I. & Weinstein, J. *Extreme Speech and Democracy*, Oxford University Press.

Potter, James. 2001. *Media Litaracy*. Sage Publication : London.

Potter, James. 2005. *Media Litaracy*. 3rd edition. Sage Publication : NY.

Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor ; SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Wahab, A. A. & Sapriya, 2011. *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan.* Alfabeta\ : Bandung.

Wolbring, G., 2012. Citizenship Education Through an Ability Expectation and "Ableism" Lens: The Challenge of Science and Technology and Disabled People. *Education Sciences,* 2(3)

IMPLEMENTASI KOMPETENSI KEPRIBADIAN GURU PPKN DALAM MEMBENTUK *GOOD CITIZEN* PADA SISWA SMP NEGERI 2 KARANGPANDAN KARANGANYAR

Erna Gesti Fadrusiana
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
ernagesfana@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang kompetensi kepribadian guru untuk membentuk *good citizen.* Pada kompetensi kepribadian dijabarkan terdapat kemampuan guru untuk tampil sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia dan menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Tujuan dari adanya kompetensi guru tersebut diharapkan guru PPKn dapat membentuk *good citizen* pada siswa melalui pembiasaan-pembiasaan di sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Tempat yang digunakan yaitu di SMP Negeri 2 Karangpandan Karanganyar. Sedangkan sumber data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumen. Dalam proses menganalisis data, peneliti menggunakan empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data lalu penarikan kesimpulan.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PPKn telah menerapkan kompetensi kepribadian guru yang tampil jujur, berakhlak mulia dan menjadi teladan sesuai dengan kompetensi kepribadian guru. Hal tersebut ditunjukkan melalui pembiasaan sehari-hari dan pembiasaan tersebut mampu dalam membentuk *good citizen* pada siswa. Pembiasaan tersebut sesuai dengan kriteria *good citizen* diantaranya, menaati tata tertib di sekolah (*obey the laws)*,mengajak siswa untuk upacara bendera *(love country)*, hidup rukun antar siswa di sekolah *(unite)*, ikut serta dalam pemilihan pengurus kelas *(express opinion)* dan menerima keputusan dengan rendah hati jika pendapatnya ditolak *(self control)*. Untuk dapat berjalan lancar, guru PPKn juga menerapkan sanksi agar siswa mengikuti dan menaati peraturan dan kegiatan tersebut, yaitu melalui teguran, peringatan, membuat pernyataan, serta pemanggilan orang tua. Melalui pembiasaan ini diharapkan guru PPKn dapat menerapkan kompetensi kepribadian dan membentuk *good citizen* pada siswa.

Kata kunci: *kompetensi kepribadian, good citizen, guru, PPKn, siswa.*

PENDAHULUAN

Guru merupakan orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan siswa. Guru professional harus siap difungsikan sebagai orang tua kedua bagi para siswa setelah orang tua kandung mereka. Guru harus senantiasa meningkatkan dan mengembangkan ilmunya untuk meningkatkan potensi yang dimilikinya. Guru professional bukanlah hanya untuk memenuhi kompetensi saja yaitu kompetensi professional, tetapi juga harus memnuhi semua kompetensi (Mulyasa, 2007). Menurut PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 28 Ayat 3 dan UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat 1 menyatakan "Kompetensi pendidik sebagai agen

pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: (a) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi profesional, dan (4) kompetensi sosial.

Pada Pendidikan Kewarganegaraan mempelajari untuk menjadi warga Negara yang baik atau yang sering disebut *good citizen*. Agar dapat mencapai hal tersebut, perlu adanya peran guru sesuai dengan kompetensi kepribadian untuk membentuk *good citizen*. Salah satunya yaitu guru harus tampil sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan menjadi teladan bagi siswa. Namun, karena perkembangan jaman banyak guru yang mulai lalai dalam penanaman nilai-nilai moral pada siswa, sehingga untuk membentuk *good citizen* perlu pembiasaan-pembiasaan yang harus ditanamkan sejak dini terutama dimulai dari guru. Dari beberapa sekolah yang saya observasi, terdapat beberapa guru di sekolah tersebut yang bersikap acuh tak acuh pada siswanya. Selain itu juga membiarkan siswa lolos dari sanksi atau hukuman jika siswanya melanggar tata tertib. Seperti yang kita tahu, tata tertib sekolah dibuat secara resmi oleh pihak yang berwenang dengan melihat berbagai macam pertimbangan yang sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan sekolah tersebut. Tata tertib sekolah memuat hal-hal yang diwajibkan maupun hal-hal yang dilarang untuk siswa selama mereka berada di lingkungan sekolah, dan apabila ternyata terjadi pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh siswa maupun warga sekolah lainnya, maka pihak sekolah memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Lebih lanjut, kompetensi dalam pendidikan kewarganegaraan ada tiga macam, diantaranya pendidikan kewarganegaraan *(civic knowledge)*, keterampilan kewarganegaraan *(civic skills)*, dan karakter kewarganegaraan *(civic disposition)*. Kompetensi karakter kewarganegaraan *(civic disposition)* meliputi ciri-ciri watak pribadi seperti tangggung jawab moral, disiplin diri, dan rasa hormat terhadap nilai dan martabat kemanusiaan dan ciri-ciri watak kemasyarakatan antara lain seperti semangat kemasyarakatan, sopan santun, rasa hormat terhadap peraturan hukum, berfikir kritis, hasrat untuk mendengarkan, bernegosiasi, dan berkompromi sangat diperlukan bagi keberhasilan demokrasi. Guru harus tampil sebagai pribadi yang

jujur, berakhlak mulia, dan menjadi teladan bagi siswa merupakan salah satu cara untuk membentuk karakter kewarganegaraan pada siswa.

Di SMP Negeri 2 Karangpandan Karanganyar, terdapat tiga orang guru PPKn yang menerapkan berbagai kegiatan pembiasaan dalam membentuk *good citizen*. Diantaranya dengan mendidik anak untuk disiplin dengan datang tepat waktu, mengikuti upacara bendera, dan lain sebagainya. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk membentuk *good citizen* pada siswa sebagai generasi penerus bangsa. Dari penjelasan pada latar belakang maka dapat disusun rumusan masalah "Bagaimana implementasi sikap jujur, berakhlak mulia, dan menjadi teladan sebagai salah satu kompetensi kepribadian pada guru PPKn dalam membentuk *good citizen* pada siswa SMP Negeri 2 Karangpandan Karanganyar?"

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan mengenai implementasi sikap jujur, berakhlak mulia, dan menjadi teladan sebagai salah satu kompetensi kepribadian guru PPKn dalam membentuk *good citizen* pada siswa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Tempat atau lokasi yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian juga merupakan salah satu jenis sumber data yang dimanfaatkan oleh peneliti (H.B Sutopo, 2002: 52). Tempat yang digunakan untuk penelitian yaitu di SMP Negeri 2 Karangpandan Karanganyar. Penelitian ini memakan waktu kurang lebih selama satu minggu dengan melibatkan tiga orang guru PKn dan 12 orang siswa. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2011: 308). Untuk mendapatkan informasi, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan serta studi dokumen. Dalam proses menganalisis data, peneliti menggunakan empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data lalu penarikan kesimpulan (H. B Sutopo (2002: 91)).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kompetensi Kepribadian Guru

W. Robert Houston (dalam Janawi, 2011: 29) memberikan definisi, competence ordinarily is defined as "adequacy for a task or as "possession" of require knowledge, skill, and abilities". Kompetensi dirumuskan sebagai suatu tugas yang memadai, atau pemilikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang.

Dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 10 dinyatakan secara tegas bahwa "kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan".

Selanjutnya, Gordon (dalam Janawi, 2011: 42) memperinci kompetensi guru kepada lima kategori, yaitu:

1. Kompetensi intelektual

   Adalah beberapa perangkat pengetahuan yang ada dalam diri individu yang diperlukan untuk menunjang berbagai aspek kinerja guru.
2. Kompetensi fisik

   Adalah seperangkat kemampuan fisik yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagai guru dalam berbagau situasi.
3. Kompetensi pribadi

   Adalah perangkat perilaku yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam mewujudkan dirinya sebagai pribadi yang mandiri untuk melkukan transformasi diri, identitas diri, dan pemahaman diri.
4. Kompetensi sosial

   Adalah perangkat perilaku tertentu yang merupakan dasar dari pemahaman diri sebagai bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan sosial serta tercapainya interaksi sosial secara efektif.
5. Kompetensi spiritual

   Merupakan pemahaman, penghayatan, serta pengalaman kaidah-kaidah keagamaan.

Selanjutnya, kompetensi kepribadian meliputi kemampuan personalitas, jati diri sebagai seorang tenaga pendidik yang menjadi panutan bagi perserta didik.kompetesi inilah yang selalu menggambarkan prinsip bahwasanya guru adalah sosok yang patut digugu dan ditiru. Dengan kata lain, guru menjadi suri teladan bagi peserta didik, apalagi untuk jenjang pendidikan dasar atau taman kanak-kanak. Secara khusus kemampuan ini dapat dijabarkan berupa:

a. Berjiwa pendidik dan bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.
b. Tampil sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia dan menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
c. Tampil sebagai pribadi yang mantab, dewasa, stabil dan berwibawa.
d. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga sebagai tenaga pendidik dan rasa percaya diri (Priansa, 2014).

Pada penelitian ini, peneliti lebih menekankan poin kedua pada kompetensi kepribadian, yaitu guru harus tampil jujur, berakhlak mulia, dan menjadi teladan bagi siswanya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10 ayat 1 dikemukakan bahwa kompetensi kepribadian adalah "kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik". Motivasi adalah suatu syarat mutlak untuk belajar. Banyak kita temui di sekolah peserta didik yang malas, tidak disiplin, suka membolos, suka mencontek, dan lain sebagainya. Hal tersebut menunjukkan bahwa guru tidak berhasil dalam memberikan motivasi. Karena motivasi tidak hanya melalui ucapan tetapi juga melalui tindakan dan teladan yang baik. Oleh karena itu, guru harus mempunyai kepribadian yang baik yang bisa memahami dirinya, peserta didik, lingkungan dan masyarakatnya.

Membentuk *Good Citizen*

Good citizen adalah warga negara yang baik yang mentaati peraturan yang berlaku disuatu Negara (Rahmad dan Yudi Riana, 2016). Untuk membentuk *good citizen*, berikut ini adalah beberapa kriteria dari *good citizen* (http://dunia-blajar.blogspot.co.id/2017/09/pengertian-serta-kriteria-good-citizen.html):

1. *Active*, yaitu untuk menjalankan suatu pemerintahan yang baik, tentunya dibutuhkan suatu masyarakat yang aktif, tidak pasif.
2. *Be Cooperative*, maksudnya masyarakat juga harus mendukung program-program pemerintah dalam menciptakan Negara yang baik.
3. *Self Control*, untuk menjadi masyarakat yang baik tentunya kita harus dapat mengendalikan diri sendiri.
4. *Obey the Laws*, yaitu patuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
5. *Love Country*, maksudnya mencintai negeri atau nasionalisme. Kita harus memupuk rasa nasionalisme kita terhadap Negara.
6. *Unite*, atau persatuan. Kita sebagai satu bangsa, satu negeri dan satu tanah air merupakan satu keluarga yang besar.
7. *Truthful and Trustworthy*, jujur dan dapat dipercaya. Kepercayaan adalah hal yang sulit didapat.
8. *Express Opinion*, kita harus dapat mengekspresikan dan menyalurkan pendapat kita.
9. *Love Others*, mengasihi sesama. Jika kita saling mengasihi satu sama lain, maka perdamaian, keamanan dan kesejahteraan akan dapat dicapai bersama-sama.

Dalam dunia pendidikan, konsep *good citizen* kiranya sudah termaktub dalam tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan secara universal di dunia. Hal ini seperti pernyataan tentang tujuan pendidikan kewarganegaraan (www.citizen.org.uk/what-is-citizenship), yaitu:

> *To equip young people with the knowledge, skills and understanding to play an active, effective part in society as informed, critical citizens who are socially and morally responsible. To give them the confidence and conviction so that they can act with others, have influence and make a difference in their communities (locally, nationally, and globally).*

Kutipan di atas, menunjukkan bahwa tujuan dari pendidikan kewarganegaaran, di antaranya untuk membekali generasi muda agar dapat turut serta aktif sebagai bagian dari masyarakat, yang diharapkan juga menjadi warga yang kritis secara sosial dan bertanggungjawab secara moral. Selain itu, bertujuan untuk menjadikan mereka sosok yang percaya diri dan berpendirian teguh sehingga dapat bekerja secara nyata bersama individu yang lain, berpengaruh dan dapat menciptakan perubahan yang lebih baik untuk komunitas, baik itu yang sifatnya lokal, nasional, maupun global.

Dari hasil penelitian tiga orang guru PPKn yaitu Ibu Ratnaningsih, S.Pd., Bapak Supono, S.Pd., dan Ibu Dewi Krisnawati, S.Pd. menunjukkan bahwa Guru PPKn di SMP Negeri 2 Karangpandan telah melakukan atau menjalankan kompetensi kepribadian sebagai guru professional. Guru harus tampil jujur, berakhlak mulia dan menjadi teladan telah ditunjukkan melalui pembiasaan sehari-hari, misalnya

- mengajak siswa untuk upacara bendera,
- baris di depan kelas,
- hormat bendera,
- datang ke sekolah tepat waktu,
- menggunakan atribut seragam yang lengkap,
- mengajak siswa sholat berjamaah tepat waktu,
- mengajak siswa untuk aktif dalam pembelajaran di kelas seperti menyampaikan pendapatnya,
- membentuk kelompok belajar,
- ikut serta dalam membentuk pengurus kelas,
- melerai siswa yang bertengkar,
- membiasakan sikap jujur seperti saat tidak membawa buku atau tidak mengerjakan tugas siswa harus melapor pada guru,
- jika guru terlambat mengajar maka guru jujur kepada siswa alasan apa yang membuatnya terlambat.

Selain itu, dalam membentuk *good citizen* jika siswa melanggar akan langsung disikapi oleh guru. Sikap yang dilakukan oleh guru tersebut diantaranya,

a. Memberikan teguran. Guru memberikan teguran secara lisan kepada siswa.
b. Peringatan dan hukuman. Guru memberi peringatan dan hukuman kepada siswa yang sudah berulang kali melanggar dan telah mendapat teguran lebih dari tiga kali. Guru harus memberikan hukuman yang bersifat mendidik siswa.

c. Mengisi pernyataan. Setelah peringatan dan sanksi, mengisi pernyataan dengan ditanda tangani kepala sekolah merupakan cara guru untuk membentuk *good citizen*.

d. Pemanggilan orang tua. Merupakan salah satu alternatif yang dilakukan guru untuk menangani siswa. Guru memanggil orang tua untuk berdiskusi bersama dalam memecahkan persoalan siswa yang sering melanggar peraturan atau tata tertib yang ada.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan kriteria *good citizen*, yaitu

1. *Active*, yaitu untuk menjalankan suatu pemerintahan yang baik, tentunya dibutuhkan suatu masyarakat yang aktif, tidak pasif. Pada poin ini, guru PPKn mengajak siswa untuk aktif saat pembelajaran. Selain itu juga mengajak siswa untuk membentuk pengurus kelas seperti ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan sebagainya melalui pemilihan.
2. *Be Cooperative*, maksudnya masyarakat juga harus mendukung program-program pemerintah dalam menciptakan Negara yang baik. Guru PPKn mengajak siswa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah, seperti pramuka.
3. *Self Control*, untuk menjadi yang baik tentunya kita harus dapat mengendalikan diri sendiri. Dalam hal ini diajarkan saat proses pembelajaran, ketika siswa menyampaikan pendapatnya dan tidak dapat diterima maka siswa harus belajar rendah hati atau mengendalikan diri untuk tidak marah saat menerima keputusan bersama.
4. *Obey the Laws*, yaitu patuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di sekolah pasti terdapat tata tertib yang wajib dipatuhi oleh seluruh anggota sekolah.
5. *Love Country*, maksudnya mencintai negeri atau nasionalisme. Kita harus memupuk rasa nasionalisme kita terhadap Negara. Diajarkan oleh guru PPKn melalui hormat bendera, mengikuti upacara-upacara hari besar Nasional.
6. *Unite*, atau persatuan. Kita sebagai satu bangsa, satu negeri dan satu tanah air merupakan satu keluarga yang besar. Guru PPKn mengajarkan dengan

mengajak siswa untuk saling hidup rukun. Jika ada siswa yang bertengkar, siswa yang lain harus melerainya.

7. *Truthful and Trustworthy*, jujur dan dapat dipercaya. Kepercayaan adalah hal yang sulit didapat. Terlihat dari cara guru PPKn membiasakan sikap jujur saat siswa tidak membawa buku atau tidak mengerjakan tugas sekolah. Selain itu, saat guru terlambat mengajar, guru juga memberitahu kepada siswa dengan jujur alasan apa yang membuatnya terlambat.
8. *Express Opinion*, kita harus dapat mengekspresikan dan menyalurkan pendapat kita. Melalui pemilihan pengurus kelas ataupun proses pembelajaran aktif, siswa dibiasakan untuk ikut serta dalam menyalurkan pendapatnya.
9. *Love Others*, mengasihi sesama. Jika kita saling mengasihi satu sama lain, maka perdamaian, keamanan dan kesejahteraan akan dapat dicapai bersama-sama. Dengan membentuk kelompok belajar, siswa dibiasakan untuk berbagi ilmu kepada temannya, sehingga siswa yang awalnya mengalami kesulitan dapat lebih memahami materi setelah belajar bersama.

Untuk mendukung keberhasilan pembiasaan dalam membentuk *good citizen*, guru juga menerapkan sanksi kepada siswa yang melanggar dengan cara memberikan teguran, peringatan dan hukuman, mengisi pernyataan serta pemanggilan orang tua. Sanksi yang diberikan tentunya yang mendidik siswa bukan hukuman yang menyiksa siswa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di SMP Negeri 2 Karangpandan Karanganyar, dapat disimpulkan bahwa guru PPKn telah menerapkan kompetensi kepribadian guru yang tampil jujur, berakhlak mulia dan menjadi teladan sesuai dengan kompetensi kepribadian guru. Hal tersebut ditunjukkan melalui pembiasaan sehari-hari dan pembiasaan tersebut mampu dalam membentuk *good citizen* pada siswa. Pembiasaan tersebut tidak hanya ditujukan kepada siswa, tetapi guru juga harus membiasaan terhadap dirinya

sendiri. Sesuai dengan teori kriteria *good citizen*, guru PPKn menerapkan pembiasaan-pembiasaan melalui tindakan sebagai berikut:

1. *Active*, yaitu untuk menjalankan suatu pemerintahan yang baik, tentunya dibutuhkan suatu masyarakat yang aktif, tidak pasif. Pada poin ini, guru PPKn mengajak siswa untuk aktif saat pembelajaran. Selain itu juga mengajak siswa untuk membentuk pengurus kelas seperti ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan sebagainya melalui pemilihan.
2. *Be Cooperative*, maksudnya masyarakat juga harus mendukung program-program pemerintah dalam menciptakan Negara yang baik. Guru PPKn mengajak siswa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah, contohnya pramuka.
3. *Self Control*, untuk menjadi yang baik tentunya harus dapat mengendalikan diri sendiri. Dalam hal ini diajarkan saat proses pembelajaran, ketika siswa menyampaikan pendapatnya dan tidak dapat diterima maka siswa harus belajar rendah hati atau mengendalikan diri untuk tidak marah.
4. *Obey the Laws*, yaitu patuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di sekolah pasti terdapat tata tertib yang wajib dipatuhi oleh seluruh anggota sekolah.
5. *Love Country*, maksudnya mencintai negeri atau nasionalisme. Harus memupuk rasa nasionalisme terhadap Negara. Diajarkan oleh guru PPKn melalui hormat bendera, mengikuti upacara-upacara hari besar Nasional.
6. *Unite*, atau persatuan. Sebagai satu bangsa, satu negeri dan satu tanah air merupakan satu keluarga yang besar. Guru PPKn mengajarkan dengan mengajak siswa untuk saling hidup rukun. Jika ada siswa yang bertengkar, siswa yang lain harus melerainya.
7. *Truthful and Trustworthy*, jujur dan dapat dipercaya. Kepercayaan adalah hal yang sulit didapat. Terlihat dari cara guru PPKn membiasakan sikap jujur saat siswa tidak membawa buku atau tidak mengerjakan tugas sekolah. Selain itu, saat guru terlambat mengajar, guru juga memberitahu kepada siswa dengan jujur alasan apa yang membuatnya terlambat.

8. *Express Opinion*, harus dapat mengekspresikan dan menyalurkan pendapat. Melalui pemilihan pengurus kelas ataupun proses pembelajaran aktif, guru PPKn membiasakan siswa untuk menyalurkan pendapatnya.
9. *Love Others*, mengasihi sesama. Jika saling mengasihi satu sama lain, maka perdamaian, keamanan dan kesejahteraan akan dapat dicapai bersama-sama. Dengan membentuk kelompok belajar, siswa dibiasakan untuk berbagi ilmu kepada temannya, sehingga siswa yang awalnya mengalami kesulitan dapat lebih memahami materi setelah belajar bersama.

Untuk mewujudkan *good citizen* pada siswa perlu faktor pendukung, salah satunya dengan pemberian sanksi kepada siswa yang melanggar. Di SMP Negeri 2 Karangpandan Karanganyar, guru PPKn menerapkan sanksi sebagai tindak lanjut dari pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh siswa dengan cara memberikan teguran, peringatan dan hukuman, mengisi pernyataan serta pemanggilan orang tua. Dengan adanya kegiatan pembiasaan dan sanksi terhadap pelanggarnya, diharapkan dapat membentuk *good citizen* pada siswa. Selain itu guru PPKn juga sebaiknya senantiasa memperbaiki dan meningkatkan kompetensi kepribadian yang wajib dimiliki sebagai guru professional.

DAFTAR PUSTAKA

Acep Supriadi., Mariatul Kiftiah. 2014. *Efektivitas Pemberian Sanksi Bagi Siswa Pada Pelanggaran Tata Tertib Di Smp 2 Kapuas Timur Kabupaten Kapuas*. Pendidikan Kewarganegaraan, IV, 636.

Aditya W.P. 2017. Pengertian Serta Kriteria Good Citizen (Warga Negara yang Baik), http://dunia-blajar.blogspot.co.id/2017/09/pengertian-serta-kriteria-good-citizen.html, diakses 18 November 2017.

http://www.academia.edu/11731071/maklaah_good_cityzen, diakses 18 November 2017.

https://meylahazizah.wordpress.com/2013/12/27/kompetensi-dalam-pkn-paradigma-baru/, diakses 18 November 2017.

Janawi. (2011). *Kompetensi Guru*. Bandung: Alfabeta.

Mulyasa. (2007). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 28 Ayat 3.

Priansa, Donni Juni. (2014). *Kinerja dan Profesionalisme Guru*. Bandung: Alfabeta.

Rahmad, Yudi Riana. 2016. *Konsep Good Citizen Dalam Teks Ki Agĕng Sela.* Etnografi, XVI, 59.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutopo, H. B. (2002). *Pengantar Penelitian Kualitaitf*. Surakarta: UNS Press.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

www.citizen.org.uk/what-is-citizenship , diakses 18 November 2017.

PENDIDIKAN KARAKTER DALAM KURIKULUM 2013

Muhammad Yogi Guntoro
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Yogi.Guntoro5158@gmail.com

ABSTRAK

Undang-undang RI No. 20 tahun 2003, tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 dijelaskan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pada kurikulum 2013 pendidikan karakter sudah terinternalisasikan dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Metode penelitian adalah metode kualitatif diskriptif yang berfokus pada pendidikan karakter yang terdapat di dalam kurikulum 2013 yang di terapkan di SMP N 2 Karangpandan Uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi teknik untuk menguji data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda dan teknik analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pendidikan karakter dapat diajarkan melalui empat cara yaitu pembelajaran, keteladanan, pembiasaan, dan penguatan Pendidikan karakter pada kurikulum 2013 di SMP N 2 Karangpandan juga di ajarkan melalui kegiatan intrakurikurikuler, ekstakurukuler dan kokurikuler sehingga mendapatkan hasil yang komperhensif dan menyeluruh. Saran yang dapat di berikan oleh penulis bagi pengembangan pendidikan karakter pada kurikulum 2013 di SMP N 2 Karangpandan, pendiidkan karakter di SMP N 2 Karangpandan sudah berjalan dengan baik dan hanya perlu di sempurnakan sedikit yaitu dengan cara membentuk tiga sumber utama pendidikan yang terpadu untuk melakukan pendidikan karakter yaitu keluarga, masyarakat dan sekolah.

Kata kunci : *Pendidikan Karakter, Kurikulum 2013, Tujuan Pendidikan*

PENDAHULUAN

Undang-undang RI No.20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional pasal 1 menjelaskan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam Undang-undang RI No. 20 tahun 2003, tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3

dijelaskan bahwa "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab". (Depdiknas, 2003:3)

Undang-undang diatas mengharapkan bahwa manusia Indonesia itu harus memiliki watak yang bermartabat dan dapat mengembangkan potensi diri yaitu berupa spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut Zainuddin dan Hambali, (2015: 26) "proses pendidikan adalah proses pengembangan potensi peserta didik sehingga mereka mampu menjadi pewaris dan pengembang budaya bangsa". Melalui pendidikan, berbagai nilai dan keunggulan budaya di masa lampau diperkenalkan, dikaji, dan dikembangkan menjadi budaya dirinya, masyarakat dan bangsa yang sesuai dengan zaman di mana peserta didik hidup dan mengembangkan diri. Jadi pendidikan adalah proses pewarisan budaya dan karakter bangsa bagi generasi muda dan proses pengembangan budaya dan karakter bangsa untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa di masa mendatang.

Sumberdaya manusia yang berkarakter sebagaimana yang diharapkan dapat dicapai melalui pendidikan yang berorientasi pada pembentukan jiwa *entrepreneurship*, yaitu jiwa keberanian dan kemauan menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar, jiwa kreatif untuk mencari solusi dan mengatasi problema tersebut, dan jiwa mandiri dan tidak bergantung pada orang lain.

Pendidikan memiliki fungsi untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan prestasi masa lalu itu menjadi nilai-nilai budaya bangsa yang sesuai dengan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang, serta mengembangkan prestasi baru yang menjadi karakter baru bangsa. Oleh karena itu, pendidikan karakter bangsa merupakan inti dari suatu proses pendidikan.

Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai pendidikan karakter dalam Kurikulum 2013 perlu disambut gembira dan

didukung semua pihak. Pendidikan karakter bukan hanya penting, tetapi mutlak dilakukan oleh setiap bangsa jika ingin menjadi bangsa yang beradab. Banyak fakta membuktikan bahwa bangsa-bangsa yang maju bukan disebabkan bangsa tersebut memiliki sumber daya alam yang berlimpah, melainkan bangsa yang memiliki karakter unggul seperti kejujuran, kerja keras, tanggung jawab.

Pendidikan karakter menjadi sesuatu yang penting untuk membentuk generasi yang berkualitas. Pendidikan karakter merupakan salah satu alat untuk membimbing seseorang menjadi orang baik, sehingga mampu memfilter pengaruh yang tidak baik.

Urgensi pendidikan karakter pada era millennial penting untuk laksanakan pada semua jenjang pendidikan dan semua tingkatan usia. Terutama pada jenjang sekolah menengah pertama dimana siswa sedang mencari jatidirinya. Kondisi ini semakin di perparah dengan semakin terbukanya akses informasi terutama informasi media elektronik yang kian mudah untuk di peroleh tetapi dari muatan media elektronik ini seringkali terdapat muatan-muatan informasi yang dapat memperburuk karakter anak bangsa.

> Menurut Lickona (2013: 13-18) bahwa terdapat sepuluh karakteristik jaman yang harus diwaspadai karena jika karakteristik tersebut ada di kalangan remaja berarti sebuah bangsa sedang menuju jurang kehancuran. Kesepuluh karakteristik tersebut adalah 1) meningkatnya kekerasan dan pengrusakan (*Viollencen and vandalisme*); 2) meningkatnya pencurian yang dilakukan siswa (*Stealing*); 3) maraknya penjiplakan/ketidakjujuran (*Cheating*); 4) semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua atau yang dituakan (*disrespect of outhority*); 5) pengaruh peer group yang kuat dalam tindakan kekerasan (*peer cruelty*); 6) berprasangka buruk, intoleransi, dan memusuhi orang-orang dari keyakinan yang berbeda (*Bigotry*); 7) penggunaan bahasa dan kata-kata yang semakin memburuk (*bad language*); 8) kebebasan seksualitas dan adanya rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama (*sexual precocity and abuse*); 9) semakin rendahnya tanggung jawab individu dan warga negara (*Increasing self-centeredness and declining civic resposibility*); dan 10) meningkatnya perilaku merusak diri, seperti: penggunaan narkoba, alkohol, dan lain lain (*self-destructive behavior*).

Kualitas moral seperti yang dikemukakan Lickona diatas sedang terjadi di Indonesia dan pelaku perbuatan tersebut justru di lakukan oleh remaja dan anak-anak yang sedang mencari jatidiri. Hal tersebut dapat dikarenakan krisis karakter yang sedang melanda anak muda.

Semakin terdegradasinya moral generasi muda yang mengakibatkan krisis karakter ini di perparah dengan semakin berkembangnya era digital dimana semua arus informasi dapat di akses tanpa ada filter baik atau buruk informasi tersebut. Lemahnya pengawasan orang tua dan semakin apatisnya kondisi masayarakat merupakan faktor-faktor terkikisnya karakter bangsa Indonesia.

Lebih lanjut menurut (Kosim, 2011:87) "Diakui atau tidak, fakta memperlihatkan bahwa dalam dua puluh tahun terakhir ini perilaku warga masyarakat banyak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur". Misalnya, sikap mementingkan diri sendiri; menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan, termasuk dengan cara-cara yang melanggar hukum seperti korupsi dan memeras warga masyarakat; budaya memilih jalan pintas; budaya konflik dan saling curiga; saling mencela/menjatuhkan; budaya mengerahkan otot (massa); dan budaya tidak tahu malu.

Kurang berfungsinya lembaga keluarga, masyarakat, dan sekolah dalam pendidikan karakter, karakter anak lebih banyak dibangun oleh tayangan media TV dan internet. Padahal, meskipun salah satu fungsi media adalah mendidik, TV dan internet lebih banyak menerapkan fungsi yang lain; seperti usaha/bisnis. Untuk tujuan bisnis tersebut, tayangan atau program lebih merangsang birahi daripada intelektual, lebih memberi contoh berpikir mistis daripada berpikir rasional, lebih menonjolkan kekerasan daripada kelembutan, dan lebih menonjolkan sikap munafik daripada kearifan (Warsono, 2011:152).

Kerangka pengembangan karakter dan budaya bangsa melalui pembelajaran di kalangan tenaga pendidik dirasakan sangat penting. Sebagai agen perubahan, pendidik diharapkan mampu menanamkan ciri-ciri, sifat, dan watak serta jiwa mandiri, tanggung jawab, dan cakap dalam kehidupan kepada peserta didiknya. Di samping itu, karakter tersebut juga sangat diperlukan bagi seorang pendidik karena melalui jiwa ini, para pendidik akan memiliki orientasi kerja yang lebih efisien, kreatif, inovatif, produktif serta mandiri.

Lebih lanjut Andrianto (2011:20-22) menjelaskan bahwa pengembangan karakter pada individu akan berhasil sesuai dengan yang diharapkan jika memperhatikan karakter dasar yang dimiliki individu. Karakter dasar digunakan

sebagai pijakan dalam mengembangkan dan membentuk karakter individu. Tanpa ada karakter dasar, pendidikan karakter tidak akan memiliki tujuan yang pasti.

Pada kurikulum 2013 pendidikan karakter sudah terinternalisasikan dalam muatan KI dan KD terutama pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan tetapi guru juga harus memberikan contoh teladan yang baik sehingga tujuan pendidikan nasional yang bertujuan untuk membentuk watak bangsa Indonesia dapat diwujudkan.. Pendidikan karakter pada kurikulum 2013 di bangun melalui kegiatan intrakurikurikuler, ekstakurukuler dan kokurikuler sehingga dapat komperhensif dan menyeluruh Hal ini dapat di raih apabila seluruh elemen dapat bersatu untuk membentuk karakter warga negara yang baik.

Demikian pentingnya pendidikan karakter dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka dalam makalah ini penulis tertarik untuk mengkaji pendidikan karakter dalam Kurikulum 2013.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana dalam penelitian ini akan menyajikan data deskripsi. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Kirk dan Miller (dalam Moleong, 2010:4).

Dalam penelitian ini fokus penelitian peneliti adalah pendidikan karakter yang terdapat di dalam pengimplementasian kurikulum 2013 yang di terapkan di SMP N 2 Karangpandan. Sumber data primer dari penelitian ini adalah wawancara dengan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sedangkan data sekunder berupa studi kepustakaan atau studi literatur dari peneliti. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi teknik untuk menguji data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda dan teknik analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dilapangan dapat di peroleh temuan-temuan penelitian yang dapat mendukung penelitian. Berdasarkan penelitian yang di lakukan di SMP N 2 Karangpandan dapat di ketahui bahwa pendidikan karakter yang dilakukan di SMP N 2 Karangpandan dilakukan melalui 4 cara yaitu:

1) Pembelajaran

   Dari aspek pembelajaran dapat diketahui bahwa pembelajaran di SMP N 2 Karangpandan memasukan unsur –unsur muatan pendidikan karakter ini dapat diketahui berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan juga melalui perangkat pembelajaran yang dimiliki dan digunakan oleh guru pada saat proses pembelajaran baik itu RPP ataupun Silabus. Dari RPP dan silabus dapat diketahui bahwa guru menekankan nilai-nilai pembentukan karakter berikut 1) Religius, 2) Jujur, 3) Toleransi, 4) Disiplin, 5) Kerja, 6) Kreatif, 7) Mandiri, 8)Demokratis, 9) Rasa Ingin Tahu, 10) Semangat Kebangsaan, 11) Cinta Tanah Air, 12) Menghargai Prestasi, 13) Bersahabat /Komunikatif , 14) Cinta Damai, 15) Gemar Membaca, 16) Peduli Lingkungan, 17) Peduli Sosial, 18) Tanggung Jawab.

2) Keteladanan

   Hidayatullah (2009:106) yang menyatakan bahwa salah satu dari tiga unsur agar seseorang dapat diteladani atau menjadi teladan adalah memiliki integritas, integritas adalah kesamaan antara ucapan dan tindakan atau satunya kata dan perbuatan. Aspek keteladanan merupakan aspek vital dalam proses pendidikan karakter sehingga di SMP N 2 Karangpandan keteladanan dilakukan oleh seluruh perangkat sekolah yang ada di SMP N 2 Karangpandan baik guru, staf administrasi hingga pekerja kantin dan penjaga sekolah. Selain membentuk keteladanan dari pihak sekolah juga sering berkomunikasi dengan orangtua/wali murid untuk memberikan keteladanan di lingkungan keluarga.

3) Penguatan

Penguatan nilai-nilai pembentukan karakter ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang di ikuti para siswa selain itu penguatan nilai-nilai pembentuk karakter ini juga di lakukan dengan menghadirkan sosok-sosok teladan dang ada di sekitar daerah sekolah dari bidang apapun. Penguatan ini tentulah harus melibatkan peran orang tua siswa karena bagaimanapun pendidikan karakter paling utama adalah melalui keluarga.

4) Pembiasaan

Pembiasaan penguatan nilai pembentuk karakter dilakukan di sekolah dengan berbagai cara dan menyangkut banyak hal seperti disiplin waktu, etika berpakaian, etika pergaulan, perlakuan siswa terhadap karyawan, guru, dan pimpinan, dan sebaliknya. Pembiasaan yang dilakukan oleh pimpinan, guru, siswa, dan karyawan, dalam disiplin suatu lembaga pendidikan merupakan langkah yang sangat strategis dalam membentuk karakter secara bersama.

Hidayatullah (2010:9) menjelaskan bahwa secara harfiah 'karakter' adalah kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang membedakan dengan individu lain. Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, tabiat, watak (Tim Bahasa Pustaka Agung Harapan, 2003:300).

Adapun selanjutnya menurut departemen pendidikan dan kebudayaan ada 10 Prinsip pengembangan pendidikan karakter yaitu (1) prinsip nilai-nilai moral universal, (2) prinsip pendekatan sinkronisasi, (3) Prinsip pendekatan integral, (4) Prinsip terukur dan objektif, (5) Prinsip keterlibatan publik, (6) Prinsip kearifan lokal, (7) Prinsip keterampilan abad 21, (8) Prinsip revolusi mental, (9) Prinsip adil dan inklusif, (10) Prinsip evaluasi program.

Menurut Foerster (Koesoema, 2010), terdapat empat ciri dasar dalam pendidikan karakter. Keempat ciri tersebut sebagai berikut.

1) Pertama adalah keteraturan interior. Setiap tindakan diukur berdasarkan hierarki nilai. Nilai menjadi pedoman normatif setiap tindakan.
2) Kedua adalah koherensi yang memberi keberanian, membuat seseorang teguh pada prinsip, tidak mudah terombang ambing pada situasi baru atau takut resiko. Koherensi merupakan dasar yang membangun rasa percaya satu sama lain. Tidak adanya koherensi meruntuhkan kredibilitas seseorang.
3) Ketiga adalah otonomi. Seseorang menginternalisasikan aturan dari luar sampai menjadi nilai-nilai bagi pribadi. Hal ini dapat dilihat lewat penilaian atas keputusan pribadi, tanpa terpengaruh atau desakan pihak lain.
4) Keempat adalah keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan merupakan daya tahan seseorang guna mengingini apa yang dipandang baik dan kesetiaan merupakan dasar bagi penghormatan atas komitmen yang dipilih.

Dalam mendidik karakter, guru dapat mengacu pada grand design pendidikan karakter yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan Nasional sebagai upaya untuk meningkatkan kesesuaian dan mutu pendidikan karakter, untuk setiap jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan. Grand design menjadi rujukan konseptual dan operasional pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian pada setiap jalur dan jenjang pendidikan. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural tersebut dikelompokkan dalam: Olah Hati (*Spiritual and emotional development*), Olah Pikir (*intellectual development*), Olah Raga dan Kinestetik (*Physical and kinestetik development*), dan Olah Rasa dan Karsa (*Affective and Creativity development*) (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010).

Kepmendiknas (2010: i-ii) mengemukakan hasil diskusi dan sarasehan tentang "Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa" menghasilkan "Kesepakatan Nasional Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa" untuk berbagai wilayah Indonesia yang terdiri dari 18 nilai sebagai berikut:

1) Religius, 2) Jujur, 3) Toleransi, 4) Disiplin, 5) Kerja keras, 6) Kreatif, 7) Mandiri, 8) Demokratis, 9) Rasa ingin tahu, 10) Semangat kebangsaan, 11) Cinta tanah air, 12) Menghargai prestasi , 13) Bersahabat, 14) Cinta damai, 15) Gemar membaca, 16) Peduli lingkungan, 17) Peduli sosial, 18) Tanggung jawab.

Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut; (1) Mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat; (2) Menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar; (3) Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan; (4) Mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk Kompetensi Inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam Kompetensi Dasar mata pelajaran; (5) Mengembangkan Kompetensi Inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (*organizing elements*) Kompetensi Dasar. Semua Kompetensi Dasar dan proses pembelajaran; (6) Mengembangkan Kompetensi Dasar berdasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (*reinforced*) dan memperkaya (*enriched*) antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).

Merosotnya pendidikan karakter bangsa ada kecenderungan bahwa pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan non formal yang selama ini berjalan terpisah satu dengan yang lainnya. Mereka tidak saling mendukung untuk peningkatan pembentukan kepribadian peserta didik. Pembangunan pendidikan karakter bagi anak usia sangat penting sekali karena dapat memberikan manfaat yang sangat luar biasa diantaranya yaitu menumbuhkan rasa cinta kepada Tuhannya, Orang tuanya dan kepada orang-orang disekitarnya; mendidik rasa tanggung jawab dan disiplin.

Krisis moral multidimensi yang terjadi di hampir semua lapisan masyarakat belakangan ini menunjukkan bahwa identitas bangsa sedang terkoyak. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut akan berakibat fatal bagi keberlangsungan suatu negara. Karena itu, pembentukan karakter bangsa melalui penguatan pendidikan karakter

mutlak diperlukan untuk menyelamatkan generasi bangsa dari ambang kehancuran. Pembentukan karakter bangsa bukan hal yang mudah, ia harus ditumbuhkembangkan sejak dini dan berkelanjutan mulai dari lingkungan keluarga, sekolah hingga lingkungan masyarakat luas. Karena itu, dibutuhkan komitmen bersama semua pihak untuk mewujudkan generasi yang berkarakter. (Kosim, 2011 :91)

Ramli (2003) menjelaskan bahwa pendidikan karakter memilki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, hakikat dari pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi muda.

Sjarkawi (2011,29), menjelaskan tujuan pendidikan karakter adalah mendorong lahirnya anak-anak yang baik. Begitu tumbuh dalam karakter yang baik mereka akan tumbuh dengan kapasitas dan komitmennya untuk melakukan berbagai hal yang terbaik dan melakukan segalanya dengan benar dan cenderung memiliki tujuan hidup. Untuk itu karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sedini mungkin, sebab jika gagal dalam menanamkan karakter anak maka akan membentuk pribadi yang bermasalah si masa dewasanya kelak.

Menurut Rachman (2000), tujuan pendidikan karakter diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Mengembangkan potensi afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai karakter.
b. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya dan karakter bangsa.

c. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa.
d. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri dan kreatif.

Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan.

Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu penggunaan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah (scientifi c approach) dalam pembelajaran meliputi kegiatan mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, mengasosiasi/ menalar/mengolah informasi, dan menyajikan/ mengkomunikasikan. Kurikulum 2013 menyarankan penerapan model-model pembelajaran seperti *project based learning*, *problem based learning*, dan *discovery learning* dan model model pembelajarn lain yang relevan. Kegiatan belajar yang dilakukan dalam proses mengamati adalah membaca, mendengar, menyimak, melihat (tanpa atau dengan alat). Kompetensi yang dikembangkan adalah melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi.

KESIMPULAN

Dalam melakukan pendidikan karakter pada kurikulum 2013 pendidik haruslah dituntun untuk kreatif dan inovatif untuk memudahkan siswa dalam menerima pendidikan karakter tersebut. Pada kurikulum 2013 pendidikan karakter sudah terinternalisasikan dalam muatan KI dan KD terutama pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di SMP N 2 Karangpandan pendidikan karakter di lakukan melalui 4 cara yaitu pengajaran, keteladanan, penguatan dan kebiasaan. Pendidikan karakter pada kurikulum 2013 di bangun melalui kegiatan intrakurikurikuler, ekstakurukuler dan kokurikuler sehingga dapat komperhensif dan menyeluruh. Hal ini di raih dengan seluruh elemen masyarakat dapat bersatu untuk membentuk karakter warga negara yang baik.

Saran yang dapat di berikan oleh penulis bagi pengembangan pendidikan karakter pada kurikulum 2013 di SMP N 2 karangpandan, pendiidkan karakter di SMP N 2 Karangpandan sudah berjalan dengan baik dan hanya perlu di sempurnakan sedikit yaitu dengan cara membentuk tiga sumber utama pendidikan yang terpadu untuk melakukan pendidikan karakter yaitu keluarga, masyarakat dan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Andrianto, Tuhana Tufiq. 2011. *Mengembangkan Karakter Sukses Anak di Era Cyber*. Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.

Lickona, Thomas. (2013). *Educating for Character: Mendidik untuk Membentuk Karakter,* Bumi Aksara, Jakarta.

Koesoema, Doni. 2010. *Pendidikan Karakter*.: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Kepausan Salesian, Roma.

Warsono. 2011. Bunga Rampai Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Generasi Masa Depan: *Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa di Sekolah Dasar*.Unesa Universty Press, Surabaya.

Zainuddin dan Hambali, 2015 *Pengembangan Model Piranti Olah Pikir-Emosi (Model pop-e) untuk Menumbuhkembangkan Karakter Cinta Budaya Bangsa Pada Siswa Kelas Rendah Sekolah Dasar di Indonesia: Strategi Pembangunan Karakter Anak Indonesia,*: Lemlit UM Malang, Malang.

Kosim Muhammad, 2011. Urgensi Pendidikan Karakter. *Karsa* Vol. IXI No. 1 April 2011

Zainuddin, HM. 2010. *Membentuk Karakter Anak melalui Pendidikan IPS*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang.

Permendiknas Nomor 22 tahun 2016: Standar Kompetensi Kelulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Depdiknas, 2003, Undang-Undang No. 20 tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, www.depdiknas.go.id.

Kemendiknas, 2010. Pembinaan Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama. Jakarta: Kementrian Pendidikan Nasional

PENGUATAN *CIVIC LITERACY* DIKALANGAN PESERTA DIDIK MELALUI KEGIATAN MENYANYIKAN LAGU-LAGU WAJIB NASIONAL DALAM PEMBELAJARAN PPKN

Syahrur Razy
PPKn Pascasarjana UNS, Surakarta
razysyahrur@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah penguatan *civic literacy* dikalangan peserta didik melalui kegiatan menyanyikan lagu-lagu wajib nasional pada saat memulai pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif yang berdasarkan fakta. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh dan menyusun data penelitian adalah dengan wawancara informan, observasi peristiwa dan tempat. Guna memperoleh validitas data digunakan trianggulasi data dan trianggulasi metode. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif dengan tahap-tahap sebagai berikut: (1) Pengumpulan Data, (2) Reduksi Data, (3) Sajian Data, (4) Pengambilan Kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan menyanyikan lagu-lagu wajib nasional pada saat memulai pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat menguatkan *civic literacy* dikalangan peserta didik serta meningkatnya pengetahuan peserta didik tentang lagu-lagu wajib nasional yang ada di Indonesia. Peneliti menyarankan hendaknya sekolah lebih mendukung dan menghimbau kepada guru SMK Muhammadiyah 11 Sumberlawang melakukan kegiatan inovatif dalam proses pembelajaran di sekolah untuk menguatkan *civic literacy* dikalangan peserta didik.

Kata Kunci: *penguatan, civic literacy, peserta didik, lagu-lagu wajib nasional*

PENDAHULUAN

Civic literacy secara umum merupakan kemelekwacanaan sebagai warga negara, jika dikaitkan dengan peserta didik dapat diartikan dengan pemahaman peserta didik sebagai warga negara Indonesia dalam memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dalam setiap kehidupan demokrasi yang berdasarkan oleh konstitusi Indonesia serta melakukan perilaku sesuai dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia. konstitusi tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen. Dalam komponen *civic literacy* terdapat 3 komponen yaitu *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic dispositions.* Peningkatan *civic literacy*, yakni pengetahuan dan kemampuan warga dalam mengatasi masalah-masalah sosial, politik, dan kenegaraan menjadi keniscayaan seiring dengan perubahan politik yang menuntut warga bertindak secara otonom (Suryadi, 2010: 3).

Data terkait dengan tingkat literasi Indonesia pada tahun 2016, menurut Central Connecticut State University, Amerika Serikat dengan data bertajuk *World's Most Literate Nations Ranked* yang dirilis pada 9 Maret 2016. Penelitian tersebut menempatkan Indonesia di peringkat ke 60 dari total 61 negara yang diteliti (Firman, 2016: https://tirto.id/literasi-indonesia-yangbelum-merdeka-bBJS diakses 18 November 2017).

Peserta didik sebagai warga negara yang hidup dalam suatu negara, secara otomatis

memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dimana kewajiban harus didahulukan daripada hak, ini yang disebut dengan *good citizen* atau warga negara yang baik. warga negara yang baik merupakan warga negara yang berperilaku sesuai dengan hak dan kewajiban dalam lokasi suatu wilayah negara, dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat baik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di negaranya maupun norma-norma sosial di masyarakat.

Lagu-lagu wajib nasional di Indonesia merupakan modal bagi para peserta didik untuk menguatkan *civic literacy* dan menjadi *good citizen* dikalangan peserta didik. Tetapi banyak generasi muda yaitu peserta didik yang sekarang tidak hafal bahkan tidak tahu lagu-lagu wajib nasional. Peserta didik sekarang lebih tertarik dengan lagu-lagu populer yang sering diputar di radio, televisi dan internet. Sehingga sangat wajar apabila sekarang negara Indonesia perlu penguatan *civic literacy* dikalangan peserta didik, karena lagu-lagu-lagu-lagu wajib nasional Indonesia yang menjadi akses untuk penguatan *civic literacy* terutama dilakukan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Berikut ini kutipan berita peserta didik mulai melupakan lagu-lagu-lagu-lagu wajib nasional:

> Karawang, SpiritNews-Nyanyian lagu-lagu wajib nasional mulai luntur dari kalangan pelajar. Sebaliknya, lagu-lagu dangdut sambalado, yang dilantunkan penyanyi dangdut Ayu Ting Ting justru lebih dihafal pelajar, daripada lagu-lagu wajib nasional Bagimu Negeri, 17 Agustus, Rayuan Pulau Kalapa, Satu Nungsa Satu Bangsa atau Berkibarlah Benderaku.
> Fenomena itu diketahui ketika Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Dadang S Muchtar melakukan sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika kepada salah satu SMPN di Karawang Barat, Jumat (7/4/2017) lalu.

> "Lagu-lagu wajib memang tidak sekental dahulu, pelajar yang harus hafal di luar kepala. Tapi sekarang hanya di dengar pada momen-momen tertentu, seperti saat perayaan kemerdekaan RI atau upacara bendera," kata Dasim, sapa akrab Dadang S Muchtar usai melakukan sosialisasi kepada pelajar dan Aparatur Sipil Negara (ASN) guru di SMPN Karawang Barat. Menurutnya, lagu-lagu kebangsaan ini pelajar mulai tak tertarik untuk belajar. Malahan dominan hafal lagu-lagu dangdut atau pop yang tenar saat ini. Lagu-lagu wajib yang segitu-gitu saja dari dulu belum tentu banyak yang hafal. Disini peran pendidik harus menyampaikan kepada pelajar supaya minat belajar lagu-lagu wajib nasional. (sumber: https://spiritnews.co.id/anggota-dpr-ri-sebut-pelajar-lebih-hafal-lagu-lagu dangdut dari pada-lagu-lagu-wajib-nasional/ diakses tanggal 18 November 2017)

Berdasarkan contoh di atas dapat disimpulkan bahwa masih ada peserta didik pada saat ini mulai melupakan lagu-lagu wajib nasional padahal perlu kita ketahui salah satu fungsi peserta didik hafal lagu-lagu nasional adalah sebagai salah satu sarana untuk penguatan *civic literacy* dikalangan peserta didik untuk menjadi *good citizen*.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan wajib ada disetiap pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (BSNP, 2006 : 108).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk warga negara yaitu peserta didik untuk dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik berdasarkan Undang-Undang 1945 Amandemen dan Pancasila. Salah satu untuk upaya untuk penguatan *civic literacy* dikalangan peserta didik melalui kegiatan menyanyikan lagu-lagu wajib nasional yang dilakukan pada saat awal pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dimulai, diharapkan dengan kegiatan tersebut peserta didik mampu hafal dan memaknai makna dari setiap lagu-lagu wajib

nasional sehingga mampu menumbuhkan kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang penguatan civic literacy dikalangan peserta didik melalui kegiatan menyanyikan lagu-lagu-lagu-lagu wajib nasional dalam pembelajaran PPKn. Kemudian membentuk sebuah rumusan masalah yaitu bagaimana penguatan civic literacy dikalangan peserta didik melalui kegiatan menyanyikan lagu-lagu wajib nasional dalam pembelajaran PPKn ?.

METODE PENELITIAN

Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah SMK Muhammadiyah 11 Sumberlawang yang berada di Kabupaten Sragen, dengan alasan bahwa di SMK Muhammadiyah 11 Sumberlawang pada saat memulai pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melakukan kegiatan menyanyikan lagu-lagu wajib nasional sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di sekolah tersebut. Waktu penelitian adalah Bulan November 2017.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif, hal ini dikarenakan hasil penelitian ini memaparkan obyek yang diteliti (orang, lembaga atau yang lainnya) yang berdasarkan fakta. H. B Sutopo (2002: 110) menyatakan bahwa "penelitian deskriptif adalah penelitian tingkat kedua yang merupakan pengembangan lanjut dari penelitian eksploratif, peneliti sudah mengetahui variabel yang terlibat dalam sasaran studinya".

Informan adalah individu-individu yang memiliki informasi terkait permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. H. B Sutopo (2002: 50) menyatakan bahwa:

> Jenis sumber data yang berupa manusia dalam penelitian pada umumnya dikenal sebagai responden. Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data manusia (narasumber) sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, dan narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia bisa lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki.

Dengan sumber data ini maka akan diperoleh informasi yang berupa kata-kata atau kalimat. Informasi yang diperoleh dari informan disebut data primer, yaitu orang yang tahu dan dapat dipercaya serta mengetahui secara mendalam data-data yang diperlukan. Informan dalam penelitian ini adalah Guru PPKn dan peserta didik di SMK Muhammadiyah 11 Sumberlawang.

Sugiyono (2011: 122-125) menyatakan ada beberapa jenis teknik dalam *Nonprobability Sampling*, antara lain :

1. *Sampling Sistematis* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut;
2. *Sampling Kuota* adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan;
3. *Sampling Insidental* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data;
4. *Sampling Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu;
5. *Sampling Jenuh* adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel;
6. *Snowball Sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dalam penelitian ini menggunakan *sampling purposive,* yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jadi dalam penentuan sampel merupakan keputusan subjektif peneliti sendiri berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. "*Purposive sampling* merupakan sampling yang dilaksanakan pada cara ini berdasarkan keputusan subyektif peneliti yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu" (Sandjaja dan Heriyanto, 2011: 187).

Hal penting yang dilakukan dalam penentuan sampel pada penelitian ini adalah sampel yang dipilih merupakan informan kunci. Peneliti mengambil orang-orang kunci yang akan digunakan sebagai sumber data. Pertimbangan peneliti dalam penentuan sampel antara lain : memahami masalah, jujur, dapat dipercaya, dan objektif.

Teknik memilih informan kunci penelitian, kemudian dari yang terpilih tersebut dijadikan sebagai sumber data yang dapat membantu dalam mengungkap permasalahan yang telah dirumuskan. Dengan kata lain, teknik pengambilan sampel yang digunakan dengan teknik informan kunci (*key informan*) yaitu peneliti mengambil orang-orang kunci untuk dijadikan sebagai sumber data.

Untuk mendapatkan informasi dari sumber data ini, maka diperlukan teknik wawancara yang mendalam. "Teknik wawancara ini merupakan teknik yang paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif, terutama pada penelitian lapangan (Sutopo, 2002: 58)". Observasi dilakukan dengan mendatangi peristiwanya, kehadiran peneliti di lokasi sudah menunjukkan peran yang paling pasif, sebab kehadirannya sebagai orang asing diketahui oleh yang diamati, dan bagaimanapun hal itu membawa pengaruh pada yang diamati (H. B Sutopo, 2002: 65).

Penelitian ini, teknik trianggulasi yang digunakan adalah trianggulasi data dan metode. Trianggulasi data disebut juga dengan trianggulasi sumber. Dalam trianggulasi data Sutopo (2002: 79) menyatakan bahwa "cara ini mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan data, ia wajib menggunakan beragam sumber data yang tersedia. Dalam data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber yang berbeda". Dengan cara menggali data dari sumber yang berbeda-beda, maka data sejenis dapat teruji kemantapan dan kebenarannya

Penelitian ini mengunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Herdiansyah (2010: 164-181) terdiri atas empat tahapan yang harus dilakukan, yaitu: "tahapan pertama adalah tahap pengumpulan data, tahapan kedua adalah tahap reduksi data, tahapan ketiga adalah tahap display data, dan tahapan keempat adalah tahap penarikan kesimpulan dan/atau tahap verifikasi".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sanjaya (2009: 37) menyatakan bahwa penguatan (reinforcement) adalah segala bentuk respon baik verbal ataupun non verbal, yang diberikan guru terhadap

tingkah laku siswa untuk memberikan umpan balik atas perbuatannya sebagai suatu dorongan atau koreksi dan memotivasi siswa yang lain untuk berbuat hal yang sama seperti siswa yang diberikan penguatan tadi. Sedangkan menurut Hasibuan (2008: 58) yang menyatakan bahwa memberikan penguatan diartikan dengan tingkah laku guru dalam merespon secara positif suatu tingkah laku tertentu siswa yang memungkinkan tingkah laku tersebut timbul kembali, dimaksudkan untuk mengganjar atau membesarkan hati siswa agar mereka lebih giat berpartisipasi dalam interaksi belajar-mengajar.

Civic literacy berkaitan erat dengan paradigma teori *Civics. Civics* merupakan suatu ilmu yang membahas dan mengkaji tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara (Wuryan dan Syaifullah, 2008: 36). Dalam ilmu kewarganegaraan, *civic literacy* ditempatkan sebagai elemen dasar kebajikan politik warga negara (*political virtue of citizenship*), di dalam *civic literacy* tersirat penguasaan bentuk pengetahuan politik warga negara pada khususnya dan akan dimanifestasikan dalam aktivitas kewarganegaraan (Suryadi, 2010: 29-30).

Sehingga dapat disimpulkan peneliti bahwa penguatan *civic literacy* adalah proses pemberian respon motivasi kepada peserta didik dengan melakukan perbuatan yang mendorong peserta didik mampu menjadi warga negara yang dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen menjadi *good citizen*.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 4, Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 48), peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.

Abu Ahmadi (2001: 251) menyatakan peserta didik adalah anak yang belum dewasa, yang memerlukan usaha, bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa, guna dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat dan

sebaga suatu pribadi atau individu. Di bawah ini merupakan deskripsi tentang peserta didik (siswa) menurut Samsul (2002: 48-49), yaitu:

1. Siswa adalah orang yang belum dewasa yang mempunyai sejumlah potensi dasar yang masih bisa berkembang;
2. Siswa adalah manusia yang memiliki diferensiasi periodesasi perkembangan dan pertumbuhan;
3. Siswa adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individual, baik yang disebabkan oleh faktor pembawaan maupun lingkungan dimana ia berada.

Jadi dapat disimpulkan peserta didik adalah orang yang mempunyai fitrah (potensi) dasar, baik secara fisik maupun psikis, yang perlu dikembangkan, untuk mengembangkan potensi tersebut sangat membutuhkan pendidikan dari seorang pendidik agar mampu memaksimalkan potensi pada diri mereka.

Menurut W.S Simanjuntak (2007: 9-23) "Terdapat 14 lagu-lagu wajib nasional yang dapat dihafalkan dan dinyanyikan oleh rakyat Indonesia untuk meningkatkan rasa semangat kebangsaan dalam diri mereka". Lagu-lagu wajib nasional tersebut antara lain:

1. Indonesia Raya;
2. Satu Nusa Satu Bangsa;
3. Bagimu Negeri;
4. Garuda Pancasila;
5. Merah Putih;
6. Hari Merdeka;
7. Maju tak Gentar;
8. Indonesia Tumpah Darahku;
9. Indonesia Tetap Merdeka;
10. Berkibarlah Benderaku;32
11. Indonesia Tanah Pusaka;
12. Dari Sabang sampai Merauke;
13. Syukur;
14. Rayuan Pulau Kelapa

Lagu-lagu sudah digunakan sebagai alat persatuan sejak zaman pendudukan kolonialisme. Lagu-lagu bertemakan nasionalisme dan patriotisme dipakai sebagai pemompa semangat untuk mengusir para penjajah dari bumi Indonesia. Pada kongres pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya dicanangkan sebuah pernyataan nasional yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, namun dikumandangkan lagu "Indonesia Raya" lewat gesekan biola sang

penciptanya, Wage Rudolf Soepratman. Lagu tersebut yang kemudian menjadi lagu kebangsaan Indonesia saat ini menjadi salah satu pembakar semangat untuk rakyat melaksanakan kewajibannya untuk berjuang demi negara Indonesia bebas dari penjajahan.

John J Cogan dalam Winarno dan Wijianto, (2010: 6-7) menyatakan bahwa: Pendidikan Kewarganegaraan lazimnya dilukiskan sebagai "kontribusi pendidikan untuk pengembangan karakteristik-karakteristik dari seorang warga negara". Bahkan sekarang ini istilah warga negara yang baik mendapat tambahan warga negara yang cerdas. Jadi tujuan pendidikan Kewarganegaraan adalah terbentuknya warga Negara yang cerdas dan baik (smart and good citizen).

Upaya penguatan *civic literacy* dikalangan peserta didik melalui kegiatan menyanyikan lagu-lagu wajib nasional dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui kegiatan menyanyikan lagu-lagu wajib nasional sebelum memulai pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan dalam menyanyikan lagu-lagu nasional setiap minggunya bervariasi dalam hal pemilihan lagu-lagu wajib nasional. Pemilihan lagu-lagu wajib nasional setiap minggunya dalam disesuaikan apakah dalam minggu tersebut sedang merayakan hari besar nasional dan jika tidak ada hari besar nasional dalam minggu tersebut pemilihan lagu-lagu wajib nasional yang dinyanyikan bebas namun satu lagu-lagu wajib nasional hanya dinyanyikan satu kali dalam satu semester sehingga pengetahuan tentang lagu-lagu nasional akan bertambah. Bukan hanya itu saja, dalam menyanyikan lagu-lagu wajib nasional menciptakan suasana yang tertib dengan agar dapat memaknai makna yang terkandung dalam lagu-lagu nasional tersebut. Apalagi jika dilihat fenomena sekarang ini budaya menyanyikan dan menghafalkan lagu-lagu nasional mulai menghilang terutama pada generasi muda di Indonesia atau dapat dikatakan para peserta didik di Indonesia.

Berdasarkan penelitian di SMK Muhammadiyah 11 Sumberlawang pada saat memulai pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan pada saat itu peserta didik diminta untuk menyanyikan lagu-lagu wajib nasional yang berjudul "Satu Nusa Satu Bangsa". Kegiatan menyanyikan lagu-lagu wajib nasional diikuti semua peserta didik yang ada dalam kelas dengan sikap berdiri tegak dan

dipimpin oleh salah satu peserta didik di depan kelas. Jika para peserta didik belum tenang dan sikap yang belum tertib kegiatan menyanyikan lagu-lagu wajib nasional tidak akan dimulai sampai dengan semua peserta didik tenang dan sikap berdiri tegak. Setelah selesai menyanyikan lagu-lagu wajib nasional guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bertanya kepada para peserta didik tentang makna dari lagu-lagu wajib yang baru saja dinyanyikan dan kemudian menjelaskan kepada para peserta didik tentang makna yang terkandung dalam lagu-lagu wajib nasional yang baru saja dinyanyikan. Hal ini bertujuan agar para peserta didik bukan hanya menyanyikan lagu-lagu wajib nasional saja namun dapat memaknai makna dari lagu-lagu wajib nasional tersebut, serta diharapkan dapat menguatkan *civic literacy* peserta didik tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik (*good citizen*). Karena dalam setiap lagu-lagu wajib nasional memuat semangat untuk membangun negara Indonesia dan dapat menumbuhkan kesadaran tentang hak dan kewajiban warga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen dan Pancasila.

Berdasarkan penelitian dan wawancara para peserta didik merasakan dampak positif dengan menyanyikan lagu-lagu wajib nasional pada saat memulai pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menumbuhkan semangat dan keinginan membangun negara Indonesia lebih baik pada diri mereka, dengan demikian semangat akan belajar dan bepretasi baik bidang akademik maupun non akademik serta menaati peraturan tata tertib di sekolah akan meningkat karena pada hakikatnya mereka adalah seorang peserta didik, serta kesadaran para peserta didik terkait hak dan kewajibannya sebagai warga negara sehinggan mampu menguatkan *civic literacy* dan membentuk warga negara yang baik (*good citizen*).

KESIMPULAN

Kegiatan menyanyikan lagu-lagu wajib nasional pada saat memulai pebelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai upaya menguatkan *civic literacy* di kalangan peserta didik atas inisiatif guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMK Muhammadiyah 11 Sumberlawang karena melihat rendahnya *civic literacy* di Indonesia dengan salah satu cara dengan memberikan

pemahaman dan menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam lagu-lagu wajib nasional di kalangan peserta didik sehingga mampu menguatkan *civic literacy* para peserta didik terutama berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara atau dapat disebut kemelekwacanaan sebagai warga negara. Proses kegiatan menyanyikan lagu-lagu wajib nasional menjadi rutinitas dalam memulai pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta dalam melaksanakan kegiatan ini para peserta bersikap berdiri tegak dan hormat sehinggan para peserta didik mampu memaknai setiap lagu-lagu wajib nasional yang dinyanyikan. Kegiatan ini juga membiasakan peserta didik menyanyikan lagu-lagu wajib nasional dan mampu menghafalkan lagu-lagu wajib nasional yang ada di Indonesia. Para peserta didik merasakan dampak setelah melakukan kegiatan menyanyikan lagu-lagu wajib nasional yaitu meningkatnya kesadaran tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara yang sesuai Undang-Undang 1945 Amandemen dan Pancasila dalam hal ini konteks secara khusus hak dan kewajiban sebagai peserta didik.

Saran hendaknya sekolah lebih mendukung dan menghimbau kepada guru SMK Muhammadiyah 11 Sumberlawang melakukan kegiatan inovatif dalam proses pembelajaran di kelas sebagai upaya menguatkan *civic literacy* dikalangan peserta didik. Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat berperan dalam membentuk *civic literacy* para peserta didik sehingga mampu menjadi warga negara baik (*good citizen*) generasi penerus untuk kemajuan negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, Abu, 2001, *Ilmu Pendidikan. Jakarta*: Rineka Cipta.

Alwi, Hasan dkk, 2007, *Cetakan ketiga. Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

BSNP, 2006, *Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar SD/MI*. Jakarta: BSNP.

Firman, 2016, https://tirto.id/literasi-indonesia-yangbelum-merdeka-bBJS diakses 18 November 2017.

Hasibuan, J.J, Dip. Ed, dan Moedjiono, 2008, *Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Herdiansyah, Haris, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Sandjaja, B dan Albertus Heriyanto, 2011, *Panduan Penelitian*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Sanjaya, Wina, 2009, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana.

Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryadi, K., 2010, "*Inovasi Nilai Dan Fungsi Komunikasi Partai Politik Bagi Penguatan Civic Literacy*". Naskah Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik Pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Bandung, 24 November 2010.

Sutopo H.B, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif: dalam Teori Terapannya dalam Penelitian.* Surakarta: UNS Press.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

W.S Simanjutak, 2007, *Indonesia Persadaku*. Jakarta: Titik Terang.

Winarno dan Wijiyanto, 2010, *Ilmu Kewarganegaraan dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan (Ikn-PKn)*. Surakarta: UNS Press.

Wuryan, S., dan Syaifullah, 2008, *Ilmu Kewarganegaraan (Civics),* Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan, UPI Bandung.

_____, 2017, https://spiritnews.co.id/anggota-dpr-ri-sebut-pelajar-lebih-hafal-lagu dangdut dari pada-lagu-wajib-nasional/ diakses tanggal 18 November 2017.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGUATKAN *CIVIL SOCIETY* DI INDONESIA (STUDI PADA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS)

An-nisa Nur Sholihah Indah Septiani[19]
PPKn Pascasarjana UNS, Surakarta
annisansis@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dalam menguatkan *civil society* di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan analisis dokumen, observasi dan wawancara. Subyek penelitian adalah guru di sekolah menengah atas yang menerapkan kurikulum KTSP dan Kurikulum 2013, yang dipilih secara random. *Civil society* merupakan suatu masyarakat yang cerdas, beradab, mandiri, toleran, demokratis, dan partisipatif, yang dapat berperan sebagai penyeimbang atau control terhadap Negara atau pemerintah. Indikator dari *civil society* atau masyarakat madani yakni : 1) Demokratis, 2) Partisipatif, 3) Toleran, 4) Beradab, 5) Mandiri/bebas, 6) Taat pada hukum. Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat mewujudkan penguatan *civil society* di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi isi, kompetensi dasar pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan baik dalam KTSP maupun Kurikulum 2013 sebagian besar telah mendukung penguatan *civil society* pada siswa tingkat SMA. Sedangkan dari segi proses, proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan belum cukup untuk mendorong penguatan *civil society* pada siswa tingkat SMA. Berdasarkan hasil penelitian, disampaikan saran bahwa proses pembelajaran PKn perlu lebih menerapkan indicator-indikator *civil* society yakni demokratis, partisipatif, toleran, beradab, mandiri/bebas, serta taat pada hukum melalui internalisasi nilai, pembiasaan maupun keteladanan dalam proses pembelajaran sehari-hari. Sehingga dapat menguatkan *civil society* di Indonesia melalui pembelajaran PKn.

Kata kunci : *pendidikan kewarganegaraan, civil society, sekolah menengah atas*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu factor penting dalam suatu Negara. Sistem pendidikan yang baik dalam suatu Negara akan turut memajukan Negara tersebut, dan sebaliknya, sistem pendidikan yang buruk dan bermasalah dalam suatu negara akan menghambat kemajuan negara tersebut. Sistem pendidikan di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

[19] Mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pascasarjana UNS

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. (UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003)

Sehingga dapat dikatakan pendidikan nasional Indonesia diantaranya berfungsi dan bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang beradab, bermartabat, beriman dan bertaqwa, berakhlak, berilmu, mandiri, demokratis serta bertanggung jawab. Sehingga seringkali dikatakan tujuan pendidikan Indonesia mengisyaratkan pembentukan dan atau penguatan *civil society* atau yang sering diterjemahkan sebagai masyarakat madani Indonesia, yakni suatu masyarakat yang tidak hanya berilmu, tetapi juga beradab, berakhlak baik, mandiri, serta demokratis. Dalam menjawab tantangan pembentukan dan / atau penguatan *civil society* di Indonesia, khususnya dalam lingkup persekolahan salah satu mata pelajaran yang memegang posisi strategis yakni mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang bertugas untuk membentuk warga Negara yang cerdas dan baik *(good and smart citizen).* Pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan keilmuan yang multifaset (terpadu) atau sering dikatakan sebagai *integrated knowledge system,* yang tidak sekedar memiliki misi mengembangkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air, tetapi juga untuk membentuk warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, sebagai pendidikan kebangsaan, pendidikan bela negara, pendidikan HAM, pendidikan multikultural, pendidikan lingkungan hidup, pendidikan hukum, pendidikan antikorupsi (Winarno, 2013:20-23). Disamping itu, Pendidikan Kewarganegaraan juga sebagai mata pelajaran sentral dalam pendidikan nilai dan karakter. Maka dari itu, secara teoritis Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat mengupayakan pembentukan dan/atau penguatan *civil society* di Indonesia. Hasil penelitian dari Branka Vasiljevic tahun 2009 yang berjudul *Civic Education as a Potential for Developing Civil Society and Democracy (The Case of Serbia)* menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraam berpotensi untuk konsolidasi atau menguatkan masyarakat madani dan demokrasi di Serbia.

Wacana mengenai *civil society* di Indonesia sangat ramai diperbincangkan pada akhir tahun 90an sampai dengan awal tahun 2000an yakni pada masa awal Reformasi. Tetapi akhir-akhir ini wacana mengenai *civil society* yang merupakan elemen penting bagi suatu negara mulai menyusut. Disusul dengan berbagai permasalahan di Indonesia mulai dari permasalahan moral anak bangsa, sampai permasalahan intoleransi yang tidak bisa dianggap sepele bagi negara yang heterogen seperti Indonesia. Kasus beberapa remaja yang memberi minuman keras kepada hewan di salah satu kebun binatang di Indonesia yang masih hangat di telinga kita, sungguh menyindir sanubari kita, betapa masih rendahnya moral anak bangsa. Ditambah lagi dengan berbagai perkataan kotor, perkelahian, *hate speech*, di berbagai media sosial, yang disebabkan perbedaan pandangan dan junjungan politik. Anak-anak bahkan orang dewasa, yang tanpa mengkroscek kebenaran dari suatu informasi, saling menghujat di media sosial.

Masyarakat kita juga cenderung mengarah pada intoleran, dibuktikan dengan sangat mudahnya mengaitkan permasalahan yang terjadi dengan isu-isu agama, ditambah lagi dengan mulai seringnya agama dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperoleh kekuatan politik dari masyarakat. Sebagai contoh pembakaran masjid di Tolikara yang dianggap sebagai konflik agama antara Islam dengan Kristen di Tolikara, yang sebenarnya jauh dari konflik keagamaan apalagi kebencian terhadap Islam (Noroyono, 2015). Ditambah lagi dengan munculnya berbagai aliran dalam suatu agama yang saling bertentangan. Semakin meningkatnya angka kecelakaan lalu-lintas yang dikarenakan ketidaktertiban hukum masyarakat, dimana masyarakat kita cenderung lebih takut kepada aparat penegak hukum daripada kesadaran untuk menaati berbagai aturan hukum, termasuk tata tertib lalu-lintas. Dan permasalahan pemerintah sebagai mandat kekuasaan rakyat yang belum menjalankan tugas dengan baik, terbukti dari berbagai kasus korupsi, suap sampai dengan kasus amoral lain seperti *hate speech* dan saling menyindir di media sosial oleh para wakil rakyat.

Berbagai permasalahan tersebut jelas mengindikasikan lemahnya *civil society* kita, dimana masyarakat kita semakin jauh dari moral dan adab, semakin intoleran dan bagitu mudahnya terpancing isu-isu tanpa pengkroscekan terlebih

dahulu. Sebagaimana dikatakan Azra bahwa semua kerusuhan yang terjadi di Indonesia, merupakan *setback* atau langkah mundur dalam proses pembentukan masyarakat madani, karena kerusuhan tersebut pada hakikatnya mencerminkan perilaku actor-aktornya yang tidak demokratis, tidak peduli hukum *(lawlessness),* tidak beradab *(uncivilized),* dan bahkan kasar dan kejam. (Azra, 1999:5) Hal ini sangat kontradiktif, dimana ketika kita semakin lama menerapkan demokrasi tetapi tidak diiringi dengan menguatnya *civil society,* justru cenderung melemah. Sebagaimana dikatakan bahwa sayangnya ada kecenderungan bahwa menguatnya kekuatan masyarakat tidak dibarengi dengan ketertiban social atau keberadaban masyarakat *(civility).* Akibatnya, ketika Negara lemah dan masyarakat kuat yang muncul adalah *social chaos.* (Nugroho, 2003:31) Tanpa adanya *civil society* yang kuat, maka Indonesia akan semakin jauh ketinggalan dari berbagai negara berkembang lainnya. Maka kita perlu menguatkan kembali *civil society* Indonesia. Sebagaimana dikatakan Rosyada (2003:257) : "...melihat itu semua (penindasan HAM, pengekangan demokrasi dan masalah lain), maka secara essensial Indonesia memang membutuhkan pemberdayaan dan penguatan masyarakat secara komprehensif agar memiliki wawasan dan kesadaran demokrasi yang baik serta mampu menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Untuk itu diperlukan pengembangan masyarakat madani dengan menerapkan strategi pemberdayaannya sekaligus agar proses pembinaan dan pemberdayaan itu mencapai hasilnya secara optimal."

Hal ini dikarenakan *civil society* bukanlah suatu hal yang berupa tujuan, melainkan merupakan suatu proses panjang yang harus terus dijaga keberlanjutannya dan memerlukan komitmen teguh dari warga negara untuk menjadi masyarakat madani yang memerlukan perjuangan. Maka sudah selayaknya jika upaya dalam membangun dan/atau memperkuat *civil society* perlu dilakukan sejak warga negara dalam bangku sekolah dasar, menengah maupun atas dengan porsinya masing-masing. Salah satu yang patut menjadi perenungan kita bersama, yakni dimana mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang secara teoritis memegang posisi strategis dalam memeperkuat *civil society,* ternyata belum mampu mewujudkan tugas tersebut. Maka sudah sepatutnya untuk melakukan

pengkajian kembali terkait dengan Pendidikan Kewarganegaraan dalam meperkuat *civil society* di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka dirumuskan masalah yakni "Bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan dalam menguatkan *civil society* di Indonesia pada tingkat sekolah menengah atas?" selanjutnya berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pendidikan Kewarganegaraan dalam menguatkan *civil society* pada tingkat sekolah menengah atas.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan analisis dokumen, studi pustaka dan wawancara. Analisis dokumen dilakukan dengan menganalisis Kompetensi Dasar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan baik pada Kurikulum KTSP maupun Kurikulum 2013. Studi pustaka dilakukan dengan merujuk pada literatur yang sesuai dengan variabel yang diteliti. Sedangkan wawancara dilakukan guna mengetahui proses pembelajaran PKn dikaitkan dengan penguatan *civil society.*

Subyek penelitian yakni guru Pendidikan Kewarganegaran dan siswa sekolah menengah atas baik dari sekolah yang menerapkan Kurikulum KTSP dan Kurikulum 2013, yang dipilih secara random. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam memperkuat *civil society* di Indonesia pada tingkat sekolah menengah atas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Civil Society*

Civil society di Indonesia sering diterjemahkan sebagai masyarakat madani. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma, nilai-nilai, dan hukum yang ditopang oleh penguasaan teknologi yang beradab, iman dan ilmu. (www.kbbi.web.id)

Terkait dengan konsep *civil society*, Beetham and Boyle dalam Vasiljevi (2009:13) mengatakan, *"The concept of civil society can be also viewed from two*

different aspects. Negative: It represents an idea that a state power has to be limited and prevented from controlling all social activities, contaminating the whole public sphere and social initiatives. Positive: It is an idea, which promotes many independent sources of self-engagement in the society, and facilitates initiatives from people outside the state and market power to make common actions, pursue their goals and solve problems. In that way it serves as a network of public opinion channels and pressure on government, or protection from the possible abuse of state power." Pada intinya, Beetham and Boyle mengatakan bahwa *civil society* dapat dilihat dari dua aspek yang berbeda. Dari aspek negatif *civil society* merepresentasikan ide bahwa kekuasaan negara harus dibatasi dan mencegah konrol negara terhadap segala aktivitas sosial masyarakat. Sedangkan dari aspek positifnya bahwa *civil society* merupakan ide yang mendukung independenitas dari keterlibatan masyarakat, dan memfasilitasi inisiatif dari orang-orang diluar negara dan kekuatan pasar untuk melakukan tindakan bersama, mengejar tujuan mereka dan memecahkan masalah. Sehingga dapat dikatakan masyarakat madani berfungsi sebagai jaringan saluran opini publik dan kontrol pada pemerintah, atau perlindungan dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan negara.

Senada dengan sebelumnya, Hikam dalam Suseno (2000:56) mengartikan *civil society* sebagai ruang public, yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, dan tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material dan tidak terserap dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat pentingnya ruang publik yang bebas, tempat dimana komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga masyarakat.

Civil society sering diidentikkan dengan system demokrasi. Terkait hal ini, Rosyada mengatakan bahwa hubungan antara masyarakat madani dengan demokrasi yakni masyarakat madani merupakan 'rumah' persemaian demokrasi. Perlambang demokrasinya adalah pemilu yang bebas dan rahasia. Namun demokrasi tidak hanya bersemayam dalam pemilu, sebab jika demokrasi harus mempunyai 'rumah', maka 'rumah'nya adalah masyarakat madani. (Rosyada, 2003:252-253) dalam hal ini, pemilu hanya penerapan demokrasi prosedural, sedangkan esensi demokrasi yang sebenarnya ada pada partisipasi masyarakat

secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang tercermin dalam masyarakat madani itu sendiri.

Civil society bukan hanya merupakan masyarakat yang identik dengan demokrasi, melainkan juga merupakan masyarakat yang beradab dan berkualitas. Sebagaimana disampaikan Azra (1999:7) bahwa masyarakat madani lebih dari sekadar gerakan-gerakan pro demokrasi. Masyarakat madani juga mengacu ke kehidupan masyarakat yang berkualitas dan bertamadun *(civility).* Lebih lanjut, Azra menyampaikan *civil society* meniscayakan toleransi, yakni kesediaan individu-individu untuk menerima berbagai pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *civil society* merupakan suatu masyarakat yang cerdas, beradab, mandiri, toleran, demokratis, dan partisipatif, yang dapat berperan sebagai penyeimbang atau control terhadap Negara atau pemerintah.

Indikator *Civil Society*

Nurcholis Madjid dalam Culla (2002:192) menyampaikan ciri mendasar dari masyarakat madani yang dibangun Nabi yaitu 1) Egalitarianisme, 2) Penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi (bukan kesukuan, keturunan, ras, dsb), 3) Keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat aktif, 4) Penegakan hukum dan keadilan, 5) Toleransi dan pluralisme, 6) Musyawarah. Sehingga menurut Madjid. masyarakat madani bukan hanya sekedar masyarakat yang berdaya yang mampu ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dan negara, melainkan lebih dari itu, masyarakat madani juga merupakan masyarakat yang egaliter, yakni memandang manusia dilahirkan sederajat; serta toleran terhadap perbedaan suku, agama, ras, dsb. Selain itu juga menjunjung tinggi penegakan hukum dan keadilan, serta mendukung asas musyawarah untuk mencapai mufakat.

Alexis de Tocqueville dalam Gatara dan Sofhian (2012:111) mengatakan *civil society* dapat didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan social yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain, kesukarelaan *(voluntary),* keswasembadaan *(self generating),* dan keswadayaan *(self supporting),*

kemandirian yang tinggi berhadapan dengan Negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.

Dalam literature yang berbeda, Zamroni (2016) mengatakan, *"the characteristics of civil society include the Free Public Sphere, Democratic, Tolerance, Pluralism, Social Justice and civilized."* Karakteristik *civil society* meliputi ruang public yang bebas, demokratis, toleransi, pluralism (kemajemukan), keadilan social, dan beradab. Hampir sama dengan apa yang disampaikan Zamroni, Ubaedillah dalam bukunya (2008:202-204), bahwa beberapa unsure pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat madani adalah wilayah public yang bebas, demokrasi, toleransi, kemajemukan, dan keadilan social.

Secara lebih jelas, Dwiyatmi dkk (2012:178) mengatakan bahwa masyarakat sipil atau *civil society* mempunyai ciri-ciri : lahir secara mandiri, bukan dibentuk oleh penguasa Negara melainkan oleh warga masyarakat; bersifat sukarela; swadaya atau tidak menggantungkan diri pada bantuan pemerintah; bebas atau mandiri dari kekuasaan Negara; dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, beberapa indicator dari *civil society* atau masyarakat madani yakni : 1) Demokratis, 2) Partisipatif, 3) Toleran, 4) Beradab, 5) Mandiri/bebas, 6) Taat pada hukum. Jika berbagai indicator tersebut dimiliki oleh masyarakat Indonesia, maka masyarakat Indonesia akan dapat lebih maju dan demokratis.

Pendidikan Kewarganegaraan dalam Memperkuat *Civil Society* pada Tingkat SMA

Pendidikan Kewarganegaraan dalam memperkuat *civil society* pada tingkat sekolah menengah atas dapat dilihat dari dua segi, yakni dari segi isi dan proses pembelajaran. Dari segi isi, bisa dilihat dari berbagai Kompetensi Dasar dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan baik dalam Kurikulum KTSP yang diatur dalam Permendiknas No.22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maupun Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2013 yang termuat dalam Lampiran permendikbud No. 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yakni pada Lampiran 20. Berbagai kompetensi dasar tersebut dikaitkan dengan indicator dalam *civil society* diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1. Kompetensi Dasar pada Kurikulum KTSP dan K2013 dalam Penguatan *Civil Society*

No.	**Indikator *CS***	**KD Kurikulum KTSP**	**KD Kurikulum 2013**
1.	Demokratis	2.4 Menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari (kelas XI, didukung KD 2.1, 2.2, 2.3) 3.3 Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (kelas XI, didukung KD 3.1, 3.2)	2.3 Bersikap peduli terhadap lembaga-lembaga di sekolah sebagai cerminan dari lembaga-lembaga negara (Kelas X, didukung KD 3.3 dan 4.3) 2.2 Berperilaku santun dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Kelas XI, didukung KD 3.2 dan 4.2)
2.	Partisipatif	6.3 Menampilkan peran serta dalam system politik di Indonesia (kelas X, didukung KD 6.1, 6.2) 1.4 Menampilkan peran serta budaya politik Partisipan (kelas XI, didukung KD 1.1, 1.2, 1.3) 2.5 Menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia (kelas X, didukung KD 2.4)	2.2 Bersikap peduli terhadap penerapan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan (Kelas X, didukung KD 3.2 dan 4.2) 2.4 Bersikap peduli terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah yang harmonis di daerah setempat (Kelas X, didukung KD 3.4 dan 4.4) 2.6 Bersikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika (Kelas X, didukung KD 3.6 dan 4.6) 2.5 Bersikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap

			negara strategi mengatasinya berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika (Kelas XI, didukung KD 3.5 dan 4.5)
3.	Toleran	5.3 Menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku (kelas X, didukung KD 5.1, 5.2)	2.5 Menunjukkan sikap kerjasama dalam rangka mewujudkan komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika (Kelas X, didukung KD 3.5 dan 4.5) 2.4 Bersikap toleran dan cinta damai sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia dalam hidup ber-masyarakat, berbangsa dan bernegara (Kelas XI, didukung KD 3.4 dan 4.4)
4.	Beradab	1.3 Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka (kelas XII, didukung KD 1.1, 1.2) 4.3 Menentukan sikap terhadap pengaruh dan implikasi globalisasi terhadap Bangsa dan Negara Indonesia (kelas XII, didukung KD 4.1, 4.2, 4.4)	2.1 Menunjukkan sikap gotong royong sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (kelas X, didukung KD 3.1 dan 4.1) 2.1 Bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (kelas XI, didukung KD 3.1 dan 4.1) 2.3 Bertanggungjawab dalam menyikapi pengaruh kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika (kelas XII, didukung KD 3.3 dan 4.3)
5.	Mandiri/bebas		
6.	Taat pada hukum	2.3 Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (kelas X, didukung KD 2.1, 2.2) 4.4 Menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi Negara (kelas X, didukung KD 4.1, 4.2, 4.3)	2.3 Menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia (kelas XI, didukung KD 3.3 dan 4.3) 2.1 Bersikap responsif dan proaktif terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan

		5.3 Menghargai putusan Mahkamah Internasional (kelas X, didukung KD 5.1, 5.2)	berbangsa dan bernegara (kelas XII, didukung KD 3.1 dan 4.1) 2.2 Berperilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat (kelas XII, didukung KD 3.2 dan 4.2)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam kompetensi dasar mata pelajaran PKn sebagian besar telah mencerminkan indicator dalam *civil society.* Artinya, kompetensi dasar tersebut mendukung pembentukan dan/atau penguatan *civil society* atau masyarakat madani, karena telah memuat berbagai materi yang mendukung proses pembentukan dan/atau penguatan *civil society* tersebut. Jika dibandingkan antara kompetensi dasar pada KTSP dengan K2013, dapat dikatakan bahwa K2013 memuat lebih banyak kompetensi dasar yang sesuai dengan indicator *civil society.* Ini berarti bahwa K2013 memungkinkan pembentukan dan/atau penguatan *civil society* secara lebih intensif. Didukung dengan keseimbangan porsi aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor dalam pembelajaran, sehingga lebih mendukung penguatan *civil society* yang secara taksonomi lebih dekat dengan aspek afektif. Kekurangannya yaitu, baik dalam Kurikulum KTSP maupun K2013 belum terdapat kompetensi dasar yang sesuai dengan indicator mandiri/bebas. Sehingga kurang mendukung untuk mewujudkan warga Negara yang bebas atau mandiri, dalam hal ini bebas dan mandiri dari intervensi pemerintah/Negara, sehingga bisa mengontrol pemerintah/Negara.

Sebaik apapun isi suatu mata pelajaran yang dirumuskan dalam berbagai kompetensi dasar, tidak akan berarti jika tanpa didukung dengan proses pembelajaran yang baik. Jika dilihat dari segi isi dimana kompetensi dasar atau materi pada PKn telah mendukung dalam pembentukan dan/atau penguatan *civil society,* sedangkan jika dilihat dari segi proses yakni dalam proses pembelajaran, dapat dikatakan belum cukup membentuk serta menguatkan *civil society.* Guru dalam proses pembelajaran PKn cenderung fokus ke materi. Ini merupakan salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia yang belum dapat teratasi, yakni dimana aspek kognitif yang diutamakan dalam pembelajaran, dan cenderung mengesampingkan aspek afektif dan psikomotor. Anak dianggap pintar jika

nilainya tinggi, dan sikap guru yang cenderung berpihak kepada siswa yang mendapat nilai tinggi.

Proses pembelajaran juga terbatas di dalam kelas, sehingga kurang dapat mengajarkan nilai-nilai dalam *civil society.* Metode pembelajaran yang terbatas pada caramah dan diskusi juga kurang efektif untuk mewujudkan *civil society.* Diskusi yang dimaksudkan untuk menumbuhkan sikap demokratis, partisipatif, dan toleran ternyata juga kurang efektif. Hal ini dikarenakan ketika berlangsungnya diskusi kelompok, hanya siswa-siswa tertentu saja yang bekerja. Proses pembelajaran juga belum mendukung terinternalisasikannya nilai-nilai toleran. Guru belum membiasakan kebiasaan-kebiasaan dalam kelas yang mendorong tumbuhnya nilai toleran antar siswa. Proses pembelajaran cenderung ditujukan untuk mencapai aspek kognitif.

Sedangkan untuk membentuk serta menguatkan *civil society,* diperlukan proses pembelajaran yang didalamnya memuat internalisasi nilai, pembiasaan, serta keteladanan yang meliputi keenam indicator *civil society* tersebut. Indikator-indikator *civil society* tidak hanya dicapai melalui aspek pengetahuan, namun lebih baik jika diterapkan dalam kehidupan kelas setiap harinya, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing indikator *civil society* dapat terinternalisasi dalam diri siswa dan selanjutnya dicerminkan dalam sikap dan perilaku siswa. Dan berujung pada terwujudnya *civil society* yang kuat.

Penguatan *civil society* melalui mata pelajaran PKn yang baru sampai pada tataran isi/materi, dan belum menyentuh pada proses, mengakibatkan belum terwujudnya *civil society* yang kuat di Indonesia selama ini. Sebagaimana dikatakan Rahardjo dalam Ubaedillah (2008:206) bahwa masyarakat madani di Indonesia lebih banyak melakukan protes daripada mengajukan solusi, lebih banyak menuntut daripada memberikan sumbangan terhadap pemecahan masalah. Sehingga masayarakat madani Indonesia belum menjalankan fungsinya dengan baik. Maka sudah menjadi keharusan bagi kita untuk mewujudkan *civil society* yang kuat di Indonesia, dengan menerapkan komptensi dasar PKn tersebut baik dalam isi maupun prosesnya terutama. Karena pembentukan *civil society* yang kuat akan mendukung keberhasilan system demokrasi kita dan membawa kemajuan bagi

seluruh warga Indonesia sendiri. Menilik pelajaran dari Amerika, sebagaimana dikatakan Tocqueville dalam Dwiyatmi dkk (2012:180) menyatakan bahwa *civil society* lah yang menjadikan demokrasi di Amerika mempunyai daya tahan. Dengan terwujudnya pluralitas (kemajemukan), kemandirian dan kapasitas (kemampuan) politik di dalam *civil society*, maka warga Negara akan mampu mengimbangi dan mengontrol kekuatan Negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan pada tingkat SMA dilihat dari segi isi/materi, kompetensi dasar pada mata pelajaran PKn baik dalam KTSP maupun Kurikulum 2013 sebagian besar telah mendukung penguatan civil society pada siswa tingkat SMA, dimana berbagai kompetensi dasar tersebut memuat indikator-indikator *civil society*, diantaranya demokratis, partisipatif, toleran, beradab, mandiri/bebas, serta taat pada hukum. Sedangkan dari segi proses, proses pembelajaran PKn belum cukup untuk mendorong penguatan civil society pada siswa tingkat SMA.

Berdasarkan hasil penelitian, disampaikan saran bahwa proses pembelajaran PKn perlu lebih menerapkan indikator-indikator civil society yakni demokratis, partisipatif, toleran, beradab, mandiri/bebas, serta taat pada hukum melalui internalisasi nilai, pembiasaan maupun keteladanan dalam proses pembelajaran sehari-hari. Sehingga dapat menguatkan civil society di Indonesia melalui pembelajaran PKn.

Selain itu, perlu dikembangkan indicator *civil society* untuk membentuk warga Negara yang mandiri atau bebas yang diajarkan dalam isi/materi maupun proses pembelajaran. Karena baik dalam Kurikulum KTSP maupun Kurikulum 2013 belum memuat indicator tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Azra, Azyumardi. 1999. *Menuju Masyarakat Madani*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Culla, Adi Suryadi. 2002. *Masyarakat Madani : Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita-cita Reformasi*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.

Dwiyatmi, Sri Harini, dkk. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Gatara, Asep Sahid dan Subhan Sofhian. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan.* Bandung : Fokusmedia.

KBBI. 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) [online]*, diakses dari www.kbbi.web.id , 16 November 2017.

Lisman, C David. 1998. *Toward a Civil Society : Civic Literacy and Service Learning.* London : Bergin and Garvey

Noroyono, Bambang. 2015. *Pembakaran Masjid di Papua, Ini Hasil Penelusuran Komnas HAM*, diakses dari www.republika.co.id 20 November 2017

Nugroho, Heru. 2003. *Pergulatan Menuju Civillity, Demokrasi dan Keadilan.* Dalam Malian, Sobirin dan Marzuki, Suparman, *Pendidikan Kewarganegaran dan Hak Asasi Manusia.* Yogyakarta : UII Press.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi

Rosyada, Dede. 2003. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) : Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani.* Jakarta : Prenada Media.

Sitepu, P Anthonius. 2012. *Teori-teori Politik.* Yogyakarta : Graha Ilmu.

Suseno, Franz Magnis. 2000. *Strategi Pembentukan Masyarakat Madani.* Dalam Kumpulan Artikel "Membongkar Mitos Masyarakat Madani". Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Ubaedillah dkk. 2008. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani.* Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Vasiljevi, Branka. 2009. *Civic Education as a Potential for Developing Civil Society and Democracy (The Case of Serbia).* Master Thesis, Faculty of Social Science University of Tromsø, Norway.

Winarno. 2013. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan : Isi, Strategi dan Penilaian.* Jakarta : Bumi Aksara.

PERAN PPKn DALAM MEMBENTUK KEWARGANEGARAAN DIGITAL YANG BERKARAKTER

Benaziria
Program Studi PPKn
Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
Sibenachoiri@gmail.com

ABSTRAK

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat telah menimbulkan perubahan pada pola prilaku manusia, khususnya remaja sebagai warga negara muda. Mudahnya akses internet menyebabkan remaja dengan sangat mudah dapat memperoleh informasi yang diinginkan, cukup menggunakan *gadget* terutama *smartphone* para remaja dengan mudahnya mengakes informasi kapanpun, dan dimanapun. Lemahnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan gadget menimbulkan penyalagunaan penggunaan *gadge*t oleh remaja. Penyalagunaan *gadget* mempengaruhi prilaku sosial remaja atau sehingga muncul istilah populer *kids jaman now*. Tidak semua informasi yang terdapat dalam dunia digital layak untuk dikonsumsi oleh remaja. Penyalagunaan penggunan gadget menimbulkan perilaku menyimpang pada remaja, seperti prilaku *bullyin*g, pornografi, dan prilaku konsumtif. Pendidikan Kewarganegaarn atau PKn merupakan salah satu mata pelajaran yang mengemban tugas untuk membentuk dan mengembangkan karakter peserta didik. Pendidikan kewarganegaraan dapat berperan dalam membentuk kewarganegaraan digital yang berkarakter pada remaja sebagai warga negara muda untuk bijak dalam menggunakan *gadget*. Tujuan dari artikel ini adalah mendeskripsikan PKn sebagai mata pelajaran yang berperan dalam membentuk kewarganegaraan digital yang berkarakter dan strategi yang diterapkan oleh guru PKn dalam mengembangkan karakter "melek" etika digital pada peserta didik sebagai warga negara muda. Metode dalam artikel ini menggunakan studi literatur. Simpulannya PKn merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki posisi strategis dalam membentuk dan mengembangkan kewarganegaraan digital pada remaja . Guru PKn dapat menerapkan model pembelajaran *VCT* (*value clarification tehnique*) dalam membentuk dan mengembangkan "melek" etika digital pada remaja.

Kata Kunci : *Peran PKn, Kewarganegaraan Digital, Karakter, Etika Digital, Model Pembelajaran VCT.*

PENDAHULUAN

Secara eksplisit saat ini telah terjadi fenomena yang menunjukan terjadinya penurunan etika, moral, dan karakter anak bangsa, khususnya remaja. Pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat sangat mempengaruhi pola prilaku dan aktivitas sehari-hari remaja saat ini. Perubahan yang terjadi bukan hanya pada aktivitas sehari-hari pada remaja saja, namun perubahan juga terjadi pada prilaku sehari-hari remaja, telah terjadinya penurunan moral pada remaja sekarang ini.

Banyak remaja yang sering menggunakan kata-kata yang tidak pantas atau kurang sopan ketika bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan teman sebayanya, dengan orang yang lebih tua bahkan dengan orang tuanya sendiri. Telah banyak fenomena yang menunjukkan terjadinya penurunan moral pada remaja Indonesia.

Pada masa lalu bangsa indonesia yang dulunya dikenal sebagai bangsa yang santun, lambat laut berubah menjadi bangsa yang suka mencaci dan menajdi pemaki. Fenomena ini dapat dengan jelas terlihat pada media elektronik, terutama televisi banyak tayangan yang menayangkan adegan yang tidak patut ditiru seperti memaki, berkelahi, atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik untuk diperlihatkan pada remaja, tidak hanya itu muncunya teknologi baru yang menghasilkan media baru, seperti internet turut serta menyumbang terbentuknya prilaku menyimpang remaja. Kehadiran media berbasis internet seperti media sosial, *facebook, instagram, twitter,* dan jejaring sosial lainnya menyebakan remaja saat ini sangat mudah memperoleh informasi dan hiburan. Mudahnya akses informasi menimbulkan dampak negatif berupa penurunan moral dan etika remaja saat ini. Banyak remaja tidak menyadari bahwa tidak semua informasi yang diperoleh malalui dunia digital itu pantas dan layak untuk dikonsumsi. Penggunaan media digital pada kalangan anak dan remaja saat ini menimbukan fenemoman sosial yang disebut prilaku *kids jaman now*.

Hasil riset Kemeninfo dan UNICEF mengenai prilaku anak remaja indonesia dalam menggunakan internet. Penelitian yang didanai oleh *Unicef* dan dilaksanakan oleh Kementrian Kominfo dengan dengan jumlah 400 responden dan dengan sampel penelitin yang meliputi anak dan remaja yang berusia 10-19 tahun yang tersebar diseluruh Indonesia menghasilkan data bahwa penggunaan media sosial dan digital menjadi bagian yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari anak muda Indonesia. Hasil penelitian menemukan bahwa 98 persen dari anak-anak dan remaja yang disurvei tahu tentang internet dan bahwa 79,5 persen diantaranya adalah pengguna internet. Terjadi perubahan pola penggunan media digita internet pada remaja. yang awalnya menggunakan personal komputer melalui warnet (warung internet), laptop dirumah, laboratorium komputer sekolah, kini beralih pada penggunaan ponsel atau *smartphone* dalam kegitan sahari-hari.

Hasil riset Kemeninfo juga menunjukan hasil ada tiga motivasi yang mendasari anak-anak dan remaja mengakses internet, yaitu untuk mencari infomasi. Pencarian informasi yang dilakukan didorong karena adanya tugas-tugas sekolah. Motivasi yang kedua adalah untuh terhubung dengan teman, baik teman lama, maupun teman baru dan motivasi yang ketiga adalah untuk hiburan. Penggunaan media sosial dan konten hiburan didorong oleh kebutuhan pribadi. Hasil riset selanjutnya menunjukan bahwa sejumlah besar anak dan remaja telah terekspos dengan konten pornogarfi. Pihak orangtua ketinggalan dari anak-anak mereka dalam hal menguasai dan menggunakan media digital, sedikit dari orangtua yang mengawasi anak-anak mereka ketika mengakses internet, dan sedikit yang menjadi 'teman' anaknya dalam jejaring sosial.

Berdasarkan penelitian Kominfo dapat penulis simpulkan bahwa sebagai besar anak dan remaja indonesia sudah sangat akrab dan sering menghabiskan waktu dengan dunia digital, dan pengawasan orang tua terhadap anak dalam menggunakan media digital sangat lemah. Lemahnya pengawasan orang tua tersebut disebabkan orang tua yang kurang menguasai dan ketinggalan dalam penggunaan media digital. Berdasarkan fenomena tersebut, adanya perilaku yang menjukkan pada penuruan moral dan etika remaja saat ini adalah lemannya pengawasan orang tua terhadap anak, dan terlalu permisifnya orang tua terhadap penggunaan *gadge*t pada anak. Padahal tidak semua informasi pada media digital layak dikonsumsi oleh anak, penggunaan media sosial yang cenderung digunakan sebagai media untuk mem*bully, hate speech* atau ujaran-ujaran kebencian yang tersebar di media digital, *cyber crime*, pornografi dll, merupakan konten-konten negatif yang terdapat dalam media digital. Tanpa adanya pengawsan dari orang tua sangat mungkin sekali anak-anak akan terkontaminasi dengan hal-hal tersebut, sehingga menumbuklan prilaku negatif pada anak seperti menjadi pelaku bully, menjadi pemaki, dan yang lebih parah terlibat seks bebas.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, pendidikan, malalui lembaga sekolah dan guru memiliki peran penting dalam mengajarkan dan menumbuhkan kewarganegaraan digital kepada peserta didik sebagai warganegara muda. Salah satu mata pelajaran yang dapat menumbuhkan kerakter kewarganegaraan digital

pada peserta didik adalah malalui mata pelajaran PKn. PKn merupakan salah satu mata pelajara yang mengemban tugas untuk membentuk karakter kewarganegaaran. PKn berperan penting dalam mengajarkan kewarganegaraan digital, malalui PKn peserta didik dapat belajar bagaimana menjadi warga negara digital yang terdidik, bertanggung jawab, dan beretika. Sehingga melalui penerapan mata pelajaran PKn disekolah dapat terbentuk etika digital pada peserta didik.

Berdasarkan penjabaran yang telah dikemukan oleh penulis, maka yang menjadi rumusan masalah dalam artikel ini adalah :

1. Bagaimana peran mata pelajaran PKn dalam mengembangkan keterampilan dan kompetensi kewaragnegaraan digital ?
2. Keterampilan apa yang dibutuhkan siswa untuk belajar menjadi warga digital yang bertanggung jawab ?
3. Strategi pembejaran apa yang dapat digunakan oleh guru, agar siswa dapat mempelajari dan mengembangkan keterampilan kewarganegaraan digital ?

Tujuan dalam penulisan artikel ini adalah memberikan pemaparan pentingnya peran PPKn dan memberikan alternatif strategi pembelajaran dalam mata pelajaran PPKn yang dapat diterapkan untuk membentuk dan mengembangkan karakter kewarganegaarn digital kepada peserta didik sebagai warganegara muda, serta keterampilan apa yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh peserta didik dalam penggunaan media digital guna mencegah penyalagunaan media digital oleh remaja

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi pustaka, melalui berbagai buku dan jurnal. Sugiyono (2012: 291) mengemukakan studi pustaka berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lainnya yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, karena penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah. Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif, subjek dan objek dalam artikel ini adalah mata pelajaran PPKn dan kewarganegaaran digital pada peserta didik sebagai warganegara muda. Analisis

data dalam artikel ini adalah studi kepustakaan, dengan cara mengkaji teori-teori dan permasalahan-permasalahan dalam jurnal dan referensi lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran PKn

Budimansyah (2010: 9) mengemukakan dalam pratiknya Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Menurut Winataputra (2016: 22-23) secara konseptual dan holistik (psikologis, pedagogis, dan sosial-kultural) pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar setiap warganegara muda/peserta didik (*young citizens*) memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, nilai dan norma Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan komitmen Bhinneka tunggal Ika, dan komitmen bernegarakesatuan Republik Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan secara psikopedagogis/andragogis dan sosiokultural dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi dalam konteks pengembangkan kecerdasan kewarganegaraan (*civic intelligence*) yang secara psikososial tercermin dalam penguasaan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), perwujudan sikap atau karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), pemilikan komitmen kewarganegaraan (*civic committment*), pemilikan keteguhan kewarganegaraan (*civic confidence*), dan penampilan kecakapan kewarganegaraan (*civic competence*) yang kesemua itu memancar dari dan mengkristal kembali menjadi kebajikan/keadaban kewarganegaraan (*civic virtues/civility).* Dapat dismpulkan bahwa mata pelajaran PKn berperan dan bertujuan membentuk karakter kewarganegaaran sesuai dengan nilai-nilai pancasila

2. Kewarganegaraan Digital

Konsep *Digital Citizenship* atau kewarganegraan digital muncul seiring dengan semakin majunya perkembangan teknologi informasi, terutama internet yang ditopang dengan kehadiran berbagai situs jejaring, kehadiran situs jejaring sebagai ajang untuk saling interaksi antara satu individu dengan individu lainnya secara digital. Mereka bergabung dan membentuk komunitas-komunitas tertentu untuk saling berbagi informasi dan memanfaatkan berbagai konten yang didistribusikan, dalam bentuk video, *e-book*, gambar, dan lain-lain.

Adanya kemajuan teknologi berdampak pada terjadinya gejalah penurunan moral pada remaja. Penurunan moral yang terjadi akibat penggunaan media digital dapat diantisipasi dan diminimalisirkan melalui lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan terutama sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan *digital citizenship* atau "kewarganegaraan digital" yang baik. Warga negara digital *(digital citizen*) harus memiliki keterampilan, pengetahuan akses internet dan teknologi yang bertanggung jawab. Seiring dengan kemajuan teknologi yang telah terintegrasi ke dalam kehidupan peserta didik, maka sekolah harus mengeksplorasi kewarganegaraan digital sebagai pendekatan alternatif. Kewarganegaraan digital mendorong siswa untuk menghargai diri mereka sendiri, orang lain dan kekayaan intelektual, belajar untuk berpikir kritis tentang melindungi diri mereka sendiri dan orang lain dari konten dan prilaku berbahaya secara *online*. Saat ini siswa memiliki kehidupan digital dan mendapatkan keuntungan dari penggunaan teknologi, sekolah memiliki kesempatan untuk membantu siswa membangun keterampilan yang mereka butuhkan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab di komunitas *online* global.

Mata pelajaran PPKn sebagai mata pelajaran yang mengemban tugas membentuk karakter warganegara, harus membimbing siswa untuk menjadi warga digital yang beretika. Isman. Dkk (2014: 73) mengemukakan yang dimaksud dengan kewarganegaraan digital adalah kemampuan warganegara untuk menggunakan teknologi dengan kompeten, memahami konten digital dan dapat menilai kredibiitasnya, membuat, meneliti dan berkomunikasi dengan alat

yang tepat, serta berpikiri kritis tentang peluang etis dan tantangan dunia digital, membuat pilihan yang aman, bertanggung jawab, dan memiliki etika dalam penggunaannya. Ada beberapa karaktersitik warga negara digital, yaitu meliputi :

1. Warga negara digital harus memahami masalah manusia, budaya, dan masyarakat yang terkait dengan teknologi dan praktik prilaku hukum dan etika yang berkaitan dengan penggunaan media digital
2. Warganegara harus mengadvokasi dan memperaktekkan penggunaan informasi dan teknolgi yang aman, legal dan bertanggung jawab.
3. Warganegara digital harus menunjukkan sikap positif terhadap penggunaan teknologi dan memiliki tanggung jawab pribadi.
4. Memiliki etiket, memahami peraturan hukum dan memiliki tanggung jawab, serta menjaga keamanan diri *(self protection*)

2.1 Pengertian Kewarganegaraan Digital dan Pentingnya Kewarganegraan Digital

Internet menawarkan remaja banyak kesempatan untuk belajar dan berinteraksi sosial. Internet juga membawa potensi berbahaya dan risiko, seperti *cyberbullying*, pornografi dan pencurian identitas. Maka dari itu guru melalui mata pelajaran PKn harus harus mengembangkan keterampilan kewarganegaraan digital kepada peserta didik. Keterampilan kewarganegraan digital penting dikembangkan karena memungkinkan siswa mengembangkan kerangka kerja untuk penggunaan teknologi yang bertanggung jawab, mempersiapkan mereka untuk sukses dalam belajar dan dalam kehidupan. Banyak remaja,menghabiskan dan mengisi waktu luang mereka di rumah dengan mengakses internet melalui perangkat pribadi mereka, (*personal computer*, laptop dan *smart phone*) untuk belajar dan hiburan. Banyaknya waktu yang dihabiskan untuk mengakes internet dan lemahnya pengawasan dari orang tua, pendidik dalam hal ini guru PKn memiliki peran penting dalam mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia digital dan membantu mereka mengembangkan literasi digital dan media yang teridentifikasi.

Pada dasarnya, kewarganegaraan digital berakar pada kewarganegaraan tradisional. Nilai-nilai kewarganegaraan yang mendasarinya berfungsi untuk menginformasikan dan membimbing kewarganegaraan digital. Namun kewarganegaraan digital merupakan dimensi baru kewarganegaraan. Menurut Alberta (2012: 7) mengemukakan kewarganegaraan digital memiliki berbagai konotasi. Sebagai titik awal, penting untuk menentukan istilahnya. Sebagai dasar pemikiran tentang kewarganegaraan digital. Kewarganegaraan didefinisikan sebagai keadaan menjadi warga masyarakat suatu komunitas sosial, politik atau nasional tertentu. Kewarganegaraan membawa hak dan tanggung jawab. Namun ada juga beberapa perbedaan - terutama pada tingkat spesifik. Kewarganegaraan digital memiliki peraturan bernuansa tersendiri yang terkait dengan kewarganegaraan, peraturan yang khas pada konteks digital.

ISTE (2007) mendefinisikan kewarganegaraan digital sebagai bentuk untuk menganjurkan dan mempraktikkan perilaku yang memungkinkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang legal, etis, aman dan bertanggung jawab dalam media internet. Definisi lain dari kewarganegaraan digital adalah tindakan yang sesuai dengan norma-norma dasar yang diterapkan dalam penggunaan teknologi (Ribble and Bailey 2007). Warga digital, adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk membaca, menulis, memahami, dan merujuk apa yang mereka lihat secara online, yang memiliki akses yang sesuai dengan batasan ekonomi mereka, dan siapa yang menggunakan Internet secara teratur dan efisien (Mossberger, Tolbert & McNeal, 2008).

Farmer (2010) menyatakan bahwa warga negara digital dapat memfilter informasi elektronik dengan tepat, berpartisipasi dalam ruang *cyber* secara efektif, dan dapat memanfaatkan informasi yang mereka pelajari secara daring dengan bijak agar berdampak baik pada pengembangan pribadi maupun sosial. Warga digital berpikir sebelum bertindak, mempertimbangkan konsekuensinya, menampilkan perintah etika yang baik, dan menyadari risiko dan manfaat akses terhadap materi *online* (Churches, Crockett & Jukes, 2010). Menurut Knorr (2010), mempraktekkan perilaku aman dan respek di Internet

adalah indikator kunci dari kewarganegaraan digital yang mapan. Poin umum dari semua definisi ini menekankan memiliki akses ke Internet dan menggunakannya secara etis dan tepat Dapat penulis simpulkan bahwa kewarganegaraan digital merupakan prilaku warganegara dalam menggunakan media digital yang sesuai dengan aturan umum yang berlaku.

2.2 Tujuan Kewarganegaraan Digital

Membentuk warga negara digital yang berkarakter saat ini penting dilakukan. Tujuan kewarganegaraan digital adalah mendidik,memberdayakan dan melindungi (Common Sense Media White Paper, 2011). Ribble & Bailey (2007) menjelaskan ketiga hal tersebut sebagai penghormatan (etiket, akses, hukum), mendidik (komunikasi, melek huruf, perdagangan) dan melindungi (hak dan tanggung jawab, keselamatan / keamanan, kesehatan dan kesejahteraan). Membentuk siswa menjadi warga digital saat ini penting dilakukan, melalui pembelajaran PKn, kewarganegaran digital dapat dikembangkan. Faktor kunci dalam pembentukan kewarganegraan digital adalah melalui proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang dialami siswa dan lingkungan belajar siswa akan mempengaruhi perilaku dalam membentuk kewarganegaraan digital pada diri siswa. PKn memiliki peran dalam membentuk karakter kewarganegaaran digital. Melaui mata pelajaran PKn guru dapat dapat mengembangakan karakter kewarganegaran digital pada pserta didik, mata pelajaran PKn akan efektif mengembangkan karakater kewarganegaraan digital, jika didukung oleh strategi pembelajaran yang tepat.

3. Peran PPKn Terhadap pengembangan karakter kewarganegaraan digital pada warga negara muda.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki otoritas dan peran penting dalam mempersiapkan siswa untuk menghadapi kehidupan dalam masyarakat, bekerja dan berbagi dalam lingkungan digital, secara tidak lansung sekolah memiliki peran dalam pembentukan kewarganegaraan digital. Beberapa pertanyaan muncul mengenai otoritas sekolah, seperti siapa yang harus

dilibatkan dalam menciptakan visi untuk kewarganegaraan digital di sekolah dan bagaimana mengidentifikasi hasil yang diinginkan? Keterampilan apa yang dibutuhkan peserta didik untuk belajar menjadi warga digital yang bertanggung jawab? Apa sajakah cara yang dapat dilakukan oleh guru, terutama guru PPKn agar peserta didik dapat mempelajari keterampilan kewarnegaraan digital tersebut ? Aktivitas pembelajaan PPKn yang seperti apa yang dapat diterapkan untuk mengembangkan kewarganegaraan digital kepada peserta didik?

Menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai mata pelajaran PPKn diperoleh data bahwa PPKn memiliki peran strategis dalam mengembangkan karakter kepada peserta didik. Penelitian yang telah dilakukan oleh Fauzi (2013: 13) menyatakan bahwa peran guru dalam memberikan materi pembelajaran di kelas memiliki pengaruh dalam membentuk karakter peserta. Selanjutnya penelitian yang juga dilakukan oleh Suwito (2012) pengembangan karater siswa dapat dilakukan melalui mata pelajaran PPKn. Pengembangan karakter siswa dapat optimal jika, guru PPKn menerapkan model atau strategi yang tepat dalam proses pembelajaran PPKn. Sedangkan Budimansyah (2010: 13) dalam jurnalnya, mengemukakan pembelajaran PPKn merupakan pembelajaran yang ideal diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri, ditopang oleh sejumlah mata pelajaran lain yang relevan untuk memperkuat aspek tanggung jawab warganegara, dan disempurnakan oleh berbagai program kegiatan ekstrakurikuler maupun ekstra mural yang diselenggarakan di sekolah maupun luar sekolah termasuk pendidikan interventif dengan keluarga, organisasi sosial politik, maupun media massa. Artinya mata pelajaran PPKn memiliki peran strategis dalam mengembangkan karakter peserta didik.

Dari beberapa penelitian mengenai pembelajaran PPKn salah satunya adalah pembelajaran PPKn dapat mengembangkan karakter peserta didik dalam hal ini remaja. Pengembangan karakter melalui mata pelajaran PPKn dapat optimal dilakukan jika guru PPKn dalam proses pembelajaran menerapkan model dan strategi pembelajaran yang tepat. Maka dari itu penulis menyarankan untuk mengembangkan kewarganegaraan digital melalui mata pelajaran PPKn, guru PPKn memerlukan model pembelajaran dalam proses pembelajaran PPKn

agar dapat berjalan opimal. Model pembelajaran yang tepat digunakan dalam mengembangkan karakter kewarganegaraan digital adalah model pembelajaran tehnik klarifikasi nilai atau *VCT (Value Clarification tehnique).* Kelebihan Model Pembelajaran *VCT* menurut Casteel (Adisusilo, 2012:151) adalah :

1. Model VCT dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk mengkomunikasikan ide-ide, keyakinan, nilai-nilai dan perasaan mereka.
2. Model VCT dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk berempati dengan orang lain, terutama dengan keadaan-keadaan yang mungkin berbeda secara signifikan dari mareka sendiri.
3. Model VCT dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk menyelesaikan masalah yang muncul
4. Model VCT dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk setuju atau tidak setuju mengenai suatu pendapat sebagai anggota kelompok sosial.
5. Model VCT dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk terlibat dalam pengemabilan suatu keputusan
6. Model VCT dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memegang dan menggunakan kepercayaan/keyakinan dan ketidakyakinan/ketidakpercayaan secara konsisten.

Selanjutnya Adisusila (2012: 142) menyatakan tujuan model pembelajaran VCT adalah membantu peserta didik untuk menyadari dan mengidentifkasi nilai-nilai mereka sendiri, serta nilai-nilai orang lain. Membantu peserta didik agar mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan orang lain, berkaitan dengan nilai-nilai yang diyakininya. Serta membantu peserta didik agar mampu menggunkan akal budi dan kesadaran emosionalnya untuk memahami perasaan, nilai-nilai dan pola tingkah lakunya sendiri. Berdasarkan kelebihan dan tujuan model pembelajaran *VCT* tersebut maka, proses pembelajaran PKn dengan menerapkan model pembelajaran *VCT* sangat cocok diterapkan untuk mengembangkan kewarganegaraan digital. Model pembelajaran *VCT* dapat membina sikap dan mengembangkan nilai moral peserta didik

Ada beberapa teknik yang terdapat dalam model pembelajaran *VCT* menurut Djahiri (1985: 61- 81) teknik model pembelajaran *VCT* meliputi :

1. Metode percontohan (example of the exemploritary behavior)

2. *VCT* menggunakan analisis nilai meliputi :
   a. Reportase/liputan
   b. Analisis secara akurat
   c. Analisis tulisan
   d. Cerita tidak selesai
3. *VCT* menggunakan daftar/matrix meliputi :
   a. Daftar baik – buruk
   b. Daftar tingkat urutan
   c. Daftar skala prioritas
   d. Daftar gajala kontinum (terus menurus)
   e. Daftar penilaian diri sendiri
   f. Daftar membaca perkiraaan orang lain tentang diri kita
   g. Perisai kepribadian diri
4. *VCT* menggunakan kartu keyakinan (*evidance card)*
5. *VCT* menggunakan wawancara *(public interview*)
6. *VCT* menggunakan yurisprudensi (*Jurisprudensi tehnique*)
7. *VCT* menggunakan teknik inkuiri nilai (*Value inqury random questioning technique)*

VCT sangat tepat diterapkan dalam pembelajaran PPKn, hal ini didukung oleh beberapa penelitian yang telah dilaukan sebelumnya bahwa penerapan model pembelajaran *VCT* dalam mata pelajaran PPKn sangat tepat digunakan, bukan hanya dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik saja, malainkan juga mampu mengembangkan karakter peserta didik. Melalui penerapan model *VCT*, guru PPKn dapat menginternalisaikan karakter kewaganegaraan digital. PPKn dapat berperan dalam mengembangkan etika digital kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat dengan bijak dan memiliki tanggung jawab dalam menggunakan media digital.

Untuk mengembangkan kewarganegaraan digital peserta didik, sebelumnya guru harus memiliki kompetensi yang memungkinkan mereka menggabungkan dunia digital ke dalam kelas - tingkat penggunaan - dan memungkinkan mereka berperilaku koheren dengan teori - tingkat indra (Burguet & Buxarrais, 2013; García-Gutiérrez, 2013). Menurut Garcias dan Marin (2016: 83) untuk meningkatkan kompetensi guru dalam penguasaan media digital diperlukan pelatihan guru yang mencakup pengembangan kapasitas etis para profesional pendidikan, yang berkaitan dengan etika konten digital.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisi terhadap beberapa referensi, diperoleh simpulan bahwa :

1. Mata pelajaran PPKn memiliki peran strategis dalam mengembangkan karakter kewarganegaarn digital pada peserta didik sebagai warganegara muda. Peran PPKn dalam mengembangakan kompetensi kewarganegaarn digital akan optimal jika menerapkan model pembelajaran VCT dalam proses pembelajaran PKn.
2. Kompetensi yang harus dimiliki siswa dalam era digital adalah etika dalam penggunaan media digital dan internet, meliputi kemampuan siswa memfilter informasi pada ruang *cyber*, kemampuan untuk membaca, menulis, memahami, dan merujuk apa yang mereka lihat secara *online* atau literasi digital, yang memiliki akses yang sesuai dengan batasan usia mereka, paham akan norma-norma yang berlaku dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang legal, etis, aman dan bertanggung jawab dalam media internet.
3. Pengembangan karakter melalui mata pelajaran PPKn dapat optimal dilakukan jika guru PPKn dalam proses pembelajaran menerapkan model dan strategi pembelajaran yang tepat. Penulis menyarankan untuk mengembangkan kewarganegaraan digital melalui mata pelajaran PPKn, maka guru PPKn memerlukan model pembelajaran dalam proses pembelajaran PPKn. Model pembelajaran yang tepat digunakan dalam mengembangkan karakter kewarganegaraan digital adalah model pembelajaran teknik klarifikasi nilai atau *VCT (Value Clarification tehnique).*
4. Degradasi moral akibat penyalagunan media digital pada peserta didik khususnya remaja merupakan permasalahan yang harus segera diatasi. Perlu kerjasama semua pihak untuk mengatasi permasalahan ini. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran peran penting dalam membentuk karakter peserta didik, dan guru memiliki peran penting dalam mengembangkan karakter pesertad didik, maka dari itu seorang guru harus memiliki kompetensi yang baik dalam, guru dituntut untuk selalu

mengembangakn dan berinovasi dalam proses pembelajaran di kelas. Karena proses pembejaran dikelas sangat mempengaruhi pola prilaku siswa. Selain itu orang tua harus berperan secara aktif dalam mengawasi tumbuh kembang anaknya, jangan hanya menyerahkan pada sekolah saja, orang tua jangan terlalu permisif terhadap penggunaan gadget. Orang tua harus melek digital, dan tidak boleh abai terhadap aktivitas anak terhadap media digital. Maka dari itu penulis menyarankan diperlukannya penyuluhan-penyuluhan mengenai kewaganegaraan digital. Supaya orang tua, dan sebagain guru yang masih *imigran* dalam dunia digital dapat melek digital dan dapat mengawasi penggunaaan media digital pada anak. Sehingga prilaku menyimpang akibat penggunakan media digital yang salah dapat diminimalisirkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada bapak Choiri Hasan, Nurjanna M.Pd dan An Perlani untuk semua dukungan morilnya. Terimakasih kepada para guru dan dosen yang telah memberikan banyak ilmu.

DAFTAR PUSTAKA

Adisusilo, Sutarjo, J.R. 2012. *Pembelajaran Nilai-Nilai Karakter Konstruktivisme Dan VCT Sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Alberta Education. 2012. *Digital Citizenship Policy Development Guide*. http://education.alberta.ca/admin/technology/research.aspx. Di akses tanggal 19 November 2017.

Budimansyah. Dasim. 2010. *Tantangan Globalisasi Terhadap Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air di Sekolah*. Jurnal Penelitian Pendidikan Vol. 11 No. 1

Churches, A., Crockett, L., & Jukes, I. (2010). *The digital diet: Today's digital tools in small bytes*. 21st Century Fluency Project.

Djahiri, Kosasih. A. 1985. *Strategi Pengajaran Afektif-Nilai-Moral VCT dan Games dalam VCT*. Bandung: PMPKN FPIPS IKIP Bandung

Farmer, L. 2010. . *21. Century standarts for information literacy*. Leadership, 39 (4). 20-22

Fauzi, Yudia, Fadil. 2013. *Peran Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan dalam Upaya Pembentukan Karakter Peserta Didik*. JURNAL PPKN UNJ ONLINE. Volume 1. No. 2

Garcias, Adolfina, Perez dan Marín, I, Victoria. 2016. *Ethics Issues of Digital Contents for Pre-Service Primary Teachers: A Gamification Experience for Self-Assessment with Socrative.* The IAFOR Journal of Education. Volume 4 . Issue 2

Isman, Aytekin , Ozlem Canan Gungoren. 2014. *Digital Citizenship*. TOJET : The Turkish Online Journal of Educational Technology. Vol. 13. 1.

ISTE. (2007). *National education technology standarts for students*. http://www.iste.org/standards/nets-for-students/nets-student-standards-2007.aspx. Di akses tanggal 19 November 2017.

Kominfo. SIARAN PERS NO. 17/PIH/KOMINFO/2/2014. Riset *Kominfo dan UNICEF Mengenai Perilaku Anak dan Remaja Dalam Menggunakan Internet*. Kominfo.go.id. diakses 19 November 2017.

Mossberger, K., Tolbert, C. J., & McNeal R. (2008). *Digital citizenship: the internet, society, and participation*. London: The MIT Press.

Ribble, M. and Bailey, G. (2007). *Digital citizenships in scholls.* Washington: ISTE.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung

Suwito, Anton. 2012. *Integrasi Nilai Pendidikan Karakter ke dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Melalui RPP*. Jurnal Ilmiah CIVIS. Vol II. No. 2

Winataputra.S. Udin. 2016. *Posisi Akademik Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) dan Muatan/Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional*. Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol. 1, No.1.

PERAN GURU PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PKn) MENINGKATKAN PENGAMALAN NILAI NILAI PANCASILA PADA SISWA DI SMP NEGERI 2 SIMEULUE TIMUR KABUPATEN SIMEULUE

Hasbi Ali[1]
[1]Prodi PPKn FKIP Unsyiah, Banda Aceh
asbysagita@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran guru Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (PKn) menanamkan nilai- nilai Pancasila dalam proses pembelajaran, kendala yang dialami guru Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (PKn) menanamkan nilai- nilai Pancasila dalam proses pembelajaran, dan upaya guru Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (PKn) mengatasi kendala menanamkan nilai- nilai Pancasila dalam proses pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, subjek penelitian 3 (tiga) orang guru Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (PKn), data dikumpulakn dengan menggunakan instrumen wawancara, dan dianalisis secara kualitaif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (PKn) sangat berperan menanamkan nilai- nilai Pancasila dengan menggunakan metode analisis sintesis dalam proses pembelajaran, masih terbatasnya sumber belajar dan rendahnya pemahaman peserta didik terhadap nilai- nilai Pancasila, dan untuk mengatasi kendala ini guru Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (PKn) dalam menanamkan nilai- nilai Pancasila kepada peserta didik adalah dengan mencari sumber belajar lain dan menggunakan strategi pembelajaran yang lebih menyenangkan. Dari hasil penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa guru Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (PKn) menerapkan berbagai metode dalam menanamkan nilai- nilai Pancasila kepada peserta didik, kendala pembelajaran ada yang bersifat internal dari siswa sendiri yang masih rendah tingkat pemahamannya tentang nilai-nilai Pancasila maupun yang bersifat eksternal seperti terbatasnya sumber belajar, untuk itu guru menerapkan berbagai strategi yang lebih menyenangkan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik.

Kata Kunci: *Peran Guru, Nilai Nilai Pancasila*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan sebagai sarana transmisi pengetahuan, nilai, dan sikap adalah untuk pengembangan pribadi seseorang dalam mencapai kematangan dan kedewasaan. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya ingin mengembangkan ilmu, keterampilan dan teknologi; tetapi juga mengembangkan aspek-aspek lain misalnya kepribadian, etika moral dan lain-lain. Dalam hal ini, Syaodih (1988:18) menyatakan bahwa: "Pendidikan merupakan suatu interaksi antara pendidik dengan peserta didik dalam upaya membantu menguasai tujuan-tujuan pendidikan".

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada hakikatnya adalah pendidikan yang mengarah pada terbentuknya warga negara yang baik dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai dan dasar negara Pancasila. Secara konseptual epistemologis, menurut Winataputra (2006:26) bahwa: "Pendidikan Pancasila dapat dilihat sebagai suatu *integrated knowledge system* yang ber-Pancasila". Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku yang memancarkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari bermacam agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab,yang mendukung persatuan bangsa dalam masyaraka yang beragam budaya dan kepentingan bersama diatas golongan dan perorangan, sehingga perbedaan pemikian dapat diatas dengan cara mesyuwarat mufakat dan perilaku yang mendukung upaya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Seiring dengan perkembangan zaman dan derasnya arus globalisasi saat ini, setiap individu sering melupakan bahkan mempertanyakan nilai-nilai yang ada dalam pancasila serta bagaimana pengamalan nilai-nilai pancasila tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya keinginan untuk mengkaji akan keberadaan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila untuk diterapkan dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara. Hal ini didasarkan

bahwasanya nilai-nilai Pancasila merupakan salah satu sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia ini.

Dalam pembicaraan mengenai nilai, maka nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila memiliki arti yang penting dan mendalam baik itu secara historis maupun pengamalannya dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai pancasila ini bagi masyarakat bangsa Indonesia merupakan landasan dan dasar negara, serta cita-cita dalam melakukan segala sesuatu, baik dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat maupun dalam kehidupan kenegaraan.

Efek negatif dari globalisasi, terbukti akhir-akhir ini banyak keluhan masyarakat tentang menurunnya tata susila, etika, dan kreativitas karena pendidikan budaya dan karakter bangsa lemah. Akibatnya, sebagian besar siswa sekolah yang berkelakuan tidak sopan dan kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, etika dan budaya Indonesia. Dari kenyataan yang demikian itu, maka sudah seharus nyalah pemerintah (maupun masyarakat) mengambil langkah-langkah usaha perlu segera diupayakan solusinya agar tidak menjadi permasalahan yang lebih serius lagi. Salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah adalah dengan menetapkan pengembangan kemampuan dan membentuk karakter sebagai fungsi pendidikan nasional Indonesia.

Kondisi siswa di SMP Negeri 2 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue akhir-akhir ini tidak lagi berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, salah satu upaya pengukuhan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara adalah melalui pengajaran di sekolah-sekolah melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Oleh karena itu, penelitian ini membahas tentang: Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) Meningkatkan Pengamalan Nilai Nilai Pancasila pada Siswa di SMP Negeri 2 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

2. Rumusan Masalah

1. Peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) meningkatkan pengamalan nilai- nilai Pancasila pada siswa di SMP Negeri 2 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

2. Kendala guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) meningkatkan pengamalan nilai- nilai Pancasila pada siswa di SMP Negeri 2 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.
3. Upaya guru Pendidikan pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) mengatasi kendala meningkatkan pengamalan nilai- nilai Pancasila pada siswa di SMP Negeri 2 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

2. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) meningkatkan pengamalan nilai- nilai Pancasila pada siswa di SMP Negeri 2 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.
2. Mengetahui kendala guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) meningkatkan pengamalan nilai- nilai Pancasila pada siswa di SMP Negeri 2 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.
3. Mengetahui upaya guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) mengatasi kendala meningkatkan pengamalan nilai- nilai Pancasila pada siswa di SMP Negeri 2 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan/Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif untuk menentukan variabel yang akan diteliti. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Arikunto (2003:23) yang mengatakan bahwa: "Pendekatan adalah metode atau cara mengadakan penelitian, juga menunjukkan jenis dan tipe penelitian". Jenis penelitian ini adalah deskriptif karena hanya ingin mendeskripsikan tentang: Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Meningkatkan Pengamalan Nilai Nilai Pancasila pada Siswa. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Arikunto (2003:310) bahwa: "Penelitian deskripsi tidak dimaksudkan untuk

menguji hipotesis tertentu, akan tetapi hanya menggambarkan suatu variabel, gejala, atau keadaan".

2. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah 3 orang guru Pendidikan Pncasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada SMP Negeri 2 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Menurut Arikunto (2003:141) subjek bertujuan dilakukan dengan cara: "Mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah, akan tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya ada alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana, sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh". Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah: Peran Guru Pendidikan pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Meningkatkan Pengamalan Nilai Nilai Pancasila pada Siswa di SMP Negeri 2 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan instrumen wawancara. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada SMP Negeri 2 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Menurut Moleong (2005:186) wawancara adalah: "Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap- cakap dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban/keterangan pada peneliti".

3.4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul melalui wawancara, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang diperoleh melalui penelitian ini. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan tentang: Peran Guru Pendidikan pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Meningkatkan Pengamalan Nilai Nilai Pancasila pada Siswa di SMP Negeri 2 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Menurut Miles dan Huberman dalam Salim (2006:20) menyebutkan ada tiga langkah analisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi data.

Reduksi, yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti pada proses dan pernyataan- pernyataan yang perlu dijaga, sehingga tetap berada di dalamnya.

2. Penyajian data.
   Penyajian data dimaksudkan, dimana peneliti mengembangkan sebuah informasi deskripsi untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan dalam bentuk teks naratif.
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi.
   Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

1.1. Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam Meningkatkan Pengamalan Nilai Nilai Pancasila pada Siswa

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa semua guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pernah menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa dalam proses pembelajaran. Strategi yang digunakan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa dalam proses pembelajaran adalah dengan memberikan contoh teladan kepada siswa, sopan dalam berbicara dan bertutur kata yang baik, hormat kepada orang tua dan guru serta sayang kepada sesama teman, dan mengucapkan salam apabila memasuki rumah dan mengendarai sepeda atau motor.

Metode mengajar yang sering digunakan oleh guru untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa dalam proses pembelajaran adalah tanya jawab, diskusi, ceramah bervariasi, dan simulasi. Penerapan berbagai metode mengajar tersebut sangat memberi pengaruh pada pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila. Pendekatan mengajar yang sering digunakan oleh guru untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa dalam proses pembelajaran adalah dengan cara berkomunikasi langsung kepada siswa dan orang tua mereka.

1.2.. Kendala Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam Meningkatkan Pengamalan Nilai Nilai Pancasila pada Siswa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru pernah mengalami hambatan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa dalam proses pembelajaran. Berbagai hambatan tersebut seperti kurangnya buku paket untuk siswa, maka terhambat dalam proses belajar mengajar dan kesulitan dalam memotivasi anak. Oleh karena itu, dalam hal ini tidak ada hambatan yang berasal dari guru untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa dalam proses pembelajaran, akan tetapi kurangnya buku paket untuk siswa, sehingga menghambat dalam proses belajar mengajar.

1.3. Upaya Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran (PPKn) mengatasi kendala Meningkatkan Pengamalan Nilai Nilai Pancasila pada Siswa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada upaya yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi hambatan penanaman nilai-nilai Pancasila kepada siswa dalam proses pembelajaran seperti menerapkan metode diskusi dalam proses pembelajaran dan mendikte materi pelajaran. Bentuk upaya yang dilakukan adalah dengan menanamkan nilai-nilai keagamaan, berbudi luhur dan jujur serta berkeadilan, dan mengajar secara ikhlas dan tepat waktu masuk dalam kelas dan mencari materi ajar yang disukai siswa. Selain itu, guru juga bekerjasama dengan guru lain untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa dalam proses pembelajaran.

2. Pembahasan

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, peningkatan pengamalan terhadap nilai- nilai Pancasila kepada peserta didik harus ditingkatkan dalam upaya memperkuat nilai- nilai kebangsaan. Oleh karena itu, menurut Maftuh dan Sapriya (2005:320) Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada hakekatnya adalah: "Upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara".

Komponen penting yang hendak dikembangkan dalam mencapai tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganaegaraan (PKn), yaitu warga negara yang cerdas (memiliki pengetahuan kewarganegaraan), terampil (berpikir kritis dan berpartisipasi), dan berkarakter (loyal kepada bangsa dan negara, memiliki kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945). Pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan merupakan basis bagi terbentuknya karakter kewarganegaraan. Karakter kewarganegaraan menurut Cholisin (2003:2) berisikan: "Sifat-sifat yang melekat pada diri setiap warga negara dalam melakukan perannya sebagai warga negara, hal ini akan terbentuk ketika pada dirinya telah terbentuk pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan".

Menurut Djahiri (2002:100) penanaman nilai-nilai Pancasila kepada siswa dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dengan beberapa usaha, yaitu: "(1) Pengukuhan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, (2) Memperkuat nilai dan norma Undang Undang Dasar 1945, (3) Penguatan komitmen kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (4) Penguatan nilai-nilai keragaman sesuai dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika, (5) Penguatan keunggulan dan daya saing bangsa".

Salah satu upaya pengukuhan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara dan memperkuat nilai dan UUD 1945 adalah melalui pengajaran di sekolah-sekolah melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Dengan demikian, bahwa saat pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang sebenarnya, dapat mengembangkan karakter bangsa. Proses pembangunan karakter bangsa *(national character building)* yang sejak proklamasi menjadi prioritas kini perlu direvitalisasi agar sesuai dengan arah dan pesan konstitusi negara Republik Indonesia. PKn sebagai salah satu matapelajaran yang wajib bagi seluruh peserta didik mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, mempunyai peranan yang strategis dalam menerapkan peembangunan karakter.

Secara konseptual epistemologis, menurut Winataputra (2006:96) bahwa: "Pendidikan Pancasila dapat dilihat sebagai suatu *integrated knowledge system* yang ber-Pancasila". Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku yang memancarkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari bermacam agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab,yang mendukung persatuan bangsa dalam masyaraka yang beragam budaya dan kepentingan bersama diatas golongan dan perorangan, sehingga perbedaan pemikian dapat diatas dengan cara musyawarah mufakat dan perilaku yang mendukung upaya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, visi dari Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah sebagai sarana pembinaan karakter bangsa *(nation and character building)* dan pemberdayaan warga,sedangkan misinya adalah membentuk warga negara yang baik.

KESIMPULAN

1. Peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam meningkatkan pengamalan terhadap nilai- nilai Pancasila adalah sangat penting karena melalui pembelajaran inilah siswa dapat diajarkan tentang nilai-nilai kebangsaan.
2. Kendala yang dialami guru meningkatkan pengamalan terhadap nilai- nilai Pancasila pada siswa dalam proses pembelajaran berupa terbatasnya buku ajar tentang nilai-nilai Pancasila, sehingga guru harus menerapkan berbagai metode, strategi, dan pendekatan dalam pembelajarannya.
3. Upaya guru untuk mengatasi kendala yang dialami dalam meningkatkan pengamalan terhadap nilai- nilai Pancasila adalah dengan menerapkan metode diskusi dan mencari bahan ajar dari sumber-sumber belajar lain yang relevan.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Terima kasih kepada panitia Seminar Nasional AP3KnI Jawa Tengah yang telah mau memuat artikel saya dalam prosiding.
2. Terima kasih kepada narasumber dalam penelitian ini yang telah mau memberikan data yang saya perlukan.
3. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu peneliti, baik moril maupun materil dalam menyusun laporan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2003. *Prosedur Penelitian*. (Suatu pendekatan praktis). Jakarta: Rineka Cipta.

Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan. 2011. *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter* (Berdasarkan pengalaman di Satuan Pendidikan Rintisan. Jakarta: Kementrian Pendidikan Nasional.

Cholisin. 2003. *Kewarganegaraan*. Jakarta: Dit.PLP Ditjen Dikdasmen Depdiknas.

Djahiri, A. Kosasih. 2006. *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium PKn FIPS-UPI.

Depdiknas. 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan, Strategi dan Metode Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : Depdiknas.

Depdiknas. 2007. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025*. Jakarta: Depdiknas.

Depdiknas. 2003. *Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.

Depdiknas. 2006. *Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi*. Jakarta: Depdiknas.

Ganeswara, G dkk. 2002. *Panduan Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Bandung: CV. Yasindo Multi Aspek.

Maftuh, Bunyamin dan Sapriya. 2005. *Pembelajaran PKn melalui Pemetaan Konsep*. Dalam Jurnal CIVICUS. Bandung: Jurusan PKn FPIPS.

Moleong, J. Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Novitasari, Almi. 2008. *Penerapan* Quantum Learning *dalam Meningkatkan Pemahaman Konsep Sistem Politik di Indonesia pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: FPIPS UPI.

Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025*.

Rauf, M dkk. 2008. *Refleksi Karkater Bangsa*. Jakarta : UI.

Sapriya dkk (ed). 2012. *Transformasi Empat Pilar Kebangsaan dalam Mengatasi Fenomena Konflik dan Kekerasan*: Peran Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: CV Maulana Media Grafika.

Sumantri,E. 2008. *Pegagangan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Asia Tenggara*. Bandung: Rajawali.

Syaodih, Nana Sukmadinata. 1988. *Prinsip dan Landasan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Dirjendikti, P2LPTK, Depdikbud.

Sanusi, Achmad. 2004. *Kapita Selekta Pembahasan Masalah Masalah Sosial*. Bandung: UPI.

Sumantri, M. Nu'man. 2006. *Metode Mengajar* Civics. Jakarta: Erlangga.

Suwardi. 2009. *Konsepsi Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan. Sebuah Refleksi*. Bandung: Jurusan PKn PIPS UPI.

Salim. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial.* Yogyakarta: Tiara Wacana.

Tilaar, H.A.R. 1999. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*. Magelang: Tera Indonesia.

Winataputra, Udin S. 2006. *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistematik Pendidikan Demokrasi*. Suatu Kajian dalam Konteks Pendidikan IPS. Bandung: UPI.

PENERAPAN METODE GALERI WISATA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI AKTIF SISWA PADA BAHAN AJAR PEMBAGIAN JENIS-JENIS HUKUM

Ratnaningsih
Prodi PPKn Pascasarjana UNS, Surakarta
ratnaningsih935@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu persoalan yang dihadapi guru dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) adalah belum menerapkan Metode Pembelajaran Kooperatif yang melibatkan partisipasi aktif siswa, sehingga proses pembelajaran menjadi kurang menarik dan tidak bisa memunculkan kreatifitas siswa. Penerapan Metode Pembelajaran Kooperatif menjadikan siswa menjadi kreatif dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis sehingga dapat mempengaruhi hasil prestasi belajar siswa. Kemampuan guru dalam menerapkan Metode Pembelajaran Kooperatif tidak mungkin didapatkan tanpa melaksanakan praktik secara langsung. Macam-macam Metode Pembelajaran Kooperatif terdiri dari galeri wisata, the power of two, think pair and share, card short, index card match. Berdasarkan pengalaman penulis menerapkan Metode Galeri Wisata pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dengan bahan ajar pembagian jenis-jenis hukum, hasil yang didapatkan adalah siswa ikut berpartisipasi aktif tentang penjelasan teoritis jenis-jenis hukum menurut bentuk, sifat, isi, waktu berlakunya, tempat berlakunya, wujudnya, cara mempertahankannya dalam proses pembelajaran, siswa berperan aktif dalam berpendapat dan berkarya, siswa mampu berpikir kritis dan kreatif serta hasil prestasi belajar siswa menjadi lebih baik sehingga tercapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan studi dokumen, studi berbagai buku pustaka dan observasi . Teknik analisa data ada tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dalam bentuk uraian, dan menarik kesimpulan tentang pembagian jenis-jenis hukum. Untuk menguji keabsahan data, maka digunakan uji kredibilitas data dengan triangulasi data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, antara lain triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu.

Kata kunci *: Metode Pembelajaran Kooperatif, Galeri Wisata, Partisipasi aktif*

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia pendidikan semakin hari semakin penuh dengan tantangan dan kompetisi. Kemajuan Iptek yang sangat cepat dan masif menuntut kemampuan sumber daya pendidikan melakukan penyesuaian yang signifikan.

Keunggulan daya saing dapat dicapai dengan menguasai pengetahuan, keterampilan dan tingkat mental. Mobilitas pekerja pada tataran internasional yang gerakannya melintasi batas-batas negara (*borderless movement*) menuntut

pendidikan semakin harus dikelola secara baik (Maylanny Christine,2009). Peningkatan kualitas pembelajaran menjadi sebuah kewajiban sebagai praktisi pendidikan. Usaha inovasi dan pengembangan pendidikan yang dilakukan belum dapat diimplementasikan secara maksimal. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Bab II pasal 3 ditekankan kualitas pendidikan dengan tujuan sebagai berikut : " Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab ".

Peningkatan kualitas proses kegiatan belajar mengajar memerlukan tindakan yang dapat memberikan dampak positip sehingga siswa ikut berpartisipasi aktif dan tercapainya hasil kegiatan belajar mengajar yang optimal sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Salah satu tindakan yang dilakukan guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dan hasil proses kegiatan belajar mengajar adalah dengan metode Pembelajaran Kooperatif. Menurut David W Johnson (2010: 4) " Pembelajaran Kooperatif merupakan proses belajar mengajar yang melibatkan kelompok-kelompok kecil yang memungkinkan siswa untuk bekerja bersama-sama didalamnya guna memaksimalkan pembelajaran mereka sendiri dan pembelajaran satu sama lain ". Macam-macam pembelajaran kooperatif adalah galeri wisata, the power of two, think pair and share, card short, index card match (Dirjendikdasmen:2017). Berdasarkan pendapat Silberman galeri wisata menyebutnya dengan istilah Galeri Belajar, " merupakan suatu cara untuk menilai dan merayakan apa yang telah peserta didik pelajari setelah rangkaian pelajaran studi "(dalam Marini, 2012)

Keberhasilan dan prestasi yang memuaskan dapat tercapai dengan adanya sebuah proses dan meningkatkan pola kebiasaan. Materi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraa (PKn) praktis bersifat teoritis sehingga perlu

menerapkan metode pembelajaran kooperatif agar materi dapat dipahami siswa. Bahan ajar pembagian Jenis-Jenis Hukum berisi tentang penjelasan teoritis jenis-jenis hukum menurut bentuk, sifat, isi, waktu berlakunya, tempat berlakunya, wujudnya, cara mempertahankannya sehingga diperlukan metode galeri wisata dalam penyampaian materi tersebut kepada siswa.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis mendeskripsikan pelaksanaan proses pembelajaran untuk meningkatkan partisipasi aktif dan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam sebuah *Best Practice* yang berjudul "Penerapan Metode Galeri Wisata pada Bahan Ajar Pembagian Jenis-Jenis Hukum ".

PENDEKATAN PENYELESAIAN MASALAH

Guru sebagai administrator kelas harus mempunyai ide-ide yang kreatif untuk membangkitkan partisipasi aktif siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar. Pengalaman penulis dalam menerapkan metode galeri wisata adalah pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dengan Bahan Ajar Pembagian Jenis-Jenis Hukum. Penerapan Metode Galeri Wisata diharapkan dapat membangkitkan partisipasi aktif siswa dalam menyampaikan pendapat tentang penjelasan teoritis jenis-jenis hukum menurut bentuk, sifat, isi, waktu berlakunya, tempat berlakunya, wujudnya, cara mempertahankannya dalam proses pembelajaran , menghasilkan suatu karya, membawa suasana yang berbeda dikelas, serta meningkatkan kemampuan belajar siswa dalam berpikir kritis dan kreatif.

Menurut Isjoni (2009:29) bahwa " Pembelajaran Kooperatif merupakan pembelajaran yang memungkinkan siswa mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan secara penuh dan suasana belajar yang terbuka dan demokratis ". Pembelajaran yang selama ini sudah terlaksana hanyalah sebatas penyampaian pengetahuan kepada siswa yang bersifat satu arah tanpa memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan siswa sesuai potensi yang dimiliki. Pembelajaran efektif memerlukan suasana pembelajaran yang mampu menggali

potensi siswa, yang menempatkan siswa sebagai obyek sekaligus subyek pembelajaran sehingga siswa bisa berkembang secara maksimal.

Penerapan Metode Galeri Wisata pada Bahan Ajar Pembagian Jenis-Jenis Hukum dapat meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam pemahaman tentang penjelasan teoritis jenis-jenis hukum menurut bentuk, sifat, isi, waktu berlakunya, tempat berlakunya, wujudnya, cara mempertahankannya, meningkatkan keberanian siswa berpendapat dan berkarya penjelasan teoritis jenis-jenis hukum menurut bentuk, sifat, isi, waktu berlakunya, tempat berlakunya, wujudnya, cara mempertahankannya, membantu dan mendorong siswa berpikir kritis dan kreatif penjelasan teoritis jenis-jenis hukum menurut bentuk, sifat, isi, waktu berlakunya, tempat berlakunya, wujudnya, cara mempertahankannya, menghargai hasil karya dalam bentuk galeri yang menarik satu sama lain.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan studi dokumen, studi berbagai buku pustaka dan observasi . Variabel yang diteliti yaitu metode galeri wisata dalam meningkatkan partisipasi aktif siswa pada bahan ajar pembagian jenis-jenis hukum. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data melalui tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dalam bentuk uraian, dan menarik kesimpulan-kesimpulan tentang pembagian jenis-jenis hukum. Untuk menguji keabsahan data, maka digunakan uji kredibilitas data dengan triangulasi data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, antara lain triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Galeri wisata menurut Silberman (dalam Marini, 2012:4) menyebutnya dengan istilah Galeri Belajar, " merupakan suatu cara untuk menilai dan merayakan apa yang telah peserta didik pelajari setelah rangkaian pelajaran studi". Kemudian hal serupa pula dikemukakan oleh Machmudah (dalam Marini, 2012:4) " Galeri belajar merupakan suatu cara untuk menilai dan mengingat apa

yang telah siswa pelajari. Adapun menurut Francek dalam *Journal of College Science Teaching* (dalam Marini, 2012:4) " *Gallery Walk is a discussion technique that gets students out of their chairs and actively involved in synthesizing important science concepts, writing, and public speaking. The technique also cultivates listening and team building skills".*

Galeri Wisata adalah cara untuk menggambarkan apa yang telah dibaca dan dipahami siswa dalam bentuk keaktifan kinestetik. Metode galeri wisata yang telah diterapkan terbukti mempunyai pengaruh dalam meningkatkan partisipasi aktif pada siswa hal ini terlihat dalam pelaksanaan Metode Pembelajaran Galeri Wisata pada Bahan Ajar Pembagian Jenis-jenis Hukum sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan orientasi untuk penanaman sikap menghayati ajaran agama yang dianutnya memulai pembelajaran dengan berdoa, kemudian evaluasi terhadap kebersihan kelas dan mengabsen kehadiran siswa.
2. Melakukan kegiatan untuk memotivasi siswa dan penanaman nilai nasionalisme dengan mengajak siswa menyanyikan lagu Dari Sabang sampai Merauke.
3. Melakukan kegiatan apersepsi untuk mengingat kembali materi yang lalu tentang hakikat norma hukum (lagu norma hukum) serta mengecek kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran hari ini.
4. Menyampaikan Pokok bahasan tentang pembagian jenis-jenis hukum menurut bentuknya, sifatnya dan isinya serta menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah mengikuti pembelajaran pembagian jenis-jenis hukum menurut bentuknya, sifatnya dan isinya.
5. Pada Kegiatan inti penjelasan teknis untuk menarik siswa dalam pelaksanaan Metode Pembelajaran Galeri Wisata pada Materi Pembagian Jenis-jenis Hukum menurut bentuknya, isinya dan sifatnya.
6. Pembentukan kelompok-kelompok oleh siswa dengan jumlah yang seimbang
7. Guru mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam proses belajar yang terdiri dari kertas lipat warna warni, spidol warna warni, gunting, lem, dan kertas karton yang digunakan untuk menempel hasil kerja (Galeri).

8. Guru meminta bantuan seorang siswa untuk membagikan kertas karton, kertas warna warni, spidol secara merata untuk semua kelompok. Untuk gunting dan lem bisa secara bergantian.
9. Kegiatan selanjutnya pembagian tugas dalam kelompok secara mandiri. Pembagian tugas dengan rincian @ kelompok 4 siswa, 3 siswa mencari informasi keperpustakaan tentang topik pembagian jenis-jenis hukum menurut bentuknya, isinya dan sifatnya @ anak satu jenis hukum dengan batasan waktu (sekitar 10 menit). Sedangkan 1 siswa menyiapkan desain galeri yang akan dibuat dan yang nanti akan menunggui galeri pada saat ada kunjungan terhadap galeri milik kelompoknya.
10. Setelah 3 anak yang mencari informasi tentang hukum yang menjadi tugasnya selesai dan kembali ke kelas, siswa segera membuat ringkasan dari informasi yang diperoleh tersebut. (mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, memecahkan masalah, kemandirian, mengolah dan menyajikan informasi).
11. Ringkasan informasi yang sudah dibuat kemudian ditulis serapi mungkin dengan tulisan yang seindah mungkin pada kertas lipat warna warni (mengembangkan kreativitas siswa, nilai estetika) dengan kreasi gambar dan hiasan lain sesuai selera dengan tetap memperhatikan etika.
12. Guru sesekali berkeliling melakukan pengecekan dan senantiasa memotivasi siswa untuk menyelesaikan tugasnya pada setiap kelompok (nilai kedisiplinan) dan menegur dengan halus siswa yang tidak aktif berpartisipasi menyelesaikan tugas (nilai kerjasama, kebersamaan) sambil berkeliling guru melakukan penilaian proses dengan menggunakan pedoman observasi yang sudah dipersiapkan sebelumnya secara obyektif.
13. Hasil tulisan di kertas lipat kemudian disusun sesuai kreasi kesepakatan kelompok di kertas karton yang sudah disediakan dengan kreativitas dari masing-masing anak sesuai idenya untuk dibuat sebuah galeri pembagian jenis-jenis hukum menurut bentuk, sifat dan isinya. Hasil kerja kelompok yang berupa galeri pembagian jenis-jenis hukum kemudian ditempel didinding dekat masing-masing kelompok.

14. Kegiatan selanjutnya masing-masing kelompok berkeliling mengamati galeri kelompok lainnya secara bergantian sambil diamati, dibaca kemudian membubuhkan tanda bintang pada galeri (jumlah minimal dibuat kesepakatan terlebih dahulu antara siswa dengan guru, misal minimal 3) dan menuliskan nama kelompok yang telah mengunjungi galeri (pengembangan nilai menghargai hasil karya orang lain)
15. Setelah selesai melakukan wisata galeri, siswa bersama guru melakukan klarifikasi terhadap temuan siswa saat melakukan kunjungan ke galeri kelompok lain untuk dikoreksi dan dibuat kesimpulan secara klasikal.
16. Guru melakukan kegiatan post test dengan teknik tes tertulis bentuk uraian singkat yang berupa melengkapi bagan tentang pembagian jenis-jenis hukum menurut bentuknya, isinya dan sifatnya yang ditayangkan dalam slide dan menyalinnya di buku tugas.
17. Guru melakukan refleksi dari pelaksanaan Metode Galeri Wisata pada bahan ajar pembagian jenis-jenis hukum yang telah dilaksanakan, kemudian meminta salah satu siswa menghitung banyaknya jumlah bintang yang diperoleh masing-masing kelompok untuk menentukan urutan 1, 2 dan 3. (Penguatan untuk memotivasi siswa).

Dari hasil pelaksanaan penggunaan metode galeri wisata tersebut diatas didapatkan hasil bahwa terdapat interaksi antar guru – siswa dan siswa – siswa. Siswa mempunyai kebebasan dalam menyampaikan pendapat masing-masing sehingga peran dan kegiatan guru pada metode galeri wisata sebagai fasilitator. Dengan metode galeri wisata, siswa berpartisipasi aktif dalam membahas bahan ajar yang sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan siswa menjadi sumber pembelajaran (*Student Center Learning*). Hal ini sesuai dengan teori menurut Silberman yaitu Galeri Belajar, " merupakan suatu cara untuk menilai dan merayakan apa yang telah peserta didik pelajari setelah rangkaian pelajaran studi" dan Machmudah " Galeri belajar merupakan suatu cara untuk menilai dan mengingat apa yang telah siswa pelajari.

A. Hambatan, cara mengatasi dan Pendukung

1. Hambatan pelaksanaan Metode Galeri Wisata pada Bahan Ajar Pembagian Jenis-jenis hukum yaitu :
   a. Pelaksanaan Metode Pembelajaran Galeri Wisata pada Bahan Ajar Pembagian Jenis-jenis hukum memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pembelajaran konvensional.
   b. Siswa memerlukan waktu untuk mencari informasi tentang materi yang dicari.
   c. Ketika siswa melakukan wisata galeri ke kelompok lain suasana kelas menjadi gaduh.
   d. Kalimat siswa ketika mengubah informasi menjadi ringkasan sesuai bahasanya sendiri masih kesulitan / bingung.
2. Cara mengatasi :
   a. Perlunya pengelolaan waktu yang lebih tepat mulai dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi, misalnya pembentukan kelompok sebelum pelaksanaan, pemberian post test dipersiapkan oleh guru lalu dibagikan dalam bentuk hand out jadi siswa tidak perlu menyalin dari slide.
   b. Siswa diminta untuk mempelajari materi yang akan didiskusikan terlebih dahulu sebagai bekal awal pengetahuan siswa.
   c. Pelaksanaan wisata galeri khususnya pada kunjungan kelompok lebih dikondusifkan agar tidak mengganggu kelas yang lain.
   d. Perlunya pendampingan siswa dalam merumuskan kalimat berdasar informasi yang diperoleh.
3. Faktor-faktor pendukung :
   a. Penerapan Metode Galeri Wisata pada Bahan Ajar Pembagian Jenis-jenis hukum mudah dipahami, mudah dilaksanakn dan menyenangkan.
   b. Siswa dalam menyelesaikan tugasnya tidak hanya sekedar membaca dan menulis tetapi siswa dituntut untuk lebih kreatif dalam mengolah dan menyajikan informasi, mandiri, kerjasama untuk membuat galeri hasil kerja.

c. Penyelesaian tugas dengan kondisi yang nyaman karena tidak hanya diatas meja (keaktifan kinestetik) sesuai keinginan siswa agar tidak jenuh.
d. Ketersediaan sumber belajar yaitu buku paket Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP / MTs kelas VII karangan Gino penerbit Yudhistira, buku paket Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP / MTs kelas VII karangan Samidi dan W. Vidyaningtyas.
e. Media pembelajaran mudah didapat
f. Media pembelajaran mudah digunakan
g. Antusiasme siswa untuk menyusun galeri hasil kerja dengan kretifitas masing-masing.
h. Adanya kerjasama wisata galeri antar kelompok meningkatkan interaksi dan mempererat persaudaraan.
i. Kompetisi muncul dari masing-masing kelompok untuk menyelesaikan tugas sebaik dan seindah mungkin serta lebih awal.

B. Alat yang digunakan

Alat dan bahan terdiri dari :

1. Kertas karton yang digunakan untuk menempel hasil kerja (Galeri)
2. Kertas lipat warna warni yang digunakan untuk mengolah dan menyajikan informasi yang diperoleh
3. Spidol untuk memberi hiasan pada galeri, baik menulis kelompok dan anggota kelompok.
4. Lem untuk menempel kartu lipat pada kertas karton
5. Solasi bolak balik untuk menempelkan galeri pada dinding.

C. Pelaksanaan

Pelaksanaan Metode Galeri Wisata pada Bahan Ajar Pembagian Jenis-jenis Hukum sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan orientasi untuk penanaman sikap menghayati ajaran agama yang dianutnya memulai pembelajaran dengan berdoa, kemudian evaluasi terhadap kebersihan kelas dan mengabsen kehadiran siswa.

2. Melakukan kegiatan untuk memotivasi siswa dan penanaman nilai nasionalisme dengan mengajak siswa menyanyikan lagu Dari Sabang sampai Merauke.
3. Melakukan kegiatan apersepsi untuk mengingat kembali materi yang lalu tentang hakikat norma hukum (lagu norma hukum) serta mengecek kesiapan siswa dalm mengikuti pembelajaran hari ini.
4. Menyampaikan Pokok bahasan tentang pembagian jenis-jenis hukum menurut bentuknya, sifatnya dan isinya serta menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah mengikuti pembelajaran pembagian jenis-jenis hukum menurut bentuknya, sifatnya dan isinya.
5. Pada Kegiatan inti penjelasan teknis untuk menarik siswa dalam pelaksanaan Metode Pembelajaran Galeri Wisata pada Materi Pembagian Jenis-jenis Hukum menurut bentuknya, isinya dan sifatnya, waktu berlakunya, tempat berlakunya, wujudnya, dan cara mempertahankannya.
6. Kegiatan selanjutnya untuk efisiensi waktu, pembentukan kelompok-kelompok oleh guru.
7. Guru mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam proses belajar yang terdiri dari kertas lipat warna warni, spidol warna warni, gunting, lem, dan kertas karton yang digunakan untuk menempel hasil kerja (Galeri).
8. Guru meminta bantuan seorang siswa untuk membagikan kertas karton, kertas warna warni, spidol secara merata untuk semua kelompok. Untuk gunting dan lem bisa secara bergantian.
9. Kegiatan selanjutnya pembagian tugas dalam kelompok secara mandiri. Pembagian tugas dengan rincian @ kelompok 4 siswa, 3 siswa mencari informasi keperpustakaan tentang topik pembagian jenis-jenis hukum menurut bentuknya, isinya dan sifatnya @ anak satu jenis hukum dengan batasan waktu (sekitar 10 menit). Sedangkan 1 siswa menyiapkan desain galeri yang akan dibuat dan yang nanti akan menunggui galeri pada saat ada kunjungan terhadap galeri milik kelompoknya.

10. Setelah 3 anak yang mencari informasi tentang hukum yang menjadi tugasnya selesai dan kembali ke kelas, siswa segera membuat ringkasan dari informasi yang diperoleh tersebut. (mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, memecahkan masalah, kemandirian, mengolah dan menyajikan informasi).
11. Ringkasan informasi yang sudah dibuat kemudian ditulis serapi mungkin dengan tulisan yang seindah mungkin pada kertas lipat warna warni (mengembangkan kreativitas siswa, nilai estetika) dengan kreasi gambar dan hiasan lain sesuai selera dengan tetap memperhatikan etika.
12. Guru sesekali berkeliling melakukan pengecekan dan senantiasa memotivasi siswa untuk menyelesaikan tugasnya pada setiap kelompok (nilai kedisiplinan) dan menegur dengan halus siswa yang tidak aktif berpartisipasi menyelesaikan tugas (nilai kerjasama, kebersamaan) sambil berkeliling guru melakukan penilaian proses dengan menggunakan pedoman observasi yang sudah dipersiapkan sebelumnya secara obyektif.
13. Hasil tulisan di kertas lipat kemudian disusun sesuai kreasi kesepakatan kelompok di kertas karton yang sudah disediakan dengan kreativitas dari masing-masing anak sesuai idenya untuk dibuat sebuah galeri pembagian jenis-jenis hukum menurut bentuk, sifat dan isinya. Hasil kerja kelompok yang berupa galeri pembagian jenis-jenis hukum kemudian ditempel didinding dekat masing-masing kelompok.
14. Guru mengecek hasil kerja masing-masing kelompok untuk mengoreksi informasi yang dicantumkan siswa pada galeri kemudian memberikan tanda paraf pada galeri sebagai tanda sudah dikoreksi guru.
15. Kegiatan selanjutnya masing-masing kelompok berkeliling mengamati galeri kelompok lainnya secara bergantian sambil diamati, dibaca kemudian membubuhkan tanda bintang pada galeri (jumlah minimal dibuat kesepakatan terlebih dahulu antara siswa dengan guru, misal minimal 3) dan menuliskan nama kelompok yang telah mengunjungi galeri (pengembangan nilai menghargai hasil karya orang lain)

16. Setelah selesai melakukan wisata galeri, siswa bersama guru melakukan klarifikasi terhadap temuan siswa saat melakukan kunjungan ke galeri kelompok lain untuk dikoreksi dan dibuat kesimpulan secara klasikal.
17. Guru melakukan kegiatan post test dengan teknik tes tertulis bentuk uraian singkat yang berupa melengkapi bagan tentang pembagian jenis-jenis hukum menurut bentuknya, isinya dan sifatnya dengan membagikan kartu soal dan langsung dikerjakan pada kartu tersebut.
18. Guru melakukan refleksi dari pelaksanaan Metode Galeri Wisata pada bahan ajar pembagian jenis-jenis hukum yang telah dilaksanakan, kemudian meminta salah satu siswa menghitung banyaknya jumlah bintang yang diperoleh masing-masing kelompok untuk menentukan urutan 1, 2 dan 3. (Penguatan untuk memotivasi siswa).
19. Guru memotivasi bagi kelompok yang jumlah bintangnya masih kurang untuk meningkatkan belajar dan kerjasama agar menjadi team work yang baik
20. Hasil evaluasi prestasi belajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaran (PKn) pada bahan ajar pembagian jenis-jenis hukum didapatkan nilai tertinggi 100, nilai terendah 78, nilai rata-rata 80,88. Sehingga dapat dilihat bahwa mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada bahan ajar pembagian jenis-jenis hukum melebihi nilai batas kelulusan.

D. Dampak

Dampak pelaksanaan Metode Galeri Wisata pada Bahan Ajar Pembagian Jenis-jenis Hukum antara lain :

1. Mengasah kemampuan berpikir kreatif siswa untuk mengolah dan menyajikan informasi yang diperoleh sesuai idenya.
2. Meningkatnya partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran
3. Siswa lebih antusias dan sangat menikmati proses pembelajaran
4. Siswa belajar tidak hanya sekedar menerima informasi yang sudah jadi, akan tetapi siswa dapat melatih kemandirian menganalisis, dan

memecahkan masalah serta jawabannya (sesuai prinsip pembelajaran *cooperative learning*)

5. Siswa belajar disiplin waktu untuk menyelesaikan tugas sesuai batas waktu yang sudah ditentukan.
6. Memunculkan kompetisi positip untuk segera menyelesaikan tugasnya
7. Meningkatkan kreatifitas siswa dalam menyusun galeri
8. Memupuk rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik.
9. Meningkatkan hasil prestasi belajar siswa.
10. Menginspirasi guru untuk mengembangkan dan mencoba metode pembelajaran baru yang lebih variatif.
11. Memotivasi guru untuk membuat dan memanfaatkan media pembelajaran agar materi tersampaikan sesuai hasil yang diharapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dalam penerapan Metode Galeri Wisata pada Bahan Ajar Pembagian Jenis-jenis hukum menurut bentuknya, sifatnya dan isinya dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Dapat meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar dengan penerapan metode Galeri Wisata pada Bahan Ajar Pembagian Jenis-jenis hukum menurut bentuknya, isinya dan sifatnya.
2. Dapat meningkatkan keberanian siswa untuk berpendapat dan berkarya karena pembelajaran yang terjadi adalah *Student Centered Learning* (SCL).
3. Dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar
4. Dapat meningkatkan prestasi hasil belajar siswa

SARAN

1. Bagi Guru

Untuk lebih meningkatkan penerapan Metode Pembelajaran yang kooperatif dan *Up to date*

2. Bagi Siswa

   Untuk lebih meningkatkan kemampuan merangkai kosakata sesuai pemahaman siswa.

DAFTAR PUSTAKA

Christine, Maylanny.2009.*Pedagogi: Strategi dan Teknik Mengajar dengan Berkesan*.PT Setia Purna : Bandung.

Dirjendikdasmen Kemdikbud.2017.*Pengembangan pembelajaran aktif*. Jakarta.

Isjoni, 2010. *Cooperative Learning.* Alfabeta : Bandung.

Laksono, P.M., 2011. *Kontekstualisasi (Pendidikan) Antropologi Indonesia*. Jurnal Komunitas, Vol.5 : 87 No 1 Maret 2011.

Marini.2012.*Efektifitas Penggunaan Metode " Gallery Walk " dalam Meningkatkan Kemampuan Siswa pada Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Al-Fatah Tarakan*. https://www.unhas.ac.id/arab/data_fl/JURNAL_Marini.docx. diakses tanggal 19 November 2017.

Rosalin, Elin. 2008.*Gagasan Merancang Pembelajaran Kontekstual*.PT Karsa Mandiri Perkasa : Bandung.

Sisdiknas. 2005. *Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003*. Citra Umbara : Bandung.

Uno, Hamzah B.2008.*Model Pembelajaran*. Bumi Aksara : Jakarta.

Suprijono, Agus. 2006. *Cooperative Learning (Teori dan Aplikasi PAIKEM).*Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

PERSEPSI SISWA SMK N 7 SURAKARTA TENTANG KEWARGANEGARAAN DIGITAL DI ERA GLOBAL DALAM PERSPEKTIF LITERASI MEDIA DIGITAL

Wendy Librata Ratna Manikam
Pascasarjana PPKn UNS, Surakarta
wendyppkn@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi siswa SMK N 7 Surakarta mengenai kewarganegaraan digital di era global dalam meliterasi media digital. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana subjek yang diteliti adalah siswa SMK N 7 Surakarta dan Guru PKn SMK N 7 Surakarta. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: 1). Pemahaman siswa SMK N 7 Surakarta mengenai media digital masih sangat rendah 2). Tingkat pemahaman siswa SMK N 7 Surakarta terhadap kewarganegaraan digital di era global dalam meliterasi media digital sangat rendah. Penulis menyarankan agar sekolah dapat mendidik generari muda (young citizen) dalam hal ini siswa untuk memberi pemahaman dan penguatan tentang literasi media digital untuk menyongsong kehidupan warga Negara digital di era global.
Kata kunci : *literasi media digital, kewarganegaraan digital di era global*.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi serta teknologi digital lainnya termasuk internet, di era globalisasi telah menjadi media baru dan sebagai instrumen penting dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai penelitian telah membuktikan betapa berpengaruhnya media baru dalam hidup bermasyarakat terutama berpengaruh pada generasi muda dalam hal ini terhadap siswa. Perubahan pola pikir yang cenderung mengumbar self disclosure di media baru terutama di sosial media, serta kecenderungan menjadi lebih konsumtif. McLuhan dengan Teori Determinisme Teknologi *"sebuah teori yang menegaskan bahwa perubahan yang terjadi dalam perkembangan teknologi sejak zaman dahulu sampai saat ini memberikan pengaruh yang besar terhadap masyarakat".* Keberadaan media baru juga sedikit banyak merubah gaya hidup siswa, dimana siswa jaman sekarang lebih pasif dalam proses komunikasi langsung dan lebih terfokus kepada informasi – informasi yang mereka akses dari media baru.

Ketergantungan siswa dalam kehidupan sehari – hari maupun di kelas sudah dalam kategori *addict* (kecanduan), kalau boleh dikatakan demikian. Dalam forum

diskusi di kelas dalam situasi proses belajar mengajar pun untuk mencari jawaban lebih sering membuka *search engine google* daripada mencari jawaban di buku-buku referensi.

Internet sebagai media digital telah menawarkan berbagai macam kemudahan seiring perkembangan jaman. Manusia modern begitu sangat dimanjakan oleh media ini. Siswa sebagai generasi muda yang terdidik seharusnya mempunyai pemahaman tentang literasi media digital khususnya untuk memahami dampak perkembangan kewarganegaraan digital di era global saat ini. Perubahan yang telah terjadi dan sedang berproses membawa mereka menjadi lebih mudah dalam mendapatkan akses terhadap informasi yang ada.

Namun sayangnya, kedekatan media digital dengan siswa yang sangat erat tersebut tidak selalu membawa dampak baik akan tetapi juga membawa dampak buruk. Informasi yang disajikan dalam internet/media digital belum tentu benar adanya. Apabila sang penerima informasi tidak melakukan *cross check* maka dapat terjadi kesalahan persepsi yang dampaknya tentu saja tidak baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat.

Observasi awal menunjukkan bahwa penggunaan media digital khusunya internet di SMK N 7 Surakarta sangat di perbolehkan untuk menunjang pembelajaran. Akan tetapi guru maupun sekolah tidak memikirkan dampak negatif akibat ketergantungan menggunakan media digital tersebut. Untuk itu siswa dalam menjawab ketergantungan terhadap media digital tentang dampak negatif dan tidak diharapkan yang mungkin akan timbul dari akibat media digital khususnya pengaruh perkembangan kewarganegaraan digital di era global maka perlu dikenalkan dengan *media literacy digital* atau melek media digital yaitu kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam banyak format dari berbagai sumber ketika itu disajikan melalui komputer. (Paul Gilster 2007, dikutip Seung-Hyun Lee, 2014). Media digital yang dimaksud dalam penelitian ini adalah media informasi yang terhubung atau terkoneksi dengan internet.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu rujukan untuk membuat suatu peraturan atau pemahaman di sekolah mengenai penggunaan media digital terutama di lingkungan sekolah. Berdasarkan fenomena seperti diatas maka

peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pemahaman siswa SMK N 7 Surakarta tentang kewarganegaraan digital di era global ditinjau dari aspek literasi media digital.

Berikut rumusan masalahnya :

Bagaimanakah tingkat pemahaman siswa SMK N 7 Surakarta tentang kewarganegaraan digital di era global khususnya dalam meliterasi media digital ?

METODE PENELITIAN

Tempat yang digunakan untuk penelitian ini yaitu di SMK N 7 Surakarta. Waktu penelitian dilaksanakan pada hari Jum'at 17 November 2017. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian ini, informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan observasi dan wawancara.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMK N 7 Surakarta pada Tahun Ajaran 2017/2018 yang berjumlah 1430 siswa. Teknik pengambilan sampel (*sampling*) yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah *Sampling Purposive*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu karena populasi terlalu banyak maka dibutuhkan sampel yang representatif dan seimbang. Peneliti memutuskan untuk memilih 1 kelas di tiap angkatan, yaitu kelas X yang diambil X BC 1, kemudian kelas XI yang diambil XI MM 1 dan untuk kelas XII yang diambil kelas XII APh1.

Peneliti dalam penelitian ini uji validitas datanya menggunakan trianggulasi sumber dan teknik. Analisis data dengan menggunakan 4 komponen yaitu ;

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Penyajian data
4. Penarikan kesimpulan/verifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Era digital telah membentuk warga negara digital dalam kehidupan sehari-hari maupun di sekolah. Dalam kehidupan di era digital, media digital adalah sebuah kebutuhan yang pokok atau primer. Seperti apa yang di katakan oleh guru PKn di SMK N 7 Surakarta yang disini sebagai informan mengatakan "*media digital sangat membantu dalam menunjang pembelajaran dan memberikan kontribusi positif dalam kehidupan sehari - hari*". Hal yang sama dikemukakan oleh Feriyansyah (2014: 3) mengemukakan bahwa "*warga negara digital yang cerdas dan baik, merupakan konsep yang ideal sebagai seorang warga negara hidup di era digital. Warga negara digital yang cerdas dan baik tercermin melalui perilaku cerdas dan baik ketika beraktifitas di masyarakat dalam jaringan (Online Community)*". Perilaku warga negara digital yang cerdas dan baik menjadi kunci utama agar seorang warga negara dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan digital. Ketika warga negara digital tidak cerdas dan tidak baik dalam beraktifitas maka akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat dalam jaringan.

Kewarganegaraan digital dapat didefinisikan sebagai norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab terkait dengan penggunaan teknologi. Komponen dalam kewarganegaraan digital khususnya dalam lingkungan belajar dan akademis dibagi menjadi 3 yaitu; 1.Akses digital ; 2. Komunikasi digital ; 3.Literasi digital. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah mengenai Literasi digital.

Dalam mengukur tingkat kemampuan literasi media, terbagi kedalam tiga kategori yaitu:

1. *Use skills*

   Use Skills merupakan kemampuan untuk mengakses dan mengoperasikan media. *Use skill* mencakup beberapa kriteria, yaitu:

   a. Kemampuan menggunakan media (*Media Skills*);
   b. Kemampuan menggunakan media secara aktif (*balanced and active use of media*);
   c. Kemampuan menggunakan dan pemanfaatan media secara tinggi (*advanced media use*);

2. *Critical understanding*

Critical understanding merupakan kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi konten media secara komperehensif. Kriteria *critical understanding* ini meliputi:

a. Kemampuan memahami konten dan fungsi media (*understanding media content and its functioning*)
b. Memiliki pengetahuan tentang media dan regulasi media (*knowledge about media and media regulation*)
c. Perilaku pengguna dalam menggunakan media (*user behavior*)

3. *Communicative Abilities*

Kemampuan komunikasi dan partisipasi melalui media. *Communicative abilities* ini mencakup kemampuan untuk membangun relasi sosial serta berpatisipasi dalam lingkungan masyarakat melalui media. Selain itu, *communicative abilities* ini juga mencakup kemampuan dalam membuat dan memproduksi konten media.

Setelah melakukan penelitian terhadap tingkat Literasi Media pada siswa maka penulis mencoba untuk menginterpretasi secara mendalam hasil penelitian sehingga pertanyaan penelitian yang diajukan pada rumusan masalah dapat terjawab.

Kelas	Program Keahlian	Populasi	Sampel
X BC 1	Produksi dan Siaran Program Televisi	36	5
XI MM 1	Multimedia	32	5
XII APh1	Akomodasi Perhotelan	27	5

Kisi-kisi *use skill* terkhusus pada penggunaan komputer dan akses internet adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan komputer/laptop;
2. Penggunaan komputer/laptop;
3. Kepemilikan akun media sosial dan *e-mail;*
4. Situs yang sering dikunjungi;
5. *Download* dan *upload*

Dari hasil observasi dan wawancara terhadap siswa dalam komponen *Use Skill* dapat diartikan bahwa mayoritas siswa memiliki tingkat kemampuan untuk

mengakses dan mengoperasikan media dalam kategori *rendah.* Bahwa mayoritas dapat menggunakan internet dalam artian mampu menggunakan internet namun belum mampu memilah isi situs. Kemudian kemampuan dalam menganalisa konten media tidak terlalu baik, dan kemampuan berkomunikasi lewat media terbatas.

Kisi-kisi *Critical understanding* terkhusus pada kemampuan pemahaman fungsi media, diantaranya :

1. Tingkat kepercayaan sumber informasi antara internet dan media massa (televisi, radio dan koran cetak);
2. Dapat membedakan situs yang berisi hal-hal baik dan tidak.
3. Pemahaman regulasi pemerintah;
4. Kemampuan menjaga privasi;
5. *Cross check* sumber berita

Lebih lanjut dalam observasi dan wawancara terhadap siswa, komponen *Critical understanding* yang dapat diartikan bahwa mayoritas siswa dalam hal kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi konten media secara komprehensif juga berada dalam kategori *rendah* .

Kisi-kisi *Communicative Abilities* terkhusus pada kemampuan komunikasi melalui media, diantaranya :

1. *Update* status di media sosial;
2. Melakukan kritik melalui media sosial;
3. *Update* berita dari internet

Kemudian dalam komponen *Communicative Abilities* hasilnya dapat diartikan bahwa mayoritas siswa dalam hal kemampuan komunikasi dan partisipasi melalui media berada dalam kategori *rendah.* Dari ketiga komponen dalam literasi media khususnya media digital siswa SMKN 7 Surakarta masih rendah.

Pernyataan tentang Faktor Pengaruh Tingkat Literasi Media Digital diantaranya adalah :

1. Pengenalan internet pertama kali;
2. Orang yang pertama kali mengenalkan internet;

3. Peraturan penggunaan internet dari orang tua;
4. Waktu akses internet;
5. Situs yang sering diakses

Dari hasil *observasi* bahwa mayoritas siswa dalam menggunakan *gadget* mendapatkan pengaruh dari lingkungan terutama lingkungan keluarga. Dimana siswa yang memiliki tingkat literasi media yang tinggi mendapatkan pengetahuan tersebut dari orang tua ataupun dari saudara. Lingkungan keluarga turut memberikan andil yang besar walaupun tidak menutup kemungkinan justru pengaruh lingkungan teman sebaya yang memberikan andil. Wawancara sekilas yang sempat dilakukan oleh peneliti menambah informasi yaitu ada beberapa siswa membeli *smartphone* keluaran terbaru agar tidak ketinggalan bergaya dengan teman yang lainnya.

Permasalahan dalam penelitian ini telah dikemukakan dalam bagian hasil penelitian di atas. Kemudian dalam hal ini ditinjau dari kewarganegaraan digital di era global ini sangat menyangkut untuk tatanan kehidupan di masa yang akan datang. Karena Kewarganegaraan digital adalah konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar. Penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar memiliki banyak implikasi, pemilihan kata yang tepat dalam berkomunikasi, tidak menyinggung pihak lain dalam update status, tidak memberikan informasi penting kepada publik, tidak membuka tautan yang mencurigakan, dan lainnya.

Oleh karena itu untuk membangun dan memberi penguatan tentang literasi media digital di era global ini, sekolah harus mendidik generari muda (young citizen) dalam hal ini siswa untuk memberi pemahaman dan penguatan tentang literasi media digital untuk menyongsong kehidupan warga Negara digital di era global.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami pendidikan kewarganegaraan (civic education) mempunyai peranan penting untuk mempersiapkan warganegara

untuk memberikan penguatan terhadap siswa untuk menjadi warganegara digital di era global saat ini. Seperti apa yang di katakan oleh salah satu guru PKn di SMK N 7 Surakarta yang disini sebagai informan mengatakan "*Dalam peraturan sekolah belum ada anjuran untuk memberi pemahan maupun penguatan tentang literasi media digital dan seolah – olah itu sebagai tugas guru PPKN saja untuk membentuk karakter siswa menjadi warga negara yang baik* (*good citizen*) *untuk menyongsong era digital*". Warganegara ideal sesuai dengan kecendrungan global menurut hasil penelitian Cogan (1999) memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut :

1. Kemampuan untuk mengenali dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global.
2. Kemampuan untuk bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggungjawab atas peran/kewajibannya dalam masyarakat.
3. Kemampuan untuk memahami, menerima dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya.
4. Kemampuan berfikir kritis dan sistematis.
5. Kemauan untuik menyelesaikan konflik dengan cara damai, tanpa kekerasan.
6. Kemauan untuk mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan.
7. Kemampuan untuk memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak asasi manusia (seperti kaum wanita, minoritas etnik,dsb).
8. Kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintahan lokal, nasional dan internasional.

Kemudian literasi media digital memiliki manfaat yang penting bagi setiap individu. bahkan dalam beberapa kasus literasi digital dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Menurut Brian Wright (2015) dalam infographics yang berjudul *Top 10 Benefits of Digital Literacy: Why You Should Care About Technology*, bahwa ada 10 manfaat penting dari adanya literasi digital yaitu menghemat waktu, belajar lebih cepat, menghemat uang, membuat lebih aman, senantiasa memperoleh informasi

terkini, selalu terhubung, membuat keputusan yang lebih baik, dapat membuat anda bekerja, membuat lebih bahagia, dan dapat mempengaruhi dunia.

Media digital turut memproduksi sebuah nilai yang dijadikan panutan dalam pergaulan sehari- hari, apabila panutan ini positif bukan suatu masalah namun apabila panutan negative akan menimbulkan masalah. Bagi guru, dapat memberikan pengetahuan mengenai kurang dan lebihnya media digital melalui pelajaran dengan melakukan diskusi dalam kelas dengan topik yang menarik dan kasus-kasus. Untuk siswa, sebagai generasi muda dan insan intelektual dapat memanfaatkan berbagai media informasi yang ada dalam internet namun tidak lupa dalam penggunaannya ada aturan tidak tertulis. Sementara orang tua pun juga harus melakukan kontrol terhadap anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian pada Bab sebelumnya maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai jawaban atas perumusan permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Tingkat *Literasi media digital* siswa SMK N 7 Surakarta berada pada kategori *rendah,* dengan rincian sebagai berikut : *use skill* berada pada kategori ***rendah***, *critical understanding* berada pada kategori ***rendah***, *communicative abilities* berada pada kategori ***rendah***. Kategori ***basic*** berarti kemampuan dalam mengoperasikan media tidak terlalu tinggi, kemampuan dalam menganalisa konten media tidak terlalu baik, dan kemampuan berkomunikasi lewat media terbatas.
2. Faktor-faktor yang paling dominan mempengaruhi tingkat literasi media digital adalah lingkungan keluarga, dimana peran orang tua sangat besar dalam memberikan pendidikan awal mengenai media digital.
3. Tidak hanya guru PPKN saja untuk mempersiapkan warganegara untuk memberikan penguatan terhadap siswa untuk menjadi warganegara digital di era global saat ini. Akan tetapi sekolah juga harus mendidik generari muda (young citizen) dalam hal ini siswa untuk memberi pemahaman dan penguatan tentang literasi media digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada sekolah SMK N7 Surakarta, yang mengijinkan saya untuk melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 1997. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta: Jakarta.

Cogan, J.J. 1999. *Developing the Civic Society: The Role of Civic Education.*CICED:, Bandung.

Feriyansyah. 2014.*Warga negara digital sebagai instrumen Menuju warga negara global (penelitian grounded theory tentang dampak kemajuan Teknologi informasi dan komunikasi terhadap praktik kewarganegaraan*. Tesis : Universitas Pendidikan Indonesia.

Ibrahim, Idi Subandy dan Akhmad, Bachruddin Ali. 2014. *Komunikasi dan Komodifikasi, Mengkaji Media dan Budaya dalam Dinamika Globalisasi*.Yayasan Pustaka Obor Indonesia : Jakarta.

Iskandar. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.Gaung Persada: Jakarta.

Lee, S.2014. *Digital Literacy Education for the Development of Digital Literacy*, http://doi.org/10.4018/ijdldc.2014070103, diakses tanggal 17 November 2017.

Nasrullah, Rulli. 2014. *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia).* Prenadamedia: Jakarta.

Nurnisya, Frizky Yulianti.2013.*Melek Media : Strategi Pencegahan Pengaruh Buruk Media Televisi pada Anak- anak*.Jurnal Komunikator, Vol. 5 No. 3, Hal 21-27.

Nurudin. 2012. *Pengantar Komunikasi Massa*.Rajawali Pers: Jakarta.

Wright, Brian.2015.*Top 10 Benefits of Digital Skills*. http://webpercent.com/top-10-benefits-of-digital-skills, diakses tanggal 17 November 2017.

Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Warga Negara Muda sebagai Warga Digital *(Digital Citizen)* di Era Global

Hani'atul Hidayah
Pascasarjana Pendidikan Kewarganegaraan UNS, Surakarta
haniatulhidayah08@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan elemen dalam pendidikan kewarganegaraan yang dapat membentuk *digital citizen* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi dua kategori, yaitu sumber bahan cetak (kepustakaan) dan sumber responden terdiri dari pendidik pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sembilan elemen kewarganegaraan digital yang dapat dikembangkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk membentuk warga digital (*digital citizenship*) yang baik. Selain itu, warga digital juga dapat dibangun melalui penguatan karakter kewarganegaraan atau *civic disposition.* Warga negara muda sebagai penerus bangsa, sebaiknya memahami dan menerapkam elemen-elemen kewarganegaraan digital sesuai dimensi PKn dalam pembelajaran dengan baik, agar dapat menjadi *digital citizen* pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di era global.

Kata kunci : *PKn,Warga Negara,* dan *Digital Citizen*

PENDAHULUAN

Perkembangan arus globalisasi pada abad ke-21 ditandai dengan kemajuan disegala bidang kehidupan manusia, salah satunya yaitu pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Kamajuan dibidang IPTEK, khususnya pada teknologi komunikasi dan informasi menjadikan dunia menjadi tanpa batas (*borderless),* yang mana arus globalisasi ini seakan telah menghilangkan batas-batas antar satu negara dengan negara lainnya.

Internet dapat berperan dalam pertukaran informasi dan ide-ide antara pemerintah dan warga negara (Kim dalam Murdiono. 2017). Internet mampu menjadi perantara dalam penyampaian aspirasi, pendapat dan kontrol kepada pemerintah, begitu juga sebaliknya. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Kalidjernih (2011:62), bahwa proses-proses global membuka ruang-ruang bagi

daerah pinggiran untuk bersuara, dan kekuasaan monolitik dan kekuasaan subjek di pusat akan terus dipertanyakan karena kompetisi di pusat. Perkembangan internet ini menandakan dibidang komunikasi dan informasi semakin maju dan mudah diakses oleh setiap orang. Pada era global yang tanpa batas ini, selain berdampak positif dalam memudahkan masuk keluarnya informasi dari satu negara ke negara lain, hal ini juga menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh suatu negara.

Informasi yang datang silih berganti memiliki dampak terhadap kehidupan warga negara di dunia. Ideologi, gaya hidup, dan keyakinan atau kepercayaan yang berkembang di suatu negara dapat mempengaruhi kebiasaan dan pola-pola kehidupan yang sudah mapan di negara lain (Murdiono. 2017). Niai-nilai luhur yang melandasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah mulai terkikis dan ditinggalkan. Terkikisnya nilai-nilai dasar ini sangat terlihat dari perilaku yang ditunjukkan generasi muda sebagai warga negara muda. Perilaku generasi muda yang cenderung mengarah pada kebiasaan yang bersifat hedonis dan komsumtif.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi, khususnya pada akses internet yang semakin mudah ini, tidak hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa saja, anak-anak sebagai generasi muda juga dapat mengakses internet dengan mudah. Anak-anak pada generasi milenial saat ini juga dapat mengakses segala sesuatu dan berinteraksi dengan orang lain melalui pergaulan dunia maya. Sifat dunia maya yang tidak mempertemukan individu-individu secara langsung dapat menyebabkan berkurangnya bahkan hilangnya norma-norma sopan santun, tanggung jawab, dan etiket dalam berkomunikasi. Maka, yang terjadi saat adalah maraknya kasus pornografi, kasus SARA, berita hoak, ujaran kebencian, dan kasus lainnya yang terjadi pada masyarat era digital sekarang ini. Masyarakat, termasuk juga generasi muda ada yang telah bijak dan tenang menanggapi masalah ini, namun ada pula yang menanggapi dengan negatif. Ini menjadi kondisi yang memprihatinkan yang melanda generasi muda saat ini, dan menjadi tantangan besar bagi negara, khususnya pada dunia pendidikan untuk mampu menyelesaikannya.Persoalan-persoalan global yang sedang melanda generasi muda yang dapat melunturkan nilai-nilai luhur bangsa perlu dihadapi dan ditemukan jalan keluarnya. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat nilai-nilai luhur bangsa pada

generasi muda yang dapat dijadikan landasan dan bekal generasi muda dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yaitu melalui jalur pendidikan khusunya pada pendidikan kewarganegaraan.

Dari uraian permasalahan di atas, penelitian ini dirumuskan untuk melakukan kajian mendalam tentang bagaimana elemen dalam pendidikan kewarganegaraan yang dapat membentuk *digital citizen* di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk menemukan elemen dalam pendidikan kewarganegaraan yang dapat membentuk *digital citizen* di Indonesia. Hasil kajian melalui penelitian ini diharapkan dapat memperkaya secara teori maupun praktis dalam mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk warga digital (*digital citizen*) yang baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang mengarah pada hakikat realitas sosial yang sebenarnya terjadi pada masyarakat. Hal ini didasarkan pada kajian mengenai pembentukan warga digital yang baik melalui pendidikan kewarganegaraan. Sumber data yang diperlukan untuk kepentingan analisis dalam penelitian terbagi menjadi dua kategori, yaitu *pertama* sumber bahan cetak (kepustakaan), meliputi buku teks, dokumen-dokumen kurikulum, jurnal, makalah, dan lainnya yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk *digital citizen. Kedua*, sumber responden terdiri dari pendidik pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk *Digital Citizen* pada Warga Negara Muda

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Kerr, mengemukakan bahwa *Citizenship or civics education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education (trough*

schooling, teaching, and learning) in that preparatory processs (Winataputra & Budimansyah, 2012: 4). Berdasarkan pendapat tersebut, maka PKn secara luas mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Sedangkan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran dan belajar, dalam proses penyiapan warga negara tersebut.

Senada dengan yang dikemukakan oleh Kerr di atas, Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia juga dikembangkan untuk membentuk generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sesuai hak dan kewajiaban yang dimilikinya sebagai warga negara. Hal ini dipaparakan dalam Standar Isi Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memfokuskan pada pembentukan warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia telah diterapkan di jenjang sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan sosial, juga mempelajari teori-teori dan perihal sosial yang ada dan berkembang dalam lingkungan masyarakat di suatu negara.

Dari kajian yang ditemukan mengenai pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan saat ini, bahwa Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya mendidik generasi muda menjadi warga negara yang cerdas pada lingkup bangsa dan negara saja, melainkan juga dalam bergaul dan berinteraksi dengan warga negara lain dalam lingkup internasional. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Herdiawanto dan Hamdayama (2010 : 2), "Generasi tersebut diharapkan mampu mengantisipasi hari depan mereka yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, dan hubungan internasional".

Perkembangan ilmu pengetahuan yang maju, terutama pada bidang teknologi informasi dan komunikasi, membawa anak untuk dapat berinteraksi dengan siapa saja tanpa batasan waktu dan ruang. Hal ini merupakan salah satu aspek dari perkembangan arus globalisasi. Perkembangan di era global ini

membawa warga negara untuk dapat memanfaatkan dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu salah satunya adalah internet dengan baik. Warga negara harus bijak dan sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat ketika berinteraksi menggunakan media ini. Yang kemudian muncullah wacana *digital citizen.*

Warga digital atau *digital citizen* menurut Norris dan Bimber (Mossberger dkk,2007:1) "*digital citizens as those who use the Internet regularly and effectively-that is, on daily basis.* Kemudian, mengenai warga digital ini juga didefinisikan oleh Mossberger dkk (2007:2), bahwa "*Digital citizens are those who use technology frequently, who use technology for politic information to fulfilltheir civic duty, and who use technology at work for economic gain".* Jadi, dapat disimpulkan baha warga digital adalah seorang warga yang dapat menggunakan teknologi internet secara teratur dan efektif, untuk mendapatkan informasi politik agar dapat memenuhi kewajiban sipil mereka, ataupun diginakan dalam bidang ekonomi untuk mencari keuntungan. Warga digital ini perlu diajarkan sebagai bekal peserta didik menjadi penerus bangsa masa depan yang semakin pesat perkembangan teknologinya.

Pendidikan Kewarganegaraan untuk membangun warga negara muda menjadi warga digital diperlukan bagi peserta didik. Generasi muda akan menghadapi tantangan dunia baru pada masa yang akan datang. Interaksi sehari-hari yang berhadapan dengan individu dari beragam etnis, jenis kelamin, bahasa, ras, dan latar belakang sosial ekonomi di seluruh dunia. Mereka akan mengalami berbagai masalah berkaitan dengan hal ini seperti kesehatan, ketidakadilan, kerusakan lingkungan, ledakan penduduk, migrasi transnasional, nasionalisme etnis, dan penurunan negara-bangsa (Murdiono, 2017:351). Oleh karena itu, perlu adanya pembentukan *digital citizen* pada generasi muda saat ini.

Berkaitan dengan hal di atas, maka Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kompetensi-kompetensi yang hendak dicapai. Kompetensi yang hendak dikembangkan oleh Pendidikan Kewarganegaraan paradigma baru adalah agar siswa mampu menjadi warga negara yang berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis untuk memiliki kompetensi seperti itu

diperlukan seperangkat pengetahuan (kognitif), ketrampilan (psikomotor), serta watak (afektif). Dalam konsep Pendidikan Kewarganegaraan disebut (1) *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), (2) *civic skills* (ketrampilan kewarganegaraan), dan (3) *civic disposition/traits* (nilai/karakter kewarganegaraan) (Yulaewati, 2004 dalam Winarno).

Untuk membangun warga digital, Pendidikan Kewarganegaraan lebih menekankan pada pengembangan peserta didik agar memiliki nilai, karakter, sikap dan kemauan melakukan interaksi dengan sesama warga negara yang mendasarkan pada prinsip-prinsip menjaga harkat dan martabat manusia (Zamroni, dalam Murdiono, 2017:351). Dalam Pendidikan Kewarganegaraan, pengembangan nilai, karakter, sikap dan kemauan ini dapat melalui komponen-komponen kewarganegaraan yaitu *civic disposition*. *Civic Dispotion* sendiri terbagi menjadi dua, yaitu karakter privat dan karakter publik. Karakter privat lebih pada karakter hubungan dengan diri sendiri, sedangkan karakter privat merupakan karakter yang diperlukan ketika berinteraksi dengan orang lain. Selain karakter privat, karakter publik ini haruslah telah ditanamkan pada peserta didik sebagai bekal mereka dalam bergaul, baik pada lingkup nasional maupun internasional,dan melalui dunia nyata maupun dunia maya (internet).

Karakter publik kewarganegaraan sendiri terdiri dari kepedulian sebagai warga negara, kesopanan,mengindahkan aturan main, berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi. Untuk itu, diperlukan seorang guru professional yang tidak hanya dapat *transfer of knowledge* saja, tetapi juga dapat *transfer of value* yakni dapat menanamkan nilai dan karakter kewarganegaraan pada peserta didik, terutama untuk menjadi warga digital.

Selain melalui pengembangan karakter publik pada komponen *civic disposition*, terdapat pula konsep dari Kewargaan digital sebagai sebuah konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar. Ribble dan Bailey (Arif dan Aulia, 2016) mengidentifikasikan sembilan elemen yang dapat membentuk kewarganegaan digital, yaitu *digital access,digital communication, digital literacy,*

digital rights and responsibilities, digital etiquette, digital security, digital health a wellness, digital law, and digital commerce.

Mengacu pada komponen-komponen yang ada pada *digital citizenship,* maka Pendidikan Kewarganegaraan dapat memasukkan komponen tersebut pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah. Sembilan elemen yang dapat membentuk kewarganegaan digital, yaitu *digital access, digital communication, digital literacy, digital rights and responsibilities, digital etiquette, digital security, digital health a wellness, digital law, and digital commerce.* Dalam proses pembelajaran Pkn Komponen kewargaan digital ini terbagi menjadi 9 komponen, yang dikategorikan menjadi 3 berdasarkan pemanfaatannya, yaitu:

1. Lingkungan belajar dan akademis

   Pembelajaran PKn tidak hanya melalui buku teks siswa yang disediakan saja. Pembelajaran PKn di sekolah pada kurikulum 2013 ini telah mengarah pada *student centered approach* yang mengharuskan siswa aktif dan kreatif dalam menggali informasi dalam pembelajaran. Pembelajaran dapat didapatkan dari berbagai sumber, termasuk dari teknologi informasi menjadi bagian dari lingkungan belajar dan akademis. Komponen-komponen yang termasuk dalam lingkungan ini yaitu, *Pertama,* Komponen Akses Digital (*digital access).* Komponen akses digital ini berarti bahwa setiap warga memiliki hak yang sama untuk mengakses teknologi informasi, tetapi hak dibatasi oleh infrastruktur maupun oleh lingkungan komunitas pengguna itu sendiri. Pembelajaran PKn setiap peserta didik diberikan kesempatan yang sama untuk mengakses materi-materi pembelajaran pkn melalui internet. Hal ini dimaksudkan sebagai sumber belajar tambahan selain buku teks. *Kedua,* Komponen komunikasi digital (*digital communication)* bahwa dalam setiap aspek kehidupan semua warga memerlukan komunikasi dengan warga lainnya untuk dapat bertukar informasi dan ide. Perkembangan teknologi pada saat ini, telah mengubah cara berkomunikasi seseorang tidak hanya melalui pertemuan langsung saja, tetapi dapat menggunakan komunikasi digital. Komunikasi digital ini memiliki banyak sekali bentuk, seperti *e-mail, sms, chatting, facebook, twitter, forum* dan berbagai bentuk lainnya. Dalam pembelajaran PKn kini, pemberian tugas

sebagai bahan evaluasi dan pengumpulannya melalui komunikasi media komunikasi *whatsapp, facebook* dan lainnya. *Ketiga,* Literasi digital (*digital literacy)* yang merupakan proses belajar mengajar mengenai teknologi dan pemanfaatan teknologi. Bagaimana menggunakan teknologi dengan baik dan cerdas, tanpa melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat. Dalam pembelajaran PKn literasi digital dapat dilakukan dengan mencari buku-buku sebagai bahan literatur pembelajaran PKn di sekolah.

2. Lingkungan sekolah dan tingkah laku

   Lingkungan sekolah dan tingkah laku terdiri dari, *Pertama,* Hak digital (*digital rights and responsibilities).* Setiap warga yang menggunakan teknologi memiliki perlindungan hak di dunia digital, setiap warga memiliki hak atas privasi, kebebasan berpendapat, berkespresi, berkumpul dalam forum tertentu dan lainnya. Maka, dalam pelaksanaannya untuk menjamin hak warga lain, terdapat kewajiban yang ahrus dipenuhi, bahwa setiap warga harus menggunakan teknologi dengan benar dan mengikuti tata karma yang berlaku. Dalam pembelajaran PKn peserta didik dapat dilatih untuk memahami hak-hak apa saja yang dimiliki oleh individu, agar tidak mengganggu hak orang lain, melalui materi tentang HAM dan Hak dan kewajiban warga Negara. *Kedua*, Etiket digital (*digital etiquette*. Etiket digital bertujuan untuk menjaga kenyamanan pengguna lainnya, tidak mengganggu dan menyinggung perasaan warga lainnya. Untuk itu, setiap warga harus bertanggung jawab dalam pemanfaatan teknologi. Dalam pembelajaran PKn terdapat nilai-nilai sebagai standar dalam kehidupan di masyarakat yang dihadapkan ada teknologi digital, seperti saling menghargai dan menghormati antar masyarakat. *Ketiga*, Keamanan digital *(digital security).* Keamanan digital berarti setiap warga yang mengakses informasi dan berkomunikasi menggunakan teknologi ini data aman dari gangguan atau perilaku yang tidak sesuai dari warga lainnya.

3. Kehidupan siswa di luar lingkungan sekolah

   Kehidupan siswa di luar lingkungan sekolah terdiri dari, *Pertama* Hukum digital *(digital law).* Hukum digital ini berisi aturan atau norma mengenai penggunaan teknologi dalam masyarakat. Bahwa ketika melanggar terdapat

sanksi dan hukuman sesuai hukum yang berlaku. Pembelajaran PKn juga menekankan pengetahuan pada peserta didik mengenai hukum yang ada di Indonesia, khusunya mengenai teknologi informasi. *Kedua,* Transaksi digital (*digital commerce).* Menuntut pembelajaran Pkn untuk mengakomordir atau menyesuaikan perubahan kegiatan ekonomi di suatu Negara dengan perkembangan teknologi dan informasi, yang mana kegiatan ekonomi tidak hanya dilakukan secara langsung melalui pertemuan penjual dan pembeli, melainkan dapat dilakukan dengan media internet. *Ketiga,* Kesehatan digital *(digital health a wellness),* Warga Negara dilatih untuk mengenali pengaruh penggunaan teknologi pada kesehatan dan kebugaran tubuh.

Kesembilan elemen kewargaan digital tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

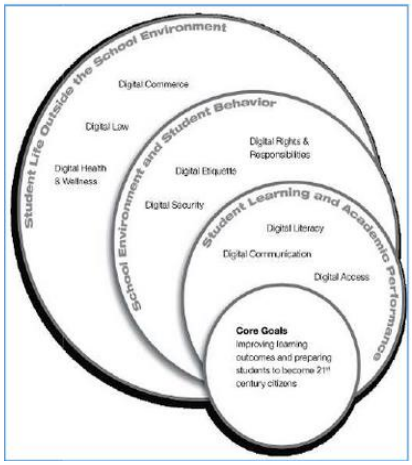

Gambar 1. Lingkungan *Digital Citizen* pada siswa

Pembelajaran PKn melalui pengembangan sembilan elemen kewarganegaraan digital ini dapat diterapkan di sekolah, dan disesuaikan dengan perkembangan peserta didik yang ada di sekolah. Peserta didik harus memiliki kesiapan dalam menghadapi arus globalisasi terutama pada bidang teknologi informasi dengan baik dan bijak, sehingga tidak melunturkan nilai-nilai luhur bangsa, dan sesuai dengan norma-norma yang terdapat dapal kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

KESIMPULAN

Perkembangan era digital pada generasi muda yang ditandai dengan pesatnya penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan mendorong negara untuk mampu mengembangkan pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai luhur yang dapat diterapkan pada PKn di sekolah. Kompetensi-kompetensi utama yang diperlukan warga negara muda dalam rangka menghadapi dan menjalani era digital. Pendidikan kewarganegaraan dapat mengembangkan elemen/komponen kewargaan digital untuk membentuk warga digital (*digital citizen*). Salah satunya melalui penguatan karakter kewarganegaraan atau *civic disposition.* Selain itu terdapat elemen-elemen kewargaan digital yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, yaitu komponen akses digital, komponen komunikasi digital, literasi digital, hak digital, etiket digital, keamanan digital, hukum digital, transaksi digital, dan kesehatan digital. Warga negara muda sebagai penerus bangsa, sebaiknya memahami dan menerapkam elemen-elemen kewarganegaraan digital sesuai dimensi PKn dalam pembelajaran dengan baik, agar dapat menjadi *digital citizen* pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Arif, Dikdik Baehaqi dan Syifa SITI Aulia. 2016. *Kewargaan Digital, Penguatan Wawasan Global Warga Negara, dan Peran PPKN*. Seminar Nasional, Kongres dan Deklarasi AP3KnI

Herdiawanto, Heri dan Jumanta Hamdayama. 2010. *Cerdas, Kritis dan Aktif Berwarganegara*. Jakarta : Penerbit Erlangga

Kalidjernih, Freddy K. 2011. *Puspa Ragam Konsep dan Isu Kewarganegaraan Edisi Ketiga.* Jakarta : Widya Aksara Press

Mossberger, Karen dkk. 2007. *Digital Citizenship : The Internet, Society, and Paarticipation.* Cambridge *:* The MIT Press

Murdiono, Mukhamad. 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Wawasan Global Warga Negara Muda* . Cakrawala Pendidikan, Vol. XXXIII, No.3, Hal. 349-357

Samsuri. (2011). *Model Pembelajaran PKn untuk Membangun Kompetensi Warga Negara.* Makalah disajikan pada kajian Mandiri Kewarganegaraan di Program Studi PIPS Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Semester Genap 2008/2009

Sugiyono.2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R& D).* Bandung : Alfabeta

Ubaedillah, A dkk. 2010. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani (Edisi Ketiga).* Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Wahab, Abdul Aziz, dan Sapriya. 2011. *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan.* Bandung : Alfabeta

Winarno.(2013). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan :Isi, strategi dan Penilaian.* Jakarta: Bumi Aksara

Winataputra & Budimansyah. (2012). PKn dalam Perspektif Internasional (Konteks, Teori, dan Profil Pembelajaran). Bandung: Widya Aksara Pers

MENYIAPKAN GENERASI MUDA MENJADI WARGA NEGARA DIGITAL (DIGITAL CITIZENSHIP) YANG CERDAS DAN BAIK MELALUI MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Galih Puji Mulyoto[1], Yoga Ardian Feriandi[2]
[1]STKIP PGRI Ngawi
[2]Universitas PGRI Madiun
newiota22@gmail.com

ABSTRAK

Era digital telah membentuk warga negara digital yang dalam kehidupan sehari-hari terbiasa menggunakan internet sebagai sebuah kebutuhan. Pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu mata pelajaran disekolah yang dirancang untuk menyiapkan warga negara muda berkaitan dengan peran dan tanggungjawabnya, agar kelak ketika dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mencoba memberikan gagasan mengenai bagaimana menyiapkan generasi muda menjadi warganegara digital yang cerdas dan baik dalam menyosong demokrasi digital melalui pendidikan kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka/library research. Hasil analisis menunjukkan bahwa menyiapkan generasi muda menjadi warganegara digital yang cerdas dan baik diperlukan peran aktif guru dalam mengemas pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berdasarkan 4 komponen dasar, pertama: pengetahuan warganegara dan pemerintah, kedua: Keterampilan kognitif warganegara yang demokratis (cognitive skills), ketiga: Keterampilan partisipatori warganegara yang demokratis, keempat: Kebaikan dan disposisi warganegara demokratis.

Kata kunci : *generasi muda, warganegara digital, pendidikan kewarganegaraan.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi termasuk internet, di era globalisasi telah menjadi media baru dan sebagai instrumen penting dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya penting penggunanan Internet khususnya pada kalangan muda di Indonesia menjadi perhatian serius semua kalangan untuk mencegah penyalahgunaan media internet. Apalagi terdapat data yang mengatakan bahwa pengguna internet di Indonesia rata-rata berasal dari kalangan anak-anak dan remaja dan diprediksi akan mencapai 30 juta. (Aditya Panji. http://tekno.kompas.com/read/2014/02/19/1623250-/Hasil-Survei-Pemakaian-Internet-Remaja-Indonesia. di akses pada tanggal 20 Juni 2015). Sementara itu, penelitian yang dilakukan UNICEF tahun 2012, menunjukkan bahwa remaja di Indonesia beresiko terdampak pornografi anak, berbicara dengan orang asing dan

bertemu, perdagangan, pembajakan perangkat lunak, paparan konten ekstrimis, dan *cyber-bullying*. (Gerrit Beger, et. al., 2012: 4).

Melihat hasil penelitian diatas, dimana perkembangan internet, bisa membawa dampak positif maupun negatif. Salah satunya yaitu dapat membentuk kelompok dan komunitas dilingkungan dunia maya (online). Hal ini telah menjadikan perubahan dan transformasi dalam konsep kewarganegaraan yang terkait dengan demokrasi seperti yang di ungkapkan oleh Mossberger, Tolbert and McNeal, 2008: 1; Fackson Banda, 2014:7; Kuzu, Odabasi, & Gunuc, 2013:302, sepakat menyatakan bahwasanya dengan adanya kemajuan teknologi partisipasi masyarakat yang merupakan intisari dari proses demokrasi juga berubah. Dari hal yang paling sederhana misalnya cara penyampaian pendapat, di era kemajuan teknologi menjadi lebih simpel dengan bantuan *sosial media* dll tidak harus secara langsung, bisa juga melalui pengajuan petisi online (*www.change.org)* dan melalui media masa.

Perubahan tersebut mampu meningkatkan kompetensi kewarganegaraan untuk membantu warga dalam menganalisis laporan/masalah sosial dan mendorong partisipasi yang lebih besar pada berita masyarakat di antara lembaga media. Dalam hal ini jelas bahwa media menjadi semakin penting untuk partisipasi warga. Khususnya terjadi dalam situasi negara berkembang, media dapat membantu warga memainkan peran mereka dalam meningkatkan pengalaman demokratis. Itulah mengapa Media adalah bagian penting dari demokrasi. Berkaitan dengan media Mc Combs dan Donald Shaw (dalam Griffin, 2003: 390-391) percaya bahwa media massa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi agenda publik Dengan kata lain, media memiliki kemampuan untuk menyusun isu-isu bagi masyarakat yang pada akhirnya, penyusunan agenda media membentuk gambaran isu yang penting dalam pikiran masyarakat, sehingga muncul warga negara digital dalam masyarakat.

Dalam pandangan pentingnya demokrasi pada generasi muda, menurut Bahmuller & John J. Patrick (1999) mengatakan, untuk mengembangkan dan mempertahankan demokrasi, sekolah harus mendidik generasi muda (*young citizen*) memahami dan mempraktikkan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini sejalan dengan

upaya menyiapkan warga negara digital untuk mengembangkan demokrasi di sekolah. Warga digital harus memiliki keterampilan yang luas, pengetahuan, Internet dan akses teknologi dan sekolah harus membimbing siswa untuk menjadi warga negara digital. Oleh karena itu, sekolah adalah salah satu lingkungan yang paling tepat yang memungkinkan memberikan latihan warga digital dan meningkatkan kesadaran siswa tentang teknologi (Kuzu, Odabasi, & Gunuc, 2013:302). Lebih lanjut Ribble (2007) menyatakan bahwa guru harus memberikan siswa pemahaman penggunaan teknologi yang tepat melalui kegiatan peningkatan kesadaran. Dengan demikian, penting bagi siswa untuk belajar tindakan yang tepat dan ketika mereka menggunakan teknologi yang berbeda.

Mengapa hal ini perlu menyiapkan warga negara digital melaui sekolah? Menjawab pertanyaan ini adalah tentu harus melihat kenyataan yang berkembang di masyarakat. Dimana jaringan sosial seperti Twitter, Facebook dan lain-lain membantu perubahan yang paling penting dalam kehidupan warga digital. Dalam hal ini, penggunaan jaringan sosial juga penting dalam hal warga negara digital sebagai konsep-konsep seperti yang diciptakan oleh jaringan sosial sebagai "partisipasi" dan "berbagi" memainkan peran penting dalam membantu individu mendapatkan kualifikasi yang dibutuhkan oleh warga negara digital.

Di Negara-negara lain, misalnya di Selandia Baru menerapkan pendekatan baru yaitu melalui progam *cybersafety* di sekolah. Progam ini mengandalkan guru dan administrator mencegah akses konten tertentu. Fokus *cybersafety* untuk memperluas luar kebijakan dan prosedur untuk memasukkan diskusi, aksi, dan saat mendidik di kelas. (www.mylgp.org.nz., diakses pada tanggal 2 Juni 2015). Menengok penerapan progam yang diterakpan di Selandia Baru, hal ini tentu perlu diterapkan melalui pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam hal ini tentu beban tidak hanya pada mata pelajaran Teknologi dan Informasi saja, namun terdapat peran Pendidikan Kewarganegaraan didalamnya. Hal ini tidak lepas dikarenakan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang bertugas menyiapkan generasi muda untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik.

Sementara itu, para ahli seperti J. Cogan, (1999:4), David Kerr, (1999:2), dan Branson, (1998) sependapat bahwa Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu

mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda berkaitan dengan peran dan tanggung jawabnya, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakat. Dari pengertian tersebut, tentu ini menjadi dasar bagaimana peran pendidikan kewarganegaraan dalam membantu menyiapkan generasi muda. Sehingga tujuan pendidikan kewarganegaraan dalam mewujudkan warga negara yang cerdas dan baik dapat tercapai.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, sebagai berikut : Bagaimana Konsep warganegara digital (*digital citizenship*) untuk generasi muda? Bagaimana pendidikan kewarganegaraan mampu membantu menyiapkan generasi muda menjadi warga negara digital yang cerdas dan baik dalam menyongsong demokrasi digital di era global?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan termasuk ke dalam jenis penelitian deksriktif kualitatif, yaitu dengan menggunakan metode penelitian pustaka/*library research*. Sebelum melakukan penelitian, dilakukan pembatasan melalui kategorisasi yang dipilih secara jelas dan menghindari perbedaan pandangan dengan peneliti lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka/*library research* untuk mendapatkan makna yang terdapat dalam isi berita pada media massa, media online maupun buku mengenai Konsep warganegara digital (digital citizenship) untuk generasi muda dan pendidikan kewarganegaraan mampu membantu menyiapkan generasi muda menjadi warga negara digital yang cerdas dan baik dalam menyongsong demokrasi digital di era global.

Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama empat bulan yaitu mulai bulan November 2015 sampai dengan bulan Februari 2016.

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah isi berita pada media massa, media online maupun buku. Objek dalam penelitian ini adalah mengenai Konsep warganegara

digital (digital citizenship) untuk generasi muda dan pendidikan kewarganegaraan mampu membantu menyiapkan generasi muda menjadi warga negara digital yang cerdas dan baik dalam menyongsong demokrasi digital di era global.

Prosedur

Tahap tahap dalam melakukan analisis isi (Bulaeng, 2004: 172) sebagai berikut: merumuskan pertanyaan penelitian atau hipotesis, mendefenisikan populasi yang diteliti, memilih sampel yang sesuai dari populasi, memilih dan menetukan unit analisis, menyusun kategori-kategori isi yang dianalisis, membuat sistem hitungan, melatih para pengkode dan melakukan studi percobaan, mengkode isi menurut defdenisi yang telah ditentukan, menganalsis data yang sudah dikumpulkan, dan menarik kesimpulan-kesimpulan dan mencari indikasi.

Data, Intrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi. Langkah yang dilakukan adalah mendokumentasikan segala yang diperlukan dalam proses penelitian, mulai pemilihan berita baik dari media masa maupun media online serta dari buku-buku terkait Konsep warganegara digital (digital citizenship) untuk generasi muda dan pendidikan kewarganegaraan mampu membantu menyiapkan generasi muda menjadi warga negara digital yang cerdas dan baik dalam menyongsong demokrasi digital di era global di Indonesia. Langkah selanjutnya adalah pemilahan berbagai sumber yang dikumpulkan serta dilanjutkan dengan pengkodean. Langkah terakhhir adalah melakukan analisis serta menarik kesimpulan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis isi dilakukan pertama-tama mengorganisasikanm data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya menjadi kesimpulan dari hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Warga Negara Digital (*Digital Citizenship*)

Era digital telah membentuk warga negara digital yang dalam kehidupan sehari-hari terbiasa menggunakan internet sebagai sebuah kebutuhan. Istilah warga negara digital telah digunakan oleh Karen Mossberger, Caroline J. Tolbert dan Ramona S. Mcneal dalam bukunya yang berjudul *Digital Citisenship : The Internet, Society, and Participation.* Warga negara digital didefinisikan *(Digital Citizens)* adalah mereka yang sering menggunakan teknologi, yang menggunakan teknologi untuk informasi politik untuk memenuhi tugas kewarganegaraan mereka, dan siapa yang menggunakan teknologi di tempat kerja untuk keuntungan ekonomi (Mossberger, Karen. Dan Tolbert, Caroline J. et.al. 2008). Sedangkan menurut Feriyansyah, (2014: 3). Warga negara digital adalah mereka yang terbiasa menggunakan teknologi (TIK), untuk mendapatkan informasi politik demi memenuhi kewajiban sebagai warga negara serta mereka yang menggunakan teknologi dalam pekerjaanya untuk tujuan ekonomi.

Lebih lanjut, Feriyansyah (2014: 3) mengemukakan bahwa warga negara digital yang cerdas dan baik merupakan konsep yang ideal sebagai seorang warga negara hidup di era digital. Warga negara digital yang cerdas dan baik tercermin melalui perilaku cerdas dan baik ketika beraktifitas di masyarakat dalam jaringan (*Online Community*). Perilaku warga negara digital yang cerdas dan baik menjadi kunci utama agar seorang warga negara dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan digital. Ketika warga negara digital tidak cerdas dan tidak baik dalam beraktifitas maka akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat dalam jaringan.

Sementara di Indonesia penggunaan media sosial (twwiter, facebook dan lain-lain) menduduki peringkat ke dua terbesar di dunia. Apalagi akhir-akhir ini kejahatan melalui media sosial meningkat. Lebih lanjut, Mitja Hafner Fink, Tanja Oblak Črnič, 2014 menjelaskan Menjadi warga negara yang aktif saat ini tidak terbatas pada bentuk partisipasi tradisional (offline), namun juga harus mencakup - secara teoritis dan empiris tentang partisipasi online aktif: saat ini, kebanyakan aktor politik dan lembaga politik 'hidup' secara online di situs web mereka,

Facebook (profil FB dan pengaturan digital lainnya.Namun, tidak semua bentuk penggunaan yang dimediasi secara digital harus aktif: menjadi 'online aktif' berarti lebih dari sekedar menjelajah situs web atau situs jaringan sosial..

Sedangkan, risiko utama yang dihadapi oleh remaja Indonesia dan secara online pemuda pornografi anak, berbicara dengan dan bertemu orang asing, perdagangan, pembajakan perangkat lunak, dan paparan konten ekstrimis. Oleh karen itu, perlunya kerjasama Pemerintah dan sektor swasta secara aktif terlibat dalam mempromosikan ICT pengembangan dan pemantauan keamanan online. Digital Kewarganegaraan adalah konsep yang membantu guru, pemimpin teknologi dan orang tua untuk memahami apa yang siswa/orang-orang muda/pengguna teknologi tentang apa yang mereka gunakan. *Digital Citizenship* adalah lebih dari sekedar alat ajaran, cara untuk mempersiapkan siswa/pengguna teknologi untuk menjadi generasi digital (www.ciconline.org/DigitalCitizenship).

Jika melihat penerapan kewarganegaraan digital di negara Selandia Baru mendefinisikan seorang warga negara digital adalah :

1) Pengguna percaya diri dan mampu ICT
2) Menggunakan teknologi untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan, budaya, dan ekonomi
3) Menggunakan dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis di dunia maya
4) Melek dalam bahasa, simbol, dan teks dari teknologi digital
5) Menyadari tantangan ICT dan dapat mengelola secara efektif
6) Menggunakan TIK untuk berhubungan dengan orang lain di positif, cara yang bermakna
7) Menunjukkan kejujuran dan integritas dan perilaku etis dalam penggunaan TIK
8) Menghormati konsep privasi dan kebebasan berbicara di dunia digital
9) Memberikan kontribusi dan secara aktif mempromosikan nilai-nilai kewarganegaraan digital
10) Melek digital atau kemampuan untuk memahami dan berpartisipasi penuh dalam dunia digital mendasar untuk kewarganegaraan digital (www.mylgp.org.nz).

Ini adalah kombinasi dari keterampilan teknis dan sosial yang memungkinkan seseorang untuk menjadi sukses dan aman di era informasi. Ribble and Bailey (2007) mengungkapkan ada sembilan komponen yang menonjol berkaitan dengan warga negara digital, antara lain:

These strategies included the electronic standards regarding execution and related procedures (etiquette), exchange of information on electronic basis (communication), the teaching and learning process related to technology and technology use (literacy), electronic participation in social issues (access), buying and selling in the electronic environment (commerce), responsibility for all actions taken in the electronic environment (responsibility), rights valid for everybody in the digital world (law), health in the world of digital technology (health) and taking electronic precautions to assure security (security).

Mengapa media sangat penting untuk pendidikan kewarganegaraan. D'Agostino, Maria J. (2006: 2) mengemukakan partisipasi warganegara adalah hal fundamental dalam tata pemerintahan yang demokratis. Masalah sudah ditujukan di dalam partisipasi warganegara dalam banyak cara, termasuk di dalamnya pemakaian teknologi untuk melibatkan warganegara dalam proses pengambilan keputusan.

Prospek Demokrasi Digital

Masyarakat di Amerika menjadi digital dengan lincah. Dunia analog memudar dan digantikan oleh dunia digital yang di didalamnya terdapat fungsi telepon, jaringan-jaringan komputer, dan televisi-televisi yang jumlahnya kian hari bertambah. Tentu saja peralatan-peralatan tersebut akan terus digunakan terutama untuk tujuan non-politik. Jajak pendapat di Amerika yang hasilnya dipublikasikan pada bulan Juni 1999 memperlihatkan bahwa publik memandang keberadaan televisi masih sebagai sarana hiburan. Namun kemudian memang datang tuntutan perubahan dari masyarakat agar televisi lebih merepresentasikan kepentingan publik. Dengan televisi dan radio sebagai media yang tersebar luas, dan dengan peran mereka yang menonjol dalam menginformasikan publik dalam keadaan yang baik maupun buruk, maka dampak potensialnya pada perbaikan perilaku dalam kehidupan politik tidak dapat diremehkan .

Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi tidak semata berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur fisik yang memadai walaupun tak dapat disangkal bahwa infrastruktur tersebutlah yang menjadi salah satu prasyarat keberhasilan. Hal yang paling penting sebenarnya berkaitan dengan kemampuan teknologi untuk menjembatani jarak dan memperluas akses sehingga informasi tersedia dan dapat dimanfaatkan siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Menurut Leggewie dan Bieber, kebebasan memperoleh atau memberikan informasi secara efektif lebih penting daripada potensi mendapatkan akses dalam proses politik digital (Siska Sasmita, 2011: 159-160).

Dari pendapat tersebut tersirat bahwa keberadaan teknologi informasi dan komunikasi sebenarnya merupakan perantara lintas batas dalam menyajikan dan mengakses informasi bagi publik. Poin pentingnya terletak pada kemampuan publik untuk memanfaatkan informasi yang tersedia bagi pembentukan opini mereka terhadap masalah-masalah publik yang kemudian akan memengaruhi pembentukan kebijakan publik. Keberadaan media dan teknologi dinilai sebagai pembaharuan atas "demokrasi langsung ala Athena." Demokrasi Athena memerlukan suatu komitmen umum terhadap prinsip kebijakan kewarganegaraan: pengabdian kepada negara kota republik dan ketundukan kehidupan pribadi terhadap masalah-masalah publik dan kebaikan bersama. Ranah publik dan privat terjalin berkelindan digital (Siska Sasmita, 2011: 164).

Rakyat (*demos*) terlibat dalam fungsi-fungsi legislatif dan pengadilan, sebab konsep kewarganegaraan Athen menuntut keikutsertaan mereka dalam fungsi-fungsi ini, dengan berpartisipasi langsung dalam masalahmasalah negara. Jika dikaitkan dengan keberadaan teknologi informasi dan komunikasi maka perwujudan konsep kewarganegaaran sebagaimana yang dipersyaratkan demokrasi langsung ala Athena tampaknya akan tercipta dengan lebih baik. Melalui media teknologi yang tersedia warga negara akan dengan sangat mudah terlibat dan melibatkan diri dalam segala aspek yang menyangkut perikehidupan bersama.

Generasi Muda

Peranan generasi muda dalam perjalanan suatu bangsa adalah sangat penting, peranan yang sangat menonjol terutama dalam hal menentukan estafet

kepemimpinan. Apabila Generasi Muda memiliki kualitas yang memadai maka hampir dipastikan bahwa tidak sulit menemukan figur pemimpin yang diperlukan pada saat dibutuhkan. Untuk itu telah dinyatakan dalam GBHN 1999-2004 sebagai berikut: mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat dan minat dengan memberikan kesempatan dan mengorganisasikan dirinya secara lebih bebas dan merdeka sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertaqwa, berahlak mulia, patriotis, demokratis, mandiri dan tanggap terhadap aspirasi rakyat (Marcelino Sumolang, 2013: 4-5).

Berdasarkan rumusan di atas, telah menunjukkan seberapa penting potensi generasi muda dalam upaya mengembangkan, memajukan bangsa didalam perjalanan, terutama dalam menentukan arah pembangunan bangsa ini di masa yang akan datang. Generasi muda sekarang ini menjadi bahan pembicaraan oleh semua kalangan masyarakat, karena generasi muda adalah generasi penerus bangsa yang nantinya sebagai pemegang nasib bangsa ini, maka generasi mudalah yang menentukan semua apa yang dicita-citakan bangsa dan Negara ini. Kata ”generasi” sebagaimana sering diungkapkan dengan istilah "angkatan "seperti; angkatan 66, angkatan 45, dan lain sebagainya. Pengertian generasi menurut Sartono Kartadiharjo: "ditinjau dari dimensi waktu, semua yang ada pada lokasi sosial itu dapat dipandang sebagai generasi, sedangkan menurut Auguste Comte (Pelopor sosiologi modern): "generasi adalah jangka waktu kehidupan sosial manusia yang didasarkan pada dorongan keterikatan pada pokok-pokok pikiran yang asasi".

Media Baru Sebagai Sumber Kekuatan Demokrasi

Teknologi komunikasi informasi atau teknologi komunikasi yang di dalamnya terkait pengelolaan dan penyebaran informasi merupakan sistem komunikasi yang banyak ditunjang komputer. Sebagaimana dikemukakan oleh ahli komunikasi Tubbs dan Moss (2000:225), bahwa, "teknologi baru dalam komunikasi dapat dianggap sebagai perluasan media yang lebih interaktif dan menuju pada tatanan global". Secara klise posisi teknologi komunikasi mampu

menghilangkan batas geografis dan kultural dalam bisnis maupun politik (Eko Harry Susanto , http://journal.tarumanagara.ac.id/-index-php/kidFik/article/viewFile/1246/1283).

Cepatnya arus kemajuan teknologi komunikasi, terutama media komunikasi modern dan mediua baru, yang mampu mencapai sasarannya dalam waktu relatif singkat dan lebih interaktif, banyak dimanfaatkan untuk melakukan gerakan politik anak muda, khususnya yang memiliki kesadaran tentang pentingnya tanggungjawab negara dan pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Namun kondisi masyarakat pasca reformasi, ternyata tidak sepenuhnya menghendaki kebebasan informasi sebagaimana dilakukan oleh media baru yang didukung oleh internet. Teknologi informasi harus diatur pemanfaatannya agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Menurut Rogers (1986:7), bahwa "sifat utama teknologi komunikasi baru mengandung implikasi untuk melakukan riset komunikasi tentang interaktivitas dari media baru, sifat media baru yang individualistis membuat media baru tersebut hampir – hampir tidak mungkin dapat distandarkan". Setiap individu dapat menerima informasi yang sangat berbeda dari suatu sistem komunikasi yang interaktif

Generasi muda, sebagai penerus cita – cita reformasi politik dan kenegaraan yang telah menghasilkan kebebasan, hendaknya memahami hakikat kebebasan dalam penggunaan media baru. Sebab, ada kecenderungan generasi muda dan remaja tidak menghiraukan norma dalam interaksi komunikasi dalam wilayah publik Padahal komunikasi yang menggunakan media baru, meskipun fleksibel namun tetap harus tunduk kepada UU N0.14/2008 dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronika. UU KIP menjamin transparansi dan demokratisasi informasi yang mendukung terbentuknya kesejahteraan masyarakat informasi. Sedangkan UU No.11/2008, mengatur tentang penggunaan teknologi komunikasi Generasi muda dan remaja yang setiap saat berinteraksi dengan media baru, wajib mengetahui UU ITE. Sebab, tanpa memahami dengan sungguh – sungguh, dikahawtirkan dalam menyuarakan kebebasan justru terjebak melakukan kesalahan. UU No.11/2008.

Bahkan dari 54 pasal yang ada didalamnya, terdsapat Pasal tentang "Perbuatan yang Dilarang" merupakan aturan terbanyak, karena mencapai 11 pasal, dengan 24 butir ketentuan yang harus menjadi perhatian bagi mereka yang menggunakan internet.

Diantara ketentuan yang berpotensi menyeret pengguna internet dalam ranah hukum, antara lain terdapat dalam pasal 27 ayat (2), Setiap orang dengan senagaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik. Selain itu, muatan perjudian, pencemaran nama baik dan pemerasan atau pengancaman juga dilarang. Ketentuan yang seringkali juga tidak dihiraukan, antara lain terdapat dalam menyangkut pasal 28 ayat (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronika. Pasal 28 ayat (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Pasal 29, Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut – nakuti yang ditujukan secara pribadi

Ketentuan tersebut, seringkali secara tidak sadar diabaikan oleh para pengguna, khususnya generasi muda dalam menggunakan media baru yang didukung jaringan internet. Padahal, masih ada, 21 (duapuluh satu) butir aturan lain yang mengikat yang berpotensi para pengguna internet berurusan dengan aparat penegak hukum. Sebagaimana diketahui, bahwa jaringan internet yang terbuka sebagaimana dalam laman facebook, twitter dan media online lainnya, sifatnya sangat terbuka. Dalam arti mudah diakses oleh orang lain, karena itu, dalam penggunaannya untuk mengkritik atau menyuarakan tuntutan demokrasi, hendaknya diperhatikan juga norma dan peraturan yang berlaku. Jangan sampai komunikasi publik yang dilakukan berujung pada tuntutan hukum, karena bertentangan dengan peraturan yang terdapat dalam UU ITE. Sebab, ada kecenderungan, generasi muda mengusung jargon demokrasi di media online ataupun media baru, semata – mata didasarkan kepada aspek yang emosional dan

tidak berdasar. Padahal, mengingat ruang yang digunakan adalah milik publik, maka harus hati – hati dalam menyampaikan pendapat di media baru. Banyak kasus yang terjadi sampai ke ranah hukum, akibat pernyataan yang tersebar di media baru berbasis jaringan internet

Generasi muda mestinya menyadari, bahwa kebebasan komunikasi yang diperoleh adalah kerja keras generasi muda sebelumnya, yang berjuang melawan pemerintahan tertutup, anti kritik dan melembagakan kerahasiaan demi untuk kelanggengan kekuasaan. Jadi, jangan sampai perjuangan generasi muda dan mahasiswa menjadi sia – sia, ketika kebebasan itu sendiri ditafsirkan sesuai dengan kepentingan kelompok. Akibatnya muncul konflik yang berbahaya bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia (Eko Harry Susanto , http://journal.tarumanagara.ac.id/-index-php/kidFik/article/viewFile/1246/1283).

Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam menyiapkan generasi muda menjadi warganegara digital di era Demokrasi digital

Bila diperhatikan indikator demokrasi yang dikemukakan terakhir dapat dilihat bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu syarat sistem pemerintahan demokrasi. Pendapat itu sangat beralasan karena sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Jefferson, penulis Declaration of Independence dan presiden Amerika Serikat ketiga, bahwa pengetahuan, ketrampilan *(skills*) dan perilaku warganegara yang demokratis tidak muncul secara alamiah, tetapi harus diajarkan secara sadar melalui sekolah kepada setiap generasi (Cogan,1999). Sejalan dengan pendapat Jefferson tersebut Michael Kammen mengemukakan, demokrasi tidak bisa dianggap sebagai mesin yang dapat berjalan dengan sendirinya. Oleh karena itu untuk membangun dan mempertahankan lembaga demokrasi, sekolah harus mendidik generari muda (*young citizen*) prinsip-prinsip dan praktik demokrasi (Bahmuller & Patrick, 1999).

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat dipahami pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) mempunyai peranan penting untuk mempersiapkan warganegara untuk mendukung dan mengembangkan sistem

politik yang demokratis. Warganegara ideal sesuai dengan kecendrungan global menurut hasil penelitian Cogan (1999) memiliki beberapa karakteristik sbb:

1. Kemampuan untuk mengenali dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global.
2. Kemampuan untuk bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggungjawab atas peran/kewajibannya dalam masyarakat.
3. Kemampuan untuk memahami, menerima dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya.
4. Kemampuan berfikir kritis dan sistematis
5. Kemauan untuik menyelesaikan konflik dengan cara damai, tanpa kekerasan
6. Kemauan untuk mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan
7. Kemampuan untuk memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak asasi manusia (seperti kaum wanita, minoritas etnik,dsb)
8. Kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintahan lokal, nasional dan internasional.

Persoalan selanjutnya adalah bagaimana konsep pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) yang efektif untuk mempersiapkan warganegara yang demokratis tersebut? John J. Patrick mengemukakan konsep-konsep substantif demokrasi sebagai fondasi pendidikan kewarganegaraan mencakup hal-hal berikut (Bahmuller & Patrick, 1999) : 1) Demokrasi (minimal), 2) Konstitusionalisme, 3) Hak-hak warganegara, 4) Kewarganegaraan, 5) Civil Society, 6) Ekonomi Pasar, 7) Ketegangan yang berkelanjutan dalam demokrasi konstitusional (liberal).

Lebih lanjut Patrick mengemukakan pendidikan efektif untuk mempersiapkan warganegara demokratis mencakup 4 komponen dasar sbb:

1. Pengetahuan kewarganegaraan dan pemerintahan demokrasi. Melalui komponen pertama ini diajarkan konsep-konsep dan implementasi demokrasi yang mencakup konsep demokrasi Pendidikan Kewarganegaraan (minimal), konstitusionalisme, hak-hak warganegara, kewarganegaraan, *civil society* (masyarakat madani) dan ekonomi pasar,

2. Keterampilan kognitif warganegara yang demokratis (*cognitive skills*) yang ditujukan agar dapat memberdayakan warganegara supaya memiliki kemampuan mengidentifikasikan, mendiskripsikan, menjelaskan informasi dan gagasan-gagasan yang berkaitan dengan masalah publik dan menentukan dan mempertahankan keputusan tentang masalah-masalah tersebut.
3. Keterampilan partisipatori warganegara yang demokratis dimaksudkan untuk dapat memberdayakan warganegara agar mampu mempengaruhi kebijakan dan keputusan publik dan memiliki tanggungjawab terhadap wakil-wakilnya di pemerintahan. Kombinasi keterampilan kognitif dan keterampilan partisipastori dapat dijadikan sarana bagi warganegara berpartisipasi secara efektif untuk memajukan kepentingan umum dan personal serta mempertahankan hakhak mereka. Pengembangan keterampilan kognitif dan partisipatori membutuhkan agar siswa belajar secara intelektual di dalam maupun diluar kelas.

Kebaikan dan disposisi warganegara demokratis yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan dan disposisi terhadap demokrasi. Komponen ini menunjukkan sifat atau karakter yang diperlukan untuk mendukung dan mengembangkan demokrasi.

Hasil penelitian menjelaskan temuan penelitian, yang memuat data-data yang diperoleh selama penelitian, yang dilakukan baik melalui observasi, wawancara, studi dokumen maupun berbagai buku pustaka. Pembahasan menjelaskan hasil temuan yang di analisis dengan teori-teori maupun kajian pustaka yang telah disusun. Sajian hasil penelitian dapat diperjelas dengan dilengkapi tabel/gambar. Urutan nomor tabel dan gambar menggunakan angka.

KESIMPULAN

Demokrasi telah bergeser kearah era digital, dimana juga dipengaruhi perubahan pada aktifnya masyarakat beralih kedalam dunia digital. Hal ini tentu mendorong perhatian cepatnya informasi serta partisipasi lebih aktif ketika berada didunia digital. Menyiapkan generasi muda agar bijaksana dan bertanggungjawab dalam menggunakan media internet melalui pesan-pesan moral adalah sebagai salah satu jalan pembentukkan warganegara digital yang baik dan cerdas. Untuk itu dalam mengajarkan membentuk digital citizenship

melalui pendidikan kewarganegaraan, seorang guru harus memasukan empat komponen yakni pengetahuan warganegara dan pemerintah, Keterampilan kognitif warganegara yang demokratis (cognitive skills), Keterampilan partisipatori warganegara yang demokratis, dan Kebaikan dan disposisi warganegara demokratis.

Misalnya guru dapat mengajak siswa untuk bersama-sama menggunakan media internet dengan mempertimbangkan manfaatnya bagi diri sendiri maupun masyarakat (Cognitive skills). Hal tersebut bisa berupa kritikan dan saran terhadap jalanya pemerintahan, atau isu-isu tentang penyalah gunaan internet di kalangan masyarakat (Hoax, penyebaran berita sara, penyebaran konten negatif dll). Dari situ maka selanjutnya guru mengajak siswa untuk belajar mengatasi permasalahan yang muncul dengan menggunakan media internet secara benar. Dalam hal ini guru mengajari siswa bagaimana cara menyampaikan pendapat kritikan dan saran maupun petisi dengan menggunakan internet tanpa menyakiti hati orang lain atau melanggar peraturan, misalnya dengan cara membuat petisi di situs change.org. Dengan paham demokrasi yang di anut bangsa indonesia maka masyarakat bisa menyampaikan segala pendapatnya terkait jalanya pemerintahan di Indonesia, namun tentunya harus dipahami bahwa kebebasan menyampaikan kritik/pendapat tersebut perlu didasari pengetahuan yang cukup sehingga tidak melanggar hak-hak dari individu lainya. Dengan demikian konsep digital citizenship yang ingin di bangun oleh PPKN hendak mendidik warganegara agar dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dalam memperkuat pilar-pilar demokrasi yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya Panji. http://tekno.kompas.com/read/2014/02/19/162-3250-/Hasil-Survei-Pemakaian-Internet-Remaja-Indonesia. di akses pada tanggal 20 Juni 2015.

Bahmuller & John J. Patrick (1999). Principles and practices of education for demokratic citizenship : Internationalprespective and projects. ERIC.

Banda, Fackson. (2014). Civic Education for Media Professionals: A Training Manual. *UNESCO Series on Journalism Education*.

Branson, Margaret S. (1998). The *Role of Civic Education: A Forthcoming Education Policy Task Force Position Paper from the Communitarian Network*. Washington, DC: Center for Civic Education.

Cogan, J.J. (1999). *Developing the Civic Society: The Role of Civic Education*. Bandung: CICED.

D'Agostin, Maria J. (2006). *Social Capital: Lessons from a Service-Learning Program*. http://whatworksforhealth.wisc.edu/resources/D%27Agostino2006.pdf.

Davis, V. (2007). *Digital citizenship.* Retrieved May 20, 2012, from http://digicitizenship.wikispaces.com/.

Feriariansyah.http://studikewarganegaraan.blogspot.com/2013/11/digitalcitizens.html. diakses pada tanggal 23 Mei 2015.

Feriyansyah. 2014.Warga negara digital sebagai instrumen Menuju warga negara global (penelitian *grounded theory* tentang dampak kemajuan Teknologi informasi dan komunikasi terhadap praktik kewarganegaraan. *Tesis.* Universitas Pendidikan Indonesia.

Gerrit Beger, et. al., (2012). *Indonesian Youth Online An Exploratory Study of the Indonesian Digital Landscape*. UNICEF New York, Division of Communication, Social and Civic Media Section.

Griffin EM. (2003). *A Fisrst Look At Communication Theory, The McGraw*- Hill Company, Inc.

Hafner, Mitja Fink. Tanja Oblak Črnič. (2014). Digital Citizenship As Multiple Political Participation? Predictors Of Digital Political Participation In Slovenia. *TEORIJA IN PRAKSA*. let. 51, 6/2014.

Isman, Aytekin. (2014). Digital Citizenship. TOJET*: The Turkish Online Journal of Educational Technology*. January 2014. volume 13 issue 1.

Kerr, David. (1999). *Citizenship Education: An International Comparison*. England: National Foundation for Educational Research-NFER.

Kuzu, A., Odabasi, F., & Gunuc, S. (2013). Evaluation of a Social Network Activity within the Scope of the Digital Citizenship. *World Journal on Educational Technology. 5(*2), 301-309.

Mossberger, K., Tolbert, C.J., & McNeal, R.S. (2008). *Digital citizenship: The internet, society, and participation. London*: The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

Ribble, Mike and Gerald Bailey. (2004). Digital Citizenship. *Learning & Leading with Technology*. Volume 32 Number 1.

Ribble, Mike and Gerald Bailey. (2007). *Digital Citizenship in School.* ISTE ® (International Society for Technology in Education). iste@iste.org, www.iste.org.

Sasmita, Siska (2011). Demokrasi dalam Bingkal Digital. *Demokrasi vol. X no. 2 th. 2011.*

Sumolang, Marcelino. (2013). Peranan Internet Terhadap Generasi Muda Di Desa Tounelet Kecamatan Langowan Barat. *Journal* Volume II. No. 4. Tahun 2013.

Susanto, Eko Harry. (2012). Media Baru , Kebebasan Informasi dan Demokrasi di Kalangan Generasi Muda. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta. *journal.tarumanagara.ac.id/index.php/kidFik/article/view/1246/1283.*

www.ciconline.org/DigitalCitizenship. diakses pada tanggal 20 Juni 2015.

www.mylgp.org.nz.di akses pada tanggal 2 Juni 2015.

www.mylgp.org.nz diakses pada tanggal 2 Juni 2015.

PEMBENTUKAN WARGA NEGARA YANG BERINTEGRITAS UNTUK MEMBENTUK PERILAKU ANTI KORUPSI

Muhamad Saleh,Yayuk Hidayah
Universitas Halu Oleo, Kendari
Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
salehmuhamad431@gmail.com
yayukhidayah@upi.edu

Gaung anti korupsi di Indonesia semakin nyaring seriring dengan banyaknya "kasus" korupsi yang terungkap di Indonesia. Berbagai instrument tindakan "pencegahan" tengah ramai di galakan, mulai dari upaya pencegahan, penindakan, dan edukasi. Bagaimana tidak, korupsi menjadi "musuh" bersama, ketika korupsi menjadi semacam tantangan dalam kehidupan berbangsa. Tidak hanya masalah penegakan hukum, masalah-masalah lainpun muncul dari korupsi ini, mulai dari terhambatnya pembangunan, masalah akuntabilitas, penyediaan layanan publik, dan mengikis integrasi nasional. Makalah ini mengkaji pembentukan warganegara yang berintegrasi untuk membentuk prilaku anti korupsi. Pembahasan dalam makalah ini sistematis dengan menggunakan teori yang relevan. Peran warga Negara dalam melakukan upaya pencegahan tindak korupsi, tidak dapat di negasikan. Tentu bukan dalam hal penindakan karena itu merupakan ranah penegak hukum. Warga Negara yang berintegrasi di harapkan dapat menjadi solusi dalam ranah pencegahan, karena Warga Negara yang berintegrasi akan dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.Dengan adanya sikap integrasi Warga Negara dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam pencegahan tidak korupsi, karena melalui inilah sikap antikorupsi secara perlahan akan meng-afmosfir sehingga dapat menghidupkan kesadaran, kehendak untuk menghidupkan lembaga yang berdasarkan pada nailai dan norma bangsa Indonesia.

Kata kunci: *warganegara, berintegrasi, anti korupsi*

PENDAHULUAN

Korupsi, masih menjadi topik yang hangat untuk di bicarakan di Indonesia. Korupsi di Indonesia telah menjadi Syndrom dan mencedarai demokrasi di Indonesia. Fenomena korupsi di Indonesia mancapai stadium mengkhawatirkan, karena korupsi subur hampir di setiap birokrasi pemerintahan. Prosesnya pun sistematis, oleh perorangan maupun berkelompok. Agar tercapai tujuan pembangunan nasional, maka mau tidak mau korupsi harus diberantas. Terdapat sector-sektor yang "rawan" terhadap korupsi, berdasarkana laporan tahunan KPK 2016, setidakanya ada tiga, yaitu pendidikan,kesehatan,perizinan. Sebagai gambaran misalnya sektor pendidikan yang dialokasikan 20% dari APBN (sekitar Rp428 triliun), sektor kesehatan, yang dialokasikan 5% dari APBN (sekitar Rp106 triliun). (Laporan Tahunan KPK 2016 Hlm 29). . Dari data, kasus korupsi dunia

pendidikan 2006-2015 terdapat kurang dari 400 kasus dengan kerugian negara Rp1,3 triliun. Di bidang kesehatan 2001- 2013, terdapat 100-an kasus korupsi dengan kerugian negara Rp594 miliar. Kasus lain yang cukup fenomenal adalah Gayus Tambunan, seorang PNS dengan golongan 3A, memiliki gaji 12 juta, melakukan menggelapkan pajak sekitar Rp. 25 miliar. Lalu korupsi pengadaan sapi dan mesin jahit oleh mantan Menteri Sosial periode 2004-2009 dan lain sebagainya.

Banyaknya kasus korupsi yang menjerat aparatur Negara memerlukan suatu tindakan hukum yang tegas. Namun demikian, Undang-Undang No 31/1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi juncto UU No 20/2001 tentang Perubahan atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi landasan pencegahan mengalami perubahan mendasar. Perubahan pertama terjadi pada 24 Juli 2006 ketika Mahkamah Konstitusi melalui putusan No 003/PUU-IV/2006 menyatakan norma Penjelasan Pasal 22 Ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bertentangan dengan konstitusi sehingga menjadi norma formil. Perubahan kedua terjadi pada 25 Januari 2017, kembali MK melalui putusannya No 25/PUU-XIV/2016 menyatakan, frasa kata "dapat" dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan konstitusi sehingga "tidak mengikatnya" kata "dapat" menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor menjadi delik materiil. Ada ragam pendapat tentang perubahan ini, ada yang menganggap maju sebgai wujud konsekuen penegakan hukum dan ada yang menganggap mundur karena "mempersempit" ruang bagi hakim untuk menggali dan menemukan. (Amir Syamsudin, Putusan MK dalam Penegakan Hukum Korupsi". Harian Kompas edisi 2 Februari 2017, di halaman 6)

Indonesia, Negara besar dan kaya memiliki keragaman budaya dengan tingkat heterogenitasnya tinggi. Keragaman ini selain di pengaruhi oleh banyaknya etnis juga adanya perluasan agama-agama besar di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode dalam makalah ini menggunakan metode *study literature*, yaitu memaparkan teori-teori yang berhubungan dengan judul makalah yang di peroleh dari dari berbagai sumber, jurnal, buku dokumentasi, internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. **Sikap Integrasi Warga Negara**

Sikap integrasi Warga Negara dapat menjadi kekuatan dalam pencegahan tindak korupsi, karena melalui inilah sikap antikorupsi secara perlahan meng-afmosfir, sehingga dapat menghidupkan kesadaran, kehendak untuk menghidupkan lembaga yang berdasarkan pada nailai dan norma bangsa Indonesia. Integrasi berasal dari kata sifat integer, yang berarti "utuh", "tidak bercacat", "tidak retak", "tidak gempil", "bulat padu" (Soedarno,P. 1992: 38). Dalam KBBI integrasi di artikan sebagai:

> integrasi/in·teg·ra·si/ n adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.
> -- bangsa Pola penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan suatu identitas nasional;
> -- horizontal pembauran dengan pihak atau badan yang sederajat;
> -- kebudayaan Antar penyesuaian antara unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat;
> -- kelompok Antar penyesuaian perbedaan tingkah laku warga suatu kelompok bersangkutan;
> -- vertikal pembaruan dengan pihak atau badan yang berada di atas (lebih tinggi);
> -- wilayah Pola pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat atas unit-unit atau wilayah politik yang lebih kecil yang mungkin beranggotakan kelompok budaya atau sosial tertentu;

Sementara itu, Hendropuspito (1989:65)

> integrasi diartikan sebagai pernyataan secara terencana dari bagian bagian yang berbeda menjadi satu kesatuan yang serasi. Kata integrasi berkaitan erat dengan terbentuknya suatu bangsa, karena suatu bangsa terdiri dari berbagai unsur seperti suku/etnis, ras, tradisi, kepercayaan dan sebagainya, yang beranekaragam

Di sisi lain, *United Nations Research Institute For Social Development* membedakan konsep integrasi dalam sosial. Yaitu, pertama tujuan inklusi, yang

menyiratkan kesempatan dan hak yang sama untuk semua manusia yang menyiratkan peningkatan kesempatan hidup, integrasi yang meningkat memiliki konotasi negatif, membayangkan citra yang tidak diinginkan pengenaan keseragaman. Kedua, istilah integrasi tidak selalu berarti positif atau keadaan negatif, ini hanyalah sebuah cara untuk menggambarkan pola hubungan manusia yang telah mapan di masyarakat tertentu (1994:3)

Integrasi integrasi merupakan sikap keserasian dalam masyarakat dalam suatu sistem, dalam memahami integrasi, di perlukan pengaplikasian dalam bentuk sikap. Sikap yang merupakan kecenderungan seseorang dalam bersifat dalam lingkungannya.

"Sikap adalah suatu organisasi yang tetap dari proses motivasi , emosi, persepsi, atau pengamatan atas suatu aspek dari kehidupan". (D.Krech Dan RS Crutchfiled dalam abu ahmadi, 1990:163) .

Dengan memperhatikan latar belakang perbedaan etnis, religi bangsa Indonesia perlu di bangun sikap berintegritas, karena persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan kehidupan yang serasi, perbedaan yang ada tidak menjadi masalah dan pembangunan tidak terganggu. berkaitan dengan korupsi, maka sikap berintegrasi yang di bangun merupakan berintegrasi untuk membentuk prilaku anti korupsi. Peran warga Negara dalam melakukan upaya pencegahan tindak korupsi, tidak dapat di negasikan. Tentu bukan dalam hal penindakan karena itu merupakan ranah penegak hukum. Warga Negara yang berintegrasi di harapkan dapat menjadi solusi dalam ranah pencegahan, karena Warga Negara yang berintegrasi akan dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikap integrasi untuk mrmbrntuk sikap anti korupsi adalah

Hal-hal dasar dari seperti meningkatkan keimanan dan ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,, membina hubungan yang terbuka, saling menghargai, peduli, saling membimbing, meliliki keasadaran pentingnya harga diri, kemampuan untuk menahan diri sehingga mampu mengendalikan diri pada akhirnya dapat

menumbuhkan sikap anti korupsi dalam domain terkecil yaitu tidak ada keinginan untuk korupsi. Lalu selanjutnya penananman kejujuran sejak dini yang merupakan hal yang penting karena, bila kejujuran ditanamkan secara dini, bukan tidak mungkin akan mendapatkan pejabat-pejabat pemerintahan yang jujur. Lalu kedisiplinan, Bila seseorang disiplin maka perilaku korupsi tidak ada padanya. Selanjutnya adalah kesadaran mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maka tidak akan egois tentang kepentingan pribadinya, jika prilaku ini ada maka bukan tidak mungkin kesejahteraan masyarakat pun terjamin.

B. **Integritas Untuk Membentuk Prilaku Anti Korupsi**

Warga Negara yang berintegrasi akan dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam buku Anti korupsi modul pendidikan dan golongan I/II dan golongan III. 2014:55 dijelaskan bahwa konsep integrasi dalam memberantas korupsi di tejemahkan dalam konsep manusia sebagai kunci perubahan. "Faktor manusia sebagai kunci perubahan mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia dipandang sebagai pembenahan permasalahan akhlak/moral. Konsep manusia sebagai faktor kunci keberhasilan bukan berarti menafikan faktor lainnya, apalagi jika memperhatikan korupsi yang sudah menjadi kejahatan yang luarbiasa, maka perlu dilakukan pemberantasan secara terintegrasi. Dengan demikian, pembenahan akhlak/moral berarti membangun integritas individu dan budaya anti korupsi serta membangun sistem yang berintegritas". Dalam buku tersebut juga di gambarkan konsep tunas integritas dengan melakukan penyelarasan pada semua elemen manusia (jiwa, pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan) dengan nurani (standar kebaikan universal), sehingga terbentuk perilaku integritas yang selaras pula dengan berbagai situasi dan lingkungan (sistem dan budaya integritas). (2014:56)

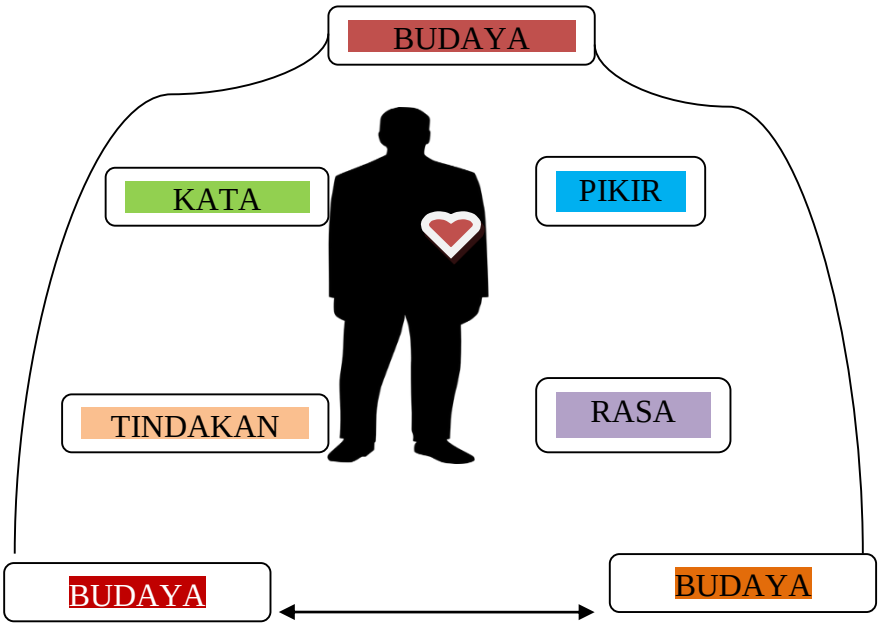

Gambar 1: Integrasi tunas 2014:55

Pengaplikasian nilai-nilai anti korupsi yang terintegritas dalam diri individu berupa kejujuran, tanggung jawab dan disipilin di harapkan akan membnagun lembaga yang bercikal anti korupsi "pembenahan akhlak/moral berarti membangun integritas individu dan budaya anti korupsi serta membangun sistem yang berintegritas. (Tim Penulis Komisi PemberantasanKorupsi. 2014:45).

jujur, disiplin, tanggung jawab

Gambar 2:
nilai-nilai anti korupsi
(Nadri Taja. 2016:45)

Kejujuran

Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegakan integritas diri seseorang. Seseorang dituntut untuk bisa berkata jujur dan

transparan serta tidak berdusta baik terhadap diri sendiri maupun orang lain (Nadri Taja. 2016:45). Jujur sebagai nilai-nilai anti korupsi merupakan yang paling utama, karena tanpa kejujuran tidak akan ada kepercayaan.

Tanggung jawab

Tanggung jawab dalam nilai-nilai anti korupsi bmerupakan cikal dari konsistensi seseorang dalam menyelesaikan tugas dengan lebih baik dan benar. Jika seseorang melaksanakan tugasnya dengan baik, maka anak mendapatkan kepercayaan dari berbagi pihak. Tanggung jawab dapat menumbiuhkan kesadaran unuk berbuat baik " Pribadi yang utuh dan mengenal diri dengan baik akan menyadari bahwa keberadaan dirinya di muka bumi adalah untuk melakukan perbuatan baik demi kemaslahatan sesama manusia" . (Nadri Taja. 2016:45).

Disiplin

Disiplin merupakan kemampuan mengatur waktu, kepatuhan terhadap aturan."Disiplin adalah kunci keberhasilan semua orang, ketekunan, dan konsisten untuk terus mengembangkan potensi diri membuat seseorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya". (Nadri Taja. 2016:45). Dalam hal anti korupsi, disiplin dapat menumbuhkan kepercayaan yang akan memperkokoh kepercayaan seseorang terhadap individu.

KESIMPULAN

Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa, pembentukan warga negara yang berintegritas untuk membentuk perilaku anti korupsi adalah dengan mengintegraiskan rasa tanggung jawab, disiplin dan jujur. Penyelarasan elemen manusia dengan nurani sehingga terbentuk perilaku integritas yang selaras dengan lingkungan lembaga akan dapat menumbuhkan nilai-nilai antu korupsi. Warga Negara yang berintegrasi di harapkan dapat menjadi solusi dalam ranah pencegahan, karena Warga Negara yang berintegrasi akan dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya sikap integrasi Warga Negara dapat menjadi kekuatan dalam pencegahan tidak

korupsi, karena melalui inilah sikap antikorupsi secara perlahan akan dapat menghidupkan kesadaran, kehendak untuk menghidupkan lembaga yang berdasarkan pada nailai dan norma bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abu. Ahmadi H. (1991). *Psikologi Sosial*. Rineka Cipta

Amir Syamsudin**.** Artikel "*Putusan MK dalam Penegakan Hukum Korupsi*". 2 Februari 2017. Harian Kompas, halaman 6. http://nasional.kompas.com/read/2017/02/02/20153701/putusan.mk.dalam.penegakan.hukum.korupsi diakses pada 14 Oktober 2017 Pukul 19:02

Hendropuspito. 1989. *Sosiologi Semantik*. Kanisius: Yogyakarta.

https://kbbi.web.id/integrasi diakses pada 14 November 2017 Pukul 20:56

Nadri Taja. 2016. *Mengintegrasikan Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Atas*. Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. XIII, No. 1, Juni 2016

Soedarno, P. (1992). *Ilmu Sosial Dasar*, Buku Panduan Mahasiswa, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Yogyakarta.

Tim Penulis Komisi PemberantasanKorupsi. 2014. *Anti korupsi modul pendidikan dan golongan I/II dan golongan III*. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta

Tim Penyusun Laporan Tahunan Kpk 2016. 266 Hal+Xviii. 2017. *Laporan Tahun 2016 Kpk* . Komisi Pemberantasan Korupsi 2017. Jakarta

United Nations Research Institute For Social Development. 1994. *Social Integration: Approaches and Issues*. UNRISD Briefing Paper No. 1 World Summit for Social Development. Geneva

PENGUATAN KEWARGANEGARAAN EKOLOGIS MELALUI PEMBELAJARAN PKN BERBASIS *ECOLITERACY DAN PROJECT CITIZEN*

Mariyani
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
mariyani573@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena kerusakan lingkungan menjadi salah satu isu global setiap negara. Hal itu memberikan gambaran bahwa masih kurangnya perhatian setiap warga negara dunia untuk memberikan ruang lebih untuk membahas permasalahan tersebut. Green Peace sebagai salah satu organisasi dunia yang fokus terhadap isu lingkungan mengemukakan bahwa hampir semua negara mengalami permasalahan lingkungan yang sama seperti *illegal logging*, kerusakan perairan, polusi udara, pengelolaan limbah yang tidak ramah lingkungan bahkan dampak nuklir terhadap lingkungan. Oleh karena itu upaya penguatan membentuk kewarganegaraan ekologis sangatlah penting untuk diaktualisasikan oleh berbagai pihak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah melalui penyelenggaraan pendidikan berbasis lingkungan hidup yang di aktualisasikan melalui pembelajaran di kelas. PKn merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat bersinergis untuk mencapai tujuan penguatan kewarganegaraan ekologis melalui pengembangan tiga kompetensi warga negara yang baik. Pembelajaran PKn berbasis *ecoliteracy* dapat diupayakan oleh guru dengan mengemas pembelajaran yang mampu menumbuhkan kesadaran, pengetahuan serta membuat pola perilaku terhadap peserta didik di kelas untuk peduli dan tanggap terhadap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan. Salah satu kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dapat dikembangkan melalui gagasan *ecoliteracy* ialah di kelas IX pada KD. 3.6 Mengkreasikan konsep cintah tanah air/bela negara dalam konteks NKRI, dan 4.6 Mengorganisasikan kegiatan lingkungan yang mencerminkan konsep cinta tanah air dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pencapaian tujuan penguatan kewarganegaraan ekologis harus di perkuat dengan melibatkan siswa dalam pengalaman nyata melalui model pembelajaran *project citizen*. Metode yang digunakan dalam tulisan ini ialah *library research* (tinjauan pustaka). Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penguatan kewarganegraan ekologis melalui pembelajaran PKn berbasis *ecoliteracy* dan *project citizen.*

Kata kunci: *Penguatan kewarganegaraan ekologis, PKn berbasis ecoliteracy, dan project citizen*

PENDAHULUAN

Pada abad 21 saat ini semua warga negara dituntut untuk menjadi warga negara multidimensional yang berarti warga negara yang memiliki karakteristik yang tidak hanya *good citizen* dan *smart citizen* tetapi juga melek diberbagai bidang. Hal ini diperkuat oleh Cogan & Derricott (1998: 2-3) bahwa warga negara saat ini haruslah memiliki karakteristik multidimensional yang memiliki ciri

memiliki jati diri; kebebasan untuk memperoleh hak-hak tertentu; pemenuhan terkait kewajiban-kewajiban; minat dan keterlibatan dalam urusan publik; dan kepemilikan nilai-nilai dasar kemasyarakatan. Konsep ini menunjukkan bahwa warga negara yang diharapkan salah satunya ialah keterlibatan dalam urusan publik terutama dalam berbagai isu global yang menjadi permasalahan semua negara di dunia.

Salah satu isu global yang saat ini semakin tampak terlihat ialah isu kerusakan lingkungan. Green Peace sebagai salah satu organisasi dunia yang fokus terhadap isu lingkungan mengemukakan bahwa hampir semua negara mengalami permasalahan lingkungan yang sama seperti *illegal logging*, kerusakan perairan, polusi udara, pengelolaan limbah yang tidak ramah lingkungan bahkan isu nuklir dan dampaknya. Secara khusus isu kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini di Indonesia meliputi pembakaran hutan, pembalakan liar, pencemaran limbah dan sebagainya. Warga negara yang multidimensional haruslah mampu terlibat dalam meminimalisir kasus-kasus kerusakan lingkungan. Hal ini di perkuat oleh UU No 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup (UUPLH) Pasal 5 ayat (3) menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan. Hak tersebut diatur secara jelas agar warga negara mampu berperan bijak terhadap lingkungan. Walaupun secara hukum diatur akan tetapi kesadaran akan pelestarian lingkungan masih sangat minim.

Upaya pembentukan warga negara yang peduli akan lingkungan umumnya dikenal dengan istilah kewarganegaraan ekologis. Kewarganegaraan ekologis yang dimaksud ialah gagasan baru yang di upayakan untuk membentuk kesadaran warga negara dalam membentuk manusia seutuhnya dalam keterlibatan menjaga pelestarian lingkungan hidup (Deane Curtin dalam Isin dan Turner, 2002: 297). Hal ini mengingat bahwa kerusakan lingkungan terjadi karena kurangnya kesadaran dan perilaku warga negara yang tidak bijak terhadap lingkungannya. Prasetiyo (2011: 175) mengemukakan bahwa penyebab utama kerusakan lingkungan ialah kurangnya kesadaran warga negara dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Selain dari kurangnya kesadaran juga disebabkan oleh perilaku warga negara yang salah terhadap lingkungan.

Oleh karena itu salah satu komponen penting dalam konsep kewarganegaraan ekologis ialah melek ekologi (*ecoliteracy*) atau pemahaman berpikir dan pembiasaan untuk belajar peduli lingkungan. Untuk mencapai pembentukan kewarganegaraan ekologis tersebut haruslah dilakukan oleh semua komponen baik pemerintah, persekolahan bahkan keterlibatan masyarakat. Salah satu komponen yang akan dibahas dalam artikel ini ialah melalui persekolahan yang melibatkan proses pembelajaran salah satunya mata pelajaran PKn. Peran pembelajaran sangatlah efektif dalam mencapai tujuan pembentukan kewarganegaraan ekologis dengan melibatkan langsung siswa sehingga mampu menghayati dan mengamalkan perannya sebagai warga negara ekologis. Pentingnya PKn dalam mengkolaborasikan *ecoliteracy* di dalam pembelajaran dikarenakan materi pembelajaran PKn masih cenderung sedikit dalam upaya penguatan kewarganegaraan ekologis. Adapun beberapa kajian yang akan dibahas dalam tulisan ini ialah meliputi 1) konsep ekologi kewarganegaraan dan urgensinya; 2) konsep PKn, gagasan *ecoliteracy* dan *project citizen*; 3) penguatan kewarganegaraan ekologis melalui pembelajaran PKn berbasis *ecoliteracy dan project citizen.*

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian tinjauan pustaka (*library research*) yang bersumber baik dari jurnal maupun buku yang terkait mengenai penguatan kewarganegaraan ekologis melalui pembelajaran PKn berbasis *ecoliteracy* dan *project citizen*. Beberapa referensi akan menjadi sumber gagasan utama dalam penulisan artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kewarganegaraan Ekologis (*Ecological Citizenship*) Dan Urgensinya

Kewarganegaraan ekologis hakikatnya ialah pembentukan warga negara yang memiliki karakteristik motivasi yang baik, kepercayaan diri, kesadaran akan

nilai-nilai, kebijaksanaan praktis dan kemampuan untuk menempatkan kewarganegaraan seseorang yang melek ekologi ke dalam tindakan. Kewarganegaraan ekologis juga dimaknai sebagai pemahaman tentang isu-isu ekologi, hak-hak, tanggung jawab warga negara dalam isu lingkungan hidup dan tindakan yang dilakukan tidak hanya mengatasi masalah lingkungan tetapi juga untuk mempromosikan interaksi manusia yang positif dan berkelanjutan dengan lingkungan sekitar (Berkowitz dkk, 2005: 227; Clarke & Agyeman, 2011: 1775; Latta, 2007: 18; Gabrielson & Cawley, 2010: 605; Gebbels, Evans, & Delany, 2011: 13). Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pentingnya upaya bersama baik melalui pemerintah, persekolahan maupun masyarakat haruslah mengefektifkan upaya dalam pembentukan kewarganegaraan ekologis. Kewarganegaraaan ekologis (*ecological citizenship*) ialah pemikiran ataupun ide yang berkaitan erat dengan tata cara etika dan moral warga negara terhadap lingkungannya secara bertanggungjawab mampu bijaksana dalam menjaga, mengelola dan melestarikan lingkungan.

Oleh karena, itu penting pemahaman mengenai konsep kewarganegaraan ekologis. Kewarganegaraan ekologis melibatkan pemberberdayaan warga negara untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan tujuan mereka sehubungan dengan lingkungan serta mampu bertindak sesuai pengetahuannya tentang konsekuensi yang akan terjadi (Berkowitz, et. al., 2005: 228). Kewarganegaraan ekologis bertujuan untuk mempromosikan secara global untuk membentuk warga negara yang melek lingkungan, mampu bertindak secara bertanggung jawab terhadap perilaku yang mampu menunjukkan respon positif terhadap berprilaku dan berinteraksi dengan lingkungan dengan baik.

Untuk mencapai tujuan pembentukan kewarganegaraan ekologis maka harusnya ada keserasian dalam memaknai konsep melek ekologi dan kewarganegaraan melek huruf yang berarti isu lingkungan tidak hanya sebagai pengetahuan tetapi juga pemahaman warga negara yang mampu memiliki kesadaran dan keterlibatan warga negara terhadap isu lingkungan tersebut. ada lima komponen utama dalam konsep kewarganegaraan ekologis meliputi 1) melek

kewarganegaraan meliputi sistem sosial, ekonomi, budaya, dan politik kunci pemahaman menggunakan keterampilan berpikir kritis yang diperlukan; 2) melek ekologi meliputi pemahaman sistem ekologi dan menggunakan pemikiran ekologi tetapi juga harus mampu memahami hubungan ekologi dengan masyarakat; 3) nilai kesadaran yang berarti kesadaran nilai-nilai pribadi sehubungan dengan lingkungan dan kemampuan untuk menghubungkan nilai-nilai ini dengan pengetahuan dan kebijaksanaan praktis untuk membuat keputusan dan bertindak; 4) efikasi diri yang berarti memiliki kapasitas untuk belajar dan bertindak sehubungan dengan nilai-nilai pribadi dan kepentingan di lingkungan dan 5) kebijaksanaan praktis yang bearti memiliki kebijaksanaan dan keterampilan praktis untuk pengambilan keputusan dan bertindak sehubungan dengan lingkungan (Berkowitz, et. al, 2005: 230). Komponen yang diuraikan di atas haruslah dikembangkan melalui peran berbagai pihak mulai dari pemerintah, persekolahan dan keterlibatan dalam masyarakat.

Konsep Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Penguatan kewarganegaraan ekologis haruslah dilaksanakan dengan berkolaborasi pada semua mata pelajaran salah satunya ialah mata pelajaran PKn. Hal ini dikarenakan bahwa konsep warga negara pada abad 21 saat ini tidak hanya membentuk warga negara yang baik dan cerdas tetapi juga memiliki karakteristik multidimensional. Cogan & Derricott (1998: 2-3) juga mengemukakan bahwa warga negara saat ini haruslah memiliki karakteristik multidimensional yang memiliki ciri memiliki jati diri; kebebasan untuk memperoleh hak-hak tertentu; pemenuhan terkait kewajiban-kewajiban; minat dan keterlibatan dalam urusan publik; dan kepemilikan nilai-nilai dasar kemasyarakatan.

Karakteristik warga negara multidimensional juga sejalan dengan pendapat Kerr (1999: 6) bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dirumuskan secara luas untuk mencakup proses mempersiapkan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar dalam proses

mempersiapkan warga negara tersebut. Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa secara umum pembentukan warga negara yang diharapkan ialah warga negara yang baik dan bertanggungjawab terhadap perannya sebagai warga negara. Hal ini jelas jika dikaitkan dengan kewarganegaraan ekologis bahwa warga negara yang baik harus juga mampu bertanggungjawab dan bijak dalam terhadap lingkungan di sekitarnya.

Jika dilihat berdasarkan kompetensi yang dikembangkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) menurut Winataputra (2010: 41) yang harusnya menjadi sasaran akhir ialah seperti pada gambar:

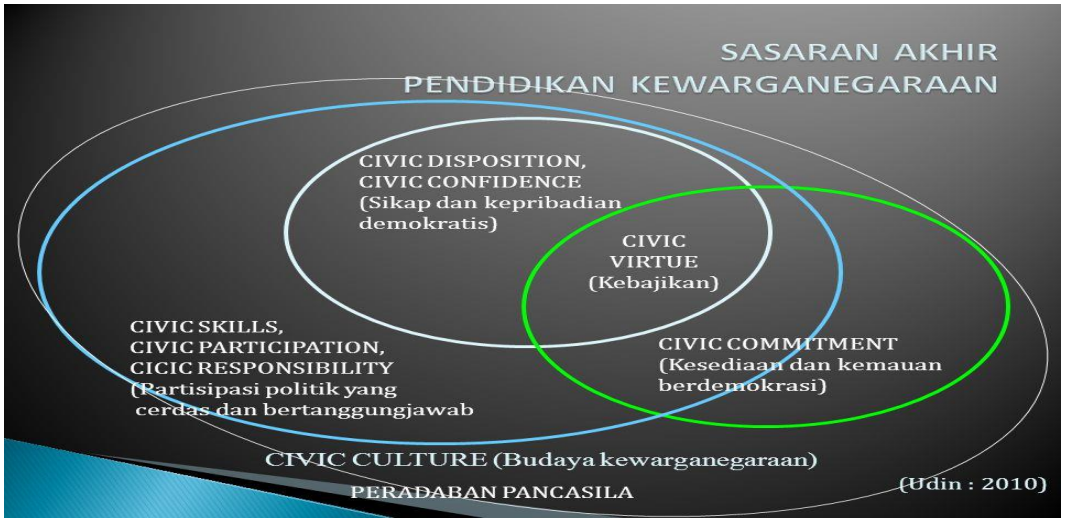

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa kompetensi dalam PKn dimulai dari *civic knowledge, civic skills, civic virtue* bahkan harus mencapai *civic commitment*. Komptensi tersebut berkembang secara utuh agar mencapai tujuan pembentukan warga negara salah satunya upaya penguatan kewarganegaraan ekologis yang juga haruslah memiliki *ecoliteracy* baik hingga adanya komitmen untuk menjadi warga negara yang ekologis.

Konsep Melek Ekologi (*Ecoliteracy*)

Penguatan kewarganegaraan ekologis melalui persekolahan penting untuk dikembangkan sejak dini. Penguatan tersebut haruslah berkelanjutan sehingga siswa akan terbiasa memiliki pemahaman dan bertindak bijak terhadap

lingkungannya. Degeng (1989; 269) mengemukakan bahwa pembiasaan akan terbentuk pada diri seseorang jika dilakukan berulang-ulang. Kasus-kasus kerusakan lingkungan menggambarkan bahwa kurangnya kesadaran terhadap lingkungan dikarenakan gagasan *ecoliteracy* juga masih sangat minim dikembangkan melalui persekolahan. Oleh karena persekolahan melalui pembelajaran haruslah mampu mengkolaborasi pembelajaran berbasis *ecoliteracy*.

Gagasan kesadaran terhadap lingkungan hidup (*ecoliteracy*) menjadi perhatian yang sangat serius sehingga segala upaya dilakukan. Salah satu upaya yang dilakukan dapat melalui pembelajaran PKn berbasis *ecoliteracy*. Pemahaman terhadap gagasan akan pentingnya kesadaran ekologis agar meciptakan keseimbangan antara kebutuhan warga dunia dengan kesanggupan bumi untuk menopangnya. Pemahaman seperti itu juga disebut dengan melek ekologi. Adanya perbedaaan term dalam konsep *ecoliteracy* membuat beberapa ahli mengemukakan dengan istilah berbeda. *Ecoliteracy* dibeberapa literatur juga disebut melek ekologi atau kecerdasan ekologi. Melek ekologi (*ecoliteracy*) dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan pemahaman ekologi, berpikir dan kebiasaan pikiran untuk belajar peduli lingkungan (Berkowitz, 2005: 253). Kecerdasan ekologis seseorang didasari atas pengetahuan, sikap/kesadaran, dan tindakan/perilaku hidup yang selaras dengan lingkungan alam. Seperti dijelaskan oleh Supritana (2016: 27) bahwa kecerdasan ekologis bersifat kompleks. Kecerdasan tersebut didukung oleh unsur kognitif, afektif (sosial dan emosi), dan psikomotorik. Hasrat untuk menjaga lingkungan hidup didasari oleh pengetahuan tentang lingkungan. Kesadaran untuk menyelamatkan lingkungan yang rusak didasari oleh aspek afektif, sedangkan tindakan untuk menjaga kelestarian lingkungan menggambarkan aspek psikomotorik.

Gagasan *ecoliteracy* tersebut dapat diintegrasikan dalam semua mata pelajaran salah satunya PKn. Prasetiyo (2016: 182) mengemukakan bahwa gagasan *ecoliteracy* dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan 3 jalur meliputi: 1) pendidikan tentang lingkungan yang dapat dilakukan melalui pengembangan materi pembelajaran yang membahas isu lingkungan. Tahap ini bertumpu pada pengembangan aspek kognitif. Salah satu pendekatan yang tepat ialah penemuan

informasi (*discovery*); 2) pendidikan tentang dari lingkungan yang berarti sumber belajar yang digunakan identik dengan lingkungan sekitar; 3) pendidikan untuk lingkungan yang berarti pembelajaran ini tidak hanya mengembangkan pengetahuan dan keterampilan tetapi juga keterlibatan nilai yang membentuk perilaku. Tujuannya ialah menekankan pada kesadaran untuk berprilaku yang menjadi kebiasaan.

Sejalan dengan pendapat di atas bahwa gagasan tersebut selaras dengan tujuan yang hendak di capai dalam pembelajaran PKn yang meliputi 1) pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) yang berkaitan dengan pemahaman yang harus dimiliki warga negara; 2) keterampilan kewarganegraan (*civic skill*) kecakapan intelektual dan partisipasi aktif warga negara dan 3) watak kewarganegraaan (*civic disposition*) yang berarti pembentukan karakter yang mengembangkan nilai-nilai kebajikan salah satunya karakter peduli lingkungan. Oleh karena itu gagasan *ecoliteracy* tersebut dapat kita susun dalam pembelajaran PKn yang disesuaikan dengan kompetensi inti gagasan *ecoliteracy* dan kompetensi inti dan komptensi dasar yang termuat dalam kurikulum yang disesuaikan. Kompetensi inti tersebut meliputi kognitif, afektif, psikomotor dan hubungan antara sekitar (*The Center for Ecoliteracy).* Berikut penulis berupaya membuat keterkaitan kompetensi dasar melek ekologi dengan kompetensi dasar yang sesuai dengan upaya pembelajaran berbasis *ecoliteracy*

Tabel 1. Keterkaitan Kompetensi Dasar Melek Ekologi Dengan Kompetensi Dasar Pembelajaran PKn

No	***Set of Core Competency from The Center for Ecoliteracy***	***Indikator Keberhasilan***
1	***Head (kognitif)/ civic knowledge (pengetahuan kewarganegaraan)*** *a) Pendekatan isu dari berbagai persfektif* *b) Pemahaman terhadap prinsip utama ekologis*	*a) Peserta didik mencari informasi mengenai kasus perusakan lingkungan yang ada di sekitar* *b) Peserta didik dapat mengklasifikasikan perusakan yang paling sering terjadi dilingkungan sekolah*

No	***Set of Core Competency from The Center for Ecoliteracy***	***Indikator Keberhasilan***
	c) Berpikir kritis, pemecahan masalah yang kreatif, dan mempu menggunakan pengetahuan ke dalam situasi baru	*c) Peserta didik mengidentifikasi indikator penyebab perusakan lingkungan* *d) Peserta didik dapat menjelaskan akibat perusakan lingkungan*
2	***Hands (aktif)/civic skills (ketrampilan kewarganegaraan)*** *a) Membuat dan menggunakan alat, benda, dan prosedur yang dibutuhkan secara berkelanjutan masyarakat* *b) Mengubah keyakinan menjadi fakta dan tindakan efektif, dan menerapkan ekologi pengetahuan untuk praktek desain ekologis* *c) Menilai dan menyesuaikan penggunaan energi dan sumber daya*	*a) Peserta didik dapat mempraktekkan tata cara mengelola lingkungan sekitar* *b) Peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan di sekolah maupun di luar sekolah* *c) Peserta didik dapat menginformasikan tata cara pelestarian lingkungan*
3	***Heart (emosional) /civic disiposition (watak kewarganegaraan)*** *a) Peduli dan empati untuk orang lain dan lingkungan* *b) Menghargai perbedaan, bekerja dengan nilai keberagaman yang berbeda latar belakang, motivasi dan tujuan baik* *c) Berkomitmen untuk keadilan dan peduli kepada sesame*	*a) Peserta didik memiliki kesadaran untuk tidak berperilaku merusak lingkungan* *b) Peserta didik menunjukkan perilaku peduli terhadap lingkungan* *c) Peserta didik berkomitmen untuk mengelola lingkungan dengan bijak* *d) Peserta didik berokitmen untuk ikut serta dalam merumuskan pelestarian lingkungan*

Sumber: di olah Rondli (2017) dan penulis 2017.

Konsep Pembelajaran *Project Citizen*

Penguatan kewarganegaraan ekologis akan lebih efektif jika melibatkan siswa dalam situasi yang direncanakan agar siswa mampu terlibat langsung dan menghayati posisi mereka sebagai salah satu peran warga negara ekologis. Model pembelajaran yang ditawarkan dalam tulisan ini ialah melalui *project citizen*. *Project citizen* adalah sebuah kumpulan pekerjaan siswa yang bermanfaat, terintegrasi yang diseleksi dan disimpan dalam suatu bundle (Budimansyah, 2002: l).

Project citizen merupakan model pembelajaran yang di dalamnya terdapat karya pilihan dari keseluruhan kelas yang bekerja secara *kooperatif* untuk mengembangkan kebijakan publik yang terpusat pada masalah kemasyarakatan, terdiri dari Bagian Tayangan dan Bagian Dokumentasi yang oleh siswa menurut topik yang dikaji. Dewey (Budimansyah, 2002: 56) menawarkan berbagai metode dalam filosofi pendidikann yang sesuai dengan project citizen, yang terdiri dari lima fase yaitu: 1) cara berfikir yang "*reflective thinking"; 2)* proses hubungan sosial anak*; 3) "guiding idea"; 4) "reasoning"; 5)* ferivikasi gagasan dengan *"experimental corroboration*". Hal ini jelas hakikatnya melalui *project citizen* siswa menjadi pusat pembelajaran dengan keterlibatan siswa terhadap isu-isu publik salah satunya isu lingkungan.

Adapun Sifat-sifat pembelajaran *project citizen* menurut Djahiri (2000:6-7), terdiri dari:

1) Aktif dan *Meaningfull*, melalui pembelajaran ini seluruh potensi siswa (kognitif, afektif dan psikomotor) siswa terlibat secara utuh. Pembelajaran ini juga diharapkan *meaningfull* dalam arti berguna, bermanfaat dan menjadi milik siswa sepenuhnya (*self concept).*
2) *Inquiry learning* atau *problem solving*, pembelajaran ini melatih dan membiasakan siswa untuk mahir memecahkan masalah dengan pelaksanaan langkah-langkah yang sistematis. Lingkungan belajar sekitar siswa menjadikan fenomena hidup yang menarik sehingga menimbulkan rasa ingin tahu yang tinggi sehingga mereka terdorong untuk bertanya dan mencari jawabannya.

3) *Integrated learning*, pembelajaran ini bersifat komprehensif dan utuh, karena bahan ajar dan kegiatan belajar bersifat multidimensional yang utuh. Dimensi keilmuan dipadukan dengan dimensi kehidupan.
4) *Cooperative learning*, seluruh proses belajar merupakan satu kesatuan yang penuh solidaritas, saling menolong dan membantu keberhasilan belajar siswa. Segala pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah dan votting (suara terbanyak).
5) *Student based*, seluruh kemampuan siswa fisik dan non fisik serta lingkungan belajarnya akan menjadi acuan mulai dari bahan ajar sampai penilaian.
6) *Factual base*, pembelajarannya menggunakan multi sumber, media dan evaluasi. Pembelajaran mulai dari realita kehidupan kemarin, kini dan esok, untuk dilakoninya.
7) *Democratic, humanistic* dan terbuka, seluruh siswa dihargai sebagai manusia yang memiliki potensi diri yang memiliki berbagai pilihan dan aktivitas yang berbeda-beda. Hubungan antara guru dan siswa terjalin harmonis sebagai teman belajar dengan menjunjung prinsip keadilan dan keterbukaan.

Uraian mengenai sifat pembelajaran *project citizen* menggambarkan bahwa hasil akhir dari pembelajaran ini ilaha 1) Memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk dapat berpartisipasi secara efektif; 2) Memberikan pengalaman praktis yang dirancang untuk mengembangkan kompetensi dan efikasi; 3) Mengembangkan pemahaman akan pentingnya partisipasi warga negara. Sejalan dengan konsep pembelajaran berbasis *ecoliteracy* maka *project citizen* merupakan salah satu model pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan penguatan kewarganegaraan ekologis.

Penguatan Kewarganegaraan Ekologis Melalui Pembelajaran PKn Berbasis *Ecoliteracy* Dan *Project Citizen*

Tulisan ini berupaya memberikan gambaran bahwa peran pembelajaran PKn dalam penguatan kewarganegaraan ekologis sangatlah besar mengingat pembentukan kewarganegaraan ekologis tersebut dapat dibentuk secara efektif melalui pengembangan ketiga kompetensi dalam PKn secara utuh. Akan tetapi dalam ruang lingkup pembelajaran PKn persekolahan sendiri juga masih sangat minim yang membahas materi tentang peduli lingkungan. Penulis hanya akan mengambil ruang lingkup jenjang SMP Kurikulum 2013 untuk dijadikan salah satu contoh. Minimnya ruang lingkup materi dalam pembelajaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Ruang Lingkup Materi PKn SMP

KELAS	MATERI POKOK
VII	Proses perumusan Pancasila, norma,sejarah perumusan dan pengesahan UUD NRI 1945, Keberagaman SARA, bentuk kerjasama, karakteristik daerah dalam kerangka NKRI
VIII	Pancasila sebagai dasar negara, kedudukan dan fungsi UUD NRI 1945, tata urutan peraturan perundang-undangan, makna kebangkitan nasional, nilai dan semangat sumpah pemuda, semangat dan komitmen kebangsaan kolektif
IX	Praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara, pokok pikiran UUD NRI 1945, prinsip harmoni keberagaman SARA, konsep cinta tanah air.

Sumber: diolah dari KI DAN KD SMP/MTS KEMENDIKBUD 2016

Dari tabel di atas, hasil analisis penulis melalui kompetensi inti dan dasar bahwa untuk jenjang sekolah menengah hanya satu kompetensi dasar yang membahas mengenai isu lingkungan di kelas IX pada KD. 3.6 Mengkreasikan konsep cintah tanah air/bela negara dalam konteks NKRI, dan 4.6 Mengorganisasikan kegiatan lingkungan yang mencerminkan konsep cinta tanah air dalam konteks kehidupan sehari-hari. Walaupun secara implisit guru mampu menginternalisasikan gagasan *ecoliteracy* melalui *hidden curriculum* secara mandiri.

Pada hakikatnya dalam pembelajaran guru dituntut untuk inovatif sehingga mampu memfailitasi siswa agar mencapai tujuan pembelajaran yang diharapakan. Untuk mencapai penguatan kewarganegaraan ekologis maka penulis berupaya mengembangkan Pembelajaran PKn Berbasis *Ecoliteracy* dan *Project Citizen.*

Pelaksanaan pembelajaran ini dilakukan berkelanjutan selama 4x pertemuan karena model *project citizen* merupakan model pembelajaran yang berkala dan membutuhkan waktu yang cukup lama**.**

Tabel 3. Langkah-Langkah Pelaksanaan Pembelajaran PKn Berbasis *Ecoliteracy Dan Project Citizen*

No	Langkah Model	Kegiatan	Pertemuan	Kompeteni kewarganegaraan & *ecoliteracy*
1.	Mengidentifikasi Masalah	a. Siswa dibimbing guru untuk membagi kelompok kelas menjadi empat kelompok besar b. Setelah terbentuk empat kelompok besar guru meminta tiap kelompok mengidentifikasi permasalah yang termasuk kebijakan publik yang sesuai KD (tiap kelompok mengusulkan 1 masalah kerusakan lingkungan) c. Setiap anggota kelompok mengemukakan alasan memilih masalah tersebut d. Siswa dibantu guru akan menulis empat masalah dan alasan tiap kelompok dalam mengidentifikasi masalah	**1**	*Head (kognitif)/ civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan) dan *Hands (aktif)/civic skills* (ketrampilan kewarganegaraan)
2.	Memilih Masalah	a. Siswa mengajukan masalah secara demokratis b. Siswa dibantu guru menulis di papan tulis setiap masalah yang dipilih c. Jumlahkan perolehan suara dari masing-masing permasalahan tersebut. d. Apabila jumlah suara yang diperoleh oleh ranking pertama belum mencapai jumlah 50% plus 1, maka selanjutnya diadakan pemilihan tahap 2 untuk mendapatkan satu masalah sebagai bahan kajian kelas Setelah didapatkan masalah yang akan di kaji, selanjutnya bagi kelas menjadi 4 kelompok portofolio seperti sebelumnya	**1**	*Head (*kognitif*)/ civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan) dan *Hands (aktif)/civic skills* (ketrampilan kewarganegaraan)

No	Langkah Model	Kegiatan	Pertemuan	Kompeteni kewarganegaraan & *ecoliteracy*
		e. Tiap kelompok portofolio bertugas membuat 2 laporan portofolio, yakni Portofolio tayangan (untuk *show case*) dan Dokumen Portofolio (laporan penelitian dan data pendukung, berupa hasil wawancara, kajian pustaka, klipping dll) Tugas Masing-masing kelompok Porto folio : 1) Kelompok Portofolio 1 = Menjelaskan masalah, latar belakang masalah dan pentingnya masalah tersebut menjadi bahan kajian 2) Kelompok Portofolio 2 = Mengkaji Kebijakan alternatif kelompok ini bertanggungjawab untuk menjelaskan masalah dan memberikan penilaian atas kebijakan yang sudah ada / yang sedang disusun. 3) Kelompok Portofolio 3 = Mengusulkan kebijakan alternatif 4) Kelompok Portofolio 4 = Mengembangkan Rencana kerja Rencana ini harus mencakup langkah-langkah yang mungkin dapat diambil sebagai cara untuk membuat pemerintah menerima dan melaksanakan kebijakan yang diusullkan		
3.	Mengumpulkan Informasi	Siswa mendengarkan penjelasan guru terkait langkah memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif, tiap kelompok hendaknya mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, baik melalui kajian pustaka, observasi, wawancara dan informasi dari sumber-sumber lain yang relevan	**2**	*Head (*kognitif*)/ civic knowledge (*pengetahuan kewarganegaraan*)* dan *Hands (aktif)/civic skills (*ketrampilan kewarganegaraan*)*
4.	Mengembangkan Portofolio	a. Untuk memasuki tahapan ini, tiap kelompok portofolio harus sudah menyelesaikan penelitiannya. b. Tiap kelompok potofolio membuat laporan, terdiri dari : 1). Bagian Tayangan Laporan ini berupa sebuah panel portofolio terbuat dari kardus bekas,	**3**	*Head (*kognitif*)/ civic knowledge (*pengetahuan kewarganegaraan*)* dan *Hands (*aktif*)/civic skills (*ketrampilan kewarganegaraan*)* serta *Heart*

No	Langkah Model	Kegiatan	Pertemuan	Kompeteni kewarganegaraan & *ecoliteracy*
		styrofoam atau bahan lain dengan ukuran tidak lebih dari 90cm x 80 cm. bagian ini berisi pernyataan-pernyataan tertulis, daftar dari sumber-sumber informasi, peta, grafis, foto-foto karya seni dll. 2). Bagian Dokumentasi Bagian ini berisi laporan penelitian kelompok dengan melampirkan data pendukung hasil kajian pustaka, wawancara dan observasi		*(*emosional*) /civic disiposition (*watak kewarganegaraan)
5.	Menyajikan Portofolio	a. Siswa mendapatkan tema apa yang akan digunakan dalam penyajian portofolio sesuai dengan tema yang di pelajari b. Tujuan kegiatan ini adalah membekali pengalaman kepada siswa tentang cara menyampaikan gagasan kepada orang lain, serta bagaimana meyakinkan orang lain terhadap langkah-langkah yang akan diambil. c. Dalam sesi ini tiap kelompok mempresentasikan hasil penelitiannya dihadapan hadirin dan dewan juri, yang populer disebut *SHOWCASE.* d. Presentasi dilakukan secara bergantian mulai dari kelompok portofolio 1, 2, 3 dan terakhir kelompok. Untuk memotivasi siswa, guru dapat menghadirkan beberapa guru lain, tokoh masyarakat atau para ahli sebagi peninjau dan dewan juri, sementara guru bidang studi bertindak sebagai moderator. Setelah presentasi dilakukan, dewan juri mengajukan beberapa pertanyaan untuk menguji hasil penelitian siswa.	**4**	*Head (*kognitif*)/ civic knowledge (*pengetahuan kewarganegaraan) *dan Hands (*aktif*)/civic skills (*ketrampilan kewarganegaraan)*serta *Heart (*emosional*) /civic disiposition (*watak kewarganegaraan)
6.	Merefleksikan Pengalaman Belajar	a. Refleksi pengalaman belajar dilakukan setelah semua kelompok melakukan presentasi.	**4**	*Head* (kognitif)/ *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan

No	Langkah Model	Kegiatan	Pertemuan	Kompeteni kewarganegaraan & *ecoliteracy*
		Hal ini penting dilakukan untuk melihat sejauhmana efektifitas model pembelajaran ini dalam meningkatkan kemampuan siswa serta untuk menghindari terjadinya kesalahan b. Sebagai penutup acara, tiap kelompok mendapatkan penilaian presentasi dari dewan juru.		) dan *Hands (aktif)/civic skills (*ketrampilan kewarganegaraan) serta *Heart* (emosional) */civic disiposition (*watak kewarganegaraan)

Dengan mengkolaborasi pembelajaran PKn berbasis *project citizen* siswa tidak hanya melek ekologi tetapi dapat terlibat dalam pembahasan isu-isu lingkungan sehingga upaya pembentukan kewarganegaraan ekologis lebih dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Penyusunan pembelajaran berbasis *ecoliteracy* tersebut akan lebih efektif jika dengan menggunakan metode pembelajaran yang berbasis proyek. Model pembelajaran yang tepat ialah melalui model pembelajaran *project citizen*. Hal ini dikarenakan salah satu keunggulan model ini ialah mampu mengembangkan secara utuh tiga kompetensi kewarganegaraan seperti pengetahuan, keterampilan dan watak kewarganegaraan dan melibatkan siswa terlibat langsung dalam kebijakan yang lebih tepat dalam isu lingkungan. Hal ini dipekuat oleh Gibson dan Levine (2003: 45) menganggap memungkinkan siswa untuk terlibat dalam pekerjaan yang berarti pada isu-isu publik yang serius dengan kemampuan untuk melihat hasil yang positif dalam waktu yang wajar. Selain itu Huckle (1986: 15) berpendapat bahwa *project citizen* tentang lingkungan hanya dapat dipelajari dengan berlatih dan langsung proyek untuk mengaktifkan siswa dan memberikan kontribusi untuk masalah nyata yang mempengaruhi masyarakat setempat. Para siswa sendiri percaya bahwa proyek memungkinkan mereka untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai warga negara yang bertanggungjawab.

Pengembangan kewarganegaraan ekologi berbasis *ecoliteracy* dan proyek juga dapat mencontoh program *school urban* dari negara-negara maju seperti Jepang, Kanada, Australia dan Amerika. Program ini berbasis proyek antara

sekolah formal dengan mitra komunitas lingkungan. Tujuan program ini ialah melibatkan siswa dalam kehidupan nyata untuk berupaya menjaga dan mengelola lingkungan yang baik sehingga siswa tidak hanya paham dan terlibat aktif tetapi juga mampu mengahayati dalam bentuk perilaku. Harapan penulis pembelajaran PKn berbasis *ecoliteracy* dan *project* ini tidak hanya dalam pembelajaran tetapi karya siswa tersebut mampu diakomodir guru untuk disampaikan pada pemegang kebijakan yang ada.

SIMPULAN

Upaya penguatan kewarganegaraan ekologis penting dilakukan oleh berbagai pihak salah satunya ialah melalui persekolahan. Hal ini penting bahwa isu mengenai lingkungan menjadi masalah global yang sedang terjadi di seluruh kawasan dunia salah satunya Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah melalui penyelenggaraan pendidikan berbasis lingkungan hidup yang di aktualisasikan melalui pembelajaran di kelas. PKn merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat bersinergis untuk mencapai tujuan penguatan kewarganegaraan ekologis melalui pengembangan tiga kompetensi warga negara yang baik. Pembelajaran PKn berbasis *ecoliteracy* dapat diupayakan oleh guru dengan mengemas pembelajaran yang mampu menumbuhkan kesadaran, pengetahuan serta membuat pola perilaku terhadap peserta didik di kelas untuk peduli dan tanggap terhadap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan. Salah satu kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dapat dikembangkan melalui gagasan *ecoliteracy* ialah di kelas IX pada KD. 3.6 Mengkreasikan konsep cintah tanah air/bela negara dalam konteks NKRI, dan 4.6 Mengorganisasikan kegiatan lingkungan yang mencerminkan konsep cinta tanah air dalam konteks kehidupan sehari-hari. PKn berbasis *ecoliteracy akan lebih efektif jika dilaksanakan melalui model project citizen.* Hal ini dikarenakan salah satu keunggulan model ini ialah mampu mengembangkan secara utuh kompetensi *ecoliteracy* dan kewarganegaran mulai dari pengetahuan, keterampilan dan watak kewarganegaraan serta siswa terlibat langsung dalam kebijakan yang tepat dalam menanggapi masalah

lingkungan. Adapun saran dari penulis ialah guru harus memiliki kemampuan dalam mengelolah pembelajaran berbasis *ecoliteracy* secara inovatif dikarenakan pembahasan isu lingkungan dalam pembelajaran PKn sangat minim sehingga guru harus bijaksana dalam upaya penguatan kewarganegaraan ekologis melalui pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

Berkowitz, A. J., Ford, M. A., & Brewer, C. A. (2005). *A framework for integrating ecological literacy, civics literacy, and environmental citizenship in environmental education.* In E. A. Johnson & M. J. Mapping (Eds.), Environmental education and advocacy: Changing perspectives of ecology and education (pp. 227–266). Cambridge. Cambridge University Press

Budimansyah, Dasim. (2002). *Model pembelajaran dan penilaian berbasis portofolio.* Bandung. PT Ganesindo

Clarke, L., & Agyeman, J. (2011). *Shifting the balance in environmental governance: Ethnicity environmental citizenship and discourses of responsibility*. Antipode, 43 (1) Pp: 1773–1800

Cogan, J.J and Ray Derricott (eds) (1998). C*itizenship for the 21 century: an international perspective on education*. London. Kogan Page.

Core Competencies for Ecoliteracy. Tersedia On Line di http://www.ecoliteracy.org/discover/competencies (diakses tanggal 17 Oktober 2016 pukul 08.55 WIB)

Curtin, D. (2002) Ecological citizenship. Dalam Isin, E.F. dan Turner, B.S. (eds). *Handbook of citizenship studies.* New Delhi. SAGE Publications.

Djahiri, Kosasih. (2006). *Pendidikan nilai moral dalam dimensi pendidikan kewarganegaraan*. Bandung. Laboratorium PKn FPIPS UPI

Degeng, I. N. S. (1998). Mencari paradigma pemecahan masalah belajar dari keteraturan menuju kesemrawutan. Pidato Pengukuhan Guru Besar IKIP Malang.

Dobson, Andrew. 2003. *Citizenship and the Environment*. Oxford. Oxford University Press.

Gabrielson, T., & Cawley, R. M. (2010). *Plain member and citizen: Aldo Leopold and environmental citizenship*. Citizenship Studies, 14 (1). Pp: 605–615.

Gebbels, S., Evans, S. M., & Delany, J. E. (2011). *Promoting environmental citizenship and corporate social responsibility through a school/industry/university partnership*. Journal of Biological Education, 45 Pp: 13–19

Gibson, Cynthia & Peter Levine. (2003). *The civic mission of schools*. New York and Washington, DC. The Carnegie Corporation of New York and the Center for Information and Research on Civic Learning.

Huckle, J. 1986. *Geographical education for environmental citizenship*. Geographical Education 5(2), Pp: 13–20.

Kemendikbud (2016) Kompetensi inti dan kompetensi dasar SMP/MTS

Kerr, D. (1999). *Citizenship education: An international comparison.* London. National Foundation for Educational Research (NFER).

Latta, A. (2007). *Environmental citizenship: A model linking ecology with social justice could lead to a more equitable future.* Alternatives Journal, Pp: 33,18–19.

Prasetiyo Wibowo dan Budimansyah, Dasim (2016) *Warga Negara dan Ekologi: Studi Kasus Pengembangan Warga Negara Peduli Lingkungan Dalam Komunitas Bandung Berkebun.* Jurnal Pendidikan Humaniora. 4 (4). Hal 177-186

Rondli, W.S. dan Khoirinnida, Yuli. (2017). *Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berbasis ecoliteracy: upaya rekontruksi kewarganegaraan ekologis. Hasil prosiding Seminar Nasional aktualisasi kurikulum 2013 di sekolah dasar melalui gerakan literasi sekolah untuk menyiapkan generasi unggul dan berbudi pekerti*. Hal 114-122

Supriatna, N. 2016. *Ecopedagogy membangun kecerdasan ekologis dalam pembelajaran IPS.* Bandung. Remaja Rosdakarya

Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup (UUPLH)

Winataputra U. S. (2010) *Perkembangan pendidikan sebagai wahana pendidikan demokrasi di Indonesia*. Bandung: CICED

GERAKAN *GO GREENSCHOOL* DALAM MENINGKATKAN KARAKTER PEDULI LINGKUNGAN SISWA DI SMK NEGERI 1 ADIWERNA

Novita Isnarosi Nurfaida

Program Pascasarjana PPKn UNY, Yogyakarta

itsna_ngapaks@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi gerakan *go greenschool* dalam meningkatkan karakter peduli lingkungan siswa di SMK Negeri 1 Adiwerna. Penulisan dilatarbelakangi oleh banyaknya permasalahan global yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan yang terjadi sehingga perlu adanya perhatian serius dari berbagai pihak dan memiliki program berkelanjutan. Kerusakan lingkungan dapat terjadi pada lingkungan sekolah, terutama siswa yang bersikap acuh tak acuh dan kurang peduli terhadap lingkungan yang ramah dan bersih seperti membuang sampah sembarangan. Salah satunya yang ada di SMKN 1 Adiwena yaitu penerapan *go greenschool*. Go greenschool sebagai proses pendidikan lingkungan kepada siswa terhadap pentingnya mencintai dan melestarikan lingkungan. Salah satu tujuan dari go greenschool yaitu membentuk karakter peduli lingkungan siswa. Karakter peduli lingkungan merupakan suatu sikap peduli terhadap lingkungan yang diwujudkan dalam kesediaan diri untuk menyatakan aksi yang dapat meningkatkan dan memelihara kualitas lingkungan dalam setiap perilaku yang berhubungan dengan lingkungan. Metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini, yaitu studi kepustakaan. Hasil penulisan menyimpulkan bahwa implementasi gerakan go greenschool sangat mempengaruhi peningkatan karakter peduli siswa. Adapun saran yang mungkin dapat menjadi pertimbangan persoalan di atas yaitu sekolah hendaknya menjalin kerjasama dengan orang tua siswa untuk mengimplementasikan pembiasaan peduli lingkungan di rumah. Serta meningkatkan monitoring dan evaluasi secara intensif terhadap pelaksanaan program yang sudah dilaksanakan.

Kata kunci : *Go Greenschool, Karakter Peduli Lingkungan*

PENDAHULUAN

Memasuki abad ke-21 ini isu lingkungan yang paling hangat adalah perubahan iklim karena meningkatnya konsentrasi karbon di udara yang disebut pemanasan global. Pemanasan global salah satunya disebabkan oleh penggundulan hutan karena dapat menghilangkan kemampuan untuk menyerap karbon yang ada di udara dan juga sejak terjadinya Perang Dunia II jumlah kendaraan bermotor di dunia bertambah dari 40 juta menjadi 680 juta kendaraan bermotor merupakan produk manusia yang menyebabkan adanya emisi karbondioksida pada atmosfer

sehingga dalam hal ini manusia merupakan pemeran utama dalam kelangsungan rusak atau tidaknya lingkungan (Worosuprojo: 2008).

Lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menjelaskan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup berkaitan dengan kesatuan ruang antara semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Sedangkan masalah kerusakan lingkungan hidup merupakan deteorisasi lingkungan yang ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Masalah kerusakan lingkungan merupakan salah satu ancaman yang paling berbahaya untuk kelangsungan hidup manusia.

Beberapa contoh kerusakan lingkungan hidup yang masih hangat dalam ingatan misalnya banjir dan longsor yang terjadi di Jember yang menyebabkan jatuhnya ratusan korban. Longsor di Banjarnegara, bencana "galodo" di Solok Sumatera Barat, bencana longsor Situ Gintung, longsor di Papua. Darurat Sampah di Bandung (Bandung lautan sampah) dan bencana Bantar Gebang. Semburan Lumpur Panas Sidoardjo, illegal dumping limbah B3 di Cikarang-Bekasi, pencemaran di Teluk Buyat yang telah merugikan masyarakat secara luas, *illegal loging* dan kebakaran hutan. Semua kerusakan lingkungan hidup tersebut, ditengarai disebabkan oleh ulah manusia baik dalam tataran praktis maupun kebijakan yang belum memperhatikan aspek lingkungan.

Potret lingkungan di Indonesia dari tahun ke tahun makin memprihatinkan. Berdasarkan data terakhir dari Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia, pada 2012 sudah ada 300 kasus lingkungan hidup seperti kebakaran hutan, pencemaran lingkungan, pelanggaran hukum, dan pertambangan. Data lain yang mendukung tentang potret lingkungan Indonesia adalah berdasarkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup.Tercatat, ada penurunan kualitas lingkungan, yakni pada 2009 sebesar 59,79 persen, 2010 sebesar 61,7 persen, dan 2011sebesar 60,84 persen. Hal ini juga diperkuat dengan data terakhir menuju indonesia hijau menuju Indonesia hanya memiliki luas tutupan

hutan sebesar 48,7 persen seluruh Indonesia (http://nationalgeographic.co.id/berita/2012/10/potret-lingkungan-indonesia-kian-memprihatinkan).

Oleh karena itu, semua usaha pembangunan yang dilakukan manusia hendaknya memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Neoloka (2008) menyatakan bahwa masalah lingkungan hidup pada hakikatnya berhubungan dengan sistem nilai, sistem sosial, dan agama dalam pengendalian pertumbuhan penduduk dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, cara mengatasi masalah kependudukan dan lingkungan hidup tidak dapat hanya dengan melakukan usaha yang bersifat teknis, tetapi perlu didukung dengan upaya yang bersifat edukatif dan persuasif. Salah satu upaya tersebut dengan melaksanakan pendidikan lingkungan hidup dilingkungan sekolah. Pendidikan Lingkungan Hidup adalah suatu program pendidikan untuk membina anak atau peserta didik agar memiliki pengertian, kesadaran, sikap, dan perilaku yang rasional serta bertanggung jawab tentang pengaruh timbal balik antara penduduk dengan lingkungan hidup dalam berbagai aspek kehidupan manusia (Pratomo, 2009:8).

Lembaga Pendidikan di Lingkungan sekolah merupakan langkah antisipasi yang paling dasar untuk mengubah perilaku seseorang dengan mengupayakan langkah dan sikap untuk mengurangi dampak *global warming* tersebut yaitu dengan menanamkan sikap cinta lingkungan bagi anak didik sedini mungkin (Syafri:2008).

Sekolah menjadi lembaga pendidikan sebagai media berbenah diri dan membentuk nalar berpikir yang kuat dengan membentuk karakter siswa dengan nilai-nilai luhur. Sekolah juga tempat yang signifikan bagi siswa dalam tahap perkembangan dan merupakan sebuah lingkungan sosial yang berpengaruh bagi kehidupan yang berhubungan dengan penanaman kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dilingkungan sekolah. Akan tetapi kerusakan lingkungan juga dapat terjadi pada lingkungan sekolah apabila siswa bersikap acuh tak acuh dan kurang peduli terhadap lingkungan yang ramah dan bersih seperti membuang sampah sembarangan sehingga menyebabkan lingkungan menjadi kotor.

Salah satu program pendidikan di sekolah yang mengarah pada usaha menanamkan kesadaran untuk berlaku bijak terhadap lingkungan yaitu Program

Adiwiyata. Program Adiwiyata adalah salah satu Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup yang telah disepakati pada tanggal 19 Februari 2004 oleh 4 departemen yaitu Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH), Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri. Kebijakan ini sebagai dasar arahan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder)* dalam pelaksanaan dan pengembangan PLH di Indonesia serta sebagai salah satu solusi dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahanan masyarakat terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup (Panduan Adiwiyata, 2011:2).

Program Adiwiyata memiliki bermacam-macam konsep kegiatan diantaranya sekolah hijau *(green school), green peace, eco school, ecorearch, ecopreneurship,* sekolah sehat. Sekolah hijau (*green school)* merupakan program pemerintah yang diharapkan mampu memiliki pemahaman, kesadaran, dan mengintegrasikan nilai-nilai lingkungan hidup pada seluruh warga sekolah agar membentuk perilaku dan pola pengelolaan sekolah yang ramah lingkungan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Program sekolah hijau menjadi ikon penting dalam rangka mengantisipasi *global warming* karena dapat membangkitkan rasa tanggungjawab, peduli, dan percaya diri kepada siswa SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK untuk ikut serta dalam upaya meminimalisir pemanasan global.

Salah satunya program kegiatan sekolah yang ada di SMKN 1 Adiwena yaitu penerapan gerakan *go greenschool*. *Go greenschool* sebagai proses pendidikan lingkungan kepada siswa terhadap pentingnya untuk mencintai dan melestarikan lingkungan hidup. Salah satu tujuan dari *go greenschool* yaitu membentuk karakter peduli lingkungan siswa. Siswa dibentuk agar memperhatikan dan meningkatkan karakter terhadap lingkungan yang bersih.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah penulisan yaitu 1) bagaimana implementasi gerakan *go green school* dalam meningkatkan karakter peduli lingkungan siswa di SMK Negeri 1 Adiwerna? 2) Bagaimana perwujudan perilaku/sikap yang ditunjukkan siswa dalam penerapan gerakan *go green school?* 3) Apa hambatan dalam mengimplementasi gerakan *go green school* di SMK Negeri 1 Adiwerna? Tujuan penulisan ini untuk mengidentifikasi : 1) Implementasi gerakan *go green school* dalam meningkatkan

sikap peduli siswa di SMK Negeri 1 Adiwerna 2) perwujudan perilaku/sikap yang ditunjukkan siswa dalam penerapan gerakan *go green school* 3) hambatan dalam mengimplementasi gerakan *go green school* di SMK Negeri 1 Adiwerna

METODE PENELITIAN

Metode yang akan digunakan dalam penulisan ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data dalam penulisan artikel ini diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi kemudian dilakukan identifikasi yang relevan dan berhubungan dengan pelaksanaan gerakan *go green school* dalam meningkatkan karakter Peduli lingkungan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu dengan menganalisis isi dengan mengorganisasikan dan mengkategorikan data untuk memperoleh hasil penulisan yang akan menjadi kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Greenschool

Setiap negara memiliki definisi sendiri tentang Adiwiyata (sekolah hijau). Istilah "adiwiyata" di indonesia berasal dari bahasa Sanskerta. Adi berarti besar, besar, bagus, ideal atau sempurna, sedangkan wiyata berarti tempat dimana seseorang mendapat pengetahuan, norma, dan etika dalam kehidupan sosial. Kombinasi dua kata itu menjadikan konsep adiwiyata memiliki arti yaitu sebuah hak dan tempat ideal yang bisa didapat melalui semua sains, norma, dan etika. (MoE, 2011).

Tren sertifikasi *Green School* telah menyebar ke seluruh dunia. Pada tahun 2001, lebih dari dua ribu sekolah di 11 negara Eropa terlibat dalam program *Eco School.* Sekolah-sekolah tersebut berusaha untuk memberikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepada murid-murid untuk berpikir kritis, belajar mandiri, dan peduli lingkungan. Sebuah studi yang dilakukan di Australia (Chapman & Sharma, 2001) tentang *Eco-Schools* di Asia (di India dan di Filipina) menemukan bahwa konsepsi sekolah dapat membantu mempengaruhi sikap siswa, sehingga

mengubahnya menjadi lebih berhati-hati. Sekolah Hijau adalah tren di seluruh dunia. Di China, misalnya, 135 sekolah menerima sertifikasi hijau pada tahun 2000, karena penerapan pendidikan lingkungan disana sangat baik (Wu, 2002).

Sekolah hijau dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Ada beberapa prinsip umum yang sering digunakan untuk menggambarkan sekolah hijau, yaitu: melindungi lingkungan, menurunkan biaya operasi, meningkatkan kesehatan dan kualitas lingkungan belajar, dan mengintegrasikan kesempatan belajar dengan lingkungan. (Olson and Kellum, 2003)

Definisi sekolah hijau di Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Program Adiwiyata disebutkan dalam peraturan menteri bahwa sekolah adiwiyata adalah sekolah yang bagus dan ideal sebagai tempat untuk mendapatkan semua sains, norma, dan etika itu dapat menjadi dasar terciptanya kesejahteraan manusia dan modelnya pembangunan berkelanjutan. Secara harfiah, arti kata *green school* adalah sekolah hijau, namun sebenarnya memiliki makna yang lebih luas. *Green School* bukan hanya tampilan fisik sekolah saja yang hijau atau rindang, tetapi wujud sekolah yang memiliki program dan aktivitas pendidikan yang mengarah pada kesadaran dan kearifan terhadap lingkungan hidup. Dalam makna luas, Sekolah Hijau diartikan sebagai sekolah yang memiliki komitmen dan secara sistematis mengembangkan program-program untuk menginternalisasikan nilai-nilai lingkungan ke dalam seluruh aktivitas sekolah.

Sekolah Hijau atau *Green School* merupakan sekolah yang memiliki komitmen dan secara sistematis mengembangkan program-program untuk menginternalisasikan nilai-nilai lingkungan ke dalam seluruh aktivitas sekolah. (Sugeng Paryadi, 2008:12). Sebuah sekolah dapat menjadi sekolah berwawasan lingkungan apabila menerapkan serta mengembangkan empat pilar utama yang menjadi indikator dan kriteria, yakni sebagai berikut. *Pertama*, pengembangan kebijakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. *Kedua,* pengembangan kurikulum berbasis lingkungan. *Ketiga*, pengembangan kegiatan berbasis partisipatif. *Keempat,* pengelolaan dan atau pengembangan sarana pendukung sekolah. (MoE, 2011).

Sekolah hijau sebagai salah satu bentuk pendidikan lingkungan hidup melalui jalur sekolah sebenarnya memberikan pemahaman. Pemaknaan sekolah hijau yang seharusnya yakni dengan berbuat untuk menciptakan kualitas lingkungan sekolah yang kondusif, ekologis, lestari yang secara nyata dan berkelanjutan. Tentu saja cara-cara yang simpatik, kreatif, dan inovatif dengan menganut nilai-nilai dan kearifan budaya lokal (Paryadi, 2008: 13). Adiwiyata (2012:5) Pelaksanaan *green school* dilandasi dua prinsip dasar berikut ini. *Pertama*, partisipatif yaitu komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai tanggungjawab dan peran. *Kedua*, berkelanjutan yaitu seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus menerus secara komprehensif.

Adapun tujuan dari *green school* sebagai perwujudan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik. Tujuan utama penekanan konsep lingkungan ini adalah untuk menjelaskan fungsi manusia dalam menjaga alam semesta dan menunjukkan cara menjaga kualitas lingkungan alam untuk kepentingan bersama pada masa yang akan datang. Disinilah para guru yang mengajar siswa diluar kelas harus memahami betul arti penting konsep lingkungan (Adelia, 2010: 25)

Proses menuju sekolah hijau secara ideal membutuhkan waktu yang relatif panjang sehingga membutuhkan perencanaan yang matang serta kerja keras seluruh warga sekolah. Langkah awal dari program ini yaitu dengan menanamkan serta membangun rasa kepedulian warga sekolah untuk menyelamatkan lingkungan sekolah dalam ruang lingkup mikro. Penyusunan program sekolah hijau ini dilakukan secara holistik dengan mengaitkan seluruh program yang ada di sekolah serta mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambatnya. Potensi internal sekolah yang berupa lahan, sumberdaya air, energi dan limbah serta potensi sekitar sekolah seperti tradisi masyarakat, kondisi bentang alam dan ekosistemnya akan menjadi objek-objek pengembangan dalam program sekolah hijau.

Karakter Peduli Lingkungan

Karakter dapat diartikan sebagai watak, tabiat, akhlak, dan kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan *(virtues)* yang digunakan sebagai landasan cara pandang berfikir, bersikap, dan bertindak. (Sulistyowati, 2012: 21). Secara terminologis, makna karakter dikemukakan oleh Thomas Lickona. Menurutnya karakter adalah "Sebuah disposisi batin untuk merespons situasi dengan cara yang baik secara moral. "Selanjutnya ia menambahkan," Karakter yang memiliki tiga bagian yang saling terkait yaitu pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral (Lickona, 1991: 51). Dengan kata lain, karakter mengacu kepada serangkaian pengetahuan (*cognitives*), sikap (*attitides*), dan motivasi (*motivations*), serta perilaku (*behaviors*) dan keterampilan (*skills*).

Hamzah (2013: 43) menyatakan bahwa karakter peduli lingkungan bukanlah sepenuhnya talenta maupun instink bawaan, akan tetapi juga merupakan hasil dari suatu proses pendidikan dalam arti luas. Salah asuh atau salah didik terhadap seorang individu bisa jadi akan menghasilkan karakter yang kurang terpuji tehadap lingkungan. karakter yang kurang terpuji menjadi karakter yang baik haruslah dibentuk kepada setiap individu, sehingga setiap individu dapat menjiwai setiap tindakan dan perilakunya.

Peduli lingkungan hidup atau lebih dikenal peduli lingkungan saja merupakan perilaku atau tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang telah terjadi. Namun tidak jarang ditemui banyak sekali anak-anak bahkan orang dewasa sebagai pencontoh yang tidak peduli terhadap sampah yang berserakkan, merusak taman serta membuang sampah sembarangan, hal tersebut terjadi karena rendahnya penanaman perilaku peduli lingkungan sejak dini.

Kementerian Negara Lingkungan Hidup Tahun 2005 menyatakan bahwa perilaku ramah lingkungan atau peduli lingkungan sudah menjadi komitmen kita semua, mengingat adanya korelasi yang sangat jelas antara keberlanjutan dan kesejahteraan hidup manusia dengan kualitas lingkungannya, dengan kata lain bahwa semakin baik kualitas lingkungan maka semakin baik pula kesejahteraannya yang berimplikasi pada semakin panjang pula angka harapan hidup manusia. Begitu

pula sebaliknya semakin buruk kualitas lingkungan, semakin banyak sumber penyakit dan semakin kurang terjaminnya kesejahteraan dan semakin pendek angka harapan hidup manusia. Komitmen tersebut hendaknya ditanamkan pada siswa.

Jika pengetahuan dan kepedulian lingkungan dapat ditanamkan pada siswa diharapkan ketika mereka dewasa akan menjadi bekal sikap dan perilaku dalam dirinya terhadap lingkungan akan berdampak positif. Terlebih lagi dengan isu-isu pemanasan global yang merupakan akibat dari kerusakan lingkungan pada zaman sekarang. Generasi muda lah yang memegang peran besar sebagai promotor perilaku peduli lingkungan hidup. Di sinilah peran sekolah yang merupakan tempat berlangsungnya pendidikan yang fungsinya membentuk karakter peduli lingkungan.

Karakter peduli lingkungan merupakan hal yang harus ditanamkan secara terus menerus melalui pembiasaan. Kepedulian dan kesadaran dari siswa akan pentingnya menjaga lingkungan hidup akan menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan nyaman. Lingkungan sekolah yang sehat dan nyaman ini dapat meningkatkan prestasi dan kreativitas siswa. Hal ini dapat terwujud dengan dukungan dari berbagai elemen sekolah.

Implementasi Gerakan Go Greenschool Dalam Meningkatkan Karakter Peduli Lingkungan

Konsep sekolah hijau dalam meningkatkan karakter peduli lingkungan melalui proses pembelajaran dan pembiasaan menjadi penting dan strategis. Di sekolah, proses pembelajaran mengarah pada upaya pembentukan perilaku siswa yang peduli lingkungan melalui model pembelajaran yang aplikatif dan menyentuh kehidupan sehari-hari. Sementara itu, lingkungan sekolah dijadikan wahana pembiasaan perilaku peduli lingkungan sehari-hari. Dengan demikian, kedua aspek tadi, menuju pada satu tujuan yaitu internalisasi atau pembiasaan perilaku peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

Implementasi gerakan *go green school* di SMK Negeri 1 Adiwerna dalam meningkatkan karakter peduli lingkungan terwujud dalam kegiatan sekolah yang meliputi kebersihan dan keindahan kelas, kebersihan tempat pembuangan dan kebersihan dan keindahan taman. *Gerakan Green school* sangat mendukung upaya meningkatkan karakter peduli lingkungan. Pelaksana kegiatan gerakan *Green school* umumnya adalah seluruh siswa yang dilaksanakan setiap hari dan pelaksana khususnya adalah anggota OPPLH . Aspek-aspek peduli lingkungan yang dikembangkan di sekolah melalui pembiasaan dalam kegiatan *Go Green School* meliputi 1) pemeliharaan kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah 2) pemeliharaan peralatan kebersihan 3) Pemisahan jenis sampah organik dan anorganik 4) Ketersediaan Tempat pembuangan, serta 5) optimalisasi program kegiatan OPPLH .

1) pemeliharaan kebersihan dan kelestarian lingkungan di sekolah.

Menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di sekolah merupakan salah satu unsur terpenting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan kondusif, sehingga mampu mempengaruhi perkembangan kepribadian dan karakter siswa. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik. Manusia semacam ini memiliki kesadaran bahwa dirinya menjadi bagian yang tidak terpisah dari lingkungan sekaligus berusaha untuk berbuat sebaik mungkin bagi lingkungannya. Hubungan timbal balik semacam ini penting artinya untuk harmonisasi lingkungan. Munculnya berbagai persoalan lingkungan yang semakin hari semakin kompleks merupakan cermin dari tidak harmonisnya relasi manusia dengan lingkungan (Naim, 2012: 200).

Pembiasaan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan oleh siswa mencerminkan terealisasinya karakter peduli lingkungan. Pemahaman siswa mengenai pembiasaan memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah dilaksanakan melalui kegiatan bersih harian dan kegiatan bersih mingguan. Kegiatan bersih harian adalah kegitan piket harian yang dilakukan setiap hari senin-kamis pada waktu 5 menit sebelum kegiatan pembelajaran di kelas selesai yaitu

mulai pukul 15.45 – 15.50 wib. Tujuannya untuk membersihkan ruang kelas dan halaman sekitar ruang kelas masing-masing, serta halaman sekitar kantor atau ruang lainnya yang berdekatan dengan kelas peserta didik. Kegiatan bersih mingguan adalah kegiatan yang dilakukan seminggu sekali pada hari jumat yang dilaksanakan sebelum kegiatan pembelajaran di kelas di mulai, mulai 07.00 – 07.45 wib. Kegiatan ini biasa disebut dengan jumat bersih. Program kegiatannya bersifat massal yang melibatkan peserta didik dan warga sekolah lainnya. Tujuannya untuk membersihkan lingkungan sekolah secara keseluruhan. Khusus peserta didik, dalam kegiatan pembersihan tersebut di bagi berkelompok berdasarkan kelas, dan masing-masing kelompok membersihkan lingkungan atau halaman sekolah yang telah ditetapkan oleh pembina kebersihan. Dalam kegiatan ini, kadang kala peserta didik diminta membawa sabit, ember kecil dan alat kebersihan lainnya, tergantung keadaan lingkungan sekolah yang akan dibersihkan.

Karakter peduli siswa SMK Negeri 1 Adiwerna dalam memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah sudah terlihat dari dalam diri siswa. Hal ini terlihat dari sikap siswa yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan piket harian ataupun dalam kegiatan jumat bersih.

2) Pemeliharaan Peralatan Kebersihan

Dalam buku pedoman manajemen perlengkapan sekolah, pemeliharaan atau perawatan adalah upaya untuk membuat kondisi sarana dan prasarana tetap terjaga dengan baik dan menghindari kerusakan yang terlalu dini (Soenarto, 2002: 6). Dengan demikian peralatan yang terawat dengan baik akan mudah untuk dipakai dan dapat menghemat biaya pembelian barang baru. Kebersihan kelas merupakan keadaan yang menggambarkan kondisi kelas yang bersih, bebas dari sampah, kotoran dan bau sehingga tercipta suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Perilaku siswa menggunakan peralatan kebersihan, siswa terlihat menyapu menggunakan sapu dan mengumpulkannya menggunakan sekop, saat piket siswa berbagi tugas, ada yang menyapu, membersihkan debu, mengepel lantai dan

membuang sampah. Bentuk kepedulian siswa memelihara peralatan kebersihan yaitu siswa membereskan alat kebersihan yang telah digunakan, dan siswa menyusun rapi peralatan kebersihan kelas. Begitu pula dari bentuk respon siswa terhadap siswa lain yang tidak memelihara peralatan kebersihan yaitu siswa mengajak teman-temannya dikelas untuk melaksanakan piket dan siswa mengingatkan temannya untuk membereskan peralatan kebersihan yang sudah dipakai. Di Sekolah siswa diajarkan untuk menggunakan peralatan kebersihan dengan cukup baik. Hal ini terbukti dari sikap siswa yang selalu menggunakan dan memanfaatkan peralatan kebersihan yang ada di kelas mereka dengan sangat baik ketika melakukan piket, sehingga kebersihan kelas dapat terjaga secara maksimal.

3) Pemisahan jenis sampah organik dan anorganik

Berdasarkan zat kimia yang terkandung di dalamnya, sampah dibagi menjadi 2 jenis yaitu : 1) Sampah anorganik adalah sampah yang umumnya tidak dapat membusuk, misalnya : logam/besi, pecahan gelas, plastik dan sebagainya. 2) Sampah organik adalah sampah yang pada umumnya dapat membusuk, misalnya : sisa-sisa makanan, daun-daunan, buah-buahan dan sebagainya. (Notoatmodjo, 2007:189-191)

Secara kognitif, siswa telah diajarkan untuk membiasakan memisahkan jenis sampah organik dan anorganik di sekolah baik melalui mata pelajaran yang berkaitan maupun pengetahuan yang diberikan oleh guru dikelas. Pengetahuan yang dimiliki siswa tentang memisahkan jenis sampah organik dan anorganik sudah cukup baik. Bentuk kepedulian siswa memelihara tempat pembuangan sampah yaitu setelah menyapu kelas, siswa terlihat memisahkan jenis sampah kemudian membuangnya ke tong sampah organik dan anorganik. Akan tetapi masih ada beberapa siswa yang terlihat membuang sampah tidak pada sesuai klasifikasi jenis sampah. Kemudian siswa mengangkut tong sampah anorganik yang penuh terisi sampah untuk dikumpulkan di belakang sekolah oleh petugas kebersihan sekolah.

4) Penyediaan Tempat Pembuangan Sampah di SMK Negeri 1 Adiwerna

Gunawan (2007:1) sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia yang begitu kompleks. Setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan

buangan atau sampah. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi terhadap barang atau material yang kita gunakan sehari-hari. Demikian juga dengan jenis sampah, sangat tergantung dari jenis material yang kita konsumsi. Oleh karena itu, pengelolaan sampah tidak bisa terlepas dari pengelolaan gaya hidup masyarakat.

Sampah memiliki banyak pengertian dalam batasan ilmu pengetahuan. Namun pada prinsipnya, sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam. Sampah ditampung dan dibuang setiap hari ditempat pembuangan yang memenuhi syarat karena membuang sampah tidak pada tempatnya akan dapat mengakibatkan penyakit dan akan mencemari udara disekitarnya. Mendidik anak untuk selalu membuang sampah pada tempatnya akan dapat menekan angka penyakit yang dapat muncul di lingkungan sekolah. Untuk itu peran sekolah sangat penting dalam hal penyediaan tempat pembuangan sampah, sebagaimana menurut Suwarna & Timotius (2009: 81), "Sektor pendidikan yang mengemban tugas mengubah perilaku manusia merupakan sektor yang strategis dalam mewujudkan manusia yang mampu berperilaku menciptakan lingkungan yang lestari, jika dilandasi etika, moral, dan hati nurani yang memiliki pemahaman dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan." Untuk menanggulangi jumlah sampah yang ada, maka SMK Negeri 1 Adiwerna menyediakan tempat sampah yang cukup untuk menampung sampah yang dihasilkan warga sekolah. Di setiap kelas tersedia satu tong sampah kecil dan satu tong sampah besar yang diletakkan di depan kelas. Selain itu, juga tersedia tong sampah yang terpisah antara sampah jenis organik dan anorganik.

Siswa adalah salah satu pendukung kebersihan kelas. Kebersihan sangat mempengaruhi konsentrasi belajar siswa. Jika kelas bersih, indah dan tertata rapi maka kemungkinan besar kenyamanan dalam proses pembelajaran akan tercapai. Dampak kebersihan kelas menjadi sangat penting mengingat pengaruhnya terhadap kenyamanan untuk proses belajar mengajar berlangsung.

5) Optimalisasi program kegiatan OPPLH

Sekolah hijau merupakan program yang memiliki kebijakan positif dalam pendidikan lingkungan hidup artinya dalam aspek kegiatannya mempertimbangkan aspek lingkungan. Selain itu sekolah hijau yaitu sekolah yang memiliki komitmen dan secara sistematis mengembangkan program-program untuk menginternalisasikan nilai-nilai lingkungan ke dalam seluruh aktifitas sekolah. Menurut Susilo (2001) "program sekolah hijau dikembangkan melalui lima kegiatan utama yaitu "1. Pengembangan kurikulum berwawasan lingkungan, 2. Peningkatan kualitas sekolah dan lingkungan sekitarnya, 3. Pengembangan pendidikan berbasis komunitas, 4. Pengembangan sistem pendukung yang ramah lingkungan dan 5. Pengembangan manajemen sekolah berwawasan lingkungan." Perilaku siswa dalam melaksanakan program kegiatan OPPLH itu terlihat ketika siswa mengikuti sosialisasi program LH oleh TIM PLH, serta siswa mengikuti kegiatan bersih-bersih taman sekolah. Selain itu, Bentuk karakter kepedulian siswa pada program kegiatan OPPLH adalah siswa tergabung dalam kegiatan program OPPLH, serta siswa aktif mengikuti agenda OPPLH, yaitu bersih-bersih taman, membuat tong sampah unik, kreasi barang bekas dan menanam tanaman hias di sekitar sekolah**.**

Dalam pelaksanaan kegiatan *go greenschool* di SMK Negeri 1 Adiwerna selama ini masih dijumpai berbagai permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan yaitu: 1) masih ada beberapa siswa yang terlihat belum sadar dalam memahami konsep sekolah berwawasan lingkungan hidup 2) masalah pendanaan untuk sarana dan prasasarana kegiatan *go green school*. 3) dukungan masyarakat dan instansi lain masih rendah.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Implementasi gerakan *Go Greenschool* di SMK Negeri 1 Adiwerna dalam meningkatkan karakter peduli lingkungan terwujud dalam kegiatan sekolah yang meliputi kebersihan dan keindahan kelas, kebersihan tempat pembuangan dan kebersihan dan keindahan taman. 2) Bentuk Karakter Kepedulian

siswa terhadap lingkungan dapat dilihat pada partisipasi siswa dalam melaksanaan gerakan *Go Green School.* 3) Hambatan yang dialami sekolah dalam pelaksanaan gerakan *Go Green School* ialah masih ada beberapa siswa yang terlihat belum sadar dalam memahami konsep sekolah berwawasan lingkungan hidup, masalah pendanaan untuk sarana dan prasasarana kegiatan *go green school* dan dukungan masyarakat dan instansi lain masih rendah. Adapun saran yang mungkin dapat menjadi pertimbangan persoalan di atas yaitu 1) mengarahkan para siswa agar memiliki antusiasme dan semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan Gerakan *Go GreenSchool* dan hendaknya menjalin kerjasama dengan orang tua siswa untuk mengimplementasikan pembiasaan peduli lingkungan di rumah. 2) Selain itu, sekolah juga diharapkan bisa menjalin mitra kerja yang konsisten memfasilitasi dan mendukung sekolah terkait dengan pelaksanaan Program tersebut 3) Meningkatkan program penyelenggaraan *workshop* atau sosialisasi atau pelatihan bertemakan lingkungan kepada masyarakat terbuka sehingga pemahaman tentang konsep sekolah berwawasan lingkungan dapat tersosialisasikan lebih luas. 4) meningkatkan monitoring dan evaluasi secara intensif terhadap pelaksanaan program yang sudah dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Syafri. 2008. *Alternatif Kebijakan Sekolah dalam Mewujudkan Program Go Green School sebagai Antisipasi Dampak Pemanasan Global*. Makalah disajikan dalam prosiding Seminar Nasional, Pertemuan Ilmiah Tahunan XI IGI Tahun 2008 di Universitas Negeri Padang, 22-23 November. Sukabina Press.

Adelia, Vera. 2010. *Cara Mengajar Anak di Luar Kelas*. Jogjakarta: Diva Press

Chapman D., Sharma, K. (2001). *Environmental attitudes and behavior of primary and secondary students in Asian cities: an overview strategy for implementing an eco- schools programme*. The Environmentalist, 21(4), pp. 265-272.

Gordon, D. E. 2010. Green Schools as High Performance Learning Facilities. Washington, D.C.: National Clearinghouse for Educational Facilities. Diakses dari http://www.ncef.org/pubs/greenschools.pdf pada tanggal 17 November 2017

Gunawan, Gugun. 2007. Mengelola Sampah Jadi Uang. Jakarta : Trans Media Pustaka

Hamzah, Syukri. 2013. *Pendidikan Lingkungan: Sekelumit Wawasan* Pengantar. Bandung: Refika Aditama.

MoE. 2011. *Guidelines for Adiwiyata: School which Care and Environment Cultured.* Jakarta: Ministry of Environment and the Ministry of National Education of the Republic of Indonesia.

MoE. 2013. Minister of Environment Regulation No. 05 of 2013 on Guidelines for Adiwiyata Program

Naim, Ngainun. 2012. Character Building Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa. Jakarta: Ar-Ruzz Media.

Neolaka A. 2008. *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta : Rineka Cipta

Notoatmodjo, Soekidjo. 2007. Kesehatan Masyarakat Ilmu & Seni. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Olson, S. L., & Kellum, S. 2003. The Impact of Sustainable Buildings on Educational Achievementm in K-12 Schools diakses dari

http://www.cleanerandgreener.org/download/sustainableschools.pdf pada 17 November 2017

Panduan Adiwiyata. 2012. *Panduan Adiwiyata Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan*. Kerjasama Kementrian Lingkungan Hidup dan Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan,

Paryadi, Sugeng. 2008. *Konsep Pengelolaan Lingkungan Sekolah (Green School)*. Modul. Cianjur.

Pratomo, Suko. 2009. *Model Pembelajaran Tematik dalam Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di Sekolah Dasar*. Jurnal Pendidikan Dasar No. 11 2009 Halaman 8-15. Bandung. Respository UPI.EDU. diakses Januari 2013

Ramli,et. 2012. *A Comparative Study of Green School Guidelines.* In Procedia Journal Social and Behavioral Sciences Vol. 50, hal 462–471.

Sulistyowati, Endah. 2012. *Implementasi Kurikulum Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Citra Aji Parama.

Soenarto. 2002. *Pedoman Manajemen Perlengkapan Sekolah, Pemeliharaan atau Perawatan.* Jakarta

Susilo,H. 2001. *Menggalakkan Pendidikan Lingkungan Hidup Di Sekolah Dasar "Sekolah Hijau"*. Malang : Universitas Negeri Malang.

Thomas Lickona. 1991. Educating for Character. New York: Bantam Books

Tim Adiwiyata Tingkat Nasional. 2011. *Panduan Adiwiyata Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan*. Kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Wiyani, Novan Ardy. 2012. *Manajemen Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasinya di Sekolah.* Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani

Worosuprojo, Suratman. 2009. *Merespon Perubahan Iklim Global Apresiasi Konsep Mitigasi dan Adaptasi*. dalam pidato pembukaan Seminar Nasional, Pertemuan Ilmiah Tahunan XI IGI tahun 2008 di Universitas Negeri Padang.

Wu Z. 2002. *Green schools in China*. The Journal of Environmental Education, 34(1), pp. 21-25.

http://nationalgeographic.co.id/berita/2012/10/potret-lingkungan-indonesia-kian-memprihatinkan

IMPLIKASI PROGRAM *ECOVILLAGE* DALAM MENGEMBANGKAN *CIVIC RESPONSIBILITY TERHADAP LINGKUNGAN*

Tasya Fildzah Shabrina
Departemen Pendidikan Kewarganegaraan
Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia
Email: tasyafildzah@gmail.com

ABSTRAK

Program *Ecovillage* merupakan salah satu program Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat yang bertujuan untuk mengembangkan desa berbudaya lingkungan di sekitaran Sungai Citarum. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini berusaha mengungkapkan implikasi penerapan Program *Ecovillage* terhadap pengembangan *civic responsibility* masyarakat Dayeuhkolot yang tinggal di kawasan Sungai Citarum. Agar hasil penelitian diperoleh secara maksimal, penelitian ini dilakukan di dua lokasi yakni Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dan seluruh desa yang ada di Kecamatan Dayeuhkolot dengan melibatkan subjek penelitian diantaranya Tim Pelaksana Program *Ecovillage* DLH Jawa Barat dan kader *Ecovillage* dari setiap desa di Dayeuhkolot. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan Program *Ecovillage* belum berjalan secara efektif karena masih ditemukan berbagai hambatan. Dampaknya, implikasi pelaksanaan Program *Ecovillage* belum sepenuhnya dapat membentuk kesadaran masyarakat Dayeuhkolot terhadap lingkungan Sungai Citarum.

Kata kunci: *ecovillage, civic responsibility,* lingkungan

PENDAHULUAN

Penurunan kualitas lingkungan terus terjadi, hal tersebut dikarenakan oleh berbagai faktor. Salah satu penyebab terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan ialah perilaku masyarakat dalam beraktivitas yang tidak memuliakan lingkungannya. Sungai Citarum menjadi bukti nyata pencemaran dan kerusakan lingkungan oleh ulah manusia. Kondisi Sungai Citarum yang kritis memberikan dampak buruk bagi masyarakat sekitar, banjir melanda apabila musim penghujan tiba. Hal tersebut dikarenakan terjadinya sedimentasi air atau pendangkalan sungai akibat tumpukan sampah. Sampah merupakan limbah dari aktivitas masyarakat dan menjadi permasalahan pelik serta belum ada cara penyelesaiannya yang signifikan.

Masyarakat yang hidup di sekitar Sungai Citarum pada umumnya masih minim kesadaran dan pemahamannya terhadap hukum lingkungan. Sikap dan perilaku masyarakat harus dibenahi dan dibina kembali khususnya dalam menjaga dan melestarikan Sungai Citarum. Lingkungan yang baik dan sehat akan mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dan taraf perekonomian masyarakat. Melihat hal

tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama dalam menangani masalah Sungai Citarum tersebut.

Seperti yang tertera dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 66 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan yang berbunyi:

(1) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
(2) Pendidikan lingkungan hidup dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan jalur informal.
(3) Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap kondisi lingkungan hidup dalam rangka mengembangkan cipta, rasa, karsa dan karya untuk memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekolah dan lingkungan sekitar, pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan sebagai muatan lokal pada pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Daerah.

Berdasarkan bunyi pasal di atas maka dapat ditarik sebuah intisari bahwa pemerintah memiliki usaha dalam menumbuhkan kesadaran dan pemahaman mengenai lingkungan yakni melalui pendidikan. Pendidikan dapat ditempuh secara formal, non formal maupun informal. Tujuan dari pendidikan ialah mengubah *mindset* dan perilaku. Maka program *Ecovillage* ini sebagai sarana pendidikan non formal bagi masyarakat Dayeuhkolot dalam menjaga dan melestarikan lingkungannya.

Ecovillage merupakan suatu kegiatan berbasis masyarakat di mana pengelolaan lingkungan dilakukan dengan melibatkan peran serta pemangku kepentingan di masyarakat (*steakholder*), dengan tujuan untuk menumbuhkan perilaku masyarakat berbudaya lingkungan pada 4 aspek, yaitu: ekologi, ekonomi, sosial-budaya dan spiritual. Program *Ecovillage* ini bertujuan untuk menjadikan Jawa Barat BESTARI (bersih, sehat, indah dan lestari) di tahun 2020. Maka melalui *Ecovillage* Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan masyarakat diharapkan mampu bekerjasama dalam menumbuhkan kesadaran, kepedulian dan rasa cinta terhadap lingkungan.

Program *Ecovillage* sebagai sarana pendidikan non formal memang menjadi hal urgensi dalam membentuk kedewasaan warga negara, khususnya terhadap lingkungan. Dalam Pendidikan Kewarganegaraan dijelaskan bahwa warga negara sedikitnya harus memiliki 3 kompetensi, yakni pengetahuan (*civic knowledge*), keterampilan (*civic skills*) dan watak yang berkarakter (*civic disposition*). Yang dikatakan warga negara yang cerdas dan baik dalam Pendidikan Kewarganegaraan ialah warga negara yang mengetahui akan hak dan kewajibannya. Sebagai warga negara yang baik sudah sepatutnya masyarakat Dayeuhkolot berpartisipasi dan berkontribusi dalam program *Ecovillage* tersebut.

Peran serta masyarakat Dayeuhkolot sangat diperlukan. Program *Ecovillage* tidak akan berjalan mulus apabila tidak ada respon dan partisipasi dari masyarakatnya. Agar dapat mendukung dan berperan aktif dalam suksesi program pemerintah ini, tentu saja masyarakat Dayeuhkolot harus memiliki bekal dasar dalam berpikir dan bertindak. Menyadari bahwa segala aspek kehidupan yang berkenaan dengan kepentingan umum merupakan tanggung jawabnya sebagai warga negara (Cogan dalam Djahiri, 2002: hlm. 92).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa eksistensi manusia akan bertahan apabila manusia tersebut mampu menanamkan tanggung jawab pada dirinya. *Civic responsibility* harus tumbuh sebagai integritas dan jati diri bangsa. Agar terwujudnya masyarakat yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, memang diperlukan proses pendidikan dan pembiasaan yang direalisasikan melalui program *Ecovillage* ini. *Ecovillage* diharapkan mampu membantu masyarakat dalam merubah *midset* dan pola perilaku dalam menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif sebagai pendekatannya. Hal ini dikarenakan fokus penelitian ditujukan terhadap kajian suatu perilaku manusia yang digambarkan melalui kata-kata. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Sugiyono bahwa:

> Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2013, hlm.1).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada kajian interpretatif data hasil penelitian dan tidak menggunakan kuantifikasi atau perhitungan statistik. Pengertian lebih lanjut mengenai penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

> *Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analyzes words, reports detailed views of informants, and conducts the study in a natural setting* (Creswell, 2012, hlm. 15).

Dalam pendapatnya tersebut di atas, Creswell menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan proses penelitian untuk memahami berdasarkan tradisi metodologi penelitian tertentu dengan cara menyelidiki masalah sosial atau manusia. Peneliti membuat gambaran kompleks bersifat holistik, menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan-pandangan para narasumber secara rinci, dan melakukan penelitian dalam situasi alamiah.

Ada pun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian menggunakan studi kasus diharapkan mampu mengeksplorasi fenomena-fenomena dan fakta-fakta pada saat peneliti melakukan penelitian dilakukan terhadap implementasi program *Ecovillage*. Vredenbergt mengemukakan:

> studi kasus *(case study*) adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan *(wholeness)* dari objek, artinya data yang dikumpulkan dalam rangka studi kasus sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi. Tujuannya adalah untuk memperkembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai objek yang bersangkutan yang berarti bahwa studi kasus harus disifatkan sebagai suatu penelitian yang eksploratif (dalam Creswell, 1984, hlm. 38).

Studi kasus dalam pendekatan kualitatif dianggap tepat karena penelitian lebih terfokus pada masalah dari implikasi *civic responsibility* melalui program

Ecovillage untuk masyarakat Dayeuhkolot. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus ini akan lebih luas dan mendalam mengembangkan fenomena di lapangan.

HASIL PENELITIAN

1. Proses Pelaksanaan Program *Ecovillage* Yang Dilakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Dalam Menumbuhkan *Civic Responsibility* Pada Masyarakat Dayeuhkolot Terhadap Lingkungan

Ecovillage merupakan program dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup yang berupaya untuk mengatasi permasalahan Sungai Citarum. Pelaksanaan program *Ecovillage* sudah dimulai sejak bulan Mei 2014 lalu. *Ecovillage* merupakan suatu kegiatan berbasis masyarakat di mana pengelolaan lingkungan dilakukan dengan melibatkan peran serta pemangku kepentingan di masyarakat (*steakholder*), dengan tujuan untuk menumbuhkan perilaku masyarakat berbudaya lingkungan pada 4 aspek, yaitu: ekologi, ekonomi, sosial-budaya dan spiritual. Dinas Lingkungan Hidup memberikan sosialisasi, pelatihan dan pembinaan secara berkala kepada masyarakat Dayeuhkolot tentang cara mengelola, menjaga dan melestarikan lingkungan. Tidak lepas begitu saja, Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan *controling* dan evaluasi kepada masyarakat Dayeuhkolot yang bergabung dalam program *Ecovillage* guna melihat perkembangan perubahan *mindset*, sikap dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan.

2. Kendala Dan Hasil Yang Dicapai Dalam Pelaksanaan Program *Ecovillage* Dalam Menumbuhkan *Civic Responsibility* Pada Masyarakat Dayeuhkolot Terhadap Lingkungan

Kendala yang dihadapi oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat ialah masih adanya masyarakat yang kurang pro-aktif dalam pelaksanaan kegiatan program *Ecovillage* ini. *Controling* dan evaluasi masih sukar dilakukan karena komunikasi diantara pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan *steakholder* masyarakat belum berjalan dengan baik. Masyarakat

Dayeuhkolot notabene pekerja atau buruh pabrik yang masih sukar dikondisikan. Hasil yang diperoleh pada program *Ecovillage* belum seluruhnya maksimal, akan tetapi 1 diantara 6 desa yang berada di wilayah Dayeuhkolot sudah mulai mengarah pada desa berbudaya lingkungan. Hal tersebut ditunjukkan dengan sudah adanya bank sampah di wilayah desa Bojongsoang, rutin melakukan kerja bakti dan dibentuknya kelompok-kelompok pencinta lingkungan.

3. Implikasi *Civic Responsibility* Masyarakat Dayeuhkolot Terhadap Lingkungan

Meski dalam praktiknya masih terdapat hambatan, hal tersebut tidak menjadikan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat lepas tangan terhadap program *Ecovillage* ini. Program *Ecovillage* akan terus berjalan selama masa kepimpinan Gubernur Ahmad Heryawan, karena penyelesaian masalah lingkungan menjadi salah satu *goal* dari visi misinya. Elemen masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan program *Ecovillage* memang belum seluruhnya berperan aktif. Hal tersebut disebabkan sebagian besar masyarakat Dayeuhkolot berprofesi sebagai pekerja atau buruh, sehingga kegiatan sosialisasi, pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat belum optimal. Sementara di sisi lain, bagi masyarakat Dayeuhkolot yang sudah mengikuti program *Ecovillage* masih terdapat beberapa partisipan yang *inkonsistensi* dalam menggalakkan kegaiatan ini kepada masyarakat sekitarnya. Padahal pelatihan dan bimtek mengenai desa berbudaya lingkungan sudah diberikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih lemahnya kesadaran *civic responsibility* dari *steakholder* masyarakat Dayeuhkolot dalam menjaga dan melestarikan lingkungan secara bersama-sama.

PEMBAHASAN

1. Proses Pelaksanaan Program *Ecovillage* Yang Dilakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Dalam Menumbuhkan *Civic Responsibility* Pada Masyarakat Dayeuhkolot Terhadap Lingkungan

Segala bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, semata-mata untuk memecahkan permasalahan publik. Pemerintah bergerak mencari solusi dari pemasalahan harus berdasarkan kebutuhkan masyarakat (Dunn, 2003: hlm. 2).

Program *Ecovillage* merupakan salah satu kebijakan publik yang dilaksanakan guna menyelesaikan permasalahan lingkungan yang terjadi di Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat berupaya untuk menjalin kerjasama dengan orang-orang yang memiliki peran dalam masyarakat agar sama-sama mendukung dan melaksanakan program desa berbudaya lingkungan.

Berawal sejak bulan Mei 2014 Pemerintah Provinsi Jawa Barat dibawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Heryawan mulai mencari solusi, merancang program dan menggiatkan masyarakat Jawa Barat untuk peduli akan lingkungan alam. Berbagai kegiatan dan program-program mengenai peduli lingkungan hidup digalakkan, yang salah satunya ialah *Ecovillage.* Program *Ecovillage* menjadi program unggulan yang memiliki perhatian terbesar dari pemerintah. Selain jumlah dana yang digelontorkan pemerintah cukup besar, namun program *Ecovillage* ini dianggap mampu menyentuh elemen masyarakat langsung di lapangan dan adanya pengawasan khusus berkala.

Melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, mulanya program *Ecovillage* ini disosialisasikan kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya yang tinggal dibantaran Sungai Citarum. Mengingat program *Ecovillage* ini bersinergitas dengan Program Gerakan Citarum Bestari, maka proses sosialisasi dilakukan bersamaan. Sosialisasi dijadikan sarana belajar bagi masyarakat untuk mengetahui dan memahami suatu nilai-nilai dan norma-norma agar munculnya kesadaran untuk berpartisipasi pada kelompoknya tersebut (David A. Goslin, 2008).

Tidak seluruhnya masyarakat Dayeuhkolot dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi program *Ecovillage* ini, akan tetapi partisipannya bersifat perwakilan. Setiap desa dari Kecamatan Dayeuhkolot diminta 6 sampai 10 orang perwakilannya untuk diikut sertakan dalam pelatihan dan bimtek mengenai kepedulian lingkungan. Pelatihan dan bimtek diberikan oleh instruktur lapangan dari Dinas Lingkungan Hidup. Materi yang diberikan berupa gerakan persuasif bagi masyarakat dalam menjaga lingkungan, seperti kerja bakti, pengelolaan sampah dan reboisasi. Setiap perwakilan desa diberikan *Ecovillage coaching* yang menjadi kepanjangan tangan dari DLH Provinsi Jawa Barat agar mudah melakukan komunikasi dan

pengontrolan lokasi dari desa-desa berbudaya lingkungan tersebut. Diharapkan kelompok masyarakat pada program *Ecovillage* dapat menyebarluaskan informasi dan pelatihan yang didapatnya pada masyarakat desanya masing-masing, guna untuk terwujudnya Jawa Barat Bestari melalui desa berbudaya lingkungan.

2. Kendala Dan Hasil Yang Dicapai Dalam Pelaksanaan Program *Ecovillage* Dalam Menumbuhkan *Civic Respo*

3. *nsibility* Pada Masyarakat Dayeuhkolot Terhadap Lingkungan

Hambatan menjadi hal yang lumrah ditemukan dalam suatu kegiatan atau pelaksanaan program, seperti *Ecovillage* ini. Tentu segala bentuk kesadaran sikap dan perilaku individu yang berpegang pada prinsip dan moral merupakan suatu bentuk dari tanggung jawab (Hermawan, 2013). Hambatan atau kendala yang terjadi pada program *Ecovillage* tidak terlepas dari *human error* atau kesalahan teknis pelaksanaan.

Kelompok desa berbudaya lingkungan dari masing-masing desa yang sudah diberikan pelatihan dan bimtek secara rutin seharusnya mampu mengaplikasikan yang didapatnya pada lingkungan masyarakatnya. Tapi pada realitasnya, masih terdapat beberapa kelompok *Ecovillage* yang belum menjalankan hal tersebut. Warga negara sebagai bagian dari masyarakat seharusnya memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan keutamaan dan kebajikan (Syaifullah, 2008: hlm. 45). Jika masyarakat yang tergabung dalam kelompok *Ecovillage* itu memiliki integritas dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungannya, tidak akan ada kendala dalam pelaksanaan program ini.

Memperkuat jati diri dan bersikap mandiri sebagai bentuk kesadaran, merupakan indikator dari *civic responsibility* (Djahiri, 2002: hlm. 22). Meski masih belum optimalnya *goal* yang ingin dicapai dari program *Ecovillage* ini, setidaknya ada sedikit hasil yang ditemukan dari program tersebut. Satu dari enam desa yang ada di Kecamatan Dayeuhkolot sudah bergerak mandiri dalam melaksanakan desa berbudaya lingkungan. Kelompok *Ecovillage* yang diberikan pelatihan dan bimtek oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat di desa tersebut perlahan-lahan mulai mempraktikan apa yang didapatnya. Seperti salah satunya, membuat bank sampah sehingga sampah-sampah tidak lagi dibuang ke sungai melainkan diolah

menjadi prakarya atau pupuk organik. Bantaran Sungai Citarum mulai ditanami pohon berbatang keras, agar resapan air bisa terjaga.

Memang belum banyak hasil yang diperoleh dari program *Ecovillage.* Tapi besar harapan pada kelompok *Ecovillage* dapat melaksanakan pembiasaan tersebut secara konsisten dan progresif, serta makin memupuk kesadaran untuk peduli lingkungan. Menularkan kebajikan terhadap sesama merupakan tugas dari kita bersama.

4. Implikasi *Civic Responsibility* Masyarakat Dayeuhkolot Terhadap Lingkungan

Belum terasa signifikansi dari perubahan *mindset* dan perilaku masyarakat Dayeuhkolot sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungannya. Hal tersebut dibuktikan masih banyak desa dan masyarakatnya yang belum paham dan sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Lingkungan alam baik yang hidup maupun tidak hidup, semuanya menunjang segala aspek kehidupan manusia (Sumintarsih, 1993:15). Peduli dalam menjaga dan melestarikan lingkungan senyatanya ialaj untuk keberlangsungan hidup dari manusia itu sendiri.

Seperti yang sudah termaktub dalam Pasal 67 BAB X Bagian Kedua dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan pasal di atas, idealnya masyarakat sudah mengetahui tentang hukum lingkungan dan sadar dalam menjaga lingkungan.

Dikatakan manusia, apabila bisa hidup dengan manusia lain disekelilingnya dan mempunyai jiwa sosial serta mampu bergaul dengan manusia lainnya (Mansyur, 1997: hlm. 31). Masyarakat Dayeuhkolot yang hidup bersamaan sudah semestinya saling mengingatkan dan menjaga, sebagai rasa tanggung jawab serta kesadaran dalam menjaga lingkungan. Program *Ecovillage* diberikan sebagai Pendidikan Kewarganegaraan non kulikuler pada masyarakat Dayeuhkolot sejauh ini belum terasa implikasi nyatanya dalam perubahan lingkungan.

KESIMPULAN

1. Program *Ecovillage* adalah suatu kegiatan berbasis masyarakat di mana pengelolaan lingkungan dilakukan dengan melibatkan peran serta pemangku kepentingan di masyarakat (*steakholder*), dengan tujuan untuk menumbuhkan perilaku masyarakat berbudaya lingkungan pada 4 aspek, yaitu: ekologi, ekonomi, sosial-budaya dan spiritual. Proses pelaksanaan dari program *Ecovillage* yakni melalui sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis pada masyarakat Dayeuhkolot agar peduli terhadap lingkungan.
2. Kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan program *Ecovillage* masih terdapatnya anggota kelompok *Ecovillage* dari beberapa desa yang inkonsisten dalam praktiknya di lingkungan masyarakatnya. Hasil yang dicapai belum terlalu signifikan, namun terdapat satu desa yang perlahan sudah mulai mempraktikan desa berbudaya lingkungan berdasarkan hasil dari pelatihan dan bimtek yang diberikan.
3. Implikasi *civic responsibility* terhadap lingkungan masih belum terasa perubahannya. Masyarakat belum seluruhnya sadar dan peduli terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Masih kurangnya partisipasi dan keikutsertaan masyarakat Dayeuhkolot dalam kegiatan yang berkenaan dengan lingkungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kompetensi warga negara kita belum seutuhnya tercapai.

REFERENSI

Buku

Creswell, JW. (2010). *Reseach Design Pendekatan, Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.* Yogyakarta: Pustaka pelajar

David A. Goslin. 2008. *Engaging Minds: Motivation and Learning in American's School.* Lanham Maryland an Oxford: A Scarecrow Education Book.

Djahiri, Kosasih (1978). *Pengajaran Studi Sosial/IPS, Dasar-dasar Pengertian Metodologi Model Belajar Mengajar Ilmu Pengetahuan Sosial*. Bandung: LPPP-IPS FKIS IKIP Bandung.

Dunn, W.N. (2000). *Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua).* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Mansyur, M. Cholil. (1993). *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*. Surabaya: Usana Offset Printing.

Nurmalina, K dan Syaifullah. (2008). *Memahami Pendidikan Kewarganegaraan.* Bandung: Laboratorium PKn.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.

Sumirtasih, dkk. (1991). *Kearifan Tradisional Masyarakat Pedesaan dalam Hubungannya dengan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Departemen P dan K.

Jurnal

Hermawan, I.C. (2013). *Jurnal Kajian Pendidikan: Revitalisasi Pendidikan Politik dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia.* Tidak diterbitkan.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 66 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan.

MENELISIK DIAMETRAL KERUSAKAN LINGKUNGAN BERKACA DARI ALIRAN ECO FEMINISM SEBAGAI BENTUK GERAKAN ECOLOGICAL CITIZENSHIP

Oleh:
Dewi Gunawati[1]
[1]Program Studi Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, FKIP,Universitas Sebelas Maret Surakarta, Email: dewigunawatiuns@yahoo.co.id

ABSTRAK

Makalah ini berpijak dari permasalahan lingkungan yang berwujud Pemanasan global, perubahan iklim, bencana banjir, polusi udara, deforestasi dan degradasi alam merupakan bentuk nyata kerusakan alam yang tidak netral gender.Ketika terjadi kerusakan alam, perempuan menjadi pihak yang paling beresiko terkena dampaknya. Dalam dimensi publik banyak kebijakan pemerintah yang masih belum terpatri pada kepentingan keseimbangan hidup. Paper ini bertujuan mengkaji diametral kerusakan lingkungan dalam kajian ekofeminism. Ekofeminisme mencermati tindak manusia sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam ekosistem lokal dan global, dimana terdapat hubungan dialektis antara perempuan dan eksploitasi terhadap alam.Metode Penulisan makalah adalah deskriptif kualitatif, melalui penelusuran literature yang terkait dengan kajian . Pembahasan: Ekofeminisme merupakan bentuk gerakan *ecological citizenship* yang berbasis filosofi bumi yang keberlanjutan dimana sifat-sifat feminitas dan segala aspeknya mendominasi. Gerakan ecological citizenship mewujud dalam berbagai bentuk gerakan "chipko", "Amigrasia", "Salimist"," "gema" dll yang tumbuh diberbagai belahan dunia. Berkembangnya gerakan tersebut menyiratkan tingginya kesadaran feminis yang bangkit untuk berjuang dalam menyelamatkan bumi " *safe the earth*" sehingga tercipta tercipta *sense of belonging* kehidupan yang *eco-friendly* dan *Womenfriendl*y dalam melestarikan lingkungan yang berkelanjutan.Saran: Aliran ekofemisme melahirkan berbagai gerakan penyelamatan perempuan yang merupakan pengejawantahan *ecological citizenship yang terfokus pada* internalisasi pentingnya kesadaran lingkungan kedalam seluruh aspek kehidupan manusia yang diejawantahkan dalam *Environmental Knowledge (*Pola pikir yang 'lebih memahami', humanis, empati, ini identik dengan pola pikir ekofeminisme yang mencoba membuat terobosan keadilan untuk alam.

Key word: Kerusakan lingkungan, eco feminist, ecological citizenship

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH

Isu kerusakan lingkungan merupakan isu yang hangat dan urgensif seiring dengan munculnya fenomena global warming dan perubahan iklim. *Climate change*

is the one of the most pressing issues of this generation, forcing the global community. (Millade,2009) Considering the effect of climate change really threatening the living organism's safety on earth, an attempt is required to deal with such the effect. It is widely known that the forestry sector plays an important role in climate change regime.The world's forest ecosystem hold more than half of all terrestrial carbon. (Smith et al.,1993). Nagra (2010) bahkan menganggap kerusakan lingkungan di abad sekarang adalah bencana gobal (*global catastrope*) dilihat dari luasnya dampak yang ditimbulkan yang melewati sekat-sekat territorial. Dua jenis bencana akibat rusaknya daya dukung lingkungan adalah: *pertama*, kerusakan karena faktor internal, yakni kerusakan yang berasal dari alam sendiri,yang merupakan bagian dari proses alam, kejadiannya dalam waktu singkat namun dampaknya dirasakan dalam waktu lama. Menyikapi perihal ini perlu adaptasi terhadap bencana yang akan datang melalui managemen yang baik. Tanggap darurat terhadap kemungkinan terjadinya bencana. *Kedua*, faktor eksternal yang dipicu oleh perilaku manusia.(Pramudya Sunu,2001).

Masalah sanitasi terkait dengan posisi perempuan sebagai subyek atau pelaku pemanfaat hasil pembangunan. Secara sosiologis masalah yang muncul perempuan kurang terlibat dalam berbagai aktivitas pengelolaan lingkungan hidup dalam fase perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Kurangnya keterlibatan perempuan disebabkan masih melekatnya *stereotype* gender dan *sub ordinasi* peran perempuan dan laki-laki dalam dalam kultur masyarakat di Indonesia. Masalah tersebut diperparah oleh minimnya komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan termasuk pengelolaan limbah dan pencegahan pencemaran lingkungan. Foskey menyebut isu akses perempuan terhadap air sebagai persoalan hidup dan mati. Fenomena ini terjadi karena perempuan lebih banyak sebagai obyek ,pemakai bahan konsumsi rumah tangga tanpa adanya pengetahuan tentang bahaya bahan-bahan tersebut terhadap diri, keluarga dan lingkungannya. Kenyataan tersebut menjelaskan bahwa keberadaan perempuan dapat berpotensi memperlambat proses pembangunan atau bahkan perempuan menjadi beban dalam pembangunan. Namun persoalannya kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi jika perempuan tidak memiliki akses pada pembuatan

kebijakan tentang air. Hal ini dikarenakan, menurut Whited, laki-laki tetap menjadi pembuat keputusan utama di dalam komunitas, termasuk dalam hal pengelolaan air.

Ilustrasi diatas adalah sekelumit gambaran nyata diametral kerusakan lingkungan yang dalam kajian ekofeminism terfokus pada sebuah hubungan dialektis antara perempuan dan eksploitasi terhadap alam. Melalui tulisan ini akan disuguhkan bentuk-bentuk gerakan *ecological citizenship* yang berkontribusi dalam mendukung penyelamatan terhadap kerusakan lingkungan sebagai pengejawantahan aliran ekofeminisme.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah diametral kerusakan lingkungan dalam bingkai aliran ecofeminism
2. bagaimanakah pengejawantahan aliran ecofeminisme sebagai sebuah gerakan ecological citizenship?

TUJUAN

1. Mendeskrisikan diametral kerusakan lingkungan dalam bingkai aliran ecofeminism
2. Mengeksplorasi pengejawantahan aliran ecofemisme sebagai sebuah gerakan ecological citizenship

METODE PENELITIAN

Tulisan in mengacu pada penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskripstif,eksploratif-analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder,yang berupa bahan hukum sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji,2007:13-14).Bahan hukum sekunder meliputi jurnal-jurnal dan buku yang mengkaji diametral kerusakan lingkungan dalam dimensi . Data sekunder ini diperoleh melalui studi pustaka.Teknik analisis data adalah penafsiran hukum gramatikal. Validasi data dilakukan melalui kritik sumber.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.DIAMETRAL KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM BINGKAI ECOFEMINIST

Kajian isu perempuan dan feminism sudah berlangsung lama, Isu perempuan merupakan masalah strategis yang mengkaji penempatan perempuan dalam bingkai sebuah teori. Pada akhir tahun 1960-an khususnya 1970-an di Amerika dan Eropa para feminis banyak melakukan kritikan terkait netralitas hukum. Yang sejak itu mereka berusaha membentuk sebuah teori hukum yang berperspektif feminis, yang beranggapan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang berpihak pada perempuan (dan tentunya siapa saja yang dilemahkan untuk kemudian melawan penindasan tersebut) (Dony, 2006:3)

Setelah membuktikan ketidakmungkinan netralitas dan objektivitas hukum, para feminis mengusulkan perspektif hukum yg berpihak kepada perempuan. Feminisme muncul untuk menanggapi masalah ketimpangan antar jenis kelamin, diskriminasi, penindasan, dan kekerasan ter-hadap perempuan. Aliran feminisme dibagi dalam empat aliran yang meliputi: feminism liberal, feminism radikal, feminism cultural dan feminism post modern. Feminisme liberal menyatakan bahwa setiap orang memiliki otonomi, termasuk perempuan. Aliran ini menekankan adanya kesetaraan, laki laki dan perempuan secara rasional setara, jadi mereka harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk menetapkan pilihan rasional. Menurut mereka sistem hukum dan politik sangat patriarkis dan karenanya ada dua pilihan yang tersedia bagi perempuan untuk dapat memperbaikinya. Yang pertama, menuntut adanya kesetaraan yang didasarkan pada kesamaan dengan laki-laki yang kedua mendapatkan *"special treatment*" yang didasarkan pada adanya perbedaan esensial mereka. Dalam keberjalanannya seiring munculnya berbagai kerusakan alam, gerakan feminis turut serta berkontribusi didalamnya. Keterkaitan antara perempuan dan alam adalah merupakan mata uang yang tidak dapat dipisahkan, saling berhubungan, antara dominasi terhadap perempuan dan dominasi terhadap alam. Kehancuran ekologi saat ini akibat pandang-an dan praktek yang andosentris.

Francoise d'eaubonne dalam bukunya yang berjudul ' *Le Feminisme ou la mort*" mengungkapkan pandangannya yang langsung antara eksploitasi alam dengan penindasan perempuan. Pembebasan salah satunya tidak bisa dilakukan tanpa membebaskan penindasan yang lain. Warren menjelaskan bahwa keyakinan,

nilai, sikap dan asumsi dasar dunia barat atas dirinya sendiri dan orang-orangnya dibentuk oleh bingkai pikir konseptual patriarki yang menindas yang bertujuan untuk menjelaskan membenarkan dan menjaga hubungan antara dominasi dan subordinasi secara umum antara laki-laki dan perempuan pada khususnya. Implikasi pendapat warren adalah,jika laki-laki diberi kekuasaan atas alam,otomatis ia akan mengendalikan perempuan,oleh karena itu pembebasan diperlukan baik bagi perempuan maupun penyelesaian masalah ekologis dalam masyarakat dengan mengubah hubungan sosial dan nilai-nilai yang mendominasi.(Rosemarie Putnam Tong, 2005:361)

Ekogical feminism bukanlah gerakan atau filsafat feminisme umum tetapi feminisme yang membatasi khusus fokus pada isu-isu lingkungan yang memanfaatkan model gerakan akar rumput (*grass root movement*) , wacana (*discourse*) maupun perombakan/penguatan ide-ide filosofis yang memiliki rumusan jelas tentang risalah etika lingkungan. (Rahmat dwi, 2012: 121) Gerakan feminisme dan ekologis mempunyai tujuan yang saling memperkuat, keduanya hendak membangun pandangan terhadap dunia prakteknya yang tidak berdasarkan model-model yang patriarkhis dan dominasi-dominasi. Kaitan antara feminisme dan lingkungan hidup adalah historis kausal. Para filsuf ekofem-inisme berpendapat konsep dasar dari domi-nasi kembar terhadap alam dan perempuan adalah dualisme nilai dan hirarki nilai. Maka peran etika feminisme dan lingkungan hidup adalah mengekspos dan membongkar dual-isme ini serta menyusun kembali gagasan filosofis yang mendasarinya (Darmawati, 2002)

Griffin menyatakan bahwa *environmental-isme* ekologis atau yang ilmiah menekankan pada arti pentingnya mempertahankan ling-kungan biologis atau fisik; dan bahwa ling-kungan humanistik menekankan ketidakco-cokan ilmu modern dan perkembangan teknologis dengan prinsip-prinsip kemanu-siaan (Griffin, 1978). Sementara itu, kalang-an feminis radikal sendiri sangat memberikan respek kepada alam yang non-manusia, seba-gaimana yang terlihat dalam karya Firestone, '*The Dialectic of Sex'* (1970) yang mengkaitkan antara feminisme dengan ekologi. Kalangan feminis radikal lainnya mengkaitkan antara ekologi dengan komunitas spiritual perem-puan bersama dengan alam yang non-manusia (Humm, 2002).

Ekofeminisme adalah sebuah istilah baru untuk gagasan lama yang tumbuh dari berbagai gerakan sosial yakni gerakan femi-nis, perdamaian dan ekologi pada tahun 1970-an dan awal 1980-an. Namun baru menjadi popular dalam kaitannya berbagai proses dan aktivitas menentang perusakan lingkungan hidup, yang semula dipicu oleh bencana eko-logis yang terjadi secara berulang-ulang. Ekofeminisme merupakan suatu keterkaitan dan keseluruhan dari teori dan praktek. Hal ini menuntut kekuatan khusus dan integritas dari setiap unsur hidup. Bila kita berbicara tentang ekofem-inisme maka kita berbicara tentang adanya ketidakadilan di dalam masyarakat terhadap perempuan. Ketidakadilan terhadap perem-puan dalam lingkungan ini berangkat per-tama-tama dari pengertian adanya keti-dakadilan yang dilakukan oleh manusia ter-hadap non-manusia atau alam. Karena per-empuan selalu dihubungkan dengan alam maka secara konseptual, simbolik dan linguistik ada keterkaitan antara isu feminis dan ekologis.(Tri Marheni, 2012)

Sherry B Ortner menjelaskan bahwa tidak mudah bagi perempuan untuk memutuskan kedekatannya dengan alam sebab praktis hampir semua kebudayaan menunjukkan bahwa dibanding dengan laki-laki perempuan lebih dekat dengan alam. Setidaknya ada tiga alasan yang mendasari hal tersebut: *pertama,* filospfi perempuan"lebih terlibat dalam waktu yang lebih lama dengan spesies kehidupan adalah tubuh perempuan yang merawat masa depan kemanusiaan, *kedua*, tempat perempuan adalah domestic yakni tempat bayi-bayi yang ditransformasi menjadi makhluk cultural, *ketiga,* psikologi perempuan yang dibentuk sesuai dengan fungsi ibu melalui sosiologi dirinya sendiri yang condong berpikir konkret,relasional dan lebih khusus dibandingkan laki-laki. (Rahmat dwi, 2012: 120).Secara garis besar terdapat tiga karakteristik cara berpikir feminism yang meliputi: *Pertama*, imanensi (i*mmanance*) sebagai kakuatan yang datang dari dalam, dimana menghambat kehendak untuk menguasai, *kedua,* keterhubungan (*interconnections*) yakni hubungan antara badan dan jiwa dimana mereka menyatu, *ketiga,* gaya hidup yang mengasihi (*compassionate life style*)(Rahmat Dwi, 2012: 123)

Menurut Strong (1995) kunci untuk memperbaiki bumi terletak pada penghorma-tan terhadap hukum alam yang dipahami oleh masyarakat asli tradisional. Masyarakat ini berbicara dengan kumpulan instruksi yang asli yang

diberikan kepada mereka oleh Sang Pencipta. Mereka mengetahuinya dan meng-hidupi hukum ini, yang menuntun relasi manusia dengan empat elemen pemberi ke-hidupan, yakni, tanah, air, udara, dan api (energi); serta mengajarkan penghormatan kepada kesatuan dan kesinambungan dari seluruh kehidupan. "Tidak ada jalan lain un-tuk perdamaian kecuali semua orang harus meninggalkan gerbang istana persepsi yang relatif, turun ke padang rumput, dan kembali ke jantung alam yang non-aktif. Marilah kita katakana bahwa kunci perdamaian terletak dekat di bumi".

2.PENGEJAWANTAHAN ALIRAN ECOFEMINIST YANG MEWUJUD SEBAGAI GERAKAN ECOLOGICAL CITIZENSHIP

Ekologi berasal dari bahasa Yunani Oikos, yang berarti rumah tempat tinggal; tempat tinggal semua perem-puan dan laki-laki, hewan, tumbuhan, air, tanah, udara, dan matahari (Isshiki, 2000). Ekologi mempelajari hubungan antara manu-sia dan lingkungan hidup; mengkaitkan antara ilmu alam dengan ilmu kemanusiaan secara interdispliner. Kesadaran ekologi hen-dak melihat kenyataan dunia ini secara integral holistik, bahwa dunia yang satu itu ternyata mengandung banyak keanekaragaman (Buntaran, 1996). Ekologi sekaligus merupakan reaksi kritis atas pandangan umum terhadap dunia yang dualistis-dikotomis.

Berbagai aliran yang mengkaji lingkungan bermunculan seiring perubahan zaman, biosentrisme yang mengajarkan perubahan (transformasi) etika yang bermula dimiliki manusia dalam wujud nilai, kebaikan tata karma dan orientasi hidup yang hanya berlaku pada lingkungan manusia,biosentrisme memperluas konteks bahwa etika manusia dalam korelasinya dengan alam semesta. Namun dalam keberjalanannya dianggap timpang, aneh karena melakukan pembiaran terhadap alam untuk berkembang biak sehingga berlepas tangan dari dominasi manusia, disini terlihat adanya sebuah *missing link* dalam korelasi manusia dan alam.

Ecological Citizenship " there is a consensus over the need for active ecological citizenship because of the recognition that the transition to a sustainable society requires more than institutional restructuring; it also needs a transformation in the beliefs, attitudes and behaviour of individuals. (Carter, 2007, p.65)

Kewarganegaraan ekologis menuntut agar kita memikirkan kewarganegaraan dengan cara-cara agak baru". *environmentalism* argues for a managerial approach to environmental problems, secure in the belief that they can be solved without fundamental changes in present values or patterns of production and consumption. … *ecologism* holds that a sustainable and fulfilling existence presupposes radical changes in our relationship with the non-human natural world, and in our mode of social and political life. (John Barry ett all,2012 : pp2-3) .

Other aspects of ecological citizenship follow naturally from this definition:*Duty and responsibility*: "The principal ecological citizenship obligation is to ensure that ecological footprints make a sustainable, rather than an unsustainable, impact." Unlike the rights and responsibilities which exist under contemporary citizenship, this obligation is non-reciprocal and asymmetrical because "the ecological footprints of some members of some countries have a damaging impact on the life chances of some members of other countries" (Dobson, 2004, p.12).

Virtue: "The first virtue of ecological citizenship is justice … a just distribution of ecological space" (p.18).

Citizenship and the private realm: Contemporary citizenship is exclusively associated with the public sphere; ecological citizenship, however, "is all about everyday living" wherein we each create our ecological footprint. Therefore the activity we carry out in "the private realm is important … because it is a site of citizenship activity" (p.22).

This final element completes the logic of ecological citizenship because "the private realm generates the space – the ecological footprint – that gives rise to the obligations of ecological citizenship itself" (p.23).

As I say, this is a radically new understanding of citizenship. Undoubtedly, libertarians would react with horror at the idea that our behaviour in the private realm could be the focus of attention in the way just described. But as Dobson notes, "if ecological citizenship is to be related to the responsibilities incurred by the over-occupation of ecological space, then these responsibilities must at some point relate to individual citizens" (p.7).

Mencermati kajian ecological citizebship menurut Dobson diatas, dapat diperjelas bahwa ruang lingkup eclogi citizenship berkutat pada pengetahuan lingkungan secara an sih yang dilakukan mellaui pemahaman yang holistic terhadap permasalahan aktual lingkungan. Lingkungan merupakan sebuah sistem (s*ystema*) yang dimaknai sebagai kesatuan bagian–bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Menurut Tallcot Parson, sistem merupakan interdependensi antar bagian, komponen dan proses yang mengatur hubungan-hubungan tersebut. Berdasarkan teori sibenertika Parson, sistem sosial merupakan suatu sinergi antara berbagai sub sistem sosial yang saling mengalami ketergantungan dan keterkaitan. Individu terikat dalam suatu sistem yang memiliki hubungan saling keterkaitan, interaksi dan saling ketergantungan.

Lingkungan merupakan sebuah kesatuan komponen yang berisi daya dukung dan daya tamping lingkungan, jika daya tamping tidak sepadan dengan daya dukung maka keseimbangan ekologis akan mengalami gangguan yang berbentuk destruksi lingkungan. Persoalan lingkungan tidak bisa dilepaskan dari persoalan sistemik yang seharusnya perlu dibongkar dan kemudian dirumuskan bentuk penyelamatan lingkungan secara terintegralistik. Upaya perbaikan lingkungan harus diawali dari keinginan bersama yang masuk dalam satu sistem secara komprehensif, sebagaimana logika rasional.

Berdasarkan teori relasi individu-sistem yang dikemukakan oleh Talcot Parsons, dapat dipahami bahwa upaya pengembangan kesadaran lingkungan bisa dilakukan melalui dua pendekatan. *Pertama*, mengacu pada pendekatan individu, dinyatakan bahwa baik buruknya lingkungan bergantung pada perilaku individu. Mengadaptasi dari Parsons, bisa dinyatakan bahwa individu bisa melakukan peran penting, baik merusak maupun memlihara lingkungan sebab individu memiliki perilaku voluntaristik (Susilo, 2008:177).

Perilaku voluntaristik mengandung pengertian bahwa setiap individu menggunakan bermacam–macam sarana untuk mencapai tujuan. Sekalipun ide Talcott Parsons awal kalinya menyangkut kajian sosiologi secara umum, artinya ia tidak membahas secara khusus dalam konteks lingkungan, tetapi konsep teoritis

Parsons bisa diterapkan dalam dunia ekologi. Tidak sedikit perilaku "merusak" lingkungan individu tidak lepas dari tujuan–tujuan pemupukan kekayaan, ketimbang motovasi kolektif (Susilo, 2008:178). *Kedua*, sebaliknya berkaitan dengan penjelasan sistem dalam kaitan denga lingkungan, bisa dinyatakan bahwa kerusakan lingkungan tidak lepas dari pola struktur sosial dan sistem sosial dimana terbentuk dari individu/ kelompok yang berinteraksi. Persoalan lingkungan tidak mungkin bisa dijelaskan dalam motivasi–motivasi internal individu, tetapi lebih penting merupakan produk gerak sistem yang terbukti anti ekologis (Susilo, 2008:180).

Berangkat dari teori sistem Talcot Parsons, Susilo (2008), menyatakan bahwa dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya lingkungan dibutuhkan pendekatan sistem yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pengaruh dari aspek agama, aspek politik, aspek ekonomi, aspek pendidikan, dan aspek–aspek yang lain, jelas turut terlibat menentukan baik buruknya lingkungan. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan mewujudkan *ecological citizenship*, maka diperlukan strategi yang dapat menginternalisasikan pentingnya menjaga kelestarian alam dalam seluruh aspek kehidupan. Upaya mengembangakan *ecological citizenship* pada masyarakat melaui internalisasi pentingnya kesadaran lingkungan kedalam seluruh aspek kehidupan manusia. Sehingga manusia menyadari bahwa manusia dan alam merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan memiliki hubungan saling ketergantungan. Apabila manusia berbuat baik kepada alam, maka alam akan memberikan dampak positif terhadap kehidupan manusia disegala aspek kehidupan. Sebaliknya, apabila manusia merusak alam maka keberlangsungan kehidupan manusia juga akan terganggu.

World Wide Fund (WWF) Malaysia telah mengungkapkan strategi pengembangan kewarganegaraan ekologi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *World Wide Fund* (WWF) Malaysia (2008), pengembangan kewarganegaraan ekologi dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. *Environmental Knowledge*

Tahapan pertama yang dilakukan dalam pengembangan kewarganegaraan ekologi adalah pemberian pengetahuan kepada masyarakat. Pengetahuan lingkungan atau *environmental knowledge* yaitu ekspresi dari pengalaman dan pengetahuan yang berhubungan dengan interaksi alam serta pemahaman yang dibutuhkan untuk menciptakan dan melakukan perbaikan bagi kelestarian lingkungan, baik secara individu, kelompok atau organisasi.

2. *Environmental Skill*

Environmental skills adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi, mengantisipasi, mencegah dan mengatasi problem lingkungan, baik secara individu, kelompok atau organisasi.

3. *Environmental Attitudes*

Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh menjadi modal pembentukan etika lingkungan. Etika lingkungan (*environmental attitudes*) merupakan seperangkat nilai dan *feelings* terhadap lingkungan, serta motivasi untuk berperan aktif bagi pengembangan ekologi dan proteksinya, baik secara individu, kelompok atau organisasi.

4. *Environmental Participation*

Tahapan *keempat*, warga negara pada akhirnya akan memiliki sensitifitas terhadap persoalan ekologi dan berupaya menerapkan kepedulian lingkungan melalui serangkaian tindakan pro lingkungan. Respon warga negara terhadap persoalan lingkungan akan menghadirkan partisipasi penyelamatan lingkungan (*environmental participation*) (WWF-Malaysia, 2008).

Pengembangan kewarganegaraan ekologi memiliki empat tahapan yaitu *environmental knowledge, environmental skills, environmental attitudes dan environmental participations.* Tahapan-tahapan ini merupakan suatu proses yang harus dilakukan untuk tercapainya warga negara yang memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Partisipasi warga negara dalam menjaga kelestarian lingkungan diawali dengan pemberian pengetahuan, dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan itulah yang akan membentuk sikap dan partisipasi warga negara dalam melestarikan lingkungan dan mewujudkan kewarganegaraan ekologi (*ecological citizenship*).

Pengejawantahan gerakan ekofeminisme sebagai sebuah gerakan ecological citizenship dapat dicermati dari melalui sebuah gerakan "CHIPKO' yang muncul pada tahun 1974. Gerakan ini digaungi oleh Vandana Shiva yang terfokus pada keyakinan "Aranya Sanskrit" yang merupakan sebuah basis ekologis yang kuat. (Warren, 2000). Gerakan ini merupakan gerakan perempuan yang memiliki kesadaran yang kuat akan peran perempuan dalam lingkungan hidup sebagai bentuk environment knowledge. Melalui gerakan akar rumput , gerakan ini bahu membahu memberikan kritikan dalam berbagai bentuk kerusakan lingkungan yang timbul, seperti di India misalnya dalam kasus penebangan hutan , perempuan merupakan korban pertama dari penebangan hutan. Dampak dari penebangan hutan yang dilakukan oleh korporasi adalah kelangkaan pohon yang dimanifestasikan sebagai sumber utama kebutuhan hidup (makanan, bahan bakar, pro-duk-produk rumah (termasuk peralatan membersihkan rumah, peralatan masak), dan menghasilkan ekonomi rumah tangga. Kelangkaan pohon menambah beban berat bagi perempuan (double burden) karena peran perempuan selain sebagai pencari nafkah tambahan , menanggung beban kerja dalam bidang domestic(mengambil air dari sumber mata air, ranting-ranting sebagai bahan bakar).

Mencermati kondisi hutan yang rusak, membangkitkan empati, simpati dan partisipasi perempuan melalui berbagai action perempuan untuk menyelamatkan sebanyak 12.000 kilometer areal hutan yang sudah gundul. Motivasi yang dilakukan berdasarkan: pertama, motivasi ekonomi, yakni sentiment yang dimiliki oleh kaum wanita pada kontraktor-kontraktor yang menggunduli hutan mereka, kedua, motivasi budaya yang disebabkan unsure tertanam dalam masyarakat tentang kewajiban untuk melindungi hutan-hutan nenek moyang. (Rahmat Dwi, 2012: 124)

Mencermati kondisi perempuan di negara berkembang tersebut dapat disimpulkan bahwa isu lingkungan sangat terkait dengan pemosisian perempuan sebagai subyek atau pelaku pemanfaat hasil pembangunan. Di berbagai negara berkembang, perempuan belum mampu berposisi dalam berbagai aktivitas, secara sosiologis masalah yang muncul perempuan kurang terlibat dalam berbagai aktivitas pengelolaan lingkungan hidup dalam fase perencanaan, pelaksanaan dan

evaluasi. Kurangnya keterlibatan perempuan disebabkan masih melekatnya *stereotype* gender dan *sub ordinasi* peran perempuan dan laki-laki dalam dalam kultur masyarakat dimana dia hidup. Masalah tersebut diperparah oleh minimnya komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan termasuk pengelolaan limbah dan pencegahan pencemaran lingkungan. Foskey menyebut isu akses perempuan terhadap air sebagai persoalan hidup dan mati. Fenomena ini terjadi karena perempuan lebih banyak sebagai obyek ,pemakai bahan konsumsi rumah tangga tanpa adanya pengetahuan tentang bahaya bahan-bahan tersebut terhadap diri, keluarga dan lingkungannya. Kenyataan tersebut menjelaskan bahwa keberadaan perempuan dapat berpotensi memperlambat proses pembangunan atau bahkan perempuan menjadi beban dalam pembangunan. Namun persoalannya kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi jika perempuan tidak memiliki akses pada pembuatan kebijakan tentang air. Hal ini dikarenakan, menurut Whited, laki-laki tetap menjadi pembuat keputusan utama di dalam komunitas, termasuk dalam hal pengelolaan air.

Selain gerakan diatas, gerakan Whyl merupakan gerakan yang cukup kontroversial, merupakan kelompok orang yang menolak secara aktif penggunaan tenaga atom, gerakan lingkungan ini dimotori di perancis dimana kaun feminis lebih banyak berpartisipasi aktif dalam partai hijau (*green party*) yang menperjuangkan lingkungan melalui memperjuangkan penyelamatan lingkungan dengan mencari akar-akarnya pada masyarakat kontemporer.

Gerakan eko feminis Di Korea, disebut dengan " Salimist' gerakan ini memiliki 10 prinsip kehidupan berdasar-kan elemen-elemen dasar kebijaksanaan his-toris dan spiritual dari perempuan korea. Wawasan dari orang-orang di seputar dunia yang bergema bersama para ekofeminis Ko-rea pada pokoknya merindukan kehidupan dalam kepenuhannya. Kesepuluh prinsip itu adalah: hutan, air, api, udara, keadilan-cinta kasih, keindahan, sukacita dan perayaan, kekuatan semut dan laba-laba, tujuh generasi, kemurahan hati Ahimsa (Kyung, 2001). Salimist membuat segalanya menjadi hidup, terutama yang mati seperti bumi. Salimist menyentuh setiap hal seperti seorang pesu-lap, ia mendaur ulang setiap hal. Bagi

mereka seorang aktivis perdamaian yang ber-pikir seperti gunung, dan para Salimist yang mencintai perempuan, alam, bumi dan tu-han.

Di Venezuela ada sebuah organissi yang mengambil tipe 'simbolik kultural' terk-enal yakni, AMIGRANSA (*Asociation de Amigos en Defensa de la Gran Sabana*) atau Asosiasi Sahabat untuk perlindungan Padang Rumput Besar. Sebuah organisasi LSM yang berdiri tahun 1985 hasil inisiatif 5 orang perempuan (Gracia, 1992) Mereka merancang berbagai strategi kelompok. Tujuannya adalah memelihara alam lingkungan dengan menentang berbagai aktivitas yang merusak, dan juga mengajukan berbagai proposal alter-natif sebagai jalan keluarnya. Kegiatan yang utama adalah mempertahankan Tanah Na-sional Padang Rumput Besar Canaima (La Gran Sabana Canaima) yang merupakan man nasional kelima terbesar di dunia. Ke-brhasilan organisasi ini pada dasarnya ber-tumpu pada kemampuan mereka dalam memperoleh akses dan sekaligus penggunaan informasi dan sistem-sistem simbolik (khususnya media) sebagai suatu mekanisme utama melalui isu-isu lingkungan yang diban-gun dan dikonsumsi sebagai suatu budaya politik baru. Masih di Venezuela, ada sebuah or-ganisasi yang bernama GEMA (Grupo de Estudios Mujer y Ambiente) atau Kelompok Kajian Perempuan dan Lingkungan, adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1989 oleh kalangan profesional perempuan. Proyek-proyek utama mereka berkaitan deng-an masalah kesehatan dan lingkungan di dua penampungan besar penghuni liar di Cara-cas, ibukota Venezuela, dan kondisi perem-puan di petambangan di wilayah Guayana (Gracia, 1992). Organissi yang terkait dengan perem-puan dan lingkungan yang lainnya adalah AMAVEN atau Asociacion Venezolana de Mu-jery Ambiente (Asosiasi Perempuan Venezuela dan Lingkungan) didirikan pada bulan No-vember 1991 dengan tujuan untuk membang-un kesadaran lingkungan di antara masyara-kat dengan harapan akan mendorong partisi-pasi dan kontribusi atas konservasi lingkung-an. Ini berkaitan dengan perbaikan standar kehidupan dan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang lebih adil bagi masyarakat, khususnya perempuan kelas bawah (Gracia,1992).

Jika dicermati berbagai pengejawantahan berbagai gerakan perempuan untuk menlelamatkan lingkungan diatas merupakan pengembangan

kewarganegaraan ekologi yang terpatri pada empat tahapan yaitu *environmental knowledge, environmental skills, environmental attitudes dan environmental participations.* Tahapan-tahapan ini merupakan suatu proses yang harus dilakukan untuk tercapainya warga negara yang memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Partisipasi warga negara dalam menjaga kelestarian lingkungan diawali dengan pemberian pengetahuan, dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan itulah yang akan membentuk sikap dan partisipasi warga negara dalam melestarikan lingkungan dan mewujudkan kewarganegaraan ekologi (*ecological citizenship*).

Penutup

Diametral kerusakan lingkungan terfokus pada berbagai hal yang mempengaruhinya menurut aliran ekofeminisme merupakan hasil produksi kaum patriarki. Tiga karakteristik cara berpikir feminism yang meliputi: *Pertama*, imanensi (i*mmanance*) sebagai kakuatan yang datang dari dalam, dimana menghambat kehendak untuk menguasai, *kedua,* keterhubungan (*interconnections*) yakni hubungan antara badan dan jiwa dimana mereka menyatu, *ketiga,* gaya hidup yang mengasihi (*compassionate life style*). Aliran ekofemisme melahirkan berbagai gerakan penyelamatan perempuan yang merupakan pengejawantahan *ecological citizenship yang terfokus pada* internalisasi pentingnya kesadaran lingkungan kedalam seluruh aspek kehidupan manusia yang diejawantahkan dalam 1) *Environmental Knowledge (*Pola pikir yang 'lebih memahami', humanis, empati, ini identik dengan pola pikir ekofeminisme yang mencoba membuat terobosan keadilan untuk alam) s*ense of belonging terhadap alam),2) Environmental Skill, 3) Environmental Attitude*s (seperangkat nilai dan *feelings* terhadap lingkungan, serta motivasi untuk berperan aktif bagi pengembangan ekologi dan proteksinya, baik secara individu, kelompok atau organisasi.4) *Environmental Participation(sense of belonging terhadap alam)*

DAFTAR PUSTAKA

Andrew Dobson (2004) *Ecological citizenship*. Paper presented at the annual meeting of the Western Political Science Association, Portland, Oregon, USA, March 11, 2004.

Andrew Dobson (2006) Ecological citizenship: A defence. *Environmental Politics 15*(3), 447-451.

Andrew Dobson (2007) *Green political thought* (4th ed). Routledge: Abingdon, UK.

Arivia, Gadis. 2002. "Ekofeminisme: Lingkungan Hidup Berurusan dengan Perampuan".
dalam Jurnal Perempuan. No. 21.

Donny Danardono, 2006. Perempuan dan Hukum:Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan, The Concention Watch,Universitas Indonesia,Yayasan Obor Indonesia

Tri Marhaeni Pudji Astuti, 2012.Ekofeminisme dan Peran Perempuan dalam Lingkungan Indonesian Journal of Conservation Vol. 1 No. 1 - Juni 2012 120.

Buntaran, Fredy. 1996. Saudari Bumi Saudara Manusia. Yogyakarta: Kanisius. Dankelman, Irene & Joan Davidson. 1988. Women and Environment in the Third World. London: Alliance for the Future Earthscan Publications Ltd.

Darmawati, Intan. 2002. "Dengarlah Tangisan Ibu Bumi! Sebuah Kritik Ekofeminisme atas Revolusi Hijau", dalam Jurnal Perem-puan. No. 21. hal. 7-24.

Firestone, S. 1970. The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution. New York: Willian Morrow.

Gracia, Guadilla Maria-Pilar. "Ecologia: Women, Environment and Politic in Venezuela".
dalam Sarah A. Radcliffe and Sallie West-wood (eds). Viva: Women and Popular Protest
in Latin America. London and New York: Routledge.

Griffin, S. 1978. Women and nurture: The Roaring Inside Her. New York: Harper & Row.

Humm, Maggie. 2002. Ensiklopedia Feminisme. Terjemahan Mundi Rahayu. Yogyakarta:
Fajar Pustaka Baru.

Isshiki, Yoshiko. 2000. "Eco-Feminism in the 21 "Century", dalam In God's Image. Vol. 19.
No. 3. hal. 27

Kyung, Chung Hyun. 2001. "Popular Religion and Fullness of Life: An Asian Ecofeminist
Reflection". makalah CAT (Congress of Asian Theologians) III di Yogyakarta, tang-gal 5-11 Agustus.

Luviana. 2002. "Perampuan Indonesia Pejuang Lingkungan". dalam Jurnal Perempuan.
No. 21 hal. 85-96.

Neil Carter (2007) *The politics of the environment: Ideas, activism, policy* (2nd ed). Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Pramudya Sunu, 2001. Melindungi Lingkungan dengan menerapkan ISO 14001, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia

Rahmat Dwi Susilo, 2012. Sosiologi Lingkungan& Sumber Daya Alam, Ar Ruz Media, Yogyakarta

Simon Millidge, *Getting Reddy in Tanzania:Principles,Preparation and Perspectives*, The Arch Journal Tanzania Forest Conservation Group Issues ,Biannual Newsletter Issues No. 24 November 2009 , PO Box 23410 Farest Salaam,Tanzania ISSN 0856-8715, hlm 3

Shiva, Vandana dan Maria Mies. 2005. Ecofem-inism Perspektif Gerakan Perempuan dan Ling-kungan. Alih Bahasa oleh Kelik Ismunanto. Yogyakarta: IRE Press.

Strong, Hanne. 1995. "Ecological and Spiritual Revolution". dalam Our Planet Vol.7. No. 3. hal. 25.

UNDP-WORLD BANK. 1997. "Menguntungkan dari Sisi Bisnis: Wanita sebagai Potensi Pelanggan Air Bersih di Perkotaan", Resident World Bank Staff.

UPAYA GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENANGGULANGI KASUS BULLYING DI SEKOLAH

Arif Ady Setiawan[1]

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Arif.ady@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan upaya guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam menanggulangi kasus bullying di sekolah. Tujuan dari penlitian ini adalah mengetahui bentuk bentuk bullying di sekolah dan upaya guru Pendidikan Kewarganegaraan untuk menanggulangi. Metode yang digunakan adalah diskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka, dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan guru Pendidikan Kewarganegaraan yang mengambil study S-2 di Pascasarjana UNS dan Study Pustaka terhadap literatur- literatur yang membahas masalah bullying. Hasil penelitian 1) Tindakan bullying fisik di sekolah antara lain memukul, menendang, mengganggu, mendorong, dan melempar kertas. Tindakan bullying verbal di sekolah antara lain mencela, mencemooh, dan memfitnah. Tindakan bullying secara mental/Psikologis di sekolah antara lain mengucilkan dan menghindari peserta didik yang lain. 2) Upaya guru Pendidikan Kewarganegaraan yang dilakukan untuk menaggulangi kasus bullying dilaksanakan dalam bentuk tindakan sebagai berikut: a) Melakukan kegiatan pembelajaran yang bervariasi dan menanamkan nilai nilai dalam proses pembelajaran; b) Melakukan pengamatan langsung, sehingga peserta didik mampu meminimalisir sikap dan tindakannya karena peserta didik merasa diamati oleh guru-guru; c) Memberikan peer mentoring saat proses belajar mengajar, sehingga individu atau kelompok yang teridentifikasi sebagai korban bullying lebih bisa memproteksi dirinya, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan dapat memaafkan dan menjaga diri; d) Memberikan materi dan pengetahuan tentang bahaya bullying dan menamankan sikap saling menghormati, menghargai dan tolerasi antar siswa; e) Melakukan kerjasama dengan warga sekolah untuk bersama-sama dapat mengontrol dan membantu mewujudkan kondisi yang mendidik bagi peserta didik, serta memonitoring kegiatan dan perilaku siswa.

Kata kunci : *Upaya, Guru Pendidikan Kewarganegaraan, Bullying*

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan negara yang termuat di dalam pembukaan Undang-undang dasar alenia ke-4 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Melalui pendidikan manusia dapat mempelajari bagaimana caranya untuk meningkatkan dan mengembangakan potensi yang ada pada dirinya. Hal ini sejalan dengan fungsi pendidikan yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) bab II pasal 3, menyatakan bahwa:

> Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas maka dibutuhkan tenaga pendidik salah satunya yakni guru. Guru dalam konteks pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis. Kegagalan dan keberhasilan suatu lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan tidak lepas dari peran guru di dalamnya. Guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan. Guru memegang peranan utama dalam peningkatan kualitas pendidikan khususnya yang diselenggarakan secara formal di sekolah. Hal ini disebabkan guru berada di barisan paling depan dalam pelaksanaan pendidikan di sekolahan. Menurut pasal 1 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang berbunyi "Guru adalah pendidik profesional yang mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah". Guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik, kaitannya dengan proses belajar mengajar. Tugas guru meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi proses pembelajaran. Mulyasa menyatakan pendapatnya bahwa :

> Semua orang yakin bahwa guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Minat, bakat, kemampuan, dan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuan guru. (2009: 35)

Guru tidak hanya mempunyai tanggung jawab untuk mengajarkan materi kepada siswa namun juga bertanggung jawab mendidik, membimbing, dan mengarahkan siswa untuk mengoptimlkan segala betuk minat, kemampuan, bakat dan potensi pada diri siswa. Siswa merupakan generasi muda penerus bangsa,

karena itulah sekolah menjadi salah satu tempat menempa ilmu dan mendidik siswa untuk menjadi generasi yang berkualitas, berkompeten dan unggul, namun realitanya sekolah yang notabene adalah tempat untuk mendidik anak masih rawan akan terjadinya tindakan menyimpang salah satunya adalah tumbuhnya praktik-praktik bullying.

Bullying menurut Ken Rigby (Astuti, 2008; 3) adalah "sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan ke dalam aksi, menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau sekelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan perasaan senang".

Bullying muncul di mana-mana. Bullying tidak memilih umur atau jenis kelamin korban. Yang menjadi korban umumnya adalah anak yang lemah, pemalu, pendiam dan spesial (cacat, tertutup, pandai, cantik, atau punya diri tubuh tertentu), yang dapat menjadi bahan ejekan. (Astuti, 2008:17)

Berkait kasus bullying yang beberapa waktu terakhir ini cukup marak di beberapa daerah, Kemensos RI pun merasa terbantu dengan kehadiran layanan Telepon Sahabat Anak (Tepsa) tersebut. Ada cukup banyak laporan serta pengaduan yang masuk dan berdasarkan catatan, setidaknya di periode Januari hingga Juli 2017, total ada sekitar 976 pengaduan. Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa mengatakan "Tujuh bulan terakhir ini cukup banyak. Hingga 15 Juli 2017 ini saja sudah mencapai 976 pengaduan dan 117 pengaduan di antaranya adalah berkaitan dengan kasus bullying. Jadi, sebenarnya tidak hanya satu atau dua kasus. Ada banyak, hanya memang itu yang terungkap dan ada buktinya ke publik," (Tribun Jateng, 2017)

Hasil kajian Konsorsium Nasional Pengembangan Sekolah Karakter tahun 2014 menyebutkan, hampir di setiap sekolah di Indonesia ada kasus bullying, meskipun hanya berupa bullying verbal dan psikologis/mental. Melihat kompleksnya kasus-kasus bullying yang ada, Susanto selaku Ketua Konsorsium Nasional Pengembangan Sekolah Karakter menilai bahwa Indonesia sudah masuk kategori "darurat bullying di sekolah", oleh karena itu perlu segera dilakukan intervensi (Republika.co.id, 2014).

Di sekolah peserta didik mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan di lingkungan yang aman dan bebas dari rasa takut. Pengelola sekolah dan pihak lain yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan mempunyai kewajiban untuk melindungi peserta didik dari intimidasi, penyerangan, kekerasan atau gangguan yang akan membahayakan dan menggangu peserta didik dalam proses pendidikan.

Dengan semakin maraknya kasus bullying yang terjadi dalam dunia pendidikan, hendaknya ini menjadi perhatian bagi pengelola pendidikan untuk mengatasi masalah bullying tersebut. Sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2 bahwasanya: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungandari kekerasan dan diskriminasi". Lebih lanjut hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) Nomor 23 Tahun 2002 pasal 54 menyatakan, "Anak di dalam dan dilingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya".

Berdasarkan fenomena seperti di atas, peran guru Pendidikan Kewarganegaraan sangat dibutuhkan dan menjadi sangat penting. Guru Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan mampu membimbing siswa dalam melaksanakan keterampilan kewarganegaraan sehingga dapat membentuk sikap kewarganegaraan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Guru Pendidikan Kewarganegaraan yang mempunyai kompetensi profesional dalam mengembangkan materi yang luas dan mendalam tidak hanya mengajarkan siswa tentang pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), namun juga sikap kewarganegaraan (*civic disposition*). Karena untuk membentuk dan/ atau merubah tingkah laku siswa supaya mempunyai sikap kewarganegaraan yang baik sehingga tidak melakukan tindakan bullying terhadap teman sekolahnya, guru Pendidikan Kewarganegaraan harus mempunyai kompetensi profesional yang harus mengembangkan materi yang ada dengan mencakup ketiga substansi dari Pendidikan Kewarganegaraan. Guru

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki pengaruh penting dalam membentuk sikap kewarganegaraan diantaranya yaitu toleransi dan saling menghargai.

Penelitian ini difokuskan pada bentuk-bentuk bullying di sekolah dan strategi guru Pendidikan Kewarganegaraan untuk menanggulangi kasus bullying di sekolah. Pokok permasalahana dirumuskan bagaimana bentuk-bentuk bullying di sekolah dan bagaimana upaya guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam menanggulanginya.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bentuk bentuk bullying di sekolah dan upaya guru Pendidikan Kewarganegaraan untuk menanggulangi kasus bullying di sekolah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini memberikan gambaran, merinci, dan menganalisa data pada permasalahan yang terjadi saat ini serta memusatkan pada pemecahan permasalahan yang aktual. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka, dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan Guru Pendidikan Kewarganegaraan yang mengambil study S-2 di Pascasarjana UNS dan Studi Pustaka terhadap literatur- literatur yang membahas masalah bullying. Kegiatan analisis data dilakukan setelah data yang diperlukan terkumpul. Dengan demikian, pada tahap ini, peneliti berusaha mengorganisasikan data yang diperoleh dalam bentuk catatan lapangan dan dokumentasi. Analisis data kualitatif yang akan digunakan peneliti adalah berdasarkan pada model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2015: 246) yang terdiri atas tiga aktivitas, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Bullying di Sekolah

Secara etimologi kata bully berarti penggertak, orang yang mengganggu orang lemah. Istilah bullying dalam bahasa Indonesia bisa menggunakan menyakat

(berasal dari kata sakat) dan pelakunya (bully) disebut penyakat. Menyakat berarti mengganggu, mengusik dan merintangi orang lain. (Wiyana, 2012; 12).

Bullying adalah tindakan menganggu yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok orang yang memiliki kekuatan lebih besar dari pada korban untuk melakukan kekerasan terhadap pihak lain. Bullying juga merupakan aktivitas sadar, disengaja, dan keji yang dimaksudkan untuk melukai, menanamkan ketakutan pada korban.

Menurut Wiyani (2012;14) Bullying dapat terjadi di mana saja, di lingkungan di mana terjadi interaksi sosial antarmanusia, seperti:

1) Sekolah, yang disebut school bullying.
2) Tempat kerja, yang disebut workplace bullying.
3) Internet atau teknologi digital, yang disebut cyber bullying.
4) Lingkungan militer, yang disebut military bullying.
5) Dalam perpeloncoan, yang disebut hazing.

Menurut Riauskina, Djuwita, dan Soesetio (2005; 13) mendefinisikan school bullying sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang/sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa/siswi lain yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti orang tersebut.

Seperti penelitian para ahli, antara lain oleh Rigby (Astuti, 2008 ;8), bullying yang banyak dilakukan sekolah umumnya mempunyai tiga karakteristik yang terintegrasi sebagai berikut:

1) Adanya prilaku agresif yang menyenangkan pelaku untuk menyakiti korbannya.
2) Tindakan itu dilakukan secara tidak seimbang sehingga menimmbulkan perasaan tertekan korban.
3) Prilaku itu dilakukan secara berulang atau terus-menerus.

Tindakan bullying dilihat dari betuknya, Ritola (2009;17) membagi bentuk-bentuk bullying menjadi 3 bentuk antara lain:

1) Secara fisik, yang dapat berupa memukul, menendang, mengambil miliki orang lain.

2) Secara verbal, yang dapat berupa mengolok-olok nama peserta didik lain, menghina, mengucapkan kata-kata yang menyinggung.
3) Secara tidak langsung, seperti menyebarkan cerita bohong, mengucilkan, menjadikan peserta didik tertentu sebagai target

Secara lebih rinci bentuk bullying dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Bullying Fisik

Bullying Fisik adalah jenis bullying yang kasat mata. Siapa pun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku bullying dan korbannya. Contoh-contoh bullying fisik antara lain: menggigit, menarik rambut, memukul, menendang, mengunci, dan mengintimidasi korban di ruangan atau dengan mengitari, memelintiri, menonjok, mendorong, mencakar, meludahi, dan merusak kepemilikan (property) korban, penggunaan senjata dan perbuatan kriminal.

2) Bullying Verbal

Bullying Verbal adalah jenis bullying yang juga terdeteksi karena bisa tertangkap indra pendengaran kita. Contoh bullying verbal antara lain: memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, mempermalukan di depan umum, menuduh, menyoraki, menebar gosip, memfitnah, menolak.

3) Bullying Mental/Psikologis

Bullying Mental/Psikologis adalah jenis bullying yang paling berbahaya karena tidak tertangkap mata atau telinga kita jika kita tidak cukup awas mendeteksinya. Praktik bullying ini terjadi diam-diam dan di luar radar pemantauan kita. Contoh bullying mental antara lain: memandang sisnis, memandang penuh ancaman, mempermalukan di depan umum, mendiamkan, mengucilkan, mempermalukan, meneror lewat pesan pendek telepon genggam atau email, memandang yang merendahkan, memelototi, mencibir.

Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan berdasarkan wawancara dengan guru Pendidikan Kewarganegaraan yang melanjutkan study S-2 PPKn di Pacasarjana UNS, bentuk-bentuk bullying yang terjadi di sekolah instansi mereka bekerja antara lain disajikan dalam tabel berikut:

Bentuk Bullying	**Schooll bullying**	**Tindakan bullying**
Fisik	Bullying fisik adalah suatu tindakan kekerasan atau menyakiti orang lain yang dilakukan oleh satu peserta didik atau sekelompok peserta didik dengan melibatkan anggota badan atau sentuhan fisik antara pelaku dan korban yang dilakukan secara terus-menerus.	memukul, menendang, mengganggu, mendorong, dan melempar kertas.
Verbal	Suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh satu peserta didik atau sekelompok peserta didik kepada peserta didik yang lain dengan mengandalkan penggunaan kata-kata atau bahasa untuk menyerang target.	mencela, mencemooh, dan memfitnah.
Mental/Psiko logis	*Bullying* secara tidak langsung adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh satu peserta didik atau sekelompok peserta didik kepada peserta didik yang lain dengan tidak melibatkan anggota badan atau sentuhan fisik, tetapi lebih mengarah pada psikologi si korban.	mengucilkan dan menghindari peserta didik yang lain.

Upaya Guru Pendidikan Kewarganegaraan untuk menanggulangi Bullying di Sekolah

Guru merupakan komponen yang paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan yang harus mendapatkan perhatian sentral, pertama, dan utama. Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas (Mulyasa, 2007: 5). Dari pendapat Mulyasa di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sebagai seorang yang sangat berpengaruh di dalam pelaksanaan pendidikan maka seorang guru diharapkan senantiasa meningkatkan peranan dan kompetensinya dalam proses belajar mengajar karena hasil belajar peserta didik sebagian besar ditentukan oleh peranan dan kompetensi guru.

Kaitannya dengan masalah *bullying*, menurut Smith (Ariesto, 2009;30) aspek pemberdayaan guru agar guru dapat berperan secara maksimal tidak dapat ditunda lagi. Beberapa alasan peran guru sangat penting:

1) Kebanyakan orang berpikir bahwa masalah bullying adalah masalah murid/siswa saja sehingga lebih mengintensifkan perhatian pada murid atau si agressor. Padahal ketidakpedulian guru terhadap siswa turut menjadi faktor ekselator (pelestari) kesinambungan peristiwa bullying. Oleh karena itu, bila guru tidak menaruh perhatian penuh terhadap masalah ini, maka semuanya menjadi tidak bergerak.
2) Guru merupakan figur teladan yang langsung dapat dilihat oleh siswa/murid, bila guru tidak menunjukan kepedulian dalam berkata-kata dan bertindak dengan benar setiap hari, maka siswa lebih mungkin melakukan bullying atau menjadi korban bullying. Itu sebabnya dalam proses belajar mengajar, guru harus sadar bahwa tugas mengajar adalah untuk meningkatkan kapital sosial dan kognitif.
3) Guru merupakan konselor yang mudah dan cepat bagi siswa. Meskipun di sekolah-sekolah ada guru Bimbingan dan Penyuluhan (BP), tidaklah bijaksana menempatkan semua tanggung jawab masalah yang dihadapi siswa kepada guru BP, apalagi bila jumlah siswa mencapai ratusan orang jumlahnya. Belum lagi bila guru BP lambannya menangani karena banyaknya kasus. Dalam hal ini semua guru menjadi sangat penting sebagai orang yang melakukan pertolongan pertama.
4) Guru sangat dibutuhkan perannya untuk menciptakan atmosfer yang mengurangi bullying dan mendorong proses kelompok (peer process) yang mendukung dan merangkul siswa-siswa yang rentan mengalami bullying

Peran guru juga dapat menjadi semacam social support. Dalam teori ini guru dapat dilihat sebagai penyelesai masalah sosial lewat dukungan nyata. Jim Orford 2008 (Ariesto, 2009;31) menyebutkan setidaknya ada lima fungsi utama dari social support yaitu: (1). Material (dapat dilihat, atau pendukung instrumen); (2) Emosi (ekspresi, atau dukungan pengaruh atau perhatian); (3) Harga diri (pengakuan, dukungan nilai atau pengakuan); (4) informasi (nasehat atau dukungan kognisi atau bimbingan); dan (5) Persahabatan (interaksi sosial yang positif).

Berdasakan atas peran dari guru sebagai sosial support yang memiliki lima fungsi utama, peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan kaitanya dengan penaggulangan bullying diwujudkan dalam beberapa upaya tindakan. Upaya guru kewarganegaraan yang dilakukan diwujudkan dengan bentuk tindakan sebagai berikut:

Upaya Menanggulangi Bullying Guru Pendidikan Kewarganegaraan	**Fungsi Sosial Suport**
Melakukan kegiatan pembelajaran yang bervariasi dan menanamkan nilai-nilai dalam proses pembelajaran.	Material
Melakukan pengamatan langsung, sehingga peserta didik mampu meminimalisir sikap dan tindakannya karena peserta didik merasa diamati oleh guru-guru	Emosi
Memberikan *peer mentoring* saat proses belajar mengajar, sehingga individu atau kelompok yang teridentifikasi sebagai korban *bullying* lebih bisa memproteksi dirinya, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan dapat memaafkan dan menjaga diri.	Harga diri
Memberikan materi dan pengetahuan tentang bahaya bullying dan menamankan sikap saling menghormati, menghargai dan tolerasi antar siswa	Informasi
Melakukan kerjasama dengan warga sekolah untuk bersama-sama dapat mengontrol dan membantu mewujudkan kondisi yang mendidik bagi peserta didik, serta memonitoring kegiatan dan perilaku siswa.	Persahabatan

KESIMPULAN

Bullying sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan atau kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau kelompok. Secara umum, praktikpraktik *bullying* dapat dikelompokkan ke tiga kategori: bullying fisik, bullying non-fisik, dan *bullying* mental/psikologis. Tindakan bullying fisik di sekolah antara lain memukul, menendang, mengganggu, mendorong, dan melempar kertas. Tindakan bullying verbal di sekolah antara lain mencela, mencemooh, dan memfitnah. Tindakan bullying secara mental/Psikologis di sekolah antara lain mengucilkan dan menghindari peserta didik yang lain.

Berdasakan atas peran dari guru sebagai sosial support dalam kasus bullying yang memiliki lima fungsi utama, peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan kaitanya dengan penaggulangan bullying diwujudkan dalam beberapa upaya

tindakan. Upaya guru Pendidikan Kewarganegaraan yang diwujudkan dengan bentuk tindakan sebagai berikut: 1) Melakukan kegiatan pembelajaran yang bervariasi dan menanamkan nilai nilai dalam proses pembelajaran; 2) Melakukan pengamatan langsung, sehingga peserta didik mampu meminimalisir sikap dan tindakannya karena peserta didik merasa diamati oleh guru-guru; 3) Memberikan *peer mentoring* saat proses belajar mengajar, sehingga individu atau kelompok yang teridentifikasi sebagai korban bullying lebih bisa memproteksi dirinya, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan dapat memaafkan dan menjaga diri; 4) Memberikan materi dan pengetahuan tentang bahaya bullying dan menamankan sikap saling menghormati, menghargai dan tolerasi antar siswa; 5) Melakukan kerjasama dengan warga sekolah untuk bersama-sama dapat mengontrol dan membantu mewujudkan kondisi yang mendidik bagi peserta didik, serta memonitoring kegiatan dan perilaku siswa.

DAFTAR PUSTAKA

Ariesto, (2009). *Pelaksanaan Program Anti-Bullying teacher Empewormen program disekolah*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia : Jakarta

Astuti, Ponny Retno (2008) *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Menanggulangi Kekerasan pada An`ak* , Jakarta: PT Grasindo, anggota IKAPI

Cowie, Hellen dan Jennifer, Dawn (2009) *Penanganan Kekerasan di Sekolah: Pendekatan ingkup Sekolah untuk Mencapai Praktik Terbaik*, Jakarta: PT Indeks

http://jogja.tribunnews.com/2017/07/22/117-laporan-bullying-diterima-tepsa-kemensos-ri-hingga-juli-2017 diakses 19 November 2017 jam 15.20 WIB

http://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/10/23/ndvn63-indonesia-masuk-kategori-darurat-bullying-di-sekolah diakses 18 November 2017 jam 20.10 WIB

Mulyasa, E. (2007). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya

Mulyasa, E. (2009). *Menjadi Guru yang Professional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Riauskina, I.I., Djuwita, R., dan Soesetio, S.R. (2005). *"Gencet-gencetan" dimata siswa/siswi kelas 1 SMA: Naskah kognitif tentang arti, scenario, dan dampak "gencet-gencetan".* Jurnal Psikologi Sosial, 12(01), 1-13.

Ritola, Wien (2009) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Lembaga Pendidikan, Jakarta: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D).* Bandung: Alfabeta

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Wiyani, Novan Ardy (2012) *Save Our Childern from School Bullying* , Jogjakarta: Ar-Ruzz Media

STRATEGI PEMBELAJARAN PENDIDIK AN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) DALAM MENANAMKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS PADA PESERTA DIDIK

Weka Indriani
Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
wekaindriany@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pembelajaran yang dapat diterapkan guru PPKn dalam menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas pada peserta didik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur/pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang melibatkan peserta didik dapat dicegah dengan adanya pendidikan lalu lintas di sekolah. Pendidikan lalu lintas di sekolah diintegrasikan pada mata pelajaran PPKn karena keduanya mempunyai misi yang sama yaitu untuk menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas pada peserta didik. Realitasnya, pelaksanaan PPKn justru seringkali tidak mengarah pada misi sebagaimana mestinya. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya strategi pembelajaran PPKn yang hanya menekankan *civic knowledge* saja dan cenderung mengabaikan *civic skills* dan *civic dispositions*, minimnya strategi pembelajaran yang mampu memberikan pengalaman belajar yang bermakna untuk mengembangkan keterampilan dan perilaku peserta didik baik di dalam kelas maupun di luar kelas, dan kurangnya keseimbangan antara penguasaan teori dengan praktek keterampilan dan perilaku dalam berkehidupan yang demokratis dan sadar hukum. Maka dari itu, guru PPKn hendaknya mampu melaksanakan strategi pembelajaran yang lebih maksimal sesuai kerangka David Kerr dimana PPKN "Maksimal" tidak hanya menekankan *civic knowledge* saja, tetapi juga menekankan *civic skills* dan *civic dispositions.* Selain itu, guru PPKN hendaknya mampu mendorong peserta didik agar dapat berpartisipasi secara aktif dengan mentransformasikan pembelajaran yang lebih interaktif baik di dalam ataupun di luar ruang kelas sehingga dari pembelajaran yang bermakna tersebut, peserta didik mampu mengembangkan keterampilan dan perilaku sadar hukum. Dalam mengembangkan kemampuan peserta didik tersebut, dapat dilakukan melalui pengalaman lapangan.

Kata kunci: *Strategi Pembelajaran PPKn, Kesadaran Hukum, Lalu Lintas*

PENDAHULUAN

Tren kecelakaan lalu lintas di Indonesia setiap tahunnya semakin mengkhawatirkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang terus mengalami peningkatan. Sepanjang 2014 tercatat 95.906 kasus, tahun selanjutnya 98.970 kasus, dan terakhir 2016 meningkat menjadi

105.374 kasus (Republika.co.id, 02 Mei 2017). Wakakorlantas Mabes Polri Brigjen Pol Indrajit mengatakan bahwa faktor utama kecelakaan lalu lintas bermula dari pelanggaran lalu lintas (Kompas.com, 10 Januari 2017). Banyak kejadian kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang melibatkan peserta didik terutama SMP (Tribunjogja.com, 22 Februari 2017). Wakil Kapolri Komjen Pol Syarifudin juga mengatakan bahwa penyebab tingkat kecelakaan lalu lintas yang tinggi karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk disiplin berlalu lintas (Kompas.com, 30 Juli 2017).

Zainuddin Ali (2007: 66-68) menyimpulkan bahwa masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati dan dihargai. Kesadaran hukum masyarakat tinggi jika masyarakat mentaati hukum karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa peserta didik yang melanggar lalu lintas tersebut mempunyai kesadaran hukum berlalu lintas yang masih rendah.

Rendahnya kesadaran hukum berlalu lintas peserta didik biasanya disebabkan oleh banyak faktor. Rita Eka Izzaty, dkk (2008: 150-151) merangkum faktor-faktor yang mempengaruhi remaja sering melakukan pelanggaran hukum atau yang sering dikenal dengan *Juvenile Delinquency* antara lain faktor personal, latar belakang keluarga dan latar belakang masyarakat. Faktor personal rendahnya kesadaran hukum diantaranya tidak suka mentaati norma, mempunyai kepribadian lemah karena lingkungan pembentuk psikis yang tidak tepat. Latar belakang keluarga diantaranya kurang perhatian hanya pemenuhan kebutuhan materi, situasi yang memaksa karena orang tua kerja seharian dan sebagainya. Selain itu, latar belakang masyarakat seperti pengaruh *peer group*, media massa, kekangan sekolah dan lingkungan sosial yang tidak menentu juga turut mempengaruhi peserta didik dalam melakukan pelanggaran hukum.

Menurut Puji Wulandari Kuncorowati (2009 : 65), menurunnya kesadaran hukum dapat ditingkatkan secara efektif dan efisien melalui pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Pendidikan Lalu Lintas (PLL)

secara formal di sekolah diintegrasikan pada mata pelajaran PPKn karena keduanya mempunyai misi yang sama dalam menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas pada peserta didik. Maftuh Bunyamin & Sapriya (2005: 321) menjelaskan bahwa PPKn sebagai pendidikan hukum mempunyai salah satu misi yaitu untuk membina peserta didik menjadi warga negara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Maka dari itu, PPKn dapat dijadikan sarana yang efektif dalam menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas di sekolah sebagaimana Maureen S. Durkin (1999: 1) mengemukakan bahwa pendidikan keselamatan lalu lintas di sekolah efektif dalam pencegahan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas pada peserta didik.

Guru PPKn mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menjalankan salah satu misinya yaitu untuk menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas pada peserta didik. Realitasnya, pelaksanaan PPKn justru seringkali tidak mengarah pada misi sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya proses pembelajaran dan penilaian yang lebih menekankan pada penguasaan materi (dimensi kognitif saja), miskinnya pengalaman belajar yang bermakna untuk mengembangkan keterampilan dan perilaku peserta didik, kurangnya keseimbangan antara penguasaan materi dan praktek keterampilan dan perilaku dalam berkehidupan yang demokratis dan sadar hukum (Sunarso dkk, 2008: 2).

Guru seharusnya menjadi sebuah teladan yang baik karena guru itu "digugu lan ditiru". Apa yang guru ajarkan baik atau buruk maka secara langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi peserta didik. Maka dari itu, sudah menjadi tugas guru PPKn untuk melaksanakan strategi pembelajaran yang tepat sehingga salah satu misi PPKn yaitu untuk menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas pada peserta didik dapat tercapai. Daryanto (2015: 63) menjelaskan bahwa strategi pembelajaran merupakan hal yang penting dalam kegiatan belajar mengajar, karena strategi dapat menciptakan kondisi belajar yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Selain itu, strategi pembelajaran yang dipilih dan dipergunakan dengan baik oleh guru juga dapat mendorong siswa untuk aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar.

Dari latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan bahwa tingginya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan peserta didik menunjukkan kesadaran hukum berlalu lintas masih rendah. Rendahnya kesadaran hukum berlalu lintas tersebut dapat ditingkatkan melalui pendidikan lalu lintas di sekolah yang diintegrasikan pada mata pelajaran PPKn. Maka dari itu guru PPKn mempunyai tanggung jawab dalam menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas pada peserta didik. Selanjutnya, penulis akan mendeskripsikan strategi pembelajaran yang dapat diterapkan guru PPKn dalam menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas pada peserta didik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Lexy. J. Moleong (2007: 6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Sementara, penelitian deskriptif menurut Nana Sayodih Sukmadinata (2007: 72) yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya. Adapun penelitian ini dimaksudkan untuk memahami fenomena dengan mendeskripsikan strategi pembelajaran yang dapat diterapkan guru PPKn dalam menananmkan kesadaran hukum berlalu lintas pada peserta didik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur/pustaka dengan mencari referensi teori yang relefan dengan kasus atau permasalahan yang dikaji. Data yang dihasilkan dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal, makalah, koran dan lainnya. Sedangkan **t**eknik analisis datanya menggunakan analisis deskriptif dengan menyusun data yang diperoleh kemudian di interpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan informasi bagi pemecahan masalah yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas, guru dapat memilih sendiri strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Hamruni (2012: 3) menjelaskan bahwa arah dari pencapaian strategi pembelajaran adalah pencapaian tujuan. Maka dari itu, guru harus memperhatikan prinsip-prinsip strategi pembelajaran dalam memilih strategi pembelajaran. Jerrold E. Kemp (2007: 129) menjelaskan prinsip-prinsip umum strategi pembelajaran yaitu: (1) Strategi pembelajaran harus berorientasi pada tujuan pembelajaran, (2) Strategi pembelajaran harus dapat mendorong aktivitas peserta didik, (3) Strategi pembelajaran harus mampu mengembangkan setiap individu peserta didik, (4) Strategi pembelajaran harus mampu mengembangkan seluruh pribadi peserta didik.

Begitupun juga, ketika guru PPKn ingin melaksanakan strategi pembelajaran dalam menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas pada peserta didik, guru harus memahami prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Strategi pembelajaran harus berorientasi pada tujuan pembelajaran

   Maftuh Bunyamin & Sapriya (2005: 321) menjelaskan bahwa PPKn sebagai pendidikan hukum mempunyai tujuan untuk membina peserta didik menjadi warga negara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Maka dari itu strategi pembelajaran yang dilakukan guru harus diarahkan kepada tujuan pembelajaran yaitu membina peserta didik agar mempunyai kesadaran hukum berlalu lintas. Dalam melaksanakan strategi pembelajaran tersebut, guru PPKn tentu harus menyesuaikan dengan jenis materi pembelajaran sehingga strategi pembelajaran yang dipilih merupakan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan pembelajaran.

   Direktorat Tenaga Kependidikan (2008: 26) menjelaskan enam (6) strategi yang dapat diterapkan oleh guru PPKn, yaitu: (1) strategi urutan penyampaian suksesif, (2) strategi penyampaian fakta, (3) strategi penyampaian konsep, (4) strategi penyampaian prinsip, (5) strategi penyampaian prosedur, (6) strategi penyampaian aspek sikap (afektif). Dalam menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas pada peserta didik, guru dapat menerapkan strategi penyampaian

aspek sikap (afektif) karena disini guru PPKn berusaha untuk menginternalisasikan kesadaran hukum berlalu lintas pada peserta didik. Direktorat Tenaga kependidikan (2008: 28-29) menjelaskan materi pembelajaran yang termasuk aspek sikap (afektif) yaitu pemberian respon, penerimaan suatu nilai, internalisasi, dan penilaian.

Lebih lanjut, Direktorat Tenaga kependidikan (2008: 28-29) menjelaskan bahwa strategi penyampaian materi aspek sikap (afektif) tersebut dapat dilakukan dengan memilih salah satu metode yang sesuai yaitu: penciptaan kondisi, pemodelan atau contoh, demonstrasi, simulasi, dan lainnya. Misalnya dengan metode penciptaan kondisi: untuk mengajarkan siswa tertib terhadap rambu-rambu lalu lintas, dibuatlah APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas).

2. Strategi pembelajaran harus dapat mendorong aktivitas peserta didik

   Daryanto (2015: 63) menjelaskan bahwa strategi pembelajaran yang dipilih dan dipergunakan dengan baik oleh guru harus dapat mendorong peserta didik untuk aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar. Strategi pembelajaran yang baik yaitu strategi pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, dimana pembelajarannya perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut (H. E. Mulyasa, 2016: 134):

   a. Pembelajaran harus menekankan pada praktik. Dalam hal ini setiap guru harus mampu memilih serta menggunakan strategi dan metode pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mempraktikkan apa-apa yang dipelajarinya
   b. Pembelajaran harus dapat menjalin hubungan sekolah dengan masyarakat. Dalam hal ini setiap guru harus mampu dan jeli melihat berbagai potensi masyarakat yang bisa didayagunakan sebagai sumber belajar, dan menjadi penghubung antara sekolah dengan lingkungannya
   c. Perlu dikembangkan iklim pembelajaran yang demokratis, dan terbuka, melalui pembelajaran terpadu, partisipatif, dan sejenisnya yang dilakukan dengan berfokus pada peserta didik

d. Pembelajaran perlu lebih ditekankan pada masalah-masalah aktual yang secara langsung berkaitan dengan kehidupan nyata yag ada di masyarakat secara kontekstual

3. Strategi pembelajaran harus mampu mengembangkan setiap individu peserta didik dan seluruh pribadi peserta didik

Dalam rangka mengembangkan setiap individu peserta didik dan seluruh pribadi peserta didik, guru PPKn harus berorientasi pada peserta didik dimana guru harus mampu menempatkan peserta didik lebih dominan dalam pembelajaran, yang meletakkan dasar terhadap individu secara utuh. Menurut H. E. Mulyasa (2016: 133), belajar dipandang sebagai aktivitas psikologis yang memerlukan dorongan dari luar. Oleh karena itu, hal-hal yang harus diupayakan antara lain:

a. Bagaimana memotivasi peserta didik, dan bagaimana materi belajar harus dikemas sehingga bisa membangkitkan motivasi, gairah dan nafsu belajar
b. Belajar perlu dikaitkan dengan seluruh kehidupan peserta didik, agar dapat menumbuhkan kesadaran mereka terhadap manfaat dari perolehan belajar

Sehubungan dengan itu, dalam proses pembelajaran yang paling penting adalah apa yang dipelajari peserta didik, bukan apa yang dikehendaki dan diajarkan oleh guru. Dengan kata lain, apa yang dipelajari oleh peserta didik merupakan kebutuhan, dan sesuai dengan kemampuan mereka, bukan kehendak yang ingin dicapai oleh guru.

Selain memperhatikan prinsip-prinsip strategi pembelajaran diatas, guru PPKn hendaknya juga mampu melaksanakan strategi pembelajaran yang lebih maksimal sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat diatasi dengan baik. David Kerr (1999: 14) menjelaskan bahwa PPKn "maksimal" yaitu PPKn yang mampu mewadahi berbagai aspirasi dan melibatkan berbagai unsur masyarakat; menitikberatkan pada partisipasi melalui pencarian isi dan proses di dalam maupun di luar kelas; tujuan utama adalah tidak hanya untuk menginformasikan tetapi juga menggunakan informasi tersebut untuk membantu peserta didik untuk memahami dan untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk

berpartisipasi secara aktif; pendekatan yang sesuai yaitu dengan mentransformasikan didaktik ke interaktif baik di dalam ataupun di luar ruang kelas; melibatkan akuisisi pengetahuan, pemahaman, pengembangan nilai-nilai, disposisi, keterampilan dan sikap dimana dapat dilakukan dengan cara pekerjaan proyek, studi independen dan pengalaman lapangan.

Sebelum menentukan strategi pembelajaran yang sekiranya tepat untuk dilakukan guru dalam menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas peserta didik, terlebih dahulu kita membedakan antara satu metode dengan metode yang lain yang merupakan kategori PPKN "maksimal" kerangka David Kerr yakni sebagai berikut (Abdul Gafur, 2011:15-20):

a. Pekerjaan proyek

   Pekerjaan proyek merupakan suatu metode mengajar di mana peserta didik baik secara individual atau kelompok diberi tugas untuk menyelesaikan kegiatan yang hasilnya dapat diamati dan diukur. Misalnya, proyek membuat maket Istana Negara, membuat maket Makam Pahlawan, membuat maket gedung DPR/MPR, dll

b. Studi independen

   Studi independen merupakan metode pembelajaran di mana peserta didik melakukan kegiatannya bukan dalam bentuk pembelajaran di kelas secara klasikal, melainkan dengan jalan melakukan berbagai kegiatan seperti konsultasi dengan Guru, instruktur, nara sumber, dan sebagainya dalam rangka menyelesaikan tugas belajarnya. Tugas belajar disini dapat berupa pembuatan makalah, penyelesaian proyek, kajian pustaka, penelitan, dll.

c. Pengalaman lapangan

   Pengalaman lapangan merupakan kegiatan belajar secara langsung, praktek di lapangan kerja yang sesungguhnya. Misalnya untuk menanamkan sikap dan keterampilan tolong menolong, peserta didik ditugasi bekerja di panti asuhan yatim piatu, panti jompo atau panti singgah anak jalanan. Peserta didik ditugasi membantu kegiatan administrasi, mengumpulkan bantuan, membagikan

atau menyalurkan bantuan dari masyarakat, mengantarkan berobat ke poliklinik, dll.

Dalam hal ini, dalam menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas pada peserta didik, guru harus mampu mengembangkan semua aspek yaitu *civic knowledge*, *civic skills* dan *civic dispositions* dalam pembelajarannya. Guru PPKn juga hendaknya mampu mendorong peserta didik agar dapat berpartisipasi secara aktif dengan mentransformasikan pembelajaran yang lebih interaktif baik di dalam ataupun di luar ruang kelas sehingga dari pembelajaran yang bermakna tersebut, peserta didik mampu mengembangkan keterampilan dan perilaku sadar hukum. Pembelajaran diluar ruang kelas melalui metode pengalaman lapangan dirasa lebih efektif dilakukan karena peserta didik langsung dihadapkan pada masalah-masalah aktual yang berhubungan dengan masyarakat. Dengan metode pengalaman lapangan ini juga, lebih memungkinkan peserta didik untuk mempraktikkan apa-apa yang dipelajarinya.

Sebagai contoh, Di SMP Negeri 8 Yogyakarta, strategi pembelajaran pendidikan lalu lintas diajarkan guru PPKN, Ibu Sulastri dengan menggelar aksi tertib berlalu lintas diluar sekolah (Tribunjogja.com, 10 November 2016). Ibu Sulastri juga menambahkan bahwa tujuan aksi ini adalah mengajak peserta didik untuk mengenal norma hukum lalu lintas dan berharap peserta didiknya dapat mengingatkan diri sendiri agar tertib berlalu lintas (Radioedukasi.kemdikbud.go.id, 20 Januari 2016). Muchamad Sepriko, salah satu peserta didik yang telah mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut pun mengaku senang bisa ikut dalam kegiatan ini karena dia mengaku sadar jika ternyata melanggar lalu lintas itu sangat berbahaya. Berikut ini ungkapan Sepriko mengenai hal tersebut (Solopos.com, 14 Januari 2016).

> "Setelah berdiri sebentar sambil bawa poster ternyata saya melihat banyak sekali pelanggaran. Saya sendiri jadi intropeksi diri karena menganggap pelanggaran, seperti tidak pakai helm itu hal yang biasa saja," kata Sepriko.

KESIMPULAN

Dalam menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas pada pesrta didik, guru harus mampu mengembangkan semua aspek yaitu *civic knowledge*, *civic skills* dan *civic dispositions* dalam pembelajarannya. Guru PPKn juga hendaknya mampu mendorong peserta didik agar dapat berpartisipasi secara aktif dengan cara mentransformasikan pembelajaran yang lebih interaktif baik di dalam ataupun di luar ruang kelas sehingga dari pembelajaran yang bermakna tersebut, peserta didik mampu mengembangkan keterampilan dan perilaku sadar hukum. Pembelajaran diluar ruang kelas melalui metode pengalaman lapangan dirasa lebih efektif dilakukan karena peserta didik langsung dihadapkan pada masalah-masalah aktual yang berhubungan dengan masyarakat. Dengan metode pengalaman lapangan ini juga, lebih memungkinkan peserta didik untuk mempraktikkan apa-apa yang dipelajarinya.

DAFTAR PUSTAKA

"Jumlah kecelakaan di Indonesia empat tahun terakhir," Republika.co.id, 02 Mei 2017. http://m.republika.ci.id/berita/nasional/umum/17/05/02/opaywe326-jumlah-kecelakaan-di-indonesia-empat-tahun-terakhir

"Jurus baru polisi tekan kecelakaan lalu lintas," Kompas.com, 10 Januari 2017. http://otomotif.kompas.com/read/2017/01/10/171919515/jurus.baru.polisi.tekan.kecelakaan.lalu.lintas

"Pelajar sering terlibat kecelakaan," Tribunjogja.com, 22 Februari 2017. http://jogja.tribunnews.com/2017/02/22/pelajar-sering-terlibat-kecelakaan

"Realtime news: siswa SMPN 8 Yogyakarta ajak pengguna jalan tertib berlalu lintas. Tribunjogja.com, 10 November 2016. http://jogja.tribunnews.com/2016/11/10/realtime-news-siswa-smpn-8-yogyakarta-ajak-pengguna-jalan-tertib-berlalu-lintas

"Siswa SMP N 8 Yogyakarta catat pelanggaran pengendara lalu lintas," Radioedukasi.kemdikbud.go.id. http://radioedukasi.kemdikbud.go.id/read/1254/siswa-smp-n-8-yogyakarta-catat-pelanggaran-pengendara-lalu-lintas.html

"Wakapolri sebut disiplin harus dibangun untuk kurangi kecelakaan," Kompas.com, 30 Juli 2017.

http://nasional.kompas.com/read/2017/07/30/10381631/wakapolri-sebut-disiplin-harus-dibangun-untuk-kurangi-kecelakaan

"35 menit berdiri di tepi Jalan Diponegoro, siswa SMPN 8 Jogja temukan puluhan pelanggaran,"Solopos.com, 14 Januari 2016. http://m.solospos.com/206/01/14/ lalu-lintas-Yogyakarta-35-menit-berdiri-di-tepi-jalan-diponegoro-siswa-smpn-8-Yogyakarta-temukan-puluhan-pelanggaran-680621

Abdul Gafur. 2011. *Model, strategi dan metode pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. Tidak diterbitkan

Daryanto. 2015. *Pengelolaan budaya dan iklim sekolah*. Yogyakarta: Gava Media

David Kerr. 1999. *Citizenship education in the curriculum: an international review*. The School Field, Vol.X, No.3/4

Direktorat Tenaga Kependidikan. 2008. *Strategi pembelajaran PPKN dan ilmu pengetahuan sosial*. Jakarta: PMPTK

H.E.Mulyasa. 2016. *Guru dalam implementasi kurikulum 2013*. Bandung: PT remaja Rosdakarya

Hamruni. 2012. *Strategi pembelajaran*. Yogyakarta: Insan Madani

Jerrold E. Kemp. 1994. *Proses perancangan pengajaran*. Terj.Asril Marjohan. Bandung: ITB

Lexy J. Moleong. 2007. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Maftuh Bunyamin & Sapriya. 2005. *Implementasi KBK PKn dalam berbagai konteks*. Bandung: Jurusan PMPKN FPIPS UPI

Maureen S. Durkin. 1999. *Epidemology and prevention of traffic injuries to urban children and adolescents*. Pediatrics. Vol.103, No.6

Nana Sayodih Sumadinata. 2007. *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Puji Wulandari Kuncorowati. 2009. *Menurunnya tingkat kesadaran hukum masyarakat di indonesia*. Jurnal Civics, Vol.6, No.1

Rita Eka Izaty, dkk. 2008. *Perkembangan peserta didik.* Yogyakarta: UNY Press

Sunarso, dkk. 2008. *Pendidikan kewarganegaraan*. Yogyakarta: UNY Press

Zainuddin Ali. 2007. *Sosiologi hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

PENDIDIKAN HUKUM DALAM MEMBENTUK KOMPOTENSI KEWARGANEGARAAN : APLIKASI TEORI BELAJAR YANG COCOK

Maslan Abdin[1], Nursanda Rizki Adhari[2]
Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia
Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia
Email:
maslanabdin15@gmail.com[1]
sandaadhari@gmail.com[2]

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan mendeskripsikan pendidikan hukum dalam membentuk warganegara yang melek hukum dilaihat dari aplikasi tori belajar yang cocok. penulisan ini berangkat dari dinamika pelanggaran hukum yang kian hari kian meningkat dengan modus pelangaran yang bermcam-macam, selain keluarga masyarakat, pendidikan merupakan suatu media rekonselasi yang memegang peran dalam membentuk warga Negara yang sadar hukum. Belajar pendidikan hukum sangatlah penting karena setiap masyarakat memerlukan hukum sebagai pengatur dalam kehidupan sehari-hari, apalagi sebuah negara yang kelompok masyarakatnya begitu banyak tentunya sangat di perlukan hukum untuk mengatur semua lini kehidupan masyarakat atau rakyatnya. Di Indonesia pendidikan hukum sangat penting di ajarkan di sekolah-sekolah baik dari tingkatan SD sampai dengan perguruan tinggi karena dengan di cantumkannya pendidikan hukum ini diharapakan masyarakat dapat lebih mengerti hukum sejak dini, dengan tujuan diantaranya : (1) Memberikan pengetahuan tentang hukum kepada warga negara,(2) Menjadikan melek hukum dan sarana sosialisasi hukum dikalangan akademis, (3) Menjadikan Tertib hukum dan disiplin.

Kata kunci : Pendidikan Hukum, Kesadaran Hukum, Teori Belajar

PENDAHULUAN

Salah satu pakar hukum, Satjipto Rahardjo menggugat kemapanan pendidikan hukum di Indonesia didominasi pendidikan hukum dogmatik karena telah melanggengkan hukum modern yang menimbulkan perubahan pradigmatik dari orde keadilan menjadi orde undang-undang. Hukum yang semula menjadi masalah manusia dan kemanusiaan bergeser kearah penekanan pada peraturan, struktur dan prosedur. Hukum kemudian telah berubah menjadi teknologi yang harus dikuasai secara formal oleh tenaga ahli yang khusus dididik lembaga formal yang bernama fakultas hukum.

> "*Pembelajaran yang teknologis tersebut lebih menekenakan pada pembinaan ketrampilan profesi. Disebut teknologis karena menekankan pada pengetahuan hukum dan cara-cara menggunakan hukum tersebut. Akibatnya aspek-aspek manusia dan kemanusiaan yang ada pada hukum menjadi kurang diperhatikan dan terdorong ke belakang (Satjipto Rahardjo: 2004)*

Model pembelajaran hukum dalam institusi pendidikan hukum tersebut hanyalah mencakup obyek studi yang dibatasi pada pemahaman peraturan perundang-undangan. Menurut Satjipto Raharjo, model pendidikan hukum tersebut gagal untuk menampilkan hukum dalam gambar yang utuh karena hukum selalu dianggap netral dan terpisah dengan dunia kehidupan nyata. Suatu yang tidak tersentuh dan kedap pengaruh dari sub sistem social lainnya. Pandangan tersebut melihat hukum sebagai intuisi pengaturan yang sederhana, linear, mekanistik, dan deerminisik. Hukum kemudian dikonsepkan sebagai *lawyer's law*, dalam arti hukum identik dengan undang-undang yang harus dilaksanakan dengan prinsip aturan dan logika *(rules and logic).* Pandangan terhadap hukum tersebut tercermin dalam kurikulum pendidikan hukum di Indonesia yang masih lebih bersifat kurikulum yang *conflict-based* daripada *harmony-based*. Secara filosofi kurikulum kita lebih mempersiapkan sumber daya manusia untuk siap bertarung dalam medan kompetisi kehidupan, dari pada menyiapkan tenaga yang lebih merisaukan pembinaan suatu kehidupan dan kesejateraan bersama.

Pendidikan hukum hanya melahirkan sarjana yang pro *status quo,* tidak pernah mendidik dan menghasilkan lulusan yang menciptakan hukum baru. Pembelajar hukum tidak dilatih dan dididik untuk mahir memaknai ketentuan dan peraturan lama dengan pemaknaan baru yang sesuai dengan spirit zamannya. Mereka hanya dikonstruksikan untuk menghayati makna yang sudah tersedia dalam teks, tanpa perlu bersusah payah unutk memproduksi makna berdasarkan pengalamannya. Sehingga tujuan dari pendidikan hukum yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia memiliki pemahaman tentang hukum serta dapat melaksanakan hukum dengan baik kurang Nampak.

Oleh karena ini, di dalam pendidikan hukum harus ada pembaharuan model pembelajaran. Namun sebelum kita menentukan model pembelajaran yang sesuai dan ideal untuk di terapkan dalam pembelajaran pendidikan hukum yang terbilang baru ini tentunya kita memahami terlebih dahulu ***"teori-teori belajar"*** sehingga pendidik dapat menerapkan teori belajar yang sesuai didalam pembelajaran pendidikan hukum. Aplikasi teori belajar dapat digunakan untuk merancang dan menentukan model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan situasi belajar, sehingga penddikan hukum bukan untuk melahirkan manusia yang kompetitif dan mampu bersaing melainkan lulusan yang mampu mendistribusikan nilai-nilai ilahiah seperti keadilan, kebenaran dan kejujuran sebagai dasar eksistnsi hukum untuk menjadi alat perekat social *(social unity).*

PEMBAHASAN

Belajar Pendidikan Hukum

Pendidikan tidaklah merupakan suatu tindakan yang "*einmalig*" atau insidentil sifatnya, tetapi merupakan suatu kegiatan yang kontinyu dan intensif dan terutama dalam hal pendidikan kesadaran hukum ini akan memakan waktu yang lama. Kiranya tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa dengan pendidikan yang intensif hasil peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum baru dapat kita lihat hasilnya yang memuaskan sekurang-kurangnya 18 atau 19 tahun lagi. Ini bukan suatu hal yang harus kita hadapi dengan pesimisme, tetapi harus kita sambut dengan tekad yang bulat untuk mensukseskannya. Dengan pendidikan sasarannya akan lebih dirasakan secara intensif daripada cara lain yang bersifat drastis. Pendidikan yang dimaksud di sini bukan semata-mata pendidikan formal disekolah-sekolah dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, tetapi juga pendidikan non formal di luar sekolah kepada masyarakat luas. Yang harus ditanamkan baik dalam pendidikan formal maupun non formal ialah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi masyarakat Indonesia yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara Indonesia dan sadar hukum.

Kita ketahui bahwa faktor- faktor yang mempengaruhi dalam usaha mempertahankan dan meningkatkan mutu pendidikan hukum dalam kaitannya

dengan fungsi hukum sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, antara lain; (1) Sukarnya menentukan tujuan dari perkembangan hukum (pembaharuan), (2) Sedikitnya data empiris yang dapat digunakan untuk mengadakan suatu analisis deskriptif dan prediktif, (3) Sukarnya mengadakan ukuran yang objektif untuk mengukur berhasil/tidaknya usaha pembaharuan, (4) Sering terdapatnya kepemimpinan yang kharismatis, yang kebanyakan bertentangan kepentingan dengan cita-cita *legal engineering* menuju suatu masyarakat atau negara hukum, apabila pemimpin yang demikian sebagaimana pernah kita alami, tidak dijiwai atau memahami peranan hukum dalam masyarakat dan Negara, (5). khusus dihadapi oleh Negara muda yang lahir dalam dan karena revolusi atau perjuangan kemerdekaan. Masyarakat demi kian menghadapi kesulitan khusus, bahwa kepercayaan dan keseganan terhadap hukum *(respect for the law)* dan peranannya dalam masyarakat yang revolusi dianggap sebagai simbol kekuasaan lama *(colonial, satus quo)* dan karenanya harus ditentang atau sebaiknya diabaikan saja, harus dipulihkan kembali. (6) Inertia (kelambatan) dalam sikap dan gerak yang biasanya meliputi segala hal yang bersangkutan dengan masalah-masalah hukum. (7) Masyarakat Negara berkembang dengan suatu sistem yang pluralistik di mana sistem dan lembaga-lembaga hukum dapat berlaku berdampingan dengan sistem dan lembaga- lembaga hukum barat dan mungkin sistem dan lembaga hukum asing lainnya menghadapi suatu masalah yang khusus. (8) Kurangnya fasilitas termasuk pembayaran gaji yang cukup baik untuk menarik tenaga- tenaga yang baik ke dalam pendidikan atau mempertahankan yang ada supaya tetap tinggal di kalangan pendidikan. Sebab yang lain adalah kurangnya bacaan atau minat untuk membaca atau mungkin dua-duanya. (Mochtar Kusumaatmadja: 2002, 21-55).

Problematika pendidikan hukum, juga berkenaan dengan pembaharuan yang sifatnya teknis, seperti aspek kurikulum, methode pengajaran, dan metode pendekatan. Satjipto Rahardjo menurut beliau, bahwa pengajaran hukum di kebanyakan tempat pendidikan sudah tidak lebih dari suatu proses hafal menghafal semata-mata. Untuk itulah Dalam masyarakat Indonesia yang membangun secara berencana kini hukumlah yang harus membentuk kebiasaan atau pembentukan

hukum justru harus mendahului pelaksanaan pembangunan di lain-lain bidang. Untuk melancarkan pembangunan di bidang itu terutama untuk menjaga agar supaya pembangunan masyarakat itu, tidak akan mengakibatkan ketidakadilan di dalam masyarakat, tetapi tetap akan menegakan keadilan di dalam masyarakat, sekalipun hubungan-hubungan masyarakat dan hubungan antara manusia mengalami perubahan yang terus menerus dan bertubi-tubi. Inilah kiranya inti dari arti hukum sebagai sarana pembangunan atau *social engineering*, dan keadilan (dan hal) ini pulalah perbedaan hakiki antara cara pembentukan hukum dalam hukum adat, dan cara pembentukan hukum dalam masyarakat Indonesia yang modern. Konsep kebiasaan membentuk hukum atau pembentukan dan pengembangan hukum baru terjadi setelah terbentuknya kebiasaan dengan kata lain, bahwa hukum hanya dapat mengikuti perkembangan masyarakat (*hinkt achter de feiten aan*) cara pandang seperti ini, di dasarkan pada dua ajaran yaitu, pertama, ajaran madzhab sejarah yang dikemukakan oleh Carl Friedrich Von Savigny, bahwa hukum itu tidak dibuat, akan tetapi tumbuh bersama- sama dengan masyarakat yang bersangkutan *(Das Recht wird nicht gemacht, aber ist und wird mit dem Volke).*

Dalam hal ini kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat diterapkan dalam pembelajaran pendidikan hukum dengan mengaplikasikan terori-teori belajar yang cocok. Sehinga tujuan pokok dari usaha meningkatkan pendidikan hukum yaitu terselenggaranya pendidikan hukum yang diarahkan dan disesuaikan dengan kepentingan dan ketentuan pembinaan hukum nasional, membantu kegiatan-kegiatan pembaharuan pendidikan hukum yang bertujuan menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan masyarakat yang sedang membangun dan memiliki keterampilan, daya kreasi, rasa tanggung jawab, pengabdian pada kepentingan umum, penegakan hukum, dan keadilan dapat tercapai.

Teori-Teori Belajar

1. Teori behavioristik

Dalam pandangan teori ini, belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan (*reinforcement*). Kaum behavioris menjelaskan bahwa belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku dimana *reinforcement* dan *punishment* menjadi stimulus untuk merangsang pembelajar dalam berperilaku. Karena teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan telah terstruktur rapi dan teratur, maka pembelajar atau orang yang belajar harus dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas dan ditetapkan terlebih dulu secara ketat. Pembiasaan dan disiplin menjadi sangat esensial dalam belajar, sehingga pembelajaran lebih banyak dikaitkan dengan penegakan disiplin.

2. Teori kognitivisme

Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar dari pada hasil belajar itu sendiri. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, lebih dari itu belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman.

3. Teori konstruktivesme

Teori ini memandang siswa sebagai individu yang selalu memeriksa informasi baru yang berlawanan dengan prinsip-prinsip yang telah ada dan merevisi prinsip-prinsip tersebut apabila dianggap sudah tidak dapat digunakan lagi. Hal ini memeberikan implikasi bahwa siswa harus terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran.

Menurut pandangan teori konstruktivisme, dalam proses pembelajaran siswa harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari.

4. Hukum teori belajar

Hukum kesiapan (law of readiness)

Hukum latihan (law of exercise)

Hukum akibat (law of effect)

5. Belajar berdasarkan psikologi sosial

Menurut teori ini proses belajar jarang sekali merupakan proses yang terjadi dalam keadaan menyendiri, tetapi melalui interaksi-interaksi. Interaksi tersebut dapat:

- ✓ *Searah*, yaitu jika adanya stimulasi dari luar menyebabkan timbulnya respons.
- ✓ *Dua arah*, yaitu individu yang belajar dengan lingkungannya, atau sebaliknya, interaksi reciprocal yaitu apabila beberapa faktor yang mempunyai saling ketergantungan, seperti faktor-faktor pribadi, dan faktor-faktor lingkungan saling berinteraksi dan menyebabkan adanya perubahan tingkah laku (bigge, 1982).

6. Teori belajar berdasarkan pengalaman dan pemahaman

Menurut gagne, belajar tidak merupakan sesuatu yang terjadi secara alamiah. Akan tetapi hanya akan terjadi dengan adanya kondisi-kondisi tertentu.yaitu ; (a) kondisi internal, antara lain menyangkut kesiapan peserta didik dan sesuatu yang telah dipelajari,(b)eksternal, merupakan situasi belajar yang secara sengaja diatur oleh pendidik dengan tujuan memperlancar proses belajar.tiap-tiap jenis hasil belajar yang dikemukakan sebelumnya memerlukan kondis-kondisi tertentu yang perlu di atur dan di kontrol. (dr.aunurrahma,m.pd, 2011. Belajar dan pembelajaran)

7. Teori belajar menurut ilmu jiwa daya

Menurut teori ini otak manusia terdiri atas beberapa bagian, faculties, atau daya-daya yang masing-masing mempunyai fungsi tertentu, misalnya daya untuk menghemat, menanggap, mengkhayal, mengingat, berpikir dan sebagainya. Tiap-tiap daya harus dilatih disekolah. Jadi teori ini berpendirian setiap daya termasuk yang terpenting daya berpikir dapat dilatih seperti melatih otot. Kesanggupan berpikir, mengingat dan sebagainya yang telah terlatih dianggap dengan sendirinya dapat dipakai, dipindahkan, atau ditransfer kepada bidang-bidang lain dalam kehidupan anak. Yang diutamakan disini bukannlah penguasaan bahan yang dipelajari melainkan latihan dengan bahan-bahan itu guna pembentukan daya-daya. Jadi pembentukan formalnya (s.nasution 1964).

8. Teori koneksionisme

Menurut teori koneksionisme yang dipelopori oleh thorndike dikenal dengan "connectionism" . Belajar bagi hewan dan manusia berlangsung menurut prisip yang sama yaitu melalui proses pembentukan asosiasi antara kesan panca indra dengan tindakan.

Identifikasikan Teori-Teori Belajar Yang Cocok Diterapkan Dalam Pendidikan Hukum

Pada tabel berikut ini diidentifikasi teori-teori belajar yang cocok diterapkan dalam pembelajaran pendidikan hukum adalah sebagai berikut:

No	Nama Teori Belajar	Intisari Teori	Kecocokan untuk pembelajaran Pendidikan Hukum
1.	**Teori belajar menurut Thorndike** (*Aliran behaviorisme)*	***Connectionism (S-R bond)*** 3 hukum belajar *Law of Effect* – Efek memuaskan à S – R kuat - *Law of Readiness* - *Law of Exercise*; – banyak latihan à S-R makin kuat	Kurang cocok karena hanya memperhatikan perubahan afektif tetapi mengabaikan perkembangan kognitif si pembelajar.
2.	**Teori Belajar menurut Ivan Pavlov** (aliran behaviorisme)	***Classical Conditioning*** - *Law of Respondent Conditioning* (hukum pembiasaan yang dituntut) - *Law of Respondent Extinction* *(*hukum pemusnahan yang dituntut)	cocok karena pada pendidikan hukum membutuhkan hukum pembiasaan dalam belajar,
3.	**Teori Belajar menurut B.F. Skinner** (aliran behaviorisme)	***Operant Conditioning*** - *Law* of *operant conditining* yaitu jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. - *Law of operant extinction* yaitu jika timbulnya perilaku operant telah diperkuat melalui proses conditioning itu tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun bahkan musnah.	Cocok karena dalam pendidikan hukum yang menjadi sumber penguatan juga apabila ada respon
4.	**Teori belajar menurut Albert Bandura** (aliran behaviorisme)	***Social Learning*** Perilaku individu tidak semata-mata eflex otomatis atas stimulus (S – R Bond), melainkan juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif individu itu sendiri	cocok, karena interaksi antara lingkungan tidak dibutuhkan dalam pendidikan hukum dan Secara umum teori belajar dari aliran behaviorisme dapat terjadi dengan baik apabila siswa/ mahasiswa

			ikut berpartisipasi secara aktif didalamnya
5	**Teori Belajar menurut Piaget.** (Aliran Kognitif)	Pembelajaran dengan memperhatikan aspek-aspek perkembangan kognitif. Dengan tahapan (1) *sensory motor*; (2) *pre operational*; (3) *concrete operational* dan(4) *formal operational*.	Cocok karena teori ini memberikan gambaran mengenai tingkat perkembangan kognitif siswa, yang berhubungan erat dengan kemampuan pendidikan hukum anak dan sifat dasar ilmu pendidikan hukum itu sendiri.
6	**Teori belajar menurut Gagne** (aliran Kognitif)	**Pemprosesan Informasi** Dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi, untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Tahapan proses pembelajaran meliputi delapan fase yaitu, (1) motivasi; (2) pemahaman; (3) pemerolehan; (4) penyimpanan; (5) ingatan kembali; (6) generalisasi; (7) perlakuan dan (8) umpan balik.	Cocok, karena kedalam fase ini sangat dibutuhkan dalam pembelajaran pendidikan hukum.
7.	**Teori belajar menurut Ausubel** (Aliran kognitif)	**Teori belajar bermakna** Proses belajar akan mendatangkan hasil atau bermakna kalau guru dalam menyajikan materi pelajaran yang baru dapat menghubungkannya dengan konsep yang relevan yang sudah ada dalam struktur kognisi siswa.	Cocok karena menjadikan pembelajaran pendidikan hukum bermakna dibutuhkan kemampuan guru menghubungkan konsep yang relevan yang sudah ada dalam struktur kognisi siswa, sifat hirarkis pendidikan hukum sangat membutuhkan penguasaan hubungan antara satu konsep dengan konsep lain
11.	**Teori Belajar menurut J.Bruner** (aliran Kognitif)	**Belajar penemuan** 3 tahapan penting dalam pembelajaran yaitu Enaktif (0-2 tahun), Ikonik (2-4 tahun) and Simbolik (5-7 tahun)	Cocok, sifat hirarkis pada pendidikan hukum sangat cocok diterapkan sesuai dengan tahapan-tahapan pembelajaran bruner. Namun lebih cocok diaplikasikan pada SD dan SMP
12.	**Teori Belajar Gestalt**	Menurut pandangan teori gestalt seseorng memperoleh pengetahuan melaui sensasi atau	Relatif cocok, karena belajar untuk memperoleh pemahaman (insighful learning) sangat dibutuhkan

		informasi dengan melihat strukturnya secara menyeluruh kemudian menyusunya kembali dalam struktur yang sederhana sehungga lebih mudah dipahami. **Belajar dengan mendapatkan insight** diperoleh kalau seseorang melihat hubungan tertentu antara berbagai unsur dalan situasi tertentu. Insight bergantung pada: - Kesangupan - Pengalaman - Taraf kompleksitas dari suatu situasi. - Latihan - Trial and error	dalam pendidikan hukum. Pendidikan hukum bukan hapalan tetapi lebih mengembangkan kemampuan berpikir logis dan sistematis
8.	***Teori belajar menurut Clark L. Hull*** *(aliran behaviorisme)*	*Teori prilaku Hypothetico-deductive* Belajar menurut pandangan Hull merupakan perubahan tingkah laku melalui kekuatan kebiasaan. Peranan penguatan sangat diperlukan untuk terjadinya respon, dengan memperhitungkan faktor kelelahan. Hull menggambarkan bahwa belajar merupakan pembentukan antara respon dengan stimulus. Dalam hasil penelitian Hull menyimpulkan bahwa belajar terjadi tidak dengan sekali pecobaan, terjadi melalui proses pengulangan, dan terjadi karena adanya kebutuhan terhadap lingkungan untuk kelangsungan hidup. Maka belajar merupakan penguatan dengan maksud makin banyak belajar, makin banyak penguatan dan motivasi akan semakin besar untuk menuju keberhasil belajar.	Beberapa pandangan Hull, bisa diterapkan dalam pembelajaran pendidikan hukum seperti belajar dengan pengulangan sebagai suatu penguatan.
14	***Teori belajar konstruksi kognitif*** *(aliran konstruktivistik)*	Teori belajar konstruk kognitif merupakan teori yang menyatakan bahwa belajar merupakan proses pertumbuhan kognitif. Pematangan intelektual atau pertumbuhan kognitif	Teori ini cocok dikembangkan pada pendidikan hukum karena pada prinsifnya pembelajar pendidikan hukum menjadi

		seseorang ditunjukkan oleh bertambahnya ketidaktergantungan repon dari efek stimulus. Teori ini menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan mentranformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan lama itu tidak lagi sesuai. Bagi siswa agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, mereka harus bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya.	bermakna karena kemampuan mandiri siswa dalam membangun pemahamannya terhadap pendidikan hukum, yang dapat diaplikasikan dalam memecahkan masalah sehari-hari.
9.	***Teori belajar menurut Vygotsky*** *(aliran kontruktivistik)*	Vigotsky adalah menekankan interaksi antara aspek internal dan eksternal dari pembelajaran dan penekanannya pada lingkungan sosial pembelajaran.	Pendidikan hukum juga merupakan aktivitas sosial manusia, dengan demikian interaksi sosial dalam membangun pemahaman dalam pendidikan hukum juga sangat diperlukan, sehingga teori ini sangat mendukung pembelajaran pendidikan hukum.
10	***Teori Belajar menurut Polya***	Teori pemecahan masalah yang dinyatakan dalam 4 langkah (fase) yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian, menyelesaikan masalah dan melakukan pengecekan kembali semua langkah yang telah dikerjakan.	Sangat cocok, karena metode pemecahan masalah sangat dibutuhkan dalam pembelajaran pendidikan hukum.
11.	**Teori Perkembangan Kognitif Dienes**	Pada dasarnya pendidikan hukum dapat dianggap sebagai studi tentang struktur, memisah-misahkan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur dan mengkategorikan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur. Seperti halnya dengan Bruner, Dienes mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam pendidikan hukum yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik. Ini mengandung arti bahwa jika benda-benda atau objek-objek dalam bentuk permainan akan sangat berperan bila dimanipulasi dengan baik dalam pengajaran pendidikan hukum.	Sangat cocok karena penggunaan metode permainan dalam pendidikan hukum sangat dibutuhkan untuk menstimulus dan meningkatkan antusias belajar siswa.

		Menurut Dienes, permainan pendidikan hukum sangat penting sebab operasi pendidikan hukum dalam permainan tersebut menunjukkan aturan secara konkret dan lebih membimbing dan menajamkan pengertian pendidikan hukum pada anak didik. Dapat dikatakan bahwa objek-objek konkret dalam bentuk permainan mempunyai peranan sangat penting dalam pembelajaran pendidikan hukum jika dImanipulasi dengan baik Tahapan pembelajaran ✓ Permainan Bebas (Free Play) ✓ Permainan yang Menggunakan Aturan (Games ✓ Permainan Kesamaan Sifat (Searching for communalities) ✓ Permainan dengan Simbolisasi (symbolization) ✓ Formalisasi (Formalization)	
12	**Teori belajar Thorndike (teori Koneksionisme)**	belajar bagi hewan dan manusia berlangsung menurut prisip yang sama yaitu melalui proses pembentukan asosiasi antara kesan panca indra dengan tindakan. Hal ini terjadi karena menurut pandangan Thorndike bahwa belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon Hukum Teori Belajar a) *Hukum Kesiapan (Law of Readiness* b) *Hukum Latihan (Law of Exercise)* c) *Hukum Akibat (Law of Effect)*	cocok untuk pembelajaran pendidikan hukum
13	**Teori belajar menurut Bloom dan Krathwohl** (aliran humanistik)	Menurut teori ini ada 3 hal yang harus dikuasai (dipelajari) oleh siswa yaitu kognitif, psikomotor dan afektif. Taksonomi Bloom ini berhasil memberikan inspirasi kepada banyak pakar lain untuk mengembangkan teori-teori belajar dan pembelajaran	Sangat cocok, karena teori ini kajiannya deskriptif diterjemahkan kelangkah-langkah yang praktis dan konkrit dalam pembelajaran pendidikan hokum

14	**Teori belajar menurut Kolb** (aliran humanistik)	Kolb membagi tahapan belajar menjadi 4 tahap, yaitu: - Pengalaman konkrit - Pengalaman aktif dan reflektif - Konseptualisasi - Eksperimentasi aktif Menurutnya siklus belajar semacam ini terjadi secara berkesinambungan dan berlangsung diluar kesadaran si pelajar.	
15.	**Teori belajar menurut Honey dan Mumford** (aliran humanistik)	Teori ini membuat penggolongan siswa menjadi 4 golongan yaitu aktivis, reflector, teoris, dan pragmatis.	Sangat cocok, karena teori ini kajiannya deskriptif diterjemahkan kelangkah-langkah yang praktis dan konkrit dalam pembelajaran pendidikan hokum
16.	**Teori belajar menurut Habermas** (aliran humanistik)	Habermas percaya bahwa belajar sangat dipengaruhi oleh interaksi, baik dari lingkungan maupun dengan sesama manusia. Dengan asumsi ini, dibagi tipe belajar menjadi 3 macam. 1. Belajar tehnis (technical learning) 2. Belajar Praktis (practical learning) 3. Belajar emansipatoris (emancipatory learning)	

Dari uraian diatas teori-teori belajar yang cocok diterapkan dalam pembelajaran pendidikan hukum adalah teori behaviorisme dan teori humanistik, dikarenakan terori behavoriesme menekankan pada pembiasaan yang mana sesuai dengan aplikasi hukum yang membutuhkan pembiasaan sedangkan teori humanistik yang ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia hal ini sesuai dengan pendidikan hukum sebagai *avant garde* dari perubahan kultur berhukum di Indonesia dengan munculnya gagasan

> " pedidikan hukum berbasis memanusiakan manusia. Pendidikan hukum, bukan merupakan pertama-tama dan terutama sebagai pendidikan teknologi dan professional, melainkan menjadi tempat untuk mematangkan kemanusiaan. Semangat yang mendasari pendidikan hukum bukan

bagaimana terampil dan kompeten secara professional, melinkan bagaimana "menolong manusia yang susah dan menderita".

Untuk itu pembelajaran berdasarkan teori humanistik ini sangat cocok untuk diterapkan pada materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Indikator dari keberhasilan aplikasi ini adalah siswa merasa senang bergairah, berinisiatif dalam belajar dan terjaadi perubahan pola pikir, perilaku dan sikap atas kemauan sendiri. Siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, berani, tidak terikat oleh pendapat orang lain dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan , norma , disiplin atau etika yang berlaku. Pemilihan teori dan startegi dapat menentukan tingkat keberhasilan guru dalam mengajarkan suatu konsep baru.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pemabahasan di atas dapat disimpulkan

1. **Teori belajar** adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas.
2. **Macam-macam teori belajar :**
   a. Teori Behaviorisme
   b. Teori Kognitivisme
   c. *Teori Belajar Berdasarkan Psikologi Sosial*
   d. Teori Belajar Berdasarkan Pengalaman dan pemahaman
   e. Teori Organisme / Gestalt mengenai belajar
   f. Teori Konstrukivesme
   g. Teori Belajar Menurut Ilmu Jiwa Daya
   h. Teori Koneksionisme

3. Setelah diidentifikasi teori-teori belajar yang cocok diterapkan dalam pembelajaran pendidikan hukum adalah teori behaviorisme dan teori humanistik, dikarenakan terori behavoriesme menekankan pada pembiasaan yang mana sesuai dengan aplikasi hukum yang membutuhkan pembiasaan sedangkan teori humanistik yang ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia hal ini sesuai dengan pendidikan hukum sebagai *avant garde* dari perubahan kultur berhukum di Indonesia dengan munculnya gagasan " pedidikan hukum berbasis memanusiakan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Sanusi, SH., Prof. Dt A.-,1977, Kesadaran hukum masyarakat, Hukum no.5 tahun ke 4 1977.

Budinungsih, C. Asri. 2005. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.

Kusumaatmadja, Mochtar, 2006, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Penerbit Alumni

Rahardjo, Satjipto, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, *Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas

Rahardjo, Satjipto, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Kompas

Rahardjo, Satjipto, 2009, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia,*Yogyakarta: Penerbit Geneta

Riyanto, Astim, 2003. *Proses Belajar Mengajar Efektif di Perguruan Tinggi*, Bandung: Lembaga Peneritan Yayasan Pembangunan Indonesia

Sumber Interet

Asnaldi, Ari. 2008 *Teori Behavioristik* http://www.scribd.com/doc/8210451/Behavioristik-vs-Konstruktivistik-3 (online) diakses 3 Desember 2013

Asnaldi, Asri. 2009. *Teori-Teori Belajar Proses Perubahan Tingkahlaku dan Belajar*. http://asnaldi.multiply.com/journal/item/5. Diakses tanggal 7 Desember 2013

Proses pembelajaran tersedia di http://docstoc.com/teori_belajarDiakses tanggal 4 Desember 2013

IMPLEMENTASI PRINSIP PENDIDIKAN ISLAM DALAM PENGUATAN PERILAKU ANTI KORUPSI (STUDI KASUS PADA PENDIDIKAN KHAS SEKOLAH ISLAM TERPADU SMPIT INSAN KAMIL KARANGANYAR)

Anisa Nur Rochmah

[1]PPKn Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta
nurrochmahanisa@gmail.com

ABSTRAK

Korupsi adalah hal yang sudah dianggap sebagai budaya di Indonesia. Pendidikan memiliki peran penting dalam usaha pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi di sekolah formal. Setiap sekolah tentu memiliki ciri khas tersendiri dalam melaksanakan pendidikan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi prinsip pendidikan islam dalam pendidikan anti korupsi di Sekolah Islam Terpadu. Motode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Kekhasan yang dimiliki Sekolah Islam Terpadu yang diwujudkan melalui karakter dalam *muwashofat* (10 ciri kepribadian muslim) mengandung berbagai nilai-nilai pendidikan anti korupsi. Berbagai metode pendidikan anti korupsi mulai dari metode keteladanan, pembiasaan dan klarifikasi nilai menjadi model nyata pendidikan anti korupsi yang tidak hanya berpusat di kelas dan bersifat ceramah serta teori semata, namun menjadi proses pendidikan yang berlangsung mulai dari kegiatan belajar di sekolah hingga aplikasi dalam kehidupan sehari-hari.

Kata kunci : *Pendidikan Antikorupsi, Sekolah Islam Terpadu*

PENDAHULUAN

Masalah korupsi di Indonesia merupakan masalah umum yang terjadi mulai daru huu hingga ke bagian hilir. Sekalipun banyak orang beranggapan bahwa korupsi tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila namun masih saja bermunculan para koruptor. Korupsi memang harus diberantas agar bangsa Indonesia kembali pada tatanan nilai yang benar sesuai dengan kepribadiannya. Hasil survey Transparency International pada Januari 2017, Indonesia berada pada peringkat 90 dari 176 negara dengan skor 37 sejajar dengan Kolombia, Liberia, Maroko dan Macedonia. Bila dibandingkan dengan negara dalam lingkup ASEAN, Indonesia kalah tertinggal dengan Singapura yang berada pada peringkat ketujuh dengan skor 87, Brunei Darussalam yang berada pada peringkat 41 dengan skor 58, Malaysia peringkat 55 dengan skor 49. Peringkat Indonesia turun dua tingkat dibandingkan tahun sebelumnya, sekalipun secara skor naik satu poin.

Menurut Donald Fariz (ICW) dalam voaindonesia, peringkat pertama korupsi justru terjadi di kalangan birokrasi, DPRD, dan kepala daerah. Bentuk korupsi yang dilakukan berupa tender, proyek fiktif, pemerasan, mark up pengadaan barang hingga pengelakan pajak. Fenomena ini tentu membutuhkan usaha dari semua masyarakat Indonesia agar segera teratasi. Usaha yang paling mungkin dilakukan dan memberikan efek jangka panjang terhadap pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui pendidikan formal

Langkah preventif (pencegahan) yang dilakukan oleh bidang pendidikan dapat mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia. Mengingat dimasa yang akan datang merekalah yang akan memimpin bangsa ini dari lini paling rendah hingga ke tingkat pemerintahan pusat. Pendidikan dapat berperan dalam memberantas korupsi melalui korelasi antara materi pembelajaran dengan nilai-nilai anti korupsi yang diharapkan mampu membentuk karakter warga negara antikorup. Selain itu pembiasaan karakter tersebut tidak hanya berhenti pada proses pembelajaran di kelas namun juga di luar kelas dengan pembiasan-pembiasaan sederhana yang dapat dilakukan peserta didik.

Beberapa sekolah yang menerapkan pembiasaan-pembiasaan sederhana ini adalah Sekolah Islam Terpadu. Model pembiasan ini merupakan bagian kurikulum dari SIT yang memiliki ciri khas memadukan keilmuan modern dengan pendidikan Islam. Jadi kedua aspek penting baik yang harus dikuasi oleh peserta didik yaitu kurikulum pendidikan nasional dan pendidikan islam dapat dicapai. Dengan berprinsip pada tujuan pendidikan islam yang bertumpu pada dua pilar yaitu pendekatan diri kepada Allah mengantarkan manusia menuju pengenalan dan kemudian pendekatan diri kepada Tuhan pencipta alam. Pilar yang kedua adalah penegmbangan kemampuan sesuai dengan bakat dan kecenderungannya. Agar setiap individu menjadi warga negara dan warga dunia yang memahami segala hak dan kewajiban mereka dalam kerangka hidup bersama dan berperadaban (Standar Mutu SIT, 2014:4). Hal ini sesuai dengan hakikat pendidikan yang dijabarkan oleh Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Sisidiknas Pasal 1yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Tujuan tersebut jelas bahwa pendidikan SIT mempunyai peranan penting dalam mengembangkan nilai anti korupsi melalui penguatan pendidikan islam yang dipadukan dengan kurikulum nasional. Sebab bangsa yang terdidik adalah mereka yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, beriman, berakhlak mulia memiliki kompetensi dan profesionalitas serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Apabila institusi lain tidak mampu melakukan pemberantasan korupsi, maka institusi pendidikan dalam khususnya Islam dapat menjadi alternatif terakhir penyebaran nilai-nilai anti korupsi.

Tulisan ini menjelaskan nilai-nilai anti korupsi yang ada dalam sistem pendidikan Sekolah Islam Terpadu serta implementasinya melalui pembiasaan-pembiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari peserta didik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di SMPIT Insan Kamil Karanganyar pada bulan November 2017 dengan metode kualitatif. Teknik pengambilan data melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Subyek penelitian adalah siswa dan guru SMPIT Insan Kamil Karanganyar. Analisis data dilakukan dengan tahapan pengumpulan, reduksi, dan penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pendidikan Anti Korupsi dalam Islam

Upaya pemerintah dalam memberantas tindak korupsi secara sistematis yang sudah pada taraf akut di negeri ini, masih belum mampu mengurangi perilaku koruptif dan dinilai belum optimal. Korupsi yang merajalela di setiap elemen, baik di tingkat pemerintahan, masyarakat, sekolah, dan instansi lainnya seolah-olah telah menjadi hal yang dianggap biasa dari kehidupan kita. Jika kondisi terus berlarut dan

dibiarkan maka lambat laun negeri ini akan hancur disebabkan perilaku manusia itu sendiri.

Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa *(extra ordinary crime)* yang karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan, tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. (Puspito, 2011: v). Oleh karena itu, tidak berlebihan dikatakan jika siswa sebagai salah satu *agent of change* di negeri ini diharapkan mampu memberikan perubahan dan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sekolah sebagai pusat pendidikan dapat melaksanakan pendidikan antikorupsi terutama dalam membudayakan perilaku antikorupsi terhadap setiap individu yang berada di lingkungan akademik. Pendidik harus mampu membangkitkan rasa ingin tahu (*curiosty*) siswa tentang urgensi materi ini, sehingga mereka mampu menjauhi perilaku koruptif. Pada hakikatnya, pendidikan berarti pengembangan potensi-potensi yang terpendam dan tersembunyi. Individu itu laksana lautan dalam yang penuh mutiara dan bermacam-macam ikan, tetapi tidak tampak. Ia masih berada di dasar laut. Ia perlu dipancing dan digali agar dapat menjadi makanan dan perhiasan bagi manusia.

Manusia mempunyai bakat dan kemampuan yang kalau pandai mempergunakannya bisa berubah menjadi intan, bisa menjadi kekayaan yang berlimpah-limpah. (Langgulung, 2000: 1-2). Hal ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa pendidikan bukan sekedar urusan mencerdaskan akal semata. Akan tetapi, harus mampu mendidik spiritual, dan emosional setiap individu. Jika pendidikan berhasil menyeimbangkan potensi akal, spiritual, dan emosional, maka akan melahirkan sikap *muruah* pada setiap individu. *Muruah* secara *lughawi* berarti kehormatan dan wibawa. Dengan demikian, *muruah* adalah sikap dan perilaku yang selalu menjaga diri dari segala perbuatan yang dapat membuat seseorang jatuh dalam kebinasaan. Salah satu tujuan dari disyariatkannya hukum Islam adalah untuk menjaga kehormatan. Orang yang memiliki sifat *muruah* dapat dipastikan

terhindar dari perilaku korupsi yang merugikan pihak lain dan diri sendiri. (Ismatu, tt: 118).

Dalam konteks pendidikan anti korupsi, rancangan pendidikan harus disusun secara komprehensif dan menerapkan prinsip *cleanand good governance*. Korupsi dimaknai sebagai upaya menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. (Pope, 2013: 6). Perspektif agama melihat tindakan korupsi disebabkan lemahnya nilai-nilai agama dalam diri individu dan masyarakat untuk mencegah tindak korupsi kecil (*petty corruption*), apalagi tindak korupsi besar (*grand corruption*). (Puspito, 2011: 5).

Upaya yang dilakukan KPK untuk memberantas korupsi di negara ini telah banyak dilakukan, salah satunya memberikan bahan ajar berupa buku, modul, komik, novel di tingkat SD-SMA sebagai upaya memberikan pemahaman tentang tindakan korupsi dari skala kecil sampai sekala besar dengan tujuan memberikan infus kepada siswa agar terhindar dari bahaya korupsi.

Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi dalam SIT

Konsep Muwasafat yang menjadi dasar ideologi Sekolah Islam Terpadu mengandung 10 hal yang harus dikuasai baik oleh siswa, guru maupun elemen sekolah yang lain. Dari konsep ini nantinya akan berpengaruh pada proses pendidikan itu sendiri, terutama pendidikan anti korupsi dimana nilai-nilainya juga diambil dari konsep muwasafat yang merupakan karakter kepribadian muslim. Berikut hasil analisis penulis dari buku Standar Mutu Kekhasan Sekolah Islam Terpadu dengan Nilai-Nilai Anti Korupsi yang dirulis oleh Amirulloh dan Arbain (2014:70-74) serta Agus (2013: 45-46) :

No	Muwasafat	Indikator untuk SMP/MTs	Nilai Anti Korupsi
1	*Salimul Aqidah*, memiliki aqidah yang lurus	a. Mengesakan Allah dan tidak menyekutukannya	Jujur, tanggung jawab, kerja keras, adil

		dalam asma, sifat dan perbuatannya, b. Menjaga diri untuk tidak mengkafirkan orang islam, merasakan ada pengawasan malaikat dalam kehidupan, c. Memilih teman dan bergabung dengan orang-orang shaleh, d. Terbiasa ikhlas dalam beramal	
2	*Sohibul Ibadah,* Beribadah yang benar	a. Terbiasa tertib dalam berjama'ah b. Terbiasa dzikir,puasa, al ma'tsurat, shalat sunnah rawatib dan QL c. Terbiasa menyebarkan dan menjawab salam d. Membiasakan diri membantu orang tekena musibah e. Belajar amar ma'ruf nahi munkar f. Membiasakan niat dalam ibadah karena Allah g. Menjaga diri dari dosa-dosa kecil	Disiplin, jujur, tanggung jawab, peduli
3	*Matinul Khuluq,* Berkepribadian matang dan berakhak mulia	a. Memahami konsep diri dengan benar dan mampu bersikap dengan baik b. Mampu menunjukkan sikap percaya diri yang berlandaskan kepada nilai-nilai kebenaran c. Mampu mengenal, mengungkapkan dan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi sesuai perkembangannya d. Mampu menunjukkan sikap inisiatif, mandiri	Mandiri, kerja keras, berani, peduli, jujur

		dan pekerja keras dalam kehidupan sehari-hari e. Terbiasa menunjukkan rasa malu untuk berbuat dosa f. Terbiasa bersikap berani dalam menyampaikan nilai-nilai kebenaran g. Terbiasa berpikir positif kepada orang lain h. Terbiasa menjenguk dan mendo'akan orang yang tekena musibah i. Berbakti pada orang tua dan peduli kepada keluarga j. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan masyarakat k. Terbiasa dan siap dalam menerima kritik dan koreksi dari orang lain l. Menghargai perbedaan dan berempati kepada orang lain m. Terbiasa menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara n. Terbiasa menjaga fasilitas umum o. Ikut bepartisipasi dalam mewujudkan sikap hidup ramah lingkungan	
4	*Qodirun 'alal Kasbi,* Mandiri	a. Mampu menyelesaikan tugas tanpa bantuan orang	Mandiri, Berani, Kerja keras, Sederhana

		b. Mampu mengelola uang saku pekanan dengan baik c. Belajar mandiri untuk mengembangkan potensinya d. Mampu jual beli yang menguntungkan e. Memiliki jiwa entrepreneurship f. Gemar menabung g. Mengupayakan hasil uang dari usaha sendiri h. Mengutamakan produk dalam negeri i. Mampu mengungkapkan ide/wawasan j. Mampu mempresentasikan hasil pembelajaran berbasis IT	
5	*Mutsaqoful Fikri*, Memiliki wawasan yang luas	a. Mempelajari sirah nabawiyah dan sahabat b. Mengenal isu kekinian c. Mempelajari fiqih ibadah dan muamalah d. Memahami ideologi-ideologi yang bertentangan dengan agama islam	Kerja keras
6	*Qowiyul Jismi* Kebugaran Jasmani	a. Terbiasa membeli makanan halal b. Memiliki keterampilan memasak dan menyajikan makanan dengan menu sederhana c. Menjaga kebersihan lingkungan d. Menjauhi rokok, narkoba, miras e. Memahami dasar-dasar P3K f. Terbiasa tidur awal dan bangun sebelum fajar	Mandiri, Tanggungjawab

		g. Usaha merawat diri dengan benar dan menjaga penampilan h. Menguasai gerakan-gerakan dasar beladiri	
7	*Mujahadah li Nafsihi* Kesungguhan dan Motivasi yang Tinggi	a. Terbiasa hadir di sekolah tepat waktu b. Terbiasa menghargai aturan yang ada c. Terbiasa belajar dengan baik dan memanfaatkan waktu dengan maksimal d. Terbiasa menulis naskah dengan sederhana e. Rajin membaca buku f. Membiasakan diri mengikuti berita edukasi baik nasional maupun internasional termasuk dunia islam g. Berlatih menentukan skala prioritas kebutuhan hidup h. Terbiasa menjaga anggota badan dari perbuatan buruk i. Menjaga adab pergaulan lawan jenis dalam islam j. Belajar mengendalikan emosi	Jujur, Disiplin, Tanggung jawab, Mandiri, Peduli
8	*Munazhom fi Syu'nihi* Terampil Mengelola Urusannya	a. Terbiasa menyusun rencana kegiatan b. Tidak terburu-buru c. Memiliki skala prioritas	Mandiri
9	*Harisun 'alal waqti* Disiplin Waktu	Tepat waktu dan menggunakannya untuk hal yang bermanfaat	Disiplin
10	*Nafi'ul li Ghoirihi* Bermanfaat bagi Orang lain	a. Belajar berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat	Peduli

	b. Belajar berdakwah di keluarga dan masyarakat

Konsep ini diintegrasikan dalam proses belajar mengajar yang berlangsung di kelas dan di luar kelas dengan berlandaskan pada kurikulum nasional. Selain itu, pelaksanaan kurikulum dalam proses belajar mengajar juga ditunjang dengan guru yang mampu menjadi teladan bagi siswa. Sehingga tanggung jawab pendidikan anti korupsi tidak hanya berhenti pada mata pelajaran PAI dan PKn belaka, akrena setiap guru juga wajib memberikan teladan serta mendampingi anak-anak baik di lingkungan sekolah maupun di luar dengan cara menjalin komunikasi orang tua

METODE PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SIT

Model yang digunakan dalam pendidikan korupsi SIT yang *pertama* adalah dengan metode keteladanan. Dalam metode ini *stakeholder* di sekolah terutama guru harus memberikan keteladanan kepada siswa. Proses penanaman nilai anti korupsi kepada peserta didik melalui proses keteladanan pada mulanya dilakukan secara mencontoh, namun peserta didik perlu diberikan pemahaman mengapa hal itu dilakukan (Sanjaya, 2011:179). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ditemukan bahwa model keteladanan ini berlaku setiap hari dan setiap waktu, misalnya setiap bertemu anak maka guru wajib memberikan salam atau sebaliknya, setiap guru memiliki targetan amal ibadah yang indikatornya lebih tinggi dibandingkan siswa, membiasakan bertuutur kata yang baik dan sopan, jujur dalam perkataan bahkan ketika bercanda, datang lebih awal ke sekolah dll. Karena dari awal proses seleksi guru, setiap tenaga pendidik harus memenuhi syarat diantaranya selain harus memiliki empat kompetensi guru juga harus memiliki kompetensi kepribadian islam dan keshalihan sosial.

Model kedua yang dipakai adalah metode pembiasaan. Kebiasaan disini adalah kebiasaan perbaikan sikap dan perilaku salah yang tekadang sering dilakukan oleh peserta didik. Melalui pembiasaan diharapkan peserta didik dapat selalu konsisten dalam setiap perbuatan yang ia lakukan di sekolah maupun luar sekolah (Syarbini dan Arba'in, 2014:65). Model kedua ini sudah benar-benar bisa

dilaksanakan oleh sebagian siswa SMPIT Insan Kamil Karanganyar. Misalnya, mereka terbiasa langsung melapor dan meminta poin ketika datang terlambat. Hal kecil seperti mencontek juga tidak dilakukan apalagi untuk jenjang 8dan 9, karena mereka menyadari nilai bukan segalanya. Ini terjadi karena penilaian guru lebih ditekankan pada penilaian proses. Contoh lain adalah evaluasi pekanan di kelas yang membuat siswa terbiasa menyelesaikan permasalahan di kelas secara mandiri dan peduli dengan masalah teman yang lain. Karena prinsip kepedulian sangat ditanamkan di sekolah ini.

Model yang ketiga adalah klarifikasi nilai atau penjernihan nilai yang dapat diartikan sebagai teknik pengajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dari diri peserta didik (Sanjaya, 2011:282). Model ini diimplementasikan melalui konseling-konseling yang dilakukan wali kelas kepada setiap anak. Konseling ini tidak hanya dilakukan ketika anak terlibat dalam suatu masalah, namun rutin dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengenal potensi anak.

KESIMPULAN

Nilai-nilai dalam muwasofat memberikan warna baru dalam ragam pendidikan anti korupsi di sekolah. Khas yang dimiliki SIT menjadi hal yang patut diapresiasi karena menunjukkan model nyata pendidikan anti korupsi yang tidak hanya berpusat di kelas dan bersifat ceramah serta teori semata. Implementasi pendidikan anti korupsi yang telah termaktub lewat nilai-nilai yang ada dalam muwasofat perlu ditingkatkan dari segi pengoptimalan konseling agar mampu memahami potensi dan penangan yang tepat bagi setiap siswa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memudahkan proses pembuatan makalah ini, guru dan siswa SMP IT Insan Kamil Karanganyar.

DAFTAR PUSTAKA

Ismatu, Ropi, et.al.(tt). *Pendidikan Agama Islam di SMP dan SMA*. Jakarta: Kencanataf

JSIT. 2014. *Standar Mutu JSIT: Kekhasan Sekolah Islam Terpadu*. Jakarta: Tim Mutu JSIT Indonesia

Langgulung, Hasan. 2000. *Asas-Asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Al-Husna Zikra

Mazrieva, Eva. 2017. *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun ke Peringkat 90*. https://www.voaindonesi.com/amp/indeks-persepsi-korupsi-ri-turun-/3692750.html, diakses tanggal 19 November 2017

Pope, Jeremy. 2013. *Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Puspito, Nanang T, dkk. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbud

Sanjaya, Wina. 2011. *Pembelajaran dalam Implementasi*. Jakarta: Kencana

Syarbini. A., Arbain M. 2014. *Pendidikan Anti Korupsi*. Bandung: Alfabeta

Wibowo, Agus.2013. *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

GERAKAN PUNGUT SAMPAH (GPS) SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT KESADARAN LINGKUNGAN WARGA NEGARA (STUDI KASUS PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA BANDUNG)

Meidi Saputra[1], Masrukhi[2]
[1]Universitas Muhammadiyah Semarang, Semarang
[2]Universitas Negeri Semarang, Semarang
saputrameidi@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Gerakan Pungut Sampah (GPS) sebagai upaya memperkuat kesadaran lingkungan warga negara (studi kasus pada sekolah menengah atas di Kota Bandung). Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian, pertama, Gerakan Pungut Sampah (GPS) merupakan kegiatan habituasi (pembiasaan) untuk mengubah kultur warga negara yang dilakukan dengan cara berkolaborasi antara sekolah menengah atas di Kota Bandung dengan pemerintah Kota Bandung. Kedua, Kampanye Gerakan Pungut Sampah (GPS) dilakukan secara persuasif berbasis virtual dengan media sosial sebagai alat pendekatannya. Ketiga, adanya integrasi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan pendidikan lingkungan hidup dan penyediaan fasilitas sekolah berwawasan lingkungan di sekolah menengah atas di Kota Bandung.

Kata kunci : *Gerakan Pungut Sampah (GPS), Kesadaran Lingkungan, Sekolah Menengah Atas.*

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia yang semakin kompleks membuat kondisi lingkungan menjadi dalam suatu keadaan *"unstainable"* (ketidakseimbangan). Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa tidak adanya sikap dan interkasi manusia terhadap lingkungan sehingga mau tidak mau hal ini membuat kesadaran terhadap penjagaan lingkungan menjadi tidak ada. Tentu saja hal ini menjadi sebuah kerugian dalam kehidupan manusia. Siahaan (dalam Prasetyo, 2013, hlm. 2) menegaskan bahwa manusia adalah faktor terbesar yang "berkontribusi" terkait perusakan lingkungan dibandingkan faktor alam itu sendiri.

Kesadaran lingkungan yang rendah pada manusia perlu dibangun, mengingat lingkungan yang menjadi tempat manusia tinggal perlu mendapat perhatian agar para generasi penerus tidak mewarisi keadaan lingkungan yang buruk. Kesadaran lingkungan adalah pengertian yang mendalam pada orang seorang atau sekelompok orang yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah

laku yang mendukung pengembangan lingkungan. MT Zen (dalam Jamanti, 2013, hlm. 27) mengungkapkan bahwa kesadaran lingkungan merupakan usaha melibatkan setiap warga negara dalam menumbuhkan dan membina kesadaran untuk melestarikan lingkungan berdasarkan tata nilai, yaitu tata nilai dari pada lingkungan itu sendiri dengan filsafat hidup secara damai dengan alam lingkungannya. Sedangkan Neolaka (2008, hlm. 41) berpendapat bahwa kesadaran lingkungan adalah kesadaran untuk mengarahkan sikap dan pengertian masyarakat terhadap pentingnya lingkungan yang bersih, sehat dan sebagainya.

Kemudian menurut Swan dan Stapp (dalam Darmawan, dkk, 2009, hlm. 104), kesadaran terhadap lingkungan merupakan bentuk kepedulian seseorang terhadap kualitas lingkungan, sehingga muncul berbagai aksi menentang kebijaksanaan yang tidak berwawasan lingkungan. Berdasarkan pemaparan-pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran lingkungan adalah suatu usaha untuk merubah, menumbuhkan, sekaligus membina warga negara yang terwujud dalam pemikiran, sikap dan tingkah laku agar lebih bijak dalam pemanfaatan lingkungan.

Salah satu cara untuk membangun kesadaran lingkungan pada warga negara adalah dengan memberikan edukasi (pendidikan) pada warga negara itu sendiri. Sifat pendidikan yang "*more sustainable developed*" membuat cara ini masih dianggap sebagai instrumen yang efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut. Lalu pendidikan seperti yang dapat mengatasi krisis kesadaran lingkungan pada warga negara? Salah satunya adalah melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

Pemilihan pendidikan kewarganegaraan sebagaim instrumen dalam membangun kesadaran lingkungan cukup beralasan. Sebab kurikulum pendidikan kewarganegaran itu sendiri memiliki tujuan membekali warga negara berupa kemampuan dalam merubah cara pandang dan perilaku warga negara dalam mengelola krisis yang ada di lingkungannya. Hal ini sebagaimana yang pernah disampaikan Parker, dkk (dalam Winataputra & Budimansyah, 2007, hlm. 1) bahwa pendidikan kewarganegaraan hendaknya diwujudkan dalam bentuk "...*a curriculum geared to the development of world citizens who are capale of dealing*

with the crises" yaitu seperangkat kurikulum yang diarahkan pada pengembangan warga dunia yang mampu mengelola krisis.

Pendidikan Kewarganegaraan menjadi kurikulum yang bertujuan mendidik agar warga negara mampu mengelola krisis berkaitan erat dengan pengembangan karakteristik warga negara yang disampaikan Cogan (1998). Cogan mengidentifikasi delapan karakteristik yang perlu dimiliki warga Negara sehubungan dengan semakin beratnya tantangan yang harus dihadapi dimasa mendatang. Karakteristik warga negara tersebut meliputi:

1. Kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga negara masyarakat global;
2. Kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat;
3. Kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya;
4. Kemampuan berfikir kritis dan sistematis;
5. Kemauan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan;
6. Kemauan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah bisa, guna melindungi lingkungan hidup;
7. Memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak azasi manusia (seperti hak kaum wanita, minoritas etnis, dsb.);
8. Kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintahan lokal, nasional, dan internasional (Sapriya dan Winataputra, 2004, hlm. 9).

Menilik peran sentral pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk warga negara yang mampu mengelola krisis, maka pengembangan pendidikan kewarganegaraan mutlak diperlukan. Dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan seyogyanya pendidikan kewarganegaraan harus memiliki jati diri; diorganisasikan secara lintas bidang ilmu; difasilitasi dengan pembelajaran yang bersifat partisipatif dan interaktif; isi dan prosesnya dikaitkan pada kehidupan nyata; diselenggarakan dalam situasi yang demokratis; diupayakan agar mewadahi keanekaragaman sosial budaya masyarakat; dan dikembangkan bersama secara

kolaboratif oleh sekolah, orang tua dan masyarakat termasuk pemerintah (Winataputra dan Budimansyah, 2007, hlm. 29).

Salah satu cara mengembangkan pendidikan kewarganegaraan adalah dengan melakukan kolaborasi antara orang tua, sekolah, masyarakat dan pemerintah. Wujud nyata hal tersebut dibuktikan dengan penandatanganan kesepakatan bersama tentang pendidikan lingkungan hidup (PLH) antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup dalam mendukung proses membangun kesadaran lingkungan pada masyarakat khususnya masyarakat yang berada pada usia sekolah. Tujuan utama dari kesepakatan tersebut terintegrasinya mata pelajaran sekolah dengan pendidikan lingkungan hidup untuk mewujudkan perilaku dan berbudaya lingkungan hidup".

Kemudian wujud nyata berikutnya adalah pemerintah merespon cepat permasalahan lingkungan yang terjadi di daerahnya dalam hal ini adalah pemerintah Kota Bandung. Melalui instruksi walikota, dalam hal ini Bapak Ridwan Kamil, pemerintah Kota Bandung banyak mengeluarkan kebijakan atau program yang berwawasan lingkungan. Salah satu program berwawasan lingkungan yang dibuat untuk membangun kebiasaan (*habit*) masyarakat Kota Bandung terhadap pelestarian lingkungan hidup adalah aksi "Gerakan Pungut Sampah (GPS)".

Gerakan Pungut sampah merupakan program untuk mengubah kultur masyarakat untuk lebih mencintai Kota Bandung. Perubahan kultur dari yang biasanya cuek, biasanya buang sampah sembarangan, kultur yang biasa pasif menjadi aktif untuk mencintai kebersihan. Gerakan Pungut Sampah adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bandung supaya masyarakat membiasakan diri untuk menjaga kebersihan di lingkungannya dengan cara menyediakan waktu 10 hingga 30 menit untuk memungut sampah di lingkungan sekitar. Gerakan ini secara formal dilakukan setiap hari senin, rabu dan jum'at (Kompas, 23 Juni 2014). Gerakan Pungut Sampah (GPS) adalah suatu aksi yang memberikan keteladanan, memberikan motivasi kepada masyarakat/orang lain untuk menciptakan lingkungan yang bebas sampah, membentuk masyarakat agar menjaga lingkungan bebas sampah dan menempatkan sampah sesuai dengan

kategorinya pada tempat yang diperuntukkannya. Gerakan ini juga dilakukan untuk menjaga dan menegakkan perda K3 Kota Bandung (BPLH Kota Bandung).

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul Gerakan Pungut Sampah (GPS) sebagai Upaya Memperkuat Kesadaran Lingkungan Warga Negara (Studi Kasus pada Sekolah Menengah Atas di Kota Bandung).

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang Gerakan Pungut Sampah (GPS) sebagai Upaya Memperkuat Kesadaran Lingkungan Warga Negara ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian ini dilakukan pada SMA Negeri Atas di Kota Bandung. Informan peneliti terdiri dari Kepala Sekolah, Guru PKn Sekolah dan peserta didik sekolah. Hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan model Milles dan Huberman. Teknis analisis tersebut terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data (Milles dan Huberman, 2012). Data yang berhasil diperoleh kemudian divalidasi menggunakan triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gerakan Pungut Sampah (GPS) sebagai Upaya Memperkuat Kesadaran Lingkungan Warga Negara (Studi Kasus pada Sekolah Menengah Atas di Kota Bandung).

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Gerakan Pungut Sampah (GPS) merupakan kegiatan habituasi (pembiasaan) untuk mengubah kultur warga negara yang dilakukan dengan cara berkolaborasi antara sekolah menengah atas di Kota Bandung dengan pemerintah Kota Bandung.

Kesadaran sebagai bagian dari alam mutlak dibutuhkan manusia apabila menginginkan lingkungan yang menjadi tempat kehidupan menjadi lebih baik. Lalu muncul pertanyaan bagaimana manusia dapat membangun kesadaran itu? Tentu

saja kesadaran itu dapat dibangun hanya jika manusia berpikir bahwa lingkungan yang menjadi tempat mereka tinggal tidak selamanya akan ditempati oleh mereka. Akan ada generasi penerus yang akan melanjutkan kehidupan sekaligus mewarisi lingkungan hasil kehidupan manusia sebelumnya. Dengan kata lain manusia memerlukan edukasi terhadap pelestarian lingkungan sehingga mereka tidak memanfaatkan lingkungan sebesar-besarnya lalu generasi penerus mengalami imbas akibat perbuatan mereka di masa lalu. Urgensi terhadap edukasi pelestarian lingkungan inilah yang menyebabkan muncul konsep pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan (*Education Sustainable for Development*).

Education Sustainable for Development (ESD) merupakan satu pola untuk mengikuti kesepakatan internasional di dalam pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup di seluruh dunia, hal ini adalah untuk melakukan revitalisasi di dalam perubahan karakter pendidikan yang selama ini di lakukan di berbagai lembaga pendidikan untuk memasukkan aspek lingkungan hidup agar terbentuk perilaku manusia yang berbudaya lingkungan hidup. Untuk mewujudkan tujuan mulia dari konsep ESD, tentu saja tidak bisa mengandalkan dunia pendidikan semata. Konsep ini dapat terwujudkan apabila terdapat kolaborasi antara dunia pendidikan dengan pemerintah.

Kolaborasi antara dunia pendidikan dan pemerintah ini dapat dilihat pada pemerintah Kota Bandung. Melalui instruksi walikota, dalam hal ini Bapak Ridwan Kamil, pemerintah Kota Bandung banyak mengeluarkan kebijakan atau program yangbertujuan untuk membangun kesadaran lingkungan pada masyarakat. Salah satu program tersebut adalah aksi "Gerakan Pungut Sampah (GPS)".

Gerakan Pungut sampah merupakan program untuk mengubah kultur masyarakat untuk lebih mencintai Kota Bandung. Perubahan kultur dari yang biasanya cuek, biasanya buang sampah sembarangan, kultur yang biasa pasif menjadi aktif untuk mencintai kebersihan. Gerakan Pungut Sampah adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bandung supaya masyarakat membiasakan diri untuk menjaga kebersihan di lingkungannya dengan cara menyediakan waktu 10 hingga 30 menit untuk memungut sampah di lingkungan sekitar. Gerakan ini secara formal dilakukan setiap hari senin, rabu dan jum'at.

Hadirnya Gerakan Pungut Sampah (GPS) ini bagi diharapkan dapat menjaga dan menegakkan perda K3 Kota Bandung sekaligus sebagai aksi dalam rangka memberikan keteladanan, motivasi sampai kemampuan masyarakat untuk menempatkan sampah sesuai dengan kategorinya pada tempat yang diperuntukkannya. Dalam pelaksanaan berbagai macam program berwawasan lingkungan, pemerintah Kota Bandung melakukan kolaborasi dengan sekolah dan berbagai elemen masyarakat ((Kompas, 23 Juni 2014, BPLH Kota Bandung).

Kedua, kampanye Gerakan Pungut Sampah (GPS) dilakukan secara persuasif berbasis virtual dengan media sosial sebagai alat pendekatannya. Adalah suatu keharusan untuk merubah diri sendiri apabila manusia menginginkan perubahan dalam hidupnya, termasuk perubahan dalam kesadaran terhadap pelestarian lingkungan. Pola pikir dan kebiasaan yang selama ini tidak berpihak pada lingkungan harus ditinggalkan. Manusia hendaknya dapat melihat lingkungan sebagai bagian dari kehidupan mereka, sehingga kondisi "*sustainable"* (keseimbangan) pada lingkungan dapat terwujud. Untuk itu, dalam membangun kesadaran lingkungan pada warga negara diperlukan pendekatan yang harus mengadaptasi dengan perkembangan zaman. Hal ini dilakukan sebagai langkah adaptif sekaligus solutif sehingga tujuan akhir yang dicapai pun dapat berjalan efektif. (Darmawan, dkk. 2009, hlm. 104, Prasetyo, 2013, hlm. 6).

Perkembangan dunia teknologi dan informasi yang semakin cepat telah memunculkan internet sebagai pemeran utama dalam membawa transformasi pada kehidupan manusia menjadi serba modern dan digital. Sebagai dampak dari hal ini, tentu saja internet semakin mudah dijangkau dan menjadi rutinitas dalam masyarakat (Watie, 2011, hlm. 71; Juditha 2011, hlm. 2; Siswanto, 2013, hlm. 81).

Keberadaan internet yang sudah menjadi *lifestyle* masyarakat semakin tidak terbendung ketika muncul *platform* bernama media sosial. Menurut Kaplan dan Haenlein (2010; 61), media sosial adalah kumpulan aplikasi berbasis internet yang dibuat berdasarkan kerangka pikiran ideologi dan teknologi dari *web* 2.0 dan memungkinkan terbentuknya kreasi, partisipasi dan kolaborasi antar pengguna internet. Senada dengan apa yang disampaikan Gunellius (2011: 10) yang mengemukakan bahwa media sosial adalah penertiban online dan alat-alat

komunikasi, situs dan tujuan dari *web* 2.0 yang berakar pada percakapan, keterlibatan dan partisipasi.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan poin penting hadirnya media sosial adalah bahwa media ini menonjolkan sebuah hubungan dua arah (*feedback*) yang memungkinkan penggunanya untuk terlibat dan berpartisipasi terhadap apa yang menjadi pembahasan dalam ruang publik. Peluang ini yang ditangkap pemerintah Kota Bandung dalam membangun kesadaran lingkungan warga negara khususnya warga negara yang berada pada usia sekolah.

Sifat media sosial yang viral, dapat dijadikan alat pendekatan yang persuasif dalam memobilisasi warga negara guna berpartisipasi terhadap pelestarian lingkungan. Langkah ini merupakan pendekatan yang cerdas dan kekinian dalam mengadapatasi kemajuan zaman yang semakin hari semakin berkembang. Maka pola pikir warga negara dalam mengatasi krisis lingkungan pun harus mampu juga memanfaatkan kemajuan zaman. Upaya pendekatan persuasif dari pemerintah Kota Bandung terwujud dalam suatu kolaborasi dengan sekolah dan berbagai elemen masyarakat dengan memanfaatkan *platform* yang ada di media sosial seperti *facebook*, *twitter* dan *instagram* untuk kampanye mengenai kesadaran lingkungan. Disamping itu juga pemerintah membuat poster, baliho yang dipasang di ruang-ruang publik sehingga semakin membumikan Gerakan Pungut Sampah (GPS) sebagai cara cerdas warga negara dalam menjaga lingkungan mereka.

Ketiga, adanya integrasi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan pendidikan lingkungan hidup dan penyediaan fasilitas sekolah berwawasan lingkungan di sekolah menengah atas di Kota Bandung. Penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Lingkungan Hidup telah membawa kesepakatan untuk melakukan integrasi materi lingkungan hidup terhadap pelajaran di sekolah dan menyediakan fasilitas sekolah berwawasan lingkungan. Salah satu mata pelajaran sekolah yang diintegrasikan dengan materi pendidikan lingkungan hidup (PLH) adalah mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn). Terintegrasinya mata pelajaran PKn dengan PLH merupakan sebuah rekayasa cerdas sekaligus solutif terhadap pembelajaran pendidikan kewarganegaraan guna membangun

kesadaran lingkungan peserta didik. Tindakan ini dilakukan agar peserta didik dapat mengatasi krisis yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sebagaimana yang disampaikan Bevis dan Finkel (dalam Sudrajat, 2011, hlm. 5) berdasarkan hasil studi "*The Impact of Civic Education Program on Political Participation and Democratic Attitudes*" yang merekomendasikan bahwa "*Civic Education Programs should focus on themes that are immadiately relevant to people daily lives*".

Terintegrasinya mata pelajaran PKn dengan PLH juga dilakukan bukan tanpa alasan. Rekayasa tersebut dilakukan semata-mata merupakan upaya agar subjek pembelajaran Pkn menjadi kuat. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Budimansyah (2008, hlm 182) bahwa dalam prosesnya, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan hendaknya menjadi "subjek pembelajaran yang kuat" (*powerful learning area*) yang ditandai dengan pengalaman belajar kontekstual dengan ciri-ciri: bermakna (*meaningful*), terintegrasi (*integrated*), berbasis nilai (*value based*), menantang (*challenging*), dan mengaktifkan (*activating*).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut ini. pertama, Gerakan Pungut Sampah (GPS) merupakan kegiatan habituasi (pembiasaan) untuk mengubah kultur warga negara yang dilakukan dengan cara berkolaborasi antara sekolah menengah atas di Kota Bandung dengan pemerintah Kota Bandung. Kedua, Kampanye Gerakan Pungut Sampah (GPS) dilakukan secara persuasif berbasis virtual dengan media sosial sebagai alat pendekatannya. Ketiga, adanya integrasi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan pendidikan lingkungan hidup dan penyediaan fasilitas sekolah berwawasan lingkungan di sekolah menengah atas di Kota Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

Budimansyah, D. (2008). *Revitalisasi Pembelajaran PKn melalui Praktik Belajar Kewarganegaraan Project Citizen*. Jurnal Acta Civicus, Vol 1 No. 2.

Darmawan, B, dkk. (2010). *"Hubungan Pengetahuan, Sikap, Perilaku dan Peran Serta dengan Kesadaran Lingkungan Hidup serta Kesanggupan Membayar Masyarakat Sekitar Bantaran Sungai di Kota Pekanbaru"*. *Journal of Environmental Science*. Program Studi Ilmu Lingkungan PPS Universitas Riau

http://bplh.bandung.go.id/v2/gerakan-pungut-sampah/

http://regional.kompas.com/read/2014/06/23/1114368/Ridwan.Kamil.Bikin.Gerakan.Pungut.Sampah.Senin.Rabu.Jumat.

Gurnelius, S. (2011). *30-minute Social Media Marketing*. McGraw-Hill Companies, United States.

Neolaka, A. (2008). *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Jamanti, R. (2014). *"Pengaruh Berita Banjir di Koran Kaltim terhadap Kesadaran Lingkungan Masyarakat Kelurahan Temindung Permai Samarinda"*. eJournal Ilmu Komunikasi. Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Juditha, C. (2011) *Hubungan penggunaan situs jejaring sosial facebook terhadap perilaku remaja di Kota Makassar*. Jurnal Penelitian IPTEKKOM Volume 13, No. 1, Juni 2011. Makassar: Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Makassar

Kaplan and Haenlein. (2009). *Users of The World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media*. Kelley School of Business, Indiana University.

Miles, M. & Huberman, A. M. (2012). Analisis Data Kualitatif Buku, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Prasetyo, AW. (2013). *Perlunya Kesadaran Lingkungan terhadap Diri Manusia*. Semarang: Jurnal Teknologi Pendidikan, Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang.

Sapriya dan Winataputra. (2004). Pendidikan Kewarganegaraan: Model Pengembangn Materi dan Pembelajaran, Bandung: Laboratorium PKn FPIPS UPI

Siswanto, T. (2013) *Optimalisasi sosial media sebagai media pemasaran usaha kecil menengah*. Jurnal Liquidity Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2013, hlm. 80-86. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka

Sudrajat, E. (2011). *"Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Habituasi terhadap Kesadaran Lingkungan Siswa SMP".* Tesis, SPs UPI: Tidak Diterbitkan.

Watie, EDS. (2011) *Komunikasi dan Media Sosial*. The Messenger, Volume III, No 1, Edisi Juli 2011. Semarang: Universitas Semarang

Winataputra, dan Budimansyah, (2007). *Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar, dan Kultur Kelas*. Prodi PKn SPs UPI.

Laboratorium Program Studi PPKn FKIP
Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami No 36 A, Kentingan, Surakarta
Telp/fax/email : (0271) 669124/ labppkn@fkip.uns.ac.id
www.ppkn.fkip.uns.ac.id

ISBN 978-602-51150-0-4